2023 Annual Report
Laporan Tahunan

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

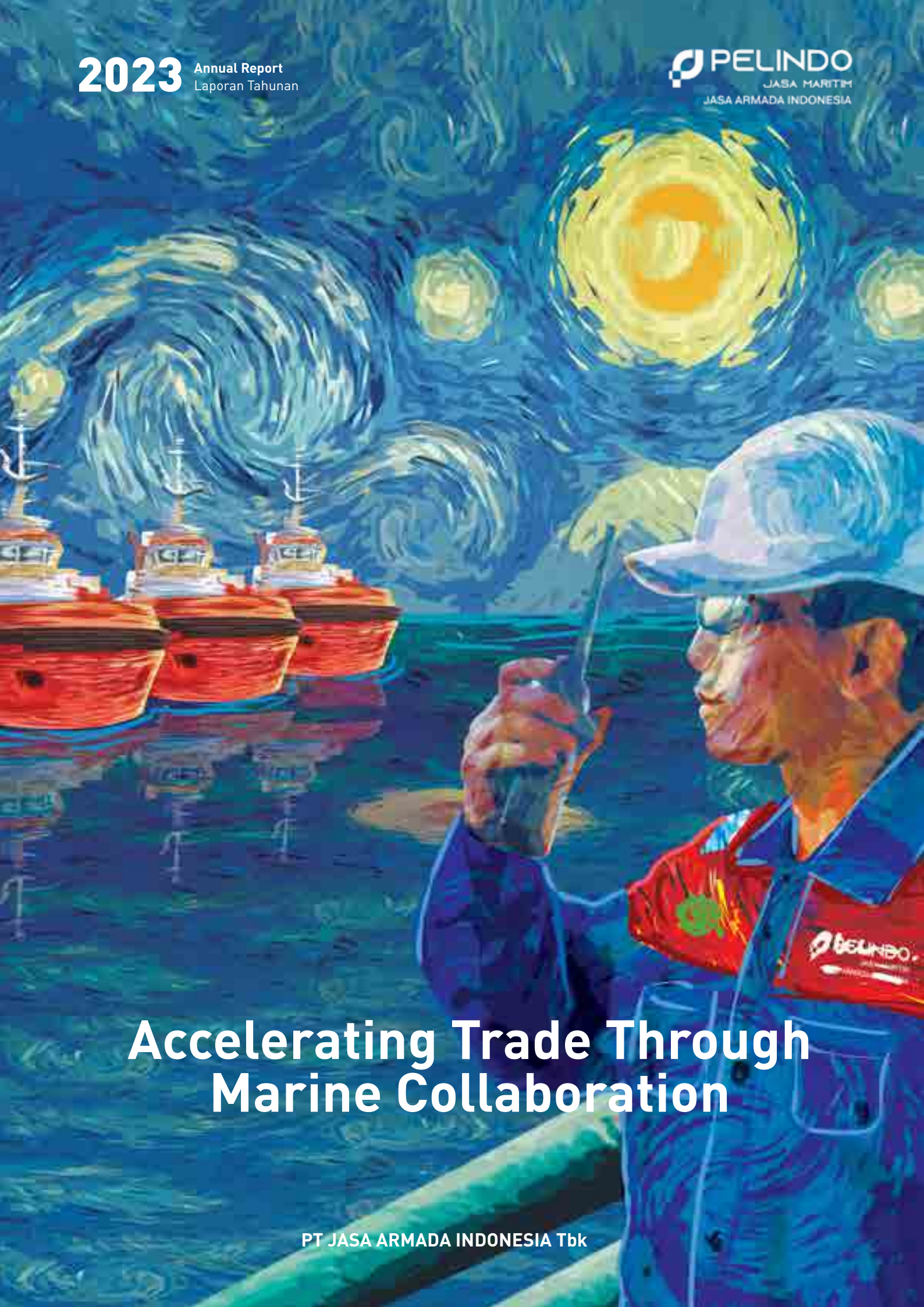

Accelerating Trade Through Marine Collaboration

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk dengan tema **"Accelerating Trade Through Marine Collaboration"**. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk serta masa depan keberlanjutan bisnis PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk.

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk.

Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk yaitu https://ipcmarine.co.id/.

Welcome to the Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk with the theme **"Accelerating Trade Through Marine Collaboration."** This theme was chosen based on in-depth analysis and study of the facts and business developments of PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk, as well as the future prospects for its business sustainability.

This annual report contains statements regarding the financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk, which are classified as forward-looking statements under applicable laws, except for historical matters. These statements involve prospective risks and uncertainties, which may cause actual developments to differ materially from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding the current and future conditions of PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk, as well as the business environment in which the Company operates. The statements contained in this Annual Report do not guarantee future performance, as actual results in the future may differ due to factors beyond the control of PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk.

The Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk is presented in two languages, Indonesian and English, using a font type and size that are easy to read and printed with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded from the official website of PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tbk on https://ipcmarine.co.id/.



Accelerating Trade Through Marine Collaboration

Pada tahun 2023, PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengedepankan strategi bisnisnya pada kolaborasi di tengah persaingan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang semakin ketat saat ini. Selain itu, sebagai bagian dari ekosistem pelabuhan (Pelindo), IPCM juga memiliki peran dalam accelerating trade dengan dengan memfokuskan diri pada peningkatan nilai dari perluasan usaha yang dijalankan. Strategi ini diyakini akan semakin memantapkan posisi perseroan dalam merealisasikan visinya "menjadi penyedia jasa marine terdepan dalam ekosistem maritim indonesia serta global."

Tema **"Accelerating Trade Through Marine Collaboration"** menjadi refleksi dari ipcm yang terus memfokuskan diri pada kolaborasi dengan berbagai perusahaan lain yang memiliki izin sebagai badan usaha pelabuhan untuk memperlancar arus keluar masuk perdagangan yang dapat memberikan nilai tambah serta ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah proaktif ini, semakin mengokohkan kehadiran dan peran IPCM bagi kemajuan bangsa dan negara indonesia tercinta.

In 2023, PT Jasa Armada Indonesia Tbk prioritizes its business strategy on collaboration amid the increasingly fierce competition of Port Business Entities (BUP) today. In addition, as part of the port ecosystem (Pelindo), IPCM also has a role in accelerating trade by focusing on increasing the value of the business expansion carried out. This strategy is believed to further strengthen the company's position in realizing its vision "to become the leading marine service provider in the indonesian and global maritime ecosystem."

The theme **"Accelerating Trade Through Marine Collaboration"** is a reflection of ipcm's continued focus on collaboration with various other companies licensed as port business entities to facilitate the flow of trade that can provide added value and a sustainable business ecosystem. With these proactive steps, it further strengthens the presence and role of IPCM for the progress of our beloved nation and country of indonesia.



KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUATION

2022 — Resilience and Optimistic in Facing Future Challenges



Tema laporan tahunan ini adalah Tangguh dan Optimis Dalam Menghadapi Tantangan di Masa Depan, yang menggambarkan optimisme dan perjuangan Perseroan dalam melewati masa-masa krisis sepanjang tahun 2022.

Tahun 2022 menjadi tahun kebangkitan bagi semua elemen masyarakat termasuk para pelaku usaha, tidak terkecuali bagi PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Bagi IPCM, tahun-tahun yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran bagi pengelolaan perusahaan untuk bertahan dan merumuskan strategi yang tepat keluar dari krisis. Keberhasilan IPCM melewati masa-masa krisis tergambar dari pencapaian kinerja positif yang menggembirakan dan memiliki tren meningkat.

Keberhasilan tersebut berkat kerjasama yang baik seluruh jajaran manajemen dan pekerja IPCM dan didukung oleh kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap layanan bisnis yang dilakukan oleh IPCM. IPCM berkomitmen terus melangkah cepat menuju masa depan dengan melakukan berbagai rumusan strategis, inovasi pengembangan layanan yang kompetitif dan unggul, serta transformasi dan penguatan implementasi Good Corporate Governance. Hal ini bertujuan untuk semakin mengokohkan kehadiran dan peran IPCM bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

The theme of this annual report is Resilience and Optimistic in Facing Future Challenges, which describes the optimism and struggles of the Company in getting through times of crisis throughout 2022.

The year 2022 is a year of revival for all elements of society including business people, with no exception for PT Jasa Armada Indonesia Tbk. For IPCM, the challenging years due to the COVID-19 pandemic provided valuable lessons for the management of the Company to survive and formulate the best strategy to get out of the crisis. The success of IPCM through times of crisis is reflected in the achievement of positive performance that is encouraging and has an increasing trend.

This success is due to the good cooperation of all levels of management and employees of IPCM and is supported by the trust of stakeholders in the business services carried out by IPCM. IPCM is committed to continuing to move forward towards the future by carrying out various strategic formulations and innovations in developing competitive and superior services, as well as transforming and strengthening the implementation of good corporate governance. This aims to further strengthen the presence and role of IPCM for the progress of our beloved nation and country of Indonesia.

2021 — Delivering Excellence For Environment, Social, and Governance



Di tengah pemulihan ekonomi, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) berhasil menjaga pertumbuhan kinerja secara sehat, kuat dan berkelanjutan. Keberhasilan Perseroan mencatatkan kinerja yang sangat baik ini adalah hasil dari strategi transformasi yang telah disiapkan sejak pandemi Covid-19 melanda dan juga sebagai bukti bahwa fundamental bisnis Perseroan sangat stabil.

Seperti halnya pada tahun 2020, di tahun 2021 ini seluruh pelaku usaha masih dilanda ketidakpastian akibat dari pandemi Covid-19. Dengan berbagai strategi yang dijalankan manajemen, Perseroan tetap mampu bertumbuh dan bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya.

In the midst of economic recovery, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) managed to maintain healthy, strong, and sustainable performance growth. The Company's success in recording this excellent performance is the result of the transformation strategy that has been prepared since the Covid-19 pandemic hit and also as proof that the Company's business fundamentals are very stable.

As in 2020, in 2021, all business players were hit by uncertainty from Covid-19 pandemic. With various strategies implemented by the management, the Company was able to grow and be even better than the previous year.

Strategi dan adaptasi yang dijalankan Perseroan dalam hal efektifitas dan efisiensi kinerja yang kesemuanya didorong dengan seluruh daya, upaya dan inovasi bersama, berhasil menjaga dan bahkan meningkatkan hasil usaha Perseroan.

Hal ini merupakan langkah strategis yang penuh kehati-hatian sekaligus visi perusahaan yang diuji dan dikembangkan sejalan dengan perubahan perilaku pasar. Kemauan dan kemampuan untuk berubah di tengah masa yang penuh perubahan ini membuat Perseroan melaju dengan gesit, bertransformasi menjadi perusahaan yang unggul dan berkelanjutan.

The strategies and adaptations implemented by the Company in terms of performance effectiveness and efficiency, all of which are driven by all the power, effort, and innovation together, have succeeded in maintaining and even improving the Company's business results.

This is a prudent strategic move as well as a corporate vision that is tested and developed in line with changing market behavior. The willingness and ability to change in the midst of these changing times have allowed the Company to move swiftly, transforming into a superior and sustainable company.

2020 New Horizon, New Opportunities



Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh pelaku usaha secara global. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sangat berdampak kepada kelangsungan seluruh sendi-sendi ekonomi di dunia. Hal ini menyebabkan seluruh pelaku usaha dituntut untuk menyesuaikan strategi bisnis terhadap dampak dari pandemi COVID-19.

COVID-19 juga telah memperkenalkan istilah baru yaitu New Normal, dimana seluruh kegiatan yang biasa dilakukan kini harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, termasuk dalam menjalankan bisnis.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan berhasil beradaptasi terhadap Dampak dari COVID-19, manajemen berhasil Menerapkan strategi untuk tetap meningkatkan kinerja.

Kami percaya, dengan seluruh kerja keras dari seluruh insan Perseroan, kami berhasil merespons kondisi ekonomi global dengan melakukan pendekatan market baru dalam rangka perluasan pasar, dengan tetap memberikan layanan terbaik untuk market yang telah dimiliki dan hasilnya kami berhasil mengerjakan beberapa pipeline baru di akhir tahun 2020.

The year 2020 was a challenging year for all business players globally. As we know, the COVID-19 pandemic has greatly affected the continuity of all economic sectors in the world. This causes all business players to be required to adjust business strategies to the impact of the COVID-19 pandemic.

COVID-19 has also introduced a new term, New Normal, where all activities that are usually carried out must now be adjusted to health protocols, including running a business.

Throughout 2020, the Company successfully adapted to the impact of COVID-19, and management implemented strategies to continue to improve performance.

We believe, with all the hard work of all the members of the Company, we managed to respond to the global economic conditions by approaching new markets to expand the market, while still providing the best service for the existing market which has, resulted in us successfully working on several new pipelines at the end of 2020.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

2 **Sanggahan Dan Batasan Tanggung Jawab**
Disclaimer

3 **Penjelasan Tema**
Theme Explanation

4 **Kesinambungan Tema**
Theme Continuation

6 **Daftar Isi**
Table of Content

8 **Sekilas Tentang JAI**
JAI at a Glance

9 **Produk Atau Jasa Utama Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Jai**
Main Product Or Service And The Contribution Towards Jai's Revenues

10 **Pencapaian Terbaik JAI**
JAI'S Best Achievement

Kilas Kinerja 2023
2023 Performance

14 **Ikhtisar Data Keuangan Penting**
Important Financial Highlights

17 **Informasi Saham**
Share Information

19 **Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi Yang Masih Beredar**
Information On Outstanding Bonds, Sharia Bonds (Sukuk), Or Conversion Bond

19 **Informasi Sumber Pendanaan Lainnya**
Information On Other Source Of Fundings

20 **Peristiwa Penting**
Significant Events

Laporan Manajemen
Management Report

28 **Laporan Dewan Komisaris**
Board Of Commissioners' Report

34 **Laporan Direksi**
Board of Directors Report

40 **Surat Pernyataan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023 Pt Jasa Armada Indonesia Tbk**
Responsibility Statement From The Board Of Commissioners And Board Of Directors On The Accountability Of The Annual Report 2023

41 **Surat Pernyataan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023 Pt Jasa Armada Indonesia Tbk**
Responsibility Statement From The Board Of Commissioners And Board Of Directors On The Accountability Of The Annual Report 2023

Profil Perusahaan
Company Profile

44 **Identitas Dan Informasi Umum Perusahaan**
Corporate Identity And General Information

47 **Riwayat Singkat Perusahaan**
Brief Company History

52 **Jejak Langkah**
Milestone

54 **Bidang Usaha**
Line Of Business

58 **Jaringan Bisnis Dan Wilayah Operasi**
Business Network And Operational Area

60 **Visi, Misi, Dan Budaya Perusahaan**
Vision, Mission, And Corporate Values

65 **Makna Logo Perusahaan**
The Meaning Of The Company's Logo

67 **Keanggotaan Dalam Asosiasi**
Membership In Association

68 **Struktur Organisasi**
Organizational Structure

70 **Profil Dewan Komisaris**
Profile Of The Board Of Commissioners

75 **Profil Direksi**
Profile Of The Board Of Directors

80 **Profil Pejabat Eksekutif**
Profile Of Executive Officers

88 **Demografi Pekerja**
Employee Demography

91 **Komposisi Pemegang Saham**
Shareholders Composition

94 **Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan Oleh Dewan Komisaris Dan Direksi**
Company Share Ownership By The Board Of Commissioners And Directors

98 **Transaksi Saham Oleh Senior Management**
Share Transaction By Senior Management

98 **Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan**
Information Regarding Major/Controlling Shareholders

98 **Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Dan Ventura Bersama**
Subsidiaries, Associates, Joint Venture

99 **Kerjasama Dengan Pihak Terafiliasi Dan Pihak Ketiga**
Cooperation With Affiliations And Third Parties

99 **Struktur Grup**
Group Structure

100 **Kronologi Penerbitan Dan/Atau Pencatatan Saham**
Chronology Of Share Issuance And/Or Listing

101 **Kronologi Penerbitan Dan/Atau Pencatatan Efek Lainnya**
Chronology Of Other Securities Issuance And/Or Listing

101 **Lembaga Dan/Atau Profesi Penunjang**
Supporting Professionals And/Or Institutions

104 **Penghargaan Dan Sertifikasi**
Awards And Certification

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

110 **Tinjauan Perekonomian Dan Industri**
Economic And Industrial Review

114 **Tinjauan Operasional**
Operational Review

116 **Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha**
Performance Review By Business Segment

127 **Tinjauan Kinerja Keuangan**
Financial Performance Review

Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function

162 **Tata Kelola Sumber Daya Manusia**
Human Resources Governance

174 **Tata Kelola Teknologi Informasi**
Information Technology Governance

181 **Sistem Manajemen Mutu**
Quality Management System

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

186 **Kebijakan Tata Kelola Perusahaan**
Corporate Governance Policy

192 **Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Lingkup Perusahaan**
Development Of The Implementation Of Good Corporate Governance Within The Company

204 **Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**
Good Corporate Governance Structure

241 **Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris Dan Direksi**
Transparency Regarding Board Of Commissioners And Directors

261 **Organ Pendukung Dewan Komisaris**
Board Of Commissioners Supporting Organ

276 **Organ Pendukung Direksi**
Supporting Organs Of The Board Of Directors

285 **Auditor Eksternal**
External Auditor

288 **Sistem Pengendalian Internal**
Internal Control System

290 **Manajemen Risiko**
Risk Management

297 **Perkara Hukum**
Legal Issues

297 **Sanksi Administrasi**
Administrative Sanctions

298 **Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen Dan/Atau Pekerja (Esop/Msop)**
Stock Ownership Program By Management And/Or Employees (Esop/Msop)

299 **Kebijakan Pengungkapan Informasi**
Information Disclosure Policy

299 **Kebijakan Perseroan Mengenai Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kreditur**
Company Policy Regarding Protection Of Creditors' Rights

300 **Informasi Pemangku Kepentingan Dan Alamat Penyampaian Keluhan**
Stakeholders Information And Complaint Submission

301 **Akses Informasi Dan Data Perusahaan**
Information Access And Company Data

303 **Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham Atau Investor**
Communication Policy With Shareholders Or Investors

304 **Kode Etik**
Code Of Conduct

310 **Kebijakan Anti Korupsi Dan Gratifikasi**
Anti-Corruption And Anti-Gratification Policies

315 **Kebijakan Pencegahan *Insider Trading***
Insider Trading Prevention Policy

316 **Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa**
Goods And Services Procurement Policy

318 **Sistem Pelaporan Pelanggaran**
Violation Reporting System

321 **Transparansi Praktik *Bad Governance***
Transparency Of Bad Governance Practices

322 **Penerapan Atas Pedoman Governansi Perusahaan**
Implementation Of Corporate Governance Guidelines

Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan
Social and Environmental Responsibilities

362 **Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan**
Social And Environmental Responsibility Governance

Laporan Keuangan
Financial Report

SEKILAS TENTANG JAI
JAI AT A GLANCE

PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS

- PT Pelindo Jasa Maritim 76,98%
- PT Multi Terminal Indonesia 0,11%
- Masyarakat | Public 23.00%

BIDANG USAHA
FIELD OF BUSINESS

Penyelenggaraan dan pengusahaan pelayanan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
Organization and exploitation of ship services, passengers, goods, and service activities related to port.

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

- Jasa Pelayanan Kapal
- Jasa Pengelolaan Kapal
- Jasa Pengangkutan dan Lainnya
- Vessel Services
- Vessel Management Services
- Transportation and Other Services

WILAYAH OPERASI
OPERATIONAL AREA

Jakarta, Banten, Bayah, Pontianak, Bengkulu, Panjang, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Palembang, Tanjung Pandan, Jambi, Cirebon, Patimban.



PRODUK ATAU JASA UTAMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN JAI

MAIN PRODUCT OR SERVICE AND THE CONTRIBUTION TOWARDS JAI'S REVENUES

Jasa Pelayanan Kapal
Vessel Services

Merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar Pelabuhan

Vessel Services are services for vessel operational activities from entering to leaving the Port

Jasa Pengelolaan Kapal
Vessel Management Services

Merupakan kegiatan usaha Perusahaan bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal motor Pandu yang digunakan untuk mobilisasi petugas pandu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemanduan kapal di seluruh wilayah perairan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2.

Vessel Management Service is the Company's business activity in collaboration with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in the management and maintenance of the pilotage boat used for the mobilization of pilotage officers in carrying out vessel pilotage service tasks throughout the water area of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2.

Jasa Pengangkutan dan Lainnya
Transportation and Other Services

Merupakan kegiatan usaha Perusahaan dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil produksi antar wilayah Pelabuhan dan merupakan menjadi salah satu segmen Produk atau Jasa Utama Perusahaan.

Freight Service is the Company's business activity in the field of transportation of materials or goods and products between port areas and is one of the Company's main product or service segments.



PENCAPAIAN TERBAIK JAI
JAI'S BEST ACHIEVEMENT

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Pendapatan
Revenue

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2023 tercatat sebesar:
Revenues in 2023 amounted to:

Rp1.138,54
Miliar | Billion

Jumlah Aset
Total Assets

Per 31 Desember 2023, jumlah aset tercatat sebesar:
The Company's assets as of December 31, 2023, amounted to:

Rp1.522,13
Miliar | Billion

Total Ekuitas
Total Equity

Total Ekuitas di tahun 2023 tercatat sebesar:
Total Equity in 2023 amounted to:

Rp1.240,52
Miliar | Billion

Total Laba
Total Income

Di tahun 2023, Total Laba berhasil dibukukan sebesar:
In 2023, the Company achieved Total Income of:

Rp157,66
Miliar | Billion



Kinerja Per Segmen Usaha
Business Performance by Segment

Jasa Pelayanan Kapal
Vessel Services

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2023 tercatat sebesar:
Revenues in 2023 amounted to:

Rp1,06
Triliun | Trillion

Jasa Pengelolaan Kapal
Vessel Management Services

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2023 tercatat sebesar:
Revenues in 2023 amounted to:

Rp31,50
Miliar | Billion

Jasa Pengangkutan dan Lainnya
Transportation and Other Services

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2023 tercatat sebesar:
Revenues in 2023 amounted to:

Rp46,28
Miliar | Billion

Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard
ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment

Assessment GCG GCG Assessment	Skor 98,18 Score 98.18	Kategori "SANGAT BAIK" Category "VERY GOOD"



PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Kilas Kinerja 2023

2023 Performance



Di tahun 2023, PT Jasa Armada Indonesia Tbk berhasil membukukan total Aset sebesar Rp1.522.134 juta, mengalami kenaikan sebesar 2,28% dibandingkan total Aset tahun sebelumnya.

In 2023, PT Jasa Armada Indonesia Tbk managed to book total assets of Rp1,522,134 million, an increase of 2.28% compared to the total assets of the previous year.



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IMPORTANT FINANCIAL HIGHLIGHTS

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022*	2021	2020	2019
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit or Loss and Other Comprehensive Income					
Pendapatan – Neto Revenue – Net	1.138.537	980.168	820.161	696.561	681.677
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(798.761)	(677.621)	(572.345)	(470.487)	(476.970)
Laba Bruto Gross Profit	339.775	302.546	247.816	226.074	204.707
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Neto Other Income (Expenses) – Net	(156.016)	(128.532)	(88.818)	(136.904)	(96.236)
Laba Usaha Operating Income	183.758	174.014	158.997	89.170	108.471
Pendapatan Keuangan Financial Income	14.958	14.141	14.977	27.137	23.911
Beban Keuangan Financial Expenses	(2.773)	(2.117)	(3.008)	(4.618)	(155)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Income Tax	195.943	186.038	170.966	111.689	132.227
Beban Pajak Penghasilan Corporate Income Tax Expense	(38.281)	(35.384)	(34.383)	(31.455)	(42.179)
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	157.661	150.654	136.583	80.234	90.047
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Attributable to Owner of the Company	157.661	150.654	136.583	80.234	90.047
Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali Attributable to Non-controlling Interests	-	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	157.661	150.654	136.583	80.234	90.047
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Attributable to Owner of the Company	157.661	150.654	136.583	80.234	90.047
Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali Attributable to Non-controlling Interests	-	-	-	-	-
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Basic Earnings per Share (full amount)	29,88	28,55	25,88	15,19	17,04
Posisi Keuangan Financial Position					
Total Aset Total Assets	1.522.134	1.488.208	1.427.875	1.408.290	1.279.305
Total Liabilitas Total Liabilities	281.614	291.688	271.462	316.643	199.892
Total Ekuitas Total Equity	1.240.519	1.196.519	1.156.413	1.091.647	1.079.412

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022*	2021	2020	2019
Arus Kas Cash Flow					
Arus kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	(16.058)	126.682	303.448	225.575	247.607
Arus kas untuk Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	14.522	(3.425)	(106.541)	(1.784)	(76.725)
Arus kas untuk Aktivitas Pendanaan Cash Flows for Financing Activities	(132.145)	(206.967)	(117.474)	(113.752)	(39.601)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash Equivalents	(162.726)	(83.910)	79.433	110.040	131.282
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	571.726	665.637	576.204	466.164	334.883
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	409.000	571.727	655.637	576.204	466.164
Rasio Keuangan Financial Ratios					
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios					
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	149	196	245	196	233
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	324	315	319	281	381
Rasio Solvabilitas Solvency Ratios					
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%) Debt to Assets Ratio (DAR) (%)	19	20	19	22	16
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	23	24	23	29	18
Rasio Kolektabilitas Piutang Receivables Collectability					
Rasio Perputaran Piutang (kali) Receivable Turnover (times)	29	8	9	3,93	3,98
Rasio Perputaran Piutang Harian (hari) Average Collection Period (days)	11	46	38	70	61
Rasio Keuangan Lainnya Other Financial Ratios					
Marjin Laba (%) Profit Margin (%)	13,85	15,37	16,65	11,52	13,21
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (ROE (%))	12,71	12,59	11,81	7,35	8,34
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Aset (%) Return on Assets (ROA) (%)	10,36	10,12	9,57	5,70	7,04

*Disajikan kembali karena reklasifikasi akun tertentu
*Disajikan kembali karena reklasifikasi akun tertentu

GRAFIK IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

FINANCIAL HIGHLIGHTS CHART

Pendapatan - Neto
Revenue – Net

(Dalam juta rupiah)
(In million rupiah)

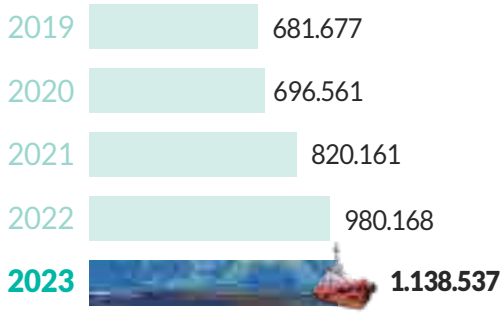

Laba Usaha
Operating Income

(Dalam juta rupiah)
(In million rupiah)

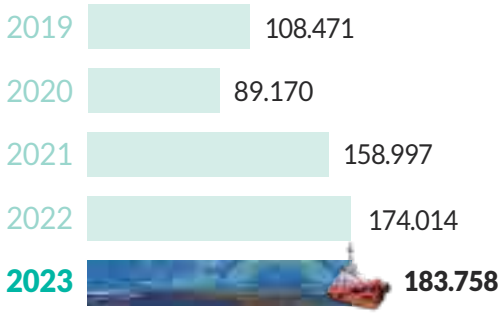

Laba Tahun Berjalan
Income for The Year

(Dalam juta rupiah)
(In million rupiah)

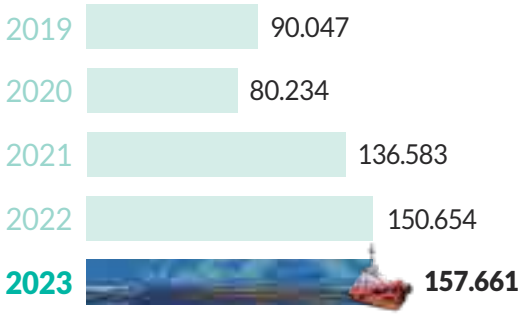

Total Aset
Total Assets

(Dalam juta rupiah)
(In million rupiah)

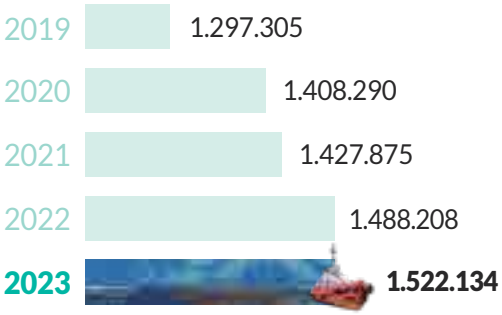

Total Liabilitas
Total Liabilities

(Dalam juta rupiah)
(In million rupiah)

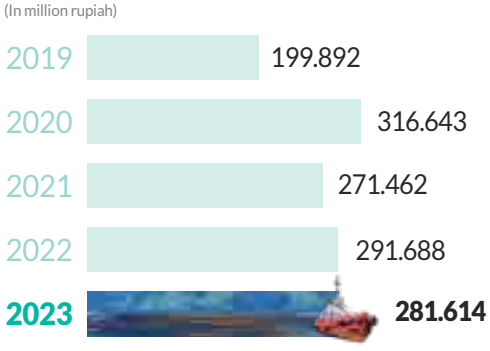

Total Ekuitas
Total Equity

(Dalam juta rupiah)
(In million rupiah)

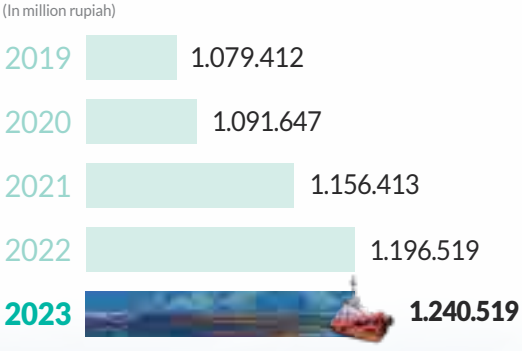

INFORMASI SAHAM
SHARE INFORMATION

Kode saham: IPCM
Bursa Perdagangan Saham: Bursa Efek Indonesia (BEI)
Ticker code: IPCM
Share Trading: Indonesia Stock Exchange (IDX)

Periode Period	Harga per Saham Price per Share				Jumlah Saham Beredar (lembar) Number of Outstanding Shares (shares)	Volume Transaksi (lembar) Transaction Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp triliun) Capitalization (Rp trilion)
	Pembukaan Opening	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
2023							
Triwulan I Quarter I	268	280	250	250	5.284.811.100	57.885.800	1.426.898.997.000
Triwulan II Quarter II	272	306	256	256	5.284.811.100	72.160.900	1.553.734.463.400
Triwulan III Quarter III	296	302	278	278	5.284.811.100	95.163.200	1.511.455.974.600
Triwulan IV Quarter IV	286	292	270	270	5.284.811.100	71.510.700	1.497.747.108.000
2022							
Triwulan I Quarter I	296	320	262	316	5.284.811.100	187.216.800	1.670.000.307.600
Triwulan II Quarter II	276	322	266	310	5.284.811.100	196.987.200	1.638.291.441.000
Triwulan III Quarter III	310	314	268	274	5.284.811.100	105.502.300	1.448.038.241.400
Triwulan IV Quarter IV	276	304	252	274	5.284.811.100	99.886.500	1.448.038.241.400

Grafik Pergerakan Harga Saham Tahun 2022-2023
Share Movement 2022-2023

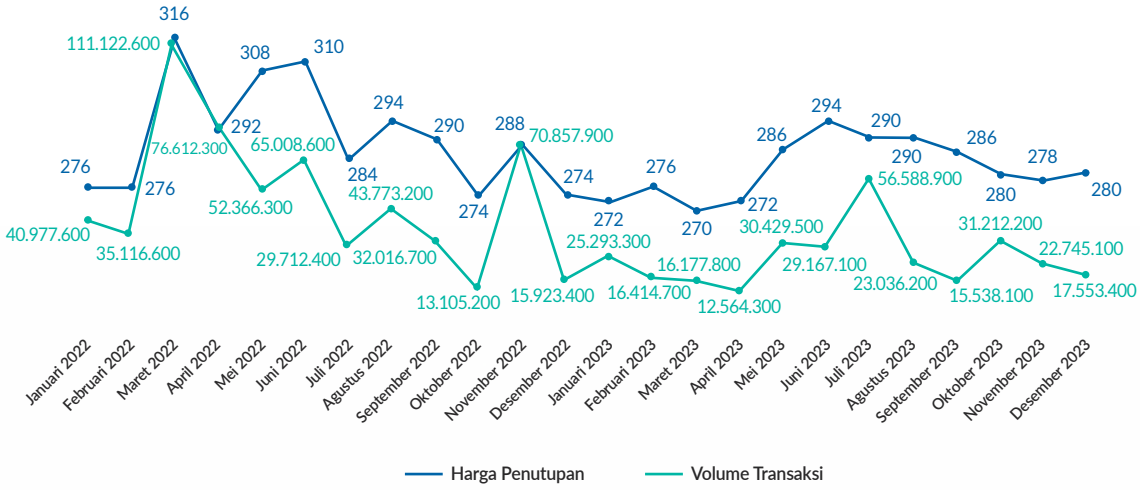

AKSI KORPORASI

Selama tahun 2023, Perusahaan tidak melaksanakan aksi korporasi apa pun. Oleh karena itu, tidak ada informasi yang dapat disajikan terkait pelaksanaan aksi korporasi, rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), pembagian dividen saham, saham bonus, penurunan nilai nominal saham, jumlah saham yang beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi, serta perubahan harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Selama tahun buku 2023, perdagangan saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia tidak pernah mengalami penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau dalam hal pembatalan pencatatan saham (*delisting*) Perusahaan, tidak pernah dilakukan dan perdagangan saham Perusahaan masih berlangsung hingga akhir periode tersebut.

CORPORATE ACTION

During 2023, the Company did not undertake any corporate actions. Consequently, no information can be provided regarding the implementation of corporate actions, stock split ratios, reverse stock splits, distribution of stock dividends, bonus shares, decrease in nominal value of shares, or changes in the number of outstanding shares before and after such corporate actions, as well as details about changes in share price before and after corporate actions.

SUSPENSION AND/OR DELISTING OF SHARES

During the 2023 financial year, trading of the Company's shares on the Indonesian Stock Exchange has never been temporarily suspended or delisted, and the trading is still ongoing until the end of that period.

INFORMASI MENGENAI OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI YANG MASIH BEREDAR

INFORMATION ON OUTSTANDING BONDS, SHARIA BONDS (SUKUK), OR CONVERSION BOND

Sampai dengan akhir tahun 2023, Perusahaan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, dan/atau obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

By the end of 2023, the Company has never issued any bonds, sukuk, and/or convertible bonds, hence no information can be disclosed regarding the number of bonds/sukuk/convertible bonds in circulation, interest rates, maturity dates, and ratings.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ON OTHER SOURCE OF FUNDINGS

Sampai dengan tahun buku 2023, Perusahaan belum mencatatkan sumber pendanaan lainnya.

By the end of 2023 financial year, the Company has not recorded other sources of fundings.

PERISTIWA PENTING
SIGNIFICANT EVENTS

JAN

18 Januari 2023



Jakarta, Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan di Terminal Khusus PT Jawa Satu Power.
Jakarta, Determination of Service Tariffs for Pilotage and Towage Services at the Special Terminal of PT Jawa Satu Power.



18 Januari 2023



Semarang, peluncuran 3 kapal pandu baru.
Semarang, launching of 3 new pilotage boats.

1 Februari 2023



Jakarta, Penandatanganan Perjanjian tambah dengan PT Jawa Satu Tower.
Jakarta, Signed an add-on agreement with PT Jawa Satu Tower.

1 Februari 2023



Jakarta, Pembaruan (Renewal) Izin Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal di Wilayah Wajib Pandu Terminal Khusus Cemindo Gemilang di Bayah, Banten dan Ship to Ship Muara Sungai Musi, Palembang.
Jakarta, Renewal of Permit for Use of Facilities Auxiliary and Ship Guiding Infrastructure in the Mandatory Guiding Area of Cemindo Gemilang Special Terminal in Bayah, Banten and Ship to Ship Muara Musi River, Palembang.

13 Februari 2023



Jakarta, Penandatanganan Kerjasama Penyediaan sarana bantu & prasarana pemanduan di perairan TUKS PT Cirebon Electric Power dan Tersus PT Cirebon Energi Prasarana.
Jakarta, Signing of Cooperation for the Provision of guiding facilities & infrastructure in the area of TUKS PT Cirebon Electric Power and Tersus PT Cirebon Energi Infrastructure.

FEB

15 Februari 2023



Jakarta, Penandatanganan Perpanjangan Kerjasama dengan PT Krakatau Bandar Samudera, bersama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten di area Terminal Cigading.
Jakarta, Signing of Cooperation Extension with PT. Krakatau Bandar Samudera, together with PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten in the Cigading Terminal area.

FEB

16 - 18 Februari 2023



Jakarta, Penandatanganan Komitmen bersama Peningkatan Layanan, Sinergi & Kolaborasi SPJM Group pada Rapat Kerja SPJM.
Jakarta, Signing of Commitment with Service Improvement, Synergy & Collaboration of SPJM Group at the SPJM Work Meeting.

18 Januari 2023



Surabaya, Peluncuran Kapal Tunda Abimanyu V di Galangan PT Dumas Tanjung Perak Shipyards, Surabaya.
Surabaya, Launching of Abimanyu V Tugboat at PT Dumas Tanjung Perak Shipyards, Surabaya.



27 - 28 Februari 2023



RAKERNAS PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

APR

4 April 2023



IPCM Anaylst Meeting (FY 2022 Result).

17 April 2023



Dukungan JAI Dalam program Mudik Bersama Pelindo Group 2023.
JAI Supports on Mudik Bersama 2023 Program by Pelindo Group

24 Mei 2023



Bali, Emiten Forum "Mengarungi Samudera Investasi".
Bali, Emiten Forum "Mengarungi Samudera Investasi"

26 Mei 2023



Bali, IPCM Media Gathering 2023.

29 Mei 2023



Penandatanganan Kontrak Sewa Kapal untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power antara KSO PT PLN Gas & Geothermal & PT Adhi Guna Putera dengan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Signing of Ship Charter Contract for One Power Java Operational Area between KSO PT PLN Gas & Geothermal & PT Adhi Guna Putera with PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Courtesy Call Bursa Efek Indonesia.

30 Mei 2023



MEI

JUN

21 Juni 2023



Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Museum Maritim Indonesia, Jakarta.
The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held at the Indonesian Maritime Museum, Jakarta.

1 Juli 2023



Pelaksanaan Kegiatan Pelindo Berbagi Kurban 1444H/2023.
Implementation of Pelindo Berbagi Kurban 1444H/2023.

(Hari Mangrove Sedunia) Penanaman 1.000 Pohon Mangrove di Kawasan Ecomarine Mangrove, Muara Angke, Jakarta Utara.
(World Mangrove Day) Planting 1,000 Mangrove Trees in the Ecomarine Mangrove Area, Muara Angke, North Jakarta.

26 Juli 2023



Partisipasi pada rapat kerja *SubHolding* Pelindo Jasa Maritim.
Participation in Pelindo Jasa Maritim SubHolding Meeting.

30 - 31 Juli 2023



JUL

AGS

1 Agustus 2023



Implementasi E-Procurement dalam proses pengadaan barang & jasa..
Implementation of E-Procurement in the process of goods & services.

7 Agustus 2023



Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tarif dan Sistem Pelayanan Pemanduan & Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang Tbk, Bayah – Banten.
Signing of Joint Agreement on Tariff and Service System for Vessel Pilotage & Towage at PT Cemindo Gemilang Tbk Special Terminal, Bayah - Banten.

15 Agustus 2023



Penghargaan TJSL Kategori Elemen Lingkungan dalam Ajang Bisnis Indonesia *Corporate Social Responsibility Awards.*
TJSL Award for Environmental Element Category in the Business Indonesia Corporate Social Responsibility Awards.

10 Agustus 2023



TJSL & CSR AWARD 2023 - Pilar Sosial dan Lingkungan 4 Star - BUMN TRACK.
TJSL & CSR AWARD 2023 - Social and Environmental Pillar 4 Star - BUMN TRACK.

26 Agustus 2023

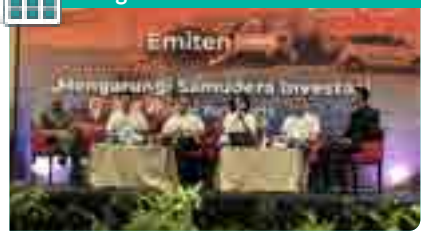

Yogyakarta, Emiten Forum "Mengarungi Samudera Investasi" 2023 Chapter Yogyakarta.
Inauguration of PT Jasa Armada Indonesia Tbk's new office at Pelindo Tower.

23 Agustus 2023



Peresmian kantor baru PT Jasa Armada Indonesia Tbk di Pelindo Tower.
Inauguration of PT Jasa Armada Indonesia Tbk's new office at Pelindo Tower.

29 Agustus 2023



Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara..
Cooperation Agreement with the District Attorney's Office North Jakarta.

31 Agustus 2023



Penghargaan dalam Ajang Indonesia CSR Awards - VI 2023 Economic Review.
Awarded at the Indonesia CSR Awards - VI 2023 Economic Review.

SEP

Makassar, Emiten Forum "Membedah Potensi Sektor Jasa Transportasi Kapal" *Chapter* Makassar.

5 September 2023



14 - 16 September 2023



Partisipasi Customer Hearing Tahun 2023 di Lingkungan Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM).
Customer Hearing Participation in 2023 in Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Subholding Environment.

18 September 2023



Malang, Emiten Forum "Mengarungi Samudera Investasi" *Chapter* Malang.
Malang, Emiten Forum "Mengarungi Samudera Investasi" Chapter Malang.

Pelindo Mengajar - PT JAI Tbk SMA Negeri 1 Batu, Jawa Timur.
Pelindo Mengajar - PT JAI Tbk SMA Negeri 1 Batu, East Java.

19 September 2023



27 September 2023



Penghargaan Pada Ajang Indonesia Best BUMN Awards 2023.
Award at the Indonesia Best BUMN Awards 2023.

13 Oktober 2023



Penandatanganan Perpanjangan Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan dengan PT Pelabuhan Bukit Prima.
Signing of Cooperation Extension Provision of Pilotage Facilities with PT Pelabuhan Bukit Prima.

Program Pengembangan Produk Tenun dan Anyaman.
Weaving and Wicker Product Development Program.

18 Oktober 2023



OKT

NOV

9 November 2023



Penandatanganan Kesepakatan Tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas.
Signing of Agreement on Adjustment of Vessel Pilotage and Towage Service Tariff at PT Nusantara Regas SpecialTerminal.

16 November 2023



Penghargaan SNI Awards Tahun 2023.
SNI Awards 2023

17 November 2023



Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII).
Signing of Memorandum of Understanding (MOU) with PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII).

21 November 2023



Penyerahan SK Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan di TUKS PT Cirebon Electric Power dan Terminal Khusus PT Cirebon Energi Prasarana (Kanci - Cirebon).
Submission of Decree on Tariff Determination for Pilotage and Towage Services at TUKS PT Cirebon Electric Power and Special Terminal PT Cirebon Energi Infrastructure (Kanci - Cirebon).

23 November 2023



Penghargaan Special Categories The Best Maritime Sustainability versi CSA Awards 2023 di Menara 165, Jakarta.
Special Categories The Best Maritime Sustainability version of CSA Awards 2023 at Menara 165, Jakarta.

30 November 2023



Jakarta, Penyelenggaraan Paparan Publik Tahunan 2023 dari monitoring room IPCM di Pelindo Tower, Jakarta Utara.
Jakarta, organized the 2023 Annual Public Expose from the IPCM monitoring room at Pelindo Tower, North Jakarta.

DES

6 - 8 Desember 2023



RAKERCAB DPC SPPI Bersatu PT Jasa Armada Indonesia Tbk "Terus Melaju Untuk JAI Maju".
Branch Work Meeting, DPC SPPI United PT Jasa Armada Indonesia Tbk "Keep Going For JAI Forward".

12 Desember 2023



Penghargaan Anugerah IDX Channel CSR Award 2023.
IDX Channel CSR Award 2023.

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Laporan Manajemen

Management Report



Peran penting Manajemen Perseroan dalam menjalankan amanah pengawasan dan pengelolaan Perseroan secara harmonis, loyal, serta adaptif, membuahkan pengembangan bisnis yang optimal serta terarah di tengah kondisi perekonomian global dan nasional yang sedang memasuki masa pemulihan.

The important role of the Company's Management in carrying out the mandate of supervising and managing the Company in a harmonious, loyal, and adaptive manner, resulted in optimal and directed business development amidst global and national economic conditions that are entering a period of recovery.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT



Zuhri Iryansyah

Komisaris Utama
President Commissioner

Keberhasilan Perseroan dalam meraih berbagai capaian positif sepanjang tahun 2023 tidak lepas dari kemampuan dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi.
The Company's success in achieving various positive achievements throughout 2023 cannot be separated from the ability to deal with the obstacles faced.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Honorable Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2023 dengan mencatatkan kinerja yang positif. Bersamaan dengan Laporan Tahunan ini, mohon perkenankan kami atas nama Dewan Komisaris untuk melaporkan pelaksanaan fungsi pengawasan atas seluruh strategi dan kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi dalam pengelolaan Perseroan selama tahun 2023.

We express our gratitude to the presence of Almighty God who has bestowed His mercy and grace, enabling the Company to navigate through 2023 while recording positive performance. Along with this Annual Report, please allow us, on behalf of the Board of Commissioners, to report on the implementation of the supervisory function over all strategies and strategic policies implemented by the Board of Directors in managing the Company during 2023.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Dinamika perekonomian global mengalami beberapa tren yang menonjol termasuk percepatan digitalisasi dan adopsi teknologi, pergeseran ke arah ekonomi berbasis layanan, serta perubahan dalam rantai pasok global akibat peristiwa seperti pandemi COVID-19. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap budaya kerja di seluruh dunia. Selain itu, juga terdapat tensi geopolitik yang berdampak signifikan terhadap perekonomian global seperti contohnya situasi di Ukraina pada saat ini.

Menurut International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan global diperkirakan melambat dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3,0% pada tahun 2023 dan 2,9% pada tahun 2024, jauh di bawah rata-rata historis (2000-19) sebesar 3,8%. Negara-negara maju diperkirakan akan melambat dari 2,6% pada tahun 2022 menjadi 1,5% pada tahun 2023, dan 1,4% pada tahun 2024 karena pengetatan kebijakan. Negara berkembang diproyeksikan akan mengalami penurunan pertumbuhan yang moderat dari 4,1 persen pada tahun 2022 menjadi 4,0 persen pada tahun 2023 dan 2024. Inflasi global diperkirakan akan terus menurun, dari 8,7 persen pada tahun 2022 menjadi 6,9 persen pada tahun 2023 dan 5,8 persen pada tahun 2024, karena kebijakan moneter yang lebih ketat yang dibantu oleh harga komoditas internasional yang lebih rendah. Inflasi inti secara umum diproyeksikan menurun secara bertahap, dan inflasi diperkirakan tidak akan kembali ke target hingga tahun 2025. Tindakan dan kerangka kerja kebijakan moneter merupakan kunci pada saat ini untuk menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terjaga.

Meskipun dihadapi oleh tantangan pada tingkat global, perekonomian Indonesia mencatatkan angka yang solid sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, yakni tercatat sebesar 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2023 dan 5,05% untuk keseluruhan tahun 2023. Beberapa sektor industri seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan berperang penting dalam pertumbuhan tersebut. Sektor manufaktur mencatatkan pertubuhan positif sebesar 4,64% sepanjang tahun 2023. Adapun sektor perdagangan mengalami pertumbuhan sebesar 4,85% sepanjang tahun 2023. Selanjutnya, sektor pertanian mencatatkan angka positif sebesar 1,30% sepanjang

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

The dynamics of the global economy are experiencing several prominent trends, including accelerated digitalization and technology adoption, a shift towards a service-based economy, and changes in global supply chains due to events such as the COVID-19 pandemic. As is known, the COVID-19 pandemic has had a significant impact on work culture throughout the world. Apart from that, there are also geopolitical tensions which have a significant impact on the global economy, such as the current situation in Ukraine.

According to the International Monetary Fund (IMF), global growth is expected to slow from 3.5% in 2022 to 3.0% in 2023 and 2.9% in 2024, well below the historical (2000-19) average of 3.8%. Developed countries are expected to slow from 2.6% in 2022 to 1.5% in 2023, and 1.4% in 2024 due to policy tightening. Developing countries are projected to experience a moderate decline in growth from 4.1 percent in 2022 to 4.0 percent in 2023 and 2024. Global inflation is expected to continue to decline, from 8.7 percent in 2022 to 6.9 percent in 2023 and 5.8 percent in 2024, due to tighter monetary policy aided by lower international commodity prices. Core inflation is generally projected to decline gradually, and inflation is not expected to return to target until 2025. Monetary policy actions and frameworks are key at this time to keep inflation expectations in check.

Despite facing challenges at the global level, the Indonesian economy recorded solid figures throughout 2023. Based on data from the Indonesian Ministry of Finance, Indonesia's economic growth remained strong, namely recorded at 5.04% (yoy) in the fourth quarter of 2023 and 5.05% for the entire year of 2023. Several industrial sectors such as manufacturing, trade, agriculture, and mining play an important role in this growth. The manufacturing sector recorded positive growth of 4.64% throughout 2023. The trade sector experienced growth of 4.85% throughout 2023. Furthermore, the agricultural sector recorded a positive figure of 1.30% throughout 2023. Then, the mining sector

tahun 2023. Kemudian, sektor pertambangan juga semakin menguat di di tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 6,12%. Lebih lanjut, kinerja ekspor pada triwulan IV-2023 menguat sebesar 1,64% atau sebesar 1,32% (yoy). Namun, impor barang pada triwulan IV-2023 masih terkontraksi sebesar 0,15% atau sebesar 1,65% (yoy).

Seiring dengan dinamika ekspor dan juga impor nasional, Perseroan akan terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam memitigasi risiko perlambatan ekonomi global yang dapat berdampak pada arus *traffic* kapal di Pelabuhan. Dengan demikian, Perseroan dapat menjaga kinerja di setiap segmen usaha yang dijalankan.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menilai bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah menunjukkan kinerja yang baik. Prestasi tersebut dibuktikan dari skor KPI tahun 2023 yang mencapai 102,56 atau melampaui dari target yang ditetapkan. Seiring dengan performa positif yang ditunjukkan oleh Direksi, Perseroan mampu mencatatkan peningkatan kinerja yang baik selaras dengan target pada RKAP dan harapan Pemegang Saham.

Perseroan juga mencatatkan performa positif dari pendapatan operasi segmen yang mencapai Rp1,14 triliun, atau meningkat 16,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh beberapa faktor, seperti contohnya segmen jasa pelayanan kapal yang menjadi pendorong utama dengan pendapatan sebesar Rp1,06 triliun atau meningkat 21,21% dibandingkan tahun sebelumnya.

Segmen jasa pelayanan kapal masih menempati urutan nomor satu penyumbang pendapatan operasi terbesar bagi Perseroan. Di mana pada tahun 2023, segmen jasa pelayanan kapal mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,06 triliun mengalami peningkatan 21,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp875,12 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kunjungan kapal khususnya pada Pelabuhan Tersus sejalan dengan upaya Perusahaan dalam melakukan optimalisasi pelayanan pasar Non Pelindo. Segmen jasa pengangkutan dan lainnya meraih pendapatan sebesar Rp46,28 miliar di tahun 2023 atau menurun 9,34% dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun profitabilitas segmen Perseroan di tahun 2023 mencatatkan total laba bruto sebesar Rp339,78 atau meningkat 12,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu segmen jasa pelayanan kapal mencatatkan laba kotor sebesar Rp316,56 miliar atau meningkat 13,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian segmen jasa pengelolaan kapal mencatatkan laba kotor sebesar Rp9,40 miliar yang berarti meningkat 43,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, segmen jasa pengangkutan dan lainnya mencatatkan laba kotor sebesar Rp13,81 miliar atau menurun 19,54% dibandingkan tahun sebelumnya.

also strengthened in 2023 with growth of 6.12%. Furthermore, export performance in the fourth quarter of 2023 strengthened by 1.64% or 1.32% (yoy). However, imports of goods in the fourth quarter of 2023 still contracted by 0.15% or 1.65% (yoy).

In line with the dynamics of national exports and imports, the Company will continue to support Government policies in mitigating the risk of a global economic slowdown which could impact the flow of vessel traffic at the port. In this way, the Company can maintain performance in each business segment it operates.

ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners considers that in carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors has demonstrated good performance. This achievement is proven by the 2023 KPI score which reached 102.56 or exceeded the set target. Along with the positive performance demonstrated by the Board of Directors, the Company succeeded in recording an increase in performance in line with the targets in the RKAP and the expectations of Shareholders.

The Company also recorded positive performance in its operating income which reached Rp1.14 trillion, or an increase of 16.16% compared to the previous year. This growth was supported by several factors, such as the vessel services segment that has become the main driver with revenues of Rp1.06 trillion, higher by 21.21% compared to the previous year.

The vessel services segment still ranks as the number one contributor to the Company's operating income. Where in 2023, the vessel services segment recorded revenue of Rp1.06 trillion, an increase of 21.21% compared to the previous year which amounted to Rp875.12 billion. This increase was caused by the increase in vessel visits, especially at Tersus Port, is in line with the Company's efforts to optimize Non Pelindo market services. The transportation and other services achieved revenue of Rp46.28 billion in 2023, lower by 9.34% compared to the previous year.

The Company's profitability in 2023 from segments recorded a total gross profit of Rp339.78, higher by 12.31% compared to the previous year. In addition, the vessel services segment recorded a gross profit of Rp316.56 billion, higher by 13.54% compared to the previous year. Additionally, the vessel management services recorded a gross profit of Rp9.40 billion, which means there was an increase of 43.16% compared to the previous year. Furthermore, the transportation and other services segment recorded a gross profit of Rp13.81 billion, lower by 19.54% compared to the previous year.



Oleh karena itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap Direksi atas kepiawaiannya dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan. Selain itu juga, Dewan Komisaris akan terus memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi untuk selalu memanfaatkan setiap peluang-peluang yang ada demi menempatkan Perseroan selangkah lebih maju dari sisi pendapatan serta efisiensi biaya operasional, dengan tetap memegang teguh prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mencapai dan 5,05% untuk keseluruhan tahun 2023, Perseroan memiliki banyak pertimbangan dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada demi mengoptimalkan potensi atau prospek usaha di masa mendatang. Seiring dengan pertumbuhan yang menjanjikan tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha sudah direncanakan dengan cukup baik mengingat tantangan dan juga pencapaian yang telah diraih Perseroan sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan yang dialami Perseroan didorong oleh lini bisnis pelayanan kapal dan juga perluasan pasar. Dewan Komisaris menganggap bahwa Direksi telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam membangun prospek usaha dengan andal.

Dewan Komisaris juga selalu mengingatkan kepada Direksi, terkait pelaksanaan tata kelola Perseroan, untuk senantiasa dijalankan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Oleh karena itu, Dewan Komisaris akan terus melakukan pengawasan secara menyuluruh agar Perseroan dapat mencapai target-target yang ditentukan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GCG

Dewan Komisaris memberi penilaian positif atas penerapan yang dilakukan oleh Direksi terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Hal tersebut tercermin dari hasil pengukuran implementasi GCG yang membuktikan bahwa penerapan yang dilakukan di Perseroan termasuk dalam kategori "Sangat Baik" Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* menunjukkan bahwa Perseroan telah sukses menerapkan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan efektif sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan oleh ASEAN. Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan GCG yang baik dan menyeluruh memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan usaha. Pasalnya, melalui penerapan GCG yang baik Perseroan dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dan juga memperkokoh kinerja serta daya saing.

Salah satu cara Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi GCG di lingkungan Perseroan adalah melalui pengawasan terhadap pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS). Dewan Komisaris berpendapat bahwa WBS merupakan tolak ukur penting atas komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Melalui pelaksanaan WBS, Perseroan dapat mengidentifikasi dan menindaklanjuti masalah internal secara tepat waktu. Oleh karena itu, Dewan Komisaris terus memberikan arahan kepada Direksi

Therefore, the Board of Commissioners appreciates all members of the Board of Directors for their expertise in carrying out the Company's management functions. Additionally, the Board of Commissioners will continue to provide suggestions and recommendations to the Board of Directors to always take advantage of every available opportunity in order to put the Company one step ahead in terms of revenue and operational cost efficiency while still upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG).

VIEW OF BUSINESS PROSPECTS

As Indonesia's economic growth reaches and 5.05% for the whole of 2023, the Company has many considerations in utilizing every opportunity available in order to optimize the potential or business prospects in the future. Along with this promising growth, the Board of Commissioners considers that the business prospects have been planned quite well considering the challenges and also the achievements that have been achieved by the Company throughout 2023. The growth experienced by the Company was driven by the ship service business line and market expansion. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has carried out its responsibility in developing the business outlook reliably.

The Board of Commissioners also always reminds the Board of Directors, regarding the implementation of the Company's governance, to always be carried out based on the principles of Good Corporate Governance. Therefore, the Board of Commissioners will continue to conduct overall supervision so that the Company can achieve the specified targets.

VIEW OF GCG IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners gave a positive assessment of the Board of Directors' implementation of the principles of Good Corporate Governance. This is reflected in the assessment of GCG implementation which proves that the Company's implementation falls into the category "Very Good" The assessment was carried out based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard which shows that the Company has successfully implemented GCG principles thoroughly and effectively in accordance with international standards set by ASEAN. The Board of Commissioners believes that good and comprehensive implementation of GCG has a big impact on business sustainability. The reason is, through implementing good GCG, the Company can gain more trust from all stakeholders and also strengthen performance and competitiveness.

One way the Board of Commissioners monitors the implementation of GCG within the Company is through supervision of the implementation of the Whistleblowing System (WBS). The Board of Commissioners believes that the WBS is an important benchmark for the Company's commitment to implementing GCG principles. Through the implementation of WBS, the Company can identify and follow up on internal problems in a timely manner. Therefore, the Board of Commissioners continues to provide

agar pelaksanaan WBS dilakukan secara efektif demi menjaga kepercayaan segenap pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap Direksi karena telah menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip GCG, yang tercermin dari pelaksanaan WBS sepanjang tahun 2023. Sistem yang dimiliki oleh Perseroan dapat diakses serta dioperasikan oleh para pelapor secara mudah, dan juga dengan jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor. Selain itu Perseroan juga dapat melindungi pelapor atas tindakan pembalasan atas laporan yang *valid*. Atas komitmen yang telah diberikan oleh seluruh insan Perseroan, sepanjang tahun 2023 tidak terdapat laporan pelanggaran yang masuk kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Dewan Komisaris berharap bahwa semangat tersebut senantiasa terjaga agar pengelolaan Perseroan terus dilakukan dengan baik.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Sebagai upaya dalam menjaga efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Komite-Komite yang dimaksud meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh Anggota Komite yang berasal dari pihak independent tidak memiliki keterikatan hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat berdampak pada kemampuannya dalam bertindak secara independent.

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2023 Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris telah menunjukkan kinerja efektif dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Penilaian yang diberikan oleh Dewan Komisaris dilakukan atas dasar realisasi pelaksanaan rencana kerja komite, frekuensi kehadiran rapat dan saran/rekomendasi yang diberikan dalam tugasnya.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Terhitung hingga Laporan Tahunan ini ditandatangani, terdapat perubahan pada susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan, yang berkaitan dengan wafatnya salah satu anggota Komisaris Independen yakni Bapak Hary Kriswanto pada tanggal 24 Juni 2023. Adapun kronologi perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

direction to the Board of Directors so that WBS implementation is carried out effectively to maintain the trust of all stakeholders.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors for upholding the implementation of GCG principles, reflected in the implementation of the WBS throughout 2023. The system owned by the Company can be accessed and operated by whistleblowers easily, and also guarantees confidentiality of the whistleblower's identity. Apart from that, the Company can also protect whistleblowers from retaliation for valid reports. Due to the commitment given by all Company personnel, throughout 2023, there were no reports of violations submitted to the Board of Commissioners. Therefore, the Board of Commissioners hopes that this spirit will always be maintained so that the management of the Company continues to be carried out well.

ASSESSMENT OF COMMITTEE PERFORMANCE UNDER THE BOARAD OF COMMISSIONERS

As part of efforts to maintain the effectiveness of supervisory and directional functions over the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by Committees under its responsibility. These committees include the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. All Committee Members, originating from independent parties, maintain no financial, managerial, shareholding, or familial ties with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders that could compromise their independence.

The Board of Commissioners evaluates that throughout 2023, the Committees under its responsibility have demonstrated effective performance in aiding the Board of Commissioners in fulfilling its functions and responsibilities. This evaluation by the Board of Commissioners is based on the realization of the committee's work plan, attendance frequency at meetings, and the suggestions/recommendations provided in the execution of their duties.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Starting from the time this Annual Report was signed, there have been changes to the composition and structure of the Company's Board of Commissioners due to the passing of an Independent Commissioner, Mr. Hary Kriswanto, on June 24, 2023. The chronology of changes to the composition and structure of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Jabatan Position	**1 Januari – 24 Juni 2023** 1 January – 24 June 2023	**24 Juni – 31 Desember 2023** 24 June – 31 December 2023
Komisaris Utama President Commissioner	Zuhri Iryansyah	Zuhri Iryansyah
Komisaris Commissioner	R.R. Dewi Ariyani	R.R. Dewi Ariyani

Jabatan Position	1 Januari – 24 Juni 2023 1 January – 24 June 2023	24 Juni – 31 Desember 2023 24 June – 31 December 2023
Komisaris Independen Independent Commissioner	Bay Mokhamad Hasani	Bay Mokhamad Hasani
Komisaris Independen Independent Commissioner	Hary Kriswanto	

Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2023, dan sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagai berikut:

The composition and structure of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2023, and until the Annual Report is signed, are as follows:

Komposisi serta Susunan Dewan Komisaris Perseroan
Komposisi serta Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Office Term	Periode Jabatan Office Period	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	13 Oktober 2020 – RUPST 2025 13 October 2020 – AGMS 2025	Ke-1 First	Akta Notaris No. 13 tanggal 13 Oktober 2020 Notary Deed No. 13 dated 13 October 2020
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	14 April 2022 – RUPST 2025 14 April 2022 – AGMS 2025	Ke-1 First	Akta Notaris No. 28 tanggal 14 April 2022 Notary Deed No. 28 dated 14 April 2022
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	15 Juli 2020 – RUPST 2025 15 July 2020 – AGMS 2025	Ke-1 First	Akta Notaris No. 24 tanggal 15 Juli 2020 Notary Deed No. 24 dated 15 July 2020

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham yang telah memberikan dukungan dan kepercayaannya, juga kepada Direksi dan segenap insan Perseroan yang telah memberikan kinerja terbaik dalam berkontribusi untuk mencapai target dan tujuan Perseroan.

Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja dan mitra usaha yang selama ini telah menyerahkan kepercayaannya kepada Perseroan. Kami berharap, di masa yang akan datang Perseroan dapat terus meningkatkan pelayannya sehingga dapat memberikan kualitas terunggul dalam segala aspek demi memenuhi harapan serta angan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai upaya mendorong kinerja di masa yang akan datang, kami atas nama Dewan Komisaris senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada segenap insan Perseroan untuk selalu tangkas dan cekatan dalam menghadapi segala rintangan dan perubahan yang muncul. Melalui kerja sama yang dinamis dengan seluruh pihak, kami berharap dapat tercipta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

APPRECIATION TO STAKEHOLDERS

On behalf of the Board of Commissioners, we express our gratitude to the Shareholders for their support and trust, as well as to the Boarad of Directors and all Company personnel for their outstanding performance in contributing to achieving the Company's targets and goals.

We also extend our appreciation to all work partners and business associates who have trusted the Company. We aspire for continuous improvement in our services to provide the highest quality in all aspects, meeting the expectations of all stakeholders.

In an effort to drive future performance, we, representing the Board of Commissioners, consistently support and encouraging all Company personnel to remain agile and adaptable in facing obstacles and changes. Through dynamic collaboration with all stakeholders, we aim to foster harmonious relationships.

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners
Jakarta, 28 Maret 2024
Jakarta, March 28, 2024



Zuhri Iryansyah
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT



Shanti Puruhita

Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director concurrently as Director of Commercial and Business Development

Monitoring implementasi strategi yang telah dilakukan oleh Direksi menunjukkan bahwa semua target kinerja Perseroan terpenuhi dengan baik di akhir tahun.
Monitoring of strategy implementation by the Board of Directors showed that all of the Company's performance targets were well met at the end of the year.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Honorable Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya PT Jasa Armada Indonesia Tbk, mampu melalui tahun 2023 dengan hasil yang positif. Segala pencapaian yang diraih oleh Perseroan sepanjang tahun, merupakan cerminan dari kerja keras dan dedikasi yang telah dilakukan oleh segenap insan Perseroan. Seiring dengan prestasi yang telah diraih, Perseroan senantiasa memberikan timbal balik positif kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, perkenankanlah kami selaku Direksi Perseroan untuk menyampaikan pengelolaan sepanjang tahun 2023 melalui Laporan Tahunan ini.

We praise and thank God Almighty, as it is by His mercy and grace that PT Jasa Armada Indonesia Tbk was able to navigate through 2023 with positive results. The achievements throughout the year reflects the hard work and dedication of all Company personnel. In conjunction with these achievements, the Company consistently delivers positive outcomes to all stakeholders. Therefore, we, as the Company's Board of Directors, kindly present the management overview of 2023 through this Annual Report.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tensi geopolitik yang panas di beberapa wilayah, risiko inflasi dan juga perubahan iklim yang terus terjadi, perekonomian dunia mengalami perlambatan di tahun 2023. Berdasarkan International Monetary Fund (IMF) pertumbuhan global menurun dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3,0% pada tahun 2023, jauh di bawah rata-rata historis (2000-19) sebesar 3,8%. Negara-negara maju juga diperkirakan akan menurun dari 2,6% pada tahun 2022 menjadi 1,5% pada tahun 2023 dan 1,4% pada tahun 2024 karena pengetatan kebijakan mulai terasa. Inflasi global diperkirakan akan terus menurun, dari 8,7 persen pada tahun 2022 menjadi 6,9 persen pada tahun 2023, karena kebijakan moneter yang lebih ketat yang didorong oleh harga komoditas internasional yang lebih rendah. Inflasi inti secara umum diproyeksikan menurun secara bertahap, dan inflasi diperkirakan tidak akan kembali ke target hingga tahun 2025.

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Influenced by various factors such as geopolitical tensions in several regions, the risk of inflation, and ongoing climate change, the world economy is projected to experience a slowdown in 2023. According to the International Monetary Fund (IMF), global growth will decline from 3.5% in 2022 to 3.0% in 2023, well below the historical average (2000-19) of 3.8%. Developed countries are also expected to decline from 2.6% in 2022 to 1.5% in 2023 and 1.4% in 2024 as policy tightening begins to be felt. Global inflation is expected to continue to decline, from 8.7 percent in 2022 to 6.9 percent in 2023, due to tighter monetary policy driven by lower international commodity prices. Core inflation is generally projected to decline gradually, and inflation is not expected to return to target until 2025.

Meskipun dihadapi oleh berbagai tantangan di tingkat global, pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap mencatatkan angka yang solid. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun 2023 berhasil tumbuh sebesar 5,05%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh beberapa sektor industri, seperti Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 13,96%. Kemudian apabila dilihat dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi diraih oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

Despite facing various challenges at the global level, Indonesia's economic growth continues to record solid figures. Based on data released by the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy in 2023 successfully grew by 5.05%. This growth was supported by several industrial sectors, such as the Transportation and Warehousing Business Field, which grew by 13.96%. Looking at the expenditure side, the highest growth was achieved by the Consumption Expenditures of Nonprofit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) at 9.83%.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

Sebagai upaya dalam menyiasati berbagai dinamika yang muncul sepanjang tahun, Direksi menyadari bahwa dibutuhkannya strategi yang tajam serta tepat. Dalam rangka mencapai pertumbuhan bisnis yang optimal, Direksi menyusun strategi dengan dasar Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana

COMPANY STRATEGY AND STRATEGIC POLICY

In response to the various dynamics that emerged throughout the year, the Board of Directors recognized the need for sharp and appropriate strategies. To achieve optimal business growth, the Board of Directors developed strategies based on the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Company Work Plan and Budget

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan Perseroan. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang menjadi acuan untuk mencapai visi Perseoan, mencakup peta jalan (*Roadmap*) selama 5 (lima) tahun. Adapun *Roadmap* yang telah disusun untuk 5 (lima) tahun ke depan, yakni *World Class Pilotage and Towage Operator* pada tahun 2020, *Strengthening* pada tahun 2021, *Value Chain Expansion* tahun 2022, *Value Chain Integration* tahun 2023 dan *World Class Trade Facilitator* tahun 2024. Pada tahun 2023, strategi yang disusun berorientasi pada *Roadmap* tersebut yang mengusung tema *Value Chain Integration.*

Mengacu pada RJPP yang telah disusun, Perseroan menetapkan target pertumbuhan sebesar 2,5 hingga 2,0 kali lipat dari pencapaian pada tahun 2019. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan aset dan kapitalisasi pasar Perseroan sehingga dapat mencapai setidaknya Rp3,00 triliun di tahun 2024. Dalam rangka mencapai target tersebut, Perseroan telah menetapkan strategi sebagaimana berikut ini:

1. Meningkatkan Daya Saing:
   a. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM.
   b. Meningkatkan kualitas produk dan jasa
   c. Meningkatkan tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen resiko.
   d. Meningkatkan citra dan reputasi Perseroan.
2. Ekspansi Bisnis secara Organik dan Inorganik:
   a. Memperluas pasar yang sudah ada.
   b. Menambah jumlah pelanggan maupun produk dan jasa yang diberikan.
   c. Menjajaki usaha baru yang berkaitan atau yang mendukung pertumbuhan Perseroan melalui kerjasama/ akuisisi dan/atau *merger*.
3. Optimalisasi Kinerja Operasional dan Keuangan:
   a. Memperkuat sumber pendanaan untuk kebutuhan modal kerja dan ekspansi.
   b. Optimalisasi penggunaan produk dan jasa instansi keuangan guna membantu peningkatan produktivitas dan efisiensi.
   c. Otomasi/digitalisasi untuk mempercepat proses kerja dan pengembangan produk & jasa.
   d. Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi memiliki peranan krusial dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola, Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan visi jangka panjang serta mengidentifikasi peluang dan tantangan di pasar. Direksi juga berperan dalam menentukan arah strategis yang akan diambil Perseroan untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Melalui rapat, analisis, dan pengambilan keputusan yang berbasis pada data, Direksi terus berupaya untuk menyusun strategi yang tepat demi menghadapi persaingan dan mencapai keunggulan kompetitif. Selain itu, Direksi juga memastikan bahwa kebijakan strategis yang ditetapkan sesuai dengan nilai, misi, dan tujuan Perseroan secara keseluruhan.

(RKAP), which have been established by the Company. The Company's Long-Term Plan (RJPP) serves as a roadmap for the Company's vision over a period of 5 (five) years. The roadmap outlined for the next 5 (five) years includes becoming a World Class Piloting and Tow Operator in 2020, Strengthening in 2021, Value Chain Expansion in 2022, Value Chain Integration in 2023, and becoming a World Class Trade Facilitator in 2024. In 2023, the strategy is oriented towards the Roadmap theme of Value Chain Integration of the Roadmap.

Based on the prepared RJPP, the Company has set a growth target of 2.5 to 2.0 times the achievement in 2019. This is aimed at increasing the Company's assets and market capitalization to reach at least Rp3.00 trillion by 2024. To achieve this target, the Company has established the following strategies:

1. Increasing Competitiveness:
   a. Enhancing the capabilities and quality of human resources.
   b. Improving the quality of products and services.
   c. Enhancing good corporate governance and risk management.
   d. Enhancing the Company's image and reputation.
2. Organic and Inorganic Business Expansion:
   a. Expanding existing markets.
   b. Increasing the number of customers and products and services.
   c. Exploring new businesses related to or supporting the Company's growth through collaboration, acquisition, and/or merger.
3. Optimizing Operational and Financial Performance:
   a. Strengthening funding sources for working capital and expansion needs.
   b. Optimizing the use of financial agency products and services to increase productivity and efficiency.
   c. Implementing automation/digitization to accelerate work processes and product & service development.
   d. The Board of Directors' Role in Formulating Strategy and Strategic Policues

The Board of Directors plays a crucial role in formulating strategy and strategic policies. As the managers of the Company, the Board of Directors is responsible for establishing a long-term vision and identifying opportunities and challenges in the market. Additionally, the Board of Directors determines the strategic direction the Company will take to achieve its business goals.

Through meetings, analysis, and data-based decision-making, the Board of Directors continuously develops appropriate strategies to face competition and achieve competitive advantage. Furthermore, the Board of Directors ensures that the strategic policies are align with the Company's overall values, mission, and objectives.



PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Setelah melakukan penyusunan strategi, Direksi memiliki harapan yang besar bahwa strategi tersebut dapat diterapkan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk itu, Direksi senantiasa memastikan bahwa strategi ditindaklanjuti sesuai dengan yang direncanakan melalui pengawasan dan evaluasi atas pencapaian kinerja. Direksi melakukan pengawasan dan evaluasi melalui rapat yang dilaksanakan secara rutin, salah satunya melalui rapat Direksi. Melalui upaya-upaya tersebut, Direksi akan terus mengawasi perkembangan serta pencapaian atas target-target yang telah ditetapkan.

PERBANDINGAN ANTARA PENCAPAIAN TARGET DENGAN REALISASI

Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan yang unggul dan kompetitif, Perseroan telah menetapkan target yang harus dicapai sepanjang tahun 2023. Adapun sepanjang tahun, Perseroan telah melaksanakan kegiatan operasional dengan efektif yang tercermin pada pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2023. Aspek yang menjadi fokus pada penilaian KPI tahun 2023 meliputi Nilai Ekonomi & Sosial, Inovasi dan Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta.

Pencapaian positif tersebut didukung oleh perbandingan antara target dengan realisasinya di tahun 2023 yang juga mencatatkan tren positif. Perseroan mencatatkan kinerja yang cukup baik, terbukti dengan total pendapatan usaha yang terealisasi sebesar Rp1.138,54 miliar, atau mencapai 124,57% terhadap target sebesar Rp913,96 miliar. Pencapaian pendapatan tersebut, utamanya disebabkan oleh proyeksi kenaikan kunjungan kapal, kenaikan tarif, optimalisasi pangsa pasar baru wilayah non Pelindo, serta investasi kapal yang telah rampung di tahun 2023 diharapkan dapat berkontribusi secara maksmimal khusunya untuk pendapatan sektor pemanduan dan penundaan kapal.

KENDALA YANG DIHADAPI

Sepanjang tahun 2023, Perseroan menghadapi berbagai macam kendala yang juga disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya disebabkan oleh situasi politik yang belum kunjung membaik, menyebabkan kekhawatiran pada segi ekonomi. Untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi, Perseroan terus melakukan pengawasan terhadap situasi yang sedang terjadi seiringan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah. Melalui rangkaian strategi yang telah ditetapkan, Perseroan akan terus menjaga kualitas pelayanannya demi mempertahankan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

ANALISIS PROSPEK USAHA

Perseroan terus memegang teguh optimisme terhadap prospek usaha yang menjanjikan di masa depan. Optimisme tersebut turut didukung oleh pertumbuhan perekonomian nasional yang berada pada level yang kokoh, yaitu sebesar 5,05% untuk keseluruhan tahun 2023. Selain itu, tahun 2023 juga menjadi tahun yang membanggakan bagi JAI karena Perseroan telah berhasil meraih berbagai pencapaian.

PROCESSES CARRIED OUT BY THE BOARD OF DIRECTORS TO ENSURE STRATEGY IMPLEMENTATION

After formulating the strategy, the Board of Directors holds high expectations for its successful implementation. Therefore, the Board of Directors ensures that the strategies are executed as planned through rigorous monitoring and evaluation of achievements. This monitoring is conducted through regular meetings, including the Board of Directors meetings. Through these efforts, the Board of Directors continuously monitors the progress and achievement of targets.

COMPARISON BETWEEN TARGET ACHIEVEMENT AND REALIZATION

To deliver superior and competitive services, the Company sets 2023 targets. Operational activities were conducted effectively, as evidenced by the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) in 2023. The assessment of the 2023 KPIs focused on aspects such as Economic & Social Value, Innovation and Business Models, Technological Leadership, Increased Investment, and Talent Development.

This positive achievement is further supported by a comparison between targets and realization in 2023, which also showed a positive trend. The Company demonstrated strong performance, with total operating revenue of Rp1,138.54 billion, or 124.57% of the targeted Rp913.96 billion. This achievement was primarily due to projected increase in vessel visits, tariff increases, optimization of new market share in non-Pelindo areas, and ship investments that have been completed in 2023 are expected to contribute maximally, especially for sector revenues. 2023 is expected to contribute maximally, especially to the revenue of the pilotage and towage sector.

OBSTACLES

Throughout 2023, the Company encountered various obstacles, influenced by several factors. One significant challenge stemmed from the ongoing political situation, raising concerns about its impact on the economy. To mitigate potential risks, the Company continues to monitor the prevailing situation in alignment with government policies. Through predefined strategies, the Company remains committed to upholding service quality to maintain the trust of all stakeholders.

BUSINESS PROSPECT ANALYSIS

The Company continues to uphold optimism towards promising business prospects in the future. This optimism is also supported by the national economic growth which is at a solid level of 5.05% for the whole of 2023. In addition, 2023 was also a proud year for JAI as the Company has managed to achieve various achievements.

Pendapatan usaha di tahun 2023 yang mencapai Rp.1.138.537 menjadi landasan atas keyakinan Perseroan dalam melangkah maju di tahun 2024. Proyeksi terhadap kenaikan kunjungan kapal, kenaikan tarif, optimalisasi pangsa pasar baru wilayah non Pelindo, serta investasi kapal yang telah rampung di tahun 2023 meningkatkan optimisme Perseroan dalam menetapkan proyeksi yang lebih besar di tahun 2024.

Direksi meyakini bahwa prospek usaha yang dimiliki JAI akan terus tumbuh. Pengamatan yang cermat terhadap kebutuhan pasar, menghasilkan pertumbuhan organik dari lini bisnis pelayanan kapal. Selain itu, Perseroan juga akan terus memperluas jangkauannya dengan membangun kemitraan dan kerja sama yang lebih solid dengan pelabuhan-pelabuhan di luar Pelindo.

PERKEMBANGAN PENERAPAN GCG

Direksi berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organ pengelola Perseroan dengan tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG merupakan tonggak penopang dalam menjalankan kegiatan operasional yang optimal. Melalui penerapan tersebut, Perseroan akan terus menjaga kestabilan pertumbuhan bisnis saat ini hingga masa yang akan datang. Lebih lanjut, penerapan GCG juga dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif dengan melalui implementasi *best practices* yang berlandaskan standar GCG terbaik. Penerapan GCG dilakukan melalui mekanisme praktik manajemen risiko, sistem pengendalian internal, internalisasi kode etik di lingkungan Perseroan dan juga sistem pelaporan pelanggaran (WBS).

Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG dapat dilihat dari pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) sepanjang tahun 2023. Berkat dedikasi dan kerja sama oleh segenap insan Perseroan, sepanjang tahun Perseroan tidak menerima laporan atas tindakan menyimpang. Hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang harus dijaga setiap tahunnya, demi menjaga citra baik yang telah dibangun oleh Perseroan dan seluruh pihak terkait.

Berkat kerja sama yang baik oleh seluruh pihak, pada tahun 2023 Perseroan memperoleh timbal balik positif atas penerapan GCG. Penilaian GCG dilakukan melalui 3 (tiga) metode pengukuran, yakni dengan menggunakan parameter penilaian Kementerian BUMN yaitu Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No: SK-16/S.MBU/2012, parameter *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan parameter Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan. Adapun komposisi dan susunan Direksi Perseroan per 31 Desember 2023, dan sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagai berikut:

Operating revenue in 2023 which reached Rp.1,138,537 is the foundation for the Company's confidence in moving forward in 2024. Projections of increased ship visits, tariff increases, optimization of new market share in non-Pelindo areas, and ship investments that have been completed in 2023 increase the Company's optimism in setting greater projections in 2024.

The Board of Directors believes that JAI's business prospects will continue to grow. Careful observation of market needs has resulted in organic growth of the ship services business line. In addition, the Company will also continue to expand its reach by building more solid partnerships and cooperation with ports outside Pelindo.

DEVELOPMENT OF GCG IMPLEMENTATION

The Board of Directors is firmly committed to fulfilling its duties and functions as the Company's management body while upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG). The implementation of GCG serves as a crucial foundation for conducting optimal operational activities, ensuring sustainable business growth now and in the future. Moreover, GCG implementation fosters a harmonious and productive work environment by adopting best practices based on international GCG standards. This implementation covers mechanisms for risk management practices, internal control systems, internalization of the Company's code of conduct, and a violation reporting system (WBS).

The Company's dedication to GCG implementation is evident in the deployment of the Whistleblowing System (WBS) throughout 2023. Thanks to the dedication and collaboration of all Company personnel, the Company received no reports of misconduct throughout the year. This achievement underscores the importance of maintaining a positive reputation that the Company has built along with all stakeholders.

Through effective collaboration, the Company garnered positive feedback for its GCG implementation in 2023. GCG assessment was conducted using three measurement methods, namely the assessment parameters of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), and the parameters outlined in Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines.

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

As of December 31, 2023, and until the signing of this Annual Report, there have been no changes to the composition of the Company's Board of Directors.



Komposisi serta Susunan Direksi Perseroan
Composition and Structure of the Company's Boarad of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Office Term	Periode Jabatan Office Period	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Shanti Puruhita	Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently as Director of Commercial and Business Development	6 Desember 2022 – RUPST 2024 6 December 2022 – AGMS 2024	Ke-1 First	• Akta Notaris No. 24 tanggal 15 Juli 2020; • Akta Notaris Nomor 33 tanggal 17 Juni 2021; • Akta Notaris Nomor 16 tanggal 6 Desember 2022. • Notary Deed No. 24 dated 15 July 2020; • Notary Deed Number 33 dated 17 June 2021; • Notary Deed Number 16 dated 6 December 2022.
Muhammad Iqbal	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operation	17 Juni 2021 - RUPST 2024 17 June 2021 – AGMS 2024	Ke-1 First	• Akta Notaris Nomor 13 tanggal 13 Oktober 2020; • Akta Notaris Nomor 33 tanggal 17 Juni 2021. • Notary Deed Number 13 dated 13 October 2020; • Notary Deed Number 33 dated 17 June 2021.
Reini Delfianti	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HR	14 April 2022 – RUPST 2024 14 April 2022 – AGMS 2024	Ke-1 First	Akta Notaris Nomor 29 tanggal 14 April 2022 Notary Deed Number 29 Dated 14 April 2022v

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Tahun 2023 telah kami lalui dengan hasil positif. Berkat kerja sama yang dinamis antara seluruh insan Perseroan serta dukungan segenap pemangku kepentingan, Perseroan dapat meraih target-target yang telah ditetapkan meskipun dihadang oleh berbagai rintangan. Untuk itu, saya mewakili seluruh jajaran Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan oleh para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan. Berkat kepercayaan dan dukungan yang diberikan, Perseroan dapat menjaga performanya sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan terbaik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan, saran dan pengawasan yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan bisnis Perseroan. Tidak lupa kami berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh insan Perseroan yang telah bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi, sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik.

Kami berharap, atas usaha dan komitmen yang telah dilakukan sepanjang tahun dapat membuahkan prestasi yang positif sehingga Perseroan dapat terus menjalankan usahanya di masa depan juga mendorong tercapainya angan serta tujuan yang diinginkan.

APPRECIATION TO STAKEHOLDERS

As we reflect on the achievements of 2023, we are grateful for the positive outcomes we have achieved. The dynamic collaboration among all Company personnel and the unwavering support from our stakeholders have been instrumental in overcoming various challenges and realizing our set targets. On behalf of the entire Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, I extend our deepest gratitude to the Shareholders and stakeholders for their trust and support. Your confidence in us has enabled the Company to sustain its performance and deliver the highest quality of service. We also express our sincere appreciation to the Board of Commissioners for their guidance, valuable suggestions, and diligent oversight, which have greatly contributed to the Company's business sustainability. Additionally, we acknowledge and commend all Company personnel for their enthusiasm and dedication in carrying out their roles, ensuring the effective implementation of our operational activities.

As we look ahead, we remain committed to our efforts and aspire to achieve even greater success in the future. With the continued support and collaboration of our stakeholders, we are confident that the Company will thrive and realize its aspirations and objectives.

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Directors
Jakarta, 28 Maret 2024
Jakarta, March 28, 2024

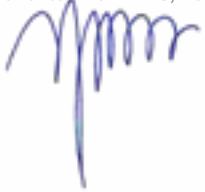

Shanti Puruhita
Direktur Utama merangkap
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director concurrently as
Director of Commercial and Business Development

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

RESPONSIBILITY STATEMENT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ON THE ACCOUNTABILITY OF THE ANNUAL REPORT 2023 PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 28 Maret 2024

We, the undersigned, declare that all information in the 2023 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk has been published in its entirety, and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the company's Annual Report.

This statement is hereby made in all truthfulness.
Jakarta, March 28 2024

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS



Zuhri Iryansyah
Komisaris Utama
President Commissioner



R.R. Dewi Ariyani
Komisaris
Commissioner



Bay Mokhamad Hasani
Komisaris Independen
Independent Commissioner



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

RESPONSIBILITY STATEMENT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ON THE ACCOUNTABILITY OF THE ANNUAL REPORT 2023 PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 28 Maret 2024

We, the undersigned, declare that all information in the 2023 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk has been published in its entirety, and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the company's Annual Report.

This statement is hereby made in all truthfulness.
Jakarta, March 28 2024

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Shanti Puruhita
Direktur Utama merangkap
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director concurrently as
Director of Commercial and Business Development

Muhammad Iqbal
Direktur Armada dan Operasi
Director of Fleet Management and Operation

Reini Delfianti
Direktur Keuangan & SDM
Director of Finance & HR

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Profil Perusahaan

Company Profile

Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan, penundaan, pengepilan, pengangkutan laut, penyewaan kapal, dan pengoperasian kapal, JAI terus mendorong perkembangan bisnis dengan strategi yang tepat.

As a company engaged in guiding, delaying, dispatching, sea transportation, ship chartering, and ship operating services, JAI continues to drive business development with the right strategy.





IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY AND GENERAL INFORMATION

Nama Perusahaan
Company Name

PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Kode Saham
Stock Code

IPCM

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

10 Juli 2013
July 10, 2013

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian No. 24 tanggal 10 Juli 2013, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-47228.AH.01.01. Tahun 2013, tanggal 9 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0084678. AH.01.09. Tahun 2013, tanggal 9 September 2013.
Deed of Establishment of the Company Number 24 dated July 10, 2013, authorized by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-47228.AH.01.01. Year 2013 dated September 9, 2013, and No. AHU-0084678.AH.01.09. Year 2013, dated September 9, 2013.

Informasi Perubahan Nama
Information on Name Changes

Sejak berdiri pada tanggal 9 September 2013, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama Perusahaan.
Since its establishment on September 9, 2013, the Company has never changed its name.

Bidang Usaha
Line of Business

Penyelenggaraan dan pengusahaan pelayanan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
Providing and operating vessels services, passengers, goods, and port-related activities.

Jaringan Usaha
Business Coverage

Jakarta, Banten, Bayah, Pontianak, Bengkulu, Panjang, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Palembang, Tanjung Pandan, Jambi, Cirebon, Patimban.

Jumlah Pekerja
Total Employees

124 orang (2023)
124 people (2023)

Tanggal Pencatatan di Bursa
Stock Listing Date at Stock Exchange

22 Desember 2017
December 22, 2017

Kode Saham
Ticker Code

(IDX: IPCM)

Kepemilikan Saham
Share Ownership

- **PT Pelindo Jasa Maritim 76,89% atau 4.063.504.600 lembar saham**
- **PT Multi Terminal Indonesia 0,11% atau 5.800.000 lembar saham**
- **Masyarakat 23,00% atau 1.215.506.500 lembar saham**
- **76.89% or 4,063,504,600 shares**
- **0.11% or 5,800,000 shares**
- **23.00% or 1,215,506,500 shares**

Total Aset
Total Assets

Rp1.522.134.646.813 per 31 Desember 2023
Rp1.522.134.646.813 by December 31, 2023

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp1.500.000.000.000,- (Satu triliun lima ratus miliar Rupiah)

terbagi atas 15.000.000.000 (Lima belas miliar) lembar saham dengan nilai masing-masing saham Rp100,- (Seratus Rupiah).
Rp528,481,110,000 (five hundred twenty-eight billion four hundred eighty-one million one hundred and ten thousand Rupiah) consists of 5,284,811,100 (five billion two hundred eighty-four million eight hundred and eleven thousand one hundred) shares.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Paid Up Capital

Rp528.481.110.000,- (Lima ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) terdiri atas 5.284.811.100 (Lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu seratus) lembar saham.
Rp528,481,110,000 (five hundred twenty-eight billion four hundred eighty-one million one hundred and ten thousand Rupiah) consists of 5,284,811,100 (five billion two hundred eighty-four million eight hundred and eleven thousand one hundred) shares.



AKSES TERHADAP PERUSAHAAN TERMASUK KANTOR CABANG DAN/ATAU PERWAKILAN

ACCESS TO THE COMPANY, INCLUDING BRANCH AND/OR REPRESENTATIVES

Kantor Pusat dan Jaringan Kantor IPCM | Head Office and Branch of IPCM

Kantor Pusat
Head Office

Gedung Pelindo Tower, Lantai 8 & 9
Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso,
Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230

Situs *Website*
Website

www.ipcmarine.co.id

E-mail

corsec@ipcmarine.co.id

Kontak Perusahaan
Official Contact

Corporate Secretary
Eddy Haristiani
Gedung Pelindo Toper, Lantai 8 & 9
Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso,
Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230

Investor Relations
Telp : (+62-21) 430 6789
E-mail : investor.relation@ipcmarine.co.id

Whistle Blowing System
Telp : +62 21 2782 2345
***E-mail* : pelindobersih@whistleblowing.link**

Customer Service
***E-mail* : ipcm.care@ipcmarine.co.id**

Media Sosial
Facebook : IPCMarine
Instagram : @ipcmarine
X: @ipcmarine

Kantor Cabang| Branch

Area Operasional I
Operational Area I

Tanjung Priok
Central Work Shop
Jl. Raya Pelabuhan Pos 9. Tanjung Priok Jakarta Utara 14310
E. jai_tanjungpriok@ipcmarine.co.id

Area Operasional II
Operational Area II

Banten
Jl. Raya Pelabuhan No.1,
Ciwandan, Banten
P. +62 254 7960010
E. jai_banten@ipcmarine.co.id

Bayah
Jl. Bayah Tugu, RT 2 RW 9
Desa Bayah Barat Kec. Bayah
P. +62 812 8027 8112
E. Jai.bayah@ipcmarine.co.id

Pontianak
Jl. Pakasih No. 11, Pontianak 78113
E. jai_pontianak@ipcmarine.co.id

Area Operasional III
Operational Area III

Bengkulu
Lt. 3 Gd. Kepanduan
PT Pelindo Regional 2 Bengkulu
Jl. Yos Sudarso No. 9 Pulau Baai Bengkulu
P. +62 736 5512735
E. jai_bengkulu@ipcmarine.co.id

Panjang
Jl. Yos Sudarso No. 337, Panjang
Bandar Lampung
P. +62 721 342431
E. jai_panjang@ipcmarine.co.id

Kantor Cabang | Branch

Area Operasional IV
Operational Area IV

Teluk Bayur
Jl. Sutan Syahrir No.213 A
Mata Air Padang Selatan Kota Padang
P. +62 751 63690
E. jai_telukbayur@ipcmarine.co.id

Tanjung Pandan
Jl. Pelabuhan No. 1, Tanjung Pandan Belitung 33411
P. +62 719 25486
E. jai_tanjungpandan@ipcmarine.co.id

Pangkal Balam
Jl. Yos Sudarso No. 1,
Pangkal Pinang 33144
P. +62 717 432678
E. jai_pangkalpinang@ipcmarine.co.id

Jambi
Jl. Mangkubumi No. 16,
Kel. Budiman, Kec. Jambi Timur 36145
E. jai.petrochinajabung@ipcmarine.co.id
E. jai_jambi@ipcmarine.co.id

Palembang
Jl. Belinyu No. 1, Boom Baru,
Palembang 30115
P. +62 711 717102
E. jai_palembang@ipcmarine.co.id

Area Operasional V
Operational Area V

Cirebon
Jl. Belawan Pelabuhan
Cirebon, Jawa Barat
Kelurahan Panjunan
Kec. Lemahwungkuk
E. jai_cirebon@ipcmarine.co.id

Patimban
Dusun Cemara RT. 22 RW. 04,
Desa Kalentambo
Kec. Pusakanagara Kab. Subang
Jawa Barat
P. +62 811 897 2000
E. jai_patimban@ipcmarine.co.id



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF COMPANY HISTORY



PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Perusahaan"), disebut juga "JAI" atau "IPCM", secara resmi dibentuk pada tahun 2013 atas *spin-off* unit usaha Pemanduan dan Penundaan dari perusahaan induknya yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) -sebelumnya bernama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)-, beroperasi sebagai unit usaha dari induk Perusahaan Nasional Pelabuhan ("PN Pelabuhan") sejak tahun 1960. Selama tahun 1964–1969, izin operasional pelabuhan di Indonesia hanya diberikan kepada Otoritas Pelabuhan, dimana PN Pelabuhan berfokus pada aspek komersial. Izin operasi diberikan kepada masing-masing pelabuhan pada tahun 1969-1983, akibatnya PN Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan dihapuskan.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("the Company"), also known as "JAI" or "IPCM", was officially formed in 2013 as a result of the spin-off of the Piloting and Towing business unit of its parent company, namely PT Pelabuhan Indonesia (Persero) – previously known as PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) – operating as a business unit of the parent Perusahaan Nasional Pelabuhan ("PN Pelabuhan") since 1960. From 1964 to 1969, port operational permits in Indonesia were only granted to the port authority, and PN Pelabuhan focused on commercial aspects. Operating permits were granted to every port between 1969 and 1983, resulting in the dismissal of the PN Pelabuhan and the Port Authority.



Pada tahun 1985, seluruh operator pelabuhan di Indonesia digabung menjadi empat perusahaan, dengan empat perusahaan yang beroperasi menurut wilayahnya masing-masing. Salah satunya adalah Perum Pelabuhan II dan perusahaan tersebut menjadi unit usaha Perum Pelabuhan II. Kemudian di tahun 1992, badan hukum Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.57/1991, yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Perum Pelabuhan II berubah nama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan Layanan pemanduan dan penundaan masuk ke dalam usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Seiring dengan diluncurkannya identitas baru pada tahun 2012 oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai IPC, diikuti dengan transformasi untuk lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan, pada tanggal 10 Juli 2013 telah dibentuk usaha layanan pemanduan & penundaan yang akan didirikan PT Jasa Armada Indonesia atau dikenal dengan IPC Marine berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 24 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-47228.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 9 September 2013, sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 44 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022, serta perubahan susunan Pengurus perusahaan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 16 tanggal 6 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan bukti surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.09-0088180 tanggal 16 Desember 2022.

In 1985, all port operators in indonesia were merged into four companies, each operating according to their respective regions. One of them is Perum Pelabuhan II which then turned into a business unit of Perum Pelabuhan II. Later in 1992, Perum's legal entity was changed to a Limited Company (PT) based on Government Regulation No.57/1991 with its shares owned by the republic of indonesia, making Perum Pelabuhan II changed its name to PT Pelabuhan Indonesia II and the piloting and towing services were incorporated into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). With the launch of a new identity from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2012 as IPC, followed by a transformation to be more effective and efficient in providing services to meet customer's needs or port service users, on July 10, 2013, a piloting & towing service was formed and PT Jasa Armada Indonesia, known as IPC Marine, was established based on the Deed of Establishment of the Company Number 24 dated July 10, 2013, made by and before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta and authorized by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-47228.AH.01.01 of 2013 dated September 9, 2013, as amended several times and lastly the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders Number 44 dated June 23, 2022, made before Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notary in Jakarta and ratified by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 dated July 8, 2022, as well as the latest changes in the composition of the Company's management based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 16 dated December 6, 2022, made before Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notary in Jakarta and has been notified to the Ministry of Law and Human Rights with proof of letter of Acceptance of Notification Number: AHU-AH.01.09-0088180 dated December 16, 2022.

Setelah spin-off, perusahaan melakukan investasi besar untuk meningkatkan kualitas armada dan menambah kapasitas personel sesuai dengan standar internasional. di bawah supervisi Thome Consulting, Singapore. Hasilnya, kualitas armada meningkat dari Grade 2.4 (48% dari skor tertinggi 100%) menjadi Grade 3.6 (72%). Perusahaan melakukan optimasi secara revolusioner di bidang pemeliharaan, perbaikan, dan sistem pengadaan barang. Hal ini dilakukan melalui strong corporate governance, dan peningkatan integritas SDM guna memastikan kualitas layanan dengan standar tertinggi serta tingkat profitabilitas secara berkelanjutan. Perusahaan juga meningkatkan kualitas dan memasarkan Layanan VVIP dengan standar Zero Waiting Time. Hasilnya, pasar di luar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berkembang, dan pendapatan Perusahaan meningkat 68% di tahun pertama operasi penuh setelah spin-off. Dengan pengalaman operasi selama 60 tahun, total armada 72 unit kapal, kinerja pemanduan & penundaan 52,000 kapal/ tahun, serta kapabilitas dalam melayani klien-klien ternama nasional dan asing, IPCM adalah perusahaan yang paling berpengalaman, paling besar, dan paling dapat diandalkan di Indonesia.

After the spin-off, the Company made significant investments to improve the quality of the fleet and increase personnel capacity in accordance with international standards, under the supervision of Thome Consulting, Singapore. As a result, fleet quality increased from Grade 2.4 (48% of the highest score of 100%) to Grade 3.6 (72%). The Company carried out revolutionary optimization in the fields of maintenance, repair, and procurement systems. This was done through strong corporate governance and improvement on HR integrity to ensure service quality of the highest standards and sustainable levels of profitability. The Company also improved the quality and marketed VVIP services with Zero Waiting Time standards. As a result, market coverage outside PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) expanded, and the Company's revenue increased by 68% in the first full year of operations after the spin-off. With 60 years of operating experience, a total fleet of 72 vessels, piloting & towing performance of 52,000 vessels/ year, as well as the capability to serve well-known national and foreign clients, IPCM is the most experienced, largest, and most reliable company in Indonesia.



Sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang bergerak dalam bidang usaha jasa penyelenggaraan dan pengoperasian kegiatan pelayanan kapal, penumpang, kargo dan yang berhubungan dengan pelabuhan, termasuk penyediaan jasa penundaan dan mengusahakan pelayanan jasa pemanduan, serta penyediaan sarana bantu pemanduan dan prasarana pemanduan, Perusahaan mentransformasikan nilai-nilai perusahaan induk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Aksi Korporasi dalam bentuk Operational Excellence, Customer Centricity, dan Quantum Leap untuk mengoptimalkan pelanggan, pemasok, komunitas, lingkungan, pekerja, dan kepuasan pemegang saham.

As a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) engaged in the business of organizing and operating ship, passenger, cargo, and port-related service activities, including providing towing services and offering piloting services, as well as providing piloting aids and infrastructure, the Company transformed the values of the parent company, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), into Corporate Actions in the form of Operational Excellence, Customer Centricity, and Quantum Leap to optimize customer, supplier, community, environment, employee, and shareholder satisfaction.

Pada tanggal 15–18 Desember 2017, Perusahaan melakukan penawaran umum sebesar 1.215.506.500 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus enam ribu lima ratus) saham baru atau sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2017.

From December 15 to 18, 2017, the Company conducted a public offering of 1,215,506,500 (one billion two hundred fifteen million five hundred six thousand five hundred) new shares or 23% (twenty-three percent) of the Company's issued and fully paid capital after the Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on December 22, 2017.



Seiring dengan perubahan status IPCM menjadi Perusahaan Tbk, Logo Perusahaan berubah berdasarkan Akta No.14 tanggal 11 Oktober 2017 menjadi IPC Marine. Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan Penandatanganan Perjanjian antara PT Citra Shipyard Batam tentang pengadaan empat unit kapal tunda minimal daya 2x2200 HP tipe azimuth stern drive (ASD) kebutuhan PT JAI Tbk serta Penerimaan Pelimpahan pelaksanaan kegiatan jasa pemanduan dan penundaan kapal ship-to-ship (STS) pada wilayah perairan Muara Sungai Musi Palembang, Sumatera Selatan dan Muara Sabak Jambi dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Along with the change in IPCM's status to a public company, the Company Logo also changed, ratified in Deed No. 14 dated October 11, 2017, to IPC Marine. In 2018, the Company signed an Agreement with PT Citra Shipyard Batam regarding the procurement of four units of tugboats with a minimum power of 2x2200 HP, type azimuth stern drive (ASD) to cater the needs of PT JAI Tbk and as part of the delegation of the ship-to-ship piloting and towing services (STS) in the Musi River Estuary in Palembang, South Sumatra, and Muara Sabak Jambi from the Ministry of Transportation, Directorate General of Sea Transportation.

Pada tahun 2020, PT JAI Tbk menghadiri acara penandatanganan kerjasama pelayanan pemanduan dan penundaan antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Pontianak dan Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan ("KUPP") Telok Melano dan KUPP Kendawangan dimana pelayanan penundaan akan dilakukan oleh PT JAI Tbk selaku anak perusahaan IPC. Tahun 2020, PT JAI Tbk melakukan Penandatanganan MoU Jawa 1 Power dan Penandatanganan Kerjasama Pelayanan Jasa Kapal

In 2020, PT JAI Tbk attended the signing ceremony of cooperation on piloting and towing services between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pontianak Port Branch and the Head of the Port Service Unit ("KUPP") Telok Melano and KUPP Kendawangan, where the towing service will be carried out by PT JAI Tbk as a subsidiary of IPC. In the same year, PT JAI Tbk signed the Java 1 Power MoU and signed the Ship Services Cooperation at the

di Terminal Khusus PT Nusantara Regas Wilayah Perairan Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

Tahun 2021, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) dan PT Jawa Satu Power (JSP) menambah kerja sama pelayanan kapal LNG di wilayah operasional Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Satu Power. PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPC Marine/IPCM), anak Perusahan Pelabuhan Indonesia II menandatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan anak perusahaan Pelabuhan Indonesia III yakni PT Pelindo Marine Service (Pelindo Marines) mengenai Penyiapan Rencana Kerjasama dalam Kegiatan Penyediaan dan/atau Pelayanan Kapal, di Kantor Pusat Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hal ini sekaligus mendukung rencana penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021 dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: S-756/MBU/10/2021. Dan kemudian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo. Kemudian tanggal 29 November 2021 didirikan PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) yang juga merupakan anak perusahaan Pelindo yang kemudian akan menjadi induk IPCM melalui inbreng saham.

Pada tahun 2022 dan 2023 IPCM memperluas ekspansi pasar, memperkuat armada dengan 4 kapal baru dan mendorong pembangunan 2 kapal dalam tender. Selain itu, Perusahaan juga mengembangkan berbagai peluang bisnis baru, menjalankan bisnis dengan mengutamakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dan bersinergi dengan anak perusahaan Pelindo lainnya pasca merger Pelindo. Sementara dalam rangka peningkatan aset Perusahaan dan memperbesar kapitalisasi pasar, IPCM akan menjalankan beberapa strategi utama yaitu standardisasi proses bisnis, ekspansi dan kerjasama bisnis serta memperkuat kinerja keuangan dan strategi investasi.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

2013

PT Jasa Armada Indonesia

Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013

2017

PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Akta No. 14 tanggal 11 Oktober 2017

Sejak awal berdiri pada 10 Juli 2013 hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama dari "PT Jasa Armada Indonesia". Adapun setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Desember 2017, IPCM resmi menjadi Perusahaan Terbuka.

PT Nusantara Regas Special Terminal in the Thousand Islands Waters Area, DKI Jakarta Province.

In 2021, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) and PT Jawa Satu Power (JSP) increased cooperation in LNG ship services in the operational area of the Jawa Satu Power Floating Storage Regasification Unit (FSRU). PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPC Marine/IPCM), a subsidiary of the Indonesian Port Company II, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Indonesian Port III subsidiary, namely PT Pelindo Marine Service (Pelindo Marines), regarding the Preparation of Cooperation Plans in Provision and Supply Activities and/or Ship Services, at the Tanjung Perak Port Area Head Office, Surabaya. This also supports the plan to merge PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which occurred on October 1, 2021, based on Republic of Indonesia Government Regulation Number 101 of 2021 and Letter from the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Number: S-756/MBU/10/2021. Then PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) changed its name to PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo. On November 29, 2021, PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) was established, also a subsidiary of Pelindo, which will later become the parent company of IPCM through a share investment.

In 2022 and 2023, IPCM expanded its market coverage, strengthened the fleet with 4 new ships, and encourages the construction of 2 ships from tender. In addition, the Company is developing new business opportunities, prioritizing the environment, social, and governance (ESG) and synergizing with other Pelindo subsidiaries after the merger of Pelindo. Meanwhile, to increase Company assets and market capitalization, IPCM opted for the main strategies of standardizing business processes, expanding and collaboration, and strengthening financial performance and investment strategies.

INFORMATION ON NAME CHANGES

Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013
Deed No. 24 dated July 10, 2013

Akta No. 14 tanggal 11 Oktober 2017
Deed No. 14 dated October 11, 2017

Since its establishment on July 10, 2013, until the publication of this annual report, the Company has never changed its name of "PT Jasa Armada Indonesia." Meanwhile, after listing its shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on December 22, 2017, IPCM officially became a Public Company.



JEJAK LANGKAH
MILESTONE

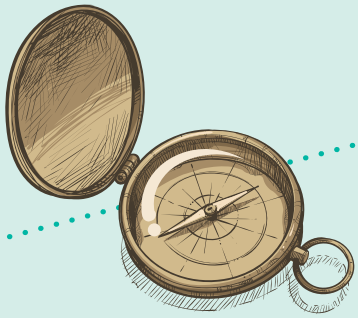

1960
Divisi Pilotage & Towage Badang Pengusahaan Pelabuhan mulai beroperasi.
Pilotage & towage division of Badan Pengusahaan Pelabuhan started its operation.

1984
Seluruh Pelabuhan di Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu Perum Pelabuhan I, II, III, dan IV.
All seaports in Indonesia were divided into 4 territories, becoming Perum Pelabuhan I, II, III, IV.

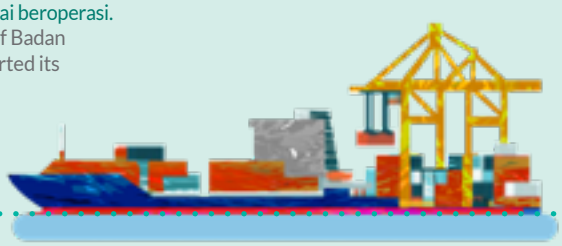

2020
- Ekspansi wilayah operasi pada Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.
- Penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk Jawa Satu Power.
- Penandatanganan Kerjasama Kapal Pelayanan di Terminal Khusus PT Nusantara Regas di Perairan Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.
- Expansion of the operating area at Patimban Port, Subang, West Java.
- MoU signing for Jawa Satu Power.
- The signing of Cooperation for Vessel Services at the Special Terminal of PT Nusantara Regas in the Waters of the Thousand Islands, DKI Jakarta Province.

2021
- Selesainya pembangunan 4 unit Kapal Tunda IPCM Abimanyu I, II, III, IV yang menggunakan dana IPO.
- Penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dan kemudian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo.
- Didirikan PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) yang juga merupakan anak perusahaan Pelindo yang kemudian akan menjadi induk IPCM melalui inbreng saham.
- The completion of the construction of 4 units of IPCM Abimanyu I, II, III, IV Tugboats using IPO funds.
- The merger of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Furthermore, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) changed its name to PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo.
- PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) was established, which is also a subsidiary of Pelindo, which later will become the parent of IPCM through share inbreng.



2022
- Pengalihan (inbreng) 76,89% saham Perusahaan dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan, yang semula dimiliki oleh Pelindo beralih kepada PJM sehingga terdapat perubahan induk IPCM.
- Perubahan logo IPCM.
- Peletakan Lunas (Keel Laying) Pembangunan Kapal Tunda 2x2200 HP di Surabaya.
- Peletakan Lunas (Keel Laying) Pembangunan 3 Unit Kapal Pandu 2x300 HP di Semarang.
- Layanan Perdana ekspansi wilayah operasi di Meulaboh Aceh.
- Ekspansi wilayah operasi pada Indonesia Timur di Teluk Weda, Halmahera, Maluku Utara berkolaborasi dengan PT Langlang Laju Layang.
- The transfer (inbreng) of 76.89% of the Company's shares from the issued and paid-up capital in the Company, which was originally owned by Pelindo, was transferred to PJM so that there was a change in IPCM's parent.
- Change of IPCM logo.
- Keel Laying of 2x2200 HP Tugboat Construction in Surabaya.
- Keel Laying of 3 units of 2x300 HP pilot vessels in Semarang. · Initial Service of expansion of operating area in Meulaboh Aceh.
- Expansion of operating area in Eastern Indonesia at Weda Bay, Halmahera, North Maluku in collaboration with PT Langlang Laju Layang.



1992
4 Perum Pelabuhan bertransformasi menjadi BUMN. Pilotage & Towage menjadi Divisi dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
The 4 Perum Pelabuhan transformed as SOEs. The pilotage & towage became a division of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

2008
Berdasarkan UU Pelayaran No.17/2008, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengubah dirinya dari "bagian regulator" menjadi hanya Penyelenggara Pelabuhan Umum.
Based on Shipping Act No 17/2008, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) transformed itself from "part regulator" into only a Public Port Operator.

2018
Peletakan Lunas (Keel Laying) Pembangunan 4 unit Kapal Tunda 2x2200 HP yang menggunakan dana IPO.
Keel Laying of the Construction of 4 units of 2x2200 HP Tugboats using IPO funds.

2017
Memiliki keuntungan yang terbesar dan yang paling menguntungkan selama 3 tahun berturut-turut. PT JAI targetkan IPO pada 1 Desember 22 Agustus 2017, di BEI untuk mencapainya pertumbuhan berkelanjutan.
Having 3 consecutive years of profit and becoming the largest and most profitable pilotage & towage company, PT JAI aimed for IPO on Dec 22, 2017, at IDX to achieve sustainable growth.

2013
PT JAI merupakan spin-off dari IPC dan resmi menjadi usaha mandiri sebagai anak perusahaan dari Pelindo II pada tanggal 13 Juli 2013. PT JAI mulai beroperasi pada bulan September 2014.
PT JAI was a spin-off from IPC and officially became an independent enterprise as a subsidiary of Pelindo 2 on July 13, 2013. PT JAI started its operation in September 2014

2012
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengubah nama dagangnya menjadi Indonesia Port Corporation ("IPC"), dan mempertahankannya posisinya sebagai divisi pilotage & derek.
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) transformed its trade name as Indonesia Port Corporation ("IPC"), and maintained its position as a pilotage & towage division.

2023
- Peluncuran 3 Unit Kapal Pandu dengan daya 2x300 HP di Semarang.
- Peluncuran Kapal Tunda Abimanyu V dengan daya 2x2200 HP di Surabaya.
- Penandatanganan kerjasama penyediaan sarana bantu dan prasarana pemanduan untuk pelayanan pemanduan dan penundaan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Cirebon Electric Power serta Terminal Khusus (Tersus) PT Cirebon Energi Prasarana (Kanci – Cirebon).
- Penandatanganan Kontrak Sewa Kapal untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power antara KSO PT PLN Gas & Geothermal & PT Adhi Guna Putera dengan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
- Launching of 3 units of Pilot Boat with 2x300 HP power in Semarang.
- Launching of Abimanyu V Tugboat with 2x2200 HP in Surabaya.
- Signing of cooperation for the provision of guiding facilities and infrastructure for guiding and delaying services at the Terminal for Own Use (TUKS) of PT Cirebon Electric Power and Special Terminal (Tersus) of PT Cirebon Energi Prasarana (Kanci - Cirebon).
- Signing of Ship Lease Contract for Java One Power Operational Area between KSO PT PLN Gas & Geothermal & PT Adhi Guna Puterawith PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 44 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022, maksud dan tujuan Perusahaan dalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kapal, penumpang, barang dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan.

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan:

1. Kegiatan usaha utama Perusahaan untuk menyediakan:
   a. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
   b. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum;
   c. Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/ atau hewan;

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on the article 3 of the Company's Articles of Association as amended several times and most recently the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders Number 44 dated June 23, 2022, made before Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notary in Jakarta and authorized by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 dated 8 July 2022, the purpose and objective of the Company is to conduct business in the field of organizing and exploiting ship services, passengers, goods and service activities related to port as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality services and strong competitiveness to obtain or pursue profits to increase the value of the Company..

To carry outthese aims and objectives, the company maycarry out activities:

1. The Company's main business activitiesare to provide:
   a. Sea port service activities;
   b. Domestic sea transportation for public goods;
   c. River and lake transportation for public goods and/or animals;

d. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang;
e. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
f. Angkutan laut luar negeri untuk barang umum;
g. Pergudangan dan penyimpanan;
h. Reparasi mesin untuk keperluan umum; dan
i. Penanganan kargo (bongkar muatbarang).

2. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. Industri kapal dan perahu; serta
   b. Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN SAAT INI DAN JASA PERUSAHAAN

Saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan, penundaan, pengepilan, pengangkutan laut, penyewaan kapal, dan pengoperasian kapal. Adapun fokus utama Perusahaan saat ini adalah layanan penundaan dan pemanduan kapal yang merupakan kegiatan usaha yang telah digeluti Perusahaan sejak awal berdiri hingga menjadi entitas komersial.

PRODUK DAN/ATAU JASA

Sampai dengan tahun 2023, Produk atau Jasa Utama Perusahaan terdiri dari:

1. Jasa Pelayanan Kapal
   Jasa Pelayanan Kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar Pelabuhan, dalam hal ini Produk atau Jasa Utama Perusahaan dalam Pelayanan Jasa Kapal adalah meliputi:
   a. Jasa Tunda
      Jasa Penundaan merupakan Produk atau Jasa Utama Perusahaan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal dan membantu kapal yang berolah-gerak dalam alur pelayaran, daerah labuh jangkar, maupun kolam untuk tambat atau untuk lepas dari dermaga. Proses Pelayanan Jasa Tunda Kapal wajib dilakukan terhadap seluruh kapal-kapal yang berada di wilayah perairan wajib Pandu dan Tunda dimana Perusahaan mendapatkan wilayah pelimpahan wajib Pandu dan Tunda.
   b. Jasa Pandu
      Jasa Pemanduan merupakan Produk atau Jasa Utama Perusahaan yang wajib diberikan untuk melayani kapal masuk menuju dan keluar dermaga malalui alur Pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

d. Domestic sea freight tramper for goods;
e. Domestic sea transportation for special goods;
f. Overseas liner sea freight for public goods;
g. Warehousing and storage;
h. General machine repair for public needs; and
i. Cargo handling.

2. Supporting business activities that support the main business activities are as follows:
   a. Ship and boat industry; and
   b. Repair of ships, boats and floating buildings.

CURRENT BUSINESS ACTIVITIES AND COMPANY SERVICES

Currently, the Company is involved in piloting, towing, shipping, sea transportation, ship rental, and ship operation services. The Company's primary focus is on ship towing and piloting services, which are business activities it has been engaged in since its inception until it became a commercial entity.

PRODUCTS AND/OR SERVICES

By the end of 2023, the Company's main products or services consist of:

1. Vessel Services
   Vessel Services are services for vessel operational activities from entering to leaving the Port, in this case, the Company's Main Products or Services in Vessel Services include:
   a. Towing Service
      Towing Service is the Company's Main Product or Service, which includes the activities of pushing, pulling, holding, escorting, and assisting vessels that move in the shipping lanes, anchorage areas, and ponds for anchoring or leaving the dock. The Towing Service process must be carried out for all ships in the mandatory waters of pilotage and towage where the Company gets the mandatory delegated area of pilotage and towage.
   b. Piloting Service
      Piloting Services is the Company's main product or service that must be provided to serve vessels entering and exiting the dock through the Port channel so that shipping navigation can be carried out safely, orderly, and smoothly for the safety of vessels and the environment.

c. Jasa Pengelolaan Kapal
Pelayanan Jasa Pengelolaan Kapal adalah kegiatan usaha Perusahaan bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal motor Pandu yang digunakan untuk mobilisasi petugas pandu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemanduan kapal di seluruh wilayah perairan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2.

d. Jasa Pengangkutan dan Lainnya
Pelayanan Jasa Pengangkutan Kapal adalah kegiatan usaha Perusahaan dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil produksi antar wilayah Pelabuhan dan merupakan menjadi salah satu segmen Produk atau Jasa Utama Perusahaan.

c. Vessel Management Services
Vessel Management Service is the Company's business activity in collaboration with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in the management and maintenance of the pilotage boat used for the mobilization of piloting officers in carrying out vessel piloting service tasks throughout the water area of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional.

d. Transportation and Other Services
Freight Service is the Company's business activity in the field of transportation of materials or goods and products between port areas and is one of the Company's main product or service segments.

Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal
Vessel Piloting and Towing Services

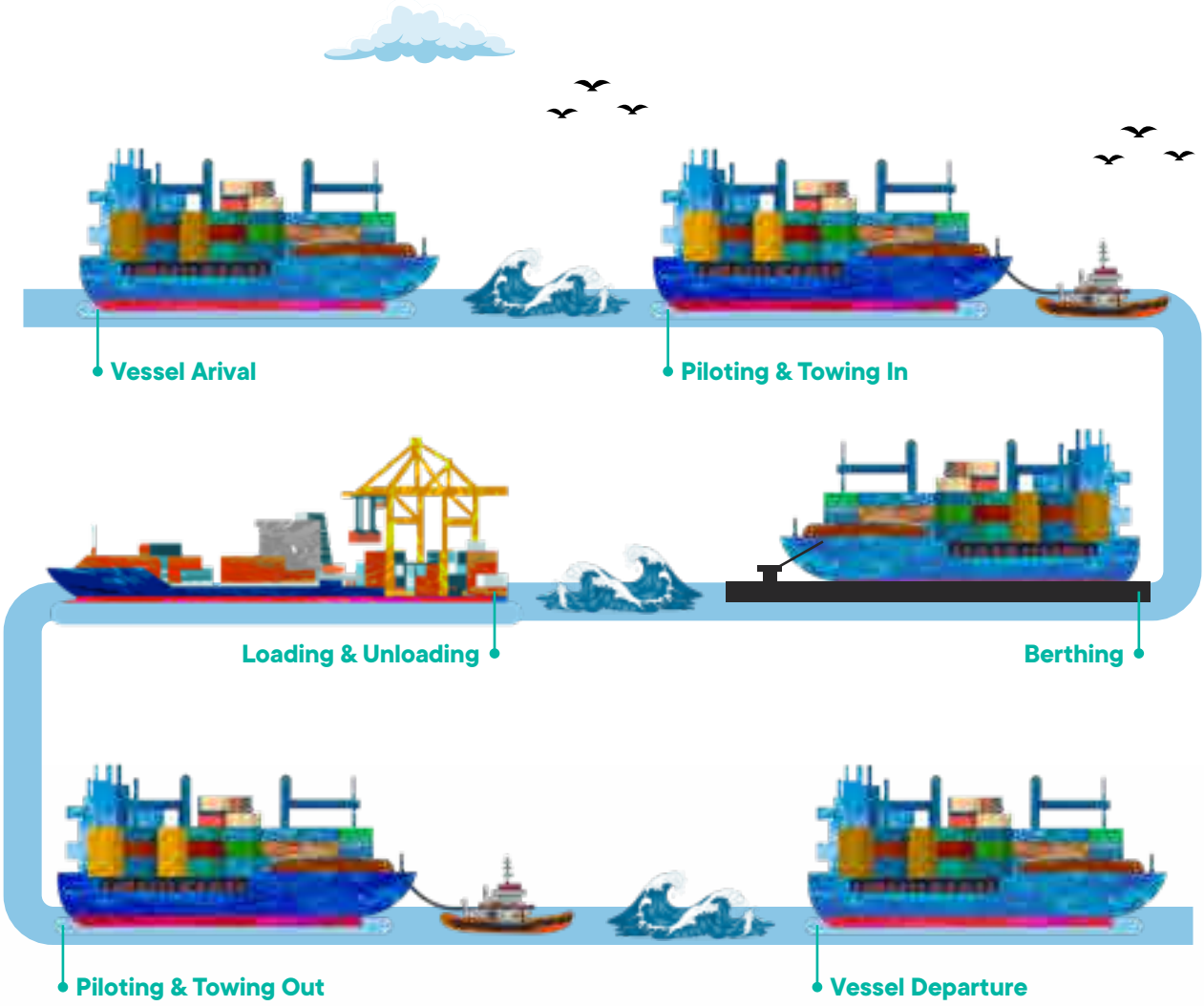


TUG

JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI
BUSINESS NETWORK AND OPERATIONAL AREA

Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta memiliki wilayah operasi di 11 (sebelas) Pelabuhan Umum milik Pelindo dan 12 (dua belas) Pelabuhan/TUKS/Tersus/Perairan di luar wilayah Pelindo.



The Company, which is headquartered in Jakarta, has operating areas in 11 (eleven) Public Ports owned by Pelindo and 12 (twelve) Ports/TUKS/Tersus/Waters outside the Pelindo area.

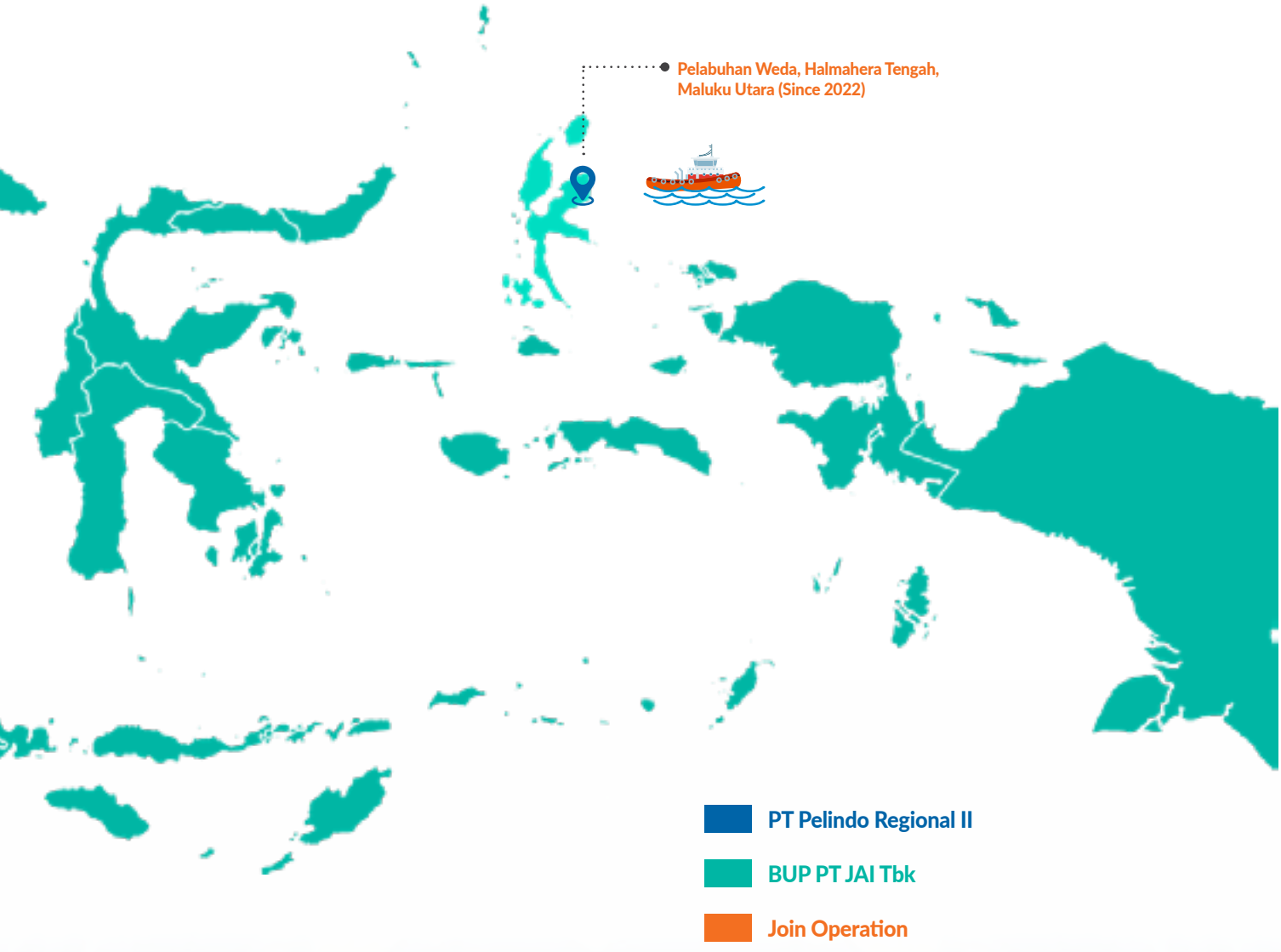

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUES

VISI » VISION

"Menjadi penyedia jasa marine terdepan dalam ekosistem maritim Indonesia serta global."

"The leading provider of marine services in the national maritime ecosystem of Indonesia and global landscape."



PENJELASAN VISI

Penyedia Jasa Marine Terdepan

1. Salah satu perusahaan terbesar dalam industri marine di Indonesia
   JAI akan menjadi salah satu jajaran perusahaan terbesar di seluruh Indonesia yang berfokus dalam penyediaan jasa marine dalam ekosistem kepelabuhanan Indonesia. Pengembangan bisnis akan difokuskan pada pelayanan kapal, pengangkutan, dan jasa-jasa marine lainnya.

2. Mampu menyediakan layanan marine dengan kualitas yang baik kepada seluruh pelanggan
   Dengan pengalaman menyediakan layanan marine kepada pelanggan baik yang melewati pelabuhan milik Pelindo maupun luar Pelindo selama lebih dari 10 tahun, JAI telah memberikan kualitas pelayanan dan manajemen pelanggan yang optimal dan terus ditingkatkan kepada seluruh pelanggan.

3. Mampu menyediakan layanan kepelabuhanan yang terintegrasi
   Terintegrasinya layanan kepelabuhanan JAI memberikan implikasi bahwa layanan kepelabuhanan yang diberikan JAI akan terpadu dengan layanan kepelabuhanan lainnya. Bersama denagn Subholding/Anak Perusahaan lainnya ataupun pemegang BUP lainnya, keterpaduan layanan ini dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan untuk menggunakan jasa Pelindo Group, khususnya JAI.

EXPLANATION OF OUR VISION

Leading Marine Service Provider

1. One of the largest companies in the marine industry in Indonesia
   JAI will focus on providing marine services within the Indonesian port ecosystem. Business development will emphasize vessel services, transportation, and other marine services.

2. Capable of providing marine services in the best qualaity to all customers
   With an experience in providing marine services to customers within and outside Pelindo's ports for over 10 years, JAI has consistently delivered optimal service quality that will always be improved to all customers.

3. Capable of providing an integrated port services

   The integrated port services of JAI means that it will be seamlessly integrated with other port services. This integration, in collaboration with other Subholdings/ Subsidiaries or other BUP holders, adds value for customers utilizing Pelindo Group services, particularly those offered by JAI.

Dalam Ekosistem Maritim Indonesia serta Global

1. JAI sebagai penyedia layanan kepelabuhanan yang tidak hanya beroperasi di Indonesia, namun juga global
   Adanya rencana aksi korporasi atas PMS oleh JAI akan memperluas wilayah operasional jasa pelayanan kapal dalam Pelindo menjangkau seluruh Indonesia, baik di Regional 1, 2, 3, dan 4. Ditambah dengan rencana JAI untuk melakukan ekspansi pasar di luar Indonesia, yang menggambarkan tekad JAI untuk mengakselerasi pertumbuhan perusahaan tidak hanya secara nasional, namun juga global.

In the Indonesian and Global Maritime Ecosystem

1. JAI is not only a port service provider operating in Indonesia but also globally
   The existence of a corporate action plan for PMS by JAI will expand Pelindo's ship services operational area to cover all of Indonesia, including Regions 1, 2, 3, and 4. Combined with JAI's plans to penetrate markets outside Indonesia, this illustrates JAI's commitment to accelerating company growth not only domestically but also internationally.

MISI » MISSION

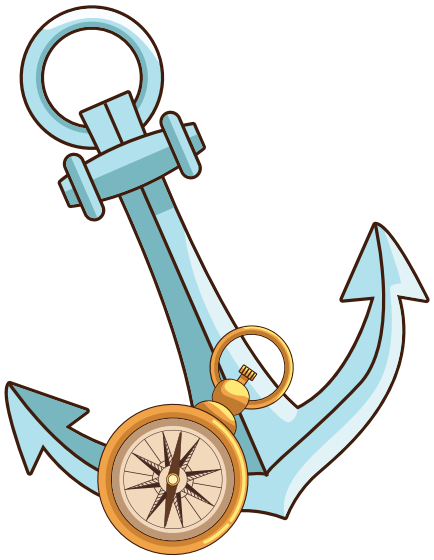

"Menyediakan jasa marine yang andal, aman, berdaya saing, dan berkelanjutan demi memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan"

"Providing reliable, safe, competitive, and sustainable marine services to maximize added value for all stakeholders"

PENJELASAN MISI

- JAI menyediakan layanan marine yang tersertifikasi serta sesuai dengan standar kemanan yang berlaku
- JAI menyediakan layanan marine yang unggul dan terintegrasi sebagai sebuah solusi jasa kepelabuhanan
- JAI menyediakan layanan marine yang tersebar dengan jangkauan Indonesia dan global, baik di Pelabuhan milik Pelindo, maupun non-Pelindo
- JAI berkomitmen untuk melakukan upaya ramah lingkungan pada rantai nilai perusahaan
- JAI berkomitmen untuk memaksimalkan penciptaan nilai untuk pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola
- JAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan menggunakan teknologi mutakhir serta memaksimalkan aksesibilitas melalui integrasi produk dan di sepanjang rantai nilai logistik untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra
- JAI berkomitmen dalam menjadi lingkungan kerja yang suportif dan konstruktif dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan seluruh pegawai

EXPLANATION OF OUR VISION

- JAI provides certified marine services that comply with applicable safety standards
- JAI offers superior and integrated marine services as a port service solution
- JAI provides marine services spread across Indonesia and globally, both at Pelindo-owned and non-Pelindo ports

- JAI is committed to making environmentally friendly efforts in the company's value chain
- JAI is committed to maximizing value creation for shareholders through improved financial performance and optimized governance management
- JAI is committed to continuously improving service quality by utilizing the latest technology and maximizing accessibility through product integration along the logistics value chain to meet customer and partner satisfaction

- JAI is committed to fostering a supportive and constructive work environment to enhance the competence and skills of all employees

- JAI berkomitmen dalam memastikan arus perdagangan dalam mendukung perekonomian Indonesia dengan efisiensi biaya logistik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Review Visi dan Misi oleh Manajemen Kunci

Perusahaan senantiasa menetapkan Visi dan Misi yang ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Visi dan Misi Perusahaan saat ini masih relevan dengan arah perkembangan bisnis Perusahaan, sebagaimana yang telah disetujui melalui Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.

Strategi Pencapaian Visi dan Misi Perusahaan

Sebagai langkah upaya dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Perusahaan menerapkan beberapa langkah strategis sesuai dengan program kerja manajemen, antara lain:

1. Unlocking Business Growth & New Opportunities
   a. Melakukan integrasi bisnis dengan perusahaan marine pada Pelindo Group dan non Pelindo Group
   b. Menstandardisasi proses operasional jasa marine secara end-to-end pascaakuisisi
   c. Memperluas jaringan kemitraan dengan pasar existing (Tersus pertambangan batu bara, LnG, dan nikel)
   d. Merintis perluasan jaringan kemitraan dengan pasar baru (Tersus industri pengolahan hasil pertambangan dan milik Kementerian/Lembaga)
   e. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pengelolaan kemitraan, baik komersial maupun operasional
   f. Membangun produk yang terkait jasa marine lainnya, seperti: layanan Marine Advisory & Consultancy dan Small LnG Shipping
   g. Membangun produk kemaritiman yang terintegrasi sebagai onestop-solution dalam klaster SPJM seperti: Layanan Shipto-Ship
   h. Mengimplementasi Key Account Management (KAM) yang terintegrasi
2. Accelerating Operational Excellence
   a. Melakukan investasi pada kapal tunda melalui produksi secara mandiri
   b. Modernisasi kapal tunda,sarana prasarana, dan teknologi pendukung bisnis marine lainnya
   c. Optimalisasi aset kapal tunda
   d. Mengimplementasi Inventori Terintegrasi
   e. Menerapkan aktivitas ramah lingkungan dalam upaya pengurangan emisi karbon
   f. Mengimplementasi digitalized marine system
   g. Meningkatkan kapabilitas SDM dalam ruang lingkup operasional pelayanan jasa
3. Enterprise Support Enchancement
   a. Melakukan penyesuaian fungsi bisnis marine pada struktur organisasi
   b. Mengimplementasi KPI terintegrasi untuk mengukur kinerja

- JAI is committed to ensuring efficient trade flows to support the Indonesian economy, reducing logistics costs to improve people's welfare

Review of Vision and Mission by Key Management

The Company consistently formulates a Vision and Mission, subject to periodic review involving the Board of Directors, Board of Commissioners, and other management levels to ensure their alignment with the Company's business development. The Board of Commissioners and Directors confirm that the Company's current Vision and Mission remain in line with the direction of the Company's business development, approved in the 2023 Company Budget and Work Plan (RKAP).

Company Vision and Mission Achievement Strategy

In an effort to realize the established vision and mission, the Company is going through several strategic initiatives aligned with the management program as follows:

1. Unlocking Business Growth & New Opportunities
   a. Conduct business integration with marine companies in Pelindo Group and non Pelindo Group
   b. Standardize the end-to-end operational process of marine services post-acquisition
   c. Expand partnership network with existing markets (coal, LnG, and nickel mining)
   d. Pioneered the expansion of partnership networks with new markets (Tersus mining products processing industry and owned by Ministries/Institutions)
   e. Improve partnership management capability and capacity, both commercial and operational
   f. Build products related to other marine services, such as: Marine Advisory & Consultancy and Small LnG Shipping services
   g. Build integrated maritime products as onestop-solution in SPJM cluster such as: Shipto-Ship Services
   h. Implementing integrated Key Account Management (KAM)
2. Accelerating Operational Excellence
   a. Investing in tugboats through independent production
   b. Modernization of tugboats, infrastructure facilities, and other marine business supporting technologies
   c. Optimization of tugboat assets
   d. Implementing Integrated Inventory
   e. Implementing environmentally friendly activities in an effort to reduce carbon emissions
   f. Implementing digitalized marine system
   g. Improving HR capabilities in the scope of service operations
3. Enterprise Support Enchancement
   a. Adjusted the marine business function in the organizational structure
   b. Implemented integrated KPIs to measure performance

c. Mengimplementasi program L&D terintegrasi untuk standardisasi dan peningkatan kualitas SDM
d. Mengimplementasi sentralisasi knowledge management bisnis marine
e. Implementasi dan penguatan budaya JAI
f. Mengimplementasi Sistem Single Enterprise Resource Planning (ERP)
g. Pembaruan Marine Digitalization Roadmap

c. Implement an integrated L&D program to standardize and improve the quality of human resources
d. Implementing centralization of marine business knowledge management
e. Implementation and strengthening of JAI culture
f. Implementation of Single Enterprise Resource Planning (ERP) System
g. Marine Digitalization Roadmap update

BUDAYA PERUSAHAAN

Perusahaan mengadopsi Budaya/Tata Nilai "AKHLAK" yang secara berurutan merupakan akronim dari (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Pelindo 2 melalui surat No. OT.02.02/23/7/I/BDP/BDM/PI.II. 2020 tanggal 23 Juli 2020 menetapkan *One Single Core Values* AKHLAK di Pelindo 2 Group. Nilai Perusahaan (*core values*) disusun berdasarkan aspirasi dan prinsip-prinsip dasar perusahaan yang diyakini sangat penting terhadap kinerja dan pertumbuhan usaha. Dengan adanya pemahaman yang sama di antara manajemen dan pegawai, diharapkan akan membentuk budaya kerja Perusahaan yang kondusif dan inovatif serta dapat mendongkrak kinerja Perusahaan.

CORPORATE CULTURE

The Company adopts the "AKHLAK" Culture/Values, an acronym representing Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative. Pelindo 2, through letter No. OT.02.02/23/7/I/BDP/BDM/PI.II. 2020 dated July 23, 2020, asserted One Single Core Values, AKHLAK, across the Pelindo 2 Group. These values are formulated based on the company's aspirations and fundamental principles considered crucial for business performance and growth. By fostering a shared understanding between management and employees, it is expected that a conducive and innovative work culture will be cultivated, enhancing overall performance of the Company.



Amanah | Trustworthy

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan
We uphold the trust given

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh pada nilai moral dan etika
- Keep promises and commitments
- Responsible for the duties, decisions and actions carried out
- Stick to moral and ethical values



Kompeten | Competent

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
We continue to learn and develop capabilities

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik
- Improve self-competence to respond to ever-changing challenges
- Help others learn
- Complete duties with the best quality



Harmonis | Harmonious

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan
We care for each other and value differences

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- Respect everyone regardless of their background
- Likes to help others
- Build a conducive work environment



Loyal | Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara
We are dedicated and put the interests of the Nation and the State first

- Menjaga nama baik sesama pekerja, pempinan, BUMN, dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika
- Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State
- Willing to sacrifice to achieve a greater goal
- Obey the leaders as long as it is not against the law and ethics



Adaptif | Adaptive

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan
We continue to innovate and are enthusiastic about moving or facing changest

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif
- Quickly adjust to being better
- Continuously making improvements to keep up with technological developments
- Act proactively



Kolaboratif | Collaborative

Kami membangun kerja sama yang sinergis
We build synergistic cooperation

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Tebuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
- Provide opportunities for various parties to contribute
- Proven in working together to generate added value
- Mobilize the use of various resources for common goals

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan (Corporate Culture)

Budaya perusahaan memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia perusahaan untuk mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Dalam melakukan proses pengembangan untuk mewujudkan visi perusahaan "menjadi promotor pertumbuhan bisnis melalui layanan kemudi dan derek kelas dunia dalam ekosistem pelabuhan".

Nilai-nilai IPCM merupakan komitmen Perusahaan untuk mengimplementasikan visi dan misinya berdasarkan standar global dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Nilai-nilai IPCM yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan nilai-nilai tersebut harus diketahui dan menjadi pedoman seluruh pekerja dalam beraktivitas. IPCM mendefinisikan lima nilai perusahaan yang dapat digunakan oleh seluruh pekerja sebagai pedoman dalam aktivitas sehari-hari.

Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan

Program budaya perusahaan IPCM tahun 2023 terdiri dari penyusunan change catalyst team, updating sistem pendukung kelancaran proses bisnis perusahaan, updating kebijakan dan SOP pendukung kelancaran proses bisnis perusahaan, penuansaan lingkungan kerja dengan kaitannya penerapan core value perusahaan.

JAI Ngajak Bicara (Jangkar) merupakan program rutin yang dilaksanakan sebagai sosialisasi budaya AKHLAK dilingkungan IPCM. Pelaksanaan Jangkar di tahun 2023 dengan tema Adaptif : Transisi berawal dari kualitas diri , Kompeten : 10 Tahun, JAI Konsisten, Loyal : Evaluasi kinerja dan edukasi finansial.

Statement on Corporate Culture

Corporate culture plays an important role in managing the Company's human resources to achieve the Company's vision, mission and goals. In carrying out the development process to realize the company's vision "to be a promoter of business growth through world-class steering and towing services in the port ecosystem".

IPCM's values are the Company's commitment to implement its vision and mission based on global standards and implement good corporate governance. IPCM values consist of Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative and these values must be known and become the guidelines for all employees in their activities. IPCM defines five corporate values that can be used by all employees as guidelines in daily activities.

Socialization and Internalization of Corporate Culture

IPCM's corporate culture program in 2023 consists of the preparation of a change catalyst team, updating the support system for the smooth running of the company's business processes, updating policies and SOPs to support the smooth running of the company's business processes, managing the work environment in relation to the application of the company's core values.

JAI Ngajak Bicara (Anchor) is a routine program implemented as a socialization of AKHLAK culture in the IPCM environment. The implementation of Jangkar in 2023 with the theme Adaptive: Transition starts from self quality, Competent: 10 Years, JAI Consistent, Loyal: Performance evaluation and financial education.



MAKNA LOGO PERUSAHAAN
THE MEANING OF THE COMPANY'S LOGO



1	Logo menggambarkan bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat dan simpang siur, yang merepresentasikan kesiapan PT Jasa Armada Indonesia Tbk dalam memberikan pelayanan terbaik pada bidang Jasa Pilotage and Towage guna mendukung terwujudnya tol laut Indonesia. The logo portrays the shape of a busy, crowded, and confusing route or path, which represents the readiness of PT Jasa Armada Indonesia Tbk to provide the best service in the field of Pilotage and Towage Services to support the realization of the Indonesian sea toll.
2	Huruf P yang menjadi inisial Pelindo dan membentuk pola ikan menggambarkan PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang merupakan bagian dari Pelindo Grup berkomitmen untuk terus menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya. The letter P, which becomes Pelindo's initial and forms a fish pattern, illustrates that PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as part of the Pelindo Group, is committed to continuing to protect Indonesia's natural wealth by continuously supporting the preservation of marine ecosystems in its operational areas.
3	Warna BIRU menggambarkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme dan pengabdian. Warna MERAH menggambarkan aksi, antusias, kecepatan, keberanian dan semangat PT JAI Tbk dalam memberikan pelayanan *stakeholders.* The color BLUE represents stability, trust, integrity, professionalism and devotion. The RED color represents the action, enthusiasm, speed, courage, and spirit of PT JAI Tbk in providing services to stakeholders.
4	Jasa Armada Indonesia menggambarkan nama dari perusahaan yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang bergerak pada industri kepelabuhanan yaitu bidang Jasa Pilotage and Towage. Jasa Armada Indonesia describes the name of the Company, PT Jasa Armada Indonesia Tbk, which is engaged in the port industry, namely the field of Pilotage and Towage Services.
5	Jasa Maritim dengan warna tulisan hijau toska mempresentasikan PT Jasa Armada Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dibawah subholding Pelindo Jasa Maritim. Jasa Maritim with tosca green writing color represents PT Jasa Armada Indonesia Tbk as a subsidiary under Pelindo Jasa Maritim sub-holding.

Warna Tosca adalah perpaduan warna biru dan hijau yang merupakan warna alam dan laut indonesia yang terkenal luas dan cantik. Warna ini juga melambangkan kreativitas dan kemajuan teknologi dalam menopang kebutuhan mode transportasi di laut Indonesia.

Tosca is a combination of blue and green colors, which are the colors of nature and the Indonesian sea, which is famous for being large and beautiful. This color also symbolizes creativity and technological advancement in supporting the needs of transportation modes at sea in Indonesia.

TAGLINE PERUSAHAAN

COMPANY TAGLINE

NAVIGATING MARINE EXCELLENCE

Menggambarkan JAI sebagai perusahaan penyedia jasa marine yang menavigasi pertumbuhan ekosistem marine di Indonesia dan global.

Describes JAI as a marine services company that navigates the growth of the marine ecosystem in Indonesia and globally.



KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI
MEMBERSHIP IN ASSOCIATION

Untuk memperkuat bisnisnya, IPCM telah tergabung dalam keanggotaan organisasi, di antaranya adalah:

To strengthen its business, IPCM has become a member of various organizations as follows:

No	Nama Asosiasi Name of Association	Posisi Position
Nasional National		
1.	Indonesian National Shipowners' Association (INSA)	Anggota Member
2.	Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ASBUPI)	Anggota Member
3.	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Anggota Member



STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur Organisasi Perusahaan per 31 Desember 2023, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. HK-568 tanggal 1 September 2021 tentang Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk sebagaimana terlampir di bawah ini.

The Company's Organizational Structure, as of December 31, 2023, was ratified by the Decree of the Board of Directors No. HK-568 dated September 1, 2021, regarding the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as attached below.

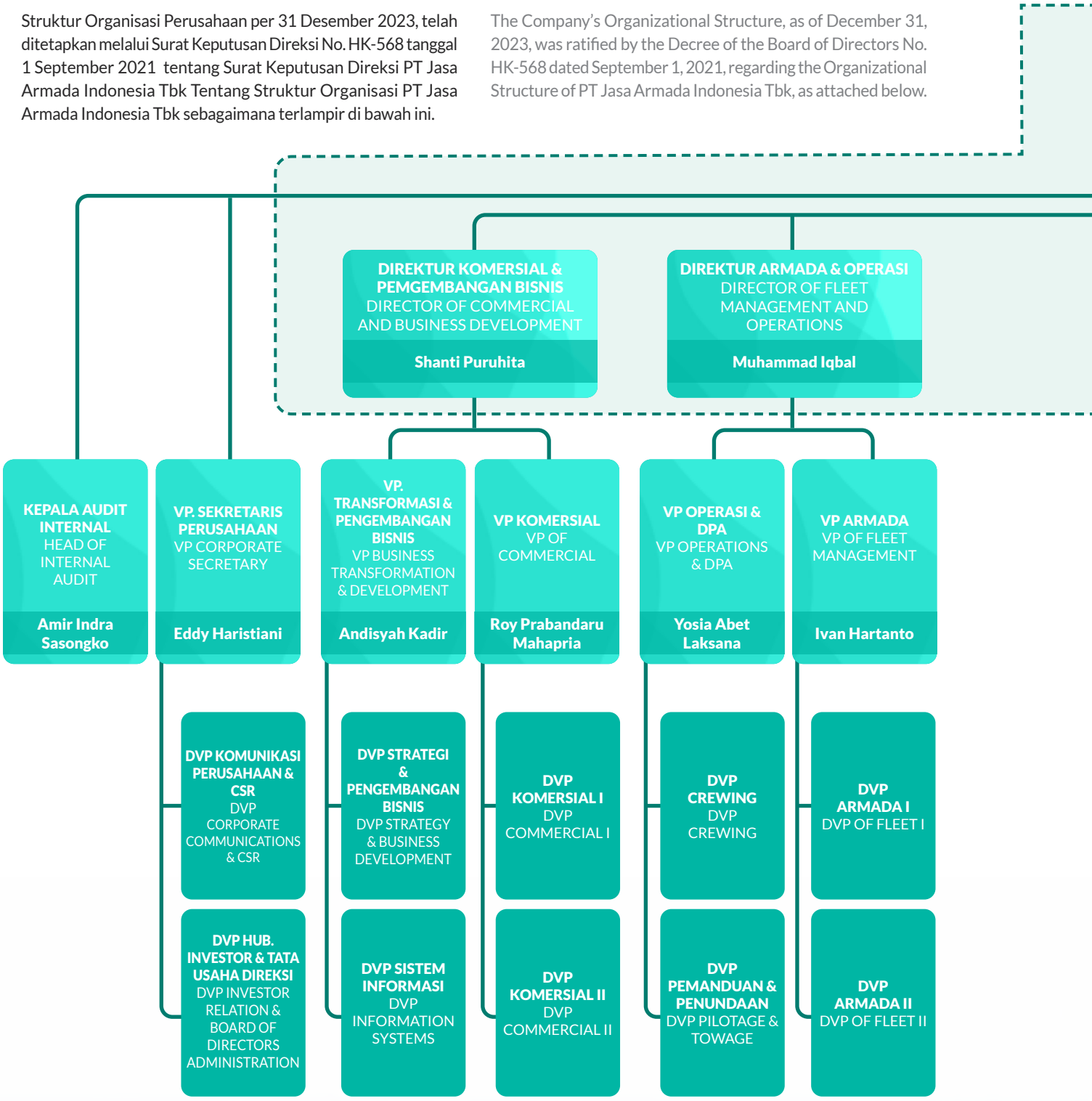

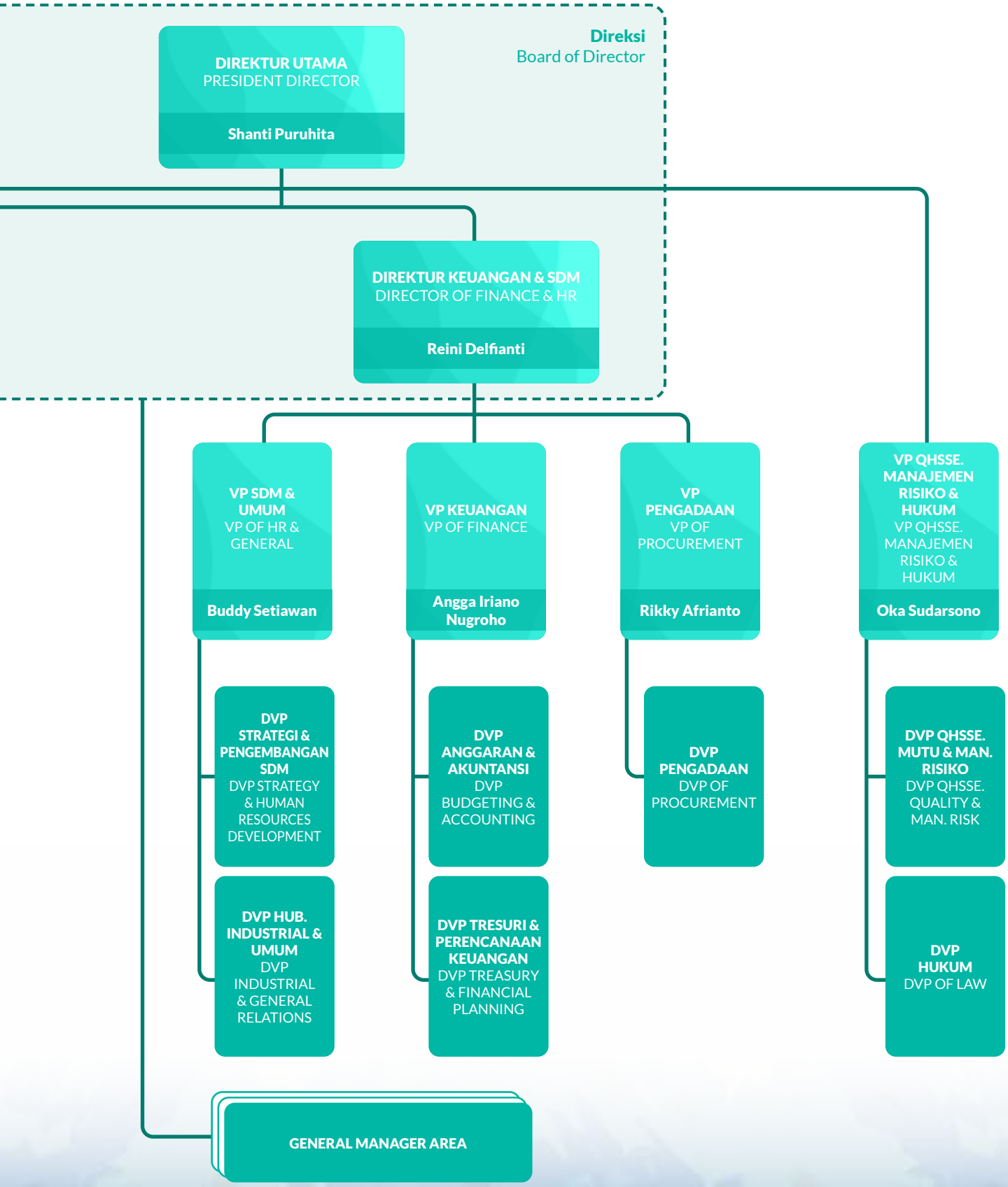
Direksi
Board of Director
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR
Shanti Puruhita
DIREKTUR KEUANGAN & SDM
DIRECTOR OF FINANCE & HR
Reini Delfianti
VP SDM & UMUM
VP OF HR & GENERAL
Buddy Setiawan
VP KEUANGAN
VP OF FINANCE
Angga Iriano Nugroho
VP PENGADAAN
VP OF PROCUREMENT
Rikky Afrianto
VP QHSSE. MANAJEMEN RISIKO & HUKUM
VP QHSSE. MANAJEMEN RISIKO & HUKUM
Oka Sudarsono
DVP STRATEGI & PENGEMBANGAN SDM
DVP STRATEGY & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
DVP HUB. INDUSTRIAL & UMUM
DVP INDUSTRIAL & GENERAL RELATIONS
DVP ANGGARAN & AKUNTANSI
DVP BUDGETING & ACCOUNTING
DVP TRESURI & PERENCANAAN KEUANGAN
DVP TREASURY & FINANCIAL PLANNING
DVP PENGADAAN
DVP OF PROCUREMENT
DVP QHSSE. MUTU & MAN. RISIKO
DVP QHSSE. QUALITY & MAN. RISK
DVP HUKUM
DVP OF LAW
GENERAL MANAGER AREA

PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan, sehubungan dengan wafatnya salah satu anggota Komisaris Independen Perusahaan, yakni Bapak Hary Kriswanto pada tanggal 24 Juni 2023.

Throughout 2023 and until this Annual Report is signed, there was a change to the composition of the Company's Board of Commissioners, in connection with the death of one of the Company's Independent Commissioners, namely Mr. Hary Kriswanto on June 24, 2023.

Berikut kronologi perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana terlampir berikut ini.

The following is the chronology of changes to the composition of the Company's Board of Commissioners.

Kronologi Perubahan Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan
Chronology of Changes to the Composition of the Company's Board of Commissioners

Jabatan Position	1 Januari – 24 Juni 2023 January 1 – June 24, 2023	24 Juni – 31 Desember 2023 June 24 – December 31, 2023
Komisaris Utama President Commissioner	Zuhri Iryansyah	Zuhri Iryansyah
Komisaris Commissioner	R.R. Dewi Ariyani	R.R. Dewi Ariyani
Komisaris Independen Independent Commissioner	Bay Mokhamad Hasani	Bay Mokhamad Hasani
Komisaris Independen Independent Commissioner	Hary Kriswanto	

Adapun profil Dewan Komisaris yang menjabat per 31 Desember 2023, sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

The profiles of the Board of Commissioners in office as of December 31, 2023, and until the signing of this Annual Report, are attached below.



Komisaris Utama
President Commissioner

Masa Jabatan:
13 Oktober 2020–saat ini,
Periode Pertama
Term of Office:
October 13, 2020–present,
First Term

Zuhri Iryansyah

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia
Usia 54 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Medan, 15 Juli 1969
Indonesian citizen
Aged 54 years old as of Desember 31, 2023
Born in Medan, July 15, 1969

Domisili | Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan Pertama | Legal Basis of Appointment
Akta Notaris No. 13 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 13, dated October 13, 2020, drawn up by Notary Fathiah Helmi, SH, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Changes to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History
- S2 Coastal Engineering and Port Development, UNESCO IHE - DELFT, Belanda (2011)
- S1 Teknik Sipil, Universitas Trisakti, Jakarta (1993)
- Master of Coastal Engineering and Port Development, UNESCO IHE - DELFT Netherlands (2011)
- Bachelor of Civil Engineering, Universitas Trisakti, Jakarta (1993)

Riwayat Pekerjaan | Employment History
- Direktur Teknik PT Pelindo Multi Terminal (2023–2024)
- Direktur Komersial dan Operasi di PT Pelindo Jasa Maritim (2021–2023)
- Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020–2021)
- SVP Manajemen Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019–2020)
- Koordinator Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2019)
- Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017)
- Direktur Konstruksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015–2017)
- Direktur Teknik PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014–2015)
- Director of Engineering of Pelindo Multi Terminal (2023–2024)
- Director of Commercial and Operation of PT Pelindo Jasa Maritim (2021–2023)
- Director of Engineering of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020–2021)
- SVP of Strategic Project Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019–2020)
- Coordinator of Strategic Project of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2019)
- Director of Commercial and Business Development of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017)
- Director of Construction of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015–2017)
- Director of Engineering of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014–2015)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information
Beliau memiliki jabatan rangkap di luar IPCM, yakni sebagai Direktur Teknik PT Pelindo Multi Terminal, sementara beliau tercatat tidak memiliki jabatan rangkap di lingkup IPCM, baik sebagai Ketua maupun Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.
Outside of IPCM, he holds another position, serving as the Director of Engineering of PT Pelindo Multi Terminal, and within IPCM, he is not recorded to have other positions, either as the Chairman or a Member of Committees under the Board of Commissioners.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
He has no affiliations with any members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM
Beliau tidak memiliki saham IPCM selama tahun buku.
During the financial year, he did not own any IPCM shares.



Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan:
14 April 2022–saat ini,
Periode Pertama
Term of Office:
October 14, 2022–present,
First Term

R.R. Dewi Ariyani

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia
Usia 53 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Surabaya, 13 Desember 1969
Indonesian citizen
Aged 53 years old as of Desember 31, 2023
Born in Surabaya, December 13, 1969

Domisili | Domicile
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan Pertama | Legal Basis of Appointment
Akta Notaris No. 28 tanggal 14 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 28, dated April 14, 2022, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History
- S2 Bidang Akuntansi di Universitas Indonesia
- S1 Akuntansi di Universitas Jendral Sudirman
- Master of Accounting from the University of Indonesia
- Bachelor of Accounting from General Sudirman University

Riwayat Pekerjaan | Employment History
- Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022–Sekarang)
- Direktur Keuangan & SDM PT Reasuransi Indonesia Utama (2020–2021)
- Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT Rekayasa Industri (2018–2020)
- Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT Pelabuhan Indonesia II1 (Persero) (2016–2017)
- Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT PANN Pembiayaan Maritim (2012–2017)
- Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT Indah Karya (Persero) (2007–2012)
- Sekretaris Dekom / Dewan Pengawas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (2002–2007)
- Staf Dekom / Dewas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998–2002)
- Commissioner of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2022—present)
- Director of Finance & HR of PT Reasuransi Indonesia Utama (2020—2021)
- Commissioner / Member of Supervisory Board of PT Rekayasa Industri (2018–2020)
- Commissioner / Member of Supervisory Board of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016–2017)
- Commissioner / Member of Supervisory Board of PT PANN Pembiayaan Maritim (2012–2017)
- Commissioner / Member of Supervisory Board of PT Indah Karya (Persero) (2007–2012)
- Secretary of the Board of Commissioners / Supervisory Board of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (2002–2007)
- Staff of the Board of Commissioners / Supervisory Board of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998–2002)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information
Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di luar IPCM, sementara saat ini beliau tercatat menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko di IPCM.
He does not hold other position outside IPCM, while within IPCM, he is the Chairman of Risk Management Committee.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
She has no affiliations with any members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM
158.100 lembar saham.
158,100 shares



Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan:
15 Juli 2020–saat ini,
Periode Pertama
Term of Office:
15 Juli 2020–present,
First Term

Bay Mokhamad Hasani

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia
Usia 66 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Rangkasbitung, 23 Oktober 1957
Indonesian citizen
Aged 66 years old as of Desember 31, 2023
Born in Rangkasbitung, October 23, 1957

Domisili | Domicile
Tangerang, Banten, Indonesia
Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan Pertama | Legal Basis of Appointment
Akta Notaris No. 24 tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 24, dated July 15, 2020, drawn up by Notary Fathiah Helmi, SH, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Changes to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History
- Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)
- Sekolah Tinggi Manajemen (tahun lulus)
- School of Sailing (STIP)
- School of Management

Riwayat Pekerjaan | Employment History
- Komisaris Independen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (2018–2021)
- Plt Dirjen Perhubungan Laut. (2017)
- Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (2016–2017)
- Kepala Kantor Utama Syahbandar Tanjung Perak. (2016)
- Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. (2015–2016)
- Independent Commissioner of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (2018–2021)
- Acting Director General of Sea Transportation (2017)
- Director of Traffic and Sea Transportation of the Ministry of Transportation (2016–2017)
- Head of Tanjung Priok Main Harbormaster Office (2016)
- Head of Tanjung Priok Port Authority (2015–2016)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information
Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di luar IPCM, sementara saat ini beliau tercatat menjabat sebagai Ketua Komite Audit di IPCM.
He does not hold other position outside IPCM, while within IPCM, he is the Chairman of Audit Committee.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships
Beliau belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen. Adapun Komisaris Independen IPCM, tidak memiliki benturan kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Komisaris Independen.
He has not served for more than 2 (two) terms as an Independent Commissioner. The Independent Commissioner of IPCM has no conflicts of interest or personal relationships that could have a negative impact or pose a conflict of interest on the Company. Furthermore, he fulfills the requirements to be appointed as an Independent Commissioner.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM
Beliau tidak memiliki saham IPCM selama tahun buku..
During the financial year, he did not own any IPCM shares.

*Status Independensi Dewan Komisaris Independen dapat dilihat pada bagian Komisaris Independen dan independensi Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.
The Independence Status of the Independent Commissioner is available in the section on Independent Commissioners and the Independence of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.



PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sepanjang tahun 2023, sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi Perusahaan. Adapun profil Direksi yang menjabat per 31 Desember 2023, sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Throughout 2023, until the signing of this Annual Report, there have been no changes to the composition of the Company's Board of Directors. The profile of the Board of Directors in office as of December 31, 2023, until the signing of this Annual Report, is attached below.



Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director concurrently as Director of Commercial and Business Development

Masa Jabatan:
6 Desember 2022–saat ini, Periode Pertama
Term of Office:
December 6, 2022–present, First Term

Shanti Puruhita*

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia
Usia 46 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Surabaya, 12 Mei 1977
Indonesian citizen
Aged 46 years old as of Desember 31, 2023
Born in Surabaya, May 12, 1977

Domisili | Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan Pertama | Legal Basis of Appointment
Akta Notaris No. 24 tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 24, dated July 15, 2020, drawn up by Notary Fathiah Helmi, SH, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Changes to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Penunjukan Selanjutnya | Subsequent Appointment History
- Akta Notaris Nomor 33 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Akta Notaris Nomor 16 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
- Notarial Deed Number 33, dated June 17, 2021, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Resolution Statement of the Annual General Meeting of Shareholders.
- Notarial Deed Number 16, dated December 6, 2022, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Resolution Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History
- S2 - Kuhne Logistic University, Hamburg Jerman - Jurusan Logistik (2014)
- S1 - Universitas Airlangga - Hukum, (1999)
- Master of Logistics from Kuhne Logistic University, Hamburg, German (2014)
- Bachelor of Law from Airlangga University (1999)

Riwayat Pekerjaan | Employment History
- Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022–Sekarang)
- Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020–2022)
- EVP Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2017–2020)
- VP Hubungan Lembaga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2016–2017)
- Direktur Komersial PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. (2015–2016)
- Senior Manager Layanan SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2012–2015)
- President Director of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022–Present)
- Director of Commercial and Business Development of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020–2022)
- EVP Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2020)
- VP Institutional Relations of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016–2017)
- Director of Commercial of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015–2016)
- Senior Manager of HR and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2012–2015)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification
- "Leader as a Coach" – oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), di Jakarta (tidak ada nomor sertifikasi)
- "APLOG Logistics Forum Webinar (Diversification and Risk Management in Logistics Industry)" – oleh PT Angkasa Pura Logistik, di Jakarta (tidak ada nomor sertifikasi)
- "Pelatihan Audit Berbasis Risiko" – oleh PT PMLI, di Surabaya (Nomor: 203517906200210)
- "Leader as a Coach" – by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), in Jakarta (no certification number)
- "APLOG Logistics Forum Webinar (Diversification and Risk Management in Logistics Industry)" – by PT Angkasa Pura Logistik, in Jakarta (no certification number)
- "Risk-Based Audit Training" – by PT PMLI, in Surabaya (Certification Number: 203517906200210)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di luar Perusahaan, sementara saat ini beliau juga merangkap sebagai Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis di IPCM sejak tahun 2022.
She does not hold other position outside the Company, while within IPCM, she is the Act. Director of Commercial and Business Development since 2022.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
She has no affiliations with any members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM
492.100 lembar saham
492,100 shares

*) Beliau juga menjabat sebagai Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis.
*) She is also the Act. Director of Commercial and Business Development.



Direktur Armada dan Operasi
Director of Fleet Management and Operations

Masa Jabatan:
17 Juni 2021–saat ini, Periode Pertama
Term of Office:
June 17, 2021–present, First Term

Muhammad Iqbal

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia
Usia 55 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Jakarta, 14 Agustus 1968
Indonesian citizen
Aged 55 years old as of Desember 31, 2023
Born in Jakarta, August 14, 1968

Domisili | Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan Pertama | Legal Basis of Appointment
Akta Notaris Nomor 13 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed Number 33, dated June 17, 2021, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Resolution Statement of the Annual General Meeting of Shareholders.

Riwayat Penunjukan Selanjutnya | Subsequent Appointment History
Akta Notaris Nomor 33 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Notarial Deed Number 33, dated June 17, 2021, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Resolution Statement of the Annual General Meeting of Shareholders.

Riwayat Pendidikan | Educational History
- S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran - Nautica, tahun 2006
- S1 - Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran - Nautica, tahun 1995
- Master of Nautical Science from College of Nautical Science (2006)
- Bachelor of Nautical Science from College of Nautical Science (1995)

Riwayat Pekerjaan | Employment History
- Direktur Armada dan Operasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2021-Sekarang)
- VP Pelayanan Kapal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020)
- Plt. Direktur Armada dan Teknik PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2018-2019)
- Director of Fleet Management and Operation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2021-Present)
- VP Vessel Services of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020)
- Act. Director of Fleet Management and Engineering of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2018-2019)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification
- "Qualified Chief Risk Officer (QRCO)" – oleh PT PMLI, di Bogor (Nomor: 214816812161014)
- "Pelatihan Audit Berbasis Risiko" – oleh PT PMLI, di Surabaya (tidak ada nomor sertifikasi)
- "APLOG Logistics Forum Webinar (Diversification and Risk Management in Logistics Industry)" – oleh PT Angkasa Pura Logistik, di Jakarta (tidak ada nomor sertifikasi)
- "Qualified Chief Risk Officer (QRCO)" – by PT PMLI, in Bogor (Nomor: 214816812161014)
- "Risk-Based Audit Training" – by PT PMLI, in Surabaya (no certification number)
- "APLOG Logistics Forum Webinar (Diversification and Risk Management in Logistics Industry)" – by PT Angkasa Pura Logistik, in Jakarta (no certification number)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam atau luar Perusahaan.
She does not hold other position within and outside the Company.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
He has no affiliations with any members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM
459.100 lembar saham
459,100 shares



Direktur Keuangan & SDM
Director of Finance & HR

Masa Jabatan:
14 April 2022–saat ini, Periode Pertama
Term of Office:
April 14, 2022–present, First Term

Reini Delfianti

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Samarinda, 6 Juni 1975
Indonesian citizen
Aged 47 years old as of Desember 31, 2023
Born in Samarinda, June 6, 1975

Domisili | Domicile
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment
Akta Notaris Nomor 29 tanggal 14 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed Number 29, dated April 14, 2022, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning the Resolution Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History
- Magister Shiping and Transport dari Netherlands Maritime University Rotterdam (2014)
- Magister Manajemen dari Universitas Trisakti dan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti (2006)
- Master of Shiping and Transport from Netherlands Maritime University Rotterdam (2014)
- Master of Management from Trisakti University and Bachelor of Accounting from Trisakti University

Riwayat Pekerjaan | Employment History
- Direktur Keuangan dan SDM PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2022–Sekarang)
- Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020–2022)
- Direktur Administrasi PT Jakarta Internasional Container Terminal (2019)
- General Manager Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa (2018)
- SVP Pengelolaan Anak Perusahaan & Cabang Kantor Pusat (2016–2018)
- Direktur SDM & Keuangan PT Pengerukan Indonesia (2014)
- Manager Akuntansi Management & Mitra Usaha, Direktorat Keuangan Pengembangan Pelabuhan Indonesia (2014)
- ASM Akuntansi Biaya, Kantor Pusat (2010–2012)
- ASM Analis Keuangan, Kantor Pusat (2009–2010)
- Director of Finance and Human Resources of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2022–Present)
- Directof of Finance and HR of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020–2022)
- Administrative Director of PT Jakarta International Container Terminal (2019)
- General Manager of Sunda Kelapa Port Branch (2018)
- SVP Subsidiary & Branch Management Head Office (2016–2018)
- Director of HR & Finance of PT Pengerukan Indonesia (2014)
- Manager of Accounting Management & Business Partner, Directorate of Finance of Indonesian Port Development (2014)
- Assistant Manager of Cost Accounting, Head Office (2010–2012)
- Assistant Manager of Financial Analyst, Head Office (2009–2010)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification
- "Leader as a Coach" – oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), di Jakarta (tidak ada nomor sertifikasi)
- "APLOG Logistics Forum Webinar (Diversification and Risk Management in Logistics Industry)" – oleh PT Angkasa Pura Logistik, di Jakarta (tidak ada nomor sertifikasi)
- "Pelatihan Audit Berbasis Risiko" – oleh PT PMLI, di Surabaya (Nomor: 203517906200210)
- "Leader as a Coach" – by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), in Jakarta (no certification number)
- "APLOG Logistics Forum Webinar (Diversification and Risk Management in Logistics Industry)" – by PT Angkasa Pura Logistik, in Jakarta (no certification number)
- "Risk-Based Audit Training" – by PT PMLI, in Surabaya (Certification Number: 203517906200210)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam atau luar Perusahaan.
She does not hold other position within and outside the Company.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
He has no affiliations with any members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM
329.500 lembar saham
329,500 shares



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
PROFILE OF EXECUTIVE OFFICERS



Oka Sudarsono
Vice President QHSSE, Manajemen Risiko & Hukum
Vice President QHSSE, Risk Management & Legal

Menjabat sejak 1 Januari 2023
Serving since January 1, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	54 tahun per 31 Desember 2023 54 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Employment at the Company	:	Tahun 2022 Year 2022
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• S.Pel. Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Jakarta, Tahun 2002 • M.M., Universitas Bina Darma Palembang, Tahun 2019 • A.Md., Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera Yogyakarta, Tahun 1993 • S.Pel. Jakarta College of Marine Technology, 2002 • M.M., Bina Darma University Palembang, 2019 • A.Md., Commercial Shipping Management Academy of Yogyakarta, 1993
Pengalaman Kerja Educational History	:	• Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi Pelindo (2014-2016) • DGM operasi dan teknik Pelindo (2016-2017) • DVP Penyusunan SOP Pelindo (2018-2020) • DGM Kepatuhan bisnis Pelindo (2020-2022) • Pelindo Operations Planning and Control Manager (2014-2016) • Pelindo operations and engineering DGM (2016-2017) • Pelindo SOPs Preparation DVP (2018-2020) • Pelindo business compliance DGM (2020-2022)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/1/9/5/RKTK/SDMA/PLND-22 tanggal 01-SEP 202 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/1/9/5/RKTK/SDMA/PLND-22 dated 01-SEP 202 • JAI Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 31 Desember 2022 Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. KP-413/31/12/1/MS-22 dated December 31, 2022



Eddy Haristiani

VP Sekretaris Perusahaan
VP Corporate Secretary

Menjabat sejak 16 Juli 2019
Serving since July 16 2019

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Employment at the Company	:	Tahun 2019 Year 2019
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Master of Public Administrations, International Christian University, Tokyo. (2003–2005) • Sarjana Komunikasi Massa, Universitas Gadjah Mada (1990–1995) • Master of Public Administrations, International Christian University, Tokyo. (2003–2005) • Bachelor of Mass Communication, Gadjah Mada University (1990–1995)
Pengalaman Kerja Educational History	:	• SVP / Group Head of Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (2018–2019) • Manager of Learning of Port and Maritime - PT PMLI (IPC Corporate University) / One of PT Pelindo II's Subsidiaries (2014–2018) • Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of PT Pelindo II (Persero) (2012-2014) • SVP / Group Head of Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (2018–2019) • Manager of Learning of Port and Maritime - PT PMLI (IPC Corporate University) / One of PT Pelindo II's Subsidiaries (2014–2018) • Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of PT Pelindo II (Persero) ((2012-2014)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 • JAI Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. KP.428/1/2/MS-19, tanggal 16 Juli 2019 Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. KP 428/1/2/MS-19 dated July 16, 2019



Andisyah Kadir

VP Transformasi & Pengembangan Bisnis
VP Business Transformation & Development

Menjabat sejak 28 April 2021
Serving since April 28 2021

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	51 tahun per 31 Desember 2023 51 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Employment at the Company	:	Tahun 2014 Year 2014
Riwayat Pendidikan Educational History	:	S1 Manajemen Informatika, Universitas Gunadarma (1996) Bachelor of Informatics Management Gunadarma University (1996)
Pengalaman Kerja Educational History	:	• VP Transformasi & Pengembangan Bisnis, Divisi Transformasi & Pengembangan Bisnis JAI (2021–2022) • Manager Crewing, Crewing, JAI (2014 - 2018) • Ass. Manager Administrasi Kepanduan & Pengawakan, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Administrasi Kepanduan & Pengawakan, Pelabuhan Tanjung Priok (2012–2014) • Supervisor Administrasi Kepanduan, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2009–2010) • Pj. Supervisor Administrasi Kepanduan, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2008) • Pel. Pelayanan Pemanduan, PPSA, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2006) • Pel. Administrasi Kepanduan dan SIMOP Senior, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2003) • Pel. Administrasi Kepanduan dan SIMOP Junior, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2002) • Pel. Adm. Pelayanan Jasa Senior, Dit. Usaha, Pelindo II (2001) • Pel. Adm. Data & Informasi, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (1998–1999) • VP of Transformation & Business Development, Transformation & Business Development Division of JAI (2021-2022) • Manager of Crewing, Crewing of JAI (2014-2018) • Assistant Manager of Pilotage & Manning Administration of Tanjung Priok Port Branch, Pilotage & Manning Administration of Tanjung Priok Port (2012–2014) • Supervisor of Pilotage Administration, Tanjung Priok Port Branch (2009-2010) • Acting Supervisor of Pilotage Administration, Tanjung Priok Port Branch (2008) • Pilotage Services Staff of One-Stop Service Center (PPSA) of Tanjung Priok Port Branch (2006) • Senior Staff of Pilotage Administration and Operational Management Information System (SIMOP) of Tanjung Priok Port Branch (2003) • Junior Staff of Pilotage Administration and Operational Management Information System (SIMOP) of Tanjung Priok Port Branch (2022) • Senior Staff of Service Administration, Directorate of Business of Pelindo II (2001) • Data & Information Administration Staff of Tanjung Priok Port Branch (1998-1999)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND- 23 dated January 13, 2023 • JAI Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023



Yosia Abet Laksana

VP Operasi & DPA
VP Operations & DPA

Menjabat sejak 19 Juni 2020
Serving since June 19, 2020

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	49 tahun per 31 Desember 2023 49 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Employment at the Company	:	Tahun 2020 Year 2020
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Dirjen Perhubungan (2008) • Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (2002) • Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (1997) • Directorate General of Transportation (2008) • College of Nautical Sciene (2002) • Shipping Education and Training (1997)
Pengalaman Kerja Educational History	:	• Manager Operasi Tanjung Pandan PT. Jasa Armada Indonesia (2020 – 2021) • Assistant DGM Perencanaan Pemanduan Cabang Pelabuhan Palembang (2019 –2019) • Assistant DGM Perencanaan, Pengendalian & Kepanduan Cabang Pelabuhan Jambi (2017 – 2018) • Manager Operasi Jambi Cabang Pelabuhan Jambi (2014 – 2015) • Staf Kapal & Pemanduan Sr. Kantor Pusat (2013 –2013) • Pandu Bandar Cirebon Cabang Pelabuhan Cirebon (2012 -2012) • Pandu laut pada Cab Pelabuhan Palembang (2009 – 2010) • Pandu Laut pada Cab. Pelabuhan Pontianak (2006) • Pel. Pengembangan SDM Junior (2005 –2005) • Manager of Operation of Tanjung Pandan of PT. Jasa Armada Indonesia (2020 – 2021) • Assistant DGM of Pilotage Planning, Palembang Port Branch (2019 – 2019) • Assistant DGM of Planning, Control & Pilotage, Jambi Port Branch (2017 – 2018) • Manager of Operation, Jambi Port Branch (2014 – 2015) • Senior Staff of Vessel & Pilotage of Head Office (2013 – 2013) • Harbor Pilot, Cirebon Port Branch (2012 – 2012) • Sea Pilot, Palembang Port Branch (2009 – 2010) • Sea Pilot, Pontianak Port Branch (2006) • Junior Staff of HR Development (2005 – 2005)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 21 Desember 2023 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated December 21, 2023 • JAI Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023



Ivan Hartanto

VP Armada

VP of Fleet Management

Menjabat sejak 6 April 2021
Serving since April 6, 2021

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Employment at the Company	:	Tahun 2020 Year 2020
Riwayat Pendidikan Educational History	:	Universitas Pancasila (1997) Pancasila University (1997)
Pengalaman Kerja Educational History	:	• VP Teknik/DPA PT Jasa Armada Indonesia (April 2021 – Oktober 2021) • DGM Teknik & Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Banten (2020 –2020) • Senior Manager Teknik IPC Terminal Petikemas (2019 –2020) • DGM Teknik & Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Panjang (2017) • DGM Teknik & Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Panjang (2017) • DVP Alat Apung Kantor Pusat (2016) • ASM. Alat Apung Kantor Pusat (2011 – 2016) • ASM. Teknik Mesin, Listrik & Telekomunikasi Kantor Pusat (2011) • Asisten Manager Teknik Mesin dan Listrik (2005 – 2009) • Staf Alat Apung Senior (1999 – 2004) • VP of Engineering/DPA of PT Jasa Armada Indonesia (April 2021 – October 2021) • DGM of Engineering & Information Systems, Banten Port Branch (2020 – 2020) • Senior Manager of Engineering of IPC Terminal Petikemas (2019 – 2020) • DGM of Engineering & Information System, Panjang Port Branch (2017) • DGM of Engineering & Information Systems, Panjang Port Branch (2017 – 2017) • DVP of Floating Equipment of Headquarters (2016) • ASM of Floating Equipment of Head Office (2011 – 2016) • ASM of Mechanical & Electrical Engineering & Telecommunication of Head Office (2011) • Assistant Manager of Mechanical & Electrical Engineering (2005 – 2009) • Senior Staff of Floating Equipment (1999 – 2004)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/31/12/1/RKTK/SDMA/PLND-22 tanggal 22 Desember 2022 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) KP.10.02/31/12/1/RKTK/SDMA/PLND-22 dated December 22, 2022 • JAI Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023



Buddy Setiawan

VP SDM & Umum
VP of HR & General

Menjabat sejak 14 Agustus 2020
Serving since since August 14, 2020

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Employment at the Company	:	Tahun 2020 Year 2020
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung - FISIP (Adm Niaga) S1 tahun (2006– 2008) • Diploma, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan (STIAMAK) (1998–2001) • Diploma from School of Administrative Sciences and Port Management (STIAMAK) (1998—2001) • Bachelor of Business Administration, University of Tulang Bawang, Bandar Lampung (2006—2008)
Pengalaman Kerja Educational History	:	• DVP Umum dan Rumah Tangga Kantor Pusat (2019–2020); • DVP Budaya Perusahaan Kantor Pusat (2018–2019); • Junior Deputy GM Umum dan Logistik Cabang Pelabuhan Panjang (2017–2018); • Asisten Manager Quality Assurance PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Divisi Audit (2015–2017); • Advisor Jaminan Mutu dan Manajemen Risiko Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2014–2017); • PJ.Advisor Jaminan Mutu dan Pengendalian Kinerja Cabang Pelabuhan Panjang (2010–2013); • Supervisor Umum dan Rumah Tangga Cabang Pelabuhan Panjang (2007–2009); • Sekretaris GM Pelabuhan Panjang (2005–2007) • DVP of General Affairs and Household of Head Office (2019–2020); • DVP of Corporate Culture of Head Office (2018–2019); • Junior Deputy General Manager of General Affairs and Logistics at Panjang Port Branch (2017–2018); • Assistant Manager of Quality Assurance of Audit Division of PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) (2015–2017); • Advisor of Quality Assurance and Risk Management of Tanjung Priok Port Branch (2014–2017); • Acting Advisor of Quality Assurance and Performance Control of Panjang Port Branch (2010–2013); • Supervisor of General Affairs and Household of Panjang Port Branch (2007–2009); • Secretary of GM of Panjang Port (2005–2007)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023 • JAI Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023



Angga Iriano Nugroho

VP Keuangan
VP of Finance

Menjabat sejak 14 Agustus 2020
Serving since since August 14, 2020

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	39 tahun per 31 Desember 2023 39 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Employment at the Company	:	Tahun 2020 Year 2020
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Msc of International Transport and Logistics/Transport & Logistics, World Maritime University (2013); • Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman (2004). • Msc of International Transport and Logistics/Transport & Logistics, World Maritime University (2013); • Bachelor of Economics & Accounting, University of Jenderal Soedirman (2004).
Pengalaman Kerja Educational History	:	• SDVP Program Kemitraan dan Bina Lingkungan & CSR PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020); • Manager Akuntansi & Anggaran, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014-2016); • Deputy Vice President Pendapatan & Piutang PT. Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2016); • Manager Perbendaharaan & KBL, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014). • Department Head Community Development PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020); • Accounting & Budget Manager, Tanjung Priok Port Branch, PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014-2016); • Deputy Vice President of Revenue & Receivables of PT Tanjung Priok Port (2014-2016); • Treasury & KBL Manager, Tanjung Priok Port Branch PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023 • JAI Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023



Rikky Afrianto

VP Pengadaan
VP of Procurement

Menjabat sejak 14 Agustus 2020
Serving since since August 14, 2020

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	46 tahun per 31 Desember 2023 46 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Employment at the Company	:	Tahun 2020 Year 2020
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Post Graduate, Netherland Maritime University, Netherland, Major in: International Shipping and Transport (2014–2016); • Magister Teknik Kelautan, Institut Teknologi Bandung, Bandung (2008–2010); • Magister Strategic Management, Universitas Indonesia, Jakarta (2009–2010). • Postgraduate in International Shipping and Transport of Netherlands Maritime University, the Netherlands (2014–2016); • Master of Marine Engineering of Bandung Institute of Technology, Bandung (2008–2010); • Master of Strategic Management of University of Indonesia, Jakarta (2009–2010).
Pengalaman Kerja Educational History	:	• Deputy Vice President (DVP) Pemeliharaan Fasilitas Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2018–2020); • Asisten Senior Manager (ASM) Pengendalian Proyek Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2014–2014); • Manager Teknik dan Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Banten. (2010–2014); • Assisten Manager Penilikan Fasilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. (2009–2010). • Deputy Vice President (DVP) Pemeliharaan Fasilitas Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2018–2020); • Asisten Senior Manager (ASM) Pengendalian Proyek Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); (2014–2014); • Manager Teknik dan Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Banten. (2010–2014); • Assisten Manager Penilikan Fasilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. (2009–2010).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/14/8/1/MTA/SDM/PI.II-2020 tanggal 14 AGUSTUS 2020 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/14/8/1/MTA/SDM/PI.II-2020 dated August 14, 2020 • JAI Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023



Amir Indra Sasongko

Kepala Audit Internal
Head of Internal Audit

Menjabat sejak 2 April 2023
Serving since April 2, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	53 tahun per 31 Desember 2023 53 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Employment at the Company	:	Tahun 2023 Year 2023
Riwayat Pendidikan Educational History	:	Sarjana Sosial (S. Sos), Universtas Krisnadwipayana (1996) Bachelor of Social Science, Krisnadwipayana University (1996)
Pengalaman Kerja Educational History	:	Kepala Satuan Pengawasan Intern, PT Pengerukan Indonesia, periode (2016-2023) Head of Internal Audit, PT Pengerukan Indonesia (2016-2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 • JAI Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: tanggal: KP.10.02/2/4/1/SRA/OUT/JAI-23 tanggal 2 April 2023 Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number KP.10.02/2/4/1/SRA/OUT/JAI-23 dated April 2, 2023



Roy Prabandaru Mahapria

VP Komersial
VP of Commercial

Menjabat sejak 01 Februari 2023
Serving since February 1, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	49 tahun per 31 Desember 2023 49 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Employment at the Company	:	Tahun 2023 Year 2023
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• S2 – Kuhne Logistics University – Hamburg, Germany (2015) • S1 – STT Pelita Bangsa – Jakarta (2023) • STIE Yasmi – Cirebon (2014) • D3 BPLP – Semarang (1996) • S2 – Kuhne Logistics University – Hamburg, Germany (2015) • S1 – STT Pelita Bangsa – Jakarta (2023) • STIE Yasmi – Cirebon (2014) • D3 BPLP – Semarang (1996)
Pengalaman Kerja Educational History	:	• Vice President Komersial Jakarta : PT Jasa Armada Indonesia, Tbk : (2023 – sekarang) • Deputi Komersial Pontianak : PT Pelindo 2 : (2017 – 2023) • Asisten Manager Tj. Priok : PT Pelabuhan Tanjung Priok : (2015 – 2017) • Kepala Usaha Terminal Cirebon : PT Pelindo 2 : (2014 -2015) • Manager Operasi Tanjung Pandan : PT Pelindo 2 : (2013 – 2014) • Spv Perencanaan Kapal Pontianak : PT Pelindo 2 : (2010 – 2013) • Pandu Bandar Pontianak: PT Pelindo 2 : (2009 – 2010) • Pandu Laut Palembang : PT Pelindo 2 : (2007 – 2009) • Pandu Laut Pontianak : PT Pelindo 2 : (2002 – 2007) • Staf SDM Kantor Pusat : PT Pelindo 2 : (2001 – 2002) • Vice President Commercial Jakarta : PT Jasa Armada Indonesia, Tbk : (2023 – present) • Commercial Deputy Pontianak : PT Pelindo 2 : (2017 – 2023) • Assisstant Manager Tj. Priok : PT Pelabuhan Tanjung Priok : (2015 – 2017) • Business Head at Cirebon Terminal: PT Pelindo 2 : (2014 -2015) • Operation Manager Tanjung Pandan : PT Pelindo 2 : (2013 – 2014) • Spv Vessel Management Pontianak : PT Pelindo 2 : (2010 – 2013) • Harbor Pilot Pontianak: PT Pelindo 2 : (2009 – 2010) • Sea Pilot Palembang : PT Pelindo 2 : (2007 – 2009) • Sea Pilot Pontianak : PT Pelindo 2 : (2002 – 2007) • HR staff at Head of Office : PT Pelindo 2 : (2001 – 2002)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 • JAI Surat Keputusan Direksi No. KP-413/1/2/1/MS-23 tanggal 1 Februari 2023 Decree of the Board of Directors No. KP-413/1/2/1/MS-23 dated February 1, 2023

DEMOGRAFI PEKERJA
EMPLOYEE DEMOGRAPHY

Per 31 Desember 2023, jumlah pekerja Perusahaan yang merupakan pekerja organik, yakni Pekerja Penugasan Pelindo sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penempatan Pekerja (Secondment Agreement) tercatat mengalami penurunan sebesar -4,62%, dari 127 orang di tahun 2022, menjadi 124 orang di tahun 2023.

As of December 31, 2023, the total number of the Company's organic employees, assigned by Pelindo in accordance to the Seconded Agreement decreased by -4,62% from 127 people in 2022 to 124 people in 2023.

Berikut demografi pekerja organik Perusahaan untuk tahun 2023 dan 2022, berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, rentang usia, wilayah kerja, dan jenis kelamin.

The following is the demographic information regarding the Company's organic employees in 2022 and 2023 by level of organization, education, age, operating areas, and gender.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi (orang)
Total Employee by Level of Organization (people)

Level Organisasi Level of Organization	2023			2022		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Direksi Board of Directors	1	2	3	1	2	3
Vice President	10	-	10	10	-	10
Deputy Vice President	12	5	17	12	4	16
General Manager	5	-	5	5	-	5
Deputy General Manajer Deputy General Manager	4	1	5	4	1	5
Staf Staff	19	2	21	19	2	21
Pelaksana Practitioner	18	2	20	19	2	21
ABK	43	-	43	49	-	49
Jumlah Total	**112**	**12**	**124**	**119**	**11**	**130**

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P=Female

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
Total Employee by Level of Education (people)

Tingkat Pendidikan Level of Education	2023			2022		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Pascasarjana (S2) Post Graduate (S2)	11	4	15	11	4	15
Sarjana (S1) Bachelor (S1)	30	6	36	34	5	39
Diploma (D3) Diploma (D3)	11	2	13	13	2	15
SLTA Senior High School	60	-	60	61	-	61
Jumlah Total	**112**	**12**	**124**	**119**	**11**	**130**

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P=Female

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia (orang)
Total Employee by Age (people)

Rentang Usia Age	2023			2022		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
<35 tahun <35 years old	10	5	15	10	6	16
35–50 tahun 35–50 years old	54	7	61	75	5	80
>50 tahun >50 years old	48	0	48	34	0	34
Jumlah Total	**112**	**12**	**124**	**119**	**11**	**130**

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P=Female

Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja (orang)
Total Employee by Operating Area (people)

Wilayah Kerja Operating Area	2023			2022		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Kantor Pusat **Head Office**	33	11	44	36	10	43
Area I **Area I**						
Tanjung Priok	39	1	40	43	1	44
Meulaboh						
Nusantara Regas						
Area II **Area II**						
Banten	6		6	5		5
Pontianak	7		7	6		6
Nipa						
Area III **Area III**						
Panjang	5		5	6		6
Bengkulu	3		3	4		4
Weda						
Halmahera & Sekitar (Lauwi)						
Area IV **Area IV**						
Palembang	5		5	6		6
Teluk Bayur	8		8	7		7
Jambi	1		1	1		1
Pangkal Balam						
Tanjung Pandan	1		1	1		1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja (orang)
Total Employee by Operating Area (people)

Wilayah Kerja Operating Area	2023			2022		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Area V **Area V**						
Cirebon	4		4	4		4
Patimban						
Jawa Satu Power						
Kanci						
Jumlah Total	112.	12	124	119	11	130

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P=Female

Jumlah Pegawai *Gender* (orang)
Jumlah Pegawai *Gender* (orang)

Gender	2023	2022
Laki-laki Male	112	120
Perempuan Woman	12	10
Jumlah Total	124	130

Uraian lengkap terkait pekerja atau pekerja dan kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan dan pengembangan SDM dapat dilihat pada pembahasan Sumber Daya Manusia di bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam Laporan Tahunan ini.
Full explanation regarding employees and workers, along with the Company's policy in terms of HR management and development is available in the section regarding Human Resources, disclosed at Supporting Business Function of this Annual Report.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS COMPOSITION

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

SHARE OWNERSHIP COMPOSITION

Kepemilikan Saham IPCM per 1 Januari 2023
IPCM Share Ownership as of January 1, 2023

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Total Issued and Fully Paid Shares (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Pelindo Jasa Maritim	4.063.504.600	406.350.460.000	76,89%
PT Multi Terminal Indonesia	5.800.000	580.000.000	0,11%
Publik: Public:			
- PT Pelabuhan Indonesia Investama	569.551.400	56.955.140.000	10,78%
- Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%) - Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	637.915.300	63.791.530.000	12,07%
Sub Total Sub Total	5.276.771.300	527.677.130.000	99,85%
Saham Treasuri Treasury Stock	8.039.800	803.980.000	0,15%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid	**5.284.811.100**	**528.481.110.000**	**100,00%**

Kepemilikan Saham IPCM per 31 Desember 2023
IPCM Share Ownership as of December 31, 2023

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Jumlah Saham Total Issued and Fully Paid Shares (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Pelindo Jasa Maritim	4.063.504.600	406.350.460	76,89%
PT Multi Terminal Indonesia	5.800.000	580.000	0,11%
Publik: Public:			
- PT Pelabuhan Indonesia Investama	569.551.400	56.955.140	10,78%
- Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%) Others (each with ownership percentage below 5%)	637.915.300	63.791.530	12,07%
Sub Total Sub Total	5.276.771.300	527.677.130	99,85%
Saham Treasuri Treasury Stock	8.039.800	803.980	0,15%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid	**528.481.110**	**528.481.110**	**100,00%**

Komposisi Pemegang Saham IPCM dengan Kepemilikan 5% atau Lebih Awal Tahun dan Akhir Tahun 2023
IPCM Shareholders Composition with 5% or More Ownership Beginning and End of Year 2023

Status Pemilik/Pemegang Saham Owners/Shareholders Status	1 Januari 2023 January 1, 2023			31 Desember 2023 December 31, 2023		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Domestik Domestic						
Pemegang Saham Kepemilikan 5% atau Lebih Shareholders with 5% or More Ownership	2	4.633.056.000	87,67%	2	4.633.056.000	87,67%
Sub Total Sub Total	2	4.633.056.000	87,67%	2	4.633.056.000	87,67%
Asing Foreign						
Pemegang Saham Kepemilikan 5% atau Lebih Shareholders with 5% or More Ownership	-	-	-	-	-	-
Sub Total Sub Total	-	-	-	-	-	-
Total	**2**	**4.633.056.000**	**87,67%**	**2**	**4.633.056.000**	**87,67%**

DAFTAR STATUS INVESTOR

LIST OF INVESTOR STATUS

Tabel Pemegang Saham IPCM Berdasarkan Status Investor Awal Tahun dan Akhir Tahun 2023
IPCM Shareholders by Status Beginning and End of Year 2023

Status Status	1 Januari 2023 1 Januari 2023			31 Desember 2023 31 Desember 2023		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (Rp) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (Rp) Ownership Percentage (%)
Domestik Domestic						
Individu Individual	5.673	340.259.500	6,44%	5.843	340.710.200	6,45%
Institusi Institution	20	4.935.436.300	93,39%	16	4.930.974.000	93,30%
Subtotal Subtotal	5.693	5.275.695.800	99,83%	5.859	5.271.684.200	99,75%

Tabel Pemegang Saham IPCM Berdasarkan Status Investor Awal Tahun dan Akhir Tahun 2023

IPCM Shareholders by Status
Beginning and End of Year 2023

Status Status	1 Januari 2023 1 Januari 2023			31 Desember 2023 31 Desember 2023		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (Rp) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (Rp) Ownership Percentage (%)
Asing Foreign						
Individu Individual	2	60.500	0,00%	3	70.500	0,00%
Institusi Institution	12	9.054.800	0,17%	16	13.056.400	0,25%
Subtotal Subtotal	14	9.115.300	0,17%	19	13.126.900	0,25%
Total	**5.707**	**5.284.811.100**	**100,00%**	**5.878**	**5.284.811.100**	**100,00%**

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

COMPANY SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Berikut adalah kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi baik secara langsung maupun tidak langsung, pada awal tahun dan akhir tahun buku 2023, sebagaimana terlampir di bawah ini.

The following is the information regarding direct and indirect share ownership of the Company by the Board of Commissioners and Directors at the beginning and end of financial year 2023.

Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Secara Langsung pada Awal Tahun dan Akhir Tahun Buku 2023
Direct Share Ownership of the Company by the Board of Commissioners and Directors Beginning and End of Financial Year 2023

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2023 January 1, 2023		31 Desember 2023 December 31, 2023	
		Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	Nihil	Nihil	158.100	0,00%
Hary Kriswanto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil		
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi Board of Directors					
Shanti Puruhita	Direktur Utama/Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director/Act. Director of Commercial and Business Development	Nihil	Nihil	492.100	0,01%
Muhammad Iqbal	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operation	Nihil	Nihil	459.100	0,01.%
Reini Delfianti	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	Nihil	Nihil	329.500	0,01.%

Keterangan:
*) Hary Kriswanto meninggal dunia pada 24 Juni 2023
Remarks:
*) Hary Kiswanto passed away at June 24, 2023

Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Secara Tidak Langsung pada Awal Tahun dan Akhir Tahun Buku 2023

Inirect Share Ownership of the Company by the Board of Commissioners and Directors Beginning and End of Financial Year 2023

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2023 January 1, 2023		31 Desember 2023 December 31, 2023	
		Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hary Kriswanto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil		
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi Board of Directors					
Shanti Puruhita	Direktur Utama/Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director/Act. Director of Commercial and Business Development	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Iqbal	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operation	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Reini Delfianti	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan:
*) Hary Kriswanto meninggal dunia pada 24 Juni 2023
Remarks:
*) Hary Kiswanto passed away at June 24, 2023

INFORMASI PEMBELIAN/PENJUALAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya, perusahaan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas transaksi tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

SHARE PURCHASE OF THE COMPANY BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

According to the Financial Services Authority No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Report or Changes to the Share Ownership of a Public Company, each member of the Board of Commissioners and Directors is required to notice the company regarding his ownership and whenever there is a change to his ownership on the company's share in less than 3 (three) days after the transaction occurred. The company then informed the Financial Services Authority (OJK) about the transaction in less than 10 (ten) days since the transaction occurred.

Tabel Pembelian/Penjualan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2023

Sales/Purchase of Company Shares by the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Transaksi** Transaction	**Jumlah Saham Sebelum Transaksi (lembar)** Total Shares Prior to Transaction (shares)	**Jumlah Pembelian/ Penjualan (lembar)** Total Purchase/ Sales (shares)	**Harga Saham (Rp)** Share Price (Rp)	**Jumlah Saham Setelah Transaksi (lembar)** Jumlah Saham Total Shares After Transaction (shares)	**Tanggal Transaksi** Transaction Date	**Tujuan Transaksi** Purpose of Transaction	**Pelaporan** Disclosure
Dewan Komisaris Board of Commissioners									
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	-	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	Pembelian Purchase	Nihil None	158.100	280	158.100	17 November 2023 November 17, 2023	Investasi Investment	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KU.01.08/17/11/4/ KGC/SPR/JAI-23 tanggal 17 November 2023 It has been reported to OJK through Letter No. KU.01.08/17/11/4/ KGC/SPR/JAI-23, dated November 17, 2023
Hary Kriswanto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Direksi Board of Directors									
Shanti Puruhita	Direktur Utama/Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director/Act. Director of Commercial and Business Development	Pembelian Purchase	Nihil None	27.000; 449.700; 15.400	280; 281,82 (avg.); 282	492.100	24 Oktober, 14 dan 15 November 2023 October 24, November 14 & 15 of 2023	Investasi Investment	Telah dilaporkan 2 (dua) kali secara terpisah kepada OJK melalui Surat No.KU.01.08/26/10/1/ KGC/SPR/JAI-23 tanggal 26 Oktober 2023 dan Surat No. KU.01.08/16/11/1/ KGC/SPR/JAI-23 tanggal 16 November 2023 It has been reported 2 (two) times separately to OJK, through Letter No. KU.01.08/26/10/1/ KGC/SPR/JAI-23, dated October 26, 2023, and Letter No. KU.01.08/16/11/1/ KGC/SPR/JAI-23, dated November 16, 2023

Tabel Pembelian/Penjualan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2023

Sales/Purchase of Company Shares by the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Transaksi** Transaction	**Jumlah Saham Sebelum Transaksi (lembar)** Total Shares Prior to Transaction (shares)	**Jumlah Pembelian/ Penjualan (lembar)** Total Purchase/ Sales (shares)	**Harga Saham (Rp)** Share Price (Rp)	**Jumlah Saham Setelah Transaksi (lembar)** Jumlah Saham Total Shares After Transaction (shares)	**Tanggal Transaksi** Transaction Date	**Tujuan Transaksi** Purpose of Transaction	**Pelaporan** Disclosure
Muhammad Iqbal	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operation	Pembelian Purchase	Nihil None	71.500; 28.200; 359.400	282; 282; 282,3 (avg.)	459.100	14,15 dan 16 November 2023 November 14, 15, 16 of 2023	Investasi Investment	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KU.01.08/17/11/3/ KGC/SPR/JAI-23 tanggal 17 November 2023 It has been reported to OJK through Letter No. KU.01.08/17/11/3/ KGC/SPR/JAI-23, dated November 17, 2023
Reini Delfianti	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	Pembelian Purchase	Nihil None	8.000 dan 321.500	280 dan 282	329.500	14 dan 15 November 2023 November 14 & 15 of 2023	Investasi Investment	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KU.01.08/16/11/2/ KGC/SPR/JAI-23 tanggal 16 November 2023 It has been reported to OJK through Letter No. KU.01.08/16/11/2/ KGC/SPR/JAI-23, dated November 16, 2023

Keterangan:
*) Hary Kriswanto meninggal dunia pada 24 Juni 2023
Remarks:
*) Hary Kiswanto passed away at June 24, 2023

TRANSAKSI SAHAM OLEH SENIOR MANAGEMENT
SHARE TRANSACTION BY SENIOR MANAGEMENT

Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak ada Transaksi Saham oleh Senior Management (pejabat satu tingkat dibawah Direksi) di Perusahaan.

By December 31, 2023, there were no share transactions by Senior Management (officials one level below the Board of Directors) of the Company

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI PERUSAHAAN
INFORMATION REGARDING MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS

PT Pelindo Jasa Maritim merupakan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan dengan kepemilikan sebesar 76,89%. Secara teknis hubungan tata kelola dengan Pemegang Saham (*liaison function*) dilakukan antara Sekretaris Perusahaan IPCM dengan Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim.

PT Pelindo Jasa Maritim is the Major and Controlling Shareholders of the Company with 76.89% ownership. Technically, the governance relationship with Shareholders (liaison function) is carried out between the Corporate Secretary of IPCM and PT Pelindo Jasa Maritim.

DAFTAR ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI, DAN VENTURA BERSAMA
SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, JOINT VENTURE

ENTITAS ANAK

Sampai dengan akhir tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki Anak Perusahaan sehingga tidak ada informasi terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha dan status operasi terkait dengan anak Perusahaan.

ENTITAS ASOSIASI

Sampai dengan akhir tahun 2023, JAI Tbk tidak memiliki perusahaan patungan maupun dalam bentuk *Special Purpose Vehicle* (SPV) sehingga tidak ada informasi terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha dan status operasi terkait dengan entitas asosiasi Perusahaan.

SUBSIDIARIES

By the end of 2023, the Company does not have any subsidiaries; therefore, there is no information regarding the names, percentage of ownership, business fields, and operational status related to subsidiaries.

ASSOCIATES

By the end of 2023, JAI Tbk does not have a joint venture company or a Special Purpose Vehicle (SPV), and therefore, there is no information regarding the name, percentage of ownership, business field, and operational status related to the Company's associated entities.



KERJASAMA DENGAN PIHAK TERAFILIASI DAN PIHAK KETIGA
COOPERATION WITH AFFILIATIONS AND THIRD PARTIES

No	Pihak Parties	Nomor PKS PKS Number	Tanggal Berlaku Effective Date	Tanggal Berakhir End Date	Judul PKS PKS Title
1	PT PLN Gas & Geothermal, PT Adhi Guna Putera	2963/126/IX/ DIREKSI-2023 PD.02/1/9/1/ SPB/DUT/JAI-23	1 Juli 2023 July 1, 2023	30 Juni 2028 June 30, 2028	Perjanjian Sewa Kapal Tunda untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power Tugboat charter agreement for Java one power operational area
2	PT Karya Pacific Shipping	KS.02/1/12/2/ KOD/DUT/JAI-23 001/KPS-JAI/ XII/2023	1 Desember 2023 December 1, 2023	30 November 2024 November 30, 2024	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kapal Tunda Beserta Awak Kapal untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal atas Kapal-Kapal Milik dan Kapal-Kapal yang Bekerja untuk Transhipment PT Karya Pacific Shipping dengan Sistem On Call di Area Ship to Ship (STS) Muara Sungai Musi Palembang. Cooperation Agreement for the Provision of Tugboats and Crews for Ship Delay Services for Owned Vessels and Vessels Working for Transhipment PT Karya Pacific Shipping with the On Call System in the Ship to Ship (STS) Area of the Musi River Estuary Palembang.

STRUKTUR GRUP
GROUP STRUCTURE

IPCM merupakan anak perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim yang kepemilikannya juga dipegang oleh PT Multi Terminal Indonesia.

IPCM is a subsidiary of PT Pelindo Jasa Maritim, and its ownership is also held by PT Multi Terminal Indonesia.

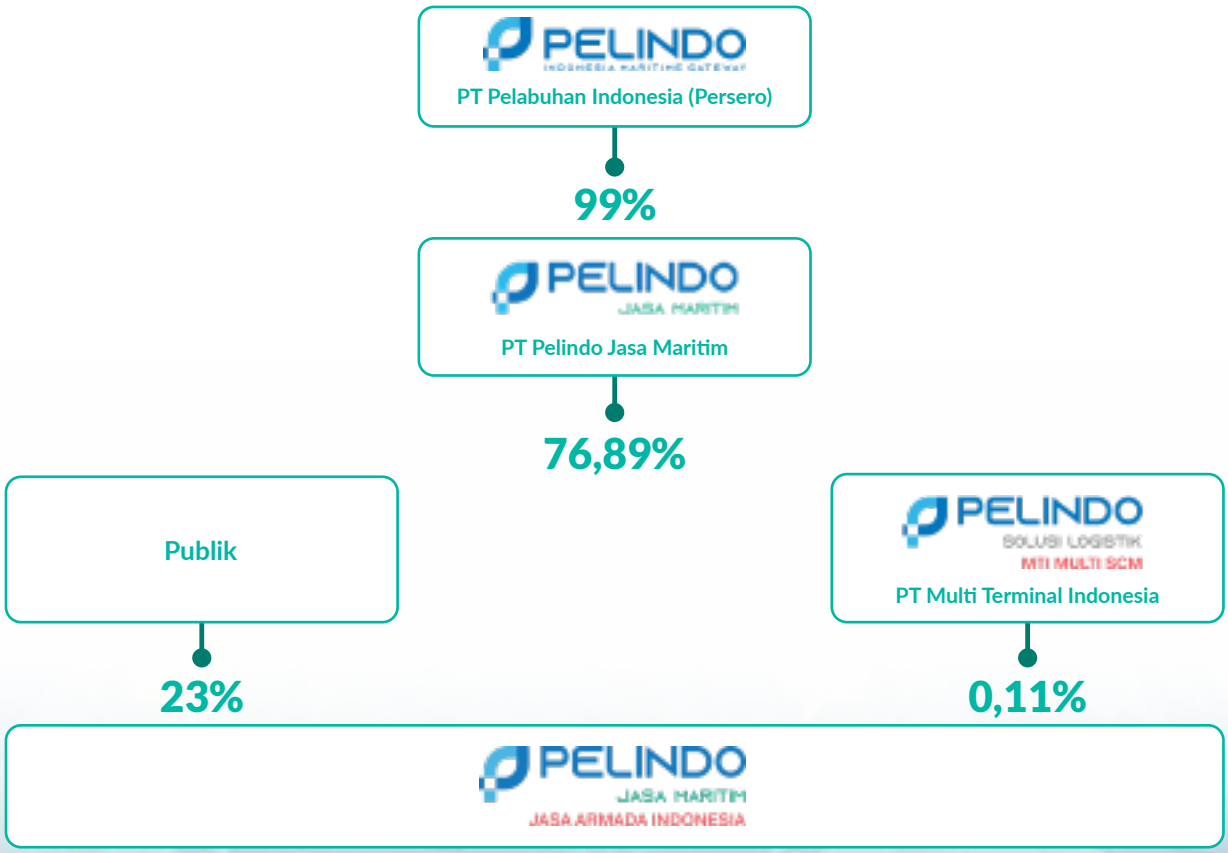

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM
CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND/OR LISTING

Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal 15–18 Desember 2017 yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2017. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perusahaan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perusahaan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

The Company conducted an Initial Public Offering from December 15 to 18, 2017, on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on December 22, 2017. With the sale of all shares during the Initial Public Offering, the composition of share capital and shareholders before and after the Initial Public Offering is as follows:

Saham Biasa atas Nama dengan Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham
Registered Shares with Nominal Value of Rp100.- per Share

Keterangan Description	Sebelum Penawaran Umum Prior to Public Offering			Setelah Penawaran Umum After Public Offering		
	Jumlah Saham Total Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp) Nominal (Rp) Total Amount (Rp)	(%)	Jumlah Saham Total Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp) Nominal (Rp) Total Amount (Rp)	(%)
Modal Dasar Authorized Capital	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Paid-Up Capital	4.069.304.600	406.930.460.000	100	5.284.811.100	528.481.110.000	100
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	4.063.504.600	406.350.460.000	99,86			
PT Pelindo Jasa Maritim				4.063.504.600	406.350.460.000	76,89
PT Multi Terminal Indonesia	5.800.000	580.000.000	0,14	5.800.000	580.000.000	0,11
Masyarakat Public	-	-	0,00	1.157.611.800	115.761.180.000	21,90
Program ESA ESA Program	-	-	-	57.894.700	5.789.470.000	1,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Paid-Up Capital	4.069.304.600	406.930.460.000	100,00	5.284.811.100	528.481.110.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel Number of Shares in Portfolio	10.930.695.400	1.093.069.540.000.		9.715.188.900	971.518.890.000	

Perusahaan mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2017 dengan menawarkan 1.215.506.500 saham baru saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebesar 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp380 setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp461.892.470.000.

The Company listed its initial shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on December 22, 2017, by offering 1,215,506,500 new shares with a nominal value of Rp100 or 23% of the Company's issued and fully paid-up capital following the Initial Public Offering. All these shares are offered at an Offering Price of Rp380 per share, which must be paid in full when applying for the FPPS. The total value of the Public Offering is Rp461,892,470,000.



KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA
CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND/OR LISTING

Sampai dengan tahun 2023, Perusahaan belum mencatatkan efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek lainnya.

By the end of 2023, the Company has not listed any other securities on the Stock Exchange, thus, there is no information regarding the chronology of listing, types of corporate actions, changes in the number of securities, exchange names, or other securities ratings

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING PROFESSIONALS AND/OR INSTITUTIONS

Daftar Lembaga dan/atau Profesi Penunjang IPCM Tahun 2023

List of Supporting Professionals and/or Institutions of IPCM in 2023

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

PUBLIC ACCOUNTING FIRM (KAP)

Nama KAP Name of KAP	Purwantono, Sungkoro & Surja
Alamat Address	Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 7th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Akuntan Publik Public Accountant	Moch. Dadang Syachruna
Periode Penugasan Assignment Period	Sejak ditandatanganinya Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) sampai dengan tanggal 30 April 2024
Jasa Audit yang Diberikan Audit Services	Jasa Audit Laporan Keuangan PT JAI
Biaya Jasa Audit Audit Fee	Rp984.996.800,00 belum termasuk PPN 11%
Jasa Non-Audit yang Diberikan Non-Audit Services	Melaksanakan prosedur yang disepakati atas laporan hasil evaluasi dan pencapaian KPI untuk tahun buku 2023 Sebagai bagian dari audit umum melaksanakan prosedur terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2023
Biaya Jasa Non-Audit Non-Audit Fee	-

NOTARIS

NOTARY

Nama Lembaga Institution Name	Kantor Notaris & PPAT Ashoya Ratam S.H., M.Kn.
Alamat Address	Jl. Suryo No. 54, RT4/RW4, Rawa Barat, Kebayoran Baru Telp / Phone : 021 29236060; 021 29236070
Periode Penugasan Assignment Period	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2023 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) in 2023
Jasa yang Diberikan Offered Services	Kenotariatan terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Notary services related to the implementation of the Company's General Meeting of Shareholders (GMS).

BIRO ADMINISTRASI EFEK

SECURITY ADMINISTRATION BUREAU

Nama Lembaga Institution Name	PT Electronic Data Interchange Indonesia
Alamat Address	Gedung Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT09/RW11 Jakarta Utara 14350 Telp / Phone : +62-21-650-5829, +62-21-2960-6330 Faks / Fax : +62-21-650-5987 Website : www.edi-indonesia.co.id
Periode Penugasan Assignment Period	2023
Jasa yang Diberikan Offered Services	Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Administration Management of the Company's Shares




GOLDEN ISAIA

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATION



Nasional
National

1 Public Relations Indonesia Awards 2023

Tanggal | Date
17 Maret 2023
March 17, 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Silver Winner Sektor Anak Usaha BUMN Kategori Owned Media Sub Kategori E-Magazine
Silver Winner in the SOE Subsidiary, Owned Media Category, E-Magazine Sub Category

Diberikan Oleh | Issuer
PR Indonesia

2 TJSL & CSR Award 2023

Tanggal | Date
10 Agustus 2023
August 10, 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Pilar Sosial dan Lingkungan 4 Star:
- Kategori Gold pada Pilar Sosial
- Kategori Gold pada Pilar Lingkungan

4 Star Social and Environmental Pillars:
- Gold Category in the Social Pillar
- Gold Category in the Environmental Pillar

Diberikan Oleh | Issuer

3 BISRA 2023

Tanggal | Date
15 Agustus 2023
August 15, 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Gold Champion in Corporate Social Responsibility Program Category of Enviromental Element
Gold Champion in Corporate Social Responsibility Program Category of Environmental Element

Diberikan Oleh | Issuer
Bisnis Indonesia

4 Indonesia CSR Award VI 2023

Tanggal | Date
31 Agustus 2023
August 31, 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Platinum Award category TJSL Program "Terumbu Karang" dengan Score 91.00
Platinum Award for the TJSL Program "Coral Reef" with a Score of 91.00

Diberikan Oleh | Issuer
Economic Review

5 Indonesia CSR Award VI 2023

Tanggal | Date
31 Agustus 2023
August 31, 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Platinum Award category Public Company sector Infrastructure, Utilities & Transport – Industry : Transportation dengan Score 92.00
Platinum Award in the Public Company Sector of Infrastructure, Utilities & Transport – Industry : Transportation with a Score 92.00

Diberikan Oleh | Issuer
Economic Review

6 Indonesia Best BUMN Awards 2023

Tanggal | Date
27 September 2023
September 27, 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Best SOE 2023 with Top Financial Performance and Improving the Operation of Vessels Service Activities
Best SOE 2023 with Top Financial Performance and Improving the Operation of Vessels Service Activities

Diberikan Oleh | Issuer
Warta Ekonomi

7 SNI Award 2023

Tanggal | Date
16 November 2023
November 16, 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Peringkat Perunggu kategori Organisasi Skala Besar Jasa
Bronze Rank in the Large-Scale Service Organization category

Diberikan Oleh | Issuer
Badan Standardisasi Nasional (BSN)

8 IDX CSR Awards

Tanggal | Date
12 Desember 2023
December 12, 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Kategori Enviromental Development Initiatives dengan Program CSR
Environmental Development Initiatives with CSR Program

Diberikan Oleh | Issuer
IDX Channel

9 Anugerah CSR IDX Channel 2023

Tanggal | Date
13 Desember 2023
December 13, 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Program CSR : TJSL Penanaman Terumbu Karang Pulau Damar, Kep. Seribu
CSR Program: TJSL of Coral Reef Planting on Damar Island, Kep. Seribu

Diberikan Oleh | Issuer
IDX Channel

Internasional
International



1 LACP 2022 Vision Awards Annual Report Competition

Tanggal | Date
29 Agustus 2023
29 Agustus 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Platinum Award for excellence within its industry on the development of the organization's sustainability report for the past fiscal year
Platinum Award for excellence within its industry on the development of the organization's sustainability report for the past fiscal year

Diberikan Oleh | Issuer
LACP

2 LACP 2022 Vision Awards Annual Report Competition

Tanggal | Date
29 Agustus 2023
29 Agustus 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Top 100 Reports Worldwide Rangking at #47 among all reports reviewed for the past fiscal years
Top 100 Reports Worldwide Rangking at #47 among all reports reviewed for the past fiscal years

Diberikan Oleh | Issuer
LACP

3 LACP 2022 Vision Awards Annual Report Competition

Tanggal | Date
29 Agustus 2023
29 Agustus 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Top 80 Reports Asia-Pacific Region Rangking at #4 among all reports reviewed for the past fiscal years
Top 80 Reports Asia-Pacific Region Rangking at #4 among all reports reviewed for the past fiscal years

Diberikan Oleh | Issuer
LACP

1 LACP 2022 Vision Awards Annual Report Competition

Tanggal | Date
29 Agustus 2023
29 Agustus 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Best in-House Reports Silver category in the asia-pacific region for the past fiscal year
Best in-House Reports Silver category in the asia-pacific region for the past fiscal yearr

Diberikan Oleh | Issuer
LACP

2 LACP 2022 Vision Awards Annual Report Competition

Tanggal | Date
29 Agustus 2023
29 Agustus 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Top 20 Indonesia Reports among all reports reviewed for the past fiscal year
Top 20 Indonesia Reports among all reports reviewed for the past fiscal year

Diberikan Oleh | Issuer
LACP

3 LACP 2022 Vision Awards Annual Report Competition

Tanggal | Date
29 Agustus 2023
29 Agustus 2023

Jenis Penghargaan | Type of Award
Technical Achievement Award for overall excellence in the art and method of sustainability report communications for the past fiscal year
Technical Achievement Award for overall excellence in the art and method of sustainability report communications for the past fiscal year

Diberikan Oleh | Issuer
LACP

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2023
Certifications Valid in 2023

Tanggal Perolehan Issuance Date	Uraian Description	Pemberi Sertifikasi Issuer	Masa Berlaku Valid Period
Nasional National			
14 April 2022 April 14, 2022	ISO 9001:2015	LRQA	13 April 2025 April 13, 2025
30 Desember 2023 December 30, 2023	ISO 37001:2016	LRQA	29 Desember 2026 December 29, 2026
15 Mei 2022 May 15, 2022	ISO 45001:2018	LRQA	14 Mei 2025 May 14, 2025
17 September 2020 September 17, 2020	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesejahteraan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety, Welfare, and Health Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	16 September 2023 September 16, 2023
31 Mei 2022 May 31, 2022	ISO 14001:2015	LRQA	2 Mei 2025 May 2, 2025

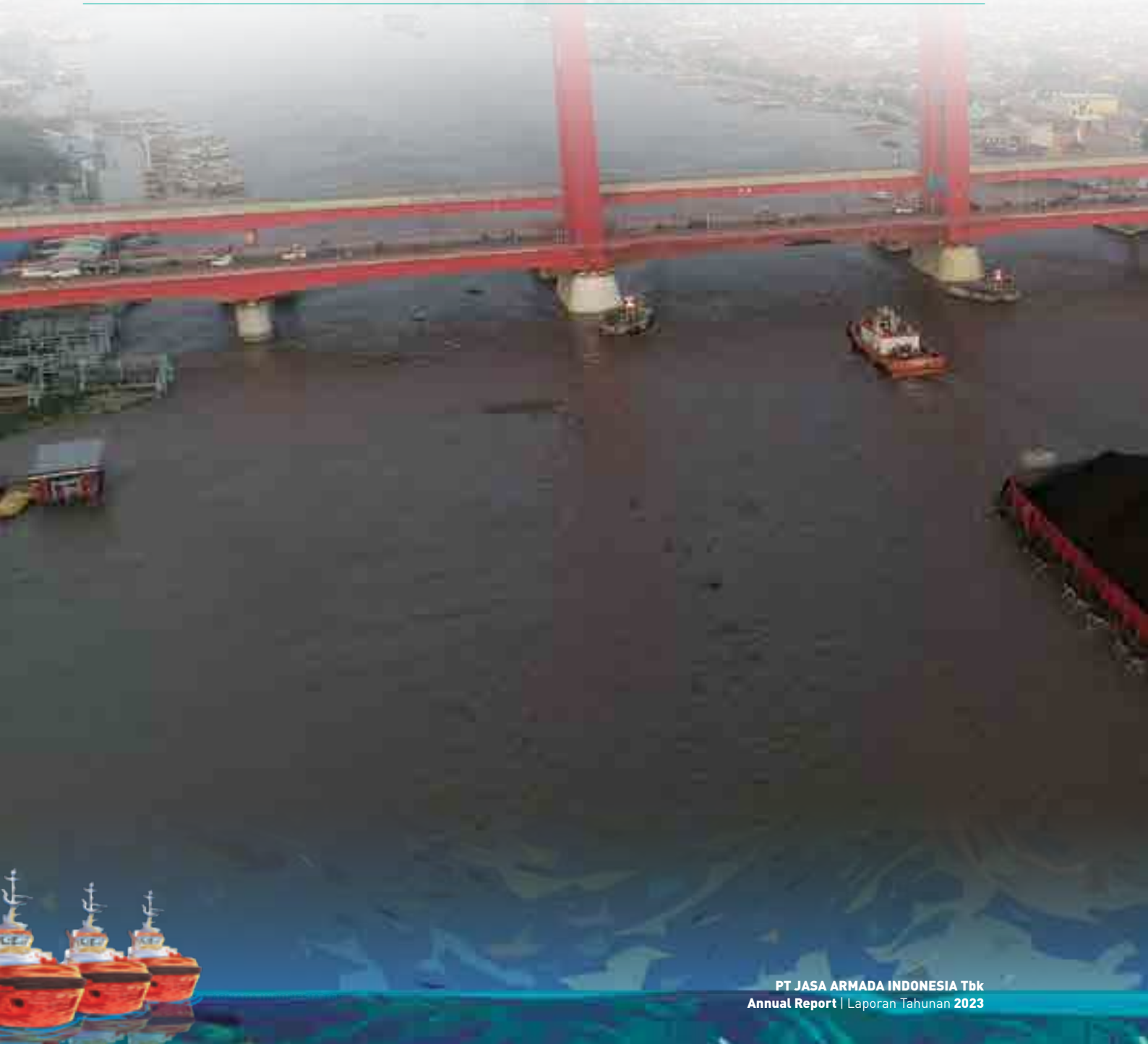



PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Dalam pengelolaan dan pengoperasian layanan usahanya, Perseroan mengendalikan bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa pelayanan kapal, jasa pengangkutan, dan jasa pengelolaan kapal

In managing and operating its business services, the Company controls the business in one segment that provides ship services, transportation services, and ship management services.



TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI
ECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW



ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Pertumbuhan perekonomian global di tahun 2023, sebelumnya telah diprediksi akan mengalami perlambatan, sebagaimana disampaikan oleh Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2023. IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mengalami penurunan dari 3,5% *year on year* (yoy) di tahun 2022 menjadi 2,9% (yoy) pada tahun 2023 yang lebih disebabkan oleh meningkatnya suku bunga dan perang di Ukraina yang terus membebani aktivitas perekonomian.

Kemudian, dalam laporan WEO edisi Oktober 2023, IMF mengkoreksi pertumbuhan perekonomian tahun 2023 menjadi sedikit lebih tinggi, yakni 3,0% (yoy) dan 2,9% (yoy) pada tahun 2024. Angka ini jauh di bawah rata-rata historis (2000-2019) sebesar 3,8%. Negara maju diprediksi mengalami perlambatan dari 2,6% (yoy) pada tahun 2022 menjadi 1,5% (yoy) pada tahun 2023 dan 1,4% (yoy) pada tahun 2024 akibat penerapan kebijakan ketat. Sementara itu, pasar negara maju dan negara berkembang diperkirakan mengalami penurunan pertumbuhan moderat dari 4,1% (yoy) pada tahun 2022 menjadi 4,0% (yoy) pada tahun 2023 dan 2024.

NATIONAL AND GLOBAL ECONOMIC ANALYSIS.

Global economic growth in 2023 was previously predicted to experience a slowdown, as stated by the International Monetary Fund (IMF) in the January 2023 edition of the World Economic Outlook (WEO) report. IMF has projected that global economic growth will decline from 3.5% year on year (yoy) in 2022 to 2.9% (yoy) in 2023, mainly due to rising interest rates and the ongoing war in Ukraine, which continues to weigh on economic activity.

Then, in the October 2023 edition of the WEO report, the IMF corrected economic growth in 2023 to be slightly higher, namely 3.0% (yoy), and 2.9% (yoy) in 2024. This figure is far below the historical average (2000-2019) of 3.8%. Developed countries are predicted to experience a slowdown from 2.6% (yoy) in 2022 to 1.5% (yoy) in 2023 and 1.4% (yoy) in 2024 due to the implementation of strict policies. Meanwhile, developed markets and developing countries are expected to experience a moderate decline in growth from 4.1% (yoy) in 2022 to 4.0% (yoy) in 2023 and 2024.

Proyeksi inflasi global menunjukkan penurunan berkelanjutan, dari 8,7% (yoy) pada tahun 2022 menjadi 6,9% (yoy) pada tahun 2023 dan 5,8% (yoy) pada tahun 2024. Hal tersebut dipicu oleh kebijakan moneter yang lebih ketat dan penurunan harga komoditas internasional. Inflasi inti diharapkan turun bertahap dan tidak akan mencapai target hingga tahun 2025.

Global inflation projections show a continued decline, from 8.7% (yoy) in 2022 to 6.9% (yoy) in 2023 and 5.8% (yoy) in 2024. This was triggered by tighter monetary policy and a decline in international commodity prices. Core inflation is expected to fall gradually and will not reach the target until 2025.

Sementara, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat proyeksi perlambatan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada tahun 2023, diperkirakan mencapai 8,1% (yoy). Revisi proyeksi menunjukkan kenaikan 0,2% poin dari estimasi sebelumnya. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi konsumsi masyarakat pada awal tahun 2023, proyeksi pertumbuhan ini dianggap tidak berkelanjutan karena dipicu oleh penggunaan tabungan selama pandemi, sementara The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga. Prediksi untuk tahun 2024 menunjukkan perlambatan lebih lanjut, dengan estimasi 1,0%, naik 0,1% poin dari revisi sebelumnya.

Meanwhile, based on data from the Central Statistics Agency (BPS), there is a projected economic slowdown in the United States (US) in 2023, estimated to reach 8.1% (yoy). The revised projection shows an increase of 0.2% points from the previous estimate. Even though there will be economic growth in public consumption in early 2023, this growth projection is considered unsustainable because it was triggered by the use of savings during the pandemic, while the Fed is expected to increase interest rates. Forecasts for 2024 suggest a further slowdown, with an estimate of 1.0%, up 0.1% point from the previous revision.

Adapun ekonomi Indonesia diprediksi akan terus tumbuh konsisten di atas angka 5% (yoy), data BPS menunjukkan ketahanan ekonomi yang positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh lembaga dunia meningkat, meskipun pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan situasi ekonomi global masih tertekan. Namun, perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dalam kisaran 4,7% (yoy) hingga 5,0% (yoy). BPS mencatat pertumbuhan sebesar 5,1% (yoy) pada semester I 2023, sehingga diperlukan pertumbuhan sekitar 5,5% (yoy) pada semester II 2023 untuk mencapai target RKP 2023 di tengah perlambatan aktivitas ekonomi global. Mengingat kondisi ini dan risiko dari situasi ekonomi global, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan turun dari target RKP 2023, yakni 5,3% (yoy) menjadi 5,2% (yoy).

As for the Indonesian economy, it is predicted to continue growing consistently above 5% (yoy) as BPS data showed positive economic resilience. Projections for Indonesia's economic growth by world institutions have increased, even though China's economic growth and the global economic situation remain depressed. However, estimates for Indonesia's economic growth remain in the range of 4.7% (yoy) to 5.0% (yoy). BPS recorded growth of 5.1% (yoy) in the first semester of 2023, therefore growth of around 5.5% (yoy) is needed in the second semester of 2023 to achieve the 2023 RKP target amidst a slowdown in global economic activity. Considering these conditions and the risks from the global economic situation, Indonesia's economic growth projection is estimated to decrease from the 2023 RKP target, namely 5.3% (yoy), to 5.2% (yoy).

Sementara, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, sebagai negara dengan ekonomi yang berbasis besar pada sektor komoditas, Indonesia telah menunjukkan performa ekspor dan impor yang dinamis sepanjang tahun 2023.

Meanwhile, based on data released by BPS, as a country with an economy based largely on the commodity sector, Indonesia has shown dynamic export and import performance throughout 2023.

Nilai Ekspor Indonesia periode 2021-2023
Indonesia's Export Value for 2021-2023
(dalam juta USD) | (in million USD)

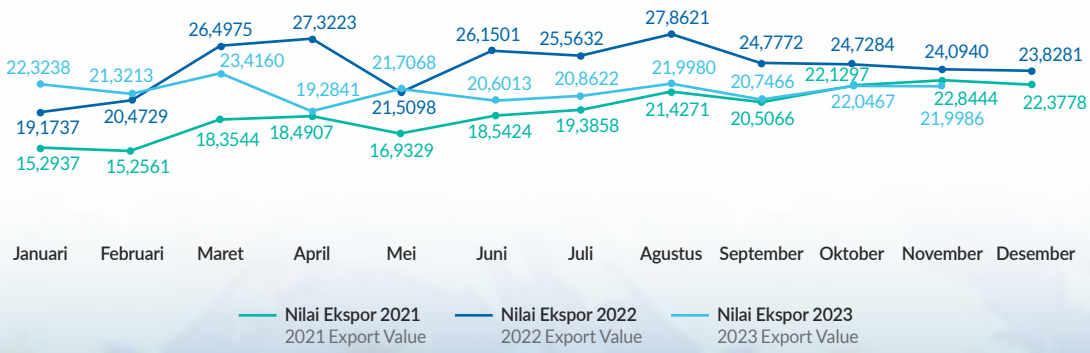

Nilai Impor Indonesia periode 2021-2023
Indonesia's Import Value for 2021-2023
(dalam juta USD) | (in million USD)

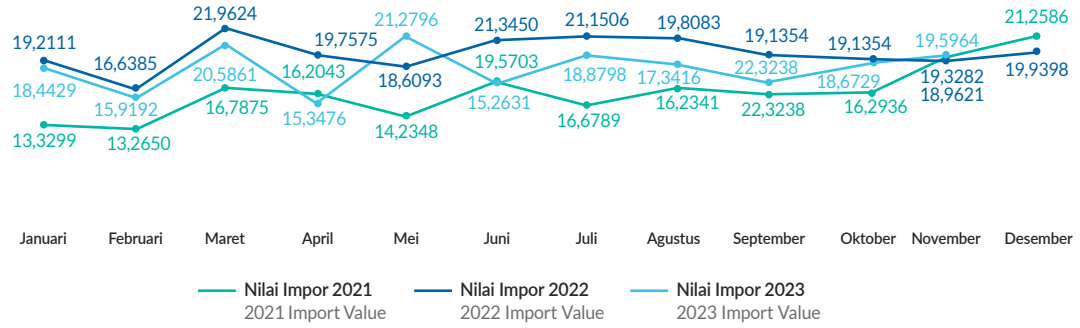

Inflasi di Indonesia %
Inflation in Indonesia %
(dalam juta USD) | (in million USD)

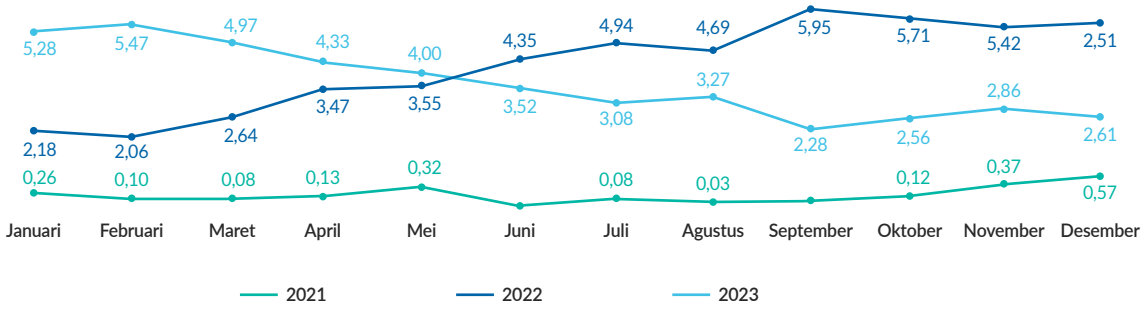

ANALISIS INDUSTRI DAN POSISI PERSEROAN DALAM INDUSTRI

Berdasarkan laporan *Review of Maritime Transport* 2023 oleh *United Nations Conference On Trade and Development* (UNCTAD), industri maritim tengah menghadapi momentum krusial dalam menghadapi tantangan dekarbonisasi. Emisi gas rumah kaca yang meningkat 20% selama dekade terakhir menunjukkan urgensi untuk melakukan transisi menuju industri yang lebih ramah lingkungan.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah usia armada kapal yang semakin tua. Dengan usia rata-rata kapal mencapai 22,2 tahun pada awal tahun 2023, banyak kapal di sektor ini terlalu tua untuk diperbaiki atau terlalu muda untuk dibuang. Hal ini menimbulkan dilema tersendiri dalam mencapai target dekarbonisasi.

INDUSTRIAL ANALYSIS AND THE COMPANY'S POSITION WITHIN THE INDUSTRY

Based on the Review of Maritime Transport 2023 report by the United Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD), the maritime industry is facing a crucial moment in confronting the challenge of decarbonization. Greenhouse gas emissions have increased by 20% over the last decade, showing the urgency of transitioning towards a more environmentally friendly industry.

The main problem is the increasingly old age of the vessel fleet. With the average age of vessel reaching 22.2 years by early 2023, many vessels in this sector are either too old to repair or too young to scrap. This creates a dilemma in achieving the decarbonization target.

Meskipun bahan bakar alternatif menunjukkan harapan, namun pengadopsiannya masih terbatas. Sebagian besar armada masih bergantung pada bahan bakar fosil, dengan hanya 21% kapal yang dipesan akan menggunakan bahan bakar alternatif yang lebih bersih. Ini menyoroti tantangan dalam memperkenalkan teknologi baru di tengah ketidakpastian pasar dan regulasi.

Although alternative fuels show promise, their adoption is still limited. The majority of the fleet still relies on fossil fuels, with only 21% of vessel ordered to use cleaner alternative fuels. This highlights the challenges of introducing new technology amidst market and regulatory uncertainty.

Tanggung jawab atas transisi ini menjadi isu yang kompleks. Negara-negara besar yang menyumbang sebagian besar emisi karbon pelayaran harus berperan aktif dalam menerapkan standar baru yang ramah lingkungan. Namun, tanggung jawab untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan sebagian besar berada di pundak pemilik kapal, pelabuhan, dan industri penghasil energi.

Responsibility for this transition is a complex issue. Large countries that account for the majority of shipping carbon emissions must play an active role in implementing new environmentally friendly standards. However, the responsibility for investing in greener technologies and infrastructure largely falls on the shoulders of vessel owners, ports, and energy-producing industries.

Dalam laporan tersebut juga dikatakan bahwa Industri maritim juga dihadapkan pada ujian besar dalam menyeimbangkan prioritas ekonomi, peraturan, dan lingkungan. Keputusan mengenai langkah-langkah dekarbonisasi diambil oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan para anggotanya. Ini menunjukkan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan yang seimbang dan berkelanjutan.

The report also indicates that the maritime industry is faced with a significant test in balancing economic, regulatory, and environmental priorities. Decisions regarding decarbonization measures are made by the International Maritime Organization (IMO) and its members. This shows the need for cross-sector collaboration to achieve balanced and sustainable goals.

Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya investasi yang lebih kuat dalam teknologi dan armada ramah lingkungan. Solusi digital seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan industri ini.

In facing this challenge, there needs to be stronger investment in environmentally friendly technology and fleets. Digital solutions such as artificial intelligence (AI) and blockchain technology can help improve operational efficiency and sustainability in the industry.

Dari segi ekonomi, dekarbonisasi penuh pada tahun 2050 akan membutuhkan investasi besar-besaran, yang dapat menyebabkan biaya logistik maritim yang lebih tinggi. Namun, biaya kelambanan jauh lebih besar daripada investasi yang diperlukan, sehingga perlunya langkah-langkah proaktif dalam mengatasi masalah ini.

From an economic perspective, full decarbonization by 2050 will require massive investment, which could lead to higher maritime logistics costs. However, the costs of inaction far outweigh the investment required, rqeuiring proactive steps in addressing this issue.

Dalam analisisnya mengenai tren maritim global, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa ketahanan industri pelayaran meskipun dihadapi dengan tantangan global, yakni seperti krisis geopolitik, perdagangan maritim tetap diprediksi akan tumbuh, menunjukkan potensi industri ini dalam menghadapi tantangan dan melanjutkan pertumbuhan di masa depan.

In its analysis on global maritime trends, the report also states that the resilience of the shipping industry, even though it is faced with global challenges such as the geopolitical crisis, maritime trade is still predicted to grow, showing the potential of this industry to face challenges and continue growth in the future.

TINJAUAN OPERASIONAL
OPERATIONAL REVIEW

STRATEGI PERSEROAN

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) yang telah dirancang sebelumnya, Perseroan memiliki tujuan pertumbuhan antara 2,5 hingga 3,0 kali lipat dari posisi pada tahun 2019. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aset dan kapitalisasi pasar Perseroan masing-masing hingga mencapai setidaknya Rp3,00 triliun pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Perseroan akan menerapkan strategi berikut:

1. Meningkatkan daya saing:
   a. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM.
   b. Meningkatkan kualitas produk dan jasa
   c. Meningkatkan tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen resiko.
   d. Meningkatkan citra dan reputasi Perseroan.
2. Ekspansi Bisnis secara Organik dan Inorganik:
   a. Memperluas pasar yang sudah ada.
   b. Menambah jumlah pelanggan maupun produk dan jasa yang diberikan.
   c. Menjajaki usaha baru yang berkaitan atau yang mendukung pertumbuhan Perseroan melalui kerjasama/ akuisisi dan/atau merger.
3. Optimalisasi Kinerja Operasional dan Keuangan:
   a. Memperkuat sumber pendanaan untuk kebutuhan modal kerja dan ekspansi.
   b. Optimalisasi penggunaan produk dan jasa instansi keuangan guna membantu peningkatan produktivitas dan efisiensi.
   c. Otomasi/digitalisasi untuk mempercepat proses kerja dan pengembangan produk & jasa.

COMPANY STRATEGY

Based on the Company's Long Term Plan (RJPP), the Company has a growth goal of between 2.5 to 3.0 times the position in 2019. This is expected to increase the Company's assets and market capitalization to reach at least Rp300 trillion in 2024. To achieve this target, the Company will implement the following strategies:

1. Increase competitiveness:
   a. Improve the capabilities and quality of human resources.
   b. Enhance the quality of products and services.
   c. Enhance good corporate governance and risk management.
   d. Enhance the Company's image and reputation.
2. Organic and Inorganic Business Expansion:
   a. Expand existing markets.
   b. Increase the number of customers and products and services provided.
   c. Explore new businesses related to or supporting the Company's growth through collaboration, acquisition, and/or merger.
3. Optimizing Operational and Financial Performance:
   a. Strengthen funding sources for working capital and expansion needs.
   b. Optimize the use of financial agency products and services to help increase productivity and efficiency.
   c. Implement automation/digitization to speed up work processes and product & service development.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Perseroan dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pasar yang ada saat ini di pelabuhan umum dan terminal khusus.
2. Peningkatan tingkat utilisasi kapal.
3. Peningkatan SDM baik pandu maupun anak buah kapal.
4. Penambahan alat produksi.
5. Perbaikan pemeriksaan dan penundaan SLA dan SLG.
6. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan.

Strategi pemasaran yang baik dan diterapkan secara konsisten dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Sehingga mempengaruhi minat pengguna jasa untuk menggunakan jasa pemanduan dan layanan tunda PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Iklan dan promosi melalui media sosial dan media lainnya juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan.

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

In order to increase the Company's income, several strategies are being implemented as follows:

1. Strengthening the existing market at public ports and special terminals.
2. Increasing ship utilization rates.
3. Increasing human resources for both pilots and ship crews.
4. Adding production equipment.
5. Ensuring fixed SLA and SLG checks and minimizing delays.
6. Cultivating harmonious relationships with stakeholders.

A well-executed marketing strategy can provide added value for the Company, influencing the interest of service users to utilize PT Jasa Armada Indonesia Tbk's piloting and towing services. Advertisements and promotions through social media and other channels are also expected to have a positive impact on the Company.



Pangsa Pasar

Perseroan dalam industri pelayanan pemanduan semakin berkembang dengan strategi kerjasama yang dijalankan bersama BUP sebagai penerima pelimpahan pemanduan, yang secara efektif membangun sinergi yang kuat di antara kedua belah pihak. Dalam upaya memperluas cakupan pasar, Perseroan melakukan kajian bisnis yang komprehensif terkait dengan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal. Kolaborasi ini juga melibatkan penyediaan sarana dan prasarana pemanduan, serta bisnis turunan dalam ranah Jasa Kepelabuhanan.

Sebagai contoh, Perseroan telah menjalin kerjasama dengan beberapa entitas terkemuka. Salah satunya adalah kontrak kerjasama dengan PT Langlai Laju Layang untuk pelayanan perairan di Weda (Teluk Weda) Provinsi Maluku Utara. Selain itu, Perseroan juga terlibat dalam pelaksanaan sesi berbagi informasi dan evaluasi pelayanan pemanduan kapal di TUKS PT Chandra Asri Petrochemical, menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan mutu layanan.

Lebih lanjut, kerjasama dalam menyediakan sarana bantu pemanduan, seperti kapal tunda di terminal Cigading milik PT Krakatau Bandar Samudera, menandai langkah strategis Perseroan dalam memperluas portofolio layanannya. Begitu juga dengan kontrak kerjasama time charter kapal tunda antara Jawa Satu Power & PLNGG & Bahtera Adhiguna dan Perseroan, yang memperkuat posisinya dalam industri.

Tidak hanya itu, Perseroan juga menjalankan kerjasama dalam menyediakan sarana bantu pemanduan berupa kapal tunda dan awak kapal dengan sistem on call di TUKS PT Bukit Asam Tbk Tarahan, menunjukkan keterlibatannya dalam menyediakan solusi yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan klien.

Dengan demikian, melalui serangkaian kerjasama strategis ini, Perseroan mampu memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saingnya dalam industri pelayanan pemanduan, memperkuat posisinya sebagai pemain utama yang memberikan layanan berkualitas dan terpercaya di pasar yang semakin kompetitif.

Market Share

The Company is increasingly developing in this guiding industry, with a cooperation strategy with BUP being implemented as the recipient of the guidance delegation, it effectively builds strong synergy between the two parties. In an effort to expand market coverage, the Company conducted a comprehensive business study related to vessel piloting and towing services. This collaboration also involves the provision of guidance facilities and infrastructure, as well as derivative businesses in the realm of Port Services.

For example, the Company has collaborated with several leading entities. One of them is through a cooperation contract with PT Langlai Laju Layang for water services in Weda (Weda Bay), North Maluku Province. Apart from that, the Company is also involved in holding information sharing sessions and evaluating vessel piloting services at TUKS PT Chandra Asri Petrochemical, showing its commitment to improving service quality.

Furthermore, collaboration in providing pilotage assistance facilities, such as tugboats at the Cigading terminal owned by PT Krakatau Bandar Samudera, marks the Company's strategic step in expanding its service portfolio. Likewise, with the tugboat time charter cooperation contract between Jawa Satu Power & PLNGG & Bahtera Adhiguna and the Company, it strengthens its position in the industry.

Not only that, the Company also collaborates in providing guidance assistance facilities in the form of tugboats and crews with an on-call system at TUKS PT Bukit Asam Tbk Tarahan, showing its involvement in providing flexible and responsive solutions to client needs.

Thus, through this series of strategic collaborations, the Company is able to expand its market share and increase its competitiveness in the guiding services industry, strengthening its position as a major player providing quality and reliable services in an increasingly competitive market.

TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA
PERFORMANCE REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Segmen usaha merupakan bagian dari suatu entitas perusahan dan terlibat dalam aktivitas bisnis Perseroannya dimana usaha tersebut memperoleh pendapatan sekaligus menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari Perseroan yang sama). Seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas, termasuk pendapatan, beban, dan hasil aset, mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Dalam pengelolaan dan pengoperasian layanan usahanya, Perseroan mengendalikan bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa pelayanan kapal, jasa pengangkutan, dan jasa pengelolaan kapal. Uraian masing-masing segmen usaha Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Jasa Pelayanan Kapal**
   Jasa Pelayanan Kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Sebagai mitra PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, Perseroan memberikan produk dan jasa utama dalam pelayanan jasa kapal yang meliputi jasa penundaan dan jasa pemanduan. Pada segmen jasa penundaan mencakup kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal, dan membantu kapal yang berolah-gerak dalam alur pelayaran, daerah labuh jangkar, maupun kolam untuk tambat atau untuk lepas dari dermaga. Pada segmen jasa pemanduan, melayani kapal masuk menuju dan keluar dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

   Berdasarkan jenisnya, kapal pandu memiliki 3 bentuk pandu pelayanan kegiatan pemanduan, yaitu: (a) pandu laut; (b) pandu bandar; dan (c) pandu bandar utama. "Pandu laut" bertugas memandu kapal-kapal dari kolam pelabuhan sampai batas perairan wajib pandu atau sebaliknya; sedangkan "Pandu bandar" memandu kapal-kapal di kolam pelabuhan. Terakhir, "pandu bandar utama" melayani pelabuhan utama dengan ukuran kapal yang lebih besar.

2. **Jasa Pengelolaan Kapal**
   Jasa Pengelolaan Kapal merupakan kegiatan usaha Perseroan dengan menggandeng PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional 2 dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal motor Pandu yang digunakan untuk memobilisasi petugas pandu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemanduan kapal di seluruh wilayah perairan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

A business segment constitutes a part of a corporate entity engaged in the Company's business activities, where it generates income and incurs expenses (including those related to transactions with other components of the same Company). All assets, liabilities, and equity, along with revenues, expenses, and returns on assets, encompass items directly attributable to a segment and can be allocated on an appropriate basis to that segment.

In managing and operating its business services, the Company controls one segment which provides ship services, transportation services, and ship management services. The description of each of the Company's business segments is explained as follows:

1. **Vessel Services**
   Vessel Services or ship services involve operational activities from ship entry to departure from the port. As a partner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, the Company offers towing and piloting services as its main products. Towing services encompass activities such as pushing, pulling, towing, escorting, and assisting ships in shipping lanes, anchor areas, or pools for mooring or departing from the dock. Pilotage services involve guiding ships entering and leaving the pier through the port channel, ensuring safe and orderly navigation for the safety of ships and the environment.

   Based on their type, pilot ships offer three forms of services: (a) sea pilot; (b) harbor pilot; and (c) main port pilot. "Sea pilots" guide ships from the port pool to the boundary of the waters requiring piloting or vice versa, while "harbor pilots" guide ships within the harbor pool. Lastly, "main port pilots" serve major ports with larger ship sizes.

2. **Vessel Management Services**
   Vessel Management Services or ship management services entail the Company's collaboration with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 in managing and maintaining Pandu motor boats utilized for pilot officers' mobilization in carrying out ship piloting service duties throughout the waters of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).



Perawatan yang dilakukan terdiri dari 2 macam yaitu: (1) perawatan berkala, dilakukan setiap tahun; (2) perawatan incidental, dilakukan sesuai kebutuhan terutama apabila terjadi kerusakan di tengah operasi. Pemeriksaan menyeluruh (termasuk baling-baling dan *shaft* yang dimiliki oleh kapal) dilakukan pada periode *maintenance* yang mengharuskan kapal masuk gelanggang yaitu setiap 2,5 tahun.

3. **Jasa Pengangkutan dan Lainnya**
   Jasa Pengangkutan dan Lainnya merupakan kegiatan usaha Perseroan dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil produksi antar wilayah pelabuhan. Segmen bisnis ini, utamanya dalam melayani pengangkutan material dan hasil produksi dari BUMN. Kegiatan pelayanan jasa pengangkutan sejalan dengan pangsa pasar bisnis angkutan laut saat ini dimana cargo owner terbesarnya merupakan Perseroan-Perseroan BUMN seperti: PT Perseroan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perseroan Gas Negara (Persero), PT Semen Indonesia (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN

Berdasarkan tinjauan operasional, data keuangan untuk setiap segmen usaha tahun 2022 dan tahun 2023, dijelaskan sebagai berikut:

Types of maintenance come in 2 including: (1) periodic maintenance conducted annually; (2) incidental maintenance performed as needed, especially in case of damage occurring during operation. Comprehensive inspections, including the propeller and shaft of the ship, are carried out during maintenance periods, requiring the ship to undergo dry-docking every 2.5 years.

3. **Freight Services and Other Services**
   Freight and Other Services involve the transportation of materials or goods and production results between port areas. This segment primarily serves the transportation needs of state-owned enterprises (SOEs) such as PT Perusahaan Usaha Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Semen Indonesia (Persero), and PT Pupuk Indonesia (Persero). Transport activities align with the current market share of the maritime transport industry, where the largest cargo owners are state-owned companies.

REVENUES AND PROFITABILITY OF SEGMENTS

Based on the operational review, financial data for each business segment in 2022 and 2023 is explained as follows:

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2023
Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	Tahun 2023 Year 2023			
	Jasa Pelayanan Kapal Vessel Services	Jasa Pengangkutan dan Lainnya Freight and Other Services	Jasa Pengelolaan Kapal Vessel Management Services	Total
Pendapatan Operasi Segmen Operating Income of Each Segment	1.060.761	46.275	31.500	1.138.537
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(744.197)	(32.465)	(22.099)	(798.761)
Laba Bruto Gross Profit	316.564	13.810	9.401	339.775
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	-	-	-	(165.468)
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income	-	-	-	10.181
Beban Operasi Lainnya Other Operating Expenses	-	-	-	(729)
Laba Usaha **Operating profit**	-	-	-	183.758
Pendapatan Keuangan Financial Income	-	-	-	14.958
Beban Keuangan Financial Expenses	-	-	-	(2.773)

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2023
Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	Tahun 2023 Year 2023			
	Jasa Pelayanan Kapal Vessel Services	**Jasa Pengangkutan dan Lainnya** Freight and Other Services	**Jasa Pengelolaan Kapal** Vessel Management Services	**Total**
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan **Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan**	-	-	-	**195.943**
Beban Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan	-	-	-	(38.927)
Laba Tahun Berjalan **Laba Tahun Berjalan**	-	-	-	**157.661**
Penghasilan Komprehensif Lain Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	**157.661**

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2022
Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2022

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	Tahun 2022 Year 2022			
	Jasa Pelayanan Kapal Vessel Services	**Jasa Pengangkutan dan Lainnya** Freight and Other Services	**Jasa Pengelolaan Kapal** Vessel Management Services	**Total**
Pendapatan Operasi Segmen Operating Income of Each Segment	875.124	51.044	54.000	980.168
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(596.307)	(33.881)	(47.433)	(677.621)
Laba Bruto **Gross Profit**	**278.817**	**17.163**	**6.567**	**302.546**
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	-	-	-	(117.607)
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income	-	-	-	749
Beban Operasi Lainnya Other Operating Expenses	-	-	-	(11.673)
Laba Usaha **Operating profit**	**-**	**-**	**-**	**174.014**
Pendapatan Keuangan Financial Income	-	-	-	14.141
Beban Keuangan Financial Expenses	-	-	-	(2.117)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan **Profit Before Corporate Income Tax Expense**	**-**	**-**	**-**	**186.038**
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	-	-	-	(35.384)
Laba Tahun Berjalan **Profit for the Year**	**-**	**-**	**-**	**150.654**
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	-	-	-	-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	-	-	-	150.654

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan operasi segmen tahun 2023 tercatat mencapai Rp1,14 triliun atau meningkat 16,16% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp980,17 miliar. Segmen jasa pelayanan kapal masih menempati urutan nomor satu penyumbang pendapatan operasi terbesar bagi Perseroan. Di mana pada tahun 2023, segmen jasa pelayanan kapal mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,06 triliun mengalami peningkatan 21,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp875,12 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kunjungan kapal khususnya pada Pelabuhan Tersus sejalan dengan upaya Perusahaan dalam melakukan optimalisasi pelayanan pasar Non Pelindo. Kemudian segmen jasa pengangkutan dan lainnya mencatatkan pendapatan sebesar Rp46,28 miliar di tahun 2023, mengalami penurunan 9,34% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp51,04 miliar. Sementara segmen jasa pengelolaan kapal mencatatkan pendapatan sebesar Rp31,50 miliar mengalami penurunan 41,67% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp54,00 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan oleh dampak atas pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sehingga terhitung mulai periode Agustus 2023 Perusahaan tidak lagi mendapatkan Pendapatan Jasa Pengelolaan Kapal.

Based on the table above, operating income of each segment in 2023 was recorded at Rp1.14 trillion or an increase of 16.16% compared to the previous year which amounted to Rp980.17 billion. The ship services segment still ranks as the number one contributor to the Company's largest operating income. Whereas in 2023, the ship services segment recorded a revenue of Rp1.06 trillion, an increase of 21.21% compared to the previous year which amounted to Rp875.12 billion. This increase was caused by the increase in ship visits, especially at Tersus Port, is in line with the Company's efforts to optimize Non Pelindo market services. Meanwhile the transportation and other services segment recorded revenue of Rp46.28 billion in 2023, a decrease of 9.34% compared to the previous year which amounted to Rp51.04 billion. Meanwhile, the ship management services segment recorded revenue of Rp31.50 billion, a decrease of 41.67% compared to the previous year which amounted to Rp54.00 billion. This decline was caused more by the impact of the termination of the Cooperation Agreement for the Provision of Guiding Facilities within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) so that starting from the August 2023 period the Company will no longer receive Ship Management Services Revenue.

Dari sisi profitabilitas segmen, di tahun 2023, Perseroan tercatat berhasil membukukan total laba bruto sebesar Rp339,78 miliar atau meningkat 12,31% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp302,55 miliar. Segmen jasa pelayanan kapal membukukan laba kotor sebesar Rp316,56 miliar mengalami peningkatan 13,54% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp278,82 miliar.

In terms of profitability, in 2023, the Company recorded a successful achievement with a total gross profit of Rp339.78 billion or an increase of 12.31% compared to the previous year which amounted to Rp302.55 billion. The ship services segment posted a gross profit of Rp316.56 billion, an increase of 13.54% compared to the previous year which amounted to Rp278.82 billion.

Kemudian segmen jasa pengangkutan dan lainnya membukukan laba kotor sebesar Rp13,81 miliar di tahun 2023, mengalami penurunan 19,54% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp17,16 miliar. Sementara segmen jasa pengelolaan kapal membukukan laba kotor sebesar Rp9,40 miliar mengalami peningkatan 43,16% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,57 miliar.

Additionaly the transportation and other services segment posted a gross profit of Rp13.81 billion in 2023, a decrease of 19.54% compared to the previous year which amounted to Rp17.16 billion. Meanwhile, the ship management services segment posted a gross profit of Rp9.40 billion, an increase of 43.16% compared to the previous year which amounted to Rp6.57 billion.

Kontribusi Segmen Usaha terhadap Total Pendapatan dan Laba Kotor Tahun 2023

Contribution of Segment towards Revenues and Gross Profit of 2023

Kontribusi Segmen Usaha terhadap Total Pendapatan (%)
Business Segment Contribution to Total Revenue (%)

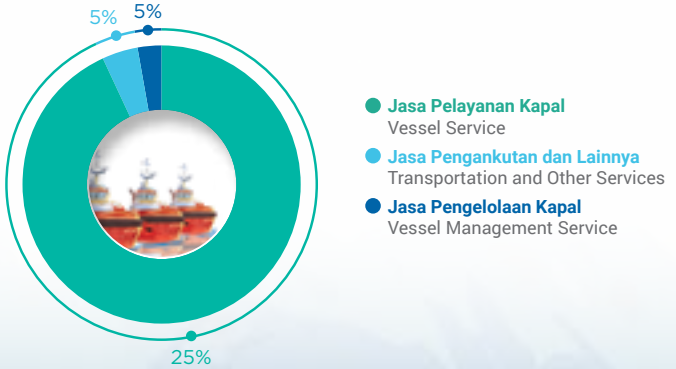

Kontribusi Segmen Usaha terhadap Total Laba Kotor (%)
Business Segment Contribution to Total Gross Profit (%)



Berikut ini, tabel penyajian data Aset dan Liabilitas per Segmen tahun 2023 dan 2022:

The following is the Assets and Liabilitites for each Segment in 2023 and 2022:

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	Tahun 2023 Year 2023 Jasa Pelayanan Kapal Vessel Services	Jasa Pengangkutan dan Lainnya Freight and Other Services	Jasa Pengelolaan Kapal Management Services	Total
Aset Segmen Assets	654.295			654.295
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan\ Unallocated Assets				867.839
Total Aset Total Assets				1.522.134
Liabilitas Liabilities	236.914			236.914
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan Unallocated Assets				44.700
Total Liabilitas Total Liabilities				281.614
Tahun 2022				
Aset Segmen Assets	652.788		4.500	657.288
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan Unallocated Assets				830.919
Total Aset Total Assets	652.788		4.500	1.488.208
Liabilitas Liabilities	183.964		25.086	209.050
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan Unallocated Assets				82.639
Total Liabilitas Total Liabilities	183.964		25.086	291.689

Berdasarkan tabel di atas, sokongan tebesar jumlah aset yang dapat didistribusikan per segmen pada tanggal 31 Desember 2023 berasal dari segmen jasa pelayanan kapal yaitu sebesar Rp654,30 miliar atau 100% dari total aset segmen yang dapat didistribusikan. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,46% dibanding posisi 31 Desember 2022. Sementara dari sisi kewajiban, kontribusi yang dapat dialokasikan per segmen pada tanggal 31 Desember 2023 terbesar berasal dari segmen jasa pelayanan kapal yaitu sebesar Rp236,91 miliar atau 100% dari total kewajiban segmen yang dapat dialokasikan. Jumlah tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 13,33% dibanding posisi 31 Desember 2022.

Based on the table above, the ship services segment provides the largest support for the amount of assets distributable per segment as of December 31, 2023, amounting to Rp654.30 billion, representing 100% of the total assets available for distribution. This amount has decreased by 0.46% compared to the position on December 31, 2022. In terms of liabilities, the ship services segment also contributes the most to the total allocable liabilities per segment as of December 31, 2023, with Rp236.91 billion or 100% of the total liabilities allocable to segments. This figure represents an increase of 13.33% compared to the position on December 31, 2022.

PRODUKTIVITAS SEGMEN

Berikut adalah gambaran realisasi produksi jasa kapal pada tahun 2023

PRODUCTIVITY OF SEGMENT

The following is the realization of production for ship services in 2023

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2022 2022 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	Deviasi Deviation	Serapan Absortion	Trend
			1	2	3	(3-2)/2	5 = (3/2)	3/1
A	Penundaan Towing	Jam/Kapal Hour/Ship	166.854	175.765	172.569	-1,82%	98,18%	103,43%
		GT Jam GT Hour	1.431.615.152	1.548.135.693	1.574.087.754	1,68%	101,68%	109,95%
1	Pelabuhan Umum dan TUKS General Port and TUKS	Jam/Kapal Hour/Ship	146.073	154.507	144.742	-6,32%	93,68%	99,09%
		GT Jam GT Hour	1.255.746.023	1.371.850.837	1.356.983.283	-1,08%	98,92%	108,06%
2	Tersus	Jam/Kapal Hour/Ship	20.781	21.258	27.827	30,90%	130,90%	133,91%
		GT Jam GT Hour	175.869.129	176.284.856	217.104.472	23,16%	123,16%	123,45%
B	Pemanduan Piloting	Jam/Kapal Hour/Ship	13.181	56.556	62.505	10,52%	110,52%	474,20%
		GT Jam GT Hour	102.210.659	432.008.161	446.810.121	3,43%	103,43%	428,76%
1	Pelabuhan Umum dan TUKS General Port and TUKS	Gerak Movement	-	43.063	45.870	6,52%	106,52%	100%
		GT Kapal GT Ship	-	324.331.574	324.128.124	-0,06%	99,94%	100%
2	Tersus	Gerak Movement	13.181	13.494	16.635	23,28%	123,28%	126,20%
		GT Kapal GT Ship	104.210.659	107.676.588	122.681.997	13,94%	113,94%	117,72%

Berdasarkan penyajian data diatas, dapat dilihat realisasi pencapaian produksi penundaan kapal dilihat dari aspek Jam/Kapal (Pelabuhan Umum, TUKS, dan Tersus) pada tahun 2023 tercatat sebesar 98,18% sedangkan dari aspek GT Jam (Pelabuhan Umum, TUKS, dan Tersus) sebesar 101,68% dari RKAP tahun 2023. Nilai tersebut meningkat sebesar 3,43% pada aspek Jam/kapal dan 9,95% pada aspek GT Jam dibandingkan dengan realisasi dan RKAP tah un 2022.

Selanjutnya, realisasi pencapaian produksi pemanduan kapal dilihat dari aspek gerak (Tersus) mencapai kenaikan sebesar 123,28%, sedangkan dari aspek GT (Tersus) sebesar 113,94% dari RKAP tahun 2023. Dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2022, terdapat peningkatan/penurunan yaitu 26,204% dari aspek Gerak dan 17,73% dari realisasi aspek GT Jam.

Total kinerja data produksi pelayanan penundaan kapal diperhitungkan dengan melihat kinerja baik di Pelabuhan Umum dan TUKS di wilayah operasi Pelindo maupun di Terminal Khusus (Tersus) di luar wilayah operasi Pelindo, dengan penjabaran sebagai berikut:

Based on the data above, the achievement of ship towing production, observed from the Hour/Ship perspective (General Port, TUKS, and Tersus) in 2023, was recorded at 98.18% while from the GT Hour perspective (General Port, TUKS, and Tersus) it amounted to 101.68% of the 2023 RKAP. This value increased by 3.43% in the Hour/ship aspect and 9.95% in the GT Hour aspect compared to the realization and 2022 RKAP.

Furthermore, the realization of ship piloting production achievement, observed from the movement aspect (Tersus), reached an increase of 123.28% while from the GT aspect (Tersus) it amounted to 113.94% of the 2023 RKAP. Compared with the achievement in 2022, there was an increase/decrease, namely 26.204% from the Movement aspect and 17.73% from the realization of the GT Hour aspect.

The total performance data on ship towing service production is calculated by examining performance at both General Ports and TUKS in Pelindo's operational areas and at Special Terminals (Tersus) outside Pelindo's operational areas, with the following explanation:

Penundaan Kapal pada Wilayah Operasi Pelindo Regional 2

Untuk pelayanan pelayanan jasa kapal khususnya pada Penundaan, JAI saat ini beroperasi pada sebelas lokasi di wilayah Regional 2 Pelindo yaitu Tanjung Priok, Panjang, Teluk Bayur, Palembang, Pontianak, Cirebon, Banten, Bengkulu, Jambi, Pangkal balam, dan Tanjung Pandan, ditambah dengan 9 (sembilan) lokasi di luar wilayah Pelindo.

Untuk pelayanan pemanduan, JAI hanya beroperasi pada 9 (sembilan) lokasi diluar wilayah Regional 2 PT Pelindo.

Total produksi pelayanan Penundaan secara Jam dan GT Jam tahun 2023 Jam dan GT Jam meningkat masing-masing sebesar 3,43% dan 9,95% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yaitu masing-masing 172.569 Jam dan 1.574.087.754 GT Jam, dan jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2023, capaian realisasi produksi Penundaan tahun 2023 kurang dari 1,82% dan GT Jam tercapai 1,68%.

Sedangkan untuk total produksi Pemanduan dihitung secara Gerak dan GT masing-masing meningkat 26.20% dan 17.72% jika dibandingkan tahun 2022 menjadi 16.635 Gerak dan 122.681.997 GT, dan dengan capaian realisasi jika dibandingkan RKAP 2023 masing-masing tercapai 23,28% dan 1313,94%, seperti tersaji pada tabel sebagai berikut:

Vessel Towage in Pelindo Regional Operational Area 2

For vessel services, especially on towage, JAI currently operates at eleven locations in Pelindo's Regional 2 area, namely Tanjung Priok, Panjang, Teluk Bayur, Palembang, Pontianak, Cirebon, Banten, Bengkulu, Jambi, Pangkal Balam, and Tanjung Pandan, plus 9 (nine) locations outside Pelindo's territory.

For guiding services, JAI only operates in 9 (nine) locations outside PT Pelindo's Regional 2 area.

Total production of Towage services by Hours and GT Hours in 2023 increased respectively by 3.43% and 9.95% when compared to the same period in 2022, reaching 172,569 Hours and 1,574,087,754 GT Hours respectively. When compared with the 2023 RKAP, the achievement of Towage production realization in 2023 was less than 1.82%, and GT Hours reached 1.68%.

Meanwhile, the total Guidance production calculated in terms of Motion and GT respectively increased by 26.20% and 17.72% when compared to 2022, reaching 16,635 Motion and 122,681,997 GT. The realization achievements compared to the 2023 RKAP reached 23.28% and 13.94% respectively, as presented in the following table::

Uraian Description	**Wilayah** Region	**Satuan** Unit	**s.d Desember** until December			***Trend***	**Deviasi** Deviation
			Realisasi 2022 2022 Realization	**RKAP 2023** 2023 RKAP	**Realisasi 2023** 2023 Realization		
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6 = 5:3**	**7 = 5:4**
Penundaan Piloting	Umum General	Jam Hour	97,403	102,349	98,300	100.92%	96.04%
		GT Jam GT Hour	935,692,189	1,024,353,230	981,838,545	104.93%	95.85%
	TUKS	Jam Hour	48,670	52,159	46,442	89.22%	89.04%
		GT Jam GT Hour	320,053,834	347,896	375,748	117.21%	109.79%
	Tersus	Jam Hour	20,781	21,858	27,827	133.91%	130.90%
		GT Jam GT Hour	175,869,129	176,284,856	217,407,472	123.45%	123.29%
	Total	Jam Hour	166,854	175,366	172,569	103.43%	98.18%
		GT Jam GT Hour	1,431,615,152	1,548,121,982	1,574,087,754	109.95%	101.68%
Pemanduan Towing	Tersus	Gerak Movement	13,181	13,494	16,635	126.20%	123.28%
		GT	104,210,659	107,676,588	122,681,997	126.20%	113.94%
	Total	Gerak Movement	13,181	13,494	16,635	126.20%	123.28%
		GT	104,210,659	107,676,588	122,681,997	126.20%	113.94%

Berikut Detail Produksi per Layanan:

The following is the Production Detail by Services:

1. **Penundaan Umum**
   General Towing

Uraian Description	Wilayah Region	Satuan Unit	s.d Desember s.d Desember			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2022 2022 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	6 = 5:3	7 = 5:4
	1	2	3	4	5	6	7
Penundaan Umum General Towing	TPK	Jam Hour	61.403	64,558	63,582	103.55%	98.49%
		GT Jam GT Hour	717.278.759	778,076,955	796,362,153	108.66%	96.22%
	BTN	Jam Hour	8.660	8,957	7,516	86.79%	83.92%
		GT Jam GT Hour	57.050.238	66,075,568	44,244,497	77.46%	66.93%
	PJG	Jam Hour	5.382	5,556	5,875	109.16%	105.73%
		GT Jam GT Hour	54.460.533	62,767,745	58,608,558	108.85%	103.76%
	PLG	Jam Hour	2.113	2,719	4,420	208.44%	162.95%
		GT Jam GT Hour	6.331.750	7,528,199	17,354,411	230.53%	130.85%
	TBS	Jam Hour	5.504	5,929	3,489	63.39%	58.85%
		GT Jam GT Hour	44.564.506	49,083,215	25,300,942	56.89%	51.21%
	BKL	Jam Hour	2.860	1,998	2,731	95.47%	136.68%
		GT Jam GT Hour	10.600.080	12,007,198	9,170,310	86.52%	71.60%
	PBM	Jam Hour	2.277	7,134	2,966	130.26%	41.47%
		GT Jam GT Hour	4.316.555	3,627,134	6,086,366	167.85%	140.26%
	CRB	Jam Hour	2.282	2,558	2,387	104.94%	97.53%
		GT Jam GT Hour	6.550.207	7,295,845	7,161,433	103.29%	98.19%
	PTK	Jam Hour	6.922	3,437	5,413	78.20%	157.51%
		GT Jam GT Hour	34.539.561	37,959,057	25,097,576	72.66%	66.12%
Total Penundaan Umum Total General Delay		**Jam** Hour	97.403	102,349	98,300	100.92%	96.04%
		GT Jam GT Hour	935.692.189	1,024,353,230	981,838,545	104.93%	95.85%

2. Penundaan TUKS
TUKS Towing

Uraian Description	Wilayah Region	Satuan Unit	s.d Desember s.d Desember			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2022 2022 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	6 = 5:3	7 = 5:4
	1	2	3	4	5	6	7
Penundaan TUKS TUKS Towing	TPK	Jam Hour	-	-	-	-	-
		GT Jam GT Hour	-	-	-	-	-
	BTN	Jam Hour	18.569	22,357	23,716	110.55%	106.08%
		GT Jam GT Hour	206.397.630	249,604,053	279,147,644	112.75%	113.59%
	PJG	Jam Hour	2.406	2,460	2,431	116.20%	98.81%
		GT Jam GT Hour	13.964.449	16,542,671	13,593,704	108.76%	82.17%
	PLG	Jam Hour	20.171	19,599	8,065	47.94%	41.15%
		GT Jam GT Hour	66.062.615	66,331,690	29,715,098	52.50%	44.80%
	TBS	Jam Hour	452	458	2,735	597.00%	596.88%
		GT Jam GT Hour	1.707.338	1,584,960	24,484,784	1511.92%	1544.81%
	BKL	Jam Hour	8	-	-	-	-
		GT Jam GT Hour	24.258	-	-	-	-
	PBM	Jam Hour	171	180	478	256.99%	-
		GT Jam GT Hour	238.214	262,159	850,466	285.32%	-
	CRB	Jam Hour	-	35	363	-	-
		GT Jam GT Hour	-	437,110	4,046,082	-	-
	PTK	Jam Hour	6.065	7,068	8,654	116.44%	122.44%
		GT Jam GT Hour	13.518.733	16,577,653	23,307,201	130.24%	140.59%
Total TUKS		**Jam** Hour	**47.842**	**52,159**	**46,442**	**95.42%**	**89.04%**
		GT Jam GT Hour	**301.913.237**	**347,483,896**	**375,144,738**	**117.21%**	**107.96%**

3. **Penundaan Tersus**

Tersus Towing

Uraian Description	Wilayah Region	Satuan Unit	s.d Desember s.d Desember			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2022 2022 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	6 = 5:3	7 = 5:4
	1	2	3	4	5	6	7
Penundaan Tersus Tersus Delay	Nusantara Regas	Jam Hour	211	115	163	185.73%	142.14%
		GT Jam GT Hour	20.691.145	17,000,747	14,876,357	123.28%	87.50%
	Cemindo Gemilang	Jam Hour	940	1,021	1,036	98.57%	101.47%
		GT Jam GT Hour	11.561.732	12,728,156	10,800,974	86.94%	84.86%
	PLTU Kanci	Jam Hour	1.083	1,536	1,721	194.46%	112.06%
		GT Jam GT Hour	7.681.919	8,258,427	10,706,562	184.26%	129.64$
	Petrochina Jabung	Jam Hour	310	-	-	-	-
		GT Jam GT Hour	9.699.100	-	-	-	-
	STS Ambang Luar Musi	Jam Hour	10.366	17,324	21,486	127.60%	124.02%
		GT Jam GT Hour	71.304.691	120,006,119	141,665,199	124.05%	118.05%
	Patimban	Jam Hour	1.084	1,262	3,421	272.37%	271.02%
		GT Jam GT Hour	4.114.960	18,291,407	39,055,380	240.83%	213.52%
Total Tersus		**Jam** Hour	13.994	21,258	27,827	133.91%	130.90%
		GT Jam GT Hour	125.053.547	176,284,856	217,104,472	123.45%	123.16%

4. **Pemanduan Tersus**
Tersus Towing

Uraian Description	Wilayah Region	Satuan Unit	s.d Desember s.d Desember			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2022 2022 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	6 = 5:3	7 = 5:4
	1	2	3	4	5	6	7
Penundaan Tersus Tersus Delay	Nusantara Regas	Jam Jam	76	53	62	110.71%	116.82%
		GT Jam GT Jam	7.235.776	6,143,638	6,165,702	192.55%	100.36%
	Cemindo Gemilang	Jam Jam	849	910	941	101.73%	103.36%
		GT Jam GT Jam	8.962.029	9,950,981	8,805,424	91.78%	88.49%
	PLTU Kanci	Jam Jam	438	356	688	194.35%	193.40%
		GT Jam GT Jam	3.081.410	2,484,188	4,278,556	184.08%	172.73%
	Petrochina Jabung	Jam Jam	142	-	-	-	-
		GT Jam GT Jam	5.480.892	-	-	-	-
	STS Ambang Luar Musi	Jam Jam	7.167	11,546	14,322	127.61%	124.04%
		GT Jam GT Jam	51.051.221	80,004,078	94,443,463	124.05%	118.05%
	Patimban	Jam Jam	518	628	622	136.11%	98.99%
		GT Jam GT Jam	2.057.480	9,093,703	8,988,852	134.66%	98.85%
Total Pandu Tersus Total Tersus Pilot		**Jam** Jam	9.190	13,494	16,635	126.20%	123.28%
		GT Jam GT Jam	77.868.808	107,676,588	122,681,997	117.72%	113.94%

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Uraian data dan penjelasan keuangan dalam bagian tinjauan keuangan ini merujuk pada Laporan Keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Perseroan"), disebut juga "JAI" atau "IPCM", untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dalam laporan No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697- 4/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan mendapatkan opini "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.".

Kinerja keuangan IPCM atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

The description of financial data and explanations in this financial review refers to the Financial Statement of PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Company"), also known as "JAI" or "IPCM," for the years ending December 31, 2023 and 2022, as presented in this year's report. The financial statement has been audited by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja in report No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 dated March 26, 2024, and obtained the opinion that "The attached financial report presents fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2023, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia."

IPCM's financial performance on the Financial Position Report, Profit and Loss Report, Other Comprehensive Income, and Cash Flow Report is presented in the following table:

POSISI KEUANGAN
FINANCIAL POSITION

Laporan Posisi Keuangan 2022-2023
Financial Position 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Total Aset Total Assets	1.522.134	1.488.208	33.926	2,28
Total Liabilitas Total Liabilities	281.614	291.688	(10.074)	(3,45)
Ekuitas Equity	1.240.519	1.196.519	44.000	3,68

Berdasarkan tabel di atas, laporan posisi keuangan Perseroan di tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya, dari sisi jumlah aset tercatat meningkat 2,28% sementara jumlah liabilitas mengalami penurunan 3,45% dan jumlah ekuitas tercatat naik 3,68%.

Berikut uraian terkait laporan posisi keuangan IPCM di tahun 2023 dibanding tahun 2022, beserta penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak atas perubahan tersebut.

Based on the table above, the Company's financial position in 2023 compared to the previous year shows that total recorded assets increased by 2.28%, while total liabilities decreased by 3.45%, and total equity increased by 3.68%.

The following is a description of IPCM's financial position in 2023 compared to 2022, along with an explanation of the causes of changes and the impact of these changes.

Aset
Nilai Aset tercatat IPCM pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1,52 triliun, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp33,93 miliar atau 2,28% jika dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 yaitu Rp1,49 triliun. Peningkatan aset tersebut terutama disebabkan oleh an increase in current assets (unearned income) for the related party segment for revenue sharing with SPJM and Regional 2 PT Pelindo, as well as an increase in fixed assets due to investment in 1 (one) tugboat and 3 (three) pilot boats.

Asset
IPCM's recorded asset value on December 31, 2023 was Rp1.52 trillion. This value increased by Rp33.93 billion or 2.28% compared to the position on December 31, 2022, which was Rp1.49 trillion. The increase in assets was mainly due to kenaikan pada aset lancar (pendapatan masih akan diterima) untuk segmen pihak berelasi atas revenue sharing dengan SPJM dan Regional 2 PT Pelindo, juga kenaikan pada aset tetap karena adanya investasi 1 (satu) kapal tunda dan 3 (tiga) kapal pandu.

Tabel Aset 2022-2023
Assets 2022-2023

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Aset Lancar Current Assets				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	409.000	571.726	(162.726)	(28,46)
Piutang usaha Trade Receivables				
Pihak Ketiga Third Parties	37.675	23.781	13.894	58,42
Pihak Berelasi Related Parties	4.443	98.731	(94.288)	(95,50)
Pendapatan masih harus diterima Accrued revenues				
Pihak Ketiga Third Parties	44.941	10.528	34.413	326,87
Pihak Ketiga Third Parties	313.409	110.882	202.527	182,65
Piutang lain-lain Other Receivables				
Pihak Ketiga Third Parties	-	6.710	-	-
Pihak Ketiga Third Parties	5.640	51.324	(45.684)	(89,01)
Persediaan Inventories	25.072	24.066	1.006	4,18
Pajak dibayar di muka Prepaid Taxes	48.572	24.143	24.429	101,18
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	878	4.041	(3.163)	(78,27)
Total Aset Lancar Total Current Assets	889.634	919.231	(29.597)	(3,22)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets				
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	12.986	12.663	323	2,55
Aset hak guna - neto Right-of-use assets-net	38.507	6.693	31.814	475,33
Taksiran tagihan restitusi Estimated claims for tax refund	-	11.495	-	-
Aset tetap - neto Fixed assets - net	581.005	538.124	42.881	7,97
Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	632.500	568.976	63.524	11,16
Total Aset Total Assets	1.522.134	1.488.208	33.926	2,28

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunananya. Nilai kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp409,00 miliar dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp571.73 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tahun ini mengalami penurunan sebesar 28,46%.

Piutang Usaha

Piutang Usaha neto pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp42,18 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp80,39 miliar atau 65,62% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp122.51 miliar.

Pendapatan Masih akan Diterima

Pendapatan masih akan diterima merupakan jenis piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesaai dilakukan oleh Perseroan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan).

Pada laporan keuangan per 31 Desember 2023, nilai dari pendapatan masih akan diterima tercatat sebesar Rp358,35 miliar, sementara pada posisi per 31 Desember 2022 mencatat sejumlah Rp121,41 miliar untuk nilai pendapatan masih akan diterima neto. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp236,94 miliar atau setara dengan 195,16%.

Piutang Lain-lain

Tercatat per 31 Desember 2023, nilai piutang lain-lain neto sejumlah Rp5,64 miliar, nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp45,68 miliar atau 89,01% dibandingkan posisi keuangan per 31 Desember 2022 yaitu sejumlah Rp58,03 miliar.

Persediaan

Aspek persediaan yang dimiliki oleh Perseroan terdiri dari bahan bakar, suku cadang, perlengkapan kapal, alat tulis dan barang cetakan, obat, bahan dan alat medis serta persediaan lain-lain. Per tanggal 31 Desember 2023, nilai aspek persediaan yang tercatat sebesar Rp25,07 miliar, dimana jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu sejumlah Rp24,07 miliar (pada posisi per tanggal 31 Desember 2022).

Pajak Dibayar di muka

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, pajak dibayar di muka tercatat sebesar Rp48,57 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencatat sebesar Rp24,14 miliar per 31 Desember 2022. Apabila dibandingkan dengan perolehan di tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 101,18% atau setara dengan Rp24,43 miliar.

Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalent comprises of cash on hand, bank balances, and time deposits that are not guaranteed and have no restrictions on their use. The value of cash and cash equivalents on December 31, 2023, was recorded at Rp409.00 billion, compared to the position on December 31, 2022, which was Rp571.73 billion. When compared with the previous year, this year's value decreased by 28.46%.

Trade Receivables

Net trade receivables on December 31, 2023, were recorded at Rp42.18 billion, a decrease of Rp80.39 billion or 65.62% compared to the position on December 31, 2022, namely Rp122.51 billion.

Accrued Revenues

Accrued revenue is a type of receivable to customers for services that have been completed by the Company, but have not yet been invoiced (receivables not yet invoiced).

In the financial statement as of December 31, 2023, the value of accrued revenue was recorded at Rp358.35 billion, while in the position as of December 31, 2022, it was recorded at Rp121.41 billion. Compared to the previous year, this year's achievement increased by Rp236.94 billion or the equivalent of 195.16%.

Other Receivables

As of December 31, 2023, the net value of other receivables was recorded at Rp5.64 billion. This value decreased by Rp45.68 billion or 89.01% compared to the financial position as of December 31, 2022, which was Rp58.03 billion.

Inventories

As of December 31, 2023, the Company's inventory includes fuel, spare parts, ship equipment, stationery and printed materials, medicines, medical materials and equipment, as well as other supplies. The recorded value of inventory as of December 31, 2023, was Rp25.07 billion, representing an increase compared to 2022, when it was Rp24.07 billion (as of December 31, 2022).

Prepaid Taxes

Based on the financial report as of December 31, 2023, prepaid taxes were recorded at Rp48.57 billion, compared to Rp24.14 billion recorded as of December 31, 2022. This represents an increase of 101.18% or Rp24.43 billion compared to the previous year.

Aset Lancar Lainnya

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, nilai aset lancar lainnya mengalami penurunan sebesar Rp3,16 miliar atau 78,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan berhasil membukukan nilai aset lancar lainnya sebesar Rp878 juta sedangkan tahun sebelumnya hanya mencatatkan senilai Rp4,04 miliar.

Aset Pajak Tangguhan

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, nilai aset pajak tangguhan mengalami peningkatan dibandingkan posisi tahun sebelumnya. Dalam laporan keuangan tahun 2023, Perseroan mencatatkan nilai aset pajak tangguhan sebesar Rp12,99 miliar, yang berarti terdapat peningkatan sebesar 2,55% dibandingkan posisi per tanggal 31 Desember 2022.

Aset Hak Guna - Neto

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, nilai aset hak guna-neto Perseroan tercatat sebesar Rp38,51 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp6,69 miliar (per 31 Desember 2022). Terdapat peningkatan sebesar 475,33% atau setara dengan Rp31,81 miliar.

Perseroan telah menerapkan PSAK 73 "Sewa" yang penerapannya dimulai tanggal 01 Januari 2020. Standard tersebut mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi". Kebijakan ini telah diberlalukan untuk kontrak yang disepakati atau diamandemen pada atau setelah 01 Januari 2020.

Awal tanggal permulaan sewa, Perseroan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset Hak Guna diukur pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Kemudian aset hak guna disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Taksiran Tagihan Restitusi

Jumlah taksiran tagihan restitusi yang dicatatkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar kosong dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp11,50 miliar.

Aset Tetap

Sementara nilai buku aset tetap bersih pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp581,01 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp42,88 miliar atau 7,97% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp538,12 miliar.

Other Current Assets

Based on the financial report as of December 31, 2023, the value of other current assets decreased by Rp3.16 billion or 78.27% compared to the previous year. The Company managed to record a value of other current assets of Rp878 million, whereas in the previous year it only recorded Rp4.04 billion.

Deferred Tax Assets

Based on the financial report as of December 31, 2023, the value of deferred tax assets has increased compared to the previous year's position. In the 2023 financial statement, the Company recorded a deferred tax asset value of Rp12.99 billion, which means an increase of 2.55% compared to the position as of December 31, 2022.

Right-Of-Use Assets-Net

Based on the financial statement as of December 31, 2023, the Company's net use rights asset value was recorded at Rp38.51 billion. This value has increased compared to the previous year, namely Rp6.69 billion (as of December 31, 2022). There was an increase of 475.33% or equivalent to Rp31.81 billion.

The Company has implemented PSAK 73 "Leases", the implementation of which began on January 1, 2020. This standard requires the recognition of lease liabilities in connection with leases previously classified as "operating leases". This policy has been applied to contracts agreed or amended on or after January 1, 2020.

At the beginning of the lease commencement date, the Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability. Right-of-use assets are measured at cost, which includes the initial measurement amount of the lease liability adjusted for lease payments made on or before the commencement date, plus the initial direct costs incurred and the estimated costs that will be incurred to dismantle and remove the underlying asset or to restore it to the required condition and lease terms, less any rental incentives received.

Then the right-of-use asset is depreciated using the straight-line method from the start date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Estimated Claims for Tax Refund

The estimated amount of restitution claims recorded by the Company on December 31, 2023, is none compared to the position on December 31, 2022, which was Rp11.50 billion.

Fixed Assets

Meanwhile, the book value of net fixed assets on December 31, 2023 was recorded at Rp581.01 billion, an increase of Rp42.88 billion or 7.97% compared to the position on December 31, 2022 namely Rp538.12 billion.



Tabel Aset Tetap 2022-2023

Tabel Aset Tetap 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Harga Perolehan Acquisition Cost				
Pemilikan Langsung Direct Ownership				
Kapal Vessels	787.070	644.239	142.831	22,17
Bangunan Buildings	12.359	626	11.733	1.874,28
Alat Fasilitas Pelabuhan Port Equipments	5.400	4.290	1.110	25,87
Aset dalam Penyelesaian Construction in Progress	-	71.557	-	-
Total Harga Perolehan Total Acquisition Cost	804.830	720.733	84.097	11,67
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation				
Pemilikan Langsung Direct Ownership				
Kapal Vessels	219.833	180.395	39.438	21,86
Bangunan Buildings	241	46	195	423,91
Alat Fasilitas Pelabuhan Port Equipments	3.750	2.167	1.583	73,05
Total Total	223.824	182.609	41.215	22,57
Nilai Buku Book Value	581.005	538.124	42.881	7,97

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, Perseroan mencatatkan nilai beban penyusutan aset tetap masing-masing Rp41,22 miliar sedangkan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp38,65 miliar. Seluruhnya dialokasikan ke beban pokok pendapatan.

As of December 31, 2023, the Company recorded a depreciation expense for fixed assets of Rp41.22 billion, the same as on December 31, 2022, when it was Rp38.65 billion. All of it is allocated to the cost of revenue.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kapal-kapal yang dimiliki sendiri telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang disebabkan kerusakan mesin dan *hull* (*machinery breakdown*) pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), pihak berelasi, dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp2.159,25 miliar dan Rp158,16 miliar.

As of December 31, 2023, independently owned vessels are insured against the risk of loss due to engine and hull damage (machinery breakdown) with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) and PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), related parties, with total coverage amounts of Rp2,159.25 billion and Rp158.16 billion, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kapal-kapal yang dimiliki sendiri telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang disebabkan kerusakan mesin dan *hull* (*machinery breakdown*) pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), pihak berelasi, dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp1.292,17 miliar.

As of December 31, 2022, independently owned vessels were insured against the risk of loss due to engine and hull damage (machinery breakdown) with PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), a related party, with a total insurance value of Rp1,292.17 billion.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kapal-kapal milik Pelindo yang dioperasikan oleh Perseroan telah diasuransikan dengan polis asuransi Protection and Indemnity pada The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association, pihak ketiga, terhadap risiko kerugian atas tabrakan di atas batas penggantian oleh polis asuransi Marine Hull & Machinery, biaya pengobatan, rumah sakit, pemakaman, biaya-biaya lain, cidera dan atau kematian anggota awak kapal dan pihak ketiga, biaya pembersihan, denda-denda yang berkaitan dengan polusi atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kapal dan pengangkatan bangkai kapal.

As of December 31, 2023, and 2022, vessels owned by Pelindo operated by the Company were insured with a Protection and Indemnity insurance policy with The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association, a third party, against the risk of loss due to collision above the compensation limit of the Marine insurance policy Hull & Machinery, medical, hospital, funeral costs, other costs, injury and/or death of crew members and third parties, cleanup costs, fines related to pollution or environmental damage caused by the ship, and removal of the wreck.

Batas maksimum penggantian setiap kecelakaan untuk semua jenis klaim sebesar $US500.000.000 (nilai penuh). Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan untuk aset tetap kapal tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

The maximum limit of compensation per accident for all types of claims is $US500,000,000 (full amount). Management believes that the insurance value for the ship's fixed assets is sufficient to cover possible losses on the insured assets.

Pada tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan penelaahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap, manajemen berkeyakinan tidak terdapat perubahan atas estimasi umut manfaat, nilai residu dan metode penyusutan untuk seluruh aset tetap. Aset tetap tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

As of December 31, 2023, based on a review of the estimated useful life, residual value, and depreciation method for fixed assets, management believes there will be no changes to the estimated useful life, residual value, and depreciation method for all fixed assets. Fixed assets are not used as collateral at the reporting date.

Tidak terdapat aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perseroan. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

There are no fixed assets that have been fully depreciated but are still used to support the Company's operations. Management believes that there will be no decrease in the value of fixed assets on December 31, 2023, and 2022.

Liabilitas

Total liabilitas tercatat pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp281,62 miliar, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10,74 miliar atau 3,45% dibandingkan posisi 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp291,69 miliar. Komponen biaya yang masih harus dibayar merupakan bagian terbesar yaitu 62,08% dari total liabilitas. Penurunan jumlah liabilitas disebabkan oleh masih terdapatnya kewajiban atas tagihan Beban Bahan Bakar, Beban Pemeliharaan, dan Beban KSMU.

Liabilities

Total liabilities recorded on December 31, 2023, amounted to Rp281.62 billion. This amount decreased by Rp10.74 billion or 3.45% compared to the position on December 31, 2022, which was Rp291.69 billion. The accrued costs component is the largest part, accounting for 62.08% of total liabilities. The decrease in total liabilities was caused by there are still liabilities for Fuel Expenses, Maintenance Expenses, and KSMU Expenses.

Tabel Liabilitas 2022-2023
Tabel Liabilitas 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities				
Utang Usaha Trade Payables				
Pihak Ketiga Third Parties	4.095	24.389	(20.294)	(83,21)
Pihak Berelasi Related Parties	18.464	29.714	(11.250)	(37,86)
Utang Lain-lain – Pihak Ketiga Other payables - Third Parties	-	69.574	-	-

Tabel Liabilitas 2022-2023
Tabel Liabilitas 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Uang Titipan Deposits	15.424	9.613	5.811	60,45
Beban Akrual Accrued Expenses	174.839	142.190	32.649	22,96
Utang Pajak Taxes Payable	9.224	9.177	47	0,51
Liabilitas Sewa Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Current Maturities of Long-Term Lease Liabilities	32.485	6.730	25.755	382,69
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**274.585**	**291.391**	**(16.806)**	**(5,77)**
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities				
Liabilitas Sewa Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Long-Term Lease Liabilities - Net of Current Maturities	7.030	297	6.733	2267,00
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	**7.030**	**297**	**6.733**	**2267,00**
Total Liabilitas Total Liabilities	**281.615**	**291.689**	**(10.074)**	**(3,45)**

Utang Usaha
Jumlah utang usaha total pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp22,56 miliar, jumlah tersebut menurun sebesar Rp31,54 miliar atau 58,30% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp54,10 miliar.

Utang Lain-lain
Jumlah utang lain-lain pada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar kosong, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp69,57 miliar.

Uang Titipan
Jumlah uang titipan pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp15,42 miliar, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5,81 miliar atau 60,45% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp9,61 miliar.

Beban Akrual
Jumlah beban akrual pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp174,84 miliar, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp32,65 miliar atau 22,96% dibandingkan posisi 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp142,19 miliar.

Utang Pajak
Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp9,22 miliar, terjadi peningkatan sebesar Rp47 juta atau 0,51% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp9,18 miliar.

Trade Payables
The total amount of trade payables on December 31, 2023, was recorded at Rp22.56 billion. This amount decreased by Rp31.54 billion or 58.30% compared to the position on December 31, 2022, which was Rp54.10 billion.

Other Payables
The amount of other debt to third parties as of December 31, 2023, was recorded as none, compared to the position as of December 31, 2022, which was Rp69.57 billion.

Deposits
The amount of deposits on December 31, 2023, was recorded at Rp15.42 billion. This amount increased by Rp5.81 billion or 60.45% compared to the position on December 31, 2022, namely Rp9.61 billion.

Accrued Expenses
Total accrued expenses on December 31, 2023, were recorded at Rp174.84 billion. This amount has increased by Rp32.65 billion or 22.96% compared to the position on December 31, 2022, namely Rp142.19 billion.

Taxes Payable
The amount of tax payable on December 31, 2023, was recorded at Rp9.22 billion, an increase of Rp47 million or 0.51% compared to the position on December 31, 2022, namely Rp9.18 billion.

Liabilitas Sewa Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Jumlah liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp32,49 miliar, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp25,76 miliar atau 382,69% dari posisi tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp6,73 miliar.

Long-Term Lease Liabilities - Net of Current Maturities

Long-term lease liabilities - net of current maturities on December 31, 2023, were recorded at Rp32.49 billion. This amount increased by Rp25.76 billion or 382.69% from the position on December 31, 2022, namely Rp6.73 billion.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas 2022-2023
Equity 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Modal Dasar - 15.000.000.000 Saham dengan Nilai Nominal Rp100 (Nilai Penuh) Authorized Capital - 15,000,000,000 Shares at Rp100 (Full Amount)				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 5.284.811.100 Saham dengan Nilai Nominal Rp100 (Nilai Penuh) Issued and Fully Paid Capital – Rp5,284,811,100 Shares at Rp100 (Full Amount)	528.481	528.481	0	0,00
Saham Treasuri Treasury Stock	(1.618)	(1.618)	0	0,00
Tambahan Modal Disetor – Neto Additional Paid-in Capital – Net	317.981	317.981	0	0,00
Saldo Laba Retained Earnings				
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated	96.758	96.758	0	0,00
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	298.917	254.916	44.001	17,26
Total Ekuitas Total Equity	1.240.519	1.196.519	44.000	3,68

Per 31 Desember 2023, total ekuitas tercatat sebesar Rp1.240,52 miliar, meningkat sebesar 3,68% atau setara dengan Rp44,00 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.196,52 miliar.

As of December 31, 2023, total equity was recorded at Rp1,240.52 billion, marking an increase of 3.68% or equivalent to Rp44.00 billion compared to 2022, which was Rp1,196.52

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Per 31 Desember 2023, Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan tahun 2023 sebesar Rp157,66 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp150,65 miliar dibanding capai kinerja pada tahun 2022.

PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

As of December 31, 2023, the Company recorded a profit for the year 2023 of Rp157.66 billion, reflecting an increase of Rp150.65 billion compared to the performance in 2022.

Tabel Laporan Laba (Rugi) 2022-2023
Tabel Laporan Laba (Rugi) 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Kenaikan/Penurunan	
			Nominal Nominal	Persentase Persentase
Pendapatan - Neto Pendapatan - Neto	1.138.537	980.168	158.369	16,16

Tabel Laporan Laba (Rugi) 2022-2023
Tabel Laporan Laba (Rugi) 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Kenaikan/Penurunan	
			Nominal Nominal	Persentase Persentase
Beban Pokok Pendapatan Beban Pokok Pendapatan	(798.761)	(677.621)	(121.140)	17,88
Laba Bruto Laba Bruto	339.775	302.547	37.228	12,30
Beban Umum dan Administrasi Beban Umum dan Administrasi	(156.016)	(117.608)	(38.408)	32,66
Pendapatan Operasi Lainnya Pendapatan Operasi Lainnya	10.181	749	9.432	1.259,28
Beban Operasi Lainnya Beban Operasi Lainnya	(729)	(11.673)	10.944	(93,75)
Laba Usaha Laba Usaha	183.758	174.014	9.744	5,60
Pendapatan Keuangan Pendapatan Keuangan	14.958	14.141	817	5,78
Beban Keuangan Beban Keuangan	(2.773)	(2.117)	(656)	30,99
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	195.943	186.039	9.904	5,32
Beban Pajak Penghasilan Badan Beban Pajak Penghasilan Badan	(38.281)	(35.384)	(2.897)	8,19
Laba Tahun Berjalan Laba Tahun Berjalan	157.661	150.654	7.007	4,65
Penghasilan Komprehensif Lain Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	157.661	150.654	7.007	4,65
Laba per Saham Dasar (Nilai Penuh) Laba per Saham Dasar (Nilai Penuh)	29,88	28,55	1	4,66

Pendapatan

Pendapatan usaha Perseroan selama tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.138,54 miliar, kinerja ini mengalami kenaikan sebesar Rp158,37 miliar atau 16,16% dibanding tahun 2022 lalu yaitu sebesar Rp980,17 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada jasa penundaan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023, Perusahaan telah melakukan pengembangan wilayah pelayanan di Meulaboh, Nipah, Batam, dan Weda.

Revenue

The Company's operating revenue for 2023 was recorded at Rp1,138.54 billion, reflecting an increase of Rp158.37 billion or 16.16% compared to 2022, which was Rp980.17 billion. This increase was caused by increase in delay services. This is because in 2023, the Company has developed service areas in Meulaboh, Nipah, Batam, and Weda.

Tabel Pendapatan 2022-2023
Revenue 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Jasa Pelayanan Kapal Vessel Services				
Penundaan Tug service	997.791	825.806	171.985	20,83

Tabel Pendapatan 2022-2023
Revenue 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Pemanduan Pilotage service	62.971	49.736	13.235	26,61
Pendapatan Jasa Pelayanan Kapal Total Revenue from Vessel Services	1.060.762	875.542	185.220	21,15
Jasa Pengangkutan Freight Services	31.500	54.000	(22.500)	(41,67)
Jasa Pengelolaan Kapal Fleet Management Services	46.276	50.627	(4.351)	(8,59)
Total Pendapatan - Neto Total Revenues – Net	**1.138.537**	**980.168**	**158.369**	**16,16**

Beban Pokok Pendapatan

Perseroan mencatatkan beban pokok pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp798,76 miliar, kondisi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp121,14 miliar atau 17,88% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp677,62 miliar.

Beban Umum dan Administrasi

Pada tahun 2023, Perseroan mencatat beban umum dan administrasi sebesar Rp167,47 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp47,86 miliar atau 40,70% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp117,61 miliar.

Laba Usaha

Pada tahun 2023, Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp183,76 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp9,74 miliar atau 5,60% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp174,01miliar.

Pendapatan dan Beban Operasi Lainnya

Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan pendapatan usaha lain sebesar Rp10,18 miliar, meningkat sebesar Rp9,43 miliar atau 1259,28% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp749 juta.

Sementara itu, beban operasional lainnya yang pada tahun 2023 sebesar Rp729 juta, mengalami penurunan, sebesar Rp10,94 miliar atau 93,75% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp11,67 miliar.

Pendapatan dan Beban Keuangan

Pada tahun 2023, Perseroan membukukan pendapatan keuangan sebesar Rp14,96 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp817 juta atau 5,78% dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp14,14 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan bunga deposito akibat dari meningkatnya suku bunga Bank.

Sedangkan beban keuangan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp2,77 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp656 juta atau 30,99% dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp2,12 miliar.

Cost of Revenue

The company recorded a cost of revenue in 2023 of Rp798.76 billion, reflecting an increase of Rp121.14 billion or 17.88% compared to 2022, which was Rp677.62 billion.

General and Administrative Expenses

In 2023, the Company recorded general and administrative expenses of Rp167.47 billion, an increase of Rp47.86 billion or 40.70% compared to 2022, which was Rp117.61 billion.

Income from Operation

In 2023, the Company recorded an operating profit of Rp183.76 billion, an increase of Rp9.74 billion or 5.60% compared to 2022, which was Rp174.01 billion.

Other Operating Income and Expenses

In 2023, the Company recorded other business income of Rp10.18 billion, an increase of Rp9.43 billion or 1,259.28% compared to 2022, which was Rp749 million.

Meanwhile, other operational expenses, which in 2023 amounted to Rp729 million, decreased by Rp10.94 billion or 93.75% compared to 2022, which was Rp11.67 billion.

Financial Income and Expenses

In 2023, the Company recorded financial income of Rp14.96 billion, an increase of Rp817 million or 5.78% compared to 2022, which was Rp14.14 billion. This increase was caused by an increase in deposit interest income due to an increase in bank interest rates.

Meanwhile, financial expenses in 2023 were recorded at Rp2.77 billion, an increase of Rp656 million or 30.99% compared to 2022, which was Rp2.12 billion.



Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan

Pada tahun 2023, laba keuangan bersih sebesar Rp195,94 miliar, meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp186,04 miiliar.

Laba Tahun Berjalan

Perseroan mampu membukukan laba tahun berjalan pada tahun 2023 sebesar Rp157,66 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp7,01 miliar atau 4,65% dari jumlah tahun 2022 yang sebesar Rp150,65 miliar. Konsekuensi dari peningkatan laba tahun berjalan yaitu meningkatnya beban pajak penghasilan badan tahun 2023 yang dibukukan sebesar Rp38,28 miliar, jumlah ini meningkat Rp35,38 miliar atau 8,19% dari posisi tahun 2022 yang sebesar Rp35,38 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan segmen tunda tersus serta penerapan kebijakan fuel surcharge selama 1 (satu) tahun penuh pada tahun 2023, sedangkan untuk tahun 2022 fuel surcharge untuk wilayah Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) baru ditetapkan pada Periode Semester II.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan merupakan akumulasi dari laba (rugi) tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Pada tahun 2023 Perseroan membukukan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp157,66 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp7,01 miliar atau 4,65% dari jumlah tahun 2022 yang sebesar Rp150,65 miliar.

Laba Per Lembar Saham

Pada tahun 2023, Perseroan meningkatkan nilai per lembar saham diangka Rp29,88 Nilai ini meningkat sebesar Rp1 atau 4,66% dari tahun 2022 yang sebesar Rp28,55.

ARUS KAS

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, Perseroan membukukan nilai kas dan setara kas sebesar Rp409,00 miliar, dimana nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp162,73 miliar atau setara dengan 28,46% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 yang mencatatkan nilai kas dan setara kas sebesar Rp571,73 miliar.

Profit Before Corporate Income Tax

In 2023, net financial profit amounted to Rp195.94 billion, an increase compared to 2022, which was Rp186.04 billion.

Profit for the Year

The Company was able to record a profit for the year in 2023 of Rp157.66 billion. This amount increased by Rp7.01 billion or 4.65% from the 2022 amount of Rp150.65 billion. The consequence of the increase in profit for the current year is an increase in corporate income tax expense in 2023, which was recorded at Rp38.28 billion. This amount increased by Rp35.38 billion or 8.19% from the position in 2022, which was Rp35.38 billion. This increase was caused by an increase in the revenue of the tug segment and the implementation of the fuel surcharge policy for 1 (one) full year in 2023, while for 2022 the fuel surcharge for the Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) region was only determined in the Semester II Period.

Total Comprehensive Income (Loss) for the Year

Total comprehensive income (loss) for the year is the accumulation of income (loss) for the year and other comprehensive income. In 2023, the Company recorded a total comprehensive income for the year of Rp157.66 billion. This amount increased by Rp7.01 billion or 4.65% from the 2022 amount of Rp150.65 billion.

Earnings Per Share

In 2023, the Company increased the earning per share to Rp29.88. This value increased by Rp1 or 4.66% from 2022, which amounted to Rp28.55.

CASH FLOW

Based on the financial statement as of December 31, 2023, the Company recorded a cash and cash equivalent value of Rp409.00 billion. This amount decreased by Rp162.73 billion or 28.46% compared to the position as of December 31, 2022, which recorded a value of cash and cash equivalents of Rp571.73 billion.

Ikhtisar Laporan Arus Kas 2022-2023
Cash Flow Statement 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	(16.058)	126.682	(140.946)	(112,86)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(14.522)	(3.425)	17.947	324,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(132.145)	(205.967)	73.227	(35,66)
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	(162.726)	(83.910)	(78.816)	93,93

Ikhtisar Laporan Arus Kas 2022-2023
Cash Flow Statement 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	571.726	665.637	(93.911)	(14,11)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	409.000	571.726	(162.726)	(28,46)

*Disajikan kembali karena reklasifikasi akun tertentu
*Restated due to reclasification of certain accounts

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tercatat per tanggal 31 Desember 2023, nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar *minus* Rp16,06 miliar, nilai ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencatat nilai sebesar *plus* Rp124,89 miliar. Terjadi penurunan senilai 112,86% atau Rp140,95 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tercatat per tanggal 31 Desember 2023, nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar *minus* Rp14,52 miliar, nilai ini meningkat dibanding pencapaian di tahun 2022 yaitu sebesar *minus* Rp3,43 miliar. Tahun ini, terjadi peningkatan sebesar 524,00% atau senilai Rp17,95 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tercatat per tanggal 31 Desember 2022, nilai nominal arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar *minus* Rp132,15 miliar, nilai ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yaitu sebesar *minus* Rp205,37 miliar. Perseroan mengalami penurunan sebesar 35,66% atau setara dengan Rp73,23 miliar.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG

Kemampuan pembayaran utang atau kredit suatu Perseroan dapat diuraikan melalui kapasitasnya untuk melunasi utang jangka pendek dan jangka panjang pada tahun 2023, seperti berikut:

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Dalam menilai sejauh mana Perseroan mampu memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek, Perseroan mengacu pada rasio likuiditas. Tingkat likuiditas ini dapat tercermin dari rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Kas dan Setara Kas yang dimiliki. Di sisi lain, rasio lancar menunjukkan kemampuan Perseroan untuk melunasi hutang dengan menggunakan Aset Lancar.

Cash Flow from Operating Activities

As of December 31, 2023, the net cash value from operating activities was minus Rp16.06 billion. This value decreased compared to the previous year, which recorded a value of plus Rp124.89 billion, marking a decrease of 112.86% or Rp140.95 billion.

Cash Flows from Investing Activities

As of December 31, 2023, the net cash flow value from investing activities was minus Rp14.52 billion. This value increased compared to the achievement in 2022, which was minus Rp3.43 billion, indicating an increase of 524.00% or Rp17.95 billion.

Cash Flow from Financing Activities

As of December 31, 2022, the nominal value of net cash flow from financing activities was recorded at minus Rp132.15 billion. This value has decreased compared to the previous year's acquisition of minus Rp205.37 billion. The Company experienced a decline of 35.66% or equivalent to Rp73.23 billion.

THE ABILITY TO PAY DEBT AND THE LEVEL OF COLLECTIBILITY

The Company's debt or credit settlement capacity can be described through its ability to pay off short-term and long-term debt in 2023, as follows:

Ability to Pay Short-Term Debt

In assessing the extent to which the Company is able to meet short-term obligations or debt, the Company refers to liquidity ratios. This level of liquidity can be reflected in the cash ratio and current ratio. The cash ratio reflects the Company's ability to pay its short-term debts using its cash and cash equivalents. On the other hand, the current ratio shows the Company's ability to pay off debts using current assets.



Tabel Rasio Likuiditas 2022-2023
Liquidity Ratio 2022-2023

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
Rasio Kas Cash Ratio	149%	245%	-39%
Rasio Lancar Current Ratio	324%	314%	3%
Rasio Cepat Quick Ratio	315%	319%	-1%

Rasio Kas

Rasio Kas per 31 Desember 2023 tercatat sebesar 149% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 245,32%. Hal tersebut menunjukan bahwa kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Kas dan Setara Kas yang tersedia mengalami penurunan di tahun 2023.

Cash Ratio

The Cash Ratio as of December 31, 2023 was recorded at 149%, lower compared to 2022, which was recorded at 245.32%. This shows that the Company's ability to settle its short-term debts using available Cash and Cash Equivalents experienced an decrease in 2023.

Rasio Lancar

Pada tahun 2023, Rasio Lancar tercatat sebesar 324% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 314%. Hal ini menunjukan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Aset Lancar yang tersedia mengalami peningkatan/penurunan di tahun 2023.

Current Rasio

In 2023, the Current Ratio was recorded at 324% higher compared to 2022, which was recorded at 314%. This shows that the Company's ability to pay its short-term debts using available Current Assets experienced an increase/decrease in 2023.

Rasio Cepat

Rasio Cepat Perseroan untuk tahun 2023 tercatat sebesar 315%, menurun dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 319,73%.

Quick Ratio

The Company's Quick Ratio for 2023 was recorded at 315%, decreasing compared to 2022, which was recorded at 319.73%.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Sebaliknya, dalam mengevaluasi kemampuan Perseroan untuk melunasi semua hutangnya, termasuk hutang jangka panjang, Perseroan merujuk pada rasio solvabilitas. Rasio ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan Perseroan dalam membayar seluruh kewajibannya setelah melikuidasi Perseroan.

Ability to Pay Long-Term Debt

On the other hand, in evaluating the Company's ability to pay off all its debts, including long-term debt, the Company refers to the solvency ratio. This ratio is a measuring tool used to assess the Company's ability to pay all its obligations after liquidating the Company.

Tabel Rasio Solvabilitas 2022-2023
Solvency Ratio 2022-2023

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan (%) Increase/Decrease (%)
Liabilitas terhadap Aset Debt to Assets Ratio (DAR)	18,50%	19,60%	(1,10)
Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (DER)	22,70%	24,38%	(1,68)

Liabilitas terhadap Aset

Pada tahun 2023, Liabilitas terhadap Aset Perseroan adalah sebesar 18,50% atau menurun dibanding dengan perolehan tahun sebelumnya yang sebesar 19,60%.

Debt to Assets

In 2023, the Company's Debt to Assets decreased to 18.50%, compared to the previous year's figure of 19.60%.

Liabilitas terhadap Ekuitas

Per 31 Desember 2023, Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan adalah sebesar 22,70% atau menurun dibanding perolehan pada akhir tahun sebelumnya yang sebesar 24,38%.

Debt to Equity

As of December 31, 2023, the Company's Debt to Equity decreased to 22.70%, compared to the previous year's figure of 24.38%.

Tingkat Kolektabilitas Piutang

Siklus piutang mencerminkan seberapa cepat piutang dapat diubah menjadi uang tunai selama satu tahun. Tingkat efisiensi dalam penagihan piutang dapat ditingkatkan dengan meningkatnya perputaran piutang dan penurunan rata-rata periode penagihan (jumlah hari penjualan piutang) dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Receivables Collectibility

The receivables cycle reflects how quickly receivables can be converted into cash during a year. The level of efficiency in collecting receivables can be increased by improving receivables turnover and reducing the average collection period (the number of days receivables are outstanding) compared to the previous period.

Rasio Aktivitas 2022-2023
Activity Ratio 2022-2023

Uraian Description	2023	2022
Receivable Turn Over (kali)	13 Kali 13 Times	9 Kali 9 Times
Average Collection Period (hari)	29 Hari 29 Days	38 Hari 38 Days

Pada tahun tahun 2023 ini, *receivable turn over* menjadi sebesar 13 kali atau meningkat dibanding realisasi tahun 2022 yang hanya menunjukan tingkat perputaran sebesar 9 kali. Selanjutnya, *average collection period* pada tahun 2023 menunjukan tren positif/negatif yaitu terealisasi sebesar 29 hari atau turun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 38 hari. Hal tersebut dikarenakan efektivitas penagihan maupun peningkatan pendapatan yang diperoleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

In 2023, the receivable turnover was 13 times, representing an increase compared to the realization in 2022, which only showed a turnover rate of 9 times. Furthermore, the average collection period in 2023 shows a positive/negative trend, realized at 29 days, indicating an decrease compared to the realization in 2022 of 38 days. This occurred due to effectiveness of collection and increase in revenue obtained by PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Tabel Umur Piutang Usaha 2022-2023
Trade Receivables 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Belum jatuh tempo Not yet due	20.165	-	-	-
Telah jatuh tempo Overdue				
1 sampai dengan 30 hari 1-30 days	4.588	54.849	(50.261)	(91,64)
31 sampai dengan 60 hari 31-60 days	2.409	17.042	(14.633)	(85,86)
61 sampai dengan 90 hari 61-90 days	3.062	10.676	(7.614)	(71,32)
Lebih dari 90 hari Over 90 days	15.590	43.024	(27.434)	(63,76)
Total piutang usaha Total trade receivables	45.816	125.591	(79.775)	(63,52)
(Penyisihan penurunan nilai) (Allowance for impairment)	(3.697)	(3.079)	(618)	20,07
Total Piutang Usaha Neto Total Trade Receivables – Net	42.118	122.512	(80.394)	(65,62)

Berdasarkan tabel diatas total piutang usaha neto Perseroan adalah sebesar Rp42,12 miliar di tahun 2023, mengalami penurunan Rp80,39 miliar atau 65,62% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 122.512 miliar. Dari total piutang usaha neto Perseroan tersebut, jumlah piutang belum jatuh tempo di tahun 2023 tercatat sebesar Rp20,17 miliar, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang kosong.

Sementara piutang usaha yang sudah jatuh tempo 1 sampai dengan 30 hari, tercatat sebesar Rp4,59 miliar di tahun 2023, mengalami penurunan Rp50,26 miliar atau 91,64% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp54.85 miliar. Piutang usaha dengan telah jatuh tempo 31 sampai dengan 60 hari, tercatat sebesar Rp2,41 miliar di tahun 2023, mengalami penurunan Rp14,63 miliar atau 85,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp17.04 miliar. Piutang usaha dengan telah jatuh tempo 61 sampai dengan 90 hari, mengalami penurunan Rp3,06 miliar atau 71,32% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10.67 miliar. Piutang usaha dengan telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, tercatat sebesar Rp43.02 miliar di tahun 2023, mengalami penurunan Rp15,59 miliar atau 63,76% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp125.60 miliar.

Adapun penyisihan penurunan nilai tercatat sebesar Rp3,70 miliar di tahun 2023, mengalami peningkatan Rp618 juta atau 20,07% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar minus Rp3.09 miliar.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Rincian Struktur Modal

Saham yang dimiliki oleh pemilik induk merupakan modal yang dikelola oleh Perseroan. Pengelolaan modal Perseroan bertujuan utama untuk memastikan pemeliharaan rasio solvabilitas yang sehat guna mendukung operasi bisnis dan maksimalkan nilai pemegang saham. Perseroan mengelola struktur modalnya dan melakukan perubahan sesuai dengan perubahan situasi ekonomi.

Based on the table above, the Company's total net trade receivables amounted to Rp42.12 billion in 2023, a decrease of Rp80.39 billion or 65.62% compared to the previous year, which amounted to Rp122.512 billion. Of the Company's total net trade receivables, the amount of receivables not yet due in 2023 was recorded at Rp20.17 billion, an increase compared to the previous year, which was none.

Meanwhile, trade receivables with a maturity of 1 to 30 days were recorded at Rp4.59 billion in 2023, a decrease of Rp50.26 billion or 91.64% compared to the previous year, which amounted to Rp54.85 billion. Trade receivables with a maturity of 31 to 60 days were recorded at Rp2.41 billion in 2023, a decrease of Rp14.63 billion or 85.86% compared to the previous year, which amounted to Rp17.04 billion. Trade receivables with a maturity of 61 to 90 days experienced a decrease of Rp3.06 billion or 71.32% compared to the previous year, which amounted to Rp10.67 billion. Trade receivables with a maturity of more than 90 days were recorded at Rp43.02 billion in 2023, a decrease of Rp15.59 billion or 63.76% compared to the previous year, which amounted to Rp125.60 billion.

The provision for impairment losses was recorded at Rp3.70 billion in 2023, an increase of Rp618 million or 20.07% compared to the previous year, which amounted to minus Rp3.09 billion.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure

Shares owned by the owner entity becomes the capital managed by the Company. The main objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of a sound solvency ratio to support business operations and maximize shareholder value. The Company manages its capital structure and makes changes according to changes in the economic situation.

Tabel Komposisi Struktur Modal 2022-2023
Capital Structure Composition 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	2023		2022		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	274.584	18,04%	291.390	19,58%	(16.806)	(5,77)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	7.030	0,46%	297	0,02%	6.733	(2.267,00)
Total Liabilitas Total Liabilities	281.614	18,50%	291.688	19,60%	(10.074)	(3,45)
Ekuitas Equity	1.240.519	81,50%	1.196.519	80,40%	44.000	3,68
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	1.522.134	100,00%	1.488.208	100,00%	33.926	2,28

Komposisi Struktur Modal tahun 2023 dan 2022

Komposisi struktur permodalan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah ekuitas yaitu sebesar 81,50% dan 18,50% merupakan liabilitas. Dibandingkan 31 Desember 2022, dimana komposisi struktur modal dalam bentuk ekuitas sebesar naik 3,68% dan utang turun sebesar 3,45%

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perseroan dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan Terbuka. Pada tahun 2023, Perseroan tidak memiliki informasi mengenai ikatan material pada investasi barang modal, sehingga tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Dalam ekspansi bisnisnya, investasi menjadi faktor krusial. Perseroan terlibat dalam investasi pada barang modal, yang melibatkan pengeluaran dana untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap. Tujuan dari investasi ini adalah untuk memperoleh manfaat jangka panjang yang diharapkan akan berkontribusi pada nilai keseluruhan Perseroan di masa mendatang.

Capital Structure Composition in 2023 and 2022

The capital structure composition as of December 31, 2023, consists of equity, accounting for 81.50%, and liabilities, representing 18.50%. Compared to December 31, 2022, where the composition of the capital structure in the form of equity increased by 3.68%, and debt decreased by 3.45%.

Management Policy on Capital Structure

The primary objective of the Company's capital management is to maintain sound capital ratios to support the business and maximize rewards for shareholders.

The Company manages capital to ensure business continuity, aiming to maximize shareholder wealth and benefits for other stakeholders. It strives to maintain a balance between borrowing levels and equity positions to sustain an optimal capital structure and reduce capital costs.

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, Article 3 paragraph (1) states that a transaction is categorized as a material transaction if the transaction value equals 20% or more of the equity of a Public Company. In 2023, the Company there wasn't any information regarding material commitments in capital goods investments, therefore there is no information available to be disclosed in this Annual Report.

CAPITAL GOODS INVESTMENT REALIZATION

Capital Goods Investment Value and Types

In business expansion, investment plays a crucial role. The Company engages in investments in capital goods, which involve spending funds to acquire or improve fixed assets. The objective of these investments is to obtain long-term benefits that are expected to contribute to the overall value of the Company in the future.



Tabel Investasi 2022-2023
Investment 2022-2023

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah unless stated otherwise)

No	Item Investasi Investment Item	Kebutuhan Dana Financial Need	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi s/d 2023 2023 Realization	Revisi RKAP 2023 2023 RKAP Revision	TAKSASI 2023 2023 TAKSASI	Perbandingan (%) Comparison (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5:4	9=7:4
1	**Investasi Multi Year** Investasi Multi Year Tahun 2021 Pengadaan 1 Unit Kapal Tunda Kapasitas 2 x 2.200 **Multi Year Investment** Multi Year Investment in 2021 1 Tugboat in the Capacity of 2 x 2,200	74.400	31.800	20.913,84 (terealisasi 71,89% s.d des 2022)	31.800	19.801,3	65,77%	62,27%
2	HP Pengadaan 3 Unit Kapal Pandu Kapasitas 2 x 200 HP HP Procurement of 3 Guiding Vessel in the Capacity of 2 x 200 HP	24.400	8.543,5	1.769 (terealisiasi 92,75% s.d des 2022)	8.543,5	1.638,74	20,71%	19,18%
3	**Investasi Multi Year** Investasi Multi Year Tahun 2022 **Multi Year Investment** Investasi Multi Year Tahun 2022	148.800	74.400	0	74.400	14.880	0	20,00%
4	Pengadaan 2 Unit Kapal Tunda Kapasitas 2 x 2.200 HP Pekerjaan Pembangunan Ruang Kantor Termasuk Interior dan Furniture Kantor Pusat PT JAI, Tbk Procurement of 2 Tugboat Units in the Capacity of 2 x 2,200 HP, including Office Space Construction covering Interior and Furniture for PT JAI, Tbk Head Office	12.205	8.543,5	12.068,3 (terealisiasi 1,12% s.d des 2022)	8.543,5	11.434,1	141,26%	133,83%

Tujuan Investasi Barang Modal

Perseroan melakukan investasi pada barang modal dengan maksud untuk mendukung operasional bisnisnya guna meningkatkan kinerja. Perseroan selalu menerapkan kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan investasi ini, sejalan dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan usaha.

Capital Goods Investment Objective

The Company invests in capital goods with the aim of supporting its business operations to improve performance. The Company always applies accuracy and prudence in making these investments, in line with efforts to maintain business continuity.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor: 91202075920050001 telah menerbitkan izin usaha sebagai Pelaku Usaha tanggal 5 Februari 2024 kepada Perseroan sehingga Perseroan dapat melakukan aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, meliputi:

1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;

MATERIAL FACT AND INFORMATION SUBSQUENT TO ACCOUNTING REPORTING DATE

The Head of the Investment Coordinating Board issued a business permit to the Company as a Business Actor on February 5, 2024, through the Risk-Based Business Licensing Standard Certificate Number: 91202075920050001 that makes the Company to engage in sea port service activities, which include:

1. Providing and maintaining the suitability of port facilities;
2. Offering services to port service users in accordance with government-set service standards;
3. Ensuring security, safety, and order at the operated port facilities;

4. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
5. Memelihara kelestarian lingkungan;
6. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Perseroan sebagai Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan untuk lebih dari 1 (satu) terminal. Izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan ini berlaku selama waktu yang tidak ditentukan.

4. Participating in maintaining safety, security, and order regarding transportation in waters;
5. Upholding environmental sustainability;
6. Fulfilling obligations as per concessions in the agreement;
7. Complying with laws and regulations, both nationally and internationally.

As a Port Business Entity, the Company can conduct business activities for more than 1 (one) terminal. This business permit as a Port Business Entity remains valid indefinitely.

PERBANDING ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI UNTUK 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Perseroan telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan kondisi industri dan ekonomi. Adapun perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan berdasarkan RKAP Tahun 2023 dengan realisasi tahun buku 2023, adalah sebagai berikut:

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION AND PROJECTION FOR 1 (ONE) YEAR AHEAD

Comparison between Target and Realization in 2023

The Company established several targets to be accomplished in the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP), which were adjusted according to industrial and economic conditions. Here is the comparison of the achievement of several targets set based on the 2023 RKAP with the realization for the 2023 financial year:

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023
Target and Realization Comparison in 2023

Uraian Description	Realisasi 2023 (Rp-Juta) 2023 Realization (Rp-Million)	Target 2023 (Rp-Juta) 2023 Target (Rp-Million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2023 (%) Realization of 2023 Target (%)
Pendapatan Usaha Revenues	1.138.537	913.959	124,57%
Laba Usaha Operating Profit	183.758	174.557	105,27%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	195.943	186.887	104,85%
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	157.661	140.166	112,48%
Struktur Modal Capital Structure			
Aset Assets	1.522.134	1.518.366	100,25%
Liabilitas Liabilities	281.614	272.412	103,38%
Ekuitas Equity	1.240.519	103,38%	99,56%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	1.522.134	1.518.366	1.518.366

Secara umum, kinerja keuangan Perseroan di tahun 2023, cukup positif, hal tersebut terlihat dari total pendapatan usaha yang terealisasi sebesar Rp1.138,54 miliar, atau mencapai 124,57% terhadap target sebesar Rp913,96 miliar. Realisasi pendapatan usaha yang tercatat lebih tinggi terhadap target tersebut terutama

In general, the Company's financial performance in 2023 is quite positive, this can be seen from the total realized operating income of Rp1,138.54 billion, or reaching 124.57% of the target of Rp913.96 billion. The realization of operating revenues that recorded higher than the target was mainly due to the projected

disebabkan oleh proyeksi kenaikan kunjungan kapal, kenaikan tarif, optimalisasi pangsa pasar baru wilayah non Pelindo, serta investasi kapal yang telah rampung di tahun 2023 diharapkan dapat berkontibusi secara maksmimal khusunya untuk pendapatan sektor pemanduan dan penundaan kapal. Perseroan juga mencatatkan realisasi laba usaha sebesar Rp183,76 miliar atau mencapai 105,27% terhadap target laba usaha sebesar Rp174,56 miliar. Selain itu, Perseroan juga mencatatkan realisasi laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp195,94 miliar atau mencapai 104,85% terhadap target laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp186,89 miliar. Lainnya, Perseroan mencatatkan realisasi laba tahun berjalan sebesar Rp157,66 miliar atau mencapai 112,48% terhadap target laba tahun berjalan sebesar Rp140,17 miliar.

Sementara dari sisi struktur modal, jumlah aset Perseroan di tahun 2023, tercatat sebesar Rp1.522,13 miliar atau mencapai 100,25% terhadap target sebesar Rp1.518, 37 miliar. Hal ini disebabkan oleh penambahan atas laba perusahaan serta estimasi pembayaran dividen atas laba tahun 2023. Jumlah liabilitas Perseroan di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp281,61 miliar atau mencapai 103,38% terhadap target sebesar Rp272,41 miliar. Sementara jumlah ekuitas, tercatat sebesar Rp1.240,52 miliar di tahun 2023, atau mencapai 99,56% terhadap target sebesar Rp1.245,95 miliar. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan dari laba Perusahaan serta estimasi pembayaran dividen atas laba tahun 2023. Lainnya, jumlah liabilitas dan ekuitas di tahun 2023, tercatat sebesar Rp1.522,13 miliar atau mencapai 100,25% terhadap target sebesar Rp1.518,37 miliar.

PERBANDINGAN ANTARA PROYEKSI TAHUN 2024 DAN REALISASI TAHUN 2023

Untuk 1 (tahun) ke depan, Perseroan telah menetapkan sejumlah proyeksi yang hendak dicapai, dan telah disesuaikan dengan perkembangan Perseroan, serta kondisi industri dan ekonomi. Adapun proyeksi yang telah ditetapkan Perseroan untuk 1 (satu) tahun ke depan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut.

increase in ship visits, tariff increases, optimization of new market shares in non-Pelindo areas, and ship investments that have been completed in 2023 are expected to contribute maximally, especially for the revenue of the guiding and delaying sector. The Company also recorded an operating profit realization of Rp183.76 billion or reached 105.27% of the operating profit target of Rp174.56 billion. In addition, the Company also recorded a realized profit before corporate income tax of Rp195.94 billion or reached 104.85% of the target profit before corporate income tax of Rp186.89 billion. Others, the Company recorded a realized profit for the year of Rp157.66 billion or reached 112.48% of the target profit for the year of Rp140.17 billion.

Meanwhile, In terms of capital structure, the Company's total assets in 2023 were recorded at Rp1,522.13 billion or reached 100.25% of the target of Rp1,518.37 billion. This was due to the addition of the company's profit as well as the estimated dividend payment on profit in 2023. The Company's total liabilities in 2023 were realized at Rp281.61 billion or reached 103.38% of the target of Rp272.41 billion. Meanwhile, total equity was recorded at Rp1,240.52 billion in 2023, or reached 99.56% of the target of Rp1,245.95 billion. This was due to the addition of the Company's profit as well as the estimated dividend payment on the 2023 profit. Others, total liabilities and equity in 2023, were recorded at Rp1,522.13 billion or reached 100.25% of the target of Rp1,518.37 billion.

COMPARISON BETWEEN 2024 PROJECTION AND 2023 REALIZATION

For the next 1 (one) year, the Company has set a number of projections which have been adjusted to the Company's developments, as well as industrial and economic conditions. The projections for the next year are as follows.

Tabel Perbandingan antara Proyeksi Tahun 2024 dan Realisasi Tahun 2023
Comparison between 2024 Projection and 2023 Realization

Uraian Description	Proyeksi 2024 (Rp-Juta) 2024 Projection (Rp-Million)	Realisasi 2023 (Rp-Juta) 2023 Realization (Rp-Million)	Proyeksi 2024 terhadap Realisasi 2023 (%) 2024 Projection against 2023 Realization (%)
Pendapatan Usaha Revenues	1.338.962	1.138.537	117,60%
Laba Usaha Operating Profit	250.386	183.758	136,26%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	250.705	195.943	127,95%
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	195.550	157.661	124,03%
Struktur Modal Capital Structure			
Aset Assets	1.527.177	1.522.134	100,33%

Tabel Perbandingan antara Proyeksi Tahun 2024 dan Realisasi Tahun 2023
Comparison between 2024 Projection and 2023 Realization

Uraian Description	Proyeksi 2024 (Rp-Juta) 2024 Projection (Rp-Million)	Realisasi 2023 (Rp-Juta) 2023 Realization (Rp-Million)	Proyeksi 2024 terhadap Realisasi 2023 (%) 2024 Projection against 2023 Realization (%)
Liabilitas Liabilities	199.270	281.614	70,76%
Ekuitas Equity	1.327.906	1.240.519	107,04%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	157.177	1.522.134	100,33%

Perseroan menargetkan mampu membukukan peningkatan kinerja keuangan di tahun 2024, di mana total pendapatan usaha diproyeksikan dapat dibukukan sebesar Rp1.338,96 miliar, atau mencapai 117,60% terhadap realisasi 2023 sebesar Rp1.138,54 miliar. Perseroan juga memproyeksikan laba usaha sebesar Rp230,39 miliar atau mencapai 136,26% terhadap realisasi 2023 laba usaha sebesar Rp183,76 miliar. Selain itu, Perseroan juga mencatatkan memproyeksikan laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp250,70 miliar atau mencapai 127,95% terhadap realisasi 2023 laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp195,94 miliar. Lainnya, Perseroan memproyeksikan laba tahun berjalan sebesar Rp195,55 miliar atau mencapai 124,03% terhadap realisasi 2023 laba tahun berjalan sebesar Rp157,66 miliar.

Sementara dari sisi struktur modal, jumlah aset Perseroan di tahun 2023, diproyeksikan sebesar Rp1.527,18 miliar atau mencapai 100,33% terhadap realisasi 2023 sebesar Rp1.522,13 miliar. Jumlah liabilitas Perseroan di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp199,27 miliar atau mencapai 70,76% terhadap realisasi 2023 yang sebesar Rp281,61 miliar. Sementara jumlah ekuitas, diproyeksikan sebesar Rp1.327,91 miliar di tahun 2023, atau mencapai 107,04% terhadap realisasi 2023 yang sebesar Rp1.240,52 miliar. Lainnya, jumlah liabilitas dan ekuitas di tahun 2023, diproyeksikan sebesar Rp1.527,18 miliar atau mencapai 100,33% terhadap realisasi 2023 yang sebesar Rp1.522,13 miliar.

Proyeksi Pembagian Dividen

Terkait kebijakan dividen, Perseroan belum dapat memproyeksikan untuk melakukan pembagian dividen di tahun 2024 atas kinerja tahun buku 2023.

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan Pembagian Dividen

Pembagian dan penyetoran dividen sepenuhnya menjadi hak Pemegang Saham. Penentuan besarnya dividen yang disetorkan kepada Pemegang Saham berdasarkan keputusan RUPS. Adapun Kebijakan Pemegang Saham melalui RUPS terkait besarnya dividen yang dibagikan kepada Pemegang Saham.

Perseroan menargetkan mampu membukukan peningkatan kinerja keuangan di tahun 2024, di mana total pendapatan usaha diproyeksikan dapat dibukukan sebesar Rp1.338,96 miliar, atau mencapai 117,60% terhadap realisasi 2023 sebesar Rp1.138,54 miliar. Perseroan juga memproyeksikan laba usaha sebesar Rp230,39 miliar atau mencapai 136,26% terhadap realisasi 2023 laba usaha sebesar Rp183,76 miliar. Selain itu, Perseroan juga mencatatkan memproyeksikan laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp250,70 miliar atau mencapai 127,95% terhadap realisasi 2023 laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp195,94 miliar. Lainnya, Perseroan memproyeksikan laba tahun berjalan sebesar Rp195,55 miliar atau mencapai 124,03% terhadap realisasi 2023 laba tahun berjalan sebesar Rp157,66 miliar.

Sementara dari sisi struktur modal, jumlah aset Perseroan di tahun 2023, diproyeksikan sebesar Rp1.527,18 miliar atau mencapai 100,33% terhadap realisasi 2023 sebesar Rp1.522,13 miliar. Jumlah liabilitas Perseroan di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp199,27 miliar atau mencapai 70,76% terhadap realisasi 2023 yang sebesar Rp281,61 miliar. Sementara jumlah ekuitas, diproyeksikan sebesar Rp1.327,91 miliar di tahun 2023, atau mencapai 107,04% terhadap realisasi 2023 yang sebesar Rp1.240,52 miliar. Lainnya, jumlah liabilitas dan ekuitas di tahun 2023, diproyeksikan sebesar Rp1.527,18 miliar atau mencapai 100,33% terhadap realisasi 2023 yang sebesar Rp1.522,13 miliar.

Dividend Distribution Projection

Regarding dividend policy, the Company has not been able to project dividend distribution in 2024 for the performance of the financial year 2023.

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Dividend Distribution Policy

Distribution and payment of dividends are entirely the right of the shareholders. The determination of the amount of dividends paid to shareholders is based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). The shareholder policy, as determined through the GMS, is related to the amount of dividends distributed to shareholders.



Pembagian Dividen dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan/Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2023, Pemegang Saham memutuskan dan menyetujui antara lain mengenai penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 untuk dividen final sebesar Rp113,03 miliar. Adapun informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2023 atas kinerja tahun buku 2022, informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2022 atas kinerja tahun buku 2021, informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2021 atas kinerja tahun buku 2020, informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2020 atas kinerja tahun buku 2019, dan informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2019 atas kinerja tahun buku 2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dividend Distribution in the Last 5 (Five) Years

Based on the resolutions of the Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 21 June 2023, shareholders decided and approved, among other things, the use of the Company's net profit for the 2022 financial year for final dividends amounting to Rp113.03 billion. Information on the distribution and payment of dividends in 2023 for the performance of the 2022 financial year, in 2022 for the performance of the 2021 financial year, in 2021 for the performance of the 2020 financial year, in 2020 for the performance of the 2019 financial year, and in 2019 for the performance of the 2018 financial year can be seen in the table below.

Tabel Pembagian Dividen per Tahun Buku 2022-2023
Financial Year

Kebijakan Dividen Dividend Policy	Tahun Buku Financial Year				
	2023 (Interim *Cash*) 2023 (Interim Cash)	2022	2021	2020	2019
Laba Tahun Berjalan (Rp) Net Income fo the year (Rp)	83.932.347.925 (Laba Bersih per Juni 2023) 83.932.347.925 (Net Income as of June 2023)	150.654.848.841.00	136.582.719.666	80.234.174.519	90.047.271.159
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Distributed cash Dividend (Rp)	20.051.730.940	113.028.441.246	109.281.933.623	64.218.306.721	67.612.349.300
Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	3,80	21,42	20,71	12,17	12,8
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	23,89	75,02	80,01	80,03	75,08
Keputusan RUPS GMS Resolution	Berdasarkan Keputusan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 21 Desember 2023 Based Directors' Decree approved by Commissioners dated December 21, 2023	Akta No. 26 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris, tanggal 21 Juni 2023 Deed No. 26 from Ashoya Ratam, S.H., M. Kn, Notary, dated June 21, 2023	Akta No. 43 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris, tanggal 23 Juni 2022 Deed No. 43 from Ashoya Ratam, S.H., M. Kn, Notary, dated June 23, 2023	Akta No. 32 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris, tanggal 17 Juni 2021 Deed No. 32 from Ashoya Ratam, S.H., M. Kn, Notary, dated June 17, 2023	Akta No. 22 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris, tanggal 15 Juli 2020 Deed No. 22 of Fathiah Helmi, S.H., Notary, dated July 15 2020
Tanggal Pengumuman Announcement Date	27 Desember 2023 December 27, 2023	28 November 2022 (Kas Interim) & 23 Juni 2023 (Kas Final) November 28, 2022 (Interim Cash) & June 23, 2023 (Final Cash)	24 November 2021 (Interim) & 27 Juni 2022 (Kas Final) November 24, 2021 (Interim) & June 27, 2022 (Final Cash)	6 November 2020 (Interim) & 21 Juni 2021 (Kas Final) November 6, 2020 (Interim) & June 21, 2022 (Final Cash)	27 November 2019 (Interim) & 17 Juli 2020 (tunai) November 7, 2019 (Interim) & July 17 2020 (cash)
Tanggal Pembayaran Date of Payment	26 Januari 2024 January 26, 2024	23 Desember 2022 (Kas Interim) & 21 Juli 2023 (Kas Final) December 23, 2022 (Interim Cash) & July 21, 2023 (Final Cash) December 23, 2022	24 Desember 2021 (Interim) & 27 Juli 2022 (Tunai) December 24, 2021 (Interim) & July 27, 2022 (Cash)	2 Desember 2020 (Interim) & 16 Juli 2021 (Tunai) December 2, 2020 (Interim) & July 16, 2021 (Cash)	26 Desember 2019 (Interim) & 14 Agustus 2020 (Tunai) December 26, 2019 (Interim) & August 14, 2021 (Cash)

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Tahun 2023, tidak terdapat aksi penawaran umum. Adapun penawaran umum perdana dilakukan pada tahun 2017 dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berikut informasi terkait penawaran umum dan penerbitan saham tersebut:

REALIZATION OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

In 2023, there were be no public offerings. The initial public offering was carried out in 2017 and proceeds were usedin accordance with the plan that has been set.

The following is information regarding the public offering and issuance of shares:

1. **Total Perolehan Dana Penawaran Umum**
   Total Public Offering Proceeds

No	Uraian Description	Nominal (Rp)
1	Hasil Penawaran Umum Proceeds from Public Offering	461.892.470.000
2	Biaya Penawaran Umum Public Offering Expenses	22.360.645.000
3	Hasil Bersih Net Proceeds	439.531.825.000

2. **Rencana Penggunaan Dana**
   Proceeds Plan Usage

Rencana Penggunaan dana hasil penawaran umum berdasarkan keputusan RUPS antara lain untuk:

The plan to use the proceeds from the public offering based on the GMS resolutions, among others:

No	Uraian Description	Nominal (Rp)
1	Investasi (Capex) Investment (Capex)	461.892.470.000
2	Modal Kerja (Opex) Working Capital (Opex)	22.360.645.000

3. **Rincian Penggunaan Dana**
   Proceeds Usage Information

Sampai dengan 31 Desember 2023, penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebesar Rp363.206.997.500,- dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut:

By December 31, 2023, proceeds usage from the Public Offering were Rp363.206.997.500,- with details as follows:

No	Uraian Description	Nominal (Rp)
1	Investasi (Capex) Investment (Capex)	319.253.815.000 *)
2	Modal Kerja (Opex) Working Capital (Opex)	319.253.815.000 *)

*) Rp319.253.815.000 telah dialokasikan untuk pembangunan 1 (satu) unit Kapal Tunda dan 3 (tiga) Kapal Pandu, yang direncanakan akan selesai secara bertahap.
*) Rp319,253,815,000 has been allocated for the construction of 1 (one) Tugboat and 3 (three) Guide Boats, which are planned to be completed in stages.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEKERJA DAN/ATAU MANAJEMEN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA (*Employee Stock Allocation*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan saham kepada pekerja sebanyak-banyaknya 57.894.700 (lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang merupakan 4,76% (empat koma tujuh enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham, dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama program ESA adalah untuk memberikan kesempatan kepada pekerja untuk ikut memiliki Perseroan melalui kepemilikan saham, sehingga meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) serta peningkatan produktivitas kerja yang akan berdampak positif pada kinerja korporasi secara keseluruhan dan peningkatan nilai Perseroan yang dapat dinikmati oleh seluruh *stakeholders*. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanan Program ESA akan ditentukan kemudian. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu penjatahan pasti dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Alokasi dengan jatah pasti yang diberikan Perseroan untuk membeli saham Penawaran Umum oleh Peserta Program ESA sebanyak-banyaknya 57.894.700 (lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus) saham. Peserta ESA dapat membeli saham sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima dengan skema pembayaran cicilan selama 12 bulan kepada Perseroan. Harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran. Saham untuk Program ESA memiliki Lock-up period selama 12 bulan, dimulai sejak tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek. Apabila terdapat sisa alokasi saham untuk Program ESA yang tidak dibeli oleh Peserta maka saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini.

Jumlah peserta Program ESA adalah sekitar 780 orang, kecuali bagi Direksi dan Komisaris Perseroan, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Atas Usulan Direksi untuk Pelaksanaan *Employee Stock Allocation* (ESA) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor DK/21/11/33/2017 tanggal 20 November 2017 sebagai berikut:

1. Tidak berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris
2. Pekerja Aktif sampai keluarnya efektif OJK
3. Pekerja Aktif minimal sejak 1 November 2016
4. Tidak sedang terkena sanksi dari Perseroan
5. Tidak dalam status Cuti di luar Tanggungan Perseroan (CDTP)

SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT

Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 14 dated October 11, 2017, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Company will allocate a maximum of 10% (ten percent) of the Shares Offered during the Initial Public Offering of Shares for the ESA (Employee Stock Allocation) Program. In connection with this matter, the Company will allocate shares to employees of a maximum of 57,894,700 (fifty seven million eight hundred ninety four thousand seven hundred) ordinary shares in the name which constitutes 4.76% (four point seven six percent) of the shares offered during the Public Offering of Shares, with the ESA exercise price equal to the Offering Price.

The main objective of the ESA program is to provide workers with the opportunity to share ownership of the Company through share ownership, thereby increasing their sense of belonging and increasing work productivity which will have a positive impact on overall corporate performance and increase the value of the Company which can be enjoyed by all stakeholders. The funding sources used in implementing the ESA Program will be determined later. Implementation of the ESA Program will follow the provisions contained in Regulation no. IX.A.7, namely a definite allotment with a maximum of 10% (ten percent) of the number of Shares Offered in the Initial Public Offering of Shares.

The allocation with a definite quota given by the Company to purchase Public Offering shares by ESA Program Participants is a maximum of 57,894,700 (fifty seven million eight hundred ninety four thousand seven hundred) shares. ESA participants can purchase shares according to the amount of allocation received with a 12 month installment payment scheme to the Company. The ESA exercise price is the same as the Offer Price. Shares for the ESA Program have a lock-up period of 12 months, starting from the date the Company's shares are listed on the Stock Exchange. If there are remaining shares allocated for the ESA Program that are not purchased by Participants, these shares will be offered to the public in this Public Offering.

The number of ESA Program participants is around 780 people, except for the Company's Directors and Commissioners, who fulfill the requirements in accordance with the Board of Commissioners' Letter of Approval of the Directors' Proposal for Implementing Employee Stock Allocation (ESA) in the context of the Company's Initial Public Offering of Shares Number DK/21/11/33/2017 dated 20 November 2017 as follows:

1. Does not apply to the Board of Directors and Board of Commissioners
2. Active workers until the OJK effective is released
3. Active workers since at least November 1, 2016
4. Not being subject to sanctions from the Company
5. Not on leave outside the Company's responsibility (CDTP)

Apabila peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/ persyaratan di atas sehingga menyebabkan gugurnya hak peserta program ESA pada waktu periode penawaran ESA, maka saham milik peserta ESA akan dilepas untuk dijual ke publik bersamaan dengan proses IPO.

Dan jika peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/ persyaratan di atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengunduran diri baik secara sukarela maupun pemecatan yang menyebabkan gugurnya hak peserta program ESA setelah periode penawaran ESA sampai dengan berakhirnya lock-up period, maka saham akan dikembalikan ke Perseroan dan pembayaran cicilan Peserta yang telah dilakukan akan dikembalikan oleh Perseroan.

Pelaksanaan atas program tersebut mencakup informasi antara lain:

1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya
   Jumlah saham ESOP/MSOP yang ditawarkan adalah sebanyak 57.849.700 lembar dan realisasi sebanyak 7.473.700 lembar
2. Jangka waktu 12 bulan
3. Persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak
4. Tidak beriaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
   a. Pekerja aktif sampai dengan keluarnya efektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
   b. Pekerja Aktif minimal terhitung sejak tanggal 1 November 2016;
   c. Pekerja tidak sedang terkena sanksi dari Perseroan;
   d. Pekerja tidak dalam status cuti diluar tanggungan Perusahaan.
   e. Harga exercise Rp380/lembar.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Informasi Material Mengenai Investasi

Sepanjang tahun 2023, Perseroan melakukan kegiatan investasi yang terdiri dari 1 Kapal Tunda dan 3 Kapal Pandu.

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak memiliki informasi material mengenai ekspansi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi material mengenai ekspansi yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Informasi Material Mengenai Divestasi

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak memiliki informasi material mengenai divestasi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi material mengenai divestasi yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

If the ESA Program participant does not meet the criteria/ requirements above, causing the ESA program participant's rights to lapse during the ESA offering period, then the shares belonging to the ESA participant will be released for sale to the public at the same time as the IPO process.

And if the ESA Program participant does not meet the criteria/ requirements above, including but not limited to voluntary resignation or dismissal which results in the loss of the ESA program participant's rights after the ESA offer period until the end of the lock-up period, then the shares will be returned to the Company and the Participant's installment payments that have been made will be returned by the Company.

Implementation of the program includes information including:

1. Number of ESOP/MSOP shares and their realization
   The number of ESOP/MSOP shares offered was 57,849,700 shares and the realization was 7,473,700 shares
2. 12 month term
3. Requirements of eligible workers and/or management
4. This does not apply to the Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
   a. Active workers until the effective exit of the Financial Services Authority (OJK);
   b. Minimum active workers as of November 1 2016;
   c. Workers are not subject to sanctions from the Company;
   d. Employees are not on leave outside the Company's responsibility;
   e. Exercise price Rp. 380/share.

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGERS, ACQUISITION, AND RESTRUCTURIZATION OF DEBT/CAPITAL

Material Information Regarding Investment

Throughout 2023, the Company carried out investment activities consisting of 1 Tugboat and 3 Guide Boats.

Material Information Regarding Expansion

Throughout 2023, the Company has no material information regarding expansion. Therefore, there is no material information regarding expansion that can be presented in this Annual Report.

Material Information Regarding Divestment

Throughout 2023, the Company has no material information regarding divestment. Therefore, there is no material information regarding divestment that can be presented in this Annual Report.

Informasi Material Mengenai Penggabungan/ Peleburan Usaha

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak memiliki informasi material mengenai penggabungan atau peleburan usaha. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi material mengenai penggabungan atau peleburan usaha yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak memiliki informasi material mengenai akuisisi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi material mengenai akuisisi yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Investasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/Modal

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak memiliki informasi material mengenai restrukturisasi utang atau modal. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi material mengenai restrukturisasi utang atau modal yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Kebijakan Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Mekanisme review atas transaksi dengan pihak afliasi/pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi Perseroan telah diaudit oleh Auditor. Transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, yang dilakukan Perseroan, senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Dewan Komisaris dalam kapasitas pelaksanaan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi baik secara langsung maupun melalui Komite Audit telah melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arm's length principle).

Material Information Regarding Business Mergers

Throughout 2023, the Company does not have any material information regarding business merger or consolidation. Therefore, there is no material information regarding business merger or consolidation that can be presented in this Annual Report.

Material Information Regarding Acquisition

Throughout 2023, the Company has no material information regarding acquisitions. Therefore, there is no material information regarding acquisitions that can be presented in this Annual Report.

Material Information Regarding Debt/Capital Restructuring

Throughout 2023, the Company has no material information regarding debt or capital restructuring. Therefore, there is no material information regarding debt or capital restructuring that can be presented in this Annual Report.

MATERIAL TRANSACTION WITH CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH RELATED/ AFFILIATED PARTIES

Management Review on Transactions and Fulfillment of Related Regulations and Provisions

The review mechanism for transactions with affiliates/related parties involves an audit process conducted by both internal auditors and external auditors. To ensure the fairness of transactions and compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia, the Company's affiliated transaction reports undergo auditing by the Auditor. Material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated/ related parties conducted by the Company adhere to the principle of prudence in line with generally accepted business practices and comply with OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions, as well as PSAK No. 7 concerning Disclosures of Related Parties.

The Board of Commissioners, in its capacity to supervise and advise the Board of Directors, either directly or through the Audit Committee, has implemented adequate procedures to ensure that affiliated transactions are conducted in accordance with generally accepted business practices, including adherence to the arm's length principle.

Komitmen Perseroan atau Manajemen atas Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Dalam melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, Direksi menyatakan bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle).*

Adapun, Transaksi afiliasi adalah kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam laporan No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697- 4/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.

Informasi Mengenai Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Pelaksanaan transaksi dengan pihak afiliasi yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam POJK No. 42/POJK.04/2020. Adapun di tahun 2023, tidak terdapat transaksi dengan pihak afiliasi.

Informasi Mengenai Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No.7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perseroan jika mereka:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perseroan;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci Perseroan atau entitas induk dari Perseroan.
2. Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika:
   a. Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, Perseroan; (ii) memiliki kepentingan dalam Perseroan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perseroan; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perseroan;
   b. Suatu pihak adalah entitas asosiasi Perseroan;
   c. Suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perseroan sebagai venturer;
   d. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perseroan atau induknya;

Company or Management Commitment to Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

In performing material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliats/related parties, the Board of Directors asserts that the affiliated transactions have undergone adequate procedures and are conducted in line with generally accepted business practices, including adherence to the principle of arm's length transactions.

Meanwhile, affiliate transactions are business activities conducted to generate business income and are carried out routinely, repeatedly, and/or sustainably, as indicated by the annual financial reports audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm in Report No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 dated March 26, 2024.

Information of Transactions with Affiliated Parties

Transactions with affiliated parties are conducted by the Company by adhering to the provisions outlined in POJK No. 42/POJK.04/2020. adapun di tahun 2023, tidak terdapat transaksi dengan pihak afiliasi.

Information Concerning Transaction with Related Parties

Throughout 2023, the Company conducted transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 concerning "Related Party Disclosures." A related party is a person or entity related to the reporting entity:

1. Persons or family members have a relationship with an enterprise if they:
   a. Have control or joint control over the Company;
   b. Have significant influence in the Company; or
   c. Key members of the management of the Company or a parent company of the Company.
2. A party is considered related to the Company if:
   a. Directly, or indirectly through one or more intermediaries, a party (i) controls, or is controlled by, or is under common control with, the Company; (ii) has an interest in the Company that exerts significant influence over the Company; or (iii) has common control over the Company;
   b. A party is an associate of the Company;
   c. A party is a joint venture in which the Company is a venturer;
   d. A party is a member of the key management personnel of the Company or its parent;



e. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d)
f. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);
g. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan.

e. A party is an immediate family member of an individual described in item (a) or (d);
f. A party is an entity controlled, jointly controlled or significantly influenced by or in which significant voting rights are held, directly or indirectly, by an individual described in (d) or (e);

g. A party is a post-employment benefit plan for employee benefits of the Company or an entity related to the Company.

Pihak-Pihak Berelasi dan Sifat Transaksi

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi. Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

Berikut tabel yang menginformasikan nama pihak berelasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan Perseroan untuk tahun 2023 sebagai berikut:

Transactions with Related Parties and Nature of Transactions

Transactions are conducted based on terms agreed upon by both parties, which may not be the same as other transactions conducted with unrelated parties. Material transactions and balances with related parties. Unless specifically disclosed as related parties, other parties mentioned in the notes to the financial statements are unrelated parties.

The following table provides the names of related parties and types of transactions with related parties conducted by the Company in 2023:

Sifat Relasi Nature of Relationship	**Nama Pihak Berelasi** Name of Related Party	**Jenis Transaksi** Types of Transactions
Pemegang Saham Shareholders	PT Pelindo Jasa Maritim	Penjualan jasa dan dividen Sales of service and dividend
	PT Multi Terminal Indonesia	Dividen Dividend
	PT Pelabuhan Indonesia Investama	Dividen Dividend
Entitas Sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Entities under common control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Penjualan dan pembelian jasa, imbalan kerja Sales and purchase of services, work benefits
	PT Rumah Sakit Pelabuhan	Pembelian layanan kesehatan Purchase of health services
	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Penjualan jasa Sales of services
	PT Pelindo Energi Logistik	Penjualan dan pembelian jasa Purchase and sales of services
	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Penjualan dan pembelian jasa Purchase and sales of services
	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	Pembelian jasa Purchase of services

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Name of Related Party	Jenis Transaksi Types of Transactions
Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government- related entity	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bukit Prima Bahari	Penjualan jasa Sales of services
	PT Pertamina Patra Niaga	Pembelian bahan bakar Fuel purchase
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa Sales of services
	PT Jawa Satu Power	Penjualan jasa Sales of services
	PT Pengembang Listrik Nasional Gas & Geothermal	Penjualan jasa Sales of services
	PT Adhi Guna Putera	Penjualan jasa Sales of services
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan jasa Sales of services
	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Pembelian jasa asuransi Purchase of insurance services
	PT Jasa Asuransi Indonesia	Pembelian jasa asuransi Purchase of insurance services
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa Sales of services

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Realisasi saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi terhadap kinerja keuangan Perseroan untuk tahun 2022 dan 2023 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Transaksi dalam Laporan Posisi Keuangan
   a. Aset Pihak Berelasi

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian Description	2023	2022
Kas di Bank Cash in Bank	409.001	571.619
Piutang Usaha – Neto Trade Receivables – Net	4.443	98.731
Pendapatan Masih akan Diterima – Neto Acrrued Revenues – Net	313.409	110.882
Piutang Lain-lain Neto Other Receivables. – Net	5.640	51.324
Total Aset kepada Pihak Berelasi Total Assets to Related Parties	732.493	832.556
Persentase dari Total Aset Percentage of Total Assets	48,12%	55,94%

Realization of Related Party Transactions

The realization of balances and related party transactions in the Company's financial performance for 2022 and 2023 is as follows.

1. Transactions in the Financial Position Statement
   a. Related Party Assets

(in million Rupiah unless stated otherwise)

b. Liabilitas Pihak Berelasi

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian Description	2023	2022
Utang Usaha Trade Payables	18.464	29.715
Total Liabilitas kepada Pihak Berelasi Total Liabilities to Related Parties	18.464	29.715
Persentase dari Total Liabilitas Percentage of Total Liabilities	6,72%	10,19%

b. Liabilities to Related Parties

(in million Rupiah unless stated otherwise)

c. Transaksi dalam Laporan Laba Rugi

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian Description	2023	2022
Pendapatan Pihak Berelasi Revenue from Related Parties	804.878	856.402
Persentase dari Total Pendapatan Percentage of Total Revenues	70,69%	87,37%

c. Transaction in Income Statement

(in million Rupiah unless stated otherwise)

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan alasan yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan pengembangan operasional dan bisnis.

Explanation of Transaction Fairness

In normal business activities, the Company engages in transactions with related parties due to ownership and/or management relationships. All transactions with related parties have been conducted according to mutually agreed-upon policies and conditions.

Reason for Transaction

The Company conducts transactions with related parties for the same reasons as transactions with third parties, namely to fulfill operational and business development needs.

PROSPEK USAHA

Perseroan terus berkomitmen untuk menjadi fasilitator pertumbuhan perdagangan melalui pelayanan pemanduan dan penundaan berkelas dunia dalam ekosistem kepelabuhanan. Selain berfokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Pengguna Jasa, Perseroan juga berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang mendukung penerapan prinsip sadar lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau disebut *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam pengelolaan bisnisnya.

Berdasarkan kinerja positif yang dicatatkan selama tahun 2023, Perseroan menatap masa depan dengan optimisme tinggi dalam menghadapi prospek usaha tahun 2024. Dukungan dari kenaikan laba bersih sebesar Rp157,6 miliar, yang meningkat 4,6% dari tahun sebelumnya, menandakan kestabilan dan pertumbuhan yang kokoh dalam operasional Perseroan.

BUSINESS PROSPECT

The Company continues its commitment to facilitating trade growth through world-class pilotage and towage services in the port ecosystem. Besides focusing on providing the best service to Service Users, the Company is also committed to supporting the application of environmentally, socially, and governance-conscious principles, known as Environmental, Social, and Governance (ESG) in managing its business.

Based on the positive performance recorded during 2023, the Company looks to the future with high optimism in facing business prospects in 2024. Support from higher net profit of Rp157.6 billion, an increase of 4.6% from the previous year, indicates stability and solid growth in the Company's operations.

Peningkatan pendapatan sebesar 16,1% menjadi Rp1,1 triliun, dengan kontribusi utama dari segmen jasa pelabuhan umum, memberikan dasar yang kuat bagi IPCM untuk terus berinovasi dan memperluas pangsa pasar. Kinerja positif ini tidak terlepas dari kontribusi segmen lain seperti jasa Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (Tersus), yang masing-masing memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan.

An increase in revenue of 16.1% to Rp1.1 trillion, with the main contribution from the general port services, provides a strong basis for IPCM to continue to innovate and expand market share. This positive performance cannot be separated from the contribution of other segments such as Terminal Services for Own Use (TUKS) and Special Terminal (Tersus), each of which makes a significant contribution to the Company's revenue.

Dalam menjaga kualitas layanan dan keselamatan, IPCM telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan pelaksanaan maintenance dan docking kapal yang ditingkatkan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan kesiapan armada dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin ketat.

In maintaining service quality and safety, IPCM has demonstrated a strong commitment to implementing enhanced vessel maintenance and docking. This is an important step to ensure fleet readiness and meet increasingly stringent market demands.

Kenaikan aset sebesar 2,3% menjadi Rp1,52 triliun menunjukkan bahwa Perseroan memiliki dasar finansial yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan peluang di tahun 2024. Dengan memperkuat armada melalui peluncuran kapal pandu dan kapal tunda baru, serta penandatanganan perjanjian kerja sama bisnis, IPCM menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan kepada pelanggan.

The increase in assets by 2.3% to Rp1.52 trillion shows that the Company has a solid financial basis to face the challenges and opportunities in 2024. By strengthening the fleet through the launch of new pilot boats and tugs, as well as signing business cooperation agreements, IPCM emphasized its commitment to continue to innovate and improve services for customers.

Dengan demikian, Perseroan memasuki tahun 2024 dengan keyakinan akan kemampuannya untuk mempertahankan kinerja positifnya dan menjawab tantangan-tantangan di industri pelayanan pelabuhan dengan solusi-solusi yang inovatif dan terpercaya. Dengan dukungan dari pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, IPCM siap untuk mengambil langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk memperluas cakupan bisnisnya dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa mendatang.

Thus, the Company enters 2024 with confidence in its ability to maintain its positive performance and respond to challenges in the port services industry with innovative and trusted solutions. With the support of continued improving economic growth, IPCM is ready to take the strategic steps needed to expand its business scope and achieve greater success in the future.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

CHANGES IN REGULATIONS IN THE LAST FINANCIAL YEAR ON THE COMPANY

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Perseroan selalu memperhatikan setiap perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan usahanya. Berikut adalah perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada Perseroan pada tahun 2023:

The Company is committed to complying with all applicable laws and regulations. Therefore, the Company always pays attention to any changes in laws and regulations that can be implemented in its business activities. The following are changes in laws and regulations that will impact the Company in 2023:

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Changes in Regulations

No	Peraturan Perundang-undangan Regulations	Pokok Perubahan Changes	Dampak Bagi Perseroan Impact on the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Effort
1	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Law Number 4 of 2023 regarding Financial Sector Development and Reinforcement	Pemindahan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Tidak signifikan Insignificant	-

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Changes in Regulations

No	Peraturan Perundang-undangan Regulations	Pokok Perubahan Changes	Dampak Bagi Perseroan Impact on the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Effort
2	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Minister of SOE Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises			
3	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Minister of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises			
4	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Minister of SOE Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises			
5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor8/SEOJK.04/2023 tentang Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah Indonesian Financial Services Authority Circular Number 8/SEOJK.04/2023 concerning Submission of Information by Issuers or Public Companies for Preparing the Sharia Securities List	Terkait mekanisme penyampaian informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka Penyusunanan Daftar Efek Syariah melalui Sistem Pelaporan Elektronik Mechanism for submitting information by Issuers or Public Companies for preparing the Sharia Securities List through the Electronic Reporting System	Tidak signifikan Insignificant	-
6	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 of 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises	Penugasan Khusus BUMN & Program TJSL Special Assignment for SOE & TJSL Program	Tidak Signifikan Insignificant	-
7	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises	Terkait Tata Kelola GCG dan aksi korporasi GCG Governance and corporate actions	Signifikan Significant	Menyesuaikan aturan tata kelola yang *inline* dengan Peraturan Direksi Pelindo dan yang diatur dalam PER-2 Adjusting the governance rules in line with the Pelindo Board of Directors Regulation and those stipulated in PER-2
8	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-3/Mbu/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia number per-3/mbu/03/2023 concerning organs and human resources of state-owned enterprises	Terkait persyaratan penetapan BOD, BOC dan mekanismenya Requirements for determining BOD, BOC and its mechanisms	Tidak Signifikan Insignificant	-

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERSEROAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY APPLIED BY THE COMPANY IN THE LAST FINANCIAL YEAR COMPANY LONG-TERM PLAN

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	Penjelasan/Alasan Perubahan Reason for Changes	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
1	Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan – pengungkapan kebijakan akuntansi Amendment to PSAK 1: Presentation of financial statements – disclosure of accounting policies	-	Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Perseroan, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian aitem apa pun dalam laporan keuangan Perseroan. These amendments affect the disclosure of the Company's accounting policies but do not impact the measurement, recognition, or presentation of any item in the Company's financial statements.
2	Amandemen PSAK 16: Aset Tetap – Hasil sebelum penggunaan yang diintensikan Amendment to PSAK 16: Fixed Assets – Results before intended use	Perseroan menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. The Company applies these amendments retrospectively only to fixed assets that are made ready for use at or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendments.	Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan Perseroan karena tidak ada penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal. This amendment has no impact on the Company's financial statements because there are no sales of resulting items of property, plant, and equipment that become available for use at or after the beginning of the earliest period presented.
3	Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi Amendment to PSAK 25: Accounting Policies Changes in Accounting Estimates and Errors related to the Definition of Accounting Estimates	Menjelaskan adanya perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahann. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana estitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi. Explaining the differences between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and correction of errors. The amendments also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.	Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan Perseroan. This amendment has no impact on the Company's financial statements.
4	Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan Amendment to PSAK 46: Income Tax	Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning. Amendments to PSAK 46 Income Tax narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to taxable temporary differences and such as leases and decommissioning liabilities.	Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan Perseroan. This amendment has no impact on the Company's financial statements.

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perseroan telah menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan lingkungan, sosial, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Visi Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2023-2027

Menjadi penyedia jasa marine terdepan dalam ekosistem maritim Indonesia serta global.

Misi Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2023-2027

Mewujudkan jasa marine yang andal, aman, berdaya saing, dan berkelanjutan demi memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

COMPANY LONG-TERM PLAN

The Company's Long-Term Plan (RJPP) is a strategic plan that outlines the targets and objectives to be achieved over a period of 5 (five) years. The Company has developed a Long-Term Corporate Plan by considering certain factors including the environmental sustainability, social, and Good Corporate Governance.

Vision of the Company's Long-Term Plan 2023-2027

To be the leading marine service provider in the maritime ecosystem of Indonesia and globally.

Company's Long-Term Plan Mission 2023-2027

To provide reliable, safe, competitive and sustainable marine services to maximize added value for all stakeholders. sustainable in order to maximize added value for all stakeholders.



Deskripsi:

1. JAI menyediakan layanan marine yang tersertifikasi serta sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
2. JAI menyediakan layanan marine yang unggul dan terintegrasi sebagai sebuah solusi jasa kepelabuhanan.
3. JAI menyediakan layanan marine yang tersebar dengan jangkauan Indonesia dan global, baik di Pelabuhan milik Pelindo, maupun non-Pelindo.
4. JAI berkomitmen untuk melakukan upaya ramah lingkungan pada rantai nilai perusahaan.
5. JAI berkomitmen untuk memaksimalkan penciptaan nilai untuk pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola.
6. JAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan menggunakan teknologi mutakhir serta memaksimalkan aksesbilitas melalui integrasi produk dan di sepanjang rantai nilai logistik untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra.
7. JAI berkomitmen dalam menjadi lingkungan kerja yang suportif dan konstruktif dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan seluruh pegawai.
8. JAI berkomitmen dalam memastikan arus perdagangan dalam mendukung perekonomian Indonesia dengan efisiensi biaya logistik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dua arahan utama korporat disiapkan untuk berfokus pada memperkuat bisnis marine yang terpadu dan mengakselerasi operational excellence yang tengah dijalankan untuk mendukung pencapaian visi JAI menjadi penyedia jasa marine andal dengan jangkauan di wilayah Indonesia serta global.

Description:

1. JAI provides marine services that are certified and in accordance with applicable safety standards.
2. JAI provides superior and integrated marine services as a port service solution.
3. JAI provides marine services that are spread across Indonesia and global coverage, both in Ports owned by Pelindo, as well as non-Pelindo owned ports.
4. JAI is committed to environmentally friendly efforts efforts in the company's value chain.
5. JAI is committed to maximizing shareholder value creation for shareholders through improved performance and optimization of governance management.
6. JAI is committed to continuously improving the quality of services by using the latest technology and maximizing accessibility through product integration and along the logistics value chain to meet the satisfaction of customers and partners.
7. JAI is committed to being a supportive and constructive work environment supportive and constructive work environment in improving the competencies and skills of all employees. and skills of all employees.
8. JAI is committed to ensuring the flow of trade in support the Indonesian economy with cost-efficient logistics cost efficiency in improving people's welfare.

Two main corporate directions were prepared to focus on strengthening the integrated marine business and accelerating the operational excellence that is being carried out to support the achievement of JAI's vision of becoming a reliable marine service provider with coverage in Indonesia and globally.

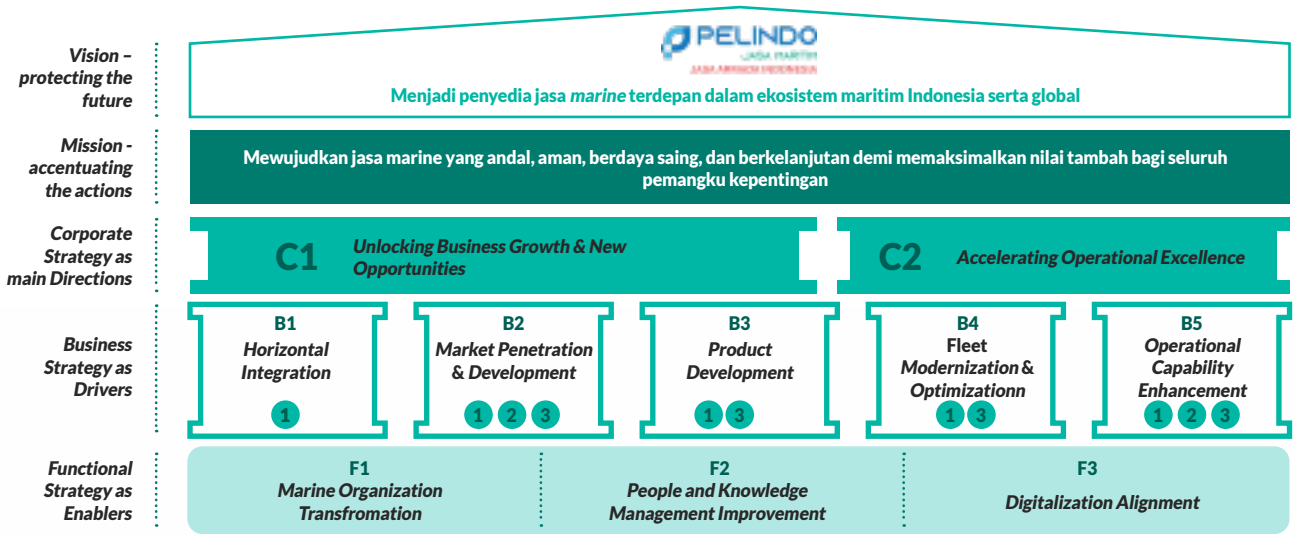

1. Jasa Pelayanan Kapal
2. Jasa Pengelolaan Kapal
3. Jasa Pengangkutan dan Lainnya

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function

PT Jasa Armada Indonesia Tbk senantiasa melakukan pengembangan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) yang baik sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kinerja Perseroan untuk tumbuh dan berkembang menghadapi berbagai tantangan.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk always develops good Human Resources (HR) and Information Technology (IT) governance as an effort to improve the productivity and performance of the Company to grow and develop to face various challenges.





TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES GOVERNANCE



Sebagai salah satu perusahaan yang memiliki fokus utama pada *Marine Services,* khususnya di bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal, PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPCM memandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan operasional Perusahaan. Di mana tujuan dan pencapaian Perusahaan tidak luput dari dukungan kinerja SDM yang mumpuni. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melakukan pengelolaan serta pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Saat ini, Perusahaan telah memiliki para pekerja yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan bisnis.

As a company with primary focused on Marine Services, particularly in vessel piloting and towing services, PT Jasa Armada Indonesia Tbk or IPCM recognizes the vital role of Human Resources (HR) for the Company's operations. The Company's goals and achievements are closely tied to the performance of its skilled HR. The Company is dedicated to consistently managing and developing human resources in alignment with business needs and advancements to achieve the Company's vision and mission. Currently, the Company boasts a workforce that is proficient in their respective fields and adept at adapting to changes in the business environment.

KOMPOSISI PEKERJA

Komposisi pekerja IPCM yang terdiri dari Pekerja Penugasan Pelindo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penempatan Pekerja *(Secondment Agreement)* dan Pekerja Kontrak dengan Waktu Tertentu (PKWT), per tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 848 orang, yang meliputi 124 Pekerja Penugasan Pelindo, 60 PKWT dan 664 Tenaga Alih Daya.

EMPLOYEE COMPOSITION

IPCM employees comprise of Assigned Employees from Pelindo (Seconded) based on the Secondment Agreement and Temporary Appointment Work Agreement (PKWT), as of December 31, 2023, is recorded at 848 people, which includes 124 employees of Seconded from Pelindo, 60 non-permanent workers and 664 outsourced workers.

Status Pekerja Employee Status	Realisasi Tahun 2022 (orang) 2023 Realization (people)	RKAP Tahun 2023 (orang) 2023 RKAP (people)	Realisasi Tahun 2023 (orang) 2023 Realization (people)	Capaian Achievement	
				Trend Trend (%)	Deviasi Deviation (%)
	1	2	3	4 = (3-1) : 1	5 = 3 : 2
Pekerja Penugasan Pelindo Pelindo Seconded	127	145	124	-4,62%	83,78%
PKWT	57	65	60	5,26%	92,31%
Tenaga Alih Daya Tenaga Alih Daya	638	664	664	4,08%	100%
Jumlah Total	**825**	**874**	**848**	**2,79%**	**96,69%**

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total pekerja IPCM di tahun 2023 mengalami pergerakan sebesar 2,79%. Adapun dari keseluruhan pekerja IPCM di tahun 2023 yang mencapai 848 orang, realisasi pemenuhan jumlah SDM mencapai 96,69% terhadap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Belum tercapainya realisasi pemenuhan jumlah SDM atas RKAP dapat disebabkan diantaranya:

1. Terdapat pekerja pensiun dan mutasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Atas pekerja yang pensiun dan mutasi, hanya beberapa yang mendapat penggantian personal;
3. Pemenuhan fisik SDM dalam hal Pekerja Penugasan Pelindo sebagaimana RKAP belum dapat dipenuhi oleh Kantor Pusat Pelindo;
4. Penambahan jumlah PKWT tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan personal di bidang bisnis Perusahaan yang membutuhkan kualifikasi khusus.

Secara lebih rinci, untuk pekerja Penugasan Pelindo tidak ada mutasi dari Holding Pelindo, sedangkan beberapa pekerja lainnya di mutasi atas permintaan Holding Pelindo dan ada penambahan pekerja PKWT untuk memenuhi kebutuhan Pandu.

Dalam hal pengelolaan ABK sebagai salah satu penggerak bisnis inti Perusahaan, berikut disampaikan pergerakan jumlah pekerja ABK baik Pekerja Penugasan Pelindo maupun Tenaga Alih Daya bekerja sama dengan PT Intan Sejahtera Utama (PT ISMA):

When compared to the previous year, the total number of IPCM employees in 2023 experienced a movement of 2.79%. As for the total number of IPCM employees in 2023 which reached 848 people, it was recorded that the realization of the fulfillment of the number of human resources reached 96.69% of the Company's Budget Work Plan (RKAP). Not achieving the realization of the fulfillment of the number of human resources on the RKAP can be caused by, among others:

1. There are workers retiring and transferring within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. For workers who retire and transfer, only a few get personal replacements;
3. Physical fulfillment of human resources in terms of Pelindo Assignment Workers as the RKAP cannot be fulfilled by the Pelindo Head Office;
4. The increase in the number of PKWT in 2023 compared to 2022 is an effort to meet personal needs in the Company's business fields that require special qualifications.

In more detail, for Pelindo Assignment workers there is no mutation from Holding Pelindo, while several other workers are mutated at the request of Holding Pelindo and there are additional PKWT workers to meet the Piloting needs.

In terms of crew management as one of the drivers of the Company's core business, the following is the movement of the number of crew workers, both Pelindo Assignment Workers and Outsourced Workers in collaboration with PT Intan Sejahtera Utama (PT ISMA):

Jenis Pekerja Types of Employees	Tahun Year	
	2023 (orang) (people)	2022 (orang) (people)
Kru Crew		
Pekerja Penugasan Pelindo Pelindo Seconded	40	47
Tenaga Alih Daya ISMA	583	556
Jumlah Total	623	603
Pekerja *Outsource* di Luar Kru Outsorced Outside Crew		
Jumlah Total	81	69

Jumlah pekerja IPCM merupakan parameter krusial yang mencerminkan skala dan kompleksitas operasional Perusahaan. Pemahaman Perusahaan akan pentingnya peran pekerja meliputi sejauh mana setiap individu dapat mengelola tugas dan tanggung jawab yang ada. Selain itu, jumlah pekerja juga mempengaruhi kecepatan pertumbuhan Perusahaan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Perusahaan memiliki jumlah pekerja yang signifikan dan struktur organisasi yang kompleks, sehingga membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang intensif. Perusahaan juga terus berupaya menunjukkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan interaksi tim. Tanpa membeda-bedakan, Perusahaan memiliki jajaran sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai jenjang usia, pendidikan, serta status. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap jumlah pekerja guna membentuk evaluasi kinerja yang efektif dan merealisasikan tujuan perkembangan bisnis.

The total number of employees for IPCM serves as a crucial parameter reflecting the scale and complexity of the Company's operations. The Company recognizes the significance of each employee's role in managing tasks and responsibilities, affecting the Company's growth rate and influencing the local economy. With a substantial workforce and a complex organizational structure, effective human resource management is imperative. The Company remains committed to promoting flexibility in decision-making and team interactions, fostering a diverse workforce across various age groups, educational backgrounds, and employment statuses. This commitment aims to enhance understanding, facilitate effective performance evaluations, and achieve the Company's business development goals.

Dalam rangka mencapai visi Perusahaan, PT Jasa Armada Indonesia Tbk membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berintegritas dan kompeten. Untuk itu Pengelola Human Capital PT Jasa Armada Indonesia Tbk perlu memfokuskan sumber daya manusia yang memiliki hal-hal strategis perusahaan dalam menyediakan, membangun, dan mengoperasikan pelayanan kepelabuhanan dan logistik secara terintegrasi, berkualitas dan handal yang berimplikasi terhadap kelancaran arus kapal dan barang.

In order to achieve the Company's vision, PT Jasa Armada Indonesia Tbk requires the quality of professional, integrity and competent human resources. For this reason, the Human Capital Manager of PT Jasa Armada Indonesia Tbk needs to focus on human resources who have strategic matters of the company in providing, building, and operating port and logistics services in an integrated, quality and reliable manner which has implications for the smooth flow of ships and goods.

Sebagai bagian dari pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam mendukung tercapainya visi, Perusahaan dapat melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak kedua. Pelaksanaan penyerahan pekerjaan penunjang di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk kepada pihak kedua diharapkan dapat membantu pengelola sumber daya manusia PT Jasa Armada Indonesia Tbk untuk lebih memfokuskan pekerja dalam menjalankan fungsi *strategic thinking* untuk pencapaian target revenue Perusahaan. Berikut disampaikan pergerakan jumlah pekerja Tenaga Alih Daya di lingkungan Perusahaan:

As part of the management of Human Resources in supporting the achievement of the vision, the Company can transfer some of the work to the second party. The implementation of the submission of supporting work within PT Jasa Armada Indonesia Tbk to the second party is expected to help PT Jasa Armada Indonesia Tbk human resource managers to focus more on workers in carrying out strategic thinking functions for the achievement of the Company's revenue targets. The following is the movement of the number of outsourced workers within the Company:



Jenis Pekerja Types of Employees	Realisasi Tahun 2022 (orang) 2022 Realization (people)	RKAP Tahun 2023 (orang) 2023 RKAP (people)	Realisasi Tahun 2023 (orang) 2023 Realization (people)	Capaian Achievement	
				Trend Trend (%)	Deviasi Deviation (%)
	1	2	3	4 = (3-1) : 1	5 = 3 : 2
ABK Ship's Crew	557	583	583	-4,46%	100,00%
Pandu Pilot	12	12	12	0,00%	100,00%
Tenaga Penunjang Lainnya Supporting Workforce	69	69	69	0,00%	100,00%
Jumlah Total	**638**	**664**	**664**	**-3,92%**	**100,00%**

Realisasi jumlah pekerja selain pekerja Pelindo dan PKWT tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 26 orang. Perubahan tersebut berdasarkan strategi Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ABK, pandu, dan tenaga penunjang lainnya sejalan dengan perkembangan usaha Perusahaan.

The actual number of employees beside those from Pelindo and PKWT in 2023 increased by 26 people. These changes occurred based on the Company's strategy in fulfilling the number of crew members, piloting crew and other supporting personnel to support the Company's business development.

Uraian Description	Realisasi Tahun 2022 (orang) 2022 Realization (people)	RKAP Tahun 2023 (orang) 2023 RKAP (people)	Realisasi Tahun 2023 (orang) 2023 Realization (people)	Capaian Achievement	
				Trend Trend (%)	Deviasi Deviation (%)
	1	2	3	4 = (3-1) : 1	5 = 3 : 2
Total SDM Total HR	825	874	848	2,79%	96,69%

Total SDM Perusahaan di tahun 2023, meningkat sebanyak 23 orang atau sebesar 2,75%, dari 825 orang di tahun 2022 menjadi 848 orang di tahun 2023. Untuk meningkatkan kualitas kinerja, Perusahaan akan terus berkomitmen dalam mengelola SDM yang dimiliki.

In 2023, the Company's total HR increased by 23 people, or 2,75%, from 825 people in 2022 to 848 people in 2023. To enhance performance quality, the Company remains committed to effectively managing its HR.

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan dalam mengelola organisasi dan Sumber Daya Manusia Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) fungsi diantaranya: Strategi SDM, Pengelolaan SDM dan Layanan SDM sebagaimana Kepmenaker 149 Tahun 2020 terkait matriks peran manajemen sumber daya manusia berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Activities in managing the organization and Human Resources of the Company consist of 3 (three) functions including: HR Strategy, HR Management and HR Services as Kepmenaker 149 of 2020 related to the matrix of human resource management roles based on the Indonesian National Work Competency Standards.

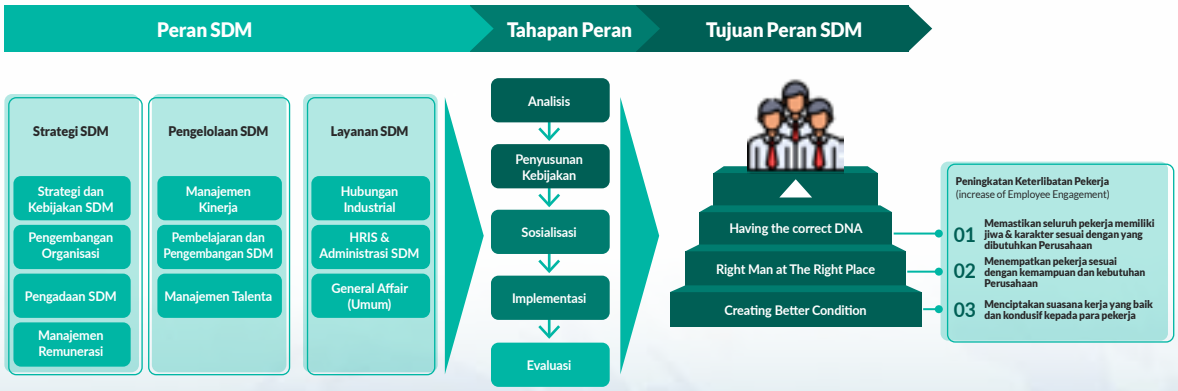

Strategi Pengelolaan SDM

Fungsi Strategi SDM memiliki peran di antaranya: Strategi dan Kebijakan SDM, Pengembangan Organisasi, Pengadaan SDM dan Manajemen Remunerasi. Dalam implementasi fungsi strategi SDM, berikut hal-hal yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023:

1. Penyusunan Peraturan Direksi bidang SDM sejalan dengan arahan Kantor Pusat Pelindo dan Sub-holding Pelindo Jasa Maritim;
2. Implementasi Perjanjian *Joint Procurement* Pelindo diantaranya:
   a. Penyedia tenaga alih daya dengan penyedia jasa terpilih yaitu PT Pelindo Daya Sejahtera
   b. Penyedia jasa pengamanan dengan penyedia jasa terpilih yaitu PT Intan Sejahtera Utama
   c. Penyedia kendaraan operasional dengan penyedia jasa terpilih yaitu PT HRC Prima Sejahtera
3. Penyesuaian koordinasi wilayah pada area sebagai salah satu program dalam meningkatkan kinerja Perusahaan dan dalam upaya peningkatan kinerja pasar baru di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk untuk kemudian dituangkan dalam penyesuaian SK Tata Kerja Manajemen sebagai berikut:
   a. Area I : Tanjung Priok, Meulaboh, Nusantara Regas
   b. Area II : Banten, Pontianak, Nipa
   c. Area III : Panjang, Bengkulu, Weda, Halmahera dan sekitarnya (Lauwi)
   d. Area V : Jawa Satu Power, Kanci
4. *Focus Group Discussion* Pemurnian Bisnis Pelindo *cluster marine* yang diinisiasi oleh Pelindo Holding dengan pembahasan: rencana *change parent* PMS dari PJM ke JAI dan transfer bisnis anak perusahaan PMS dan PJM
5. Pelaksanaan *Employee Experience Survey* (EXSurvey) 2023 dengan skor 3,33 dari skala 1 - 4 yang digambarkan pada tabel berikut:

HR Management Strategy

The HR Strategy function has roles in: HR Strategy and Policy, Organizational Development, HR Procurement and Remuneration Management. In the implementation of the HR strategy function, the following things have been implemented throughout 2023:

1. The preparation of the HR Regulations of the Board of Directors is in line with the direction of Pelindo Head Office and Pelindo Maritime Services Sub-holding;
2. Implementation of Pelindo Joint Procurement Agreement including:
   a. Outsourcing service provider with the selected service provider, PT Pelindo Daya Sejahtera
   b. Security service provider with the selected service provider, namely PT Intan Sejahtera Utama
   c. Operational vehicle provider with the selected service provider, PT HRC Prima Sejahtera
3. Adjustment of regional coordination in the area as one of the programs in improving the Company's performance and in an effort to improve the performance of new markets within PT Jasa Armada Indonesia Tbk to then be outlined in the adjustment of the Management Work Procedure Decree as follows:
   a. Area I: Tanjung Priok, Meulaboh, Nusantara Regas
   b. Area II : Banten, Pontianak, Nipa
   c. Area III : Panjang, Bengkulu, Weda, Halmahera and surrounding areas (Lauwi)
   d. Area V : Jawa Satu Power, Kanci
4. Focus Group Discussion on Purification of Pelindo Business in marine cluster initiated by Pelindo Holding with discussion: PMS parent change plan from PJM to JAI and business transfer of PMS and PJM subsidiaries.
5. The implementation of the 2023 Employee Experience Survey (EXSurvey) with a score of 3.33 on a scale of 1 - 4 is depicted in the following table:



Keterangan:
- Kecenderungan para pekerja di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk memiliki pengalaman sosial yang lebih tinggi.
- Perusahaan perlu melakukan penyesuaian yang lebih baik untuk meningkatkan pengalaman dalam proses kerja dan fasilitas kerja agar pekerja dapat memberikan *more added value* dalam kinerjanya.

Description:
- The tendency of workers in PT Jasa Armada Indonesia Tbk has a higher social experience.
- The company needs to make better adjustments to improve experience in the work process and work facilities so that workers can provide more added value in their performance.

6. Pelaksanaan evaluasi struktur organisasi sejalan dengan arahan pemegang saham untuk dilakukan penyesuaian fungsi Manajemen Risiko pada Direktorat yang membidangi fungsi Keuangan.

Pengelolaan SDM

Fungsi Pengelolaan SDM memiliki peran diantaranya: Manajemen Kinerja, Pembelajaran dan Pengembangan SDM, dan Manajemen Talenta. Dalam implementasi fungsi pengelolaan SDM, berikut hal-hal yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023:

1. Pengenalan aplikasi Portaverse sebagai *dashboard* dari Pelindo yang digunakan dalam menjalankan fungsi pengelolaan SDM diantaranya:
   a. LMS (*Learning Management System*)
      i) Fitur ini digunakan untuk mengakses pelatihan baik secara berbayar maupun gratis;
      ii) Setiap Pekerja Penugasan Pelindo mendapatkan saldo senilai Rp 3.500.000,00 tiap tahunnya untuk mengakses pelatihan dalam Portaverse;
      iii) Setiap Pekerja Penugasan Pelindo memiliki KPI untuk mencapai 10 jam belajar (*learning hour*) dalam tahun 2023;
      iv) Pekerja yang mengikuti pelatihan di luar *dashboard* Portaverse, dapat melakukan klaim *learning hour* sehingga dapat tercatat pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri atau dilaksanakan atas kebutuhan Perusahaan.
   b. KMS (*Knowledge Management System*)
      i) Fitur ini digunakan untuk bersosialisasi dengan seluruh Pekerja Penugasan Pelindo;
      ii) Fitur ini terdiri dari: s*ocial media, knowledge map, community of practice, community of interest*, dan *ask the expert*;
      iii) Setiap aktivitas yang dilakukan dalam fitur ini akan mendapatkan poin.
   c. TMS (*Talent Management System*)
      i) Fitur ini digunakan untuk mengelola kinerja individu pekerja yang terdiri dari KPI Individu dan Penilaian Perilaku;
      ii) Perusahaan mulai menggunakan fitur ini pada Triwulan IV tahun 2023 sebagaimana *timeline* yang telah disampaikan oleh Sub-holding Pelindo Jasa Maritim;
      iii) Periode *monitoring* KPI dilakukan baik secara triwulanan, semesteran dan tahunan;
      iv) Dalam hal nilai akhir atas kinerja individu, perlu dilakukan kalibrasi di tiap unit kerja.
2. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja SDM secara objektif dan transparan. Hasil dari penilaian tersebut dapat digunakan oleh Perusahaan sebagai tinjauan untuk menentukan pengembangan dan strukturisasi kebutuhan organisasi. Adapun proses penilaian kinerja yang dilakukan Perusahaan terlebih dahulu dilakukan penentuan KPI Perusahaan yang kemudian didefinisikan ke dalam KPI Direksi. KPI tersebut akan di-*deliver* ke seluruh VP untuk kemudian dilakukan *cascading* ke DVP hingga level staf.

6. The implementation of the organizational structure evaluation is in line with the direction of the shareholders to adjust the Risk Management function in the Directorate in charge of the Finance function.

HR Management

The HR Management function has roles including: Performance Management, HR Learning and Development, and Talent Management. In the implementation of the HR management function, the following things have been implemented throughout 2023:

1. Introduction to the Portaverse application as a dashboard from Pelindo used in carrying out HR management functions including:
   a. LMS (Learning Management System)
      i) This feature is used to access both paid and free training;
      ii) iEach Pelindo Assigned Worker receives a balance of Rp 3,500,000.00 per year to access training in Portaverse;
      iii) Each Pelindo Assignee has a KPI to achieve 10 learning hours by 2023;
      iv) Workers who participate in training outside the Portaverse dashboard, can claim learning hours so that training conducted independently or carried out based on the needs of the Company can be recorded.
   b. KMS (Knowledge Management System)
      i) This feature is used to socialize with all Pelindo Assigned Workers;
      ii) This feature consists of: social media, knowledge map, community of practice, community of interest, and ask the expert;
      iii) Every activity done in this feature will earn points.
   c. TMS (Talent Management System)
      i) This feature is used to manage the performance of individual workers consisting of Individual KPIs and Behavioral Assessments;
      ii) The company began using this feature in the fourth quarter of 2023 as the timeline submitted by Pelindo Jasa Maritim Sub-holding;
      iii) The KPI monitoring period is carried out both quarterly, semesterly and annually;
      iv) In terms of the final value of individual performance, calibration needs to be done in each work unit.
2. The Company evaluates HR performance objectively and transparently. The results of the assessment can be used by the Company as a review to determine the development and structure of organizational needs. The performance assessment process carried out by the Company first determines the Company's KPIs which are then defined into the KPIs of the Board of Directors. The KPIs will be delivered to all VPs and then cascaded to DVPs to the staff level.

3. Terkait Pembelajaran dan Pengembangan SDM, Perusahaan membagi sistem *learning* menjadi 2 (dua) yaitu : *Self Learning* dan *Corporate Learning*. Tujuan dari masing-masing program adalah untuk memberikan pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan *skill* bagi SDM.
   a. *Self learning* yaitu pembelajaran yang dilakukan secara mandiri dan dapat dilakukan klaim *learning hour* pada Portaverse secara mandiri sehingga tercatat historinya;
   b. *Corporate learning* terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu:
      i) *Experiential Learning*
      Perusahaan telah menerapkan *job assignment* kepada beberapa pekerja sebagai pelaksana tugas baik pada posisi struktural maupun *general*.
      ii) *Social Learning*
      - Perusahaan telah menerapkan *coaching* dan *mentoring* pada sesi penilaian KPI Individu dari atasan ke bawahan secara *one on one*;
      - Perusahaan telah melaksanakan beragam sesi *knowledge sharing* seperti JANGKAR (JAI Ngajak Bicara), CWS *Learning*, dan Evaluasi Akhir Tahun;
      - Pekerja dapat melakukan *posting knowldege* pada fitur KMS Portaverse.

      iii) *Structured Learning*
      - Perusahaan melakukan pelatihan kepada Pekerja menyesuaikan kebutuhan Perusahaan baik *soft skill* maupun *hard skill*;
      - Pekerja Perusahaan, khususnya Pekerja Penugasan Pelindo mendapatkan minimal 1 (satu) pelatihan tiap tahunnya;
      - Topik pelatihan yang dapat diambil oleh tiap Pekerja dalam unit kerja masing-masing sebagai berikut:

3. Regarding Learning and HR Development, the Company divides the learning system into 2 (two), namely: Self Learning and Corporate Learning. The purpose of each program is to provide the development of abilities, knowledge, and skills for HR.
   a. Self learning is learning that is done independently and can be done learning hour claims on Portaverse independently so that it is recorded historically;
   b. Corporate learning consists of 3 (three) aspects, namely:
      i) Experiential Learning
      The Company has implemented job assignments to several workers as task executors in both structural and general positions.
      ii) Social Learning
      - The Company has implemented coaching and mentoring in Individual KPI assessment sessions from superiors to subordinates on a one on one basis;
      - The company has conducted various knowledge sharing sessions such as JANGKAR (JAI Ngajak Bicara), CWS Learning, and Year-End Evaluation;
      - Workers can post knowledge on the KMS Portaverse feature.

      iii) Structured Learning
      - The Company conducts training for workers according to the needs of the Company, both soft skills and hard skills;
      - The Company's Workers, especially Pelindo Assigned Workers, receive a minimum of 1 (one) training per year;
      - Training topics that can be taken by each Employee in their respective work units are as follows:

Training Type	Direktorat Utama Main Directorate	Direktorat Komersial & Pengembangan Bisnis Commercial & Business Development Directorate	Direktorat Armada & Operasi Fleet & Operations Directorate	Direktorat Keuangan & SDM Directorate of Finance & HR
General	7 Habits			
	Financial Planning			
	Risk Management			
	Audit			
	Quality & Safety			
	Good Communication			
	Selling & Negotiation			
	Technology			
Specific	Capital Market	Marketing	Ship Management	People Management
	Branding	Project Management	Crew Management	Advance Finance
	Corporate Governance & Law	Business Development	Marine Regulation	Strategic Procurement

4. Manajemen Talenta dilakukan dengan melakukan pendefinisian Top Talent Millenials, Top Talent Perempuan, High Potential Talent dan Promotable Talent sebagaimana arahan dari Pelindo. Pendefinisian ini berdasarkan kelas jabatan, jabatan dan hasil kalibrasi skor KPI tahun 2023

4. Talent Management is carried out by defining Top Talent Millennials, Top Talent Women, High Potential Talent and Promotable Talent as directed by Pelindo. This definition is based on position class, position and KPI score calibration results in 2023.



a. *Top Talent Millenials* sebanyak 7% dari total Pekerja Penugasan Pelindo
b. *Top Talent* Perempuan sebanyak 5% dari total Pekerja Penugasan Pelindo
c. *High Potential Talent* sebanyak 13% dari total Pekerja Penugasan Pelindo
d. *Promotable Talent* sebanyak 67% dari total Pekerja Penugasan Pelindo

5. Bentuk penghargaan lain atas kinerja baik dalam Perusahaan, dilakukan IPCM Award 2023 dengan memberikan award kepada:
   a. *Best Employee*
   b. *Best Division*
   c. *Best Area*
   d. *Best Fleet*
   e. *Best Crew*
   f. *Best Digital Content Creator*
   g. *Marine Innovation*

Layanan SDM

Fungsi Layanan SDM memiliki peran diantaranya: Hubungan Industrial, HRIS dan Administrasi SDM, dan Umum. Dalam implementasi fungsi layanan SDM, berikut hal-hal yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023:

1. Dalam kaitannya dengan hubungan Industrial, hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan SDM memainkan peran kunci dalam perjalanan Perusahaan meraih kesuksesan. Keterlibatan antara manajemen dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif, diwujudkan melalui keberadaan serikat pekerja di lingkungan Perusahaan. Adanya dialog terbuka serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, inisiatif untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dalam bentuk *Leadership Improvement Workshop* telah menjadi prioritas, dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan Perusahaan. Kesinambungan hubungan industrial yang sehat menjadi landasan bagi pencapaian tujuan Perusahaan dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang.
2. Implementasi *Human Resource Information System* di Perusahaan dilakukan dengan implementasi beberapa sistem yang berjalan di Pelindo diantaranya: PEO sebagai *dashboard* korespondensi Perusahaan, Portaverse, SAP dan aplikasi *surrounding*.
3. Layanan kesehatan pekerja turut menjadi fokus Perusahaan demi memastikan Pekerja dalam kondisi sehat sehingga dapat bekerja dengan optimal. Beberapa program dilaksanakan diantaranya: *fit to work* kepada pekerja operasional, *medical check up*, dan evaluasi layanan kesehatan yang lebih baik lagi. Sampai saat ini pelaksanaan *monitoring* kesehatan pekerja bekerja sama dengan PT Rumah Sakit Pelabuhan.
4. Program pendukung *wellbeing* pekerja lainnya yaitu pelaksanaan olahraga yang rutin dilaksanakan seperti bulu tangkis, tenis dan futsal; pelaksanaan *employee gathering*; dan kajian keagamaan sehingga dapat meningkatkan *sense of belonging* pekerja pada Perusahaan.

a. Top Talent Millennials as much as 7% of the total Pelindo Assigned Workers
b. Female Top Talent as much as 5% of total Pelindo Assigned Workers
c. High Potential Talent as much as 13% of total Pelindo Assigned Workers
d. Promotable Talent as much as 67% of the total Pelindo Assigned Workers

5. Another form of appreciation for good performance in the Company, IPCM Award 2023 is carried out by giving awards to:
   a. Best Employee
   b. Best Division
   c. Best Area
   d. Best Fleet
   e. Best Crew
   f. Best Digital Content Creator
   g. Marine Innovation

HR Services

The HR Services function has roles including: Industrial Relations, HRIS and HR Administration, and General. In the implementation of the HR service function, the following things have been implemented throughout 2023:

1. In terms of Industrial relations, harmonious relationships between the Company and its human resources play a key role in the Company's journey to success. The involvement between management and workers in creating a stable and productive work environment is realized through the existence of trade unions within the Company. The existence of open dialog and effective conflict resolution mechanisms can contribute significantly to improving employee productivity and welfare. In addition, initiatives to strengthen the skills and capacity of the workforce in the form of Leadership Improvement Workshop have become a priority, in support of the Company's sustainable growth. The continuity of healthy industrial relations is the foundation for the achievement of the Company's goals and creates a solid foundation for long-term growth.
2. The implementation of the Human Resource Information System in the Company is carried out by implementing several systems that run in Pelindo including: PEO as a Company correspondence dashboard, Portaverse, SAP and surrounding applications.
3. Employee health services are also a focus of the Company to ensure that workers are in good health so that they can work optimally. Several programs are implemented including: fit to work for operational workers, medical check-ups, and evaluation of better health services. Until now, the implementation of worker health monitoring is in collaboration with PT Rumah Sakit Pelabuhan.
4. Other programs supporting employee wellbeing are the implementation of routine sports such as badminton, tennis and futsal; the implementation of employee gatherings; and religious studies so as to increase employees' sense of belonging to the Company.

Berdasarkan strategi penerapan pengelolaan SDM tersebut, menghasilkan pencapain positif atas produktivitas pekerja yang berdampak positif terhadap kinerja Perusahaan, sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

The HR management strategy has resulted in positive achievements in worker productivity which had a positive impact on the Company's performance, as attached in the table below.

Uraian Description	Realisasi 2022 (Audited) 2022 Realization (Audited)	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 (Audited) 2023 Realization (Audited)	Capaian Achievement	
				Trend Trend	Deviasi Deviation
	[b]	[c]	[d]	[d : b]	[d : c]
Pendapatan Operasi (Rp miliar) Operating Revenues (Rp billion)	923	914	1.131	1,23	1,24
Biaya Operasi* (Rp miliar) Operating Expenses (Rp billion)	799	739	987	1,24	1,34
Laba Operasi (Rp miliar) Income from Operation (Rp billion)	124	203	144	1,16	0,71
Jumlah Pekerja Pelindo Total Pelindo's Employees	130	148	124	0,95	0,84
Jumlah Pekerja Pelindo & PKWT Total Pelindo's Employees & PKWT	57	213	184	0,98	0,86
Produktivitas Pekerja Pelindo (Rp miliar) Pelindo Employess Productivity (Rp billion)	0,954	1,37	1,16	1,22	0,85
Produktivitas Pekerja Pelindo & PKWT (Rp miliar) Pelindo Employees & PKWT Productivity (Rp billion)	150	0,95	0,78	0,01	0,82

*Termasuk Pendapatan dan Biaya Operasi Lainnya
*Including Other Operating Revenues and Expenses

Proses Rekrutmen

Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kesetaraan dalam proses rekrutmen pekerja. Tanpa memandang unsur suku, kepercayaan, agama, jenis kelamin, dan usia, Perusahaan percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk memberikan kinerja optimal. Adapun proses rekrutmen diatur dalam surat SOP PT Jasa Armada Indonesia Tbk Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Pekerja Nomor : SOP-SDBP-01 yang kemudian dilaksanakan sesuai proses berikut :

1. Unit kerja mengajukan permohonan kebutuhan pekerja ke Direktur keuangan dan SDM;
2. SDM menentukan sumber dan metode rekrutmen;
3. Publikasi melalui tiga metode headhunter, Penugasan Pelindo, dan perusahaan penyedia Tenaga kerja;
4. Koordinasi antar unit kerja;
5. Hasil seleksi ke Direktur Keuangan dan SDM;
6. Dokumentasi administrasi pekerja (Surat Perjanjian Kerja

Recruitment Process

The Company upholds the principle of equality when recruiting employees. Irrespective of ethnicity, belief, religion, gender, and age, the Company firmly believes that every individual possesses potential that can be nurtured to generate optimal performance. The recruitment process is regulated in a letter SOP of PT Jasa Armada Indonesia TBk regarding Recruitment Procedure and Worker Selection Number : SOP-SDBP-01 and is subsequently executed following the outlined process:

1. The work unit submits a request for worker needs to the Director of Finance and HR;
2. HR determines recruitment sources and methods;
3. Publication through three headhunter methods, Pelindo Assignment, and outsourcing companies;
4. Coordination between work units;
5. Selection results are submitted to the Director of Finance and HR;
6. Employee administrative documentation (Employment Agreement Letter) is processed.

Penilaian Kinerja

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja SDM secara objektif dan transparan. Hasil dari penilaian tersebut dapat digunakan oleh Perusahaan sebagai tinjauan untuk menentukan pengembangan dan strukturisasi kebutuhan organisasi. Adapun proses penilaian kinerja yang dilakukan Perusahaan dimulai dari bulan Januari sampai dengan November 2023 menggunakan penilaian Penilaian Performansi Bulanan (P2B) melalui system IVO dan ada perubahan mengikuti perubahan dari Holding Pelindo menggunakan Key Performance Indicator (KPI) melalui sistem Portaverse.

Kebijakan Pemberian Penghargaan

Kebijakan Pemberian penghargaan oleh Perusahaan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk No HK.56/03/08/MS.18 tentang Pemberian Insentif bagi Pekerja di Lingkungan PT Jasa Armada Tbk tanggal 27 Juli 2017.

Kebijakan yang Mengatur Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan merancang kebijakan untuk melindungi kesejahteraan pekerja, mencegah risiko kecelakaan, dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman. Kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan antara lain: keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3, fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, serta informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja. Dalam implementasinya, Perusahaan mengacu pada Kebijakan Mutu & SMK3L PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang disahkan Oktober 2019 dan Manual Sistem Manajemen QHSEE No. Dok: MANUAL-JAI-01 No. Rev: 01 tanggal efektif 1 Oktober 2015, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga yang tercantum dalam SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No HK.568/20/1/2/PI.II-17 tentang Penghasilan non bulanan bagi pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 20 Januari 2017.

Hubungan Industrial

Hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan SDM memainkan peran kunci dalam perjalanan Perusahaan meraih kesuksesan. Keterlibatan antara manajemen dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif, di wujudkaan melalui keberadaan serikat pekerja di lingkungan Perusahaan. Adanya dialog terbuka serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, inisiatif untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas tenaga kerja telah menjadi prioritas, dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan Perusahaan. Kesinambungan hubungan industrial yang sehat menjadi landasan bagi pencapaian tujuan Perusahaan dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang.

Program Pensiun

Program pensiun telah menjadi bagian integral dari strategi kesejahteraan pekerja. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi pekerja yang memasuki masa pensiun. Program pensiun ini mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap pekerja sepanjang perjalanan karir mereka, memastikan bahwa mereka dapat menikmati masa pensiun dengan tenang dan nyaman.

Performance Assessment

The Company conducts an objective and transparent evaluation of HR performance. The outcomes of this assessment serve as a basis for the Company to review organizational development and structuring needs. The assessment process by the Company starts from January to November 2023 using the Monthly Performance Assessment (P2B) via the IVO system with changes coming from Pelindo Holding that instructed to use the Key Performance Indicator (KPI) via the Portaverse system.

Awards Policy

The Company's award policy is derived from the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK.56/03/08/MS.18 dated July 27, 2017, regarding Incentives for Employees of PT Jasa Armada Tbk.

Policies Regulating Occupational Health and Safety

The Company has formulated policies aimed at protecting employee well-being, mitigating the risk of accidents, and fostering a secure work environment. These policies cover work safety, OHS management, OHS certification, health facilities within the work environment, and the dissemination of information regarding specific danger levels for employees. In reality, the Company adheres to the Quality Policy & SMK3L of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, ratified in October 2019, and the QHSEE Management System Manual No. Doc: MANUAL-JAI-01 No. Rev: 01, effective as of October 1, 2015. The Company also provides health insurance for employees and their families, as outlined in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No HK.568/20/1/2/PI.II-17, regarding Non-monthly Income for Employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), issued on January 20, 2017.

Industrial Relationship

A harmonious relationship between the Company and its HR plays a pivotal role in the Company's journey toward success. The engagement between management and employees in creating a stable and productive work environment is achieved through the presence of labor unions within the Company. The establishment of open dialogue and effective conflict resolution mechanisms can significantly contribute to enhancing employee productivity and welfare. Furthermore, initiatives to bolster employee skills and capacity have become a priority in supporting the Company's continuous growth. Sustaining healthy industrial relations serves as the foundation for achieving the Company's goals and establishes a solid groundwork for long-term growth.

Pension Program

Pension program has become an integral component of the Company's employee welfare strategies. This program is designed to offer security to employees as they approach retirement. Reflecting the Company's commitment to its employees throughout their careers, the program ensures that they can enjoy a peaceful and comfortable retirement. The facilities from

Fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan dalam program ini berupa logam mulia 24 karat sebesar 20gram mengikuti SK Pensiun Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pelatihan dan Pengembangan SDM

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas individu. Melalui program pelatihan yang efektif, pekerja dapat diberdayakan untuk menguasai keterampilan baru, terus mengikuti perkembangan industri, dan meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Proses ini tidak hanya memberikan manfaat bagi setiap individu, tetapi juga meningkatkan kualitas kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Pengembangan SDM juga melibatkan strategi jangka panjang untuk menciptakan pemimpin masa depan, memastikan adanya suksesi yang lancar, dan merancang rencana karir yang memberdayakan pekerja untuk mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM merupakan langkah efektif untuk membangun tim yang terampil, adaptif, dan berdaya saing.

Kebijakan Mengenai Program Pelatihan Bagi Pekerja

Perusahaan membagi program pendidikan dan pelatihan menjadi 2 (dua), yaitu *Self Learning dan Corporate Learning*. Tujuan dari masing-masing program adalah untuk memberikan pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan *skill* bagi SDM. Program *Self Learning* diselenggarakan secara *online* melalui aplikasi Portaverse. Kemudian, program *Corporate Learning* diselenggarakan secara hybrid baik regular maupun *workshop*.

Tujuan Pelatihan

Demi memberikan kualitas pelayanan terbaik serta menjaga kinerja operasional, Perusahaan senantiasa meningkatkan potensi ada pada setiap individu. Tanpa membeda-bedakan, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang adil kepada setiap insan. Program pengembangan dan pelatihan yang diadakan oleh Perusahaan dijalankan sesuai kebutuhan dinamika perkembangan bisnis dan juga bidang yang dikuasai oleh pekerja.

Peserta Pelatihan

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan program pelatihan sebanyak 39 jenis kegiatan. Semua program pelatihan yang telah dijalankan oleh Perusahaan diikuti oleh peserta dengan jumlah total sebanyak 199 orang.

Biaya Pelatihan

Biaya program-program pelatihan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 mencapai Rp844.741.699. Adapun, jenis pelatihan yang diadakan oleh Perusahaan mencakup bidang Sekretaris Perusahaan, QHSSE, Manajemen Risiko & Hukum, Pengawas Internal, Transformasi & Pengembangan Bisnis, Komersial, Armada, Operasi & DPA, SDM & Umum, Keuangan, Pengadaan/ *Procurement Fundamental/General*.

the Company for this program take the form of 20 grams of 24-carat gold, following the Pension Decree of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

HR Training and Development

Training and development of human resources (HR) stands as a pivotal element in enhancing individual skills, knowledge, and productivity. Through well-crafted training programs, employees can empower themselves to master new skills, stay updated of industry developments, and elevate the quality of their work. This process not only benefits each individual but also enhances the overall performance quality of the Company. HR development encompasses long-term strategies aimed at cultivating future leaders, ensuring seamless succession, and crafting career paths that enable employees to unleash their full potential. Therefore, investing in human resource training and development stands as an effective measure in cultivating a skilled, adaptable, and competitive team.

Training Programs Policy for Employees

The Company divides its education and training programs into 2 (two) categories: Self Learning and Corporate Learning. Each program aims to foster the capability, knowledge, and skill development of human resources. The Self Learning Program is conducted via online through Portaverse Applications. Meanwhile, the Corporate Learning program is conducted using hybrid method either regularly or at a certain workshop.

Training Objectives

To ensure of providing top-quality service and uphold operational performance, the Company consistently enhances the potential of each individual. Without discrimination, the Company is committed to offering equitable opportunities to all. Development and training programs prepared by the Company are tailored to the evolving needs of business dynamics and the expertise of employees.

Training Participants

Throughout 2023, the Company has organized 39 training programs. All training programs were attended by a total of 199 participants.

Training Costs

The costs of conducting training programs throughout 2023 reached Rp844.741.699. Meanwhile, the types of training that the Company has organized covers various areas such as Corporate Secretary, QHSSE, Risk & Legal Management, Internal Supervisory, Business Transformation & Development, Commercial, Fleet, Operations & DPA, HR & General, Finance, and Fundamental/General Procurement.

Tabel Biaya Pelatihan Pekerja Tahun 2022-2023 (dalam Rupiah)
Employee Training Costs 2022-2023 (in Rupiah)

No	Jenis Diklat Type of Training	2023	2022
Teknik Substansial Substantial Technique			
1.	Bidang Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	19.700.000	109.450.000
2.	Bidang QHSSE, Manajemen Risiko & Hukum QHSSE, Risk Management & Legal	42.565.000	103.617.350
3.	Bidang Pengawas Internal Internal Audit	11.950.000	-
4.	Bidang Transformasi & Pengembangan Bisnis Transformation & Business Development	14.750.000	5.350.000
5.	Bidang Komersial Commercial	17.700.000	-
6.	Bidang Armada Fleet Management	53.790.820	2.727.272
7.	Bidang Operasi & DPA Operation & DPA	284.323.280	623.510.061
8.	Bidang SDM & Umum HR & General Affair	29.577.002	348.653.000
9.	Bidang Keuangan Finance	9.600.000	34.400.000
10.	Bidang Pengadaan Procurement	2.950.000	39.120.000
11.	*Fundamental/General Training* *Fundamental/General Training*	-	-
Jumlah Total		844.741.699	1.266.827.683

Rencana Program Pelatihan Tahun 2024

Pelatihan yang akan dilakukan oleh pekerja di tahun 2024 akan dilakukan dengan metode *self learning* melalui aplikasi Portaverse. Metode *self learning* memberikan fleksibilitas kepada pekerja atas materi pembelajaran yang ingin diambil serta waktu pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, pelatihan pekerja dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan keinginan serta kebutuhan pekerja. Melalui metode pembelajaran yang fleksibel, Perusahaan dapat mendorong antusiasme pekerja dalam meningkatkan kemampuan dan wawasan mereka.

Training Program Plan for 2024

Training that will be conducted by employees in 2024 will be conducted using the self learning method through the Portaverse application. The self learning method provides flexibility to employees on the learning material they want to take and the time of learning. Therefore, employee training can be carried out at any time according to the wishes and needs of employees. Through flexible learning methods, the Company can encourage employee enthusiasm in improving their abilities and insights.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE



Sistem Teknologi Informasi (TI) memainkan peran krusial dalam mendukung operasional dan pengelolaan data Perusahaan. Di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang, implementasi TI menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Perusahaan terus berupaya untuk membangun infrastruktur TI yang terintegrasi guna membantu pemantauan performa bisnis dan memastikan efektivitas operasional.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kebijakan pengelolaan teknologi informasi menjadi landasan bagi keseluruhan operasional Perusahaan. Untuk mendukung efisiensi dan keamanan, Perusahaan telah mengadopsi kebijakan yang memprioritaskan pemeliharaan serta implementasi langkah-langkah pengelolaan sistem. Selain itu, kebijakan ini menegaskan pentingnya pelatihan pekerja terkait keamanan informasi, serta pengelolaan data secara bijaksana untuk menjaga keamanan data Perusahaan. Pemantauan dan evaluasi rutin juga dilakukan untuk

Information Technology (IT) plays a crucial role in supporting Company operations and data management. In this era of constantly evolving business dynamics, IT implementation has become a necessity to increase efficiency and productivity. The Company continues to build an integrated IT infrastructure to monitor business performance and ensure operational effectiveness.

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT AND DEVELOPMENT POLICY

Information technology management policies serve as the foundation for the Company's overall operations. To enhance efficiency and security, the Company has adopted a policy prioritizing the maintenance and implementation of system management. Additionally, this policy highlights the importance of employee training in information security and emphasizes prudent data management to protect Company data. Routine monitoring and evaluation ensure the effectiveness of this policy,

menjamin keefektifan kebijakan ini seiring dengan perubahan dinamika teknologi informasi. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan teknologi informasi ini tidak hanya menjadi panduan operasional, tetapi juga instrumen vital dalam menjaga integritas dan keberlanjutan Perusahaan.

ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai upaya dalam melaksanakan pengelolaan sistem teknologi informasi yang terukur dan tepat sasaran, Perusahaan merangkai *Roadmap* yang kemudian diterapkan sepanjang tahun 2023. Penerapan yang dimaksud antara lain:

1. *Operating Surveillence System* Cabang Panjang.
2. Implementasi Single SAP
3. Penerapan e-payment pada SIMOP JAI
4. Implementasi Phinnisi

ORGANISASI PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

aligning with the dynamic changes in information technology. Thus, this information technology management policy serves not only as an operational guide but also as a vital instrument in maintaining the integrity and sustainability of the Company.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

As part of the effort to implement a measurable and targeted information technology system management, the Company has developed a Roadmap throughout 2023. This implementation includes, among other things,

1. Operating Surveillence System for Panjang Branch
2. Implementation of Single SAP
3. E-payment application on SIMOP JAI
4. Implementation of Phinnisi

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT ORGANIZATION

No	Unit Kerja Work Unit	Jumlah Total		Kapasitas Capability	
		Organik Organic	Non Organik Non Organic	Support Apps	Support Hardware
1	VP Transformasi & Pengembangan Bisnis VP Transformation & Business Development	1	-	-	-
2	DVP Sistem Informasi DVP Information System	1	-	-	-
3	Pelaksana Junior Sistem Informasi Junior Staff Information System	-	1	0	1
Jumlah Total		2	1	0	1

KINERJA TI TAHUN 2023

Program Transformasi TI: Digital Port

IT PERFORMANCE IN 2023

IT Transformation Program: Digital Port

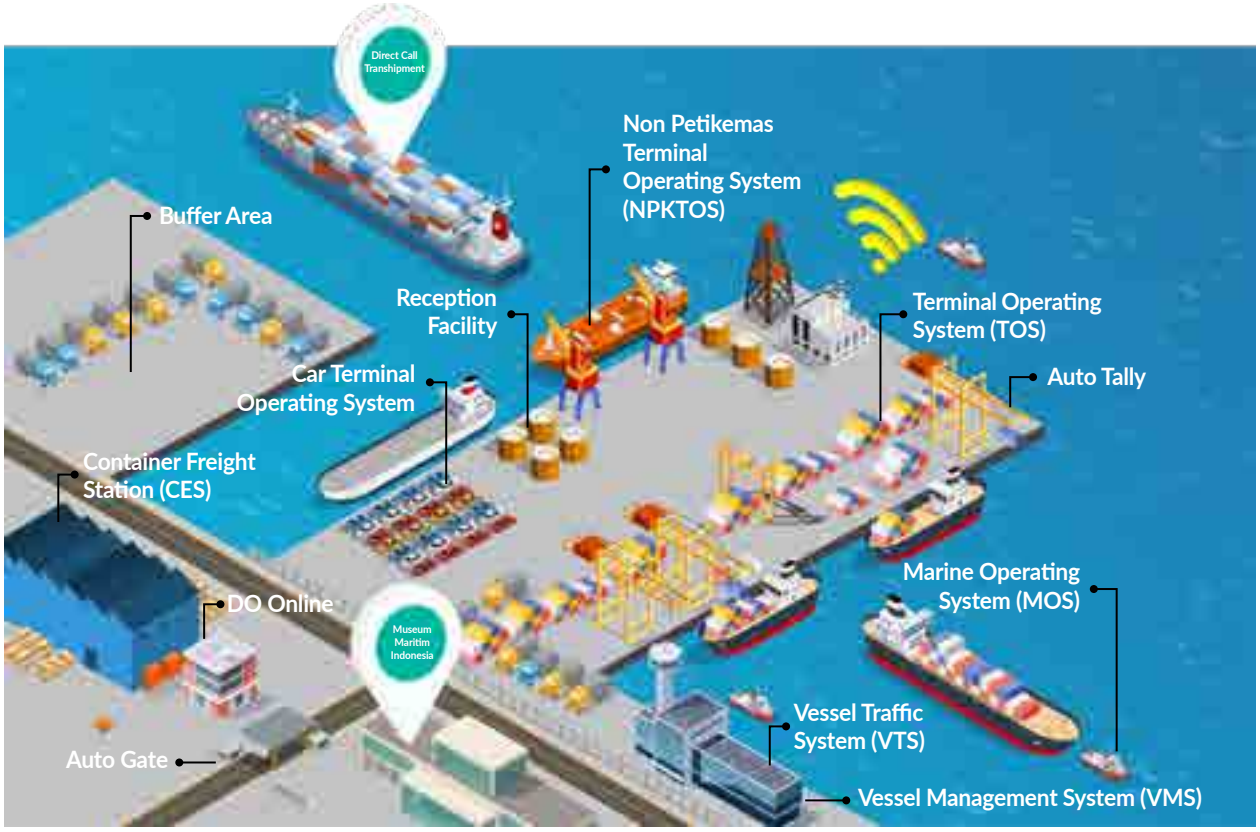

Program Transformasi IT: APLIKASI PHINNISI

Phinnisi (*Vessel Management System*) adalah aplikasi yang mengakomodir kebutuhan dari kegiatan pelayanan kapal. Adapun kegiatan pelayanan kapal tersebut dimulai dari melakukan pengajuan pelayaran kapal (terintegrasi dengan INAPORTNET), perencanaan terhadap *resource* dan *schedule*-nya, realisasi terhadap kegiatan pelayanan kapal, sampai dengan kebutuhan *billing* dan *reporting*.

Fitur Aplikasi

1. *Ordering*
   Melakukan Pengajuan PKK (integrasi dengan INAPORTNET), Pengajuan PPKB, RPK dan OP.
2. *Validating*
   Validasi terhadap pengajuan yang dilakukan yang mencakup validasi permintaan pelayanan dan uang pertanggungan.
3. *Planning*
   Melakukan perencanaan terhadap layanan, *automated resource optimizing* yang melakukan *balancing* terhadap *load resource*, dan juga *adjustment* terhadap *abnormalities* yang terjadi di lapangan.

IT Transformation Program: PHINNISI APPLICATION

Phinnisi (Vessel Management System) is an application designed to support the needs of ship service activities. These activities range from submitting ship service applications (integrated with INAPORTNET), planning resources and schedules, to executing ship service activities, and handling billing and reporting.

Application Features

1. Ordering
   Submitting PKK (integrated with INAPORTNET), Submitting PPKB, RPK, and OP.
2. Validating
   Validating applications, which includes validating service requests and insurance payments.
3. Planning
   Conducting service planning, automated resource optimization to balance load resources, and adjusting for any field abnormalities.

4. *Order Dispatching*
   Pencetakan SPK Pandu, Tunda, dan Tambat (integrasi dengan INAPORTNET).

5. *Executing Logging*
   Eksekusi dari kegiatan pelayanan kapal yang mencakup realisasi Pandu, Tunda, Tambat dan juga *acknowledgement* nakhoda kapal terhadap pelayanan.

6. *Billing*
   Melakukan perhitungan terhadap tarif, pembuatan pranota dan nota.

7. Manfaat Aplikasi
   a. Melakukan otomasi terhadap kegiatan pelayanan kapal dalam hal perencanaan dan s*cheduling;*
   b. Meningkatkan efisiensi terhadap kegiatan pelayanan kapal dalam hal efisiensi waktu dan perencanaan *resource*;
   c. Membantu dalam melakukan penanganan yang tepat dan akurat terhadap *abnormalities* yang terjadi di lapangan;
   d. Meng-*capture* dan mengevaluasi kinerja *resource* melalui *update* status secara *real time*;
   e. Memberikan laporan komprehensif yang membantu dalam proses pengambilan keputusan manajemen.

4. Order Dispatching
   Printing of Guide, Delay, and Mooring SPKs (integrated with INAPORTNET).

5. Executing Logging
   Execution of ship service activities, including the realization of Guide, Tug, Mooring services, and acknowledgment of service by the ship captain.

6. Billing
   Calculating tariffs and creating notes and memorandums.

7. Application Benefits
   a. Automates ship service activities in terms of planning and scheduling;
   b. Increases efficiency in ship service activities in terms of time and resource planning;
   c. Assists in appropriate and accurate handling of field abnormalities;
   d. Captures and evaluates resource performance through real-time status updates;
   e. Provides comprehensive reports that assist in the management decision-making process.

Flow Pelayanan Kapal
Ship Service Flow

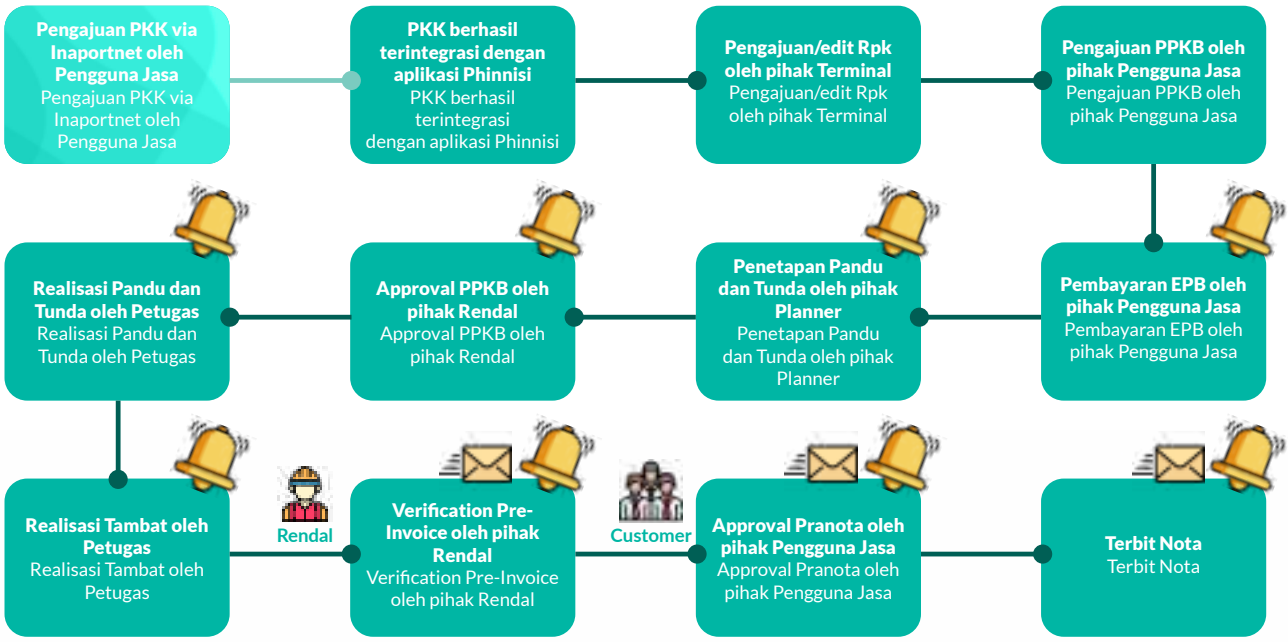

Implementasi Phinnisi
Phinnisi Implementation

No	Cabang Branch	*Implementation V1*		*Implementation Enhancement*	
		Phinnisi V1	*Date Implemented*	Phinnisi V2	*Date Implemented*
1	Palembang	-	-	✓	13 Januari 2023 January 13, 2023
2	Pontianak	-	-	✓	13 Januari 2023 January 13, 2023
3	Tanjung Wangi	-	-	✓	Batch I 3 April 2023 Batch I April 3, 2023
4	Tanjung Perak & Gresik	-	4 September 2022 September 4, 2022	✓	Batch I 3 April 2023 Batch I April 3, 2023
5	Bengkulu	✓	15 Juni 2022 June 15, 2022	✓	Batch II 16 Juni 2023 Batch II June 16, 2023
6	Cirebon	✓	-	✓	Batch II 16 Juni 2023 Batch II June 16, 2023

Linkup Implementasi
Implementation Coverage

Single ERP PELINDO

IT

BPO

Keuangan Keuangan | **SDM** | **Pengadaan** Pengadaan | **Investasi** Investasi

PELINDO

Implementation Scope & Data Ownership:

FI (Final Accounting)
- General Ledger (Parallel Currency, Parallel Ledger/ Accounting)
- Accounts Payable
- Accounts Receivable
- Fixed Asset Accounting
- Bank & Tax Accounting

Group Akuntansi, Layanan Keuangan & Perpajakan dan Pengelolaan Keuangan

CO (Controlling)
- Overhead Cost Controlling Cost Element, Cost Center, Internal Order
- Profitability Analysis
- Profit Center Accounting
- CO Reporting and Embedded Analytics

Group Akuntansi dan Anggaran & Pelaporan

MM (Materials Management)
- Consumption based Planning (Materials Planning)
- Purchasing
- Inventory Management
- External Services Management
- Logistics Invoice Verification

Group Pengadaan dan Perencanaan Investasi

Human Capital Management
- Personnel Administration
- Organization, Time & Travel Management Personnel Cost Planning
- Payroll (Indonesia specific Localization)
- ESS (Employee SelfService)

Group Strategi SDM, Layanan SDM dan Pengelolaan SDM

SAP Process Orchestrations – Middleware Surrounding

Integrasi Vessel System (SIMOP Nota Rekap & TUKS JAI), AKBI dan Front-end Apps lainnya pada Pelindo ERP SAP

Project System
- PS Logistics (WBS, Network, Activity)
- PS Accounting (Budget, Cost, Settlement)
- PS Reporting and Embedded Analytics

Group Manajemen Proyek dan Anggaran & Pelaporan, Fasilitas & Peralatan Pelabuhan, dan TIK

Funds Management
- FM Master Data (Fund Centers and Commitment Items)
- Budget Control System (Entry, Revision, Supplement, Transfer, Availability Check)

Group Anggaran & Pelaporan

Business Planning Consolidation
- Planning & Budgeting
- Financial Consolidation

Group Anggaran & Pelaporan dan Akuntansi

SAP Fiori (UI/UX)
- Mobile user interface untuk Transaksi, Mobile Approval, dan Analytics

Seluruh Group untuk layanan mobile approval dan analytics

OpenText untuk Digital Document Management

Penyimpanan data digital pada Layanan IT

Aplikasi Application	Keterangan Description
Banking System	Terdiri dari 2 (dua) fungsi utama, yaitu: 1. H2H Pembayaran Merupakan aplikasi *back end* untuk pembayaran dari Pelindo. Pembayaran tersebut dapat berupa pembayaran tagihan vendor maupun pembayaran uang saku dan reimburse kepada pegawai. 2. H2H Penerimaan Merupakan aplikasi *back end* untuk penerimaan Pelindo dari *customer*. H2H Penerimaan mengakomodir 2 (dua) metode pembayaran, yaitu kode bayar dan *autocollection*. Bank yang diakomodir saat ini meliputi Mandiri, BNI, BRI dan BSI. The system consists of 2 (two) main functions: 1. H2H Payment: This is a backend application for handling payments from Pelindo, which may include vendor bill payments or allowances and reimbursement payments to employees. 2. H2H Acceptance This is a backend application for managing incoming payments from customers to Pelindo. H2H Acceptance supports 2 (two) payment methods: payment code and autocollection. The banks currently accommodated include Mandiri, BNI, BRI, and BSI.
INCO	INCO atau Internal Coordination adalah web based application yang ditujukan bagi pegawai untuk melakukan: Penambahan Rekening Autocollection System (ACS), Monitoring Hold and Release ACS untuk Cetak Nota. Modul: • Manage Nota dan Pranota • Monitor Piutang • Manage Autocollection • Pembatalan Nota • Locking System INCO, or Internal Coordination, is a web-based application designed for employees to manage and monitor various tasks. It allows employees to add Autocollection System (ACS) accounts and monitor hold and release ACS for printing notes. Modules include: • Managing Invoice and Pre-Invoice • Monitoring Receivables • Managing Autocollection • Cancelling Invoice • Implementing a Locking System URL: https://inco.pelindo.co.id
Billing	Merupakan aplikasi billing yang telah dimiliki oleh masing-masing entitas, contoh: e-invoice, SIBI, dll. Aplikasi billing ini dapat berbeda di setiap entitas, atau beberapa entitas dapat menggunakan 1 (satu) aplikasi billing yang sama. Modul: • Penerbitan Nota • Penerbitan Receipt (Pelunasan) URL: https://eservice.pelindo.co.id/index.php/main_invoice (e-invoice)
Remote	Merupakan aplikasi easy billing untuk layanan rupa-rupa. Modul: • Property • Water & Electricity • Other services This is an easy billing application for various services. Modules include: • Property • Water & Electricity • Other services URL: remote.pelindo.co.id

PENGENDALIAN KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER

Perusahaan mengembangkan sistem ketahanan dan keamanan siber sesuai dengan prinsip utama keamanan informasi, yang meliputi kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan siber. Perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan ketahanan dan keamanan siber dalam rangka mengawal inovasi untuk menjamin keberlanjutan bisnis dari ancaman *cybercrime*. Upaya ini secara konsisten dilakukan seiring dengan arah perkembangan bisnis Perusahaan.

AUDIT TI

Perusahaan senantiasa melaksanakan proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap sistem, infrastruktur, kebijakan, dan prosedur yang terkait dengan teknologi informasi. Tujuan dari pelaksanaan audit TI adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi dan teknologi yang digunakan beroperasi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Berikut implementasi Perusahaan pada pelaksanaan audit TI:

1. Mencegah adanya risiko kebocoran data;
2. Menekan kerugian akibat kesalahan proses perhitungan;
3. Menekan kerugian akibat kehilangan data;
4. Meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan;
5. Tingginya investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
6. Mencegah adanya penyalahgunaan komputer.

PENGEMBANGAN SDM BIDANG TI

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi (TI) merupakan suatu aspek krusial dalam meningkatkan daya saing di era digital ini. Perusahaan terus berupaya menciptakan lingkungan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mencapai tujuan bisnis. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan pekerja di bidang TI menjadi strategi yang tak terhindarkan. Melalui program pelatihan yang terstruktur, setiap individu dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola infrastruktur TI. Dengan melibatkan pekerja dalam inisiatif pengembangan diri, Perusahaan tidak hanya memastikan keberlanjutan operasional yang lancar, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan berorientasi pada teknologi. Seiring berjalannya waktu, investasi dalam pengembangan SDM bidang TI akan membawa Perusahaan menuju garda terdepan di era teknologi yang terus berkembang pesat.

CYBER SECURITY RESILIENCE AND SECURITY CONTROL

The Company develops cyber resilience and security systems in accordance with the main principles of information security, which include confidentiality, integrity, and availability, as well as the provisions of laws and regulations governing cybersecurity. The Company is committed to continuing to develop cyber resilience and security to protect innovation and ensure business continuity from cybercrime threats. This effort is consistently carried out in line with the direction of the Company's business development.

IT AUDIT

The Company consistently conducts an evaluation and inspection process on systems, infrastructure, policies, and procedures related to information technology. The aim of conducting IT audits is to ensure that the information systems and technology that are being used can operate efficiently, effectively, and in accordance with applicable security standards and regulations. The following outlines the Company's IT audits implementation:

1. Preventing the risk of data leakage;
2. Reducing losses due to calculation errors;
3. Minimizing losses due to data loss;
4. Minimizing errors in decision making;
5. Optimizing investment in computer hardware and software;
6. Preventing computer misuse.

HR DEVELOPMENT IN IT

The development of human resources (HR) in the field of Information Technology (IT) is crucial for becoming more competitive in this digital era. The Company continuously strives to create an environment that is adaptive to technological developments to achieve business goals. Therefore, training and development of employees in the IT sector are inevitable strategies. Through structured training programs, individuals can enhance their skills in managing IT infrastructure. By involving employees in self-development initiatives, the Company not only ensures smooth operational continuity but also creates a dynamic and technology-oriented work environment. Over time, investment in HR development in the IT sector will bring the Company to the forefront in an era of rapidly evolving technology.



SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

PENGENDALIAN PERALATAN, PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

Perusahaan menerapkan langkah-langkah pemantauan dan pengukuran lingkungan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan regulasi yang berlaku di setiap area operasional. Instrumen pemantauan dan pengukuran yang relevan juga dipilih untuk menjamin bahwa prosedur tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

Perusahaan menerapkan pemantauan terhadap sistem TI guna menjaga keselarasan setiap aspek-aspek penting dari kegiatan operasional. Selain itu, Perusahaan juga secara konsisten melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam mengukur kinerja. Prosedur yang dimaksud mencakup dokumentasi data untuk menilai kemajuan kinerja, efektivitas kontrol operasional yang signifikan, kepatuhan terhadap tujuan QHSSE, persyaratan sistem manajemen QHSSE, serta kinerja QHSSE yang proaktif dan responsif. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sistem TI dikelola secara tepat.

Metode yang cocok telah ditetapkan, termasuk teknik statistik, agar dapat diterapkan secara luas. Perusahaan mengubah implementasi K3 sebagai bentuk evaluasi aspek keselamatan kerja dengan membentuk *Integrated Management System* ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018, dan menerapkan Standar Internasional Pengoperasian Kapal ISM *Code*.

Standar yang telah ditetapkan tersebut diwujudkan oleh Perusahaan melalui sosialisai informasi yang meliputi:

1. Mencanangkan transformasi Budaya, yang salah satu sasarannya adalah transformasi budaya K3 (*safety first*).
2. Melakukan induksi/pelatihan K3 bagi semua pekerja baru.
3. Memasukkan unsur K3 pada setiap *project* yang dilakukan di Cabang/Anak Perusahaan, minimal implementasi *house- keeping* dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada area wajib APD
4. Melakukan *Safety Patrol* di lingkungan kerja yang mempunyai risiko tinggi.
5. Melakukan Inspeksi dan Internal Audit untuk memastikan Sistem Manajemen Terpadu Keselamatan dapat berjalan dengan baik.

METODE PROSES PDCA DALAM SISTEM MANAJEMEN K3

Penerapan sistem manajemen K3 Perusahaan dilakukan dengan mengadopsi metode PDCA. Pendekatan tersebut merupakan dasar strategis dalam menanggapi masalah yang terjadi dalam implementasi K3. Metode PDCA sendiri terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: *Plan, Do, Check, Act*. Secara rinci, penerapan metode PDCA oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

EQUIPMENT CONTROL, MONITORING AND MEASUREMENT

The Company implements environmental monitoring and measurement measures, as well as Occupational Safety and Health (K3), in accordance with applicable regulations in each operational area. Relevant monitoring and measurement instruments are carefully selected to ensure that procedures are carried out in accordance with current provisions.

MONITORING AND MEASUREMENT

The Company monitors the IT system to maintain harmony in every important aspect of operational activities. Additionally, the Company consistently implements procedures for measuring performance. These procedures include data documentation to assess performance progress, the effectiveness of significant operational controls, compliance with QHSSE objectives, QHSSE management system requirements, as well as proactive and responsive QHSSE performance. These steps are taken to ensure IT systems are managed appropriately.

Suitable methods have been established, including statistical techniques, for widespread applicability. The Company has modified the implementation of OHS as a means of evaluating work safety aspects by establishing an Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018, and implementing the International Standard for Ship Operation ISM Code.

The standards set by the Company are realized through information dissemination, which includes:

1. Launching a cultural transformation, with one of the targets being the OHS (safety first) cultural transformation.
2. Conducting OHS induction/training for all new employees.
3. Incorporating OHS elements in every project carried out in Branches/Subsidiaries, at least implementing housekeeping and using Personal Protective Equipment (PPE) in mandatory PPE areas.
4. 4Conducting Safety Patrols in work environments with high risks.
5. 5Carrying out inspections and internal audits to ensure that the Integrated Safety Management System is functioning well.

PDCA PROCESS METHOD IN THE OHS MANAGEMENT SYSTEM

The Company's OHS management system adopts the PDCA method, providing a strategic basis for addressing problems encountered when implementing OHS. The PDCA method comprises of 4 (four) stages: Plan, Do, Check, Act. Here's a detailed explanation of how the Company applies the PDCA method:

1. *Plan*/Perencanaan
   Perusahaan melakukan kajian terhadap tujuan implementasi K3 serta proses yang dibutuhkan untuk merespon masalah yang terjadi. Tahapan ini dilakukan untuk menerapkan sistem manajemen yang terukur dan tepat sasaran. Selain itu, Perusahaan juga ingin meraih hasil yang diharapkan melalui perencanaan ini.
2. *Do*/Pelaksanaan
   Setelah mengkaji problematika yang ada, Perusahaan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Selama proses eksekusi, Perusahaan senantiasa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sebagai acuan kinerja sistem manajemen. Hal tersebut akan memberikan gambaran untuk tahapan selanjutnya kepada Perusahaan terhadap proses implementasi yang dilakukan.
3. *Check*/Evaluasi
   Pada tahap ini, Perusahaan melakukan evaluasi atas kinerja implementasi sistem manajemen yang sudah diterapkan. Evaluasi dilakukan guna menilai apakah hasil eksekusi sudah sesuai sasaran dan juga permasalahan yang terjadi ketika proses implementasi. Selanjutnya, Perusahaan akan mengkaji solusi untuk diterapkan pada tahap selanjutkan
4. *Act*/Tindak Lanjut
   Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Perusahaan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada. Tahap ini dilakukan untuk menjaga konsistensi implementasi metode terhadap sistem manajemen K3. Setelah melakukan tindak lanjut, Perusahaan dapat meningkatkan kinerja yang berhasil serta memperbaiki permasalahan untuk proses selanjutnya.

1. Plan/Planning
   The Company conducts a study to define the objectives of OHS implementation and the necessary processes to address arising problems. This stage aims to establish a measurable and targeted management system, ensuring the achievement of expected results.

2. Do/Implementation
   Following problem analysis, the Company proceeds to implement established procedures. During this phase, the Company diligently collects data for reference in evaluating the management system's performance. This data provides insights for subsequent stages of implementation.

3. Check/Evaluate
   At this stage, the Company evaluates the performance of the implemented management system. Evaluation serves to assess whether the execution aligns with set targets and identifies any problems encountered during the implementation process. Solutions are reviewed for implementation in subsequent stages.
4. Act/Follow Up
   Based on the evaluation results, the Company takes action to address identified problems. This phase ensures consistent implementation of methods for the K3 management system. Through follow-up actions, the Company enhances successful performance and addresses issues for subsequent processes.

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN K3

OHS MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Tanggal Perolehan Issuance Date	**Uraian** Description	**Pemberi Sertifikasi** Issuer	**Masa Berlaku** Validity Period
Nasional National			
14 April 2022 April 14, 2022	ISO 9001:2015	LRQA	13 April 2025 April 13, 2025
30 Desember 2023 December 30, 2023	ISO 37001:2016	LRQA	29 Desember 2026 December 29, 2026
15 Mei 2022 May 15, 2022	ISO 45001:2018	LRQA	14 Mei 2025 May 14, 2025
17 September 2020 September 17, 2020	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesejahteraan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Welfare and Health Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Manpower Ministry of the Republic of Indonesia	16 September 2023 September 16, 2023
31 Mei 2022 May 31, 2022	ISO 14001:2015	LRQA	2 Mei 2025 May 2, 2025



PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

PT Jasa Armada Indonesia Tbk memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di setiap aspek kegiatan usaha secara konsisten dan berkesinambungan dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik dalam penerapan GCG yang berlaku secara nasional maupun global.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk has a strong commitment in implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every aspect of business activities consistently and continuously by referring to the best practices in the implementation of GCG that apply nationally and globally.





KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE POLICY



KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN GCG

Penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pendekatan yang mendorong Perusahaan untuk mengelola aktivitasnya dengan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan menciptakan lingkungan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai wujud komitmen yang teguh terhadap penerapan GCG, IPCM menjadikan GCG sebagai landasan utama dalam mengarahkan langkah-langkah operasional dan pengelolaan bisnis. Perusahaan meyakini bahwa penerapan GCG bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban peraturan melainkan sebagai fondasi yang mendasari keputusan strategis. Dalam hal ini, IPCM telah menetapkan struktur manajemen yang transparan, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan etika bisnis, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.

COMPANY COMMITMENT ON GCG IMPLEMENTATION

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) serves as a foundational approach for the Company, encouraging the management of activities based on GCG principles to foster a sound and sustainable corporate environment. IPCM firmly commits to integrating GCG principles as the primary basis for directing operational steps and managing business affairs. The Company perceives GCG implementation not merely as a fulfillment of regulatory obligations, but as a fundamental framework guiding strategic decisions. In this regard, IPCM has established a transparent management structure, reinforced internal and external oversight, and enforced policies prioritizing business ethics, integrity, and compliance with relevant laws and regulations. These measures aim to uphold the highest standards of governance and ensure accountability across all levels of the organization.

IPCM telah memiliki perangkat pedoman dan kebijakan sebagai panduan bagi seluruh Insan Perusahaan dalam mendorong kontribusi positif setiap individu dalam menjalankan operasional Perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen IPCM dalam menjaga kualitas tata kelola di internal Perusahaan agar terbentuk sistem pengelolaan yang baik dan berkelanjutan guna menciptakan seluruh aspek tata kelola berjalan maksimal untuk mendukung jalannya kegiatan usaha Perusahaan.

IPCM has developed a comprehensive set of guidelines and policies to guide all Company Personnel, encouraging each individual to contribute positively to Company operations. This commitment highlights IPCM's dedication to maintaining governance quality within the Company, fostering a robust and sustainable management system that optimally supports the Company's business activities.

PRINSIP UMUM GCG

Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

GENERAL PRINCIPLES OF GCG

The Company implements GCG principles by adhering to 5 (five) basic principles, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. These principles are outlined in the General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Governance Policy Committee (KNKG).

Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Openness in the decision-making process and disclosure of material and relevant information regarding the Company.
Akuntabilitas Accountability	Kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Compliance of Company management with applicable laws and regulations, as well as sound corporate principles.
Responsibilitas Responsibility	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Openness in the decision-making process and disclosure of material and relevant information regarding the Company.
Independensi Independence	Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The Company is managed professionally, without conflicts of interest, and free from influence or pressure from any party not in accordance with applicable laws, regulations, and sound corporate principles.
Kewajaran dan Kesetaraan Fairness	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Justice and equality in fulfilling the rights of Stakeholders based on agreements and statutory regulations.
Terpercaya Trustworthy	Mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan. Gaining full trust and support from all Stakeholders.

IPCM berupaya meningkatkan penerapan GCG guna mendukung pertumbuhan Perusahaan. Salah satu langkah yang diambil yakni melaksanakan implementasi perkembangan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia (PUGKI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KNKG) yang dirilis pada tahun 2021. PUGKI tahun 2021 merupakan pengembangan yang disesuaikan dengan nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*) terkini, yang sebelumnya telah diterapkan pada PUGKI 2019.

IPCM strives to enhance the implementation of GCG to support the Company's growth. The Company has implemented the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) developed by the National Committee for Corporate Governance Policy (KNKG), issued in 2021. The 2021 PUGKI represents a refinement aligned with the fundamental values of TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness), previously incorporated in PUGKI 2019.

Secara umum, PUGKI 2021 terdiri dari 4 (empat) pilar governansi korporat serta penerapannya di lingkungan IPCM, dengan uraian sebagai berikut:

In essence, PUGKI 2021 comprises of 4 (four) pillars of corporate governance and their application within the IPCM framework, outlined as follows:

Perilaku Beretika
Ethical Conduct

Definisi:
Dalam melaksanakan kegiatannya, Korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Penerapan di lingkup JAI:
- JAI memiliki Kode Etik sebagai panduan dalam mengarahkan perilaku dan tindakan di dalam Perusahaan, termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.
- JAI menerapkan nilai-nilai utama "AKHLAK" sebagai bagian integral dari budaya perusahaan.
- JAI memiliki kebijakan anti korupsi dan gratifikasi untuk mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap, dan/atau gratifikasi.

Definition:
In its operations, the Corporation consistently prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and upholds moral values and trust consistently. The Corporation also emphasizes shareholder and stakeholder interests, adhering to principles of fairness and equality, independently managed to ensure that no corporate organ dominates over others and remains free from external intervention.

Application at JAI:
- JAI has a Code of Conduct serving as a guide for behavior and actions within the Company, including interactions with stakeholders.
- JAI integrates the main values of "AKHLAK" into its company culture.
- JAI has an anti-corruption and gratification policy aimed at addressing corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification.

Akuntabilitas
Accountability

Definisi:
Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Penerapan di lingkup JAI:
- Dalam pelaksanan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki pembagian tugas yang telah disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, serta memiliki Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
- JAI secara berkala melaporkan kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham.
- Pelaksanaan audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal.
- JAI secara konsisten melakukan evaluasi atas penerapan GCG, manajemen risiko, tata kelola IT.
- JAI senantiasa melakukan pelaksanaan RUPS serta penyampaian laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan.

Definition:
Corporation must be transparent and fair in being accountable for their performance. Therefore, they need to be managed correctly, measurably, and in alignment with corporate interests, while also considering the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary requirement for achieving sustainable performance.

Application at JAI:
- In performing their duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Directors have allocated segregation of duties in accordance with the Articles of Association and relevant regulations, and adhering to a Work Guide for the Board of Commissioners.
- JAI routinely presents the Company's performance to Shareholders.
- The audit of the Company's financial statements is conducted by an external auditor.
- JAI consistently evaluates the implementation of GCG, risk management, and IT governance.
- JAI consistently holds GMS and submits annual report as a form of accountability for company management.

Transparansi
Transaparency

Definisi:
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan di lingkup JAI:
- Perusahaan secara rutin mengirimkan laporan keuangan dan informasi terkait kepada OJK dan BEI untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi.
- Informasi mengenai JAI tersedia di *website* perusahaan yang dapat diakses oleh pihak eksternal.
- JAI menggunakan media sosial untuk informasi dan transparansi kegiatan perusahaan.
- Perusahaan menyediakan media pelaporan pelanggaran yang dapat diakses melalui *email* maupun *platform* yang telah disediakan.

Definition:
To maintain objectivity in business operations, corporation ensures the provision of material and relevant information in a manner that is easily accessible and comprehensible to stakeholders. Corporation takes the initiative to disclose not only the issues required by statutory regulations but also matters crucial for decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.

Application at JAI:
- The Company routinely submits financial reports and related information to the OJK and BEI to fulfill its information disclosure obligations.
- Information about JAI is available on the company website, accessible to external parties.
- JAI utilizes social media for disseminating information and ensuring transparency of company activities.

Keberlanjutan
xxx

Definisi:
Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Penerapan di lingkup JAI:
- JAI melaksanakan program CSR untuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya.
- JAI menjalankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola atau *Environmental, Social and Governance* (ESG).

Definition:
Corporation complies with statutory regulations and is committed to fulfilling its responsibilities towards society and the environment to contribute to sustainable development by collaborating with all relevant stakeholders to enhance their well-being in a manner aligned with both business interests and the sustainable development agenda.

Application at JAI:
- JAI implements a CSR program to fulfill its social responsibility towards the surrounding community.
- JAI adheres to environmental, social, and governance (ESG) principles

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

Penerapan GCG pada IPCM berlandaskan pada:
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
   a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP 14/2008);
   c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 11/2008);
   d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
   e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah
   Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (PP BUMN 45/2005);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/ 2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
   b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ SEOJK.04/2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
   e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/ POJK.04/ 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
4. Peraturan/Keputusan Menteri
   a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

LEGAL BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG in IPCM is based on:
1. Laws of the Republic of Indonesia:
   a. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
   b. Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (UU KIP 14/2008);
   c. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE 11/2008);
   d. Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism;
   e. Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.
2. Government Regulations
   Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOE (PP BUMN 45/2005).
3. Financial Services Authority Regulations
   a. Financial Services Authority Regulation Number 21/ POJK.04/ 2014 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;
   b. Financial Services Authority Circular Number 32/ SEOJK.04/2014 concerning Guidelines for Public Company Governance;
   c. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/ 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
   d. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/ 2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies;
   e. Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/ 2020 concerning Affiliate Transactions and Conflicts of Interest.
4. Ministerial Regulations/Decree
   a. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;

b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
c. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada Badan Usaha Milik Negara;
d. Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

5. Anggaran Dasar PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
6. Pedoman Komisaris Independen, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004 (Pedoman Komisaris Independen KNKG 2004);
7. Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang Efektif, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Tahun 2004 (Pedoman Komite Audit KNKG 2004);
8. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, dan terakhir dimutakhirkan pada tahun 2021, sebagai pemutakhiran dari Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2006 (Pedoman GCG KNKG 2006).

GOVERNANCE FRAMEWORK

Sejalan dengan komitmen untuk menerapkan prinsip GCG, IPCM telah menetapkan kerangka kerja tata kelola (*governance house*) yang meliputi pondasi awal, hingga mencapai tujuan akhir Perusahaan, sebagai berikut:

1. Prinsip Tata Kelola (*Governance Principle*) IPCM yakni prinsip-prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan tata kelola IPCM yaitu TARIFT.
2. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) IPCM yakni desain mengenai fungsi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta fungsi pengawasan terhadap Perusahaan.
3. Proses Tata Kelola (*Governance Process*) IPCM yakni serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh Direksi dan pekerja untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola IPCM telah dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan.
4. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) IPCM yakni perwujudan dari penerapan dan penegakan Tata Kelola IPCM dalam bentuk pencapaian kredibilitas Perusahaan.

b. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
c. Copy of Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-306/MBU/11/2023 concerning Technical Instructions for Preparing Key Performance Indicators for State-Owned Enterprises;
d. Copy of Decree of the Deputy for Finance and Risk Management, Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning Technical Instructions for Risk Maturity Index Assessment in State-Owned Enterprises.

5. Articles of Association of PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
6. Independent Commissioner Guidelines, issued by the National Committee for Governance Policy, 2004 (2004 KNKG Independent Commissioner Guidelines);
7. Guidelines for Establishing an Effective Audit Committee, issued by the National Committee for Governance Policy, 2004 (2004 KNKG Audit Committee Guidelines);
8. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI), published by the National Committee for Governance Policy, last updated in 2021, as an update to the General Guidelines for Indonesian Good Corporate Governance, issued by the National Committee for Governance Policy, 2006 (KNKG GCG Guidelines 2006).

GOVERNANCE FRAMEWORK

In line with its commitment to implementing GCG principles, IPCM has established a governance framework comprising the foundational elements to achieve the Company's ultimate goals, as follows:

1. IPCM Governance Principles as the underlying principles guiding the implementation and enforcement of IPCM governance, encapsulated in TARIFT.
2. IPCM Governance Structure, encompasses the design of the functions, duties, authority, and supervisory roles within the Company.
3. IPCM Governance Process that includes a set of standards and procedures utilized by the Board of Directors and employees to ensure that the implementation and enforcement of IPCM Governance are performed in a planned, consistent, and sustainable manner.
4. IPCM Governance Outcomes that represent the tangible results of implementing and enforcing IPCM Governance, culminating in the achievement of Company credibility.



Governance House

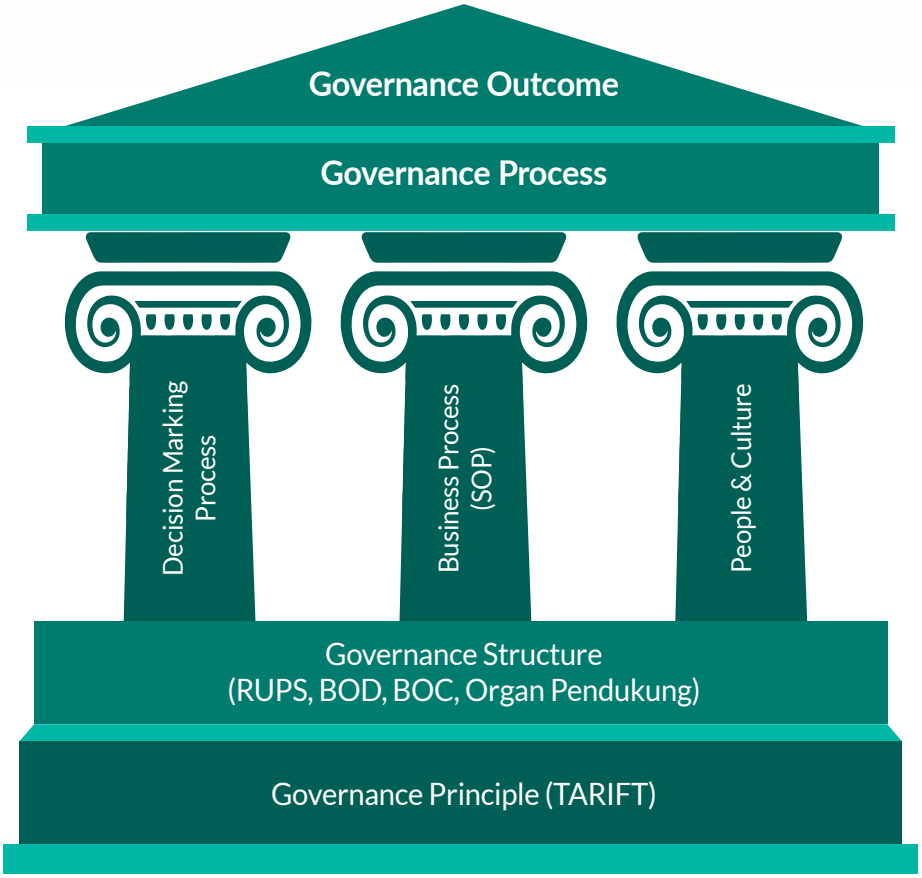

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUSAHAAN

DEVELOPMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE WITHIN THE COMPANY

PENETAPAN STANDAR KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUSAHAAN

Implementasi prinsip-prinsip GCG di lingkungan IPCM mengikuti standar terbaik yang berlaku, baik yang berlaku secara nasional maupun global. Sebagai bagian dari entitas perusahaan milik Negara atau BUMN, IPCM mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

IPCM juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), yaitu prinsip-prinsip *corporate governance* untuk Stated Owned Company yang dikembangkan oleh Asean Capital Market Forum (ACMF) serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

SOFT-STRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan telah merumuskan pedoman atau aturan tertulis untuk mengatur penerapan GCG di IPCM, yang disusun dengan didasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Perundangan dan *best practices* penerapan *Good Corporate Governance*. Pedoman ini terdiri dari berbagai kebijakan dan prosedur operasional yang berfungsi sebagai panduan bagi manajemen hingga unit kerja Perusahaan yang dirancang untuk menjamin terjaganya mekanisme *checks and balances* dalam aktivitas bisnis sehari-hari, sesuai dengan standar terbaik penerapan GCG. *Soft structure* GCG yang dimiliki IPCM, yaitu:

1. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*);
2. Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Pedoman Perilaku Perseroan (Kode Etik Perusahaan);
4. Komite *Audit Charter;*
5. Piagam Internal Audit;
6. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
7. Kebijakan Pengendalian Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Hiburan;
8. Kebijakan Penerapan *Whistleblowing System;*
9. Kebijakan Manajemen Risiko;
10. Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM);
11. Kebijakan Standar Pelayanan Informasi/Data dan Dokumentasi Kepada Pengguna Informasi;

DETERMINATION OF QUALITY STANDARDS FOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE WITHIN THE COMPANY

The implementation of GCG principles within IPCM adheres to the best applicable standards, both nationally and globally. As a state-owned company or SOE, IPCM follows the provisions outlined in the State Minister for SOE Regulation No. Per-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE, as well as State Minister for SOE Regulation No. Per-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, concerning Amendments to Regulations on State Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. Per-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE.

Additionally, IPCM adheres to Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines, and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), which outlines corporate governance principles for State-Owned Companies developed by the Asean Capital Market Forum (ACMF). IPCM also aligns with the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) published by the National Committee for Governance Policy (KNKG).

SOFT-STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company has developed written guidelines or regulations to govern the implementation of GCG within IPCM, which prepared based on the Company's Articles of Association, Legislative Regulations, and best practices for implementing Good Corporate Governance. The guideline encompasses various operational policies and procedures designed to serve as a reference for management and Company units, ensuring the maintenance of checks and balances mechanisms in daily business activities, in line with the best standards for GCG implementation. IPCM's GCG soft structure includes:

1. Corporate Governance Policy (GCG Code);
2. Work Procedures for the Board of Commissioners and Directors;
3. Company Code of Conduct (Company Code of Ethics);
4. Audit Committee Charter;
5. Internal Audit Charter;
6. Internal Control System Policy;
7. Policy for Receiving and Providing Gifts/Entertainment;
8. Whistleblowing System Implementation;
9. Risk Management Policy;
10. Human Resources (HR) Policy;
11. Standard Policy for Information/Data and Documentation Services to Information Users;

12. Pola Pembinaan Anak Perusahaan;
13. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
14. Dan berbagai kebijakan lainnya.

SOSIALISASI GCG

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai implementasi GCG di lingkungan IPCM, Perusahaan dengan konsisten menyelenggarakan sosialisasi secara berkala. Sosialisasi ini dilakukan melalui forum formal dan media informasi lainnya, mencakup rapat-rapat forum dan kegiatan *gathering*. Sosialisasi GCG tidak hanya terbatas pada kegiatan langsung, tetapi juga melalui penggunaan media informasi seperti portal internal dan *website* Perusahaan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu di lingkungan Perusahaan dapat memahami dan mendukung sepenuhnya praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Assessment GCG Berdasarkan Arahan Pemegang Saham

Setiap tahun, Perusahaan melaksanakan penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan oleh tim internal atau pihak eksternal. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana praktik-praktik terbaik penerapan GCG diterapkan di lingkungan Perusahaan. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan dapat ditingkatkan tingkat akuntabilitas terhadap penerapan GCG yang telah dilaksanakan.

Sebagai bagian dari kelompok usaha perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), IPCM senantiasa melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG melalui penilaian (*assessment*) dan/atau evaluasi (*self assessment*) dengan parameter yang berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, sebelum diterbitkannya Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, tertanggal 16 Agustus 2023.

Pada tahun 2023, IPCM melakukan evaluasi terhadap implementasi GCG Perusahaan dengan melibatkan PT Pratama Indomitra Konsultan sebagai pihak penilai. Proses evaluasi ini dilaksanakan mulai tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 5 Mei 2023. Dalam hal ini, IPCM merujuk pada kriteria dan metodologi yang dijelaskan dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian

12. Development Pattern for the Company's Subsidiaries;
13. Anti-Bribery Management System (SMAP);
14. Various other policies.

GCG SOCIALIZATION

In an effort to enhance understanding of GCG implementation within the IPCM environment, the Company consistently organizes regular outreach (socialization) initiatives. This socialization is conducted through formal forums and various information channels, including meetings and gathering activities. GCG awareness campaigns are not confined to direct engagements but also on information channels such as internal portals and the Company's website. These measures are aimed at ensuring that every individual within the Company understood and wholeheartedly supports good corporate governance practices.

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

GCG Assessment Based on Shareholders Instruction

Every year, the Company conducts a Good Corporate Governance (GCG) assessment, which is carried out by an internal team or an external party. The purpose of this assessment is to evaluate the extent to which GCG best practices are implemented within the Company. Through this assessment, the aim is to increase the level of accountability for GCG implementation that has been conducted.

As part of the State-Owned Enterprises (SOE) business group, IPCM consistently measures the implementation of GCG through assessment and/or self-assessment, based on parameters outlined in the Copy of Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE, prior is the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023, concerning the Revocation of Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, dated August 16, 2023.

In 2023, IPCM conducted an evaluation of the Company's GCG implementation by engaging PT Pratama Indomitra Consultants as the assessor. This evaluation process was carried out from February 6, 2023 to May 5 2023. IPCM refer to the criteria and methodology outlined in the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6,

BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tertanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Evaluasi atau penilaian ini dilaksanakan dengan mengacu pada kriteria-kriteria yang dijelaskan berikut ini.

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
3. Dewan Komisaris
4. Direksi
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
6. Aspek Lainnya

Berikut adalah rincian hasil evaluasi atau *assessment* penerapan GCG di lingkup IPCM untuk tahun buku 2022.

2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOE). This evaluation or assessment was conducted based on the criteria explained below.

1. Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance
2. Shareholders and GMS/Capital Owners
3. Board of Commissioners
4. Board of Directors
5. Information Disclosure and Transparency
6. Other Aspects

The following are details of the results of the evaluation or assessment of GCG implementation within the scope of IPCM for the financial year 2022.

Hasil *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2022 yang dilakukan di Tahun 2023
Results of the 2022 GCG Implementation Assessment which was carried out in 2023

Aspek Pengujian xxx	Bobot xxx	Penerapan GCG Tahun Buku 2022 xxx		
		Skor xxx	Capaian (%) xxx	Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG xxx
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	7,00	100,00%	"Sangat Baik" "Excellent"
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	9,00	100,00%	"Sangat Baik" "Excellent"
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	34,33	98,09%	"Sangat Baik" "Excellent"
Direksi Board of Directors	35,00	34,66	99,04%	"Sangat Baik" "Excellent"
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,59	95,43%	"Sangat Baik" "Excellent"
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	5,00	100,00%	"Sangat Baik" "Excellent"
Skor Keseluruhan Total Score	**100,00**		**98,58**	
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Classification Quality			"Sangat Baik" "Very Good"	

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Description: 0-50 : Bad | 50-60: Not Good | 60-75 : Fair | 75-85 : Good | 85-100 : Excellent

Setelah melakukan *assessment* terhadap penerapan GCG, ditemukan sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi sebagai *Area of Improvement* (AoI). Rekomendasi ini perlu ditindaklanjuti sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG di tahun berikutnya. Berikut adalah rekomendasi yang dihasilkan dari penilaian GCG pada tahun 2022 beserta tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan pada tahun 2023, yang dapat dilihat pada lampiran di bawah ini.

After assessing the implementation of GCG, 7 (seven) areas for improvement (AoI) were identified. These recommendations need to be addressed to enhance the quality of GCG implementation in the upcoming year. The following recommendations stem from the GCG assessment conducted in 2022, along with the follow-up actions undertaken by the Company in 2023, as detailed in the attachment below.

No	Rekomendasi Assessment GCG Tahun Buku 2022 GCG Assessment Recommendation for the Financial Year 2022	Status Tindak Lanjut di Tahun 2023 Follow-Up Status in 2023	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance			
	Tidak ada rekomendasi No recommendation		
II. Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS/Capital Owners			
	Tidak ada rekomendasi No recommendation		
III. Dewan Komisaris Board of Commissioners			
1	Komisaris Utama agar menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III, serta seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris dan Direksi. The President Commissioner to sign the Quarterly Management Report I to III, and all members of the Board of Commissioners to sign the Annual Management Report, after being evaluated/discussed by the Board of Commissioners and the Board of Directors.	v	Komisaris Utama telah menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III 2023, serta seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen Tahunan 2023. The President Commissioner has signed the Quarterly Management Report I to III Quarter 2023, and all members of the Board of Commissioners have signed the Annual Management Report 2023.
2	Dewan Komisaris agar melaporkan hasil evaluasi/pembahasan kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan. The Board of Commissioners should report the results of the evaluation/discussion of the Board of Directors' compliance in carrying out the management of the company against the RKAP and/or RJPP to the GMS in the report on supervisory duties carried out by the Board of Commissioners semesterly and annually.	v	Tertuang dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Contained in the Board of Commissioners Supervisory Task Report
3	Dewan Komisaris agar melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain untuk dicatat dalam Daftar Khusus. The Board of Commissioners should report to the company (Corporate Secretary) regarding its and/or its family's share ownership in the company and other companies to be recorded in the Special Register.	v	Tahun 2023, Dewan Komisaris sudah melaporkan Daftar Khusus. By 2023, the BOC will have reported on the Special List.
4	Komite Audit agar melaporkan laporan triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. The Audit Committee should report quarterly and annually to the Board of Commissioners, at least containing a comparison of the realization of activities with the annual work program as well as the substance of the results of activities and recommendations.	v	Telah dilaksanak setiap 3 (tiga) bulan dalam rapat Dewan Komisaris. Tertuang dalam notulen rapat Dewan Komisaris Telah dilaksanak setiap 3 (tiga) bulan dalam rapat Dewan Komisaris. Tertuang dalam notulen rapat Dewan Komisaris
IV. Direksi Board of Directors			
1	Direksi agar menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris secara tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan. Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan Komisaris sebelum 30 September tahun berjalan. The Board of Directors shall submit the draft RJPP to the GMS and/or Board of Commissioners in a timely manner or according to the specified time schedule. Submission at the latest to the Shareholders on October 31 before the RJPP period of the current year. If authorized by the GMS, then submission to the Board of Commissioners before September 30 of the current year.	n/a	Beberapa rekomendasi belum diproses dikarenakan status PT JAI Tbk sebagai perusahaan terbuka yang regulasinya tidak lazim diterapkan seperti peraturan BUMN. Some of the recommendations have not been processed due to PT JAI Tbk's status as a public company whose regulations are not commonly applied such as BUMN regulations.
2	Ketepatan waktu pelaksanaan RUPS: • RUPS pengesahan/persetujuan RJPP agar dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan; Timeliness of the GMS: • The GMS for ratification/approval of the RJPP shall be held no later than 60 (sixty) days after receipt of the complete RJPP Draft or before the next RJPP period runs;	x/v	Beberapa rekomendasi belum diproses dikarenakan status PT JAI Tbk sebagai perusahaan terbuka yang regulasinya tidak lazim diterapkan seperti peraturan BUMN. Some of the recommendations have not been processed due to PT JAI Tbk's status as a public company whose regulations are not commonly applied such as BUMN regulations.

No	Rekomendasi Assessment GCG Tahun Buku 2022 GCG Assessment Recommendation for the Financial Year 2022	Status Tindak Lanjut di Tahun 2023 Follow-Up Status in 2023	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency			
1	Perusahaan agar berupaya meraih kemenangan dalam Annual Report Award (ARA). The company should strive to win the Annual Report Award (ARA).	v	PT JAI Tbk sudah mengikuti ARA tahun 2023. Terdapat sertifikat kepesertaan ARA. PT JAI Tbk has joined ARA in 2023. There is a certificate of ARA participation.
Aspek Lainnya Other Aspects			
Tidak ada rekomendasi No recommendation			

v: sudah ditindaklanjuti I x: belum ditindaklanjuti
v: has been followed up I x: has not been followed up

Berikut adalah pencapaian hasil *assessment* penerapan GCG JAI dalam 5 (lima) tahun terakhir, yakni sebagaimana terlampir di bawah ini.

The following are the achievements of JAI's GCG implementation assessment results in the last 5 (five) years.

Tahun Buku Financial Year	Skor *Assessment* GCG GCG Assessment Score	Predikat Predicate	Lembaga Penilai Assessor
2022	98,58	Sangat Baik Excellent	PT Pratama Indomitra Konsultan
2021	98,24	Sangat Baik Excellent	PT Kharisma Integrasi Manajemen
2020	98,24	Sangat Baik Excellent	PT Kharisma Integrasi Manajemen
2019	95,235	Sangat Baik Excellent	PT Bumi Pertiwi Mandiri
2018	90,809	Sangat Baik Excellent	PT Bumi Pertiwi Mandiri

ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

Bersamaan dengan meningkatnya risiko yang dihadapi Perusahaan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kredibilitas dan reputasi yang semakin tumbuh. IPCM senantiasa berupaya untuk menjadi perusahaan yang dapat dipercaya (*well-governed corporation*). Ekspektasi yang semakin tinggi dari semua pemangku kepentingan dalam lingkup korporasi mendorong perlunya mencapai keunggulan daya saing, terutama dalam hal kinerja keuangan dan operasional untuk menjadi korporasi yang dikelola dengan baik (*well-managed corporation*).

ASEAN CG *Scorecard* merupakan alat kuantitatif untuk mengukur kepatuhan perusahaan publik di ASEAN terhadap pedoman tata kelola perusahaan sesuai dengan praktik teladan berdasarkan standar internasional, khususnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

IPCM telah menunjuk PT Pratama Indomitra Konsultan sebagai pihak independen untuk melakukan analisis dan pengukuran terkait pelaksanaan praktik tata kelola perusahaan berdasarkan ASEAN CG *Scorecard* di IPCM. Metode analisa ini dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, dengan mengacu pada informasi publik terutama pada *website* Perusahaan (Laporan Tahunan, Laporan

ASEAN Corporate Governance Scorecard

As the Company faces increasing risks, the importance of credibility and reputation is becoming more apparent. IPCM is committed to being a trusted and well-governed corporation. Higher expectations of stakeholders in the corporate sphere drives for excellence, especially for achieving competitive advantage in financial and operational performance, to establish itself as a well-managed corporation.

The ASEAN CG Scorecard serves as a quantitative tool to assess the compliance of public companies in ASEAN with corporate governance guidelines, based on international standards such as those set by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

IPCM has engaged PT Pratama Indomitra Consultant as an independent party to analyze and measure the implementation of corporate governance practices based on the ASEAN CG Scorecard. This analysis is conducted according to applicable standards, utilizing public information available on the Company's website (Annual Report, Sustainability Report, internal policies,

Keberlanjutan, Kebijakan-kebijakan internal, pelaksanaan RUPS dan lain-lain yang dipublikasikan tahun 2023) dengan Bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya juga dalam Bahasa Inggris, keterbukaan informasi pada *website* Bursa Efek Indonesia ("Bursa") dan *website* Otoritas Jasa Keuangan (pasar modal) ("OJK").

IPCM juga melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap ACGS untuk tahun buku 2023. Berdasarkan kriteria ACGS terbaru yang telah direvisi pada Oktober 2023, evaluasi dan pengukuran telah dilakukan oleh Pratama Indomitra Konsultan dan diperoleh hasil akhir yang menunjukan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Skor akhir (*overall score*) IPCM mencapai 98,18 poin, dan kinerja tingkat kepatuhan IPCM dinilai sebagai dengan predikat "Very Good". Adapun rincian skor tertimbang untuk masing- masing komponen *Scorecard* untuk Level 1 adalah sebagai berikut:

1. Level 1:
   a. Prinsip A: Hak dan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham
      20,00 poin
   b. Prinsip C: Keberlanjutan dan Ketahanan
      15,00 Poin
   c. Prinsip D: Pengungkapan dan Transparansi
      22,79 poin
   d. Prinsip E: Tanggung Jawab Dewan
      32,38 poin
2. Level 2:
   Untuk komponen penilaian Bonus and *Penalty*, IPCM memperoleh nilai Bonus sebesar 12 poin dan *Penalty* sebesar -4 sehingga total skor 8 poin.

ASSESSMENT GCG BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 21/POJK.04/2015

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Peraturan tersebut mengatur tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 butir rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Adapun uraian penerapannya di tahun 2023, dapat disampaikan sebagai berikut:

GMS implementation, etc., published in 2023) in both Indonesian and English, as well as information disclosed on the Indonesian Stock Exchange ("IDX") website and the Financial Services Authority ("OJK") website.

IPCM also conducted an evaluation and measurement of the ACGS for the 2023 financial year. Based on the latest ACGS criteria that have been revised in October 2023, evaluation and measurement have been carried out by Pratama Indomitra Konsultan and the final results show an improvement compared to the previous year. IPCM achieved a final score of 98,18 points, with its compliance level performance assessed as "Very Good" Details of the weighted scores for each Scorecard component for Level 1 are as follows:

1. Level 1:
   a. Principle A: Rights and Equitable Treatment of Shareholders
      20,00 poin
   b. Principle C: Sustainability and Resilience
      15,00 Poin
   c. Principle D: Disclosure and Transparency
      22,79 poin
   d. Principle E: Responsibilities of the Board
      32,38 poin
2. Level 2:

For Bonus and Penalty, IPCM gained a Bonus point of 12 and a Penalty of -4 thus making the total score reached 8 poin.

GCG ASSESSMENT BASED ON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 21/POJK.04/2015

Public Company Governance Guidelines are stipulated in OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 regarding the Implementation of Public Company Governance Guidelines. This regulation outlines governance guidelines for public companies, encompassing 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 recommendations for implementing good corporate governance. The implementation of these guidelines in 2023 can be described as follows:

Tabel Kepatuhan PT Jasa Armada Indonesia Tbk

PT Jasa Armada Indonesia Tbk Compliance

Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation		Penjelasan Penerapan di IPCM Expalanation of its Implementation at IPCM		Keterangan Description
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham Aspect 1: Public Company Relationship with Shareholders in guaranteeing Shareholder rights					
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1 Improving the Value of GMS Convention	1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public Company has established technical methods or procedures for collecting votes, both openly and privately, with a focus on independence and the interests of shareholders.	1.2	Terpenuhi. Prosedur pemungutan suara (*voting*) ini diatur dalam Tata Tertib RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham pada setiap RUPS. Fulfilled. The voting procedure is governed by the GMS Rules and Regulations, which are distributed to shareholders at each GMS.	
	1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Commissioners of the Public Company are present at AGMS.	1.2	Terpenuhi. Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perusahaan telah mengadakan Rapat secara elektronik (*online*) dengan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Fulfilled. The Company has conducted an electronic (online) General Meeting of Shareholders, attended by all members of the Board of Directors and Commissioners.	
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2 Improving Communication Quality of Public Company with Shareholders or Investors.	2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	2.1	Terpenuhi. Perusahaan telah melakukan pembaharuan informasi secara rutin terkait kinerjanya dan perkembangan aktivitas pengembangan usaha Perusahaan dalam situs *web* dan sosial media. Fulfilled. The Company regularly updates information regarding its performance and the development of its business activities on its website and social media platforms.	
	2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs *Web*. Public Company discloses its communication policy with shareholders or investors in Website.	2.2	Terpenuhi. Perusahaan telah menyediakan dokumen untuk Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Kegiatan Usaha, Prospek Bisnis, Tata Kelola serta materi lainnya yang dapat diunduh dari situs *web* Perusahaan untuk memberikan kesetaraan informasi kepada seluruh pemegang saham atas pelaksanaan komunikasi dengan Perseron. Fulfilled. The Company has provided documents such as Financial Reports, Annual Reports, Business Activities, Business Prospects, Governance, and other materials, which can be downloaded from the Company's website. This ensures equal access to information for all shareholders regarding communication with the Company.	
	2.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs *Web* Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the GMS minutes is available on the Public Company's website for at least 1 (one) year.	2.3	Terpenuhi.Ringkasan risalah RUPS telah tersedia dalam situs resmi Perusahaan, yaitu http:// ipcmarine.co.id/ Fulfilled. A summary of the GMS minutes is available on the Company's official website, namely http://ipcmarine.co.id/.	

Tabel Kepatuhan PT Jasa Armada Indonesia Tbk

PT Jasa Armada Indonesia Tbk Compliance

Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation		Penjelasan Penerapan di IPCM Expalanation of its Implementation at IPCM		Keterangan Description
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Function and Roles of the Board of Commissioners					
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of number of Board of Commissioners' member shall consider the condition of Public Company.	3.1	Terpenuhi. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan kondisi Perusahaan, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Fulfilled. The number of members of the Board of Commissioners is in accordance with the conditions of the Company and refers to applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.	
	3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of Composition of Board of Commissioners' member considers the variety of expertise, knowledge, and experiences required.	3.2	Terpenuhi. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perusahaan. Fulfilled. The number of members of the Board of Commissioners has taken into account the background skills, knowledge, and experience required by the Company.	
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4: Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of the Board of Commissioners	4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(Self- Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has self assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	4.1	Terpenuhi. dengan adanya Komite Nominasi dan Remunerasi yang membantu melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris. Fulfilled, with the existence of a Nomination and Remuneration Committee which helps evaluate the performance of the Board of Commissioners.	
	4.2	Kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in Annual Report of the public company.	4.2	Terpenuhi. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Fulfilled. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Public Company's Annual Report.	
	4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy with respect to the resignation of the member of the Board of Commissioners if such member is involved in financial crime.	4.3	Terpenuhi. Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 03/03/2023 dan POJK 33/POJK.04/2014 dan juga Anggaran Dasar Perusahaan. Fulfilled. Policies regarding the resignation of members of the Board of Commissioners due to involvement in financial crimes are regulated in Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number 03/03/2023, POJK 33/POJK.04/2014, and the Company's Articles of Association.	
	4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or Committee that conduct Nomination and Remuneration function arrange succession policy in Nomination process of the Board of Directors member.	4.4	Terpenuhi. Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsinya dalam menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Fulfilled. The Nomination and Remuneration Committee has fulfilled its function by formulating succession policies in the nomination process for members of the Board of Directors.	

Tabel Kepatuhan PT Jasa Armada Indonesia Tbk

PT Jasa Armada Indonesia Tbk Compliance

Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation		Penjelasan Penerapan di IPCM Expalanation of its Implementation at IPCM		Keterangan Description
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: Board of Directors' Function and Role					
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of Number of Board of Directors' members considers the condition of a Public Company and the effectiveness of decision-making.	5.1	Terpenuhi. Karena kondisi Perusahaan dan pengambilan keputusan yang efektif senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Direksi. Fulfilled. The condition of the Company and effective decision-making are always the basis for consideration in determining the number of members of the Board of Directors.	
	5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of composition of Board of Directors' member considers the variety of expertise, knowledge, and experiences required.	5.2	Terpenuhi. Komposisi Direksi saat ini berdasarkan kajian dokumen CV para anggota Direksi dan konfirmasi diketahui sudah mencerminkan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perusahaan. Fulfilled. The current composition of the Board of Directors is based on a review of the CV documents of the members of the Board of Directors and confirmation that it reflects the diversity of skills, knowledge, and experience required by the Company.	
	5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Member of Board of Directors who is liable for accounting or finance has accounting expertise and/or knowledge.	5.3	Terpenuhi. Perusahaan memiliki anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Fulfilled. The company has members of the Board of Directors overseeing accounting and finance who possess expertise and/or knowledge in the field of accounting.	

Tabel Kepatuhan PT Jasa Armada Indonesia Tbk

PT Jasa Armada Indonesia Tbk Compliance

Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation		Penjelasan Penerapan di IPCM Expalanation of its Implementation at IPCM		Keterangan Description
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6: Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Directors	6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(Self-Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi. Board of Directors has self-assessment policy to assess performance of Board of Directors.	6.1	Terpenuhi. Direksi memiliki kebijakan *self assessment* yang dilakukan secara berkala berdasarkan KPI mereka, yang hasilnya ditinjau dan dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Fulfilled. The Board of Directors has a policy of self-assessment, which is conducted periodically based on their Key Performance Indicators (KPIs). The results are reviewed and evaluated by the Nomination and Remuneration Committee, and subsequently reported to the Board of Commissioners.	
	6.2	Kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment policy to assess the performance of Board of Directors is disclosed in Annual Report of Public Company.	6.2	Terpenuhi. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi, telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Fulfilled. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Directors has been disclosed in the Annual Report of the Public Company.	
	6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors have a policy related to resignation of its member if involved in financial crimes	6.3	Terpenuhi. Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 03/03/2023 dan POJK 33/POJK.04/2014 dan juga Anggaran Dasar Perusahaan. Fulfilled. Policies regarding the resignation of members of the Board of Directors in case of involvement in financial crimes are regulated in Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number 03/03/2023, POJK 33/POJK.04/2014, and the Company's Articles of Association.	
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Participation of the Stakeholders					
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7: Improving corporate governance aspect through participation of stakeholders.	7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Public Company has a policy to prevent insider trading.	7.1	Terpenuhi. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* dalam Pedoman Tingkah Laku yang ditandatangani oleh seluruh pekerja. Fulfilled. The company has a policy to prevent insider trading in the Code of Conduct, which is signed by all employees.	
	7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*. Public Company has anti corruption and anti fraud policy.	7.2	Terpenuhi. Kebijakan ini diatur dalam Pedoman Tingkah Laku yang ditetapkan Perusahaan dan seluruh jajaran Direksi dan pekerja Perusahaan menandatangani pedoman tersebut. Fulfilled. This policy is regulated in the Code of Conduct established by the Company, and all members of the Company's Board of Directors and employees sign these guidelines.	

Tabel Kepatuhan PT Jasa Armada Indonesia Tbk

PT Jasa Armada Indonesia Tbk Compliance

Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation		Penjelasan Penerapan di IPCM Expalanation of its Implementation at IPCM		Keterangan Description
	7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public Company has policies concerning selection and capability improvement of suppliers and vendors.	7.3	Terpenuhi. Perusahaan telah melakukan seleksi vendor/pemasok berdasarkan SOP/kebijakan terkait Pengadaan yang sudah ditetapkan Perusahaan. Perusahaan juga melakukan evaluasi vendor/ pemasok berkala setiap 1 tahun sekali. Fulfilled. The Company has selected vendors/suppliers based on SOPs/ policies related to Procurement that have been established by the Company. The Company also conducts periodic vendor/supplier evaluations once a year.	
	7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Company has a policy concerning the fulfillment of creditor's rights.	7.4	Terpenuhi. Perusahaan telah memiliki kebijakan untuk memenuhi hak-hak dari kreditur. Hal ini dikelola oleh Divisi Keuangan yang mengatur dan mengelola pembayaran hak-hak kreditur. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam perjanjian, yang mengikat secara hukum. Fulfilled. The Company has a policy to fulfill the rights of creditors. This is managed by the Finance Division, which regulates and manages the payment of creditor rights. These rights are also stated in the agreement, which is legally binding.	
	7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Public company has a policy of whistleblowing system.	7.5	Terpenuhi. Perusahaan telah memiliki kebijakan sistem *Whistleblowing System* sebagaimana tertera dalam *website* Perusahaan pada menu GCG. Fulfilled. The Company has a Whistleblowing System policy, as stated on the company website under the GCG menu.	
	7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan pekerja. Public company has a policy of whistleblowing system.	7.6	Terpenuhi. Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan pekerja. Fulfilled. The Company has a Whistleblowing System policy, as stated on the company website under the GCG menu.	

Tabel Kepatuhan PT Jasa Armada Indonesia Tbk

PT Jasa Armada Indonesia Tbk Compliance

Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation		Penjelasan Penerapan di IPCM Expalanation of its Implementation at IPCM		Keterangan Description
Aspek 5: Keterbukaan Informasi xxx					
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure	8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs *Web* sebagai media keterbukaan informasi. Public company has long-term incentive policy for Directors and employees.	8.1	Terpenuhi. Selain menggunakan situs *web* dan pelaporan secara elektronik seperti IDXNet dan OJK *Reporting*, Perusahaan juga menggunakan platform media sosial untuk mengungkapkan informasi tentang Perusahaan. Fulfilled. In addition to utilizing websites and electronic reporting platforms such as IDXNet and OJK Reporting, the Company also employs social media platforms to disclose information about the Company.	
	8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Annual Report of Public Company discloses beneficial owner in share ownership of public company of at least 5% (five percent), other than disclosure of beneficial owner in share ownership of public company through major and controlling shareholders.	8.2	Terpenuhi. Selain menggunakan situs web dan pelaporan secara elektronik seperti IDXNet dan OJK *Reporting*, Perusahaan juga menggunakan platform media sosial untuk mengungkapkan informasi tentang Perusahaan. Fulfilled. In addition to utilizing websites and electronic reporting platforms such as IDXNet and OJK Reporting, the Company also employs social media platforms to disclose information about the Company.	

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

STRUKTUR ORGAN GCG DAN MEKANISME HUBUNGAN ANTAR ORGAN

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas, struktur GCG Perusahaan terdiri dari organ utama meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk membentuk organ pendukung yang bertugas membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugas yang dimiliki oleh organ pendukung tersebut. Sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sementara itu, Direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan Perusahaan didukung oleh Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

GCG ORGAN STRUCTURE AND RELATIONSHIP MECHANISMS BETWEEN ORGANS

In compliance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liabilities Companies, the Company's GCG structure comprises of primary organs, including the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. The Board of Commissioners holds the authority to establish supporting organs tasked with aiding in fulfilling its duties and obligations, as well as formulating policies aligned with the responsibilities of these supporting organs. According to the Corporate Governance Guidelines, the supporting organs of the Board of Commissioners include the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. Meanwhile, the Board of Directors, in implementing the Company's management duties, is supported by the Corporate Secretary and Internal Audit.

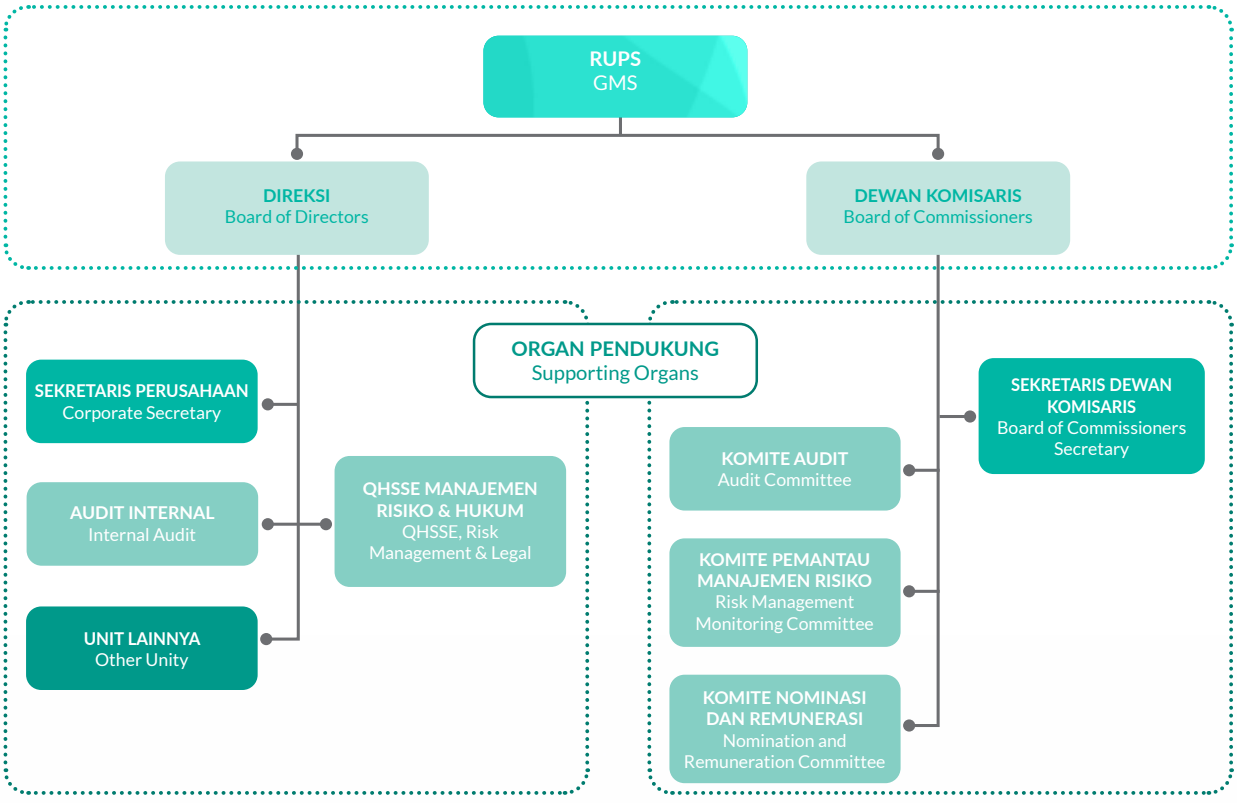

Mekanisme tata kelola Perusahaan merupakan mekanisme yang telah dirancang untuk mengarahkan pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Mekanisme ini diperkuat dengan adanya organ Perusahaan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung lainnya. Mekanisme yang dijalankan dengan konsisten bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha jangka panjang dan memberikan

The corporate governance mechanism is designed to guide the Company's management in accordance with GCG principles. This mechanism is reinforced by the presence of Company organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Board of Directors, and other supporting organs. Consistent implementation of this mechanism aims to ensure long-term business continuity and deliver added value to

nilai tambah bagi Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, organ Perusahaan menerapkan pembagian fungsi dan tanggung jawab secara transparan dan adil, di mana setiap fungsi dan tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya campur tangan yang saling bertentangan.

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham dan Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali, hingga Entitas Pemilik Akhir

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang Saham IPCM terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham lainnya yang merupakan pendiri Perusahaan. Dalam komposisi kepemilikan saham di lingkungan Perusahaan, struktur kepemilikan saham PT Pelindo Jasa Maritim 76,89%, IDX 23,00%, dan PT Multi Terminal Indonesia 0,11%. Rincian lebih lanjut mengenai informasi dan struktur Pemegang Saham Utama dan Pengendali dibahas secara mendalam dalam bagian "Komposisi Pemegang Saham" pada Bab Profil Perusahaan.

Hak Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen untuk selalu melindungi hak-hak Pemegang Saham, sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*). Hak Pemegang Saham Perusahaan antara lain:

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
3. Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS;
5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan, secara tepat waktu dan teratur;
6. Hak untuk menerima sebagian dan keuntungan Perusahaan yang diperuntungkan bagi pemegang saham dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan tidak dapat diganti/substitusi oleh siapapun sesuai ketentuan perundangan. Selain itu, RUPS menjadi wadah bagi para Pemegang Saham untuk turut serta membangun Perusahaan dengan keputusan-keputusan dan arahan yang diberikan dalam RUPS. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, di mana RUPS Tahunan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan dalam ketentuan

shareholders and other stakeholders. Therefore, the Company's organs enforce a transparent and equitable segregation of functions and responsibilities, ensuring each function and responsibility is executed without conflicting interference.

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Shareholders and Information about Major/Controlling Shareholders, up to the Final Owner Entity

Shareholders, whether individuals or legal entities, legally own Company shares but do not interfere with the functions, duties, and authority of the Board of Commissioners and Directors. IPCM's shareholders include Main/Controlling Shareholders and other founders of the Company. The share ownership composition within the Company includes PT Pelindo Jasa Maritim with 76.89%, IDX with 23.00%, and PT Multi Terminal Indonesia with 0.11%. More detailed information about the Main and Controlling Shareholders is discussed in the "Shareholder Composition" section of the Company Profile Chapter.

Shareholders Rights

The Company is dedicated to protecting the rights of its shareholders, as outlined in the Articles of Association and Corporate Governance Policy (GCG Code). These rights encompass:

1. The right to request the convening of a General Meeting of Shareholders (GMS);
2. The right to seek information regarding the agenda of the GMS;
3. The right to propose items for discussion at the GMS agenda;
4. The right to attend and cast votes at the GMS;
5. The right to receive timely and regular updates regarding the Company;
6. The right to receive a portion of the Company's profits through dividends and other profit-sharing mechanisms.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) holds the highest authority and cannot be substituted by any other entity as per statutory regulations. It serves as a platform for Shareholders to actively participate in the Company's development by making decisions and providing directions. The GMS comprises of the Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS must convene at least once a year, within 6 (six) months after the end of the financial year and according to the Company's Articles of Association, any other GMS held outside the Annual GMS

di Anggaran Dasar Perusahaan bahwa yang disebut dengan RUPS Lainnya dipersamakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan tingkat kesegeraan untuk mendapatkan kepastian Perusahaan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang merupakan mata acara pokok dalam RUPS tahunan, yaitu mengenai laporan tahunan, laporan keuangan dan penggunaan laba.

Hal-hal penting bagi Perusahaan yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan RUPS di antaranya berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, menyetujui laporan keuangan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tahapan Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS di Perusahaan telah mengikuti serangkaian tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan tersebut melibatkan persiapan waktu hingga penyediaan bahan-bahan yang diperlukan dalam RUPS. Berikut adalah standar langkah-langkah pelaksanaan RUPS yang dijalankan oleh Perusahaan:

is considered equivalent to an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which can be held at any time based on need, interest and level of urgency to obtain the Company's certainty to discuss and decide on meeting agenda except for meeting agenda which have been included into the main agenda in the annual GMS, such as regarding annual reports, financial statements and profits usage.

Crucial matters for the interests of the Company addressed in GMS Resolutions are regarding the amendments to the Company's Articles of Association, approval of financial reports, appointment and dismissal of Board of Commissioners and Directors members, evaluation of their performance, and determination of their remuneration and all decisions were made in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and the Limited Liability Company Law.

Holding Stages of GMS

The implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) in the Company follows a series of stages in accordance with applicable regulations. These stages involve careful preparation and provision of necessary materials for the GMS. The standard steps for implementing a GMS carried out by the Company are as follows:

PENGUMUMAN RUPS
GMS Announcement
→ **PEMANGGILAN RUPS**
GMS Invitation
→ **PELAKSANAAN RUPS**
GMS Implementation
→ **PENYAMPAIAN RISALAH RUPS**
Submission of Minutes of GMS

Prosedur Teknis Pengumpulan Suara

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengedepankan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengikuti jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun setuju sesuai dengan prinsip *one share one vote*.

Voting Procedure

Decision-making at the General Meeting of Shareholders (GMS) is initially prioritized through deliberation to reach a consensus, as mandated by Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. If consensus cannot be reached through deliberation, voting is conducted based on the number of shares that disagree, abstain, or agree, following the principle of one share, one vote.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023

Di tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS yakni RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dengan rincian sebagai berikut:

GMS Holding in 2023

In 2023, the Company has held 1 (one) GMS, namely the 2022 Annual GMS with the following details:

Penyelenggaraan RUPS
Holding of GMS

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 21 Juni 2023 Wednesday, June 21, 2023
Waktu Time	:	Pukul 10.22 WIB s/d 11.23 WIB
Tempat Location	:	Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310

Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Present Members of the Board of Commissioners and Directors	:	**Dewan Komisaris** • Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) • Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) **Direksi** • Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) • Reini Delfianti (Direktur Keuangan dan SDM) **Board of Commissioners** • Zuhri Iryansyah (President Commissioner) • Bay Mokhamad Hasani (Independent Commissioner) **Board of Directors** • Shanti Puruhita (President Director and Commercial and Business Development Director) • Muhammad Iqbal (Director of Fleet Management and Operation) • Reini Delfianti (Director of Finance and HR)
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on the absence of the Board of Commissioners and Directors at the GMS	:	**Dewan Komisaris** • R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) tidak dapat hadir dikarenakan sedang menjalankan ibadah haji. • Hary Kriswanto (Komisaris Independen) tidak dapat hadir dikarenakan telah meninggal dunia per tanggal 24 Juni 2023. **Board of Directors** • R.R. Dewi Ariyani (Commissioner) was unable to attend because she on Hajj pilgrimage. • Hary Kriswanto (Independent Commissioner) was unable to attend because he had passed away as of June 24, 2023.

Tahapan Pelaksanaan RUPS
GMS Holding Stages

15 Mei 2023 May 15, 2023	→	30 Mei 2023 May 30, 2023	→	21 Juni 2023 June 21, 2023	→	23 Juni 2023 June 23, 2023
Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/15/5/1/KGC/SPR/JAI-23 GMS Announcement to Shareholders via Letter No. SK.03/15/5/1/KGC/SPR/JAI-23		Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/30/5/1/KGC/SPR/JAI-23 GMS Summons to Shareholders via Letter No. SK.03/30/5/1/KGC/SPR/JAI-23		Pelaksanaan RUPS di Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 GMS holding at the Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta, 14310		Berita Acara RUPS dimuat dalam Risalah RUPS No. SK.03/23/6/1/KGC/SPR/JAI-23 GMS Minutes in document No. SK.03/23/6/1/KGC/SPR/JAI-23

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan untuk tahun buku 2022 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perusahaan yang hadir sebanyak 4.689.124.810 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,86% dari 5.284.811.100 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Perusahaan telah menunjuk pihak independen yaitu PT EDI Indonesia dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara dan Notaris Ashoya Ratam, untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Berikut hasil Keputusan RUPS dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023.

Annual GMS Resolutions

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the financial year 2022 was attended by the all members of the Board of Commissioners and Directors, as well as the Company's Shareholders, representing 4,689,124,810 shares with valid votes, equivalent to 88.86% of the total 5,284,811,100 shares issued by the Company.

To ensure transparency and accuracy, the Company appointed an independent party, namely PT EDI Indonesia, to calculate and validate the votes, and Notary Ashoya Ratam, to further validate and announce the results of the vote count.

The following are the results of the GMS Decision and the follow-up by Company Management until the end of 2023.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 21 Juni 2023
Annual GMS for the Financial Year 2022 dated June 21, 2023

Mata Acara Rapat ke-1:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.

Hasil keputusan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00418/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2022."

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2023

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 21 Juni 2023
Annual GMS for the Financial Year 2022 dated June 21, 2023

First Meeting Agenda:
Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year 2022, and Ratification of the Financial Statements for the Financial Year 2022.

Resolutions:
1. Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report conducted for the Financial Year 2022, and ratifed the Company's Financial Statement for the same period. The Financial Statement has been audited by the PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA Public Accounting Firm, as indicated in their report Number: 00418/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/III/2023 dated March 27, 2023, with the opinion stating "the attached financial report presented fairly, in all material respects, the financial position of PT Jasa Armada Indonesia Tbk as of December 31, 2022, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards."
2. Granted full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Commissioners for management and supervisory actions during the financial year 2022. This release of responsibility applies as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Annual Report and the Company's Financial Statement for the financial year 2022.

Follow-up on Resolution::
The resolutions have been realized in 2023.

Mata Acara Rapat ke-2:
Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2022.

Hasil keputusan:
Menyetujui penetapan penggunaan laba Perusahaan tahun buku 2022 yang seluruhnya berjumlah Rp150.654.848.841,00 (seratus lima puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dipergunakan sebagai berikut:
1. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT sebesar Rp30.130.969.768,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) atau kurang lebih sebesar 20%.
2. Dividen final sebesar Rp113.028.441.246,00 (seratus tiga belas miliar dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atau kurang lebih sebesar 75,02% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari:
   a. Dividen interim sebesar Rp19.418.518.384,00 (sembilan belas miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau Rp3,68 per lembar saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 23 Desember 2022.
   b. Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp93.609.922.862,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau Rpl 7,74 per lembar saham.
3. Sisanya sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai modal kerja Perusahaan sebesar Rp7.495.437.827,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sebesar 4,98%. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2022 serta mengumumkannya dalam situs *web* Perusahaan, situs *web* Bursa, dan situs *web* KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2023.

Second Meeting Agenda:
Determination of the Determination of the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year.

Resolutions:
Approved the determination of the use of the Company's profits for the 2022 financial year, totaling Rp150,654,848,841.00 (one hundred fifty billion six hundred fifty-four million eight hundred forty-eight thousand eight hundred and forty-one rupiah), to be allocated as follows:
1. Reserves as referred to in Article 70 of the Company Law amounting to Rp30,130,969,768.00 (thirty billion one hundred thirty million nine hundred sixty-nine thousand seven hundred and sixty-eight rupiah), or approximately 20%.
2. Final dividend of Rp113,028,441,246.00 (one hundred thirteen billion twenty-eight million four hundred forty-one thousand two hundred and forty-six rupiah), or approximately 75.02%, to be distributed to shareholders as follows:
   a. Interim dividend of Rp19,418,518,384.00 (nineteen billion four hundred eighteen million five hundred eighteen thousand three hundred and eighty-four rupiah), or Rp3.68 per share, distributed to shareholders on December 23, 2022.
   b. The rest as ash dividends amounting to Rp93,609,922,862.00 (ninety-three billion six hundred nine million nine hundred twenty-two thousand eight hundred and sixty-two rupiah), or Rp7.74 per share.
3. Retained earnings of Rp7,495,437,827.00 (seven billion four hundred ninety-five million four hundred thirty-seven thousand eight hundred and twenty-seven rupiah), or approximately 4.98%, to be used as the Company's working capital. Furthermore, granted authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to determine the schedule and procedures for distributing dividends for the 2022 financial year and to announce it on the Company's website, the Stock Exchange website, and the KSEI website in accordance with applicable regulations.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2023

Mata Acara Rapat ke-3:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perusahaan untuk Tahun Buku 2023.

Hasil keputusan:
1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023 termasuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perusahaan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2023.



RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 21 Juni 2023
Annual GMS for the Financial Year 2022 dated June 21, 2023

Third Meeting Agenda:
Appointment of the Company's Public Accounting Firm for the 2023 Financial Year.

Resolutions:
1. Approved the reappointment of the Public Accounting Firm "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to audit the Company's financial statements for the 2023 financial year and granted the authority to the Board of Commissioners to determine the public accountant's honorarium and any other requirements for their designation.
2. Approved the authorization of the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm for KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" in the event they are unable to complete the audit of the Company's financial statements for the 2023 financial year due to any reason, including to determine the honorarium for the replacement public accountant, along with fulfilling other requirements for appointment, the Board must consider recommendations from the Company's Audit Committee and adhere to the criteria as stipulated in POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Follow-up on Resolution::
The resolutions have been realized in 2023.

Mata Acara Rapat ke-4:
Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Hasil keputusan:
Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Utama untuk:
1. Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perusahaan serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2023;
2. Menetapkan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2022."

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2023.

Fourth Meeting Agenda:
Determining the salary, honorarium, and other allowances for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company, as well as bonuses for these members.

Resolutions:
Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners, after consulting with major shareholders, to:
1. Determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for 2023;
2. Determine tantiems for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 financial year.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2023.

Mata Acara Rapat ke-5:
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Hasil keputusan:
Oleh karena Mata Acara Rapat Kelima merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perusahaan telah menyampaikan laporan sehubungan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut:
Total dana hasil penawaran umum bersih Rp439.531.825.000,00 sebesar 10% digunakan untuk modal kerja Perusahaan dan telah digunakan seluruhnya dan sebesar 90% dialokasikan untuk belanja modal yakni 4 (empat) kapal tunda yang telah direalisasikan sebesar Rp228.723.815.000,00. Sedangkan Rp90.530.000.000,00 telah dialokasikan untuk pembangunan 1 (satu) kapal tunda dan 3 (tiga) motor pandu. Sisa dana IPO sebesar Rp76.324.827.500,00 akan digunakan untuk kebutuhan investasi lainnya pada tahun 2023 dan 2024.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2023.

Fifth Meeting Agenda:
Report on the Realization of Public Offering Proceeds Usage.

Resolutions:
As the Fifth Meeting Agenda only serves as a report, there were no decision-making processes involved. The Company's Board of Directors has submitted a report regarding the Realization Report on the Public Offering Proceeds Usage, outlined as follows:
A total 10% of the total proceeds from the net public offering of Rp439,531,825,000.00 has been fully utilized for the Company's working capital, and 90% of the rest was allocated for capital expenditure for 4 (four) tugboats amounting to Rp228,723,815,000.00. Additionally, Rp90,530,000,000.00 has been allocated for the construction of 1 (one) tugboat and 3 (three) guided motorbikes. The remaining IPO funds totaling Rp76,324,827,500.00 will be use for other investment needs in 2023 and 2024.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2023.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perusahaan sebesar Rp93.609.922.8662,00.

Furthermore, in connection with the resolution on the Second Meeting Agenda as mentioned above, the Meeting has decided to pay cash dividends to the Company's shareholders amounting to Rp93,609,922,862.00.

Yang berhak mendapatkan dividen adalah para pemegang saham menurut Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

Those entitled to receive dividends are shareholders according to the Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividends for the 2022 Financial Year as follows:

No.	Keterangan Description	Tanggal Date
1.	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)** End Stock Trading Date with Dividend Rights (Cum Dividend)	
	1. Pasar Reguler dan Negosiasi Regular and Negotiated Markets	4 Juli 2023 July 4, 2023
	2. Pasar Tunai Cash Market	6 Juli 2023 July 6, 2023
2.	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)** End Stock Trading Date without Dividend Rights (Ex Dividend)	
	1. Pasar Reguler dan Negosiasi Regular and Negotiated Markets	5 Juli 2023 July 5, 2023
	2. Pasar Tunai Cash Market	7 Juli 2023 July 7, 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*) Shareholders List Date entitled to Dividends (Recording Date)	6 Juli 2023 July 6, 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022 Cash Dividend Payment Date for 2022 Financial Year	21 Juli 2023 July 21, 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 5 Juli 2022 dan/atau pemilik saham Perusahaan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juli 2022.
2. Pembayaran Dividen:
   a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahanbukuan ke rekening Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perusahaan, yaitu PT EDI Indonesia ("EDI"), beralamat beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, *email*: bae@ediindonesia.co.id atau *Corporate Secretary* Perusahaan, beralamat di Gedung Citra Towers, Tower Utara Lantai 21, Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta 10630, Tel. (021) 4306789, *email*: corsec@ipcmarine.co.id paling lambat tanggal 6 Juli 2022 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp.10.000,-.
   b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan pada tanggal 21 Juli 2023.
3. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Procedures for Cash Dividends Distribution:

1. Cash Dividends will be distributed to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on July 5, 2022, and/or owners of Company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on July 6, 2022.
2. Dividend Payment:
   a. For entitled Shareholders whose shares are still in script (physical), Dividend payments will be made by transferring the book to the account of the Eligible Shareholder who has provided the name of the bank and account number in the name of the Eligible Shareholder to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT EDI Indonesia ("EDI"), having its address at the Securities Administration Services Office, Wisma SMR Floor 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@ediindonesia.co.id or Corporate Secretary of the Company, located at Citra Towers Building, North Tower Floor 21, Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kebon Blank Kemayoran, Jakarta 10630, Tel. (021) 4306789, email: corsec@ipcmarine.co.id no later than July 6, 2022, at 16.00 WIB accompanied by a photocopy of KTP or passport according to the address in the Register of Shareholders via a stamped letter of Rp. 10,000,-.
   b. For entitled Shareholders whose shares are registered in KSEI's collective custody, payment will be made through KSEI and Entitled Shareholders will receive payment from the relevant KSEI Account Holder on July 21, 2023.
3. Dividends to be distributed are subject to tax in accordance with applicable laws and regulations. Therefore, Eligible Shareholders are requested to pay attention to the following matters:

a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan *copy* NPWP kepada KSEI atau EDI paling lambat tanggal 6 Juli 2022 pukul 16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang -Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
   i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
   ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
   i) Dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
   ii) Tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 TAHUN 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau EDI (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 6 Juli 2022 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2022, Hasil Keputusan dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Di tahun 2022, Perusahaan telah melaksanakan 3 kali RUPS, yakni RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada pada 23 Juni 2022, dan RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 14 April 2022 dan 6 Desember 2022. Seluruh hasil keputusan RUPS tersebut telah ditindaklanjuti di tahun 2022.

a. For Eligible Shareholders who are Domestic Taxpayers who have not included their Taxpayer Identification Number ("NPWP"), they are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or EDI no later than July 6, 2022, at 16.00 WIB. In accordance with Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021 concerning the Implementation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax, and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, Cash Dividends are not deducted from Income Tax (PPh) for:
   i) Domestic Individual Taxpayers with the condition that the Dividends must be invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia within a certain period. If the Individual Taxpayer does not meet these requirements, then the Income Tax (PPh) payable on Dividends must be paid by the domestic Individual Taxpayer himself as regulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021.

   ii) Domestic Corporate Taxpayers.
b. For Eligible Shareholders who are Overseas Taxpayers whose shares:
   i) Placed in KSEI collective custody, or
   ii) Not included in KSEI's collective custody (holding shares in scrip form), and whose tax deductions will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B), must comply with the requirements of Article 26 of Law no. 36 OF 2008 concerning Income Tax as well as submitting a Certificate of Domicile ("SKD") to KSEI (for those whose shares are in collective custody) or EDI (for those whose shares are not included in KSEI's collective custody or shareholders in scrip form), no later than July 6, 2022, at 16:00 WIB, using the format and procedures as stipulated in Directorate General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements. Without an SKD in the format referred to, Cash Dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.

Implementation of the 2022 GMS, Resolutions and Follow-up by Management

In 2022, the Company held 3 General Meetings of Shareholders (GMS), namely the Annual GMS for the 2021 Financial Year held on June 23, 2022, and the Extraordinary GMS held on April 14, 2022 and December 6, 2022. All resolutions made during these GMS have been duly followed up throughout the year.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 23 Juni 2022

Resolutions of the 2021 Annual GMS for the 2021 Fiscal Year on June 23, 2022

Penyelenggaraan RUPS
Holding of GMS

Hari/Tanggal Day/Date	:	Kamis, 23 Juni 2022 Thursday, June 23, 2022
Waktu Time	:	Pukul 10.17 WIB s/d 11.33 WIB
Tempat Location	:	Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Members of the Board of Commissioners and Directors	:	1. Dewan Komisaris a. Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) b. R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) c. Hary Kriswanto (Komisaris Independen) d. Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) 2. Direksi a. Amri Yusuf (Direktur Utama) b. Shanti Puruhita (Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis)* c. Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) 1. Board of Commissioners s a. Zuhri Iryansyah (President Commissioner) b. R.R. Dewi Ariyani (Commissioner) c. Hary Kriswanto (Independent Commissioner) d. Bay Mokhamad Hasani (Independent Commissioner) 2. Board of Directors a. Amri Yusuf (President Director) b. Shanti Puruhita (Director of Commercial and Business Development)* c. Muhammad Iqbal (Director of Fleet Management and Operation)
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on the absence of the Board of Commissioners and Directors at the GMS	:	Reini Delfianti (Direktur Keuangan dan SDM) tidak dapat hadir dikarenakan ada kepentingan dinas. Reini Delfianti (Director of Finance and HR) was unable to attend due to official matters

*) hadir melalui media telekonferensi Tahapan Pelaksanaan RUPS
*) present using teleconference channel

Tahapan Pelaksanaan RUPS
Stages of the GMS Implementation

13 Mei 2022 May 13, 2022	→	31 Mei 2022 May 31, 2022	→	23 Juni 2022 June 23, 2022	→	27 Juni 2022 June 27, 2022
Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. AD-330/21/6/1/MS-22 GMS Announcement to Shareholders via Letter No. AD-330/21/6/1/MS-22		Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. AD-330/31/5/3/MS-22 GMS Summons to Shareholders via Letter No. AD-330/31/5/3/MS-22		Pelaksanaan RUPS di Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 GMS holding at the Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta, 14310		Berita Acara RUPS dimuat dalam Risalah RUPS No. AD-330/27/6/1/MS-22 GMS Minutes in document No. AD-330/27/6/1/MS-22

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan untuk tahun buku 2022 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perusahaan yang hadir sebanyak 4.645.139.830 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,03% dari 5.276.771.300 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Annual GMS Resolutions

The Annual GMS for the 2022 financial year saw the participation of the entire Board of Commissioners and Directors, along with Company Shareholders representing 4,645,139,830 shares with valid votes, equivalent to 88.03% of the 5,276,771,300 total shares eligible for voting.

Perusahaan telah menunjuk pihak independen yaitu PT EDI Indonesia dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara dan Notaris Ashoya Ratam, untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

To ensure accuracy, PT EDI Indonesia was appointed as an independent party to validate the votes, with further validation and announcement of results conducted by Notary Ashoya Ratam.

Berikut hasil Keputusan RUPS dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023.

The subsequent sections detail the outcomes of the GMS Resolutions and the subsequent actions taken by Company Management until the end of 2023.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 23 Juni 2022
Annual GMS for the Financial Year 2021 dated June 23, 2023

Mata Acara Rapat ke-1:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.

Hasil keputusan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00338/2.1032/AU.1/06/06972/1/ III/2022 tanggal 28 Maret 2021 dengan pendapat laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2021.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2022.

First Meeting Agenda:
Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2021 Financial Year, and Ratification of the Financial Statements for the 2021 Financial Year.

Resolutions:
1. Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report conducted for the 2021 Financial Year, and ratifed the Company's Financial Statement for the 2021 Financial Year that has been audited by the PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA Public Accounting Firm, as indicated in their report Number: 00338/2.1032/AU.1/06/06972/1/ III/2022 dated March 28, 2021, with the opinion stating "the attached financial report presented fairly, in all material respects, the financial position of PT Jasa Armada Indonesia Tbk as of December 31, 2020, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2. Granted full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Commissioners for management and supervisory actions during the 2021 financial year for as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Annual Report and the Company's Financial Statement for the 2021 financial year..

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2022.

Mata Acara Rapat ke-2:
Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2021.

Hasil keputusan:
Menyetujui penetapan penggunaan laba Perusahaan tahun buku 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp136.582.719.666,- (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) dipergunakan sebagai berikut:
1. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT sebesar Rp27.300.786.043,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam empat puluh tiga Rupiah) atau kurang lebih sebesar 19,99%.
2. Dividen final sebesar Rp109.281.933.623,- (seratus sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah Rupiah) atau kurang lebih sebesar 80,01% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari:
   a. Dividen interim sebesar Rp18.152.093.272,-(delapan belas miliar seratus lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 24 Desember 2021.
   b. Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp91.129.840.351 (sembilan puluh miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) atau Rp17,27 per lembar saham.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2021 serta mengumumkannya dalam situs *web* Perusahaan, situs *web* Bursa, dan situs *web* PT KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2022.

Second Meeting Agenda:
Determination of the Determination of the Company's Net Profit for the 2021 Financial Year.

Resolutions:
Approved the determination of the use of the Company's profits for the 2021 financial year, totaling Rp136,582,719,666,- (one hundred thirty-six billion five hundred eighty-two million seven hundred nineteen thousand six hundred and sixty-six Rupiah), to be allocated as follows:
1. Reserves as referred to in Article 70 of the Company Law amounting to Rp27,300,786,043,- (twenty seven billion three hundred million seven hundred eighty six forty three Rupiah), or approximately 19.99%.
2. Final dividend of Rp109,281,933,623,- (one hundred nine billion two hundred eighty one million nine hundred thirty three thousand six hundred and twenty three rupiah Rupiah), or approximately 80.01%, to be distributed to shareholders as follows:
   a. Interim dividend of Rp18,152,093,272,- (eighteen billion one hundred fifty-two million ninety-three thousand two hundred and seventy-two Rupiah), distributed to shareholders on December 24, 2021.
   b. The rest as ash dividends amounting to Rp91,129,840,351,- (Ninety billion one hundred twenty nine million eight hundred forty thousand three hundred and fifty one Rupiah), or Rp17.27 per share.

Granted authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to determine the schedule and procedures for distributing dividends for the 2021 financial year and to announce it on the Company's website, the Stock Exchange website, and the KSEI website in accordance with applicable regulations.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2022.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 23 Juni 2022
Annual GMS for the Financial Year 2021 dated June 23, 2023

Mata Acara Rapat ke-3:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perusahaan untuk Tahun Buku 2022.

Hasil keputusan:
1. Menyetujui menunjuk Kembali Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO SUNGKORO & SURJA" (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2022 termasuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perusahaan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2022.

Third Meeting Agenda:
Appointment of the Company's Public Accounting Firm for the 2022 Financial Year.

Resolutions:
1. Approved the reappointment of the Public Accounting Firm "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to audit the Company's financial statements for the 2022 financial year and granted the authority to the Board of Commissioners to determine the public accountant's honorarium and any other requirements for their designation.
2. Approved the authorization of the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm for KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" in the event they are unable to complete the audit of the Company's financial statements for the 2022 financial year due to any reason, including to determine the honorarium for the replacement public accountant, along with fulfilling other requirements for appointment, the Board must consider recommendations from the Company's Audit Committee and adhere to the criteria as stipulated in POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2023.

Mata Acara Rapat ke-4:
Penetapan gaji/ honorarium dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Hasil keputusan:
1. Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perusahaan serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk Tahun 2022.
2. Menetapkan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2021.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2022.

Fourth Meeting Agenda:
Determining the salary, honorarium, and other allowances for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company, as well as bonuses for these members.

Resolutions:
3. Determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for 2022;
4. Determine tantiems for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2021 financial year.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2022.

Mata Acara Rapat ke-5:
Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Hasil keputusan:
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yaitu menyesuaikan dengan peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 15-9-2020 (lima belas September dua ribu dua puluh);
2. Menyetujui untuk Menyusun Kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perusahaan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Risalah Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Risalah Rapat ini;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan Kembali seluruh perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan data Perusahaan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2022.



RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 23 Juni 2022
Annual GMS for the Financial Year 2021 dated June 23, 2023

Fifth Meeting Agenda:
Amendment to the Company's Articles of Association.

Resolutions:
1. Approved the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association, aligning with Central Statistics Agency regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields dated 15-9-2020 (fifteenth September two thousand and twenty);
2. Approved the Restructuring of all provisions in the Articles of Association in accordance with the amendment mentioned in point 1 above, which consequently, the entire Company's Articles of Association will be as stated in the Attachment to the Minutes of this Meeting, forming an inseparable part of the Meeting's Minutes;
3. Granted the authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to undertake all necessary actions related to the resolutions on the Meeting Agenda, including but not limited to perfecting or making amendment to the Articles of Association and restating all amendments to the Company's Articles of Association in a Notarial Deed separately, including to request approval and notify changes of the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as take all necessary actions in connection with this matter in accordance with applicable laws and regulations.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2022.

Mata Acara Rapat ke-6:
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Hasil keputusan:
1. "Total dana IPO yang diterima Perusahaan adalah sebesar Rp461.892.470.000,- setelah dikurangi dana yang telah dikeluarkan untuk IPO sebesar Rp22.360.645.000,- maka dana IPO yang diterima Perusahaan adalah sebesar Rp439.531.825.000,-.
2. Dana IPO tersebut digunakan sebagai:
   a. Modal kerja sebesar Rp43.953.182.500,- atau 10% telah digunakan seluruhnya;
   b. Investasi sebesar Rp395.578.642.500,- atau 90% yang terdiri dari:
      i) Pembelian 4 unit kapal tunda sebesar Rp227.266.660.000,- yang sudah terealisasi;
      ii) Pembangunan 1 kapal tunda dan 2 kapal pandu sebesar Rp90.530.000.000,- telah dialokasikan, yang direncanakan akan selesai secara bertahap di tahun 2022 dan 2023;
      iii) Kebutuhan investasi lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp77.781.982.500,-.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2022.

Sixth Meeting Agenda:
Report on the Usage Realization of Public Offering Proceeds.

Resolutions:
1. The Company received a total of Rp461,892,470,000,- from the IPO after deducting the funds spent for the IPO amounting to Rp. 22,360,645,000,-, making the net IPO funds received by the Company amounted to Rp439,531,825,000,-.
2. The utilization of the IPO funds is as follows:
   a. Working capital amounting to Rp43,953,182,500,- or 10% has been fully utilized;
   b. Investments totaling Rp395,578,642,500,- or 90%, comprising:
      i) Purchase of 4 units of tugboats totaling Rp227,266,660,000,-, which has been realized;
      ii) Allocation of Rp90,530,000,000 for the construction of 1 tugboat and 2 guideboats, planned to be completed in stages in 2022 and 2023;
      iii) Other investment needs in 2022 amounting to Rp77,781,982,500.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2022.

Mata Acara Rapat ke-7:
Implementasi Integrasi, Harmonisasi, dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan SDM Perusahaan.

Hasil keputusan:
Menyetujui pengukuhan dan ratifikasi Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PER.0031/HK.101/PLJM-2022 tanggal 01-06-2022 (satu juni dua ribu dua puluh dua) tentang Kebijakan Pengelolaan Bidang SDM pada Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan Kerjasama Operasi (KSO) di lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim, berikut perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya, yang pelaksanaannya tetap memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2022.

Seventh Meeting Agenda:
Implementation of Integration, Harmonization and Synergy of the Company's HR Management Policies.

Resolutions:
Approved the confirmation and ratification of Regulation Number PER.0031/HK.101/PLJM-2022 dated June 1, 2022, concerning HR Management Policy in Subsidiaries, Affiliated Companies, and Operational Cooperation (KSO) within PT Pelindo Jasa Maritim, including changes, additions, and/or updates, ensuring compliance with Laws, Regulations, and the Company's Articles of Association.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2022.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perusahaan sebesar Rp91.129.840.351.

Furthermore, in connection with the resolution on the Second Meeting Agenda as mentioned above, the Meeting has decided to pay cash dividends to the Company's shareholders amounting to Rp91,129,840,351.

Yang berhak mendapatkan dividen adalah para pemegang saham menurut Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 sebagai berikut:

Those entitled to receive dividends are shareholders according to the Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividends for the 2021 Financial Year as follows:

No.	Keterangan Description	Tanggal Date
1.	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)** End Stock Trading Date with Dividend Rights (Cum Dividend)	
	1. Pasar Reguler dan Negosiasi Regular and Negotiated Markets	1 Juli 2022 July 1, 2022
	2. Pasar Tunai Cash Market	5 Juli 2022 July 5, 2022
2.	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)** End Stock Trading Date without Dividend Rights (Ex Dividend)	
	1. Pasar Reguler dan Negosiasi Regular and Negotiated Markets	4 Juli 2022 July 4, 2022
	2. Pasar Tunai Cash Market	6 Juli 2022 July 6, 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*) Shareholders List Date entitled to Dividends (Recording Date)	5 Juli 2022 July 5, 2022
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022 Cash Dividend Payment Date for 2022 Financial Year	27 Juli 2022 July 27, 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 5 juli 2022 dan/ atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 5 Juli 2022.
2. Pembayaran Dividen:
   a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemidahbukuan ke rekening Pemegang Saham yang Berkah yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang berhak kepada Biro Administrasi Efek Perusahaan, yaitu PT EDI Indonesia ("EDI"), beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@ediindonesia.co.id atau *corporate secretary* Perusahaan, beralamat di Gedung Citra Towers, Tower Utara Lantai 21, Jl. Benyamin Suaeb, Kav: corsec@ipcmarine. co.id paling lambat tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp10.000,-.
   b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan pada tanggal 27 Juli 2022.
3. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Procedures for Cash Dividends Distribution:

1. Cash Dividends will be distributed to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on July 5, 2022, and/ or owners of Company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on July 5, 2022.
2. Dividend Payment:
   a. For entitled Shareholders whose shares are still in script (physical), Dividend payments will be made by transferring the book to the account of the Eligible Shareholder who has provided the name of the bank and account number in the name of the Eligible Shareholder to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT EDI Indonesia ("EDI"), having its address at the Securities Administration Services Office, Wisma SMR Floor 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@ediindonesia.co.id or Corporate Secretary of the Company, located at Citra Towers Building, North Tower Floor 21, Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kebon Blank Kemayoran, Jakarta 10630, Tel. (021) 4306789, email: corsec@ipcmarine.co.id no later than July 6, 2022, at 16.00 WIB accompanied by a photocopy of KTP or passport according to the address in the Register of Shareholders via a stamped letter of Rp. 10,000,-.
   b. For entitled Shareholders whose shares are registered in KSEI's collective custody, payment will be made through KSEI and Entitled Shareholders will receive payment from the relevant KSEI Account Holder on July 27, 2022.
3. Dividends to be distributed are subject to tax in accordance with applicable laws and regulations. Therefore, Eligible Shareholders are requested to pay attention to the following matters:



a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan *copy* NPWP kepada KSEI atau EDI paling lambat tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
   i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
   ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
   i) Dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
   ii) Tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 TAHUN 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau EDI (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 5 Juli 2022 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

a. For Eligible Shareholders who are Domestic Taxpayers who have not included their Taxpayer Identification Number ("NPWP"), they are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or EDI no later than July 5, 2022, at 16.00 WIB. In accordance with Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021 concerning the Implementation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax, and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, Cash Dividends are not deducted from Income Tax (PPh) for:
   i) Domestic Individual Taxpayers with the condition that the Dividends must be invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia within a certain period. If the Individual Taxpayer does not meet these requirements, then the Income Tax (PPh) payable on Dividends must be paid by the domestic Individual Taxpayer himself as regulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021.
   ii) Domestic Corporate Taxpayers.
b. For Eligible Shareholders who are Overseas Taxpayers whose shares:
   i) Placed in KSEI collective custody, or
   ii) Not included in KSEI's collective custody (holding shares in scrip form), and whose tax deductions will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B), must comply with the requirements of Article 26 of Law no. 36 OF 2008 concerning Income Tax as well as submitting a Certificate of Domicile ("SKD") to KSEI (for those whose shares are in collective custody) or EDI (for those whose shares are not included in KSEI's collective custody or shareholders in scrip form), no later than July 6, 2022, at 16:00 WIB, using the format and procedures as stipulated in Directorate General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements. Without an SKD in the format referred to, Cash Dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 tanggal 14 April 2022

Resolutions of the 2022 Extraordinary GMS on April 14, 2022

Penyelenggaraan RUPS
Holding of GMS

Hari/Tanggal Day/Date	:	Kamis, 14 April 2022 Thursday, April 14, 2022
Waktu Time	:	Pukul 10.16 WIB s/d 10.45 WIB
Tempat Location	:	*Online* melalui Media Video Telekonferensi dan Gedung Citra Tower, Tower Utara Lt. 21 Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kemayoran, Jakarta 10630
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Present Members of the Board of Commissioners and Directors	:	1. Dewan Komisaris a. Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) b. Eko Putro Adijayanto (Komisaris) c. Sayed Junaidi Rizaldi (Komisaris Independen) d. Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) 2. Direksi a. Amri Yusuf (Direktur Utama) b. Shanti Puruhita (Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) c. Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) d. Rizki Pribadi Hasan (Direktur Keuangan dan SDM/Direktur Independen) 1. Board of Commissioners a. Zuhri Iryansyah (President Commissioner) b. Eko Putro Adijayanto (Commissioner) c. Sayed Junaidi Rizaldi (Independent Commissioner) d. Bay Mokhamad Hasani (Independent Commissioner) 2. Board of Directors a. Amri Yusuf (President Director) b. Shanti Puruhita (Director of Commercial and Business Development) c. Muhammad Iqbal (Director of Fleet Management and Operation) d. Rizki Pribadi Hasan (Direktur Independen Director of Finance and HR/Independent Director)
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on the absence of the Board of Commissioners and Directors at the GMS	:	-

Tahapan Pelaksanaan RUPS
GMS Holding Stages

8 Maret 2022 March 8, 2022	→	**23 Maret 2022** March 23, 2022	→	**14 April 2022** April 14, 2022	→	**18 April 2022** April 18, 2022
Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. AD-330/8/3/1/MS-22. GMS Announcement to Shareholders via Letter No. AD-330/8/3/1/MS-22		Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. AD-330/23/3/1/MS-22 GMS Summons to Shareholders via Letter No. AD-330/23/3/1/MS-22		Pelaksanaan RUPSLB *Online* melalui Media Video Telekonferensi dan Gedung Citra Tower, Tower Utara Lt. 21 Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kemayoran, Jakarta 10630 The EGMS was conducted Online via Video Teleconference at the Citra Tower Building, North Tower, 21st Floor, Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kemayoran, Jakarta 10630		Berita Acara RUPS dimuat dalam Risalah RUPS No. AD-330/18/4/1/MS-22 GMS Minutes in document No. AD-330/18/4/1/MS-22

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perusahaan yang hadir sebanyak 4.633.216.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 87,80% dari 5.284.811.100 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Annual GMS Resolutions

The Extraordinary GMS for the 2022 financial year saw the participation of the entire Board of Commissioners and Directors, along with Company Shareholders representing 4,633,216,000 shares with valid votes, equivalent to 87.80% of the 5,284,811,100 total shares eligible for voting.

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT EDI Indonesia dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara dan Notaris Ashoya Ratam, untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

To ensure accuracy, PT EDI Indonesia was appointed as an independent party to validate the votes, with further validation and announcement of results conducted by Notary Ashoya Ratam.

Berikut hasil Keputusan RUPSLB Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023.

The subsequent sections detail the outcomes of the EGMS Resolutions dated April 14, 2022, and the subsequent actions taken by Company Management until the end of 2023.

RUPS Luar Biasa Tahun 2022 tanggal 14 April 2022
Extraordinary GMS for the Financial Year 2022 dated April 14, 2023

Mata Acara Rapat ke-1:
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.

Hasil keputusan:
Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan yaitu:

1. Menyetujui memberhentikan tuan SAYED JUNAIDI RIZALDI sebagai Komisaris Independen Perusahaan dan mengangkat nyonya R.R. DEWI ARIYANI sebagai Komisaris Perusahaan untuk menggantikan jabatan tuan SAYED JUNAIDI RIZALDI sebagai Komisaris Independen Perusahaan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui memberhentikan tuan EKO PUTRO ADIJAYANTO sebagai Komisaris Perusahaan dan mengangkat tuan HARY KRISWANTO sebagai Komisaris Independen Perusahaan untuk menggantikan jabatan tuan EKO PUTRO ADIJAYANTO sebagai Komisaris Perusahaan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui memberhentikan tuan RIZKI PRIBADI HASAN sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perusahaan dan mengangkat nyonya REINI DELFIANTI sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perusahaan untuk menggantikan jabatan tuan RIZKI PRIBADI HASAN sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perusahaan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
4. Dengan ketentuan masa Jabatan nyonya R.R DEWI ARIYANI sebagai Komisaris Perusahaan, tuan HARY KRISWANTO sebagai Komisaris independen Perusahaan, dan nyonya REINI DELFIANTI sebagai Direktur Keuangan SDM Perusahaan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Komisaris dan anggota Direksi yang digantikannya.
5. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:
   DEWAN KOMISARIS:
   Komisaris Utama :ZUHRI IRYANSYAH
   Komisaris : R.R. DEWI ARIYANI
   Komisaris Independen : HARY KRISWANTO
   Komisaris Independen : BAY MOKHAMAD HASANI
   DIREKSI:
   Direktur Utama : AMRI YUSUF
   Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : SHANTI PURUHITA
   Direktur Armada dan Operasi : MUHAMMAD IQBAL
   Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : REINI DELFIANTI
6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2022.

First Meeting Agenda:
Approval of Changes to the Composition of the Company's Management.

Resolutions:
Approval of Changes to the Composition of the Company's Management as follows:

1. Approved the dismissal of Mr. SAYED JUNAIDI RIZALDI as Independent Commissioner of the Company and appointed Mrs. R.R. DEWI ARIYANI as Commissioner of the Company to replace Mr. SAYED JUNAIDI RIZALDI, effective immediately after the Meeting.
2. Approved the dismissal of Mr. EKO PUTRO ADIJAYANTO as Commissioner of the Company and appointed Mr. HARY KRISWANTO as Independent Commissioner of the Company to replace Mr. EKO PUTRO ADIJAYANTO, effective immediately after the Meeting.
3. Approved the dismissal of Mr. RIZKI PRIBADI HASAN as Director of Finance and Human Resources of the Company and appointed Mrs. REINI DELFIANTI as Director of Finance and Human Resources of the Company to replace Mr. RIZKI PRIBADI HASAN, effective immediately after the Meeting.
4. The term of office for Mrs. R.R DEWI ARIYANI as Commissioner of the Company, Mr. HARY KRISWANTO as Independent Commissioner of the Company, and Mrs. REINI DELFIANTI as Director of Finance and HR of the Company is for the remaining term of office of the members of the Commissioners and members of the Board of Directors they are replacing.
5. Therefore, as of the closing of the Meeting, the composition of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company will be as follows:
   BOARD OF COMMISSIONERS:
   President Commissioner :ZUHRI IRYANSYAH
   Commissioner : R.R. DEWI ARIYANI
   Independent Commissioner : HARY KRISWANTO
   Independent Commissioner : BAY MOKHAMAD HASANI
   BOARD OF DIRECTORS:
   President Director: AMRI YUSUF
   Director of Commercial and Business Development : SHANTI PURUHITA
   Director of Fleet Management and Operation : MUHAMMAD IQBAL
   Director of Finance and Human Resources : REINI DELFIANTI
6. Approved granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to declare in a separate notarial deed and take all necessary actions in connection with changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors in accordance with applicable laws and regulations.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2022.

RUPS Luar Biasa Tahun 2022 tanggal 14 April 2022
Extraordinary GMS for the Financial Year 2022 dated April 14, 2023

Mata Acara Rapat ke-2:
Persetujuan Perubahan Logo Perusahaan.

Hasil keputusan:
Menyetujui perubahan logo Perusahaan efektif sejak tanggal 15 April 2022. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan logo Perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2022.

First Meeting Agenda:
Approval of Changes to the Company's Logo.

Resolutions:
Approved the change to the Company's logo, effective April 15, 2022, and granted power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to declare it in a separate notarial deed and take all necessary actions in connection with the change to the Company's logo in accordance with applicable laws and regulations.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2022.

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022

Resolutions of the 2022 Extraordinary on December 6, 2022

Penyelenggaraan RUPS
Holding of GMS

Hari/Tanggal Day/Date	:	Selasa, 6 Desember 2022 Tuesday, December 6, 2022
Waktu Time	:	Pukul 14.20 WIB s/d 14.39 WIB
Tempat Location	:	Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Present Members of the Board of Commissioners and Directors	:	1. Dewan Komisaris a. Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) b. R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) c. Hary Kriswanto (Komisaris Independen) d. Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) 2. Direksi a. Shanti Puruhita (Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) b. Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) c. Reini Delfianti (Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia) 1. Board of Commissioners a. Zuhri Iryansyah (President Commissioner) b. R.R. Dewi Ariyani (Commissioner) c. Hary Kriswanto (Independent Commissioner) d. Bay Mokhamad Hasani (Independent Commissioner) 2. Board of Directors a. Shanti Puruhita (Director of Commercial and Business Development) b. Muhammad Iqbal (Director of Fleet Management and Operation) c. Reini Delfianti (Director of Finance and Human Resources)
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on the absence of the Board of Commissioners and Directors at the GMS	:	-

Tahapan Pelaksanaan RUPS
GMS Holding Stages

28 Oktober 2022 October 28, 2022	→	14 November 2022 November 14, 2022	→	6 Desember 2022 December 6, 2022	→	7 Desember 2022 December 7, 2022
Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. KU-31/28/10/1/MS-22 GMS Announcement to Shareholders via Letter No. KU-31/28/10/1/MS-22		Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. AD-330/14/11/1/MS-22 GMS Summons to Shareholders via Letter No. AD-330/14/11/1/MS-22		Pelaksanaan RUPSLB *Online* melalui Media Video Telekonferensi dan Gedung Citra Tower, Tower Utara Lt. 21 Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kemayoran, Jakarta 10630 The EGMS was conducted Online via Video Teleconference at the Citra Tower Building, North Tower, 21st Floor, Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kemayoran, Jakarta 10630.		Berita Acara RUPS dimuat dalam Risalah RUPS No. AD-330/7/12/1/MS-22 GMS Minutes in document No. AD-330/7/12/1/MS-22

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perusahaan yang hadir sebanyak 4.633.216.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 87,80% dari 5.284.811.100 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT EDI Indonesia dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara dan Notaris Ashoya Ratam, untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Berikut hasil Keputusan RUPSLB Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023.

Extraordinary GMS Resolutions

The Extraordinary GMS for the 2022 financial year saw the participation of the entire Board of Commissioners and Directors, along with Company Shareholders representing 4,633,216,000 shares with valid votes, equivalent to 87.80% of the 5,284,811,100 total shares eligible for voting.

To ensure accuracy, PT EDI Indonesia was appointed as an independent party to validate the votes, with further validation and announcement of results conducted by Notary Ashoya Ratam.

The subsequent sections detail the outcomes of the EGMS Resolutions on December 6, 2022, and the subsequent actions taken by Company Management until the end of 2023.



RUPS Luar Biasa Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022
Extraordinary GMS for the Financial Year 2022 dated December 6, 2022

Mata Acara Rapat ke-1:
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.

Hasil keputusan:
Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan yaitu:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Amri Yusuf sebagai Direktur Utama Perusahaan terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya.
2. Memberhentikan Ibu Shanti Puruhita sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perusahaan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Mengangkat Ibu Shanti Puruhita sebagai Direktur Utama Perusahaan untuk menggantikan jabatan Bapak Amri Yusuf sebagai Direktur Utama Perusahaan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
4. Dengan ketentuan masa jabatan Ibu Shanti Puruhita sebagai Direktur Utama Perusahaan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya.
5. Menunjuk Ibu Shanti Puruhita untuk menjalankan pekerjaan Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis yang lowong sampai dengan diangkatnya seorang Direktur untuk mengisi jabatan dimaksud.
6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:
   DEWAN KOMISARIS:
   Komisaris Utama :ZUHRI IRYANSYAH
   Komisaris : R.R. DEWI ARIYANI
   Komisaris Independen : HARY KRISWANTO
   Komisaris Independen : BAY MOKHAMAD HASANI

   DIREKSI:
   Direktur Utama : AMRI YUSUF
   Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : SHANTI PURUHITA
   Direktur Armada dan Operasi : MUHAMMAD IQBAL
   Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : REINI DELFIANTI
7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang-kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindak lanjuti di tahun 2022.

First Meeting Agenda:
Approval of Changes to the Composition of the Company's Management..

Resolutions:
Approval of Changes to the Composition of the Company's Management as follows:
1. Approved the resignation of Mr. Amri Yusuf as President Director of the Company, effective immediately.
2. Dismissed Mrs. Shanti Puruhita from her position as Director of Commercial and Business Development of the Company, effective upon the conclusion of the Meeting.
3. Appointed Mrs. Shanti Puruhita as President Director of the Company, replacing Mr. Amri Yusuf, effective immediately following the conclusion of the Meeting.
4. Mrs. Shanti Puruhita's term of office as President Director of the Company will be for the remaining duration of the term of the outgoing member of the Board of Directors.
5. Appointed Mrs. Shanti Puruhita to temporarily take on the vacant position of Director of Commercial and Business Development until a permanent Director is appointed.
6. With the dismissal and appointments, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors will be as follows:
   BOARD OF COMMISSIONERS:
   President Commissioner :ZUHRI IRYANSYAH
   Commissioner : R.R. DEWI ARIYANI
   Independent Commissioner : HARY KRISWANTO
   Independent Commissioner : BAY MOKHAMAD HASANI

   BOARD OF DIRECTORS:
   President Director : AMRI YUSUF
   Director of Commercial and Business Development : SHANTI PURUHITA
   Director of Fleet Management and Operation : MUHAMMAD IQBAL
   Director of Finance and Human Resources : REINI DELFIANTI
7. Approved granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to declare in a separate notarial deed and take all necessary actions in connection with changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors in accordance with applicable laws and regulations.

Follow-up on Resolution:
The resolutions have been realized in 2022.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan alat kelengkapan Perusahaan yang secara garis besar berwenang dan mempunyai tugas pokok secara kolegial mengawasi, memberikan masukan atau saran serta memberikan arahan kepada Direksi untuk menjalankan tugas dan wewenang Perusahaan di dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is an essential component of the Company, entrusted with the collective oversight, provision of guidance, and offering of recommendations to the Board of Directors to steer the Company towards fulfilling its vision and mission.

Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab terhadap Pemegang Saham, khususnya dalam mengawasi kebijakan Direksi terkait operasional Perusahaan yang mengikuti rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Dalam hal ini, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi memiliki kemampuan yang relevan untuk menjalankan tugas-tugas nya dan sejalan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Dewan Komisaris

Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan dimulai dengan tahapan penentuan sumber bakal calon, penjaringan, penilaian serta usulan pengangkatan. Dalam pengangkatan Dewan Komisaris, Pemegang Saham telah mempertimbangkan kriteria dan persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluasi serta gambaran singkat *track record* yang bersangkutan, hal ini mengacu kepada pada Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/06/2020,. Seluruh anggota Komisaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan umum, diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Perusahaan memiliki Pedoman Dewan Komisaris yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pedoman tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: HK.56/4/10/3/ MS-21 yang disahkan tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Pedoman tersebut senantiasa ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala sesuai perkembangan peraturan dan *best practices* terkini.

Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris terhitung efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian tersebut dikarenakan berdasarkan kenyataan, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:

- Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
- Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
- Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Mengundurkan diri.

Moreover, the Board of Commissioners bears responsibility towards the Shareholders, particularly in overseeing the implementation of the Board of Directors' strategies aligned with the approved business plan by the Board of Commissioners and Shareholders. In this case, the Board of Commissioners is accountable for ensuring that the Board of Directors possesses the requisite competencies and adheres to prevailing laws and regulations.

Board of Commissioners Appointment

The process for appointing the Company's Board of Commissioners commences with identifying potential candidates, followed by thorough screening, assessment, and nomination. Shareholders carefully consider candidates based on predetermined criteria and requirements, as outlined in the Regulation of the Minister of SOE PER-04/MBU/06/2020, along with an evaluation of their track record. All appointed Commissioners met the requirements, including possessing expertise, integrity, leadership skills, honesty, exemplary conduct, and a strong commitment to advancing the Company's goals in compliance with relevant regulations.

Board of Commissioners Work Guideline

To fulfill its functions and duties effectively, the Board of Commissioners adheres to the Board of Commissioners Guidelines, serving as a roadmap for implementing its responsibilities. These guidelines are outlined in Joint Decree Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021, focusing on the Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Regular review and updates ensure alignment with evolving regulatory requirements and best practices.

Board Commissioners Members Term of Office

The term of office for the Board of Commissioners begins from the date set by the GMS and extends until the conclusion of the 5th Annual GMS following the appointment and may be reappointed for an additional 1 (one) more period without diminishing the authority of GMS to dismiss any members at any time.

Board Commissioners Resignation and Dismissal Mechanism

Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time through GMS resolution, provided reasons are stated. Dismissal may occur if the Commissioner:

- Fails to fulfill their duties adequately.
- Violates statutory regulations or provisions of the Articles of Association.
- Engages in actions detrimental to the Company or the country.
- Found guilty by a court decision with permanent legal force.
- Resigns.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2023

Di tahun 2023, terdapat perubahan komposisi dan susunan Dewan Komisaris, sehubungan dengan wafatnya salah satu anggota Komisaris Independen Perusahaan, yakni Bapak Hary Kriswanto pada tanggal 24 Juni 2023.

Berikut kronologi perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana terlampir berikut ini.

Board of Commissioners Members Composition, Amount, and Appointment Basis throughout 2023

In 2023, changes to the composition of the Board of Commissioners occurred due to the passing of one of the Company's Independent Commissioners, Mr. Hary Kriswanto, on June 24, 2023.

The chronology of these changes is outlined below.

Kronologi Perubahan Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan Per 31 Desember 2023
Chronology of Changes to the Composition and Structure of the Company's Board of Commissioners
As of December 31, 2023

Jabatan Position	1 Januari – 24 Juni 2023 1 January – 24 June 2023	24 Juni – 31 Desember 2023 24 June – 31 December 2023
Komisaris Utama President Commissioner	Zuhri Iryansyah	Zuhri Iryansyah
Komisaris Commissioner	R.R. Dewi Ariyani	R.R. Dewi Ariyani
Komisaris Independen Independent Commissioner	Bay Mokhamad Hasani	Bay Mokhamad Hasani
Komisaris Independen Independent Commissioner	Hary Kriswanto	

Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember adalah sebagai berikut:

The composition and structure of the Company's Board of Commissioners as of December 31 is as follows:

Komposisi serta Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023
Board of Commissioners Composition and Structure as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Office Term	Periode Jabatan Office Term	Dasar Pengangkatan Establishment Basis
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	13 Oktober 2020 – RUPST 2025 October 13, 2020 – AGMS 2023	Ke-1 First	Akta Notaris No. 13 tanggal 13 Oktober 2020 Notary Deed No. 13 dated October 13, 2020
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	14 April 2022 – RUPST 2027 April 14, 2022 – AGMS 2027	Ke-1 First	Akta Notaris No. 28 tanggal 14 April 2022 Notary Deed No. 28 dated April 14, 2022
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	15 Juli 2020 – RUPST 2025 July 15, 2020 – AGMS 2025	Ke-1 First	Akta Notaris No. 24 tanggal 15 Juli 2020 Notary Deed No. 24 dated July 15, 2020

Independensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusannya.

Board of Commisisoner Independency

Throughout 2023, there were no situations that have potential conflicts of interest faced by any members of the Board of Commissioners in making decisions.

Status Independensi Dewan Komisaris Tahun 2023
Board of Commissioners Independency Status in 2023

Kriteria Criteria	Independensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Independency			
	Zuhri Iryansyah	R. R. Dewi Ariyani	Bay Mokhamad Hasani	Hary Kriswanto*
Bukan Anggota Manajemen Perusahaan. Not a member of the Company's Management.	✓	✓	✓	✓
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Free from affiliation with any business or personal relationships that could influence decision-making.	✓	✓	✓	✓
Bukan pemegang saham mayoritas Perusahaan atau pekerja yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perusahaan. Not part of the Company's majority shareholder or directly associated with the majority shareholder.	✓	✓	✓	✓
Bukan Pekerja atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Not an Employee or executive at the company or any of its affiliation within 3 (three) years prior to joining the Board of Commissioners.	✓	✓	✓	✓
Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pekerja yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Not a primary professional advisor or consultant for the Company or its affiliates, or in direct contact with such service providers within 3 (three) years prior to joining the Board of Commissioners.	✓	✓	✓	✓
Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pekerja dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama. Not a supplier or primary customer of the Company or its affiliates, or an employee with direct or indirect contact with such suppliers or customers.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya sebagai Direksi. Not engaged in any contractual relationship with the company or its affiliates as a Director.	✓	✓	✓	✓
Seluruh Komisaris Perusahaan sebagaimana Disebutkan di atas Telah Memenuhi Kriteria Independensi. All Company Commissioners as Mentioned above Have Fulfilled the Independence Criteria.				

*) Tidak lagi menjabat dalam jajaran Komisaris sejak 24 Juni 2023.
*) No longer serves as a Commissioner since June 24 2023.









Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang Perusahaan, rencana kerja dan anggaran Perusahaan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak/golongan tertentu.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
4. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan.
6. Membentuk komite Audit.
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

Board of Commissioners Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners is entrusted with supervising management policies and the overall course of management concerning both the Company and its business conducted by the Board of Directors, providing guidance to the Board of Directors, including overseeing the implementation of the Company's long-term plans, work plans, budgets, and adherence to the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations, all in the best interests of the Company and in alignment with its objectives.

The responsibilities of the Board of Commissioners include:

1. Providing advice to the Board of Directors for the Company's management, prioritizing the Company's interests over specific parties or groups.
2. Reviewing and evaluating the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the Company's Articles of Association.
3. Examining and approving periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors, and signing off on the annual report.
4. Segregating responsibilities among members of the Board of Commissioners.
5. Developing the annual work program for the Board of Commissioners and incorporating it into the Company's work plan and budget.
6. Establishing an Audit Committee.
7. Recommending a Public Accountant to the GMS.
8. Documenting minutes of Board of Commissioners meetings and maintaining copies.

9. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan yang bersangkutan dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris memiliki hak, sebagai berikut:

1. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan Pemegang Saham disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
3. Dewan Komisaris diberi honorarium dan tunjangan serta fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperoleh informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

Selain itu, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris dan mengangkat Satuan Pengawas Internal (SPI), jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk komite-komite selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.

9. Disclosing their and/or their family's share ownership in the Company and other companies, including any changes.
10. Reporting on supervisory tasks conducted during the previous financial year to the GMS.
11. Fulfilling other obligations related to supervisory duties and providing advice, ensuring they do not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.

Board of Commissioners Rights and Authorities

In fulfilling its supervisory duties, the Board of Commissioners possesses the following rights:

1. Request the attendance of the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors to attend Board of Commissioners meetings.
2. Temporarily suspend one or more members of the Board of Directors, with a majority vote, if they act contrary to the Articles of Association, cause losses to the Company, neglect their obligations, or for urgent reasons concerning the Company. The temporary suspension must be communicated in writing to the individual(s) involved and to the Shareholders, along with the reasons for such action.
3. Receive honorariums, allowances, and benefits, including post-service compensation, the nature and amount of which are determined by the GMS, considering applicable laws and regulations.
4. Access information about the Company in a timely, accurate, and comprehensive manner.

Additionally, the Board of Commissioners holds the authority to:

1. Review books, correspondence, and other documents, examine cash for verification purposes, inspect securities, and assess the Company's assets.
2. Access the premises, buildings, and offices utilized by the Company.
3. Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all matters related to the Company's management.
4. Be informed of all policies and actions undertaken or to be undertaken by the Board of Directors.
5. Summon the Board of Directors and/or other officials, with the Board of Directors' knowledge, to attend Board of Commissioners meetings.
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners and appoint an Internal Audit Unit (SPI), if deemed necessary.
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors as per the Articles of Association.
8. Establish committees, aside from the audit committee, if deemed necessary considering the Company's capabilities.
9. Engage experts for specific matters and within a designated timeframe, with expenses covered by the Company, if necessary.

10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
13. Memberikan persetujuan tertulis atas usulan/perbuatan Direksi, yaitu:
    a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
    b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangunan Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerjasama lainnya;
    c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
    d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
    e. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
    f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
    g. Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
    h. Menetapkan dan merubah Logo Perusahaan;
    i. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
    j. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
    k. Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
    l. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/ atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;
    m. Melakukan tindakan-tindakan lain yang nilainya sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yaitu:

10. Take actions to manage the Company under specific circumstances and for a defined period, in accordance with the Articles of Association and without violating applicable laws and regulations.
11. Attend Board of Directors meetings and provide insights on the matters discussed.
12. Exercise other supervisory powers, provided they do not contravene statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.
13. Provide written approval for the Board of Directors' proposals/actions, namely:
    a. Placing fixed assets as collateral for short-term credit withdrawals;
    b. Organizing cooperation with business entities or other parties for a period of more than 5 (five) years up to 10 (ten) years in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Building Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO), and other collaborations.
    c. Receive or provide medium/long term loans, except for loans (debts or receivables) arising from business transactions, and loans provided to the Company's subsidiaries with the provisions that the loans to the Company's subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
    d. Write off bad debts and dead goods inventory from the books;
    e. Releasing and writing off movable fixed assets with an economic life, which is generally applicable in the industry, for up to 5 (five) years;
    f. Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
    g. Determining the Company's Long Term Plan;
    h. Determine and change the Company Logo;
    i. Establishing subsidiaries and/or joint ventures;
    j. Establish foundations, organizations, and/or associations either directly or indirectly related to the Company;
    k. Charging fixed and routine Company costs for foundations, organizations, and/or associations either directly or indirectly related to the Company;
    l. Proposing representatives of the Company to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint venture companies and/or subsidiaries that provide significant contributions to the Company and/or have strategic value as determined by the GMS. m. Carrying out other actions with a value of up to 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not;
    m. Carrying out other actions with a value of up to 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, namely:

i) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
ii) Melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain;
iii) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
iv) Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP;
v) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
vi) Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*)
vii) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris wajib memberikan keputusan.

i) Pledging fixed assets for medium/long-term credit withdrawals;
ii) Making capital investments in other companies;
iii) Releasing capital participation in subsidiaries and/or joint ventures;
iv) Carrying out other actions that have not been specified in the RKAP;
v) Carrying out mergers, consolidations, takeovers, separations, and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;
vi) Binding the Company as a guarantor (borg or avalist);
vii) Within 30 (thirty) days from receipt of the request or complete explanation and documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners is obliged to provide a decision.

Pembagian Tugas Antar Dewan Komisaris

Dalam rangka penerapan GCG, Dewan Komisaris telah menetapkan pembagian tugas antar anggota. Pembagian tugas Dewan Komisaris Perusahaan tercantum dilakukan berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Rincian Tugas Komisaris Utama

Zuhri Iryansyah bertanggung jawab atas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi di bidang:

- Koordinator pembinaan dan pengawasan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. pengawasan manajemen, komersial, keuangan dan operasional.
- Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang SDM, Hukum dan Humas.
- Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang Teknik dan Armada.

Duties Segregation Among the Board of Commissioners Members

To implement GCG, the Board of Commissioners has segregated duties among its members. The duties segregation of the Company's Board of Commissioners is conducted based on the Minutes of the Board of Commissioners Meeting of PT Jasa Armada Indonesia Tbk dated October 23, 2020 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

President Commissioners Duties

Zuhri Iryansyah is tasked with supervising and advising the Board of Directors in the following areas:

- Coordinating the development and oversight of PT Jasa Armada Indonesia, Tbk. management, including commercial, financial, and operational aspects.
- Coordinating the development and oversight in the fields of HR, Law, and Public Relations.
- Coordinating the development and oversight in the Engineering and Fleet sectors.

Tabel Bidang Tugas Anggota Dewan Komisaris
Duties Segregation Among the Board of Commissioners Members

Nama Name	Jabatan Position	Uraian Tugas Duties
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	• Koordinator pembinaan dan pengawasan PT Jasa Armada Indonesia, Tbk. • Koordinator Pembinaan dan pengawasan manajemen, komersial, keuangan dan operasional. • Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang SDM, Hukum dan Humas. • Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang Teknik dan Armada. • Coordinating the development and supervision of PT Jasa Armada Indonesia, Tbk. • Coordinating management, commercial, financial, and operational development and supervision. • Coordinating development and supervision in the fields of HR, Law, and Public Relations. • Coordinating development and supervision in the Engineering and Fleet sector.
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	• Koordinator Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko. • Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang keuangan dan pengembangan usaha. • Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko. • Coordinating Finance and Risk Management. • Conducting guidance and supervision in the field of finance and business development. • Chairman of the Risk Management Monitoring Committee.
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang keuangan. • Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang SDM. • Providing guidance and supervision in the financial sector. • Conducting guidance and supervision in the HR sector.

Program Orientasi Bagi Anggota Dewan Komisaris yang Baru

Sebagaimana tercantum dalam *Board Manual*, Perseroan memiliki kebijakan program orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat. Program ini dirancang memberikan pemahaman dan gambaran mengenai kondisi perusahaan secara umum, nilai-nilai, visi dan misi perusahaan, pengenalan atas kegiatan usaha perusahaan, serta kebijakan, prosedur, dan penerapan tata kelola perusahaan. Kebijakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diatur dalam *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan tanggal 4 Oktober 2021.

Di tahun 2023, tidak terdapat program orientasi yang dilakukan Perusahaan untuk anggota Dewan Komisaris baru.

Orientation Program for New Members of the Board of Commissioners

According to the Board Manual, the Company maintains an orientation program policy for newly appointed members of the Board of Commissioners. This program aims to provide them with a comprehensive understanding of the Company's overall condition, its values, vision, and mission, an introduction to its business activities, as well as policies, procedures, and corporate governance implementation. The orientation policy for newly appointed members of the Board of Commissioners is outlined in PT Jasa Armada Indonesia's Board Manual Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021.

In 2023, the Company did not conduct an orientation program for new members of the Board of Commissioners.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Program pengembangan kompetensi dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi termuat dalam *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan tanggal 4 Oktober 2021. Adapun pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Competency Development Program

The Company is dedicated to implementing training and competency development programs for all members of the Board of Commissioners to support in implementing their duties and responsibilities effectively. This competency development program is deemed crucial to ensure that the Board of Commissioners remains updated on the latest developments in the Company's core business and relevant laws and regulations. The policy for training and enhancing the competency of members of the Board of Commissioners is outlined in PT Jasa Armada Indonesia's Board Manual Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021. The competency development initiatives that the Board of Commissioners took part in during 2023 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) Zuhri Iryansyah (President Commissioner)	Pelatihan Training	Audit Berbasis Risiko Risk-Based Audit	PMLI/20 Februari 2023 PMLI/ February 20, 2023	PMLI
R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) R.R. Dewi Ariyani (Commissioner)	Pelatihan Training	Audit Berbasis Risiko Risk-Based Audit	PMLI/20 Februari 2023 PMLI/20 Februari 2023	PMLI
Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) Bay Mokhamad Hasani (Independent Commissioner)	Pelatihan Training	Audit Berbasis Risiko Risk-Based Audit	PMLI/20 Februari 2023 PMLI/ February 20, 2023	PMLI
Hary Kriswanto (Komisaris Independen)* Hary Kriswanto (Independent Commissioner)*	Pelatihan Training	Audit Berbasis Risiko Risk-Based Audit	PMLI/20 Februari 2023 PMLI/ February 20, 2023	PMLI

*) Tidak lagi menjabat dalam jajaran Komisaris sejak 24 Juni 2023
*) No longer serving as Commissoner as of June 24, 2023

Jenis Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan untuk:

1. Mengagungkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;

Types of Decisions that Require Approval from the Board of Commissioners

The following actions can only be carried out by the Board of Directors after obtaining written approval from the Board of Commissioners, while adhering to applicable laws, regulations, and the Company's articles of association:

1. Pledging fixed assets for short-term credit withdrawals;

2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun berupa lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja sama Operasi (KSO), Bangunan Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/*BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerjasama lainnya;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak Perusahaan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan struktur organisasi Perusahaan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
7. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Program Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkomitmen pada program kerja terarah untuk meningkatkan kinerja Perusahaan di tahun 2023. Dukungan strategis kepada manajemen eksekutif dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi landasan dalam mencapai tujuan. Keseluruhan program ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan memastikan kesuksesan jangka panjang Perusahaan. Program Kerja Dewan Komisaris Perusahaan pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi
3. Rapat dengan Pemegang Saham
4. Program Kunjungan Kerja ke Lapangan
5. Program Pengembangan dan Pelatihan Dewan Komisaris
6. Program Pengendalian Internal

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2023

Berlandaskan pada tugas inti dan fungsi Dewan Komisaris yang telah dirinci dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023, yang mencakup sejumlah program utama yakni rapat Dewan Komisaris, kegiatan pengawasan dan pemberian arahan/nasihat, kunjungan kerja lapangan serta program pengembangan bagi Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan sejalan dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, antara lain:

1. Rapat Rutin Dewan Komisaris dalam rangka pengurusan dan pengelolaan PT Jasa Armada Indonesia Tbk dilakukan setiap bulan dengan waktu sesuai kesepakatan Dewan Komisaris.
2. Pembahasan dalam Rangka Penyusunan KPI Dewan Komisaris Tahun 2023;

2. Entering into cooperation with business entities or other parties for a period of more than 5 (five) years up to 10 (ten) years, in forms such as licenses, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO), and other collaborations;
3. Receiving or providing medium/long-term loans, excluding loans arising from business transactions, with the provision that loans to the Company's subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
4. Writing off bad debts and obsolete inventory from the books;
5. Disposing of the Company's movable fixed assets with an economic life generally applicable in the industry, up to 5 (five) years;
6. Determining the Company's organizational structure one level below the Board of Directors;
7. Carrying out other actions not stipulated in the Company's Work Plan and Articles of Association.

Board of Commissioners Work Program

The Board of Commissioners is dedicated to implementing a targeted work program aimed at enhancing the Company's performance in 2023. Strategic support to executive management and collaboration with all stakeholders will serve as the foundation for achieving objectives. This comprehensive program aims to generate sustainable added value and ensure the Company's long-term success. The Company's Board of Commissioners Work Program in 2023 is outlined as follows:

1. Board of Commissioners Meeting
2. Coordination Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors
3. Meeting with Shareholders
4. Field Visit Program
5. Board of Commissioners Development and Training Program
6. Internal Control Program

Implementation the Board of Commissioners Duties in 2023

Throughout 2023, the Board of Commissioners diligently fulfilled its duties and responsibilities in supervising the Company, as outlined in the 2023 Work Plan and Budget. This included conducting a series of main programs such as Board of Commissioners meetings, supervision activities, providing direction/advice, field work visits, and development programs for the Board of Commissioners.

Throughout 2023, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities in supervising the Company in line with the 2023 Budget Work Plan, including:

1. Routine Meetings of the Board of Commissioners in the context of management and management of PT Jasa Armada Indonesia Tbk are held every month with a time according to the agreement of the Board of Commissioners.
2. Discussion on the preparation of KPIs for the Board of Commissioners in 2023;

3. Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022, laporan kinerja PT Jasa Armada Indonesia Tbk dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2023 serta jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP;
4. Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2023 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2023 dalam Rangka Persiapan Pra RUPS dan RUPS;
5. Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent serta hal strategis lainnya.
6. Pembahasan Laporan Manajemen PT Jasa Armada Indonesia Tbk sampai dengan akhir tahun 2022;
7. 7. Pembahasan Laporan Tahunan (Audited) Tahun 2023 dalam rangka pelaporan konsolidasi dan persiapan Pra RUPS dan RUPS dengan Pemegang Saham;
8. Pembahasan Laporan Manajemen PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang dilaksanakan Tahun 2023 dalam rangka pembahasan dengan Pemegang Saham;
9. Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan, Laporan Kinerja PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2023 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP;
10. Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2023 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2023 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS dengan Pemilik;
11. Pelaksanaan rapat-rapat khusus dengan masing-masing Partnership (Direktorat) PT JAI Tbk yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent serta hal strategis lainnya.

3. Discussion in order to determine the KAP for the implementation of the General Audit of the Financial Statements for Fiscal Year 2022, the performance report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk and compliance with laws and regulations in 2023 as well as the schedule and Audit Implementation Program by KAP;
4. Discussion on the Proposed Work Plan and Budget of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Year 2023 and KPI / Management Contract Year 2023 in Preparation for Pre-GMS and GMS;
5. Implementation of special meetings related to important/ urgent issues and other strategic matters.
6. Discussion of the Management Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk until the end of 2022;
7. Discussion of the Annual Report (Audited) Year 2023 in the context of consolidated reporting and preparation of Pre-GMS and GMS with Shareholders;
8. Discussion of the Management Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk implemented in 2023 in order to discuss with the Shareholders;
9. Discussion in order to determine KAP for the implementation of General Audit of Financial Statements, Performance Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Year 2023 as well as Schedule and Audit Implementation Program by KAP;
10. Discussion on the Proposed Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Year 2023 and KPI / Management Contract Year 2023 in preparation for Pre-GMS and GMS with the Owner;
11. Implementation of special meetings with each Partnership (Directorate) of PT JAI Tbk related to important/urgent issues and other strategic matters.

Penilaian Atas Kinerja Masing-Masing Komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung dibawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melakukan pengawasan, mengevaluasi dan me*review* kinerja Perusahaan sebagai bagian dari pertimbangan dalam pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi. Dasar penilaian terhadap kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris, antara lain dengan menilai keberhasilan dalam menyelesaikan program kerjanya, sesuai dengan realisasi pelaksanaan rencana kerja komite, frekuensi kehadiran rapat dan rekomendasi yang diberikan dalam tugasnya.

Assessment on Each Committee's Performance under the Board of Commissioners

In carrying out its duties and functions, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs under the Board of Commissioners, consisting of the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. These committees aid in supervising, evaluating, and reviewing the Company's performance, serving as part of the considerations in monitoring the Company's management by the Board of Directors. The basis for assessing the performance of Committees under the Board of Commissioners includes evaluating their success in completing their work program, assessing the realization of the implementation of the committee's work plan, reviewing the frequency of meeting attendance, and analyzing the recommendations provided in their duties.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners free from any financial, managerial, share ownership, and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders, as well as with the Company. This absence of relationships ensures that they can act independently

prinsip-prinsip GCG. Hal ini dilakukan terutama untuk menjaga independensi dan kebebasan dari campur tangan pihak lain.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris Perusahaan

Komposisi Komisaris Independen Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Per 31 Desember 2023, Komisaris Independen Perusahaan berjumlah 1 (satu) orang yaitu Bay Mokhamad Hasani yang diangkat sejak 15 Juli 2020 dan dinyatakan melalui Akta No. 24 tanggal 15 Juli 2020. Komposisi Komisaris Independen Perusahaan adalah lebih dari 20% atas keseluruhan Anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 3 (tiga) orang, dengan demikian, komposisi Komisaris Independen Perusahaan telah sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN.

Selain itu, komposisi Komisaris Independen Perusahaan ini juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengharuskan keberadaan Komisaris Independen mencapai 30% dari total anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, Perusahaan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, memastikan keberagaman dan independensi dalam pengambilan keputusan strategis.

Kriteria Penentuan dan Pemenuhan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar dapat diangkat sebagai Komisaris Independen Perusahaan, terdapat kriteria independensi yang tercantum di bawah ini:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan terafiliasi.
2. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
3. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.
4. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.
5. Rangkap jabatan komisaris maksimal 2 (dua) perusahaan.

Pernyataan tentang Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Pernyataan independensi Komisaris Independen, sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, yakni terkait Independensi Dewan Komisaris. Adapun sepanjang tahun 2023, tidak terdapat situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusannya.

in accordance with the principles of good corporate governance (GCG). This practice is essential to maintain their independence and freedom from interference by other parties.

Independent Commissioner Composition and Membership within the Company's Board of Commissioners Structure

The composition of the Company's Independent Commissioners is regulated by the Minister of State for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 regarding Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. As of December 31, 2023, the Company has 1 (one) Independent Commissioner, Mr. Bay Mokhamad Hasani, who was appointed on July 15, 2020, as stated in Deed No. 24 dated July 15, 2020. The composition of the Company's Independent Commissioner constitutes more than 20% of the total members of the Board of Commissioners, totaling 3 (three) people, thus, the composition of the Company's Independent Commissioners complies with the minimum requirement set forth in the Regulation of the Minister of SOE.

Additionally, the composition of the Company's Independent Commissioners also adheres to Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies, which regulates that Independent Commissioners make up 30% of the total members of the Board of Commissioners. By meeting this requirement, the Company upholds the principles of good corporate governance, ensuring diversity and independence in strategic decision-making processes.

Determination and Fulfillment Criteria of the Independent Commissioners Independency

The Company's Independent Commissioner ensures the effective functioning of the monitoring mechanism in accordance with statutory regulations. To be appointed as an Independent Commissioner of the Company, candidates must meet the following independence criteria:

1. They should not hold a Director position in an affiliated Company.
2. They should not have been employed by the Company or its affiliates within the last 1 (one) year.
3. They must not have any financial connections, either directly or indirectly, with the Company or other companies that provide services and products to the Company and its affiliates.
4. They must be free from conflicts of interest and business activities or other relationships that could impede or interfere with their ability to act or think independently within the scope of the Company.
5. They can concurrently hold the position of commissioner in a maximum of 2 (two) other companies.

Independence Statement of Each Independent Commissioner

As discussed earlier, the independence of the Independent Commissioners is crucial for the integrity of the Board of Commissioners. Throughout 2023, there have been no situations where members of the Board of Commissioners faced potential conflicts of interest when making decisions.

DIREKSI

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar, dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur Pengangkatan Direksi

Pengangkatan Direksi di lingkungan IPCM dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan SDM, yang dimulai dengan penentuan sumber bakal calon, penjaringan, penilaian serta usulan pengangkatan. Sebagai pertimbangan untuk mengangkat Anggota Direksi Perusahaan memiliki kriteria dan persyaratan serta diwajibkan lulus dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh fungsi *Talent Pool* yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham. Calon Anggota Direksi Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan umum, diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
Untuk Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- Meninggal dunia.
- Masa jabatannya berakhir.
- Diberhentikan berdasarkan keputusan.
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengundurkan diri.

Pedoman Kerja Direksi

Perusahaan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana tercantum dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/ MS-21 yang disahkan tanggal 4 Oktober 2021. Pedoman ini mengatur fungsi dan peran Direksi dalam menjalankan tugasnya, mencakup hal-hal Penyusunan dan penyampaian RJPP, penyusunan dan penyampaian RKAP, penyusunan dan penyampaian Laporan Berkala.

Masa Jabatan Anggota Direksi

Masa jabatan Direksi terhitung efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi yang bersangkutan sewaktu-waktu.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the Company organ entrusted with the authority and full responsibility for managing the Company in its best interests, aligning with the Company's aims and objectives, representing the Company both internally and externally at a court, as per the Articles of Association and Legislation, and is bound to uphold the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, and fairness. Each member of the Board of Directors is obligated to fulfill their duties and responsibilities in good faith, while adhering to applicable laws.

Board of Directors Appointment Procedure

The Board of Directors appointment within the IPCM follows the Minister of SOE Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources, which started from sourcing candidates, selecting, assessing, and submitting an appointment proposal. To be considered for a Board of Directors position, candidates must meet specific criteria and requirements and undergo a Fit and Proper Test conducted by the Talent Pool function organized by Shareholders. General requirements include expertise, integrity, leadership, honesty, good behavior, and a high dedication to advancing and developing the Company in accordance with applicable regulations.

The position of a member of the Board of Directors terminates under the following circumstances:

- Death.
- End of term.
- Dismissal based on resolution.
- No longer meeting the requirements as a Board of Directors member as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
- Resigned.

Board of Directors Work Guideline

The Company has established Guidelines and Work Rules for the Board of Directors, as outlined in the Work Procedures for the Board of Directors and Commissioners (Board Manual) of PT Jasa Armada Indonesia Number: HK.56/4/10/3/ MS-21, which was ratified on October 4, 2021. These Guidelines describe the functions and roles of the Board of Directors in implementing duties, which include the preparation and submission of RJPP, preparation and submission of RKAP, as well as the preparation and submission of Periodic Reports.

Board of Directors Member Office Term

The office term for the Board of Directors begins from the date determined by the GMS and lasts until the closing of the 5th Annual GMS after the appointment date. They can be reappointed for 1 (one) subsequent period, without diminishing the right of the GMS to dismiss any members of the Board of Directors at any time.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Prosedur terkait pemberhentian direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 03/03/2023 dan POJK 33/POJK.04/2014 dan juga Anggaran Dasar Perusahaan.
Untuk Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- Meninggal dunia.
- Masa jabatannya berakhir.
- Diberhentikan berdasarkan keputusan.
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengundurkan diri.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi di Sepanjang Tahun 2023

Ketentuan mengenai komposisi dan keanggotaan Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

- Jumlah Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perusahaan.
- Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang Anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- Komposisi dan pembagian tugas serta wewenang Direksi berdasarkan struktur organisasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Apabila pembagian tugas Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS maka pembagian tugas dan wewenang di antara Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Direksi Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Anggota Direksi, dengan demikian susunan keanggotaan Direksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Board of Directors Resignation and Dismissal Mechanism

Procedures regarding the Board of Directors dismissal of PT Jasa Armada Indonesia Tbk are governed by Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number 03/03/2023, POJK 33/POJK.04/2014, and the Company's Articles of Association.
The position of a Board of Directors member terminates under the following circumstances:

- Death.
- End of term.
- Dismissal based on resolution.
- No longer meeting the requirements as a Board of Directors member as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
- Resigned.

Board of Directors Member Composition, Number, Structure, and Appointment Basis Throughougt 2023

Provisions regarding the composition and membership of the Company's Board of Directors are as follows:

- The number of Directors is at least 1 (one) person and is adjusted to the needs, level of complexity, and strategic plans of the Company.
- If the Board of Directors consists of more than 1 (one) member, a member is appointed as President Director.
- The composition, segregation of duties, and authority of the Board of Directors based on the Company's organizational structure are determined by the GMS. If the segregation of duties is not determined by the GMS, it will be decided by the Board of Directors decree.

The appointment and dismissal of the Company's Directors are carried out by the GMS. Until the end of 2023, there will be no change in the composition of the Board of Directors, thus, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2023, is as follows:

Komposisi serta Susunan Direksi per 31 Desember 2023
Board of Directors Composition and Structure as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Office Term	Periode Jabatan Office Period	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Shanti Puruhita	Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Act. Commercial and Business Development Director	6 Desember 2022 – RUPST 2027 December 6, 2022	Ke-1 First	• Akta Notaris No. 24 tanggal 15 Juli 2020; • Akta Notaris Nomor 33 tanggal 17 Juni 2021; • Akta Notaris Nomor 16 tanggal 6 Desember 2022. • Notary Deed No. 24 dated July 15, 2020; • Notariy Deed Number 33 dated June 17, 2021; • Notary Deed Number 16 dated December 6, 2022.
Muhammad Iqbal	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operation	17 Juni 2021 - RUPST 2026 June 17, 2021 - AGMS 2026	Ke-1 First	• Akta Notaris Nomor 13 tanggal 13 Oktober 2020; • Akta Notaris Nomor 33 tanggal 17 Juni 2021. • Notary Deed Number 13 dated October 13, 2020; • Notary Deed Number 33 dated June 17, 2021.
Reini Delfianti	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HR	14 April 2022 – RUPST 2027 April 14, 2022 – AGMS 2027	Ke-1 First	Akta Notaris Nomor 29 tanggal 14 April 2022. Notary Deed Number 29 dated April 14, 2022.

Independensi Direksi

Independensi Direksi sangat dijaga agar dapat memberikan keputusan dan dapat melakukan pengelolaan perusahaan tanpa adanya benturan kepentingan. Direksi Perusahaan tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau kepemilikan saham dan/atau hubungan kepengurusan dengan Perusahaan maupun Perusahaan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen serta melaksanakan fungsi dan tugasnya secara individual maupun kolegial.

Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan demi kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas dan wewenang direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
   a. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan yang meliputi;
      - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan di dalam atau di luar negeri;
      - Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
      - Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      - Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan Perusahaan;
      - Mengangkat dan memberhentikan Satuan Pengawas Internal Perusahaan.

Board of Directors Independency

The independency of the Board of Directors is rigorously upheld to ensure the ability to make decisions and manage the company without any conflicts of interest. The Company's Board of Directors are prohibited from having financial or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or controlling shareholders. Additionally, Directors are not allowed to hold shares or management positions that could compromise their independence or affect their ability to fulfill their functions and duties independently or collectively.

Board of Directors Duties and Responsibilities

Directors are tasked with managing the Company in its best interests and in alignment with the Company's aims and objectives. They are also responsible for representing the Company internally and externally, subject to the limitations stipulated by applicable laws, regulations, the Articles of Association, and General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions.

As per the Company's Articles of Association, Directors have the following duties and authorities:

1. The Board of Directors is responsible for managing the company's affairs in the best interests of the company and in accordance with its aims and objectives, representing the company both internally and externally at court regarding any matters and events, subject to the limitations outlined in statutory regulations, the Articles of Association, and GMS Resolutions.
2. In fulfilling their duties, Directors holds the following authorities and obligations:
   a. Board of Directors hold the authority and obligations as follows:
      - Regulating the delegation of Directors' representation powers, both within and outside the court, to one or several specifically appointed Directors or employees, individually or jointly, as well as to other individuals, and the delegation of representation powers to Branch Heads or Representatives domestically or internationally.
      - Establishing provisions related to Company personnel, such as determining salaries, pensions, or other benefits for employees, in compliance with applicable laws, regulations, and GMS resolutions.
      - Appointing and dismissing Company employees in accordance with Company personnel regulations, as well as applicable laws and regulations.
      - Appointing and dismissing the Company's Corporate Secretary;
      - Appointing and dismissing the company's Internal Audit Unit;

- Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

b. Direksi berkewajiban untuk:
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;
- Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
- Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
- Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perusahaan lainnya;
- Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (11) ayat ini;
- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

- Performing all actions related to the management and ownership of the Company's assets, entering into agreements binding the Company with other parties, and representing the company in legal matters, subject to restrictions as stipulated by statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

b. The Board of Directors has the following obligation:
- Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in alignment with its aims, objectives, and business operations;
- Timely prepare the Company's Long Term Plan, Work Plan, Budget, and any amendments thereof, submitting them to the Board of Commissioners for approval;
- Provide explanations to the Board of Commissioners regarding the Company's Long Term Plan, Work Plan, and Budget;
- Generate a Shareholder List, Special List, and Minutes of Directors' Meetings;
- Produce an Annual Report to demonstrate accountability for the Company's management, along with financial documents as mandated by the Law on Company Documents;
- Prepare Financial Statements according to Financial Accounting Standards, forwarding them to the Public Accountant for audit;
- Submit Annual Reports, including Financial Statements, to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval and ratification;
- Offer explanations to the GMS concerning the Annual Report;
- Present the Balance Sheet and Profit and Loss Report, approved by the GMS, to the Minister responsible for Law and Human Rights as per statutory regulations;
- Maintain the Shareholders Register, Special Register, GMS Minutes, Commissioners Meeting Minutes, Directors Meeting Minutes, Annual Report, and Company financial documents, along with other Company documents;
- Store essential documents, including Shareholder Register, Special Register, GMS Minutes, Minutes of Commissioners Meetings, Minutes of Directors Meetings, Annual Report, Company financial documents, and other Company documents, at the Company's premises.
- Develop an accounting system complying with Financial Accounting Standards and internal control principles, particularly the segregation of management, recording, storage, and supervision functions.

- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
- Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris;
- Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perusahaan;
- Menjalankan kewajiban-kewajian lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Provide periodic reports as per applicable regulations and other reports as requested by the Board of Commissioners;
- Prepare the Company's organizational structure with detailed responsibilities;
- Offer explanations regarding all matters queried or requested by members of the Board of Commissioners;
- Develop and determine the Company's organizational structure.
- Fulfill other obligations as stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on statutory regulations.

Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dari Direksi. Hal ini diatur dalam Berita Acara Kesepakatan Direksi Nomor: AD.339/13/07/01/MS-21, dengan rincian sebagai berikut:

Segregation of Duties among Directors

Segregation of duties and authority among members of the Board of Directors aims to enhance the effectiveness of their functions. This is governed by the Minutes of Board of Directors Meeting Agreement Number: AD.339/13/07/01/MS-21, with the following details:

Tabel Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi
Segregation of Duties and Authorities among Directors

Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Supervising Coverage
Direktur Utama President Director	• Bertanggung jawab atas pengelolaan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan yang efektif dan efisien berdasarkan aturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. • Pembuat Kebijakan strategis dalam penentuan arah pengembangan bisnis perusahaan. • Berperan sebagai koordinator Dewan Direksi perusahaan. • Responsible for effectively and efficiently managing and ensuring the continuity of the Company's business in accordance with applicable laws, regulations, and principles of Good Corporate Governance. • Acts as the strategic policy maker in defining the direction of the company's business development. • Functions as the coordinator of the company's Board of Directors.
Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	• Menetapkan program kerja bidang keuangan dan SDM. • Menetapkan metode kerja secara efektif dan efisien sesuai pada bidang kerjanya. • Determines work programs related to finance and HR. • Establishes effective and efficient work methods tailored to the respective fields.
Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operation	Mengelola program kerja bidang armada dan operasi. Oversees work programs concerning fleet and operations management.
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Director of Commercial and Business Development	Mengelola program kerja bidang komersial dan pengembangan bisnis. Manages work programs focused on commercial and business development.

Program Orientasi Bagi Anggota Direksi yang Baru

Sebagaimana tercantum dalam *Board Manual*, Perusahaan memiliki kebijakan program orientasi bagi Anggota Direksi yang baru menjabat. Program ini dirancang untuk mendukung peningkatan pemahaman Direksi yang baru terhadap struktur organisasi dan operasional Perusahaan, terutama dalam konteks tanggung jawab pengelolaan Perusahaan yang telah diberikan kepada sebagai Direksi tersebut. Kebijakan program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat diatur dalam *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan tanggal 4 Oktober 2021.

Orientation Program for New Directors

As outlined in the Board Manual, the Company has an orientation program for newly appointed Directors. This program is designed to enhance the understanding of the Company's organizational and operational structure, particularly in relation to the management responsibilities entrusted to the Directors. The orientation program for newly appointed members of the Board of Directors is governed by PT Jasa Armada Indonesia Board Manual Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021.

Sehubungan dengan tidak adanya perubahan susunan dan komposisi Direksi di tahun 2023, maka program orientasi Perseroan tidak dilakukan.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh anggota Direksi guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Program pengembangan kompetensi dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan, mengantisipasi masalah yang timbul dikemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi termuat dalam *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan tanggal 4 Oktober 2021. Adapun pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Given that there were no changes to the composition of the Board of Directors in 2023, the Company did not conduct the orientation program.

Competency Development Program for the Board of Directors

The Company is dedicated to implementing training and competency development programs for all members of the Board of Directors to support the implementation of its duties and responsibilities. The competency development program holds significant importance as it enables the Board of Directors to stay abreast of the latest developments in the Company's core business, thereby anticipating future challenges for the Company's sustainability and advancement. The policy for training and enhancing the competency of members of the Board of Directors is outlined in PT Jasa Armada Indonesia Board Manual Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021. The competency development activities that the Board of Directors has followed in 2023 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Positin	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Types	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tempat/Tanggal** Location/Date	**Penyelenggara** Organizer
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) Shanti Puruhita (President Director and Act. Commercial and Business Development Director)	Pelatihan dan Webinar Training and Webinar	*Leader as a Coach*	Jakarta, 15 November 2023 Jakarta, November 15, 2023	PT Pelabuhan Indonesia
		APLOG Logistics Forum Webinar (*Diversification and Risk Management in Logistics Industry*)	*Online*, 25 Oktober 2023 Online, October 25, 2023	PT Angkasa Pura Logistik
		Pelatihan Audit Berbasis Risiko (Nomor: 203517906200210) Audit Training Risk Based Audit Training (Number: 203517906200210)	Surabaya, 20 Februari 2023 Surabaya, February 20, 2023	PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) Muhammad Iqbal (Director of Fleet Management and Operation)	Pelatihan dan Webinar Training and Webinar	*Qualified Chief Risk Officer* (QRCO)	Bogor, 31 Oktober 2023 Bogor, October 31, 2023	PT PMLI
		Pelatihan Audit Berbasis Risiko Risk-Based Audit Training	Surabaya, 20 Februari 2023 Surabaya, February 20, 2023	PT Jasa Armada Indonesia Tbk
		APLOG *Logistics Forum Webinar* (*Diversification and Risk Management in Logistics Industry*)	*Online*, 25 Oktober 2023 Online, October 25, 2023	PT Angkasa Pura Logistik
Reini Delfianti (Direktur Keuangan & SDM) Reini Delfianti (Director of Finance & HR)	Pelatihan dan Webinar Training and Webinar	*Leader as a Coach*	Jakarta, 15 November 2023 Jakarta, November 15, 2023	PT Pelabuhan Indonesia
		APLOG *Logistics Forum Webinar* (*Diversification and Risk Management in Logistics Industry*)	*Online*, 25 Oktober 2023 Online, 25 October 2023	PT Angkasa Pura Logistik
		Pelatihan Audit Berbasis Risiko (Nomor: 203517906200210) Audit Training Risk Based Audit Training (Number: 203517906200210)	Surabaya, 20 Februari 2023 Surabaya, February 20, 2023	PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2023

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sepanjang tahun 2023 sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun di awal tahun. Secara umum, pelaksanaan tugas Direksi sepanjang tahun 2023 adalah melalui rapat Direksi dan rapat bersama Dewan Komisaris.

Board of Directors' Duties Report in 2023

Throughout 2023, the Board of Directors diligently fulfilled its duties and responsibilities in accordance with the Company's Articles of Association and the Work Plan prepared at the year's outset. The implementation of the Board of Directors' duties primarily involved convening internal meetings and holding joint meetings with the Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan belum memiliki Komite di bawah Direksi. Sehingga, tidak terdapat informasi terkait penilaian kinerja Komite di bawah Direksi.

Assessment of Committee's Performance under the Board of Directors

Until the end of 2023, the Company does not have a Committee under the Board of Directors. Thus, there is no information regarding the assessment of Committees under the Board of Directors.



TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

TRANSPARENCY REGARDING BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

KEBIJAKAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi IPCM mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN. Pemilihan calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan melalui rangkaian mekanisme suksesi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham yang mengacu pada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memperhatikan unsur keberagaman dan disesuaikan dengan ukuran organisasi dan kebutuhan Perusahaan.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan saat ini belum menetapkan kebijakan terkait keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Proses penentuan kebijakan tersebut masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian kebijakan internal Perusahaan. Namun pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen Perusahaan, keahlian atau pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan Perusahaan, dan kemampuan untuk menyediakan waktu yang memadai dalam menjalankan tugasnya yang juga selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah memenuhi unsur-unsur keberagaman yang saling melengkapi baik dari sisi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, tingkat integritas, tingkat dedikasi, pemahaman mengenai isu-isu manajemen Perusahaan, dan keahlian atau pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan IPCM.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS SUCCESSION POLICY

The succession policy for the IPCM Board of Commissioners and Directors is governed by the Regulation of the Minister of SOE. The selection of candidates for these positions follows a succession process outlined in accordance with shareholders' provisions, referencing applicable regulations and laws. When determining the composition of the Board of Commissioners and Directors, the Company prioritizes diversity and tailors it to the organization's size and the Company's requirements.

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Currently, the Company has not established a policy regarding the diversity of the Board of Commissioners and Directors' composition. The process of formulating this policy is ongoing and involves developing and aligning internal Company policies. However, in appointing members to these positions, the Company considers various factors, including age, gender, education, experience, integrity, dedication, understanding of Company management issues, relevant skills or knowledge, and the ability to allocate sufficient time to fulfill their duties. This process adheres to the provisions of applicable laws and regulations.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors reflects a diverse range of attributes, including age, gender, education level, work experience, integrity, dedication, understanding of company management issues, and relevant skills or knowledge tailored to IPCM's requirements.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Pengalaman Kerja** Professional Experience	**Keahlian** Expertise	**Usia (per 31 Desember 2023)** Age (as of December 31, 2023)	**Jenis Kelamin** Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Indonesia	• S2 *Coastal Engineering and Port Development*, UNESCO IHE - DELFT, Belanda (2011) • S1 Teknik Sipil, Universitas Trisakti, Jakarta (1993) • S2 Coastal Engineering and Port Development, UNESCO IHE - DELFT, Netherland (2011) • S1 Civil Engineering, University of Trisakti, Jakarta (1993)	• Direktur Teknik PT Pelindo Multi Terminal (2023–2024) • Direktur Komersial dan Operasi di PT Pelindo Jasa Maritim (2021–2023) • Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020–2021) • Direktur Komersial dan Operasi PT Pelindo Jasa Maritim (2021) • SVP Manajemen Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019–2020) • Koordinator Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2019) • Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017) • Direktur Konstruksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015–2017) • Direktur Teknik PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014–2015) • Technical Director of PT Pelindo Multi Terminal (2023-2024) • Director of Commercial and Operations Director at PT Pelindo Jasa • Technical Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021)Direktur Komersial dan Operasi PT Pelindo Jasa Maritim (2021) • Director of Commercial and Operation Director of PT Pelindo Jasa Maritime (2021) • SVP Project Management Strategic PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020) • Project Coordinator Strategic Projects of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2019) • Director of Commercial and Business Development PT Port Developer Indonesia (2017) • Construction Director of PT Port Developer Indonesia (2015-2017) • Technical Director of PT Port Developer Indonesia (2014-2015)	• Ilmu Kepelabuhanan • Ilmu Teknik Sipil • Port Science • Civil Engineering Science	54 tahun 54 years old	Laki-laki Male

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia (per 31 Desember 2023) Age (as of December 31, 2023)	Jenis Kelamin Gender
R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia	• S2 Bidang Akuntansi di Universitas Indonesia (2004) • S1 Akuntansi di Universitas Jendral Sudirman (1993) • Masters in Accounting at University of Indonesia (2004) • Bachelor of Accounting at Jendral Sudirman University (1993)	• Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022–Sekarang) • Direktur Keuangan & SDM PT Reasuransi Indonesia Utama (2020–2021) • Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT Rekayasa Industri (2018–2020) • Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT Pelabuhan Indonesia II1 (Persero) (2016–2017) • Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT PANN Pembiayaan Maritim (2012–2017) • Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT Indah Karya (Persero) (2007–2012) • Sekretaris Dekom/Dewan Pengawas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (2002–2007) • Staf Dekom/Dewas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998–2002) • Commissioner of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022- Now) • Director of Finance & HR PT Reinsurance Indonesia Main (2020-2021) • Commissioner / Member Supervisory Board of PT Rekayasa Industri (2018-2020) • Commissioner / Member Supervisory Board of PT Pelabuhan Indonesia II1 (Persero) (2016-2017) • Commissioner / Member Supervisory Board of PT PANN Pembiayaan Maritime (2012-2017) • Commissioner / Member Supervisory Board of PT Indah Karya (Persero) (2007-2012) • Secretary of Dekom/Board Supervisor of PT Kawasan Bonded Nusantara (Persero) (2002-2007) • Dekom/Dewas Staff PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998-2002)	• Ilmu Akuntansi • Manajemen SDM • Accounting Science • HR Management	53 tahun 53 years old	Perempuan Female

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia (per 31 Desember 2023) Age (as of December 31, 2023)	Jenis Kelamin Gender
Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Indonesia	• Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) (1984) • Sekolah Tinggi Manajemen (2007) • College of Science Shipping (STIP) (1984) • Management College (2007)	• Komisaris Independen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (2018–2021) • Plt. Dirjen Perhubungan Laut. (2017) • Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (2016–2017) • Kepala Kantor Utama Syahbandar Tanjung Perak. (2016) • Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. (2015–2016) • Independent Commissioner PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (2018-2021) • Acting. Director General of Sea Transportation Sea Transportation. (2017) • Director of Traffic and Sea Transportation Ministry Transportation (2016-2017) • Head of the Main Office Syahbandar Tanjung Perak. (2016) • Head of Port Authority Tanjung Priok. (2015-2016)	• Ilmu Manajemen • Ilmu Pelayaran • Management Science • Sailing Science	66 tahun 66 years old	Laki-laki Male
Direksi Board of Directors						
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director and Act. Commercial and Business Development Director)	Indonesia	• S2 - Kuhne Logistic University, Hamburg Jerman - Jurusan Logistik (2014) • S1 - Universitas Airlangga - Hukum, (1999) • Masters - Kuhne Logistic University, Hamburg Germany - Major in Logistics (2014) • S1 - Airlangga University - Law, (1999)	• Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022–Sekarang) • Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020–2022) • EVP Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2017–2020) • VP Hubungan Lembaga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2016–2017) • Direktur Komersial PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. (2015–2016) • Senior Manager Layanan SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2012–2015) • President Director of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022-Present) • Director of Commercial and Business Development of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020-2022) • EVP Corporate Secretary PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2017-2020) • VP of Institutional Relations PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2016-2017) • Commercial Director of PT Port Developer Indonesia. (2015-2016) • Senior Manager of Services HR and General Services PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2012-2015)	• Ilmu Hukum • Ilmu Bidang Logistik • Law Science • Logistic Science	46 tahun 46 years old	Perempuan Female

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Pengalaman Kerja** Professional Experience	**Keahlian** Expertise	**Usia (per 31 Desember 2023)** Age (as of December 31, 2023)	**Jenis Kelamin** Gender
Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) (Director of Fleet Management and Operation)	Indonesia	• S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran - Nautica, tahun 2006 • S1 - Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran - Nautica, tahun 1995 • Master's Degree - College of Science Nautica, year 2006 • S1 - College of Science Nautica, year 1995	• Direktur Armada dan Operasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2021-Sekarang) • VP Pelayanan Kapal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020) • Plt. Direktur Armada dan Teknik PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2018-2019) • Director of Fleet and Operations Director of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2021-Present) • VP Ship Services of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020) • Acting. Director of Fleet and Engineering of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2018-2019)	• Ilmu Pelayaran • Ilmu Nautiica • Sailing Science • Nautical Science	55 tahun 55 years old	Laki-laki Male
Reini Delfianti (Direktur Keuangan & SDM) (Director of Finance & HR)	Indonesia	• *Magister Shiping and Transport* dari Netherlands Maritime University Rotterdam (tahun lulus) • Magister Manajemen dari Universitas Trisakti dan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti (tahun lulus) • Magister Shiping and Transport dari Netherlands Maritime University Rotterdam (tahun lulus) • Magister Manajemen dari Master of Management from Trisakti University and Bachelor of Economics in Accounting from Trisakti University (year of graduation)	• Direktur Keuangan dan SDM PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2022–Sekarang) • Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020–2022) • Direktur Administrasi PT Jakarta Internasional Container Terminal (2019) • *General Manager* Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa (2018) • SVP Pengelolaan Anak Perusahaan & Cabang Kantor Pusat (2016–2018) • Direktur SDM & Keuangan PT Pengerukan Indonesia (2014) • Manager Akuntansi Management & Mitra Usaha, Direktorat Keuangan Pengembangan Pelabuhan Indonesia (2014) • ASM Akuntansi Biaya, Kantor Pusat (2010–2012) • ASM Analis Keuangan, Kantor Pusat (2009–2010) • Director of Finance and HR PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2022-Present) • Director of Finance and Human Resources PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020-2022) • Director of Administration PT Jakarta International Container Terminal (2019) • General Manager Branch Sunda Kelapa Port (2018) • SVP Subsidiary Management Subsidiary & Branch Office Head Office (2016-2018) • HR & Finance Director of PT Pengerukan Indonesia (2014) • Accounting Manager Management & Partner Business Partners, Directorate of Finance Port Development Indonesia (2014) • Cost Accounting ASM, Head Office Head Office (2010-2012) • ASM Financial Analyst, Head Office Head Office (2009-2010)	• Ilmu Pelayaran dan Transportasi • Manajemen Akuntansi • Sailing and Transportation Science • Accounting Management	47 tahun 47 years old	Perempuan Female

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian Dewan Komisaris

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk penilaian terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Evaluasi ini tidak hanya mengacu pada Laporan Tugas Pengawasan, tetapi juga mencakup tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ada di Perusahaan.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dengan sistem *self assessment* atau sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur dari ketercapaian Key Performance Indicator (KPI) yang telah disusun pada awal tahun yang mencakup aspek Perencanaan, Pengawasan dan Nasehat, Pelaporan, dan Dinamika Usaha.

Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris

KPI Dewan Komisaris Tahun 2023 (kolegial dan individual)

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris di tahun 2023 menunjukan skor sebesar 103,9, dengan aspek-aspek penilaian sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ASSESSMENT

Board of Commissioners Assessment

The Board of Commissioners goes through an annual performance evaluation to assess the implementation of their duties. This evaluation encompasses not only the Supervisory Task Report but also factors such as attendance at meetings and adherence to applicable laws, regulations, and Company policies.

The assessment of the Board of Commissioners involves establishing Key Performance Indicators (KPIs) using a self-assessment system or other methods determined at a meeting.

Board of Commissioners Performance Evaluation Criteria

The performance assessment of the Board of Commissioners is measured by the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) that have been prepared at the beginning of the year which cover aspects of Planning, Supervision and Advice, Reporting, and Business Dynamics.

KPI Assessment Results of the Board of Commissioners

The results of the Board of Commissioners performance assessment in 2023 showed a score of 103.9, with the following assessment aspects:

No	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Periode Period	Satuan Output Unit Output	Bobot Weight	Rencana Output Plan Output	Realisasi Output Output Realization	Nilai Value	Pencapaian Achievements
	Aspek Perencanaan Planning Aspect							
I	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris tahun 2023 Develop Work Plan, Budget and KPIs for the Board of Commissioners in 2023	Tahunan Yearly	Dokumen Document	10	1	1	10	100%
Sub Total I				**10**			**10**	
II	Aspek Pengawasan dan Nasihat Supervision and Advice Aspect							
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Provide responses/recommendations to Shareholders on:							
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Company Work Plan and Budget	Tahunan Yearly	Surat/Risalah Letters/Minutes	5	1	1	5	100%
	b. Laporan Tahunan Annual Report	Tahunan Yearly	Surat/Risalah Letters/Minutes	5	1	1	5	100%
	c. Analisis Kinerja Triwulan Quarterly Performance Analysis	Triwulan Quarterly	Surat/Risalah Letters/Minutes	5	3	3	5	100%
	d. Rencana Bisnis Perusahaan Company Business Plan	Setahun a Year	Surat/Risalah Letters/Minutes	5	1	1	5	100%
2	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi Provide approval and advice to the Board of Directors	Setahun a Year	Surat/Risalah Letters/Minutes	10	7	9	13	129%

No	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Periode Period	Satuan Output Unit Output	Bobot Weight	Rencana Output Plan Output	Realisasi Output Output Realization	Nilai Value	Pencapaian Achievements
3	Rapat Dewan Komisaris board of commissioners meeting							
	a. Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Internal Meetings of the Board of Commissioners	Bulanan Monthly	Kali Times	8	12	12	8,0	100%
	b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Number of Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors	Bulanan Monthly	Kali Times	8	12	15	10	125%
	c. Penyelesaian Risalah Rapat Completion of Meeting Minutes	Bulanan Monthly	Risalah Minutes	6	24	28	7	117%
4.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Working Visit	Setahun a Year	Kunjungan Visit	8	4	3	6	100%
Sub Total II				**60**			**63,9**	
III	Aspek Pelaporan Reporting Aspect							
1	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Annual Board of Commissioners Supervisory Report	Tahunan Year	Laporan Report	10	1	1	10	100%
Sub Total III				**10**			**10**	
IV	Aspek Dinamis Dynamic Aspect							
1.	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham External Auditor Proposal to Shareholders	Tahunan Year	Surat Report	5	1	1	5	100%
2.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop, dan lain-lain Competency Improvement through seminars, workshops, etc.	Tahunan Year	Kali Times	10	3	3	10	100%
3.	Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris (Self Assessment/Konsultan Independen) GCG Assessment Result of Board of Commissioners (Self Assessment/Independent Consultant)	Tahunan Year	Ketegori Category	5	Baik Good	Sangat Baik Very Good	5	100%
Sub Total IV				20			20	
Grand Total				100			103,9	

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegial melalui self assessment dan dilaporkan dalam RUPS Tahunan, dimana hasil kinerja Dewan Komisaris dipaparkan melalui laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan Pengawasan selama Tahun Buku tersebut.

Penilaian Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Dalam melaksanakan tugasnya, kinerja Direksi dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Evaluasi dilakukan melalui *Key Performance Indicator* (KPI) sesuai dengan Kontrak Manajemen yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Prosedur Pelaksanaan Penilaian Direksi. Evaluasi ini tidak hanya mengacu pada Laporan Pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen, tetapi juga mencakup tetapi tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ada di Perusahaan.

Party Conducting the Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out collegially through self-assessment and reported at the Annual GMS, where the results of the Board of Commissioners' performance are presented through the Board of Commissioners' task implementation report to the Shareholders. The GMS further grants full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the management and supervision during the Financial Year.

Board of Directors Assessment

Assessment Procedure

In carrying out their duties, Directors performance is evaluated to ensure compliance with the Company's aims and objectives. Evaluation is carried out through Key Performance Indicators (KPI) in accordance with the Management Contract which has been approved by the Board of Commissioners in the Directors' Assessment Procedure. This evaluation does not only refer to the Company's Target Achievement Report as stated in the RKAP and Management Contract, but also includes the level of attendance at Board of Directors Meetings as well as compliance with applicable laws and regulations and existing policies in the Company.

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan terhadap kinerja Direksi secara Individu yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (jika dibentuk) atau oleh Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS adalah setidak-tidaknya sebagai berikut:

- Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
- Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris.
- Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perusahaan.
- Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu.
- Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
- Pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan KPI Perspektif keuangan dan pasar:

1. Fokus pelanggan
2. Efektivitas produk dan proses
3. Fokus tenaga kerja
4. Kepemimpinan, tata kelola dan CSR

Untuk kriteria penilaian dengan Skala sebagai berikut:

1. 00% - 50% = Kurang
2. 51% - 70% = Cukup
3. 71% - 90% = Baik
4. ≥91% = Sangat Baik

Hasil Penilaian KPI Direksi

Berikut hasil KPI secara kolegial untuk tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut:

KPI DIREKSI TAHUN 2023

Key Performance Indikator PT Jasa Armada Indonesia

The assessment is also carried out on the individual performance as proposed by the Nomination and Remuneration Committee (if established) or by the Board of Commissioners to be determined at the GMS, which is at least as follows:

- Setting KPIs at the beginning of the year and evaluating their achievement.
- Attendance levels at internal meetings and meetings with the Board of Commissioners.
- Contribution to the Company's business activities.
- Participation in specific assignments.
- Commitment to advancing the interests of the Company.
- Compliance with applicable laws, regulations, and Company policies.
- Achievement of the Company's targets outlined in the RKAP and Management Contract.

Directors' Performance Evaluation Criteria

The criteria for evaluating the performance of the Board of Directors based on Key Performance Indicators (KPIs) from a financial and market perspective are as follows:

1. Customer focus
2. Product and process effectiveness
3. Workforce focus
4. Leadership, governance, and CSR

The assessment criteria utilize the following scale:

1. 00% - 50% = Lacking
2. 51% - 70% = Enough
3. 71% - 90% = Good
4. ≥91% = Excellent

KPI Assessment for Directors

The following collegial KPI results for 2023 are described as follows:

BOARD OF DIRECTORS KPI IN 2023

Key Performance Indicators of PT Jasa Armada Indonesia

NO	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot KPI KPI Weight	Target 2023 2023 Targets	Capaian FY 2023 FY 2023 Outcome	Realisasi Realization Bobot Weight
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)X4
A. Nilai Ekonomi & Sosial A. Economic & Social Value						
1	EBITDA (Earning Before Interest Tax, Depreciation, and Amortization)	Rupiah	6	290.528.304.719	261.465.244.783,00	5,40
2	Pendapatan Income	Rupiah	6	1.151.823.387.415	1.138.537.475.251	5,93
3	BOPO	%	5	82,35%	84,69%	4,86
4	Produksi Penundaan Towage Production	GT Jam	6	1.548.135.693	1.574.087.754,00	6,10
5	*Produksi Pemanduan *Pilotage Production	GT	6	107.667.588	122.681.997,00	6,60
6	*Waiting for Pilot	Jam	6	1,0	0,20	6,60

NO	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot KPI KPI Weight	Target 2023 2023 Targets	Capaian FY 2023 FY 2023 Outcome	Realisasi Realization
						Bobot Weight
7	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	Skala Likert	6	4,73	4,79	6,08
8	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Level	Skala Likert	6	2,4	2,97	6,60
9	Tingkat Keselamatan Safety Level	%	6	100%	100%	6,00
10	Availability Kapal Tunda Tugboat Availability	%	6	90%	98,61%	6,57
11	Availability Motor Pandu Scout Motor Availability	%	6	90%	96,57%	6,44
12	Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL Implementation of Social and Environmental Responsibility Program	%	6	100%	100%	6,00
B. Inovasi Model Bisnis B. Business Model Innovation						
13	Tingkat Compliance Perusahaan Company Compliance Level	%	6	100%	100%	6,00
C. Kepemimpinan Teknologi C. Technology Leadership						
14	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Marine Standardization and Digitalization of Marine Services	%	6	100%	100%	6,00
15	Penerapan HSSE HSSE Implementation	%	6	100%	100%	6,00
D. Pengembangan Talenta D. Talent Development						
16	Peningkatan Kompetensi Pegawai Employee Competency Improvement	%	6	100%	98%	5,88
17	Peningkatan Produktifitasan Pegawai Increased Employee Productivity	Rp./Orang	5	966.660.899	1.271.467.642,00	5,50
TOTAL		%	100			102,56

* = Khusus Pelimpahan PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Special delegation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Adapun berikut hasil KPI Individual Direksi yang didasarkan pada KPI Korporat dengan masing-masing pembobotan secara proporsional disesuaikan dengan fokus bidang dari masing-masing direktorat.

The following are the results of the Directors' Individual KPIs based on the Corporate KPIs with each weighting proportionally adjusted to the focus areas of each directorate.

Key Performance Indikator Individual Direksi

Key Performance Indicators of Individual Directors

NO	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2023 2023 Targets	Realisasi 2023 2023 Realization	Skor Score
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)X4
I	Direktur Utama President Director		100			102,01
1	Tingkat Compliance Perusahaan Company Compliance Level	%	25	100	100	25,00
2	Implementasi Program TJSL Implementation of TJSL Program	%	20	100	100	20,00
3	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Level	Skala Likert Likert Scale	15	2,4	2,97	18,00
4	EBITDA	Rp	10	1.151.823.387.415	1.138.537.475.251	9,88
5	Pendapatan Income	Rp	10	290.528.304.719	261.465.244.783	9,00

NO	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2023 2023 Targets	Realisasi 2023 2023 Realization	Skor Score
6	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Marine Standardization and Digitalization of Marine Services	%	10	100	100	10,00
7	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	Skala Likert Likert Scale	10	4,73	4,79	10,13
II	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Director of Commercial and Business Developmen		100			100,16
1	Pendapatan Income	Rp	25	290.528.304.719	261.465.244.783	22,50
2	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	Skala Likert Likert Scale	20	4,73	4,79	20,25
3	Tingkat Compliance Perusahaan Company Compliance Level	%	15	100	100	15,00
4	EBITDA	Rp	10	1.151.823.387.415	1.138.537.475.251	9,88
5	Produksi Penundaan Towage Production	GT Jam GT Hour	10	1.548.135.693	1.574.087.754	10,17
6	Produksi Pemanduan Pilotage Production	GT	10	107.667.588	122.681.997	11,39
7	Availability Kapal Tunda Tugboats Availability	%	10	90	98,61	10,96
III	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet and Operation		100			105,18
1	Tingkat Keselamatan Safety Level	%	25	100	100	25,00
2	Availability Kapal Tunda Tugboat Availability	%	20	90	98,61	21,91
3	Availability Motor Pandu Scout Motor Availability	%	15	90	96,57	16,10
4	Produksi Penundaan Delay Production	GT Jam GT Hour	10	1.548.135.693	1.574.087.754	10,17
5	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Marine Standardization and Digitalization of Marine Services	%	10	100	100	10,00
6	Waiting Time for Pilot	Jam Hour	10	1	0,20	12,00
7	Penerapan HSSE HSSE Implementation	%	10	100	100	10,00
IV	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR		100			101,92
1	Pendapatan Income	Rp	25	290.528.304.719	261.465.244.783	22,50
2	EBITDA	Rp	20	1.151.823.387.415	1.138.537.475.251	19,77
3	Peningkatan Produktivitas Pegawai Employee Productivity Improvement	Rp /Orang Rp/ People	15	966.660.899	1.271.467.642	18,00
4	BOPO	%	10	82,35	84,69	9,72
5	Peningkatan Kompetensi Pegawai Employee Competency Improvement	%	10	100	98,00	9,80
6	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	Skala Likert Likert Scale	10	4,73	4,79	10,13
7	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Level	Skala Likert Likert Scale	10	2,4	2,97	12,00

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian atas kinerja Direksi di tahun 2023 dilakukan oleh Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi IPCM didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri BUMN. Pemilihan calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan melalui rangkaian mekanisme suksesi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham yang mengacu pada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memperhatikan unsur keberagaman dan disesuaikan dengan ukuran organisasi dan kebutuhan Perusahaan.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada:

1. Undang-Undang PT Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 113.
2. Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pemegang Saham utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk kepada Dewan Komisaris PT JAI Tbk nomor: KU.02.04 /11/12/1/ PBP/ UT/PI.II-18 tanggal 11 Desember 2018 tentang penyesuaian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT JAI Tbk.
3. Anggaran Dasar Perusahaan.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Direksi Perusahaan dilakukan melalui mekanisme RUPS. Dalam RUPS Tahunan, pemegang saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran dan pembagian tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Utama.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Indikator penetapan remunerasi Direksi yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham, ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau kontrak Manajemen Direksi sebagai salah satu ukuran untuk menilai kinerja Direksi.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam memperhatikan ketentuan dari regulator dan kebijakan internal Perusahaan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, struktur remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari beberapa

Assessor

In 2023, the Board of Directors was assessed by the Board of Commissioners.

SUCCESSION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The succession policy for the IPCM Board of Commissioners and Directors is rooted in the provisions outlined by the Regulation of the Minister of SOE. The selection process for candidates for these positions follows a series of succession mechanisms in line with the provisions set forth by shareholders, referencing applicable regulations and laws. When forming the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors, attention is given to elements of diversity, which are tailored to the organization's size and the Company's requirements.

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The Company has established a Nomination and Remuneration Committee tasked with overseeing the implementation of remuneration policies for the Board of Commissioners and Directors. The policy for determining remuneration for these positions refers to:

1. Republic of Indonesia PT Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 113.
2. A letter from the Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the main shareholder of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, addressed to the Board of Commissioners of PT JAI Tbk, numbered KU.02.04/11/12/1/PBP/UT/PI.II-18 dated December 11, 2018, regarding adjustments to the remuneration of the Directors and Commissioners of PT JAI Tbk.
3. Company Articles of Association.

Remuneration Procedure for the Board of Commissioners and Directors

The remuneration for the Company's Directors is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS). During the Annual GMS, shareholders conferred authority upon the Board of Commissioners to establish the amount and distribution of bonuses for members of the Board of Directors and Commissioners for the 2022 financial year, following consultation with the Major Shareholders.

Remuneration Indicator for the Board of Directors

The indicators for determining Directors' remuneration, as determined by shareholders, take into account the achievements of Key Performance Indicators (KPIs) or the Directors' Management Contract as one of the measures for assessing the performance of Directors.

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Directors

In accordance with the provisions of the regulator and the Company's internal policies approved by shareholders, the remuneration structure of the Board of Commissioners comprises

komponen, yaitu:

several components, namely:

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023
Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Directors in 2023

No.	Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration	Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration
1.	Honorarium Honorarium	Gaji Salary
2.	Tunjangan terdiri dari Tunjangan Transportasi, Tunjangan Hari Raya, Purna Jabatanx Allowance consist of Transportation Allowance, Holiday Allowance, Retirement Allowance	Tunjangan terdiri dari Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Jabatan, Tunjangan Perumahan Allowance consist of Holiday Allowance, Retirement Allowance, Housing Allowance
3.	Fasilitas terdiri dari Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Bantuan Hukum Facilities consist of Healthcare Facilities, Legal Aid Facilities	Fasilitas terdiri dari Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Kendaraan, Perumahan, Fasilitas Bantuan Hukum Facilities consist of Healthcare Facilities, Vehicle Facilities, Housing, Legal Aid Facilities
4.	Tantiem Tantiem (Bonus)	Tantiem Tantiem (Bonus)

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah gaji dan tunjangan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Total Amount of the Board of Commissioners and Directors

Total remuneration and allowances for the Company's Board of Directors and Commissioners are as follows:

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Table

Honorarium dan Tunjangan Honorarium and Allowances	Tantiem* Tantiem*	Total Total
1.482.668.550	1.238.645.695	2.721.314.245

Tabel Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Table

Gaji dan Tunjangan Salary and Benefits	Tantiem* Tantiem*	Total Total
3.061.816.200	2.005.215.473	5.067.031.673

*Catatan: tantiem diterima (setelah pajak), bukan hanya 3 BOD dan 3 BOC melainkan juga BOD dan BOC masa jabatan sebelumnya. (konfirmasi kembali masa jabatan BOD dan BOC)

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS MEETING

Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 disahkan tanggal 4 Oktober 2021, Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Seluruh keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak.

Di tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal maupun Rapat Gabungan yang diselenggarakan di tahun 2023.

Board of Commissioners Meeting

According to the PT Jasa Armada Indonesia Board Manual Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021, the Board of Commissioners convenes in a meeting at least once every 2 (two) months. During these meetings, the Board of Commissioners may invite the Board of Directors. Decisions in these meetings are made through deliberation to achieve consensus. However, if consensus cannot be reached through deliberation, decisions are made by majority vote.

In 2023, the Board of Commissioners held internal meetings as much as 12 (twelve) times and joint meetings inviting the Board of Directors for 15 (fifteen) times. The agenda and minutes of meetings, attendance, as well as a summary of the Board of Commissioners' attendance at Internal Meetings and Joint Meetings held in 2023, are as follows:



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	25 Januari 2023	1. Tindak lanjut RAKOM sebelumnya 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-
2	20 Februari 2023	1. Tindak lanjut RAKOM sebelumnya 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-
3	31 maret 2023	1. Tindak lanjut RAKOM sebelumnya 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-
4	17 April 2023	1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya; 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-
5	23 Mei 2023	1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya; 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-
6	20 Juni 2023	1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya; 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-
7	24 Juli 2023	1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya; 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-
8	24 Agustus 2023	1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya; 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-
9	22 September 2023	1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya; 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-
10	27 Oktober 2023	1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya; 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-
11	24 November 2023	1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya; 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-
12	27 Desember 2023	1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya; 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up to the previous meeting 2. Other strategic matters	• Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Organ Pendukung Dewan Komisaris PT JAI Tbk • Board of Commissioners of PT JAI Tbk • Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT JAI Tbk	-

Tabel Rapat Gabungan Bersama Direksi
Joint Meeting with the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	25 Januari 2023 January 25, 2023	• Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya • Laporan Kinerja Bidang Armada dan Operasi: Transformasi, Utilisasi, Availability dan Konsumsi BBM • Profil risiko 2023 • Follow-up to the previous meeting • Fleet and Operations Performance: Transformation, Utilization, Availability and Fuel Consumption • 2023 risk profile	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Hari Kriswanto • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Hartian Surya Widhanto • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Fajar Fitriandono • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani

Tabel Rapat Gabungan Bersama Direksi
Joint Meeting with the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
2	20 Februari 2023 February 20, 2023	• Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya • Laporan kinerja bidang komersial & pengembangan bisnis, armada & operasi, dan keuangan s.d. Januari 2023 • Laporan kinerja bidang armada dan operasi: Transformasi, Utilisasi, Availability dan Konsumsi BBM • Laporan Kinerja Bidang Keuangan • Update Rencana Aksi Korporasi • Follow up on previous meeting • Performance of commercial & business development, fleet & operations, and finance as of January 2023 • Fleet and operations performance: Transformation, Utilization, Availability and Fuel Consumption • Financial Performance • Update on Corporate Action Plan	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Hari Kriswanto • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Hartian Surya Widhanto • Yohsua P.S.I Anthonie • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Fajar Fitriandono • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
3	31 Maret 2023 March 31, 2023	• Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya • Laporan kinerja bidang komersial & pengembangan bisnis, armada & operasi, dan keuangan s.d. Februari 2023 • Laporan kinerja bidang armada dan operasi: Transformasi, Utilisasi, Availability dan Konsumsi BBM • Laporan Kinerja Bidang Keuangan • Follow up on previous meeting • Performance of commercial & business development, fleet & operations, and finance as of February 2023 • Fleet and operations performance: Transformation, Utilization, Availability and Fuel Consumption • Financial Performance	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Hari Kriswanto • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Hartian Surya Widhanto • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Fajar Fitriandono • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
4	17 April 2023 April 17, 2023	• Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya • Laporan kinerja bidang komersial & pengembangan bisnis, armada & operasi, dan keuangan s.d. Maret 2023 • Laporan kinerja bidang armada dan operasi: Transformasi, Utilisasi, Availability dan Konsumsi BBM • Laporan Kinerja Bidang Keuangan • Follow up on previous meeting • Performance of commercial & business development, fleet & operations, and finance as of March 2023 • Fleet and operations performance: Transformation, Utilization, Availability and Fuel Consumption • Financial Performance	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Hari Kriswanto • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Hartian Surya Widhanto • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Fajar Fitriandono • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
5	23 Mei 2023 May 23, 2023	• Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya • Laporan kinerja bidang komersial & pengembangan bisnis, armada & operasi, dan keuangan s.d. April 2023 • Pengelolaan Modal: Usulan Besaran Dividen Tahun Buku 2022 • Hal-hal strategis lainnya • Follow up on previous meeting • Performance of commercial & business development, fleet & operations, and finance as of April 2023 • Capital Management: Dividend Amount Proposal for 2022 Financial Year • Other strategic matters	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Hari Kriswanto • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Hartian Surya Widhanto • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Fajar Fitriandono • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
6	20 Juni 2023 June 20, 2023	• Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya • Laporan kinerja bidang komersial & pengembangan bisnis, armada & operasi, dan keuangan s.d. Mei 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow up on previous meeting • Performance of commercial & business development, fleet & operations, and finance as of May 2023 • Other strategic matters	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Hartian Surya Widhanto • Yohsua P.S.I Anthonie • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Fajar Fitriandono • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
7	24 Juli 2023 July 24, 2023	• Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya • Laporan kinerja bidang komersial & pengembangan bisnis, armada & operasi, dan keuangan s.d. Juni 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow up on previous meeting • Performance of commercial & business development, fleet & operations, and finance as of June 2023 • Other strategic matters	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Hari Kriswanto • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Hartian Surya Widhanto • Yohsua P.S.I Anthonie • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Samekta Hadi • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani

Tabel Rapat Gabungan Bersama Direksi
Joint Meeting with the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
8	28 Juli 2023 July 28, 2023	Pembahasan Usulan RKAP PT JAI Tbk Tahun 2024 Proposal of RKAP for PT JAI Tbk in 2024	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Hartian Surya Widhanto • Yohsua P.S.I Anthonie • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Samekta Hadi • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
9	22 September 2023 September 22, 2023	• Tindak lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja Bidang Komersial & PengembaNGAN Bisnis, Armada, & Operasi, dan Keuangan s/d bulan Agustus 2023 • Update Program Inisiatif Strategis PT JAI Tbk (Keselarasan dengan Inisiatif Strategis SPJM) • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report on Commercial & Business Development, Fleet, & Operations, and Finance up to August 2023 • PT JAI Tbk Strategic Initiative Program Update (Alignment with SPJM Strategic Initiatives) • Other strategic matters	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Hartian Surya Widhanto • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Samekta Hadi • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
10	27 Oktober 2023 October 27, 2023	• Tindak lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja Bidang Komersial & PengembaNGAN Bisnis, Armada, & Operasi, dan Keuangan s/d bulan September 2023 • Update Pasca RUPST 2023 • Hal-hal Strategis lainnya, antara lain: a. Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO b. Lain-lain Agenda • Follow up to previous meeting • Commercial Sector Performance & Business Development, Fleet, & Operations, and Finance as of September 2023 • Post-AGMS 2023 Update • Other strategic matters include: a. Share Performance and IPO Proceeds Usage b. Other matters	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Samekta Hadi • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
11	24 November 2023 November 24, 2023	• Tindak lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja Bidang Komersial & Perkembangan Bisnis, Armada, &Operasi, dan Keuangan s/d bulan Oktober 2023 • Prores RKM Strategis 2023 • Update IT • Agenda Strategis lainnya, antara lain: a. Profil risiko s/d Oktober 2023 b. Tata Kelola Pelaporan c. Update Pasca RUPST 2023 d. Laporan Dana IPO dan Kinerja Saham. • Follow up to previous meeting • Commercial Sector Performance & Business Development, Fleet, & Operations, and Finance as of September 2023 • 2023 Strategic RKM Process • IT Update • Other strategic matters include: a. Risk profile as of October 2023 b. Reporting Governance c. Post-2023 AGMS Update d. Share Performance and IPO Proceeds Usage	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Samekta Hadi • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
13	27 Desember 2023 December 27, 2023	• Tindak lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada, &Operasi, dan Keuangan s/d bulan November 2023 • Usulan Dividen Interim 2023 • Agenda strategis lainnya, antara lain: a. *Cutover* Strategi Single ERP SAP Tahap 1 b. Laporan Dana IPO • Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO • Follow up to previous meeting • Commercial Sector Performance & Business Development, Fleet, & Operations, and Finance as of November 2023 • 2023 Interim Dividen Proposal • Other strategic matters include: a. Single ERP SAP Strategy Cutover Phase 1 b. IPO Proceeds Report • Share Performance and IPO Proceeds Usage	• Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • Dadang Budiawan • Hartian Surya Widhanto • Ryan Hegar Suryadinatha • Deby Rahmad Wicaksono • Samekta Hadi • Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris
Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners

Nama Name	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners Meeting			Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Joint Meeting between the Board of Commissioners and Directors		
	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%
Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama | President Commissioner)	12	12	100	15	15	100%
R.R. Dewi Ariyani (Komisaris | Commissioner)	12	12	100	15	15	100%
Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen | Independent Commissioner)	12	12	100	15	15	100%
Hary Kriswanto (Komisaris Independen | Independent Commissioner)*	6	6	71%	6	6	100%

*) Tidak lagi menjabat dalam jajaran Komisaris sejak 24 Juni 2023
*) No longer serving as Commissioner since June 24, 2023

Rapat Direksi

Berdasarkan *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 disahkan tanggal 4 Oktober 2021, Direksi mengadakan secara berkala minimum satu kali dalam 1 (satu) bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

Di tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan rapat Internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan Rapat Dewan Komisaris. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Internal maupun Rapat Gabungan yang diselenggarakan di tahun 2023.

Board of Directors Meeting

According to the PT Jasa Armada Indonesia Board Manual Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021, the Board of Directors convenes meetings periodically, at least once every month. Additionally, the Board of Directors is obligated to hold a meeting with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months. Decisions made at Board of Directors meetings must be based on deliberation to reach consensus. However, if consensus cannot be reached through deliberation, decisions are made by majority vote. In the event of a tie in the votes, the chairman of the Board of Directors meeting will make the final decision.

In 2023, the Board of Directors held 12 (twelve) internal meetings and 12 (twelve) meetings with the Board of Commissioners, as previously discussed in the discussion of the Board of Commissioners Meetings. The agenda, minutes of meetings, attendance, and a summary of the level of attendance of the Board of Directors at Internal Meetings and Joint Meetings held in 2023 are as follows:

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Internal Meeting of the Board of Directors

No.	Tanggal Tanggal	Agenda Rapat Agenda Rapat	Peserta Peserta
1	09 Januari 2023 January 9, 2023	• Pending Matters • Evaluasi Operasional Wilayah Meulaboh • Kebutuhan Awak Kapal • Usulan KPI Tahun 2023 • Pending Matters • Operational Evaluation of the Meulaboh Region • Crew Needs • Proposed KPI for 2023	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
2	07 Maret 2023 March 7, 2023	Remunerasi Awak Kapal STS Ambang Luar Sungai Musi Remuneration for the Musi River Outer Threshold STS Crew	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Internal Meeting of the Board of Directors

No.	Tanggal Tanggal	Agenda Rapat Agenda Rapat	Peserta Peserta
3	16 Maret 2023 March 16, 2023	• Pending Matters • Laporan Kinerja Komersial dan Pengembangan Bisnis Februari 2023 • Value Creation Pengembangan Pasar s.d. Februari 2023 • Laporan Bidang Armada dan Operasi Periode s.d. Februari 2023 • Laporan Kinerja Keuangan s.d. Februari 2023 • Evaluasi Pembayaran BBM • Agenda Strategis Lainnya • Pending Matters • Commercial and Business Development Performance Report for the Period until February 2023 • Value Creation of Market Development until February 2023 • Financial Performance until February 2023 • Fuel Payment Evaluation • Other Strategic Agenda	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
4	04 April 2023 April 4, 2023	Asuransi Kapal JAI JAI Ship Insurance	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
5	11 Mei 2023 May 11, 2023	• Pending Matters • Laporan Kinerja Bidang Komersial Dan Pengembangan Bisnis Periode S.D Maret 2023 • Laporan Kinerja Bidang Armada Dan Operasi Periode S.D Maret 2023 • Usulan Besaran Deviden Tahun 2022 • Perdir Pedoman Tta Cara Kerjasama • Media Gathering • Pending Matters • Commercial and Business Development Performance Report for the Period until March 2023 • Fleet and Operations Performance Report for the Period until March 2023 • Proposed Dividend Amount for 2022 • Directors Decree on Cooperation Guidelines • Media Gathering	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
6	29 Mei 2023 May 29, 2023	Pembahasan tentang tindak lanjut kapal tunda pengganti untuk wilayah operasi di Weda Follow-up on replacement pilot ship in Weda	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
7	5 Juni 2023 June 5, 2023	Evaluasi Operasional Wilayah Meulaboh Evaluation of Meulaboh Operational Area	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
8	6 Juni 2023 June 6, 2023	• Revisi RKAP Tahun 2023 • Usulan Investasi Tahun 2024 • Update Kerjasama dengan PT PEL • Evaluasi Penggunaan BBM • Revised 2023 RKAP • Investment Proposal for 224 • Cooperation Update with PT PEL • Fuel Usage Evaluation	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
9	14 Juni 2023 June 14, 2023	• Pending Matters • Laporan Kinerja Bidang Komersial Dan Pengembangan Bisnis Periode S.D Maret 2023 • Laporan Kinerja Bidang Armada Dan Operasi Periode S.D Maret 2023 • Laporan Kinerja Keuangan Periode Tahun 2023 • Pending Matters • Commercial and Business Development Performance Report for the Period until March 2023 • Fleet and Operations Performance Report for the Period until March 2023 • Financial Performance Report for the 2023 Period	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
10	15 Juni 2023 June 15, 2023	Evaluasi Perpanjangan Kerjasama dengan JSP Evaluation on Cooperation Extension with JSP	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
11	19 Juni 2023 June 19, 2023	• Perluasan Pasar Laiwui & Terminal Khusus Kawasi • Kebutuhan Kapal Tunda di Wilayah Palembang • Expansion of Laiwui Market & Kawasi Special Terminal • Tugboats Needs in the Palembang Region	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
12	20 Juli 2023 July 20, 2023	• Project Meulaboh • RKAP 2024] • Meulaboh Project • 2024 RKAP	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Internal Meeting of the Board of Directors

No.	Tanggal Tanggal	Agenda Rapat Agenda Rapat	Peserta Peserta
13	14 Agustus 2023 August 14, 2023	• Pending Matters • Laporan Kinerja Bidang Komersial Dan Pengembangan Bisnis Periode S.D Juli 2023 • Laporan Kinerja Bidang Armada Dan Operasi Periode S.D Juli 2023 • Laporan Kinerja Keuangan Periode S.D Juli 2023 • Kebutuhan Investasi Single ERP SAP Pelindo Group • Hal-hal strategis lainnya • Pending Matters • Commercial Sector Performance and Business Development Report for the Period until July 2023 • Fleet and Operations Performance Report for the Period until July 2023 • Financial Performance Report for the Period until July 2023 • SAP Pelindo Group Single ERP Investment Needs • Other strategic matters	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
14	11 September 2023 September 11, 2023	• Pending Matters • Laporan Kinerja Bidang Komersial Dan Pengembangan Bisnis Periode S.D Agustus 2023 • Laporan Kinerja Bidang Armada Dan Operasi Periode S.D Agustus 2023 • Laporan Kinerja Keuangan Periode S.D Agustus Tahun 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Pending Matters • Commercial and Business Development Performance Report for the Period until August 2023 • Fleet and Operations Performance Report for the Period until August 2023 • Financial Performance Report for the Period until August 2023 • Other strategic matters	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
15	3 Oktober 2023 October 3, 2023	• Usulan Anggaran BBM • Proses Pengadaan BBM • Update Weda • Emergency Docking • Fuel Budget Proposal • Fuel Procurement Process • Update on Weda • Emergency Docking	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
16	16 November 2023 November 16, 2023	• Pending Matters • Laporan Kinerja Bidang Komersial dan Pengembangan Bisnis Periode s.d. Oktober 2023 • Laporan Kinerja Bidang Armada dan Operasi Periode s.d. Oktober 2023 • Laporan Kinerja Keuangan Periode s.d. Oktober 2023 • Progres RKM Strategis 2023 • Pending Matters • Commercial and Business Development Performance Report for the Period until October 2023 • Fleet and Operations Performance Report for the Period until October 2023 • Financial Performance Report for the Period until October 2023 • 2023 Strategic RKM Progress	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
17	14 Desember 2023 December 14, 2023	• Pending Matters • Laporan Kinerja Bidang Komersial dan Pengembangan Bisnis Periode s.d. November 2023 • Laporan Kinerja Bidang Armada dan Operasi Periode s.d. Oktober 2023 • Laporan Kinerja Keuangan Periode s.d Oktober 2023 • Pending Matters • Commercial and Business Development Performance Report for the Period until November 2023 • Fleet and Operations Performance Report for the Period until October 2023 • Financial Performance Report for the Period until October 2023	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
18	27 Desember 2023 December 27, 2023	Proses Bungkering dan Budgeting BBM Fuel Bungkering and Budgeting Process	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi
Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Directors

Nama Name	Rapat Internal Direksi Directors Internal Meeting			Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris Joint Meeting with Commissioners		
	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) Shanti Puruhita (President Director and Act. Commercial and Business Development Director)	18	18	100%	14	14	100%
Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) Muhammad Iqbal (Director of Fleet Management and Operation)	18	18	100%	14	14	100%
Reini Delfianti (Direktur Keuangan & SDM) Reini Delfianti (Director of Finance & HR)	18	18	100%	14	14	100%

Jalannya rapat dan keputusan yang diambil dalam rapat Direksi telah didokumentasikan dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat di tandangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak.

The meeting and the decisions made at the Board of Directors' meeting have been recorded in the minutes. These minutes are signed by the chairman of the meeting and distributed to all members of the Board of Directors, whether they attended the meeting or not.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

DISCLOSURE OF AFFILIATE RELATIONSHIPS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Hubungan keluarga dan keuangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham dan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi selama periode tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

The table below presents the family and financial relationships among members of the Board of Commissioners and Directors, including relationships with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors, as well as shareholders, and share ownership of the Board of Commissioners and Directors during the 2023 period:

Manajemen Kunci Perseroan Key Management	Hubungan Keluarga dengan xxx			Hubungan Keuangan dengan xxx		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/Pengendali Major/Controlling Shareholders
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) (Commissioner)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Direksi Board of Directors						
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director and Act. Commercial and Business Development Director)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) (Director of Fleet Management and Operation)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Reini Delfianti (Direktur Keuangan & SDM) (Director of Finance & HR)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS

Berikut ini tabel yang menunjukan hubungan kepengurusan antar anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain dalam periode tahun 2023.

The following table shows the management relationship between members of the Board of Commissioners and Directors at other companies in 2023.

Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Position	
	Posisi Position	Nama Perusahaan/Instansi Position
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Direktur Teknik Engineering Director	PT Pelindo Multi Terminal

Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Position	
	Posisi Position	Nama Perusahaan/Instansi Position
R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) (Commissioner)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.	
Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.	
Direksi Board of Directors		
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director and Act. Commercial and Business Development Director)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.	
Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) (Director of Fleet Management and Operation)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.	
Reini Delfianti (Direktur Keuangan & SDM) (Director of Finance & HR)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.	

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Informasi kepemilikan saham masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Information on share ownership for each member of the Board of Commissioners and Directors in 2023 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		JAI	Di Perusahaan Lain Other Companies
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	0 lembar None	0 lembar None
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	158.100 lembar 158,100 shares	0 lembar None
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	0 lembar None	0 lembar None
Direksi Board of Directors			
Shanti Puruhita	Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Act. Commercial and Business Development Director	492.100 lembar 492,100 shares	0 lembar None
Muhammad Iqbal	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operation	459.100 lembar 459.100 shares	0 lembar None
Reini Delfianti	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HR	329.500 lembar 329,500 shares	0 lembar None

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan Anggaran Dasar Perusahan tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk membentuk komite-komite pendukung. Komite Audit ini bertujuan membantu merumuskan kebijakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan untuk masing-masing komite. Hingga akhir tahun 2023, Dewan Komisaris memiliki organ pendukung, yakni Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

In accordance with SOE Ministry Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 and the Company's Articles of Association concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOE, the Board of Commissioners is empowered to establish supporting committees. One such committee is the Audit Committee, which is tasked with helping formulate policies in alignment with the duties and responsibilities assigned to each committee. As of the end of 2023, the Board of Commissioners have several supporting organs, including the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Melalui pembentukan Sekretaris Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memperkuat peran organ pendukungnya untuk meningkatkan proses pengawasan. Hal ini bertujuan agar pengawasan tersebut dapat memenuhi dan mengakomodir seluruh standar implementasi tata kelola perusahaan. Peranan penting Sekretaris Dewan Komisaris terlihat dalam memberikan bantuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan konsultasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tugas pengawasan dan penasihatan Dewan Komisaris sesuai dengan standar penerapan dan praktik terbaik GCG.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24 tanggal 22 Maret 2024 Perihal Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko di Lingkungan Pelindo Group (Hingga Cucu Perusahaan) serta menetapkan Direktur yang melaksanakan tugas fungsional dan Direktur yang melaksanakan tugas pembinaan.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu- waktu.

Pengangkatan dan Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Perusahaan telah menunjuk Deby Rahmad Wicaksono sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: SK.DK/26/03/04/JAI-2021.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary of the Board of Commissioners strengthens the role of supporting organs to enhance the supervisory process. This is aimed at ensuring that supervision can fully meet and accommodate all corporate governance implementation standards. The crucial role of the Secretary of the Board of Commissioners is evident in providing assistance in carrying out the supervisory and advisory functions performed by the Board of Commissioners. The Secretary of the Board of Commissioners plays a vital role in ensuring that the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners adhere to GCG implementation standards and best practices.

Secretary of the Board of Commissioners Work Guideline

In carrying out its duties and responsibilities, the Secretary of the Board of Commissioners refers to the Letter of the Director of Finance and Risk Management of PT Pelindo Jasa Maritim Number: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24 dated March 22, 2024 Regarding the Determination of Risk Categories and Classifications within the Pelindo Group (Up to the Subsidiaries) and establishes Directors who carry out functional duties and Directors who carry out coaching duties.

Secretary of the Board of Commissioners Office Term

The term of office of the Secretary and Secretariat Staff as stated in the Second Dictum shall be a maximum of 3 (three) years and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

Secretary of the Board of Commissioners Appointment and Profile

The Company has appointed Deby Rahmad Wicaksono as the Secretary of the Board of Commissioners, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: SK.DK/26/03/04/JAI-2021.



Deby Rahmad Wicaksono

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 40 tahun per 31 Desember 2023 Nganjuk, 18 Desember 1983 40 years of age as of December 31, 2023 Nganjuk, December 18, 1983
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 - Marine Engineering ITS (Institute Technology of Sepuluh November) (2007) Bachelor's Degree - Marine Engineering ITS (Institute Technology of Sepuluh November) (2007)
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Nomor: SK.DK/26/03/04/JAI-2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Serta Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Number: SK.DK/26/03/04/JAI-2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary and Secretariat Staff of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Pengalaman Kerja Working Experience	1. *Vice President* Pengadaan (SPSL): (1 Maret 2022–Sekarang) 2. VP Pengadaan PLI: (17 Februari 2022–1 Maret 2022) 3. *Vice President* Pengadaan PSL: (1 Oktober 2021–17 Februari 2022) 1. Vice President of Procurement (SPSL): (1 March 2022–present) 2. VP Procurement PLI: (17 February 2022–1 March 2022) 3. Vice President of Procurement at PSL: (1 October 2021–17 February 2022)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi pokok untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar tugas-tugas Dewan Komisaris dan sebagai penghubung antara Dewan Komisaris dengan manajemen serta bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting tentang Rapat Dewan Komisaris kepada Perseroan. Tugas Pokok Sekretaris Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan Administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
- Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite di lingkungan Dewan komisaris.

Secretary of the Board of Commissioners Duties and Responsibilities

The Secretary of the Board of Commissioners primarily functions to provide support to Commissioners, facilitating their duties and acting as a liaison between the Board of Commissioners and management. They are responsible for providing and conveying crucial information about Board of Commissioners Meetings to the Company. The main duties of the Secretary of the Board of Commissioners include the following:

- Organizing secretarial administration activities within the Board of Commissioners.
- Coordinating meetings of the Board of Commissioners and meetings/sessions between the Board of Commissioners and Shareholders, Directors, and other relevant parties.
- Providing necessary data/information required by the Board of Commissioners and Committees within the Board of Commissioners.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris terus berupaya meningkatkan kompetensinya, di antaranya dengan mengikuti pelatihan, *workshop*, ataupun seminar. Di tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Secretary of the Board of Commissioners Competency Development

To support the implementation of its duties and responsibilities, the Secretary of the Board of Commissioners strives to enhance its competence, including by attending training, workshops, or seminars. In 2023, the Secretary of the Board of Commissioners participated in the following competency development program:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Materials	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Deby Rahmad Wicaksono (Sekretaris Dewan Komisaris) (Secretary of the Board of Commissioners)	Audit Berbasis Risiko Risk-based Audit	Audit Berbasis Risiko Risk-based Audit	PMLI/ 27 Februari 2023 PMLI/ February 27, 2023	PMLI
	Webinar Diversifications and Risk Management in Logistic Industry	Webinar Diversifications and Risk Management in Logistic Industry	25 Oktober 2023	APLog
	Enterprise Risk Management Implementation	Enterprise Risk Management Implementation	6 s.d 8 Desember 2023	CRMS (PMLI)

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2023

Di tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan baik, di antaranya adalah:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris/rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Secretary of the Board of Commissioners 2023 Duties Report

In 2023, the Secretary of the Board of Commissioners has effectively fulfilled its duties, including:

1. Preparing for meetings, including meeting materials (briefing sheet) of the Board of Commissioners;
2. Preparing minutes of the Board of Commissioners meeting/ Board of Commissioners meeting with the Board of Directors;
3. Administering documents of the Board of Commissioners, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Draft the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
5. Draft reports of the Board of Commissioners;
6. Carry out other duties of the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, disebutkan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Secara umum tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya GCG, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

Perusahaan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit serta Anggota Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

AUDIT COMMITTEE

In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines for the Work of the Audit Committee, the Audit Committee is a committee formed and responsible to the Board of Commissioners. Generally, the main task of the Audit Committee is to promote the implementation of Good Corporate Governance (GCG), establish an adequate internal control structure, enhance the quality of financial disclosure and reporting, and review the scope, accuracy, independence, and objectivity of public accountants.

The Company has established an Audit Committee based on Board of Commissioners Decree No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 dated March 26, 2021, regarding the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee and Members of the Audit Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Pedoman Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan SK.DK/26/04/02/JAI-2021. Piagam Komite ini berisi tentang ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Komite Audit. Pedoman Komite Audit akan secara berkala ditinjau secara periodik mengikuti perkembangan kegiatan usaha, organisasi, dan tingkat risiko di dalam Perusahaan yang mungkin muncul. Selain itu, pemutakhiran Pedoman Komite Audit akan memperhitungkan kebutuhan dari Komite yang ada pada Perseroan, dan akan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Komite Audit

Kriteria untuk menjadi anggota Komite Audit diatur dalam Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24 tanggal 22 Maret 2024 Perihal Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko di Lingkungan Pelindo Group (Hingga Cucu Perusahaan) serta menetapkan Direktur yang melaksanakan tugas fungsional dan Direktur yang melaksanakan tugas pembinaan.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Audit

Masa Jabatan Komite Audit diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit di Sepanjang Tahun 2023

Di tahun 2023, komposisi Komite Audit Perusahaan berjumlah 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Sementara itu, satu anggota lainnya dipilih dari kalangan profesional yang bersifat independen terhadap Perusahaan. Komposisi ini telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.05/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Audit Committee Guideline

In carrying out its duties and functions, the Audit Committee is guided by the Audit Committee Charter, which has been approved by the Company's Board of Commissioners based on SK.DK/26/04/02/JAI-2021. This Charter contains the applicable provisions and requirements of the Audit Committee. The Audit Committee guidelines are periodically reviewed to align with developments in business activities, organization, and the level of risk within the Company that may arise. Additionally, updating the Audit Committee Guidelines takes into account the needs of existing Committees in the Company and complies with applicable statutory provisions.

Audit Committee Criteria

The criteria for becoming a member of the Audit Committee are set forth in Letter of the Director of Finance and Risk Management of PT Pelindo Jasa Maritim Number: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24 dated March 22, 2024 Regarding the Determination of Risk Categories and Classifications within the Pelindo Group (Up to the Company's Grandchildren) and establishing Directors who carry out functional duties and Directors who carry out coaching duties.

Audit Committee Term of Office

The term of office of the Audit Committee is regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises which states that the term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners / Supervisory Board of BUMN is a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without reducing the right of the Board of Commissioners / Supervisory Board of BUMN to dismiss them at any time.

Audit Committee Composition, Numbers, Structure and Appointment Basis in 2023

In 2023, the composition of the Company's Audit Committee consisted of 3 (three) members, comprising 1 (one) Chairman and 1 (one) Member who is a member of the Company's Board of Commissioners. Additionally, another member was selected from professional circles, independent of the Company. This composition aligns with the provisions outlined in POJK No. 55/POJK.05/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee.

As of December 31, 2023, the composition of the Audit Committee is as follows:

Nama xxx	Jabatan xxx	Dasar Penetapan xxx	Masa Jabatan xxx
Bay Mokhamad Hasani	Ketua Komite Audit Audit Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit serta Anggota Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 dated 26 March 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Chair of the Audit Committee and Members of the Audit Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 April 2021-1 April 2024 1 April 2021-1 April 2024

Nama xxx	Jabatan xxx	Dasar Penetapan xxx	Masa Jabatan xxx
Dadang Budiawan	Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Member (Independent)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit serta Anggota Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 dated 26 March 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Chair of the Audit Committee and Members of the Audit Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 April 2021-1 April 2024 1 April 2021-1 April 2024
Yohsua P.S.I Anthonie	Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Member (Independent)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/30/12/01/JAI-2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree No. SK.DK/30/12/01/JAI-2021 dated 30 December 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Chair of the Audit Committee and Members of the Audit Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk	1 Januari 2022-1 Januari 2025 1 January 2022-1 January 2025

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile



Bay Mokhamad Hasani
Ketua Komite Audit
Audit Committee Chairman

Profil Ketua Komite Audit, Bay Mokhamad Hasani telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
His has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners profile section of this Annual Report



Dadang Budiawan
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 63 Tahun per 31 Desember 2023 Bandung, 15 Oktober 1960 63 years old as of December 31, 2023 Bandung, October 15, 1960
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi (SE) dan Akuntan (Ak), Akuntansi di Universitas Padjadjaran (2001) • Sarjana Ekonomi Manajemen, Manajemen Uninus Bandung (1986) • Bachelor of Economics (SE) and Accountant (Ak), Accounting from Padjadjaran University (2001) • Bachelor of Economics (SE) and Accountant (Ak), Accounting from Uninus Bandung (1986)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit serta Anggota Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 dated 26 March 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Chair of the Audit Committee and Members of the Audit Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Pengalaman Kerja Professional Experience	• Auditor Madya di Deputi Bidang Investigasi BPKP (2011-2020) • Konsultan Audit di PT Yasa Industri Nusantara (2011) • Auditor Ahli Muda di Deputi Bidang Investigasi BPKP (2009) • Intermediate Auditor at Investigation Deputy of BPKP (2011-2020) • Audit Consultant at PT Yasa Industri Nusantara (2011) • Young Expert Auditor at Deputy for Investigation of BPKP (2009)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.
Sertifikasi Certifications	Chartered Accountant (CA) dan Certification in Audit Committee Practices (CACP)



Yohsua P.S.I Anthonie

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)
Audit Committee Member (Independent)

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 55 Tahun per 31 Desember 2023 Jakarta, 16 September 1968 55 years old as of December 31, 2023 Bandung, September 16, 1968
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Management pada STM Labora (2010) Magister of Management from STM Labora (2010)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/30/12/01/JAI-2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree No. SK.DK/30/12/01/JAI-2021 dated 30 December 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Chair of the Audit Committee and Members of the Audit Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Kasubdit Pemanduan dan Penundaan Kapal (Agustus 2020 - Agustus 2023) • Kabid KBPP KSOP Banten (Juni 2018- Agustus 2020) • Fungsional KSU Tanjung Priok (Juni 2017 - Juni 2018) • Kasubdit Pemanduan dan Penundaan Kapal DJPL 2017 • Sub-Directorate Head for Ship Guiding and Towing (August 2020 - August 2023) • KBPP Head at KSOP Banten (June 2018- August 2020) • Functional at KSU Tanjung Priok (June 2017 - June 2018) • Sub-Directorate Head for Ship Guiding and Towing, DJPL 2017
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Untuk diangkat sebagai anggota Komite Audit. Kriteria independensi anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Audit Committee Independence

All members of the Audit Committee who are independent parties have no financial, management, share ownership, and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or relationships with the Company that could affect their ability to act independently. The independence criteria for Audit Committee members are as follows:

Tabel Kriteria Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence Criteria

Kriteria Independensi Independence Criteria	Bay Mokhamad Hasani	Dadang Budiawan	Yohsua P.S.I Anthonie
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir. Not an individual employed by a public accounting firm, legal consultant firm, or any other entity that provided audit, non-audit services, or other consulting services to the Company within the last 6 months.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Does not possess shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓	✓	✓
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. Not a person who held authority or responsibility in planning, leading, and/or controlling the Company within the last six months.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham utama Perusahaan. Has no family relationship, by marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with Commissioners, Directors, or major Shareholders of the Company.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.	✓	✓	✓
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Not currently affiliated with an institution whose business activities involve providing services to the Company.	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur di dalam Piagam Komite Audit. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas berbagai kegiatan Perusahaan, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

The duties and responsibilities of the Audit Committee are outlined in the Audit Committee Charter. The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function over various Company activities, which include:

1. Reviewing the financial information intended for release to the public and/or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information;
2. Reviewing compliance with laws and regulations regarding the Company's activities;
3. Providing independent opinions in case of disagreements between management and accountants regarding the services provided;
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners concerning the appointment of accountants based on independence, scope of assignment, and compensation for services;
5. Reviewing the implementation of audits by internal auditors and overseeing the follow-up actions by the Board of Directors regarding the internal auditor's findings;
6. Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
7. Reviewing and offering advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Company;
8. Maintaining the confidentiality of Company documents, data, and information.

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Komite Audit memberikan rekomendasi terkait penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Auidt atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, tertanggal 20 Juni 2023. Komite Audit selanjutnya memberikan rekomendasi pada tanggal 20 Juni 2023, terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Audit Committee Responsibilities in Providing Recommendations for the Appointment and Dismissal of External Auditors

In carrying out its responsibilities, the Audit Committee provides recommendations regarding the appointment and dismissal of external auditors, based on the Evaluation Report on the Implementation of Audit Services for Annual Historical Financial Information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms, dated June 30, 2023 Subsequently, the Audit Committee offers recommendations on June 30, 2023 regarding the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Jumlah dan Frekuensi Rapat Komite Audit

Di tahun 2023, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 14 (12 Rapat Internal + 2 dengan SPI). Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat-rapat tersebut.

Audit Committee Meeting Agenda

In 2023, the Audit Committee held 14 (12 Internal Meetings + 2 with SPI). The following are the agenda and minutes of meetings, attendance, as well as a summary of the level of attendance of the Audit Committee at these meetings.

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Audit
Meeting Frequency and Attendance Level of Audit Committee

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Presence	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Bay Mokhamad Hasani	14	14	100%
Dadang Budiawan	14	14	100%
Yohsua P.S.I Anthonie	14	14	100%

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit terus berupaya meningkatkan kompetensinya, di antaranya dengan mengikuti pelatihan, *workshop*, ataupun seminar. Di tahun 2023, Komite Audit telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Audit Committee Competency Development

To support the implementation of its duties and responsibilities, the Audit Committee continues to strive to improve its competence, including by attending training, workshops, or seminars. In 2023, the Audit Committee participated in the following competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Bay Mokhamad Hasani (Ketua Komite Audit) (Chairman)	Pelatihan Training	Audit Berbasis Risiko Risk-Based Audit	20 Februari 2023 February 20, 2023	PMLI
Dadang Budiawan (Anggota Komite Audit (Pihak Independen) (Member, Independent)	Pelatihan Training	Audit Berbasis Risiko Risk-Based Audit	25 Februari 2023 February 25, 2023	PMLI
	Seminar Seminar	Konferensi Nasional Komite Audit 2023 : "Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko" National Conference Audit Committee 2023 : "Guarding Sustainability and Growth of the Company Through Supervision and Risk Control"	19 Oktober 2023 October 19, 2023	IKAI
	Webinar	Webinar Diversifications and Risk Management in Logistic Industry	25 Oktober 2023 October 25, 2023	APLog

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Yohsua P.S.I Anthonie (Anggota Komite Audit (Pihak Independen) (Member, Independent)	Pelatihan Training	Audit Berbasis Risiko Risk-Based Audit	25 Februari 2023 February 25, 2023	PMLI

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite audit telah melaksanakan tugas Pelaksanaan tugas Komite Audit diantaranya direalisasikan dalam bentuk rapat. Frekuensi pertemuan Komite Audit adalah dalam rapat Komite Audit sebanyak 18 kali dimana komposisi rapat ini terdiri dari Rapat Koordinasi Komite dengan SPI dan Pejabat terkait dan Rapat Internal Dewan Komisaris

Audit Committee Duties Report in 2023

During the year 2023, the audit committee has carried out its duties The implementation of the Audit Committee's duties is realized in the form of meetings. The frequency of Audit Committee meetings was 18 times where the composition of these meetings consisted of Committee Coordination Meetings with SPI and related Officials and Internal Meetings of the Board of Commissioners.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk memastikan pelaksanaan proses nominasi dan remunerasi yang objektif, efektif, dan efisien. Dengan adanya Komite Remunerasi dan Nominasi, proses nominasi dan remunerasi pengurus Perusahaan serta organ pelaksana Perusahaan lainnya dapat dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan.

To support the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, the Nomination and Remuneration Committee was formed to ensure the implementation of the nomination and remuneration process in an objective, effective, and efficient manner. With the Remuneration and Nomination Committee, the nomination and remuneration process for Company management and other Company organs can be carried out transparently and accountably, in accordance with the Company's business development.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan SK.DK/26/04/03/JAI-2021. Piagam ini dijadikan landasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan Piagam tersebut sejalan dengan kebutuhan dan regulasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Nomination and Remuneration Committee Work Guideline

The Nomination and Remuneration Committee has a Nomination and Remuneration Committee Charter, which has been approved by the Company's Board of Commissioners based on SK.DK/26/04/03/JAI-2021. This charter serves as the foundation for implementing the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee. The Charter is periodically reviewed to ensure that its scope aligns with other needs and regulations related to the Company's business activities.

Kriteria Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen

Nomination and Remuneration Committee Criteria

In carrying out its duties and functions to supervise and advise on the management carried out by the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. All Committee Members from independent parties have no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Nomination and Remuneration Committee Office Term

The term of office of the Nomination and Remuneration Committee is regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises which states that the term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of BUMN is a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without reducing the right of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of BUMN to dismiss them at any time.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi di Sepanjang Tahun 2023

Di tahun 2023, terdapat perubahan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi, berdasarkan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 24 Juli 2023 para Dewan Komisaris bersepakat untuk menunjuk Bp. Bay Mokhamad Hasani sebagai Plt. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi menggantikan Bp. Hary Kriswanto sampai ditetapkan pengganti definitif. Sehingga keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 2 (dua) orang yang salah satu di antaranya berasal dari Komisaris Independen Perusahaan yang merangkap sebagai ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Berikut komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2023:

Nomination and Remuneration Committee Structure, Numbers, Composition and Appointment Basis in 2023

In 2023, there were changes to the composition of the Nomination and Remuneration Committee, based on Minutes of the Internal Meeting of the Board of Commissioners dated July 24, 2023, the Board of Commissioners agreed to appoint Mr. Bay Mokhamad Hasani as Acting Chairman of the Nomination and Remuneration Committee to replace Mr. Hary Kriswanto until a definitive replacement is appointed. Therefore the membership of the Nomination and Remuneration Committee consists of 2 (two) people, one of whom is an Independent Commissioner of the Company who also serves as chairman of the Nomination and Remuneration Committee. The following is the composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penetapan Appointment Basis	Masa Jabatan Office Term
Bay Mokhamad Hasani (merangkap mengisi kekosongan) (concurrently filling the vacancy)	Plt. Ketua Nominasi dan Remunerasi Acting Chairman	Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 24 Juli 2023 Minutes of the Internal Meeting of the Board of Commissioners dated July 24, 2023	24 Juli 2023 - Sekarang July 24, 2023 - Present
Ryan Hegar Suryadinatha	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/30/12/02/JAI-2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Board of Commissioners Decree No. SK.DK/30/12/02/JAI-2021 dated December 30, 2021 concerning Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk	1 Januari 2022-1 Januari 2025 1 Januari 2022-1 Januari 2025

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi



Bay Mokhamad Hasani
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Bay Mokhamad Hasani telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini
His profile has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners profile section of this Annual Report



Ryan Hegar Suryadinatha

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 31 Tahun per 31 Desember 2023 Mataram, 29 Desember 1992 31 years old as of December 31, 2023 Mataram, December 29, 2023
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi di Universitas Brawijaya (2015) Bachelor of Economy from Brawijaya University (2025)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/30/12/02/JAI-2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree No. SK.DK/30/12/02/JAI-2021 dated December 30, 2021 concerning Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Pengalaman Kerja Professional Background	• Anggota Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk (April 2021-Desember 2021) • Staf Sekretaris Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk (Oktober 2016 – Maret 2021) • Junior Konsultan GCG (*Good Corporate Governance*) untuk Individual Expert (Juli 2016-Juni 2020) • Audit Committee member of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (April 2021-December 2021) • Staff to the Secretary of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (October 2016 – March 2021) • GCG (Good Corporate Governance) Junior Consultant for Individual Expert (July 2016-June 2020)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders or other members of the Board of Commissioners and Directors

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan adalah anggota yang independen dan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tanggung jawab yang mencakup:

1. Tugas Pokok Berkaitan Nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
      ii) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
      iii) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee Profile Nomination and Remuneration Committee Independency

Members of the Company's Nomination and Remuneration Committee are independent and have no personal interests or connections that could negatively impact or create a conflict of interest with the Company. They have fulfilled the requirements to be appointed as members of the Nomination and Remuneration Committee.

Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities

In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee has responsibilities that include:

1. Main Duties Related to Nominations:
   a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      i) The composition of positions for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
      ii) Policies and criteria required in the nomination process.
      iii) Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

b. Melakukan kegiatan terkait nominasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku.
c. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan nominasi independen untuk melakukan penelaahan Kembali atas nominasi yang telah ditentukan, maka tugas Komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui *Human Capital*.

2. Tugas Pokok Berkaitan Remunerasi
a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi.
b. Melakukan kegiatan terkait remunerasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku.
c. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan remunerasi independen untuk melakukan penelaahan Kembali atas remunerasi yang telah ditentukan, maka tugas komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta melakukan *monitoring* pekerjaan konsultan melalui *Human Capital*.

b. Conducting activities related to nominations and reporting them to Shareholders in accordance with applicable legal procedures or provisions.
c. If the Committee deems it necessary to use an independent nomination consultant to review the nominations, the Committee's task is to provide input regarding the criteria and competency of the consultant and to monitor the consultant's work through Human Capital.

2. Main Tasks Related to Remuneration
a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies, and amount of remuneration.
b. Conducting activities related to remuneration and reporting them to Shareholders in accordance with applicable legal procedures or provisions.
c. If the Committee considers it necessary to use an independent remuneration consultant to review the remuneration, the Committee's task is to provide input regarding the criteria and competency of the consultant and to monitor the consultant's work through Human Capital.

Di tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sebanyak 15 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat-rapat tersebut.

In 2023, the Nomination and Remuneration Committee held 15 meetings . The following are the agenda and minutes of meetings, attendance, as well as a summary of the level of attendance of the Nomination and Remuneration Committee at these meetings.

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi
Meeting Frequency and Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Presence	Persentase Kehadiran Attendance Presence
Hary Kriswanto (Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi)* Hary Kriswanto (Chairman)*	9	9	100%
Bay Mokhamad Hasani (Plt. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi) Bay Mokhamad Hasani (Acting Chairman)	6	6	100%
Ryan Hegar Suryadinatha (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) Ryan Hegar Suryadinatha (Member)	15	15	100%

*) Tidak lagi menjabat dalam jajaran Komisaris sejak 24 Juni 2023
*) No longer serving as Commissioner since June 24, 2023

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan pengawasan manajemen risiko pada Perusahaan.

Pedoman Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan SK.DK/26/04/01/JAI-2021. Piagam ini digunakan sebagai pedoman dan tata tertib Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional dan independen. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko ditinjau secara berkala

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Monitoring Committee was formed and is responsible to the Board of Commissioners for supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners regarding the implementation and supervision of risk management in the Company.

Risk Management Committee Work Guideline

The Risk Management Monitoring Committee has a Risk Management Monitoring Committee Charter, which has been approved by the Company's Board of Commissioners based on SK.DK/26/04/01/JAI-2021. This Charter serves as guidelines and rules for the Risk Management Monitoring Committee to carry out its duties and responsibilities professionally and independently. The Risk Management Monitoring Committee

untuk memastikan bahwa cakupan Piagam tersebut sejalan dengan kebutuhan dan regulasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Charter is reviewed periodically to ensure that its scope aligns with other needs and regulations related to the Company's business activities.

Masa Jabatan Komite Pemantau Manajemen Risiko

Masa Jabatan Komite Pemantau Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Risk Management Committee Office Term

The term of office of the Risk Management Oversight Committee is regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises which states that the term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of BUMN is a maximum of 3 (three) years and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board of BUMN to dismiss them at any time.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko di Sepanjang Tahun 2023

Di tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposis Komite Pemantau Manajemen Risiko, dengan demikian berdasarkan Keputusan Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Nomor: SK.DK/26/03/03/JAI-2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Serta Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Risk Management Committee Structure, Number, Composition and Appointment Basis in 2023

In 2023, there were no changes to the composition of the Risk Management Monitoring Committee. Therefore, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Number: SK.DK/26/03/03/JAI-2021 concerning the Formation and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Management Monitoring Committee as a Supporting Organ for the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, the composition of the Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2023, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penetapan Appointment Basis	Masa Jabatan Office Term
R. R. Dewi Ariyani	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Nomor: SK.DK/26/03/03/JAI-2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Serta Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Number: SK.DK/26/03/03/JAI-2021 concerning the Formation and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Management Monitoring Committee as a Supporting Organ for the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 April 2021-1 April 2024 April 1, 2021-April 1, 2024
Hartian S. Widhanto, CIA, CRMA, CISA, CRISC, GRCA, GRCP, CACP	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Nomor: SK.DK/26/03/03/JAI-2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Serta Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Number: SK.DK/26/03/03/JAI-2021 concerning the Formation and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Management Monitoring Committee as a Supporting Organ for the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 April 2021-1 April 2024 April 1, 2021-April 1, 2024

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Monitoring Committee Profile



R. R. Dewi Ariyani
Ketua Komite Pemantauan Manajemen Risiko
Chairman of Risk Monitoring Committee

Profil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko, R. R. Dewi Ariyani telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Her profile has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners profile section of this Annual Report.



Hartian S. Widhanto, CIA, CRMA, CISA, CRISC, GRCA, GRCP, CACP

Anggota Komite Pemantauan Manajemen Risiko
Member of Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 53 Tahun per 31 Desember 2023 21 November 1970 53 years old as of December 31, 2023 November 21, 1970
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• *Master of Science in Engineering* pada bidang Engineering Management dari the University of Birmingham, UK (1996) • Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1994) • Master of Science in Engineering Management from the University of Birmingham, UK (1996) • Bachelor of Electric Engineering from Bandung Institute of Technology (1994)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Nomor: SK.DK/26/03/03/JAI-2021 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Serta Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Number: SK.DK/26/03/03/JAI-2021 concerning the Formation and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Management Monitoring Committee as a Supporting Organ for the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Praktisi pada bidang *corporate oversight* • Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko (Pihak Independen) • Corporate oversight practitioner (periode menjabat) • Risk Management Committee Member (Independent) (periode menjabat)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.

Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kecukupan kebijakan dan pedoman manajemen risiko Perseroan dibandingkan dengan praktik terbaik dan/atau praktik umum yang berlaku.
2. Memastikan efektivitas pelaksanaan praktik manajemen risiko termasuk kepatuhan pelaksanaannya terhadap kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

Risk Monitoring Committee Independency

All members of the Risk Management Monitoring Committee, who are independent parties, meet the requirements to be appointed as a member of the committee. They have no financial, management, share ownership, and/or family relationships with the Board of Commissioners, Directors, and/or Shareholders, or relationships with the Company, which could affect their ability to act independently.

Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

The Risk Management Committee has the following duties and responsibilities:

1. Evaluate the adequacy of the Company's risk management policies and guidelines compared to applicable best practices and/or general practices.
2. Ensure the effectiveness of the implementation of risk management practices, including compliance with the risk management policies and guidelines applicable within the Company.

3. Mengevaluasi kecukupan *risk appetite* Perusahaan.
4. Mengevaluasi kecukupan dan kewajaran laporan profil risiko Perusahaan dan/atau hasil asesmen risiko oleh manajemen, termasuk risiko-risiko yang berkenaan dengan inisiatif strategi Perusahaan.
5. Melakukan pengawasan atas realisasi dari rencana mitigasi atau respon atas risiko-risiko signifikan Perusahaan.
6. Memberikan masukan dan rekomendasi atas rencana kerja unit manajemen risiko Perusahaan, serta memantau realisasinya.
7. Memberikan masukan dan rekomendasi atas strategi dan rencana peningkatan maturitas manajemen risiko Perusahaan, serta memantau realisasinya.
8. Memberikan masukan dan rekomendasi atas rencana pengembangan sistem pendukung dan kompetensi sumber daya manusia yang berperan penting dalam penerapan manajemen risiko Perusahaan, serta memantau realisasinya.
9. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

3. Evaluate the adequacy of the Company's risk appetite.
4. Evaluate the adequacy and fairness of the Company's risk profile report and/or the results of risk assessments by management, including risks related to the Company's strategic initiatives.
5. Supervise the realization of mitigation plans or responses to the Company's significant risks.
6. Provide input and recommendations on the work plan of the Company's risk management unit, and monitor its realization.
7. Provide input and recommendations on strategies and plans to increase the Company's risk management maturity, and monitor their realization.
8. Provide input and recommendations on plans to develop support systems and human resource competencies that play an important role in implementing the Company's risk management, as well as monitor their realization.
9. Carry out other duties and responsibilities assigned by the Board of Commissioners from time to time.

Di tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam rapat-rapat tersebut.

In 2023, the Risk Management Monitoring Committee convened in 12 meetings. Below are the agenda and minutes of these meetings, including attendance records and a summary of the Committee members' attendance levels.

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko
Meeting and Attendance Level of Risk Monitoring Committee

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Presence	Persentase Kehadiran Level of Attendance
R. R. Dewi Ariyani	12	12	100%
Hartian S. Widhanto, CIA, CRMA, CISA, CRISC, GRCA, GRCP, CACP	12	12	100%

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Manajemen Risiko terus berupaya meningkatkan kompetensinya, di antaranya dengan mengikuti pelatihan, *workshop*, ataupun seminar. Di tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Competency Development

To enhance the implementation of its duties and responsibilities, the Risk Management Monitoring Committee remains committed to enhancing its competency. This includes participation in training, workshops, or seminars. In 2023, the Risk Management Monitoring Committee participated in the following competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organier
R. R. Dewi Ariyani (Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko) R. R. Dewi Ariyani (Chairman of Risk Monitoring Committee)	Pelatihan Training	Audit Berbasis Risiko Risk-Based Audit	PMLI/20 Februari 2023 PMLI/ February 20, 2023	PMLI
Hartian S. Widhanto, CIA, CRMA, CISA, CRISC, GRCA, GRCP, CACP (Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko) Hartian S. Widhanto, CIA, CRMA, CISA, CRISC, GRCA, GRCP, CACP (Member of Risk Monitoring Committee)	-	-	-	-

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan belum memiliki Komite di bawah Direksi, namun dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan, Direksi memiliki organ pendukung yang bersifat struktural guna memperkuat sistem tata kelola perusahaan. Dua organ penting yang menjadi pilar pendukung dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kesehatan manajerial Perusahaan terdiri dari Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

As of the end of 2023, the Company has not established a Committee under the Board of Directors, however, in fulfilling its duties and responsibilities regarding the Company's management functions, the Board of Directors has structural supporting organs aimed at reinforcing the company's governance system. Two essential organs that serve as pillars in maintaining operational sustainability and managerial soundness of the Company include the Corporate Secretary and Internal Audit.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam perannya yang strategis, Sekretaris Perusahaan memainkan peran kunci dalam memastikan perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan transparansi, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga berkontribusi secara signifikan dalam membantu Direksi menjalin hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan berbagai pihak terkait, seperti regulator, investor, masyarakat umum, dan entitas lainnya. Melalui Divisi *Corporate Secretary* yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan, perusahaan memastikan implementasi GCG memenuhi standar ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan *best practice*. Tidak hanya itu, peran Sekretaris Perusahaan juga mencakup manajemen informasi terkait aktivitas bisnis Perusahaan dengan tujuan membangun citra korporasi yang positif.

CORPORATE SECRETARY

In its strategic capacity, the Corporate Secretary plays a pivotal role in protecting stakeholder interests, enhancing compliance with laws and regulations, and promoting transparency and communication with stakeholders. Additionally, the Corporate Secretary significantly contributes to fostering harmonious relationships between the Company and various stakeholders, including regulators, investors, the public, and other entities. Through the Corporate Secretary Division, tasked with fulfilling the Corporate Secretary's function, the company ensures that corporate governance practices adhere to statutory regulations and best practices. Moreover, the Corporate Secretary is responsible for managing information related to the Company's business activities, aiming to cultivate a positive corporate image.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama serta memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berdasarkan SK Direksi PT JAI Tbk No. KP.428/1/2/MS-19, Tanggal 16 Juli 2019, Perusahaan telah menunjuk Eddy Haristiani sebagai Sekretaris Perusahaan.

Corporate Secretary Profile

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director and directly reports to the President Director. Eddy Haristiani was appointed as Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors of PT JAI Tbk No. KP.428/1/2/MS-19, dated July 16, 2019.





Eddy Haristiani

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 52 tahun Per 31 Desember 2023 4 Desember 1970 52 years old as of December 31, 2023 December 4, 21970
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• *Master of Public Administrations*, International Christian University, Tokyo (2005) • Sarjana Komunikasi Massa, Universitas Gadjah Mada (1995) • Master of Public Administrations, International Christian University, Tokyo (2005) • Bachelor of Mass Communication, Gadjah Mada University (1995)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	SK Direksi PT JAI Tbk No. KP.428/1/2/MS-19, Tanggal 16 Juli 2019.
Pengalaman Kerja Professional Experience	• SVP/*Group Head of Corporate Secretary of* PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (Juni 2018–Juli 2019) • *Manager of Learning of Port and Maritime* - PT PMLI (IPC Corporate University)/*One of PT Pelindo II's Subsidiaries* (November 2014 – June 2018) • *Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of* PT Pelindo II (Persero) - (2012 – Oktober 2014) • SVP/Group Head of Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (June 2018–July 2019) • Manager of Learning of Port and Maritime - PT PMLI (IPC Corporate University)/One of PT Pelindo II's Subsidiaries (November 2014 – June 2018) • Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of PT Pelindo II (Persero) - (2012 – October 2014)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.
Sertifikasi Certification	Certified Chief Governance Officer (CCGO)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: HK-568/1/9/1/MS-21 tanggal 1 September 2021, tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk, meliputi:

1. Komunikasi Perusahaan dan CSR
   Komunikasi perusahaan, *corporate branding*, membangun profesional intimasi dengan media & *stakeholders*, mengelola *database* media dan *stakeholders*, pengelolaan *website* (dual Bahasa) dan media sosial, mengelola dan menyusun serta melakukan *press release*, sebagai *bridging* komunikasi antara *ultimate shareholder*, BOC beserta perangkatnya (Sekdekom, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko) dan BOD, penyaluran CSR.

Corporate Secretary Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Company's Corporate Secretary are determined in accordance with Decree Number: HK-568/1/9/1/MS-21 dated September 1, 2021, concerning the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, include:

1. Corporate Communication and CSR
   Corporate communications, corporate branding, building professional intimacy with media & stakeholders, managing media and stakeholder databases, managing websites (dual language) and social media, managing and compiling and conducting press releases, as a bridging communication between ultimate shareholders, BOC and its apparatus (Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee) and BOD, CSR distribution.

2. Hubungan Investor dan Tata Usaha Direksi
Membangun dan memperkuat kepercayaan pasar kepada Perseroan melalui formulasi dan implementasi strategi komunikasi. Mengikuti perkembangan bursa saham domestik, regional dan global. Membangun hubungan baik yang profesional dengan para pelaku pasar. Menyajikan informasi yang relevan dan akurat bagi investor mengenai perkembangan perusahaan, seperti yang terkait dengan kinerja operasional dan keuangan. Bersama sub divisi komunikasi perusahaan dan CSR menyusun dan mendistribusikan *press release* kepada pelaku pasar dan media. Membantu dalam menyiapkan dan menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

2. Investor Relations and Board of Directors Administration
Building and strengthening market trust in the Company through the formulation and implementation of communication strategies. Follow developments in domestic, regional and global stock exchanges. Building good, professional relationships with market players. Provide relevant and accurate information for investors regarding company developments, such as those related to operational and financial performance. Together with the corporate communications and CSR sub-divisions, prepare and distribute press releases to market players and the media. Assist in preparing and compiling Annual Reports and Sustainability Reports.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Berikut adalah struktur organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor HK-568/1/9/1/MS-21, yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2021.

Corporate Secretary Structure

Berikut adalah struktur organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor HK-568/1/9/1/MS-21, yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2021.

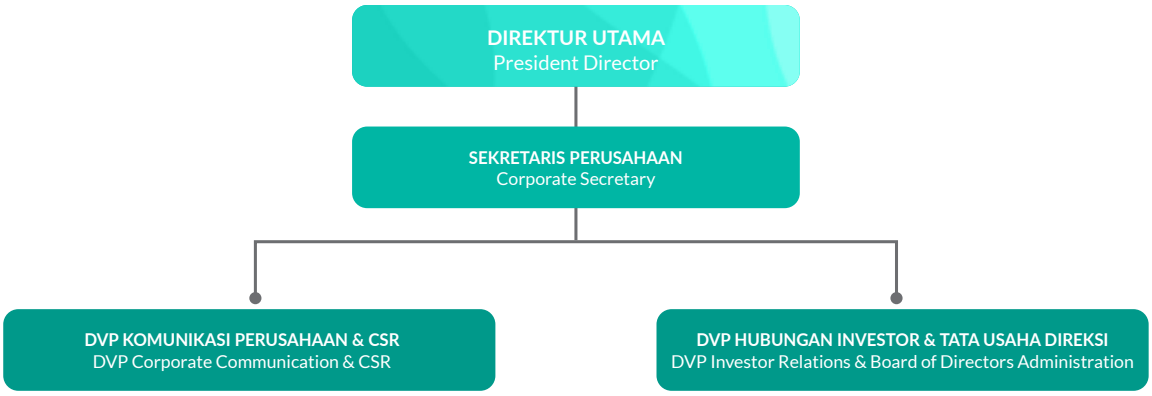

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan terus berupaya meningkatkan kompetensinya, di antaranya dengan mengikuti pelatihan, *workshop*, ataupun seminar. Di tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Corporate Secretary Competency Development

To enhance the implementation of its duties and responsibilities, the Corporate Secretary continually strives to enhance its expertise by participating in various training sessions, workshops, and seminars. In 2023, the Corporate Secretary has engaged in the following competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Types	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tempat/Tanggal** Location/Date	**Penyelenggara** Organizer
Eddy Haristiani (Sekretaris Perusahaan) (Corporate Secretary)	Webinar	Diversification and Risk Management in Logistik Industry	25 Oktober 2023 October 25, 2023	APlog Logistik Forum
	Workshop	Diskusi Nasional: Regulasi, Bisnis dan Masa Depan Pelabuhan, Seperti Apa?	9 November 2023 November 9, 2023	MEDIA OCEAN WEEK
	Pelatihan Training	Diklat Certified Chief Governance Officer (CCGO)	21 November 2023 November 21, 2023	PT Bahtera Ilmu Sejahtera Audita (PT BISA)

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tindak lanjut *improvement* area hasil *scoring* GCG tahun 2022;
2. Menyelesaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dengan batas waktu yang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya dan pasrtisipasi dalam perlombaan terkait;
3. Menyalurkan dana CSR yang tepat sasaran dan tepat guna;
4. Melaksanakan investor/*analyst meeting*, me-*release press release*, melaksanakan media *gathering*;
5. Mengelola konten informasi perusahaan pada *platform* media sosial dan *website* serta partisipasi dalam kompetisi bidang kesekretariatan Perusahaan;
6. Melaksanakan penyusunan program K3, pelaksanaan program K3, penyediaan sarana dan prasarana K3 (APAR, Obat P3K, LSP/FFA Kapal), evaluasi program K3.

Corporate Secretary 2023 Duties Report

Throughout 2023, the Corporate Secretary has performed the following activities:

1. Implemented follow-up improvements based on the GCG scoring results from 2022;
2. Accelerated the completion of the Annual Report and Sustainability Report, surpassing the previous year's deadline, and participated in related competitions;
3. Allocated CSR funds with precision and suitability for designated purposes;
4. Conducted investor/analyst meetings, issued press releases, and organized media events;
5. Managed corporate information content across social media platforms and websites, also participating in company secretarial competitions;
6. Oversaw the preparation, execution, and evaluation of the Occupational Health and Safety (OHS) program, including the provision of K3 facilities and infrastructure (such as APAR, First Aid Medicine, Ship LSP/FFA).

AUDIT INTERNAL

Sebagai organ pendukung Direksi, Audit Internal bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan dan konsultasi secara independen dan objektif kepada manajemen guna meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional Perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola perusahaan.

Dalam hal ini, Audit Internal juga memiliki mandat untuk meninjau dan memastikan proses dan kinerja keuangan serta non-keuangan, termasuk manajemen mutu dan operasional, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Direktur Utama. Aktivitas ini dijalankan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh kebijakan, keputusan, prosedur, dan pengendalian manajemen telah diatur secara efektif dan efisien sesuai dengan norma-norma pengelolaan manajemen yang lazim dan berlaku umum, serta berstandar dan beretika.

Pengangkatan dan Profil Kepala Kepala Audit Internal

Kepala Audit Internal (Ka SPI), Sdr. Amir Indra Sasongko, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 22 Juni 2023. Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Direktur Perusahaan dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Berikut adalah profil dari Kepala Audit Internal pada periode tahun 2023.

INTERNAL AUDIT

As a supportive organ for the Board of Directors, Internal Audit is tasked with providing independent and objective assurance and consulting services to management, aiming to enhance value and enhance the Company's operational activities. This involves evaluating and enhancing the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance processes.

Furthermore, Internal Audit is instructed to review and ensure the effectiveness of both financial and non-financial processes and performance, including quality and operational management, as directed by the President Director. This activity aims to ensure that all policies, decisions, procedures, and management controls are effectively and efficiently regulated in accordance with customary and generally accepted management norms, as well as standards and ethics.

Internal Audit Head Profile and Appointment

Internal Audit Head (Ka SPI), Mr. Amir Indra Sasongko, was appointed based on the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal June 22, 2023. This decree, signed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners. The following information outlines the profile of the Internal Audit Head for the 2023 period.



Amir Indra Sasongko

Kepala Audit Internal
Internal Audit Head

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 53 tahun Per 31 Desember 2023 53 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Sosial (S. Sos), Universtas Krisnadwipayana (1996) • Qualified Internal Audit (QIA), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2019) • Pendidikan Sertifikasi Praktisi Komite Audit Batch 37, Indonesia Institute of Audit Commitee (2023) • Sarjana Sosial (S. Sos), Universtas Krisnadwipayana (1996) • Qualified Internal Audit (QIA), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2019) • Pendidikan Sertifikasi Praktisi Komite Audit Batch 37, Indonesia Institute of Audit Commitee (2023)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Kepala Satuan Pengawasan Intern, PT Pengerukan Indonesia, periode (2016-2023) Head of Internal Audit Unit, PT Pengerukan Indoneisa (2016-2023)
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-21 tanggal 22 Juni 2023 • JAI Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/2/4/1/SRA/OUT/JAI-23 tanggal 2 April 2023 • Pelindo Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-June 22, 2023 • JAI Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number KP.10.02/2/4/1/SRA/OUT/JAI-23 dated April 2, 2023
Pengalaman Kerja Professional Experience	Kepala Satuan Pengawasan Intern, PT Pengerukan Indonesia, periode (2016-2023) Head of Internal Audit Unit, PT Pengerukan Indoneisa (2016-2023)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Does not have afiliated relationship with main shareholder or either members of the Board of Commissioners and Directors.
Sertifikasi Certification	Qualified Internal Audit (QIA)

Pedoman Audit Internal

Internal Audit mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Audit Charter*. Piagam Audit Internal Perusahaan telah ditetapkan Direktur Utama Perusahaan pada Tanggal 7 April 2020. Muatan Piagam Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. Dalam hal ini, *Audit Charter* memberikan arahan mengenai tujuan, posisi, wewenang, tanggung jawab, dan cakupan pekerjaan internal audit, membahas secara komprehensif mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab. Adapun hal-hal yang dimuat dalam *Internal Audit Charter* adalah:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Definisi, Visi dan Misi
- Bab III Tujuan Pengawasan Internal
- Bab IV Struktur dan Kedudukan
- Bab V Kewenangan dan Kerahasiaan
- Bab VI Peran dan Tanggung Jawab
- Bab VII Kode Etik Auditor Internal

Audit Internal Guideline

Internal Audit directs the implementation of its duties and functions based on the principles contained in the Audit Charter. The Company's Internal Audit Charter was established by the Company's President Director on April 7, 2020. The contents of the Internal Audit Charter are in accordance with POJK No. 56/2015 concerning the Formation and Guidelines for Preparing an Internal Audit Charter. In this case, the Audit Charter provides direction regarding the objectives, position, authority, responsibility, and scope of internal audit work, discussing comprehensively the position, authority, and responsibility. The matters contained in the Internal Audit Charter include:

- Chapter I: Introduction
- Chapter II: Definition, Vision, and Mission
- Chapter III: Objectives of Internal Control
- Chapter IV: Structure and Position
- Chapter V: Authority and Confidentiality
- Chapter VI: Roles and Responsibilities
- Chapter VII: Internal Auditor Code of Ethics

Independensi Audit Internal

Auditor Internal harus senantiasa bersikap independen dan objektif dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan.
Untuk menegakkan independensi dan objektivitas, Auditor Internal harus:

1. Menghindarkan diri dari kondisi benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan objek pengawasan;
2. Bekerja dengan bebas tanpa pengaruh dan campur tangan dari pihak lain;
3. Memetakan, mencatat dan melaporkan suatu hal sesuai dengan kondisi sebenarnya;
4. Menghindarkan diri untuk melaksanakan tugas pada objek pengawasan di mana yang bersangkutan terlibat aktif pada objek pengawasan tersebut dalam kurun waktu kurang dari satu tahun terakhir.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang penting dari tata kelola perusahaan, aktivitas Pengawasan Internal memberikan jaminan terhadap sistem pengendalian internal, efektivitas dan efisiensi operasional, ketaatan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta ketepatan dan kehandalan pelaporan. Adapun Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Audit Internal akan berperan aktif dalam:
   a. Mengembangkan dan menjaga budaya akuntabilitas dan integritas;
   b. Memfasilitasi integrasi sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko ke dalam kegiatan pengelolaan perusahaan sehari-hari;
   c. Mempromosikan budaya efisiensi dan efektifitas kerja, penilaian mandiri serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku baik internal maupun eksternal untuk terwujudnya tatakelola perusahaan yang baik.
2. Ruang lingkup pengawasan internal meliputi namun tidak terbatas pada:
   a. Efektifitas tatakelola, manajemen risiko serta pengendalian internal;
   b. Evaluasi kinerja satuan unit perusahaan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kegiatan Audit Internal meliputi area sebagai berikut:
   a. Kegiatan pengawasan dengan orientasi pada:
      i) Memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
      ii) Pencatatan, pengendalian dan pengelolaan aset dan sumber daya Perusahaan;
      iii) Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan serta prosedur Perusahaan;
      iv) Mengevaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional;
      v) Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan Pengawasan Internal, seperti penyelidikan dan pengungkapan penyimpangan, kecurangan dan pemborosan.

Internal Audit Independency

Internal Auditors must always be independent and objective in every supervisory task.
To uphold independence and objectivity, Internal Auditors must:

1. Avoid conditions of conflict of interest between personal interests and the interests of the object of supervision;
2. Work freely without influence and interference from other parties;
3. Mapping, recording and reporting a matter in accordance with the actual conditions;
4. Avoiding to carry out duties on the object of supervision where the person concerned is actively involved in the object of supervision in a period of less than one year.

Internal Audit Duties and Responsibilities

As one of the important supporting organs of the Board of Directors in corporate governance, Internal Audit activities provide guarantees for the internal control system, operational effectiveness and efficiency, compliance with applicable rules and regulations, as well as accuracy and reliability of reporting. The Internal Audit has the following duties:

1. In carrying out its duties and functions, Internal Audit will play an active role in:
   a. Developing and maintaining a culture of accountability and integrity;
   b. Facilitating the integration of Internal Control and Risk Management systems into daily company management activities;
   c. Promoting a culture of work efficiency and effectiveness, independent assessment, and compliance with applicable laws and regulations, both internal and external, to realize good corporate governance.
2. The scope of internal supervision includes but is not limited to:
   a. Assessing the effectiveness of governance, risk management, and internal control;
   b. Evaluating the performance of company units in achieving predetermined goals and objectives.
3. Internal Audit activities cover the following areas:
   a. Supervision activities with orientation to:
      i) Ensure that the management control system is adequate, works efficiently and economically, and functions effectively in achieving the set goals and objectives;
      ii) Record, control, and manage Company assets and resources;
      iii) Evaluate compliance with applicable laws and regulations, as well as Company policies and procedures;
      iv) Assess the reliability and integrity of financial and operational information;
      v) Perform special assignments relevant to the scope of Internal Audit work, such as investigating and disclosing irregularities, fraud, and waste.

b. Kegiatan Konsultansi dan Asistensi
Audit Internal dapat memberikan konsultansi dan asistensi kepada manajemen perusahaan terkait dengan penerapan tatakelola perusahaan yang baik dan pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan.
c. Tanggung Jawab Audit Internal
Audit Internal bertanggung jawab untuk memonitor dan memberikan asistensi tindak lanjut hasil audit kepada *auditee* hingga tuntas.

b. Consultancy and Assistance Activities:
Internal Audit can provide consultancy and assistance to company management regarding the implementation of good corporate governance and achieving the Company's goals and objectives.
c. Internal Audit Responsibilities
Internal Audit is responsible for monitoring and providing follow-up assistance to audit results to auditees until completion.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Fungsi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Audit Internal dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme interna dengan persetujuan Dewan Komisaris.

The Responsible Party to Appoint and Dismiss Internal Audit Head

The Internal Audit function is led by the Internal Audit Head and reports directly to the President Director, and the Internal Audit Head is appointed through an internal mechanism, with approval from the Board of Commissioners.

Struktur Organisasi Audit Internal

Struktur Audit Internal Perusahaan saat ini dijalankan berdasarkan SK Direksi Nomor: HK-568/1/9/1/MS-21 tanggal 1 September 2021. Struktur Organisasi Audit Internal Perusahaan adalah sebagai berikut:

Internal Audit Organization Structure

The current organizational structure of the Company's Internal Audit is implemented based on Board of Directors' Decree Number: HK-568/1/9/1/MS-21 dated September 1, 2021.



Sertifikasi sebagai Profesi SDM Audit Internal

Hingga akhir 31 Desember 2023, Audit Internal memiliki 2 (dua)) personal. Berikut disampaikan sertifikasi profesi Audit Internal yang dimiliki pekerja Audit Internal hingga akhir tahun 2023:

Professional Certification as an Internal Audit

As of December 31, 2023, Internal Audit has 2 (two) personnel. The following are the professional certifications held by Internal Audit employees until the end of 2023:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1.	Amir Indra Sasongko	Kepala Audit Internal Head of Internal Audit	QIA (*Qualified Internal Audit*)
3.	M. Taufik Tamanyira	Auditor Internal Internal Auditor	QIA (*Qualified Internal Audit*)

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1.	Amir Indra Sasongko	*Qualified Internal Auditor* - Managerial Qualified Internal Auditor – Managerial	YPIA
		Certification in Audit Committee Practices (CACP)	IKAI
3.	M. Taufik Tamanyira	*Qualified Internal Auditor* - Managerial Qualified Internal Auditor – Managerial	YPIA
		Sertifikasi QIA QIA Certification	DS-QIA

Pengembangan Kompetensi SDM Audit Internal

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Audit Internal terus berupaya meningkatkan kompetensinya, di antaranya dengan mengikuti pelatihan, *workshop*, ataupun seminar. Di tahun 2023, Audit Internal telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Internal Audit Competency Development

To enhance its competency and support the fulfillment of its duties and responsibilities, Internal Audit continuously strives for improvement by participating in training, workshops, or seminars. In 2023, Internal Audit participated in the following competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Amir Indra Sasongko (Kepala Audit Internal) (Internal Audit Head)	Pelatihan Training	Certification in Audit Committee Practices (CACP)	Jakarta, 12-14 Desember 2023 Jakarta, December 12-14, 2023	IKAI
M. Taufik Tamanyira (Auditor Internal) (Internal Auditor)	.....	.....	.....	.....

Pelaksanaan Rapat Audit Internal

Sepanjang tahun 2023, Audit Internal menyelenggarakan 10 (sepuluh) rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit dengan agenda rapat dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Internal Audit sebagai berikut:

Internal Auditor Meeting

Throughout 2023, Internal Audit has held 10 (ten) meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee with meeting agenda and attendance level of each Internal Audit member are as follows:

Tingkat Kehadiran Rapat Audit Internal
Meeting Attendance of Internal Audit Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1.	Amir Indra Sasongko	10	100%
2.	M. Taufik Tamanyira	8	80%

Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2023

Unit Internal Audit Perusahaan merespons dan bertindak secara proaktif terhadap dinamika yang terjadi dalam perkembangan metodologi internal audit. Dengan adanya perubahan ini, rencana audit yang sebelumnya statis kini menjadi lebih dinamis, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan.

Dalam tahun 2023, kegiatan Audit Internal dijalankan sesuai dengan fokus utama Perusahaan. Melalui pelaksanaan Audit Internal, upaya dilakukan untuk memastikan pertumbuhan perusahaan yang *prudent*, sekaligus diimbangi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang kuat di seluruh unit kerja. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan kinerja berkelanjutan guna mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi temuan audit dilaksanakan secara kontinyu setiap bulan agar mendapat penyelesaian dari auditee secara tepat waktu.

Internal Audit 2023 Duties Report

The Company's Internal Audit Unit responds and acts proactively to the dynamics occurring in the development of internal audit methodology. With this change, the previously static audit plan has now become more dynamic, adapting to the Company's conditions and needs.

In 2023, Internal Audit activities have been carried out in accordance with the Company's main focus. Through the implementation of Internal Audit, efforts are made to ensure prudent company growth, while being balanced with the implementation of strong corporate governance in all work units. This aims to support sustainable performance growth to achieve the Company's Vision and Mission.

The implementation of follow-up monitoring of audit findings recommendations is carried out continuously every month in order to obtain timely completion from the auditee.

Pelaksanaan Audit

Realisasi pelaksanaan penugasan Audit Internal tahun 2023 sebagai berikut:

Audit Implementation

The realization of the implementation of Internal Audit assignments in 2023 is as follows:

Pelaksanaan Implementation	Jumlah Penugasan Total Assigment	Wilayah Operasi Operational Areas	Direktorat Unit Unit Directorate	Audit Khusus Special Audit
Semester I - 2023 Semester I - 2023	1	5	5	0
Semester II - 2022 Semester II - 2022	1	5	5	1

Jumlah temuan pada Kantor Pusat dan wilayah operasi sebagai berikut:

The number of findings at the Head Office and operational areas is as follows:

PENYELESAIAN TEMUAN UNIT AUDIT INTERNAL TAHUN 2023
COMPLETION OF INTERNAL AUDIT UNIT FINDINGS IN 2023

No.	Satuan Kerja Work Unit	Tahun Pemeriksaan Audit Year	Saldo Awal Temuan Beginning Balance of Findings	Penambahan Addition	Penyelesaian Completion	Saldo Akhir Ending Balance
1.	Kantor Pusat dan Wilayah Operasi Head Office and Operational Areas	2022	0	35	31	4
2.	Kantor Pusat dan Wilayah Operasi Head Office and Operational Areas	2023	4	29	32	1

Komunikasi hasil audit dengan Direktur Utama, Komisaris dan komite Audit:
Hasil audit yang dilakukan oleh SPI disampaikan kepada Direksi melalui Direktur Utama, selanjutnya Direksi dalam hal ini Direktur Utama menyampaikan hasil laporan audit kepada Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit. Dalam rangka melakukan pendalaman, Komite Audit bisa berkoordinasi intensif dengan SPI.

Communication of audit results with the President Director, Commissioners and Audit Committee:
The results of the audit conducted by SPI are submitted to the Board of Directors through the President Director, then the Board of Directors in this case the President Director submits the results of the audit report to the Board of Commissioners with a copy of the Audit Committee. In order to conduct a deepening, the Audit Committee can coordinate intensively with SPI.

AUDITOR EKSTERNAL
EXTERNAL AUDITOR

Fungsi pengawasan keuangan Perusahaan diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik sebagai pemeriksa audit eksternal yang independen. Kantor Akuntan Publik merupakan organ eksternal bagi Perusahaan yang memberikan opini mengenai kesesuaian penyajian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Perusahaan secara khusus memastikan bahwa auditor eksternal yang dipilih tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Untuk memastikan bahwa proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan dengan tepat waktu, pertemuan rutin diadakan untuk membahas sejumlah permasalahan penting dan signifikan. Perusahaan secara konsisten berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit, dan Manajemen, dengan tujuan untuk meminimalisir kendala-kendala yang mungkin muncul selama proses audit.

MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan melalui RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2023

Sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023, pemegang saham Perusahaan telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

The Company entrusts its financial oversight function to a Public Accounting Firm, serving as an independent external audit examiner. This firm provides opinions regarding the suitability of the Company's financial reports presentation with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia. The Company ensures that the selected external auditor does not have a conflict of interest with the Company.

To ensure the audit process aligns with the Professional Standards for Public Accountants and the established audit scope, and to facilitate timely completion, regular meetings are held to discuss important and significant issues. The Company consistently strives to improve communication between the Public Accountant, Audit Committee, and Management, aiming to minimize obstacles that may arise during the audit process.

PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT MECHANISM

The appointment of a Public Accounting Firm is determined through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS), considering the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection process follows the Company's procurement mechanism for goods and services. To ensure the independence and quality of audit results, the appointed External Auditor must not have any conflicts of interest with the Company.

PUBLIC ACCOUNTANT IN 2023

In accordance with the resolution of the Annual GMS dated June 21, 2023, the Company's shareholders have approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG) to provide audit services for the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year.

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	:	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)*
Akuntan Accountant	:	Moch Dadang Syachruna
Tahun Audit Audit	:	2023
Periode Penugasan Assignment Period	:	2022-2023
Jasa Service	:	Audit Umum atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 General Audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2023
Biaya Audit Audit Fee	:	Rp984.966.800 (belum termasuk ppn) (excluding VAT)

Opini Opinion	:	(Belum Ada) (Not yet provided)
Jasa Selain Audit yang Diberikan Other Services Besides Audit	:	(Tidak ada) (None)
Biaya Fee	:	Rp984.966.800 (belum termasuk ppn) (excluding VAT)

AKUNTAN PUBLIK DAN BIAYA PERIODE LIMA TAHUN TERAKHIR

PUBLIC ACCOUNTANT AND FEE IN THE LAST FIVE YEARS

Daftar Kantor Akuntan Publik Tahun 2019-2023
Public Accounting Firm 2019-2023

Tahun Buku Financial Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accountng Firm	**Akuntan** Accountant	**Ruang Lingkup Audit** Audit Coverage	**Opini** Opinion	**Biaya** Fee
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)*	Moch Dadang Syachruna	Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Financial Statements of 2023 Financial Year	Tidak ada None	Rp984.966.800 (belum termasuk ppn) (excluding VAT)
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)*	Moch. Dadang Syachruna	1. Melaksanakan audit umum dan menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas laporan hasil evaluasi dan pencapaian KPI untuk tahun buku 2022. 3. Sebagai bagian dari audit umum melaksanakan prosedur terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2022. 1. Conduct a general audit and express an opinion on the fairness of the Company's financial statements for the year ending December 31, 2022. 2. Perform agreed procedures for reports on evaluation results and KPI achievements for the 2022 financial year. 3. As part of the general audit, conducted procedures related to compliance with laws and regulations and internal control for the 2022 financial year.	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp918.720.000
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)*	Moch. Dadang Syachruna	1. Melaksanakan audit umum dan menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas laporan hasil evaluasi kinerja dan pencapaian KPI untuk tahun buku 2021. 3. Sebagai bagian dari audit umum, melaksanakan prosedur terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2021. 4. Menerbitkan *management letter.* 1. Perform a comprehensive audit and provide an opinion on the accuracy of the Company's financial statements for the year ending December 31, 2021. 2. Execute agreed procedures for reports on performance evaluation results and Key Performance Indicator (KPI) achievements for the 2021 financial year. 3. Conduct procedures related to compliance with laws and regulations, as well as internal controls, as part of the general audit for the 2021 financial year. 4. Issue a management letter.	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp792.000.000 belum termasuk PPN 10% (excluding 10% VAT)

Daftar Kantor Akuntan Publik Tahun 2019-2023
Public Accounting Firm 2019-2023

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountng Firm	Akuntan Accountant	Ruang Lingkup Audit Audit Coverage	Opini Opinion	Biaya Fee
2020	Purwantono Sungkoro & Surja	Moch. Dadang Syachruna	1. Melaksanakan audit umum dan menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas laporan hasil evaluasi kinerja dan pencapaian KPI untuk tahun buku 2020. 3. Sebagai bagian dari audit umum, melaksanakan prosedur terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2020. 4. Menerbitkan management letter. 5. Menyampaikan laporan dalam bentuk tertulis sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan dalam bentuk *soft copy* untuk setiap lingkup pekerjaan. 1. Perform a comprehensive audit and provide an opinion on the accuracy of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2020. 2. Execute agreed procedures for reports on performance evaluation results and Key Performance Indicator (KPI) achievements for the 2020 financial year. 3. Conduct procedures related to compliance with laws and regulations, as well as internal controls, as part of the general audit for the 2020 financial year. 4. Issue a management letter. 5. Submit written reports consisting of 10 (ten) hard copies and soft copies for each scope of work.	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp750.000.000
2019	Purwantono Sungkoro & Surja	Muhammad Kurniawan	1. Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. 2. Pengendalian Internal. 3. Audit KPI. 1. Compliance with laws and regulations by the Company has a direct and material impact on the presentation of financial statements 2. Internal Control Assessment 3. Key Performance Indicator (KPI) Audit	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp662.000.000

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sebagai infrastruktur dan landasan kebijakan yang sistematis dan komprehensif, Perusahaan telah mengembangkan serta menerapkan Sistem Pengendalian Internal. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi, dengan tujuan memastikan bahwa setiap kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Rangkaian aturan, prosedur, dan mekanisme pengendalian dalam Sistem Pengendalian Internal mencakup aktivitas Perusahaan, serta menyediakan pendekatan teknis dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi di lingkungan Perusahaan. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perusahaan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tercipta budaya Perusahaan yang baik.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN DENGAN COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan mengadopsi konsep Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission yang terdiri dari 5 (lima) komponen Sistem Pengendalian Internal yang efektif:

- Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur.
- Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*).
- Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan.
- Proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi.

EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang memadai perlu dijamin oleh mekanisme penilaian dan evaluasi secara berkala dan komprehensif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien. *Monitoring* dan evaluasi atas sistem pengendalian internal Perusahaan dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit, bertujuan untuk terus meningkatkan pengendalian internal seiring berjalannya waktu.

As a systematic and comprehensive infrastructure and policy foundation, the Company has developed and implemented an Internal Control System. This system is designed to enhance integrated control functions, ensuring that every operational activity adheres to Good Corporate Governance (GCG) principles. The set of rules, procedures, and control mechanisms within the Internal Control System covers the Company's activities, providing a technical approach to prevent and address various forms of deviation that may arise within the Company's environment. Furthermore, the Internal Control System aims to facilitate reliable financial reporting, safeguard Company assets, and ensure compliance with laws and regulations, thereby fostering a positive Company culture.

COMPLIANCE OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

The Internal Control System within the Company adopts the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) concept of the Treadway Commission, which comprises 5 (five) components of an effective Internal Control System:

- The internal control environment within the Company is implemented in a disciplined and structured manner.
- Assessment of business risk management (risk assessment).
- Control activities, namely actions carried out to control company activities at each level and unit in the Company's organizational structure.
- The process of presenting reports regarding operational and financial activities, as well as compliance and adherence to statutory provisions.
- The process of assessing the quality of the internal control system, including the internal audit function at each level and unit in the organizational structure.

EVALUATION THE THE INTERNAL CONTROL SYSTEM EFFECTIVENESS

To ensure the adequacy of the internal control system, a periodic and comprehensive assessment and evaluation mechanism is essential. This ensures the effectiveness and efficiency of implementation. Monitoring and evaluating the Company's internal control system involves continuous monitoring and follow-up on recommendations from audit results with the goal is to continually enhance internal control over time.



Untuk memastikan kinerja Perseroan tetap optimal, evaluasi rutin dilakukan guna mengidentifikasi potensi kekurangan, kelemahan, atau penyimpangan dalam penerapan SOP pada setiap aspek operasional. Dalam hal ini, Audit Internal secara berkala melaporkan pelaksanaan kegiatan auditnya kepada Komite Audit untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, tetapi juga memberikan masukan kepada manajemen untuk meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi operasional yang terdapat kelemahan. Proses ini juga melibatkan penyusunan rekomendasi perbaikan yang relevan untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perusahaan membuktikan komitmennya terhadap penerapan sistem pengendalian internal dengan memastikan pelaksanaan yang optimal. Tanggung jawab penuh atas efektivitas dan kehandalan Sistem Pengendalian Internal menjadi kewajiban manajemen, yang juga bertanggung jawab memperkuat budaya risiko secara efektif di semua tingkatan organisasi.

Dari evaluasi yang telah dilakukan, Perusahaan dapat menggambarkan sejauh mana Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan memenuhi standar. Berdasarkan penlaian ini, Direksi bersama Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan dianggap telah memadai, tanpa adanya penyimpangan atau kelemahan yang signifikan.

To ensure the Company's performance remains optimal, regular evaluations are conducted to identify potential shortcomings, weaknesses, or deviations in the application of SOPs in every aspect of operations. In this regard, Internal Audit periodically reports the implementation of its audit activities to the Audit Committee for submission to the Board of Commissioners. The results of this evaluation not only serve as a tool to improve the internal control system, but also provide input to management to improve the effectiveness of operational functions where weaknesses exist. This process also involves the development of relevant recommendations for improvement to be implemented in order to improve the efficiency and reliability of the Company's operations.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company demonstrates its commitment to implementing an internal control system by ensuring its optimal execution. Management bears full responsibility for the effectiveness and reliability of the Internal Control System, along with effectively fostering a risk-aware culture throughout the organization.

Following the evaluation, the Company can assess the extent to which its Internal Control System meets standards. Based on this assessment, the Board of Directors, together with the Board of Commissioners, deems the Company's Internal Control System as adequate, without significant deviations or weaknesses.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Perusahaan dengan penuh kesadaran memahami bahwa risiko merupakan elemen tak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya, memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil usaha. Oleh karena itu, manajemen Perusahaan diharapkan memiliki kapabilitas tinggi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul, guna diakui dan dikelola secara tepat.

The Company fully acknowledges that risk is an inherent element in every operational activity and holds the potential to impact business outcomes significantly. Hence, it is crucial for Company management to possess strong capabilities in identifying, analyzing, and evaluating potential risks to appropriately recognize and manage them.

Dalam menghadapi kompleksitas lingkungan bisnis, pendekatan manajemen risiko bukan hanya sebagai alat untuk memitigasi risiko, melainkan juga sebagai landasan bagi pengelolaan yang efektif dan strategis. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Perusahaan mempertimbangkan ketidakpastian dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan strategis dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi aspek integral yang mendukung visi dan misi perusahaan, memastikan keberlanjutan serta keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

In navigating the complexities of the business environment, the risk management approach serves not only as a tool for mitigating risks but also as a foundation for effective and strategic management. The goal is to enable the Company to factor in uncertainty and its effects on achieving strategic objectives in every decision-making process. Consequently, risk management becomes an integral aspect that supports the Company's vision and mission, ensuring sustainability and success in attaining predetermined goals.

Penerapan sistem manajemen risiko perusahaan merujuk pada ISO 31000:2018, yang ditekankan pada tiga elemen kunci dalam pelaksanaan manajemen risiko.

- Kebijakan atau komitmen yang dipegang oleh BOD Perusahaan. Kebijakan tersebut mutlak harus disosialisasikan sehingga dipahami oleh seluruh level personal perusahaan.
- Perencanaan sistem manajemen risiko yang merambah pada bidang anggaran, struktur organisasi, kinerja hingga sumber daya manusia. Agar sistem manajemen risiko perusahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi dan aktual perusahaan.
- Penerapan sistem manajemen risiko yang mengadaptasi siklus *plan, do, check, action*. "Agar sistem dapat diterapkan dan mendapatkan manfaat, penerapan sistem manajemen risiko menggunakan Siklus PDCA meliputi penerapan, *monitoring*, lalu pelaksanaan evaluasi melalui tinjauan manajemen dan perbaikan," pungkas konsultan manajemen risiko itu.

The implementation of the Company's risk management system aligns with ISO 31000:2018, emphasizing three key elements in its execution.

- Policies or commitments established by the Company's Board of Directors (BOD). These policies must be thoroughly communicated to ensure understanding across all levels of company personnel.
- Planning of a risk management system that encompasses budgeting, organizational structure, performance, and human resources. This ensures the Company's risk management system operates effectively in alignment with actual company conditions.
- Implementation of a risk management system that adheres to the plan-do-check-action (PDCA) cycle. "For the system to be effectively implemented and yield benefits, adopting a risk management system utilizing the PDCA Cycle involves implementation, monitoring, followed by evaluation through management review and improvement," concluded the risk management consultant.

GAMBARAN UMUM MENGENAI SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pemahaman akan pentingnya manajemen risiko semakin menjadi fokus utama bagi Perusahaan, termasuk IPCM. Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2018, Dewan Komisaris dan Direksi IPCM telah bersama-sama menetapkan Komitmen dan *Road Map* Penerapan Manajemen Risiko IPCM.

OVERVIEW OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Recognizing the increasing significance of risk management, IPCM, in line with this trend, established a Commitment and Road Map for Implementing Risk Management on October 17, 2018, jointly endorsed by the Board of Commissioners and Directors.



Perusahaan telah menerapkan Manajemen Risiko dalam menyusun Rencana Kerja Manajemen ditahun 2023. Pengelolaan risiko tersebut melandaskan ketepatan pada:

1. Ketepatan Program Kerja (Rencana Kerja Manajemen) Dengan melakukan identifikasi risiko dalam departemen, maka akan muncul program mitigasi yang tepat dan efisien di setiap risiko RKM Departemen sehingga RKM yang telah ditetapkan dapat tercapai akan selaras dalam mencapai Visi Perusahaan.
2. Ketepatan Investasi Dengan melakukan pengelolaan risiko Investasi, maka akan dapat terserap seluruh alokasi anggaran, dan tidak muncul tambahan biaya dalam Investasi yang telah direncanakan.
3. Ketepatan Biaya Setelah diketahui Program kerja dan rencana Investasi pada tahun yang akan datang, maka perusahaan dapat menetapkan anggaran biaya sehingga penggunaan biaya yang efisien dalam mencapai visi perusahaan.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN

Perusahaan menerapkan pendekatan yang terstruktur dalam mengelola risiko, yang terdiri dari tiga lapisan pertahanan (Three Lines Model) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-5/MBU/09/2022, tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara pasal 8.

Perseroan menerapkan model koordinasi tiga lini pertahanan terhadap risiko di mana Pemilik risiko bertanggung jawab langsung atas pengelolaan risiko, fungsi manajemen risiko menyediakan kerangka kerja, dan Audit Internal memastikan kepatuhan dan efektivitas. Dengan kerja sama antara ketiga lini ini, Perseroan meningkatkan pengelolaan risiko secara efektif.

The Company has integrated risk management into the preparation of its 2023 Management Work Plan. The risk management focusing on accuracy in the following areas:

1. Precision in the Work Program (Management Work Plan) By identifying risks within each department, an appropriate and efficient mitigation program will emerge for each department's RKM risk. This ensures that the determined RKM objectives can be achieved in harmony with the Company's Vision.
2. Precision in Investments: Managing investment risks ensures that the entire budget allocation is utilized effectively, avoiding additional costs in planned investments.
3. Cost Precision: Once the work program and investment plans for the upcoming year are established, the Company can develop a cost budget, ensuring efficient utilization of resources in alignment with the company's vision.

COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company applies a structured approach in managing risk, which consists of three layers of defense (Three Lines Model) in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No. PER-5/MBU/09/2022, concerning the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises article 8.

The Company implements a three lines of defense coordination model against risk where the risk owner is directly responsible for risk management, the risk management function provides the framework, and Internal Audit ensures compliance and effectiveness. With the cooperation between these three lines, the Company enhances effective risk management.

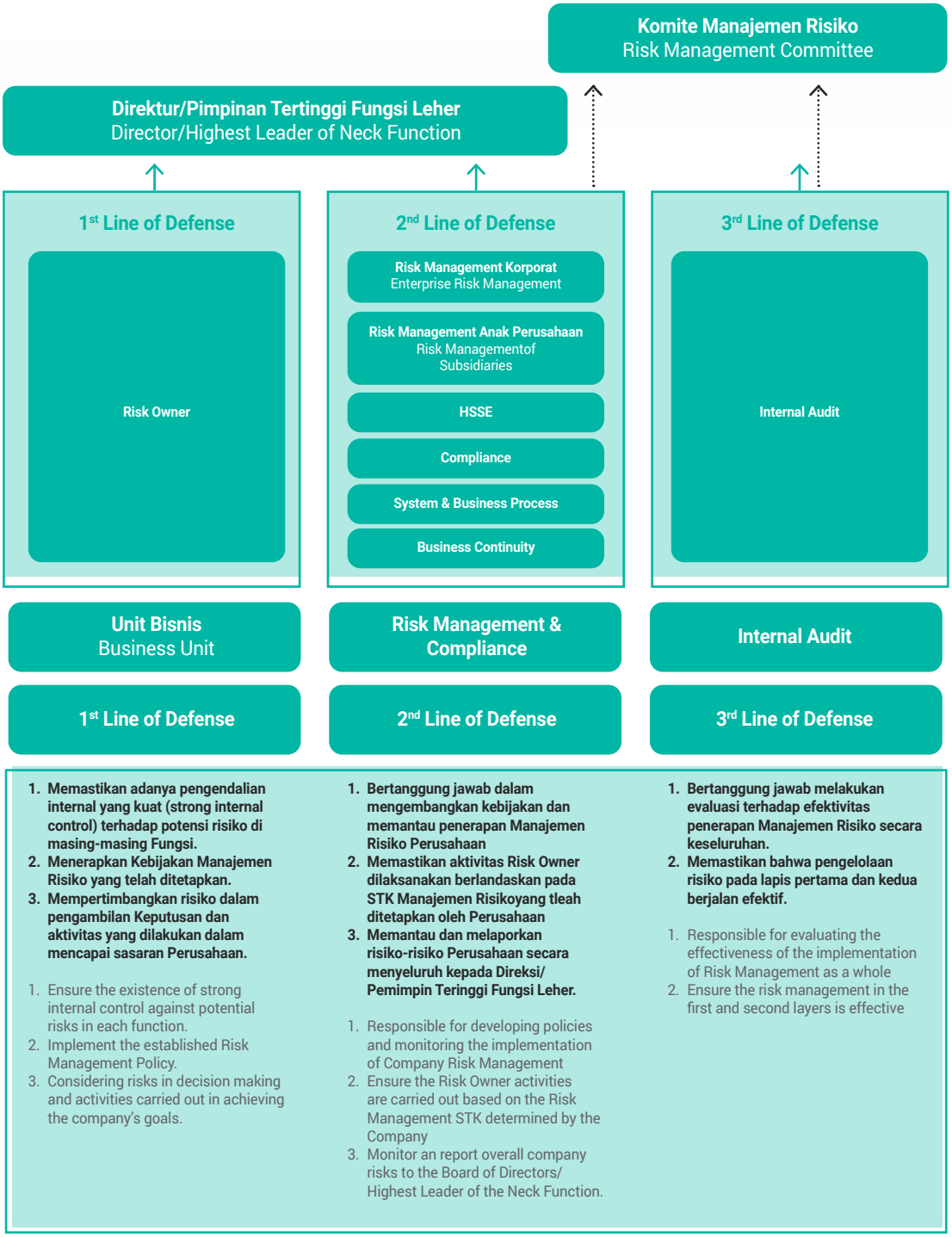

Melalui model ini, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan internal terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul. Dengan menerapkan pendekatan yang terkoordinasi, Perseroan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons risiko, sehingga mengurangi kemungkinan dampak negatif pada operasional dan keberlangsungan bisnis secara keseluruhan.

Through this model, the Company is committed to improving its internal resilience to various risks that may arise. By applying a coordinated approach, the Company can more effectively identify, evaluate and respond to risks, thereby reducing the likelihood of negative impacts on operations and overall business continuity.

THREE LINES OF DEFENSE

Sesuai COSO, Perseroan telah menerapkan mekanisme Three Line of Defense sebagai aktivitas penerapan pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan secara terpadu.
In accordance with COSO, the company has implemented third line of defense mechanism as part of the internal control implementation and integrated corporate governance

FIRST LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh masing-masing unit atau satuan kerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing:
- **Pengetahuan dan pemahaman atas proses bisnis, proses kerja utama.**
- **Identifikasi potensi risiko pada tugas yang menjadi wewenang dari setiap unit.**
- **Pengendalian dan pelaksanaan mitigasi potensi risiko.**

Managed by each unit or task force in accordance with respective functions and duties.
- Knowledge and insight on business process, and main work process.
- Potential risks identification on the duties that have been authorized to each unit.
- Control and implementation of potential risks mitigation.

SECOND LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang berada pada unit *strategic* & *planning* dan fungsi *compliance* yang berada pada unit *Corporate Secretary*:
- **Peningkatan fungsi *check* & *balance* mendukung operasi Perusahaan.**
- **Sosialisasi kesadaran terhadap penerapan tata Kelola Perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko**
- **Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi**
- **Penyempurnaan pedoman dan kebijakan operasional dan non-operasional.**

Managed by risk management function under the strategic & planning unit and compliance function under the Corporate Secretary unit.
- Increasing check & balance function in support of the company's operation.
- Socializing awareness the the implementation of corporate governance, compliance and risk management in all work units and organizational levels.
- Implementing integrated risk management.
- Improving operational and non-operational manuals and policies

THIRD LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh Unit Audit Intern:
- **Pelaksanaan audit internal sesuai program kerja audit tahunan.**
- **Pelaksanaan audit surprise untuk mengukur kesadaran akan penerapan tata Kelola Perusahaan.**
- **Kepatuhan dan manajemen risiko.**
- ***Database* temuan audit internal dan eksternal sebagai masukan untuk peningkatan.**
- **Kualitas setiap unit/fungsi.**

Managed by the Internal Audit Unit.
- Implementation of the internal audits in accordance with the annual audit work program.
- Implementation of a surprise audit to measure awareness of the corporate governance implementation.
- Compliance and risk management.
- Database of internal and external audit findings as input for improvement the quality of each unit/function.

Selain itu, model ini juga memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen risiko, memastikan bahwa informasi yang relevan dapat dengan cepat disampaikan dan diproses. Dengan demikian, Perusahaan dapat merespons perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis dengan lebih tepat waktu dan efisien.

In addition, this model also facilitates effective communication between the various parties involved in risk management, ensuring that relevant information can be quickly conveyed and processed. As such, the Company can respond to rapid and dynamic environmental changes in a more timely and efficient manner.

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor HK-56/8/11/1/MS-19 mengenai Pedoman dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko PT Jasa Armada Indonesia Tbk, diterbitkan pada tanggal 8 November 2019, struktur pengelolaan risiko perusahaan telah ditetapkan.

Kegiatan-Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko di tahun 2023:
1. Proses identifikasi risiko secara umum dan risiko strategis signifikan.
2. Proses mitigasi risiko pada risiko strategis dan signifikan yang perlu perlakuan risiko.
3. Monitoring risiko.
4. Laporan berkala terkait dengan proses manajemen risiko perusahaan.

RISK MANAGEMENT STRUCTURE

Based on the Board of Directors' Decree Number HK-56/8/11/1/MS-19 issued on November 8, 2019, concerning PT Jasa Armada Indonesia Tbk Risk Management Guidelines and Framework, the company's risk management structure has been established.

Risk Management implementation in 2023 are as follows:
1. General risk identification process and significant strategic risks.
2. Risk mitigation process on strategic and significant risks that need risk treatment.
3. Risk monitoring.
4. Periodic reports related to the company's risk management process.

RISIKO PERUSAHAAN DAN UPAYA MITIGASI RISIKO

Dengan merujuk pada hasil identifikasi dan analisis risiko, profil risiko Perusahaan diuraikan berdasarkan sumber dan dampaknya, beserta upaya mitigasi yang telah diterapkan.

COMPANY RISK AND MITIGATION EFFORTS

Based on the risk identification and analysis, the Company's risk profile is described based on its source and impact, along with the mitigation efforts that have been implemented.

No.	Jenis Risiko Risk Type	Mitigasi Mitigation
1	Potensi Tidak Tercapainya Target pendapatan Potential Not Achieving Revenue Targets	Melakukan mitigasi dengan mengembangkan dan kerjasama operasi pasar baru, peningkatan kerjasama bisnis dan loyalitas mitra, pengurangan biaya operasi Mitigate by developing and cooperating with new market operations, increasing business cooperation and partner loyalty, reducing operating costs.
2	Pelanggaran kode etik Code of ethics violations	Menerapkan standar ISO 37001 / SMAP sebagai standar implementasi pelayanan serta sosialisasi sistem kepada seluruh pegawai perusahaan, dan meningkatkan integrasi pegawai; Implement ISO 37001 / SMAP standards as service implementation standards and socialize the system to all company employees, and improve employee integration;
3	Kecelakaan Kerja Fatality Work Accident Fatality	Bekerja sesuai SOP, sosialisasi dan pemahaman budaya K3, melaksanakan safety patrol secara intensip di Area kerja perusahaan Work according to SOP, socialize and understand the K3 culture, carry out intense safety patrols in the company's work area.
4	Pencemaran Lingkungan Environmental Pollution	Melakukan kerjasama pengolahan / penyaluran limbah berbahaya (B3) Cooperate in the processing / distribution of hazardous waste (B3)

SERTIFIKASI DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Dilakukan sertifikasi untuk pengelola risiko perusahaan pada level Qualified Risk Management.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Conducted certification for company risk organizer at the Qualified Risk Management level.

PENILAIAN RISIKO TERKAIT IT

Di tengah era digitalisasi yang terus berkembang, penilaian risiko terkait dengan Informasi Teknologi telah menjadi fokus utama dalam pengawasan manajemen risiko. Hal ini mencakup evaluasi terhadap teknologi yang digunakan serta seberapa siap infrastruktur IT dalam mendukung kelancaran proses bisnis. Pada tahun 2022, kesadaran akan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan IT menjadi semakin mendalam, memperkuat upaya untuk meminimalkan dampak potensial yang dapat merugikan operasional perusahaan.

IT RISK ASSESSMENT

In the midst of the growing digitalization era, risk assessment related to Information Technology has become a major focus in risk management oversight. This includes evaluating the technology used as well as how ready the IT infrastructure is to support the smooth running of business processes. By 2022, awareness of the importance of identifying and managing IT-related risks will deepen, strengthening efforts to minimize potential impacts that could be detrimental to company operations.



Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang kemungkinan ancaman dan kerentanan terhadap sistem IT menjadi kunci untuk merancang strategi perlindungan yang efektif. Evaluasi risiko secara menyeluruh dapat membantu organisasi untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam memitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul, serta meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan cyber dan gangguan teknologi lainnya. Dengan demikian, penilaian risiko terkait IT menjadi landasan yang vital dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan operasional perusahaan di era digital ini

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Selama 2023, Perusahaan secara aktif melakukan evaluasi risiko melalui unit terkait dalam proses evaluasi risiko. Evaluasi dan peninjauan manajemen risiko ini bertujuan untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi, mengidentifikasi potensi risiko baru yang mungkin muncul, dan mencari solusi mitigasi yang diperlukan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Efektivitas evaluasi manajemen risiko diukur melalui kemampuan mitigasi dalam mengurangi tingkat risiko yang mungkin terjadi.

Hasil evaluasi manajemen risiko di tahun 2023 menunjukan bahwa:

1. Terdapat 4 (empat) risiko signicant focus Perusahaan pada tahun 2023, diantaranya: terkait target pencapain target pendapatan; risiko portensi pelanggaran fraud, serta kecurangan; risiko kecelakaan kerja fatality; dan risiko pemcemaran lingkungan;
2. Terjadi penurunan nilai risiko pada risiko significan dari risiko Tinggi dan Menengah menjadi risiko Rendah.
3. Adanya efektivitas media kontrol risiko dalam proses penurunan nilai risiko seperti availabiliti peningkatan dan kinerja operasional, pengembangan bisnis dan perluasan pasar, operasi sesuai SOP, penerapan kebijakan ISO Standar, penerapan GCG, sistem manajemen anti suap, serta proses mitigasi risiko yang efektif dalam upaya penurunan nilai risiko tahun 2023.
4. Secara umum terjadi penurunan semua nilai risiko dari level Tinggi ke level Rendah pada sampai akhir tahun 2023

PERNYATAAN MANAJEMEN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan secara berkesinambungan melakukan evaluasi untuk menilai keefektifan manajemen risiko. Dalam hal ini, evaluasi yang dilakukan Perusahaan meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko.

In this context, a deep understanding of possible threats and vulnerabilities to IT systems is key to designing effective protection strategies. A thorough risk evaluation can help organizations to take proactive steps in mitigating the risks that may arise, as well as increasing the system's resilience against cyber-attacks and other technological disruptions. Thus, IT-related risk assessment is a vital cornerstone in maintaining the sustainability and success of company operations in this digital era.

RISK MANAGEMENT SYSTEM EVALUATION EFFECTIVENESS

During 2023, the Company has been active in evaluating risks through related units in the risk evaluation process. This risk management evaluation and review aim to determine the level of risk, identify potential new risks that may arise, and look for mitigation solutions to overcome these risks. The effectiveness of risk management evaluation is measured through mitigation capabilities in reducing the level of risk that may occur.

The results of the risk management evaluation in 2023 show that:

1. There are 4 (four) signicant risks of the Company's focus in 2023, including: related to the target of achieving the revenue target; the risk of potential fraud violations, and fraud; the risk of work accident fatality; and the risk of environmental pollution;
2. There is a decrease in the risk value of significant risks from High and Medium risks to Low risks.
3. The effectiveness of risk control media in the process of risk impairment such as availabilitiy improvement and operational performance, business development and market expansion, operations in accordance with SOPs, implementation of ISO Standard policies, implementation of GCG, anti-bribery management systems, and effective risk mitigation processes in efforts to reduce risk values in 2023.
4. In general, there is a decrease in all risk scores from High level to Low level by the end of 2023.

MANAGEMENT STATEMENT ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company continuously conducts evaluations to assess the effectiveness of risk management. This evaluation includes adjustments to the risk strategy and framework as part of the risk management policy, the adequacy of the risk management information system, and the sufficiency of the risk identification, measurement, monitoring, and control processes.

Bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko salah satunya adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko. Pada tingkat manajemen, Perusahaan telah membentuk Unit Manajemen Risiko yang memiliki tanggung jawab merancang kebijakan dan panduan manajemen risiko. Kebijakan tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan aktivitas korporasi dan operasional di IPCM. Sejalan dengan itu, Direksi IPCM telah menyatakan bahwa sistem manajemen risiko sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Nomor *Manual* 002, tertanggal 01 Oktober 2015, dianggap telah memadai.

RENCANA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

Perusahaan telah merancang program strategis untuk tahun 2024 sebagai langkah proaktif dalam peningkatan pengelolaan manajemen risiko. Rencana program ini mencakup beberapa inisiatif program yang ditujukan untuk memperkuat sistem manajemen risiko di IPCM. Berikut adalah rincian rencana program pengelolaan sistem manajemen risiko yang akan diimplementasikan pada tahun 2024:

1. Penguatan sistem manajemen risiko perusahaan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan menempatkan manajemen risiko dalam bagian manajemen keuangan dibawah Direktur Keuangan
2. Menerapkan implemantasi manajemen risiko Perusahaan sesuai ketentatuan manajemen risiko BUMN sesuai Per-5/MBU/09/2022 Tahun 2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peningkatan maturitas manajemen risiko Perusahaan .

One form of evaluation of risk management policies is the annual evaluation of the Risk Management Policy. At the management level, the Company has established a Risk Management Unit responsible for designing risk management policies and guidelines. This policy serves as a reference for implementing corporate and operational activities at IPCM. In line with this, the IPCM Board of Directors has affirmed that the risk management system outlined in Risk Management Policy Manual Number 002, dated October 1, 2015, is considered adequate.

RISK MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT PROGRAM PLAN FOR 2024

The Company has developed a strategic program for 2024 as a proactive measure to enhance risk management. This program plan encompasses several initiatives aimed at bolstering the risk management system at IPCM. Below are the details of the risk management system plan prepared for implementation in 2024:

1. Strengthening the company's prudent risk management system by placing risk management in the financial management section under the Finance Director.
2. Implementing the Company's risk management implementation in accordance with SOE risk management regulations in accordance with Per-5/MBU/09/2022 of 2022 concerning the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises.
3. Increased maturity of the Company's risk management

PERKARA HUKUM
LEGAL ISSUES

Dalam rangka menjaga integritas dan kepatuhan, Perusahaan memiliki komitmen yang kuat untuk meminimalkan pelanggaran, khususnya yang terkait dengan aspek hukum.

Di tahun 2023, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Perusahaan yang dapat mempengaruhi bisnis Perusahaan secara signifikan.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama periode tahun 2023, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang sedang menjabat, memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki anak Perusahaan, dengan demikian tidak terdapat informasi terkait permasalahan hukum terhadap entitas anak.

To uphold integrity and compliance, the Company is strongly committed to minimizing violations, particularly those related to legal aspects.

In 2023, there were no important matters with significant impact on the Company's business which the Company had to face.

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES CURRENTLY BEING FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN OFFICE

During 2023, no members of the Company's Board of Commissioners or Directors who are currently serving have had any legal isses, whether civil or criminal.

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES BEING FACED BY SUBSIDIARIES

Until the end of 2023, the Company does not have any subsidiaries, thus there is no information regarding legal issues faced by subsidiaries.

SANKSI ADMINISTRASI
ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan sebagai organisasi, kepada entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas terkait.

INFORMASI TENTANG SANKSI PERKARA PAJAK

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Perusahaan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan pajak tertinggi terkait masalah pajak maupun sengketa pajak.

During 2023, there were no material administrative sanctions issued by the relevant authorities that affected the continuity of the Company's business and no administrative sanctions imposed on the Company as an organization, on subsidiaries, members of the Board of Directors or Commissioners.

INFORMATION ABOUT TAX CASE SANCTIONS

In the last four years, the Company has never been found guilty by the highest tax court regarding tax issues or tax disputes.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU PEKERJA (ESOP/MSOP)

STOCK OWNERSHIP PROGRAM BY MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEES (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak terdapat Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen dan/atau Pekerja (ESOP/MSOP). Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10% dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA (*Employee Stock Allocation*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan akan mengalokasikan saham kepada pekerja sebanyak-banyaknya 57.894.700 saham biasa atas nama yang merupakan 4,76% dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham, dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran.

Jumlah peserta Program ESA adalah 780 orang, kecuali bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Atas Usulan Direksi untuk Pelaksanaan *Employee Stock Allocation* (ESA) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan Nomor DK/21/11/33/2017 tanggal 20 November 2017 sebagai berikut:

1. Tidak berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris
2. Pekerja Aktif sampai keluarnya efektif OJK
3. Pekerja Aktif minimal sejak 1 November 2016
4. Tidak sedang terkena sanksi dari Perusahaan
5. Tidak dalam status Cuti Di luar Tanggungan Perusahaan (CDTP)

Seluruh saham yang ditawarkan Perusahaan melalui pelaksanaan program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham telah terjual dengan jumlah saham sebanyak 57.894.700 atau sebesar 1,10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan.

Until the end of 2023, the Company has never had a Share Ownership Program for Management and/or Employees (ESOP/MSOP). According to the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 14 dated October 11, 2017, before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Company allocated a maximum of 10% of the Shares Offered during the Initial Public Offering of Shares for the ESA (Employee Stock Allocation) Program. Under this program, the Company allocated shares to employees, totaling a maximum of 57,894,700 ordinary shares, representing 4.76% of the Shares Offered during the Public Offering of Shares, with the ESA exercise price equal to the Offer Price.

The ESA Program had 780 participants, excluding the Company's Directors and Commissioners, who met the requirements outlined in the Board of Commissioners' Letter of Approval of the Board of Directors' Proposal for Implementing Employee Stock Allocation (ESA) in the context of the Company's Initial Public Offering of Shares Number DK/21/11/33/2017 dated 20 November 2017, as follows:

1. Excludes the Board of Directors and Board of Commissioners
2. Active workers until the OJK effectively released
3. Active workers since at least November 1, 2016
4. Not subject to sanctions from the Company
5. Not on non-company leave (CDTP) status.

All shares offered through the ESA program during the Initial Public Offering of Shares have been sold, totaling 57,894,700 shares or 1.10% of the Company's issued and fully paid-up capital.



KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI
INFORMATION DISCLOSURE POLICY

Berdasarkan ketentuan POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan. Atas ketentuan OJK ini, Perusahaan tunduk dan patuh mengikuti ketentuan yang berlaku, serta secara tertib melaporkan kepada OJK terkait kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham yang terjadi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kewajiban untuk melaporkan kepemilikan saham mereka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Informasi terkait pelaksanaan kebijakan pengungkapan ini dapat ditemukan di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

In accordance with the provisions of POJK No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares, the Board of Commissioners and Directors are required to report to the Financial Services Authority (OJK) regarding ownership and any changes in ownership of the Company's shares. The Company diligently adheres to these OJK provisions and regularly submits reports to the OJK regarding ownership and any changes in share ownership that occur.

Members of the Board of Commissioners and Directors are obligated to disclose their share ownership in line with the regulations outlined in POJK No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares. Details regarding the implementation of this disclosure policy are available in the Company Profile Chapter of the Annual Report.

KEBIJAKAN PERSEROAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR
COMPANY POLICY REGARDING PROTECTION OF CREDITORS' RIGHTS

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan belum memiliki Kebijakan terkait perlindungan terhadap hak-hak kreditur.

Until the end of 2023, the Company hasn't established a policy regarding the protection of creditor rights.

INFORMASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN ALAMAT PENYAMPAIAN KELUHAN

STAKEHOLDERS INFORMATION AND COMPLAINT SUBMISSION

Perusahaan memastikan kemudahan akses bagi para *Stakeholder* untuk mendapatkan informasi dan layanan melalui berbagai saluran, termasuk *website* resmi dan media lainnya. Sebagai upaya lebih lanjut dalam membangun keterlibatan dengan para pemangku kepentingan, Perusahaan aktif menyelenggarakan kegiatan seperti *customer gathering* dan *coffee morning* sebagai inisiatif sosialisasi layanan, yang memungkinkan interaksi langsung untuk menggali keinginan dan harapan pelanggan. Melalui proses ini, Perusahaan tidak hanya dapat memahami secara mendalam, tetapi juga merespon kebutuhan pelanggan dengan tujuan meningkatkan dan memperbaiki kualitas layanan. *Stakeholder* juga memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau keluhan terkait pelanggaran hak mereka melalui berbagai saluran komunikasi yang telah disediakan.

The Company ensures easy access for stakeholders to obtain information and services through various channels, including the official website and other media. As an additional effort to enhance engagement with stakeholders, the Company actively organizes activities such as customer gatherings and coffee mornings as part of its service outreach initiatives. These events enable direct interaction to explore customer desires and expectations. Through this process, the Company can gain in-depth understanding and respond to customer needs, ultimately enhancing service quality. Stakeholders also have the opportunity to voice concerns or complaints regarding violations of their rights through the various communication channels provided.

Sekretaris Perusahaan
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Pelindo Tower Lt.9
Jl. Yos Sudarso No.9, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230
E-mail: corsec@ipcmarine.co.id

Corporate Secretary
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Pelindo Tower Lt.9
Jl. Yos Sudarso No.9, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230
E-mail: corsec@ipcmarine.co.id



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
INFORMATION ACCESS AND COMPANY DATA

Dalam pelaksanaan prinsip transparansi, Perusahaan berkomitmen menyediakan akses yang terbuka terhadap informasi dan data perusahaan untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dalam upaya menjalankan kewajibannya, Perusahaan berupaya memberikan informasi yang lengkap, bermanfaat, dan terkini kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan akses data Perusahaan. Keterbukaan informasi yang diberikan Perusahaan disampaikan melalui berbagai sarana meliputi Media Massa, *Website* Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik.

In line with the principle of transparency, the Company is dedicated to granting open access to company information and data for both internal and external stakeholders. To fulfill this obligation, the Company strives to provide comprehensive, valuable, and up-to-date information to shareholders and other stakeholders, all while ensuring the confidentiality of sensitive data and information. The Corporate Secretary oversees information management and access to company data. The Company disseminates information through various channels, including mass media, the company website, public exposés, and electronic reporting platforms.

Perusahaan juga berkomitmen untuk menyajikan informasi penting dalam Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memastikan ketepatan waktu, akurasi, kejelasan, dan objektivitas dalam penyampaian informasi tersebut.

Moreover, the Company is committed to presenting crucial information in financial reports in compliance with statutory provisions. It ensures the timely, accurate, clear, and objective delivery of this information.

Media Elektronik Eletronic Media	**Laporan Tahunan** Annual Report	**Media Sosial** Social Media	**Media Informasi Internal** Internal Information Channel
Telepon : (021) 430 6789 E-mail : corsec@ipcmarine.co.id Website : www.ipcmarine.co.id	• *Annual Report* tahun 2018 • *Annual Report* tahun 2019 • *Annual Report* tahun 2020 • *Annual Report* tahun 2021 • *Annual Report* tahun 2022 • Annual Report for 2018 • Annual Report for 2019 • Annual Report for 2020 • Annual Report for 2021 • Annual Report for 2022	FP Facebook : IPCMarine Instagram : @IPCMarine X : @IPCMarine Youtube : PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk/IPCM	Majalah Internal Buletin Investor IPCM Internal Magazine IPC Investor Bulletin

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah menerbitkan 15 (lima belas) siaran pers yang disebarkan ke media cetak maupun elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

During 2023, the Company issued a total of 15 press releases, which were distributed to both print and electronic media outlets as follows:

No.	**Daftar Press Release Tahun 2023** Press Release in 2023
1.	25 Januari 2023 - PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) Luncurkan 3 Kapal Pandu Baru January 25, 2023 - IPCM Launches 3 New Guided Ships
2.	15 Februari 2023 - Jasa Armada Indonesia Lanjutkan Kerjasama Penyediaan Jasa Pemanduan dan Penundaan di Berbagai Wilayah February 15, 2023 – Jasa Armada Indonesia Continues Collaboration in Providing Piloting and Towing Services in Various Regions
3.	21 Februari 2023 - Jasa Armada Luncurkan Kapal Tunda Abimanyu V Senilai Rp86,9 Miliar February 21, 2023 – Jasa Armada Launches Abimanyu V Tugboat Worth Rp86.9 Billion
4.	29 Maret 2023 - IPCM Raih Kenaikan Laba Bersih menjadi Rp150,6 Miliar March 29, 2023 - IPCM Achieves Net Profit Increase to Rp150.6 Billion
5.	9 Juni 2023 - Laba Triwulan 1-2023 IPCM Naik 25% Sejalan dengan Pendapatan yang Tumbuh menjadi Rp291,6 Miliar June 9, 2023 - IPCM Quarterly 1-2023 Profit Increases 25% in Line with Revenue Growing to Rp291.6 Billion
6	27 Juni 2023 - PT Jasa Armada Indonesia Tbk Selenggarakan RUPS Tahunan - Bagikan Dividen Sebesar Rp113 Miliar, 75% dari Laba June 27, 2023 - IPCM Holds Annual GMS - Distributes Dividends of Rp113 Billion, 75% of Profits

No.	Daftar Press Release Tahun 2023 Press Release in 2023
7	1 Agustus 2023 - IPCM Bukukan Laba Rp 84 Miliar - Ekspansi Wilayah Indonesia Timur Berjalan Positif August 1, 2023 - IPCM Records Profit of Rp84 Billion - Expansion of Eastern Indonesia Region Runs Positively
8	5 September 2023 - IPCM Catat Kinerja Baik, Retail Investor Happy September 5, 2023 - IPCM Records Good Performance, Retail Investors Are Happy
9	20 September 2023 - Jasa Armada Indonesia Kenalkan Industri Kepelabuhanan ke Siswa di Dataran Tinggi Kota Batu September 20, 2023 - Jasa Armada Indonesia Introduces the Port Industry to Students in the Highlands of Batu City
10	20 September 2023 - Bagikan Cerita Bisnis Pandu Tunda Kapal, IPCM Gandeng Retail Investor Malang September 20, 2023 - Share the Story of the Ship Tugboat Business, IPCM Collaborates with Malang Retail Investors
11	18 Oktober 2023 - Perluas Industri Mikro & Kecil Indonesia, IPCC dan IPCM Kembangkan Produk Warisan Lokal "Tenunnyaman" di NTT October 18, 2023 - Expanding Indonesian Micro & Small Industries, IPCC and IPCM Develop Local Heritage Products " Tenunnyaman" in NTT
12	31 Oktober 2023 - Kinerja Keuangan 9m-2023: IPCM Catatkan Laba Rp119,8 Miliar, Naik 17,81% (YOY) October 31, 2023 - Financial Performance 9m-2023: IPCM Records Profit of Rp119.8 Billion, Up 17.81% (YOY)
13	17 November 2023 - Jalin Kerjasama dengan Pelindo Investama, Jasa Armada Indonesia Tandatangani MoU Komersial dan Komunikasi Pasar Modal November 17, 2023 - Collaborating with Pelindo Investama, Jasa Armada Indonesia Signs Commercial and Capital Market Communication MoU
14	30 November 2023 - Paparkan Kinerja Perseroan Positif dalam Public Expose Live 2023: IPCM Catatkan Berbagai Perjanjian Kerjasama dengan Pengguna Jasa Eksisting November 30, 2023 - Present Positive Company Performance in Public Expose Live 2023: IPCM Records Various Cooperation Agreements with Existing Users
15	27 Desember 2023 - Penghujung Tahun 2023, IPCM Umumkan Tebar Dividen Interim Sebesar Rp20,06 Miliar December 27, 2023 - End of 2023, IPCM Announces Interim Dividend Distribution of Rp20.06 Billion

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR

COMMUNICATION POLICY WITH SHAREHOLDERS OR INVESTORS

Dalam kerangka Kode Etik PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Perseroan telah menerapkan kebijakan komunikasi yang melibatkan pemegang saham atau investor. IPCM berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, transparan, dan penuh kepercayaan dengan para *stakeholder*. Perusahaan secara teratur menyampaikan visi, rencana pengembangan, informasi, dan hasil keuangan kepada media, investor, pemerintah, dan pelanggan.

Akses terhadap informasi terkait Perusahaan dapat diperoleh oleh *stakeholder* dan masyarakat umum melalui situs web www.ipcmarine.co.id. Situs tersebut menyajikan informasi terkini terkait profil perusahaan, aktivitas perusahaan, praktik tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, laporan tahunan, serta informasi lain yang berkaitan dengan perusahaan, komunitas pelabuhan, dan hal-hal umum lainnya. Selain itu, informasi terkait perusahaan juga dapat diakses melalui situs web PT Jasa Armada Indonesia Tbk di www.ipcmarine.co.id.

Dalam kebijakan komunikasi memastikan bahwa hanya Direksi, *Corporate Secretary*, tim relasi media, tim relasi investor, atau juru bicara resmi yang berwenang untuk mengkomunikasikan atau memberikan informasi terkait perusahaan kepada media. Jika Insan IPCM dihubungi oleh media atau kelompok *stakeholder* lain untuk memberikan komentar atau wawancara, Insan IPCM diarahkan untuk berkoordinasi dengan *Corporate Secretary*. Setiap pernyataan yang diberikan kepada media harus akurat, resmi, dan dapat dipercaya, di mana IPCM menunjuk juru bicara resmi untuk menyampaikan topik tertentu. Selanjutnya, komentar terkait politik dan keagamaan secara tegas tidak diperkenankan dan tidak boleh diberikan dalam situasi apapun.

Within the Code of Conduct of the PT Jasa Armada Indonesia Tbk, the Company has a communication policy regarding shareholders or investors. IPCM is committed to building mutually beneficial, transparent, and trusting relationships with stakeholders. The Company regularly communicates its vision, development plans, information, and financial results to the media, investors, government, and customers.

Access to information related to the Company can be obtained by stakeholders and the general public via the website www.ipcmarine.co.id. The site provides the latest information regarding company profiles, activities, corporate governance practices, social responsibilities, annual reports, as well as other information relating to companies, port communities, and other general matters. Additionally, company-related information can also be accessed via the PT Jasa Armada Indonesia Tbk website at www.ipcmarine.co.id.

The communication policy ensures that only the Board of Directors, Corporate Secretary, media relations team, investor relations team, or official spokespersons are authorized to communicate or provide information related to the company to the media. If IPCM personnel are contacted by the media or other stakeholder groups to provide comments or interviews, they are directed to coordinate with the Corporate Secretary. Any statements given to the media must be accurate, official, and trustworthy, with IPCM designating official spokespersons to address specific topics. Furthermore, comments related to politics and religion are strictly prohibited and may not be given under any circumstances.

KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

Kode etik berperan sebagai landasan yang mengarahkan perilaku dan tindakan di dalam Perusahaan, termasuk interaksi dengan pemangku kepentingan. Sebagai panduan, Kode Etik meneguhkan nilai-nilai etika bisnis yang menjadi dasar bagi Perusahaan dan seluruh Insan IPCM. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat berperilaku dan bertindak secara etis ketika berinteraksi dengan pihak-pihak eksternal. Dengan tanggung jawab sebagai warga negara yang bertanggung jawab, Perusahaan mengharapkan seluruh elemen, termasuk Komisaris, Direksi, manajemen, dan pekerja, mampu menunjukkan perilaku positif. Seluruh Insan IPCM diharapkan tidak hanya melaksanakan kegiatan bisnis dengan etika, tetapi juga memberikan manfaat dan kontribusi untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

Standar etika yang berlaku di lingkungan IPCM dijabarkan dalam Kode Etik PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/4/MS-21 pada tanggal 4 Oktober 2021. Kode Etik ini dirancang dengan tujuan mendukung penuh implementasi GCG serta menciptakan sebuah lingkungan Perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang tinggi.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Berikut ini adalah pokok-pokok Kode Etik Perusahaan, antara lain:

1. Etika Profesional
   a. Insan PT Jasa Armada Indonesia Tbk
   b. Pelanggan Kami
   c. Vendor Kami
   d. Kompetitor Kami
   e. Komunitas dan Lingkungan Kami
   f. Institusi Pemerintah
   g. Aktivitas Politik
2. Etika Kerja
   a. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan
   b. Kontrol Internal
   c. Perjalanan Dinas
   d. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi
   e. Insider Trading
   f. Menghadapi Konflik Kepentingan
   g. Anti Penyuapan
   h. Benturan Kepentingan
   i. Media, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi
3. Komitmen
   a. Penutup
   b. Uji Diri Anda
   c. Pernyataan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik
   d. Daftar Istilah

The code of conduct serves as a foundation that guides behavior and actions within the Company, including interactions with stakeholders. As a guide, the Code of Conduct affirms business ethical values, which form the basis for the Company and all IPCM personnel. This ensures that each individual can behave and act ethically when interacting with external parties. With its responsibilities as a responsible corporate citizen, the Company expects all stakeholders, including Commissioners, Directors, management, and employees, to demonstrate positive behavior. All IPCM personnel are expected not only to conduct business activities ethically but also to provide benefits and contributions to realize the Company's vision and mission.

The ethical standards within the IPCM environment are outlined in the PT Jasa Armada Indonesia Code of Conduct Number: HK.56/4/10/4/MS-21 issued on October 4, 2021. This Code of Conduct was designed to fully support the implementation of GCG and foster an environment within the company based on high moral principles.

CODE OF CONDUCT PRINCIPLES

The Company's Code of Conduct outlines key principles and guidelines across various domains:

1. Professional Ethics
   a. PT Jasa Armada Indonesia Tbk Personnel
   b. Customers
   c. Vendors
   d. Competitors
   e. Community and Environment
   f. Government Institutions
   g. Political Activities
2. Work Ethics
   a. Company Documentation and Recording
   b. Internal Controls
   c. Business Trips
   d. Confidentiality of Data and/or Information
   e. Insider Trading
   f. Conflicts of Interest
   g. Anti-Bribery
   h. Conflict of Interest
   i. Media, Communication, and Information Dissemination
3. Commitment
   a. Conclusion
   b. Test Yourself
   c. Statement of Integrity Pact and Code of Conduct Compliance
   d. Glossary of Terms

KORELASI KODE ETIK DENGAN NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, Perusahaan menegakkan nilai-nilai budaya sebagai prinsip utama. Penerapan Kode Etik Perusahaan juga diselaraskan dengan Budaya/Tata Nilai "AKHLAK" (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, & Kolaboratif), dan *Employee Value Proposition* (EVP) yaitu *Learn, Grow, and Contribute to Indonesia* (Belajar, Bertumbuh, dan Berkontribusi Untuk Indonesia).

IPCM memiliki komitmen yang kuat terhadap implementasi dan penyeragaman Nilai-nilai Utama serta EVP. Komitmen ini didasarkan pada tujuan mendukung peran BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial, penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta. Dengan pemberian dukungan sepenuhnya terhadap nilai-nilai inti dan EVP, IPCM berupaya aktif dalam mengokohkan peran strategisnya sebagai kontributor utama dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Penjelasan mengenai *Core Values* AKHLAK adalah sebagai berikut

Nilai Perusahaan

CODE OF CONDUCT CORRELATION WITH CORPORATE CULTURAL VALUES

In conducting its business activities, the Company prioritizes cultural values as its fundamental principle. The implementation of the Company's Code of Conduct is aligned with the "AKHLAK" Culture/Values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, & Collaborative), as well as the Employee Value Proposition (EVP), which is Learn, Grow, and Contribute to Indonesia.

IPCM is deeply committed to upholding and promoting its Core Values and EVP consistently. This commitment stems from the Company's dedication to fulfilling its role as a state-owned enterprise (BUMN), which includes driving economic growth, enhancing social welfare, generating employment opportunities, and fostering talent development. By wholeheartedly supporting the core values and EVP, IPCM strives to strengthen its strategic position as a significant contributor to economic progress and societal well-being.

The explanation of the AKHLAK Core Values is as follows:

Corporate Values

AKHLAK
AMANAH KOMPETEN HARMONIS
LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

A

Amanah | Trustworthy

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan
We uphold the trust given

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh pada nilai moral dan etika
- Keep promises and commitments
- Responsible for the duties, decisions and actions carried out
- Stick to moral and ethical values

K

Kompeten | Competent

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
We continue to learn and develop capabilities

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik
- Improve self-competence to respond to ever-changing challenges
- Help others learn
- Complete duties with the best quality

H

Harmonis | Harmonious

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan
We care for each other and value differences

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- Respect everyone regardless of their background
- Likes to help others
- Build a conducive work environment

Loyal | Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara
We are dedicated and put the interests of the Nation and the State first

- Menjaga nama baik sesama pekerja, pempinan, BUMN, dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika
- Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State
- Willing to sacrifice to achieve a greater goal
- Obey the leaders as long as it is not against the law and ethics

Adaptif | Adaptive

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan
We continue to innovate and are enthusiastic about moving or facing changest

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif
- Quickly adjust to being better
- Continuously making improvements to keep up with technological developments
- Act proactively

Kolaboratif | Collaborative

Kami membangun kerja sama yang sinergis
We build synergistic cooperation

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Tebuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
- Provide opportunities for various parties to contribute
- Proven in working together to generate added value
- Mobilize the use of various resources for common goals

TUJUAN PENERAPAN KODE ETIK

- Sebagai pedoman perilaku untuk seluruh Jajaran Perusahaan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak, serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan;
- Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif serta mendorong perilaku etis dari Jajaran Perusahaan;
- Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

MANFAAT PENERAPAN KODE ETIK

Pelaksanaan *Code of Conduct* diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Pekerja
   a. Menjadi pedoman tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh Perusahaan;
   b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya Perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja.
2. Perusahaan
   Meningkatkan nilai Perusahaan dalam membangun hubungan dengan para *stakeholders* melalui kepastian dan perlindungan hak-haknya guna menciptakan reputasi positif bagi keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
   a. Mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pekerja, mitra kerja, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan stakeholders lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION PURPOSES

- As a code of conduct for all levels of the Company which must be adhered to in daily interactions with all parties, and must be used as a basis for thinking in the decision making process;
- Create and maintain a positive work environment and encourage ethical behavior from Company Staff;
- Increase the confidence of Shareholders and Stakeholders that the Company is managed prudently, efficiently, transparently, accountably and fairly to achieve the expected level of profitability while still taking into account the interests of the Company.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION BENEFITS

The Code of Conduct implementation `is expected to provide benefits for various stakeholders as follows:

1. Employees
   a. Serve as a guideline regarding desirable and undesirable behavior by the Company;
   b. Create a work environment that upholds the Company's values and culture, thereby improving performance.
2. Company
   Increase the Company's value in building relationships with stakeholders by providing certainty and protection of their rights, leading to a positive reputation for long-term business success.
   a. Encourage more efficient and effective operational activities, considering that ethical standards must be observed in relationships with workers, partners, customers, society, government, and other stakeholders.

3. Pemegang Saham (*Shareholders*)
   Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
4. *Stakeholders*
   Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *stakeholders* sehingga mendorong reputasi Perusahaan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*).

PEMBERLAKUAN PENGATURAN PEDOMAN KODE ETIK

Pedoman Kode Etik Perusahaan berlaku untuk seluruh individu yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, anak perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian, Pemegang Saham serta seluruh *stakeholders* atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

MEKANISME PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN KODE ETIK

- Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Pedoman Etika Perusahaan;
- Perusahaan menyelesaikan setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan stakeholder termasuk Pekerja dan/atau Perwakilan *stakeholder* terkait dengan pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan;
- Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholder* dalam rangka menjamin hak-hak *stakeholder* berhubungan dengan Perusahaan;
- Pelaporan pelanggaran oleh *stakeholders* yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi Perusahaan;
- Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, Perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Perseroan;
- Pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran sesuai dengan level pelaku pelanggaran;
- Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak mendapat perlindungan hukum dari Perusahaan.

PENANDATANGANAN KOMITMEN PEDOMAN KODE ETIK

Dalam rangka menegaskan komitmen terhadap implementasi Kode Etik Perusahaan, setiap tahunnya diperlukan penandatanganan komitmen terkait Etika Bisnis dan Etika Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

3. Shareholders
   Increase Shareholders' confidence that the Company is managed prudently, efficiently, transparently, accountably, and fairly to achieve the expected level of profitability while still considering the interests of the Company.
4. Stakeholders
   Create harmonious and mutually beneficial relationships with stakeholders, thereby enhancing the Company's reputation as a responsible corporate citizen.

CODE OF CONDUCT ENFORCEMENT

The Company's Code of Conduct guidelines apply to all individuals who act for and on behalf of the Company, subsidiaries, and affiliates under its control, as well as Shareholders and all stakeholders or work partners who conduct business transactions with the Company.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT MECHANISM

- Violations refer to attitudes, actions, or behaviors that deviate from the Company's Code of Conduct;
- The Company addresses every violation report submitted by stakeholders, including Employees and/or their representatives, related to breaches of the Company's Code of Conduct;
- Addressing violation reports is one way to enhance stakeholder protection and ensure their rights concerning the Company;
- Failure to promptly address violation reports from stakeholders may increase reputation risks for the Company;
- To address violation reports, the Company has established written policies and procedures outlined in the Company's Whistleblowing System Policies and Procedures;
- Violation reports are submitted in writing to the Violation Complaint Management Team, which then follows up according to the severity of the violation;
- Those who report violations are entitled to legal protection from the Company.

SIGNING COMMITMENT TO CODE OF CONDUCT GUIDELINES

To reaffirm the commitment to implementing the Company's Code of Conduct, it is necessary for every individual to sign a commitment related to Business Ethics and Work Ethics annually, with the following provisions:

1. Direksi dan Manajer sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja di lingkungan unit kerjanya masing-masing. Komitmen pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja di lingkungan unit kerjanya masingmasing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap akhir tahun;
2. Setiap Insan Perusahaan menerima satu salinan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja yang didokumentasikan oleh fungsi *Human Resource* atau fungsi yang ditunjuk. Komitmen setiap Insan Perusahaan yang melaksanakan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun.

PENYEMPURNAAN PEDOMAN KODE ETIK

Kode Etik Perusahaan, sebagai salah satu dokumen yang terus berkembang, memungkinkan pemutakhiran dan tinjauan secara berkala terkait cakupan regulasi, yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan perubahan peraturan perundang-undangan. IPCM melaksanakan pemutakhiran Kode Etik Perusahaan pada tahun 2021.

SOSIALISASI PEDOMAN KODE ETIK

Sosialisasi Pedoman Kode Etik Perusahaan menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai pemahaman dan komitmen bersama penerapan Kode Etik di lingkungan Perusahaan. Hingga akhir tahun 2023, IPCM telah melaksanakan inisiatif penyebaran Kode Etik Perusahaan dan berbagai kegiatan terkait. Sebagai hasilnya, seluruh anggota IPCM telah memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pedoman kode etik.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pertimbangan-pertimbangan berikut merupakan dasar untuk memberikan keputusan terhadap tindakan terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran, meliputi:

- Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Insan Perusahaan yang dapat menjadi teladan dalam implementasi Pedoman Etika Perusahaan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi;
- Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan Perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan non materiil berhak mendapatkan penghargaan dari Perusahaan;

1. Directors and Managers are designated as officials responsible for implementing the Business Ethics and Work Ethics Guidelines in their respective work units. The commitment of these officials is documented at the end of each year.

2. Each Company Personnel receives a copy of the Business Ethics and Work Ethics Guidelines and signs a statement form indicating that they have received, understood, and agreed to comply with the guidelines. This commitment is documented at the beginning of each year by the Human Resources function or designated function.

CODE OF CONDUCT GUIDELINE PERFECTION

The Company's Code of Conduct, as a dynamic document, undergoes regular updates and reviews to ensure alignment with evolving business needs and changes in statutory regulations. IPCM updated its Code of Conduct in 2021 to reflect these changes and developments.

SOCIALIZATION OF CODE OF CONDUCT GUIDELINES

Socializing the Company's Code of Conduct Guidelines is crucial to foster mutual understanding and commitment to its implementation within the organization. Until the end of 2023, IPCM has undertaken initiatives to disseminate the Company's Code of Conduct through various activities. As a result, all IPCM members have received comprehensive information regarding the guidelines.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

The following considerations serve as the basis for making decisions regarding actions against employees who commit violations:

- The Company may grant awards to Company Personnel who serve as role models in implementing the Company's Code of Conduct, as determined by the Board of Directors;

- Individuals who contribute to saving the Company by uncovering materially or non-materially detrimental cases are eligible to receive awards from the Company;



- Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan-tindakan disipliner sesuai dengan Peraturan Disiplin Pekerja yang berlaku;
- Mitra Kerja Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan keputusan Perusahaan;
- Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran pidana dan perdata oleh Mitra Kerja Perusahaan, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat kasus pelanggaran yang melibatkan pegawai JAI.

- Company personnel found to have violated the Company's Code of Conduct may face disciplinary actions in accordance with the applicable Worker Disciplinary Regulations;
- Company Partners found to have committed violations will be subject to sanctions as per Company regulations and decisions;
- In cases involving criminal or civil violations by Company Partners, the matter may be escalated to the authorities.

TOTAL CODE OF CONDUCT VIOLATION

Throughout 2023 there were no cases of violations involving employees of JAI.



KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI
ANTI-CORRUPTION AND ANTI-GRATIFICATION POLICIES

Dalam menghadapi tantangan global terkait korupsi dan gratifikasi, perusahaan kami dengan tegas menerapkan kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi sebagai landasan utama dalam menjalankan operasionalnya. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih, transparan, dan berintegritas.

In response to global challenges related to corruption and gratification, our company firmly implements the Anti-Corruption and Gratification policy as the primary basis for its operations. This policy is designed to foster a clean, transparent, and integrity-driven business environment.

Dalam rangka mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap, dan/atau gratifikasi di PT Jasa Armada Indonesia Tbk, program dan prosedur khusus telah diimplementasikan. Perusahaan juga telah menerbitkan publikasi Komitmen dan Implementasi Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai wujud nyata dari komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan dan mengendalikan praktik gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

To combat corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification at PT Jasa Armada Indonesia Tbk, special programs and procedures have been implemented. Additionally, the Company has published publications on the Commitment and Implementation of Gratification Control and Anti-Bribery Management System as a tangible manifestation of the Company's commitment to implementing and controlling gratification practices within the organization.

PRINSIP DASAR PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUP PERUSAHAAN

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B, pemberian apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Mengacu pada prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi di lingkup perusahaan, ini menegaskan bahwa praktek memberikan imbalan kepada pekerja atau pihak terkait dalam konteks bisnis harus dilakukan dengan penuh integritas dan transparansi. Hal ini penting untuk menjaga kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang berlaku serta mencegah terjadinya praktik korupsi.

BASIC PRINCIPLES OF GRATIFICATION CONTROL AT THE COMPANY

According to the provisions stated in Law Number 20 Year 2001 Article 12B, any gift to a civil servant or state organizer is considered a bribe if it is related to his/her position and contrary to his/her obligations or duties. Referring to the principles of gratification control within the company, this confirms that the practice of providing rewards to employees or related parties in a business context must be carried out with integrity and transparency. This is important to maintain compliance with applicable ethical and legal standards and prevent corrupt practices.

KLASIFIKASI GRATIFIKASI

Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar Dan Penerapan Whistle Blowing System (WBS), klasifikasi gratifikasi di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan
2. Gratifikasi yang terkait kedinasan
3. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan

GRATIFICATION CLASSIFICATION

As stated in the Guidelines for Gratification Management, Illegal Levy Reporting and Whistle Blowing System (WBS) Implementation, the classification of gratification in the Company is as follows:

1. Gratuities that must be reported
2. Officially related gratuities
3. Gratuities that do not need to be reported

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Perusahaan telah membentuk Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertanggung jawab kepada Direksi untuk melaksanakan sistem pencegahan dan penanggulangan grati□kasi di lingkungan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK-56/29/5/2/MS-20 Tanggal 29 Mei 2020.

GRATIFICATION USAGE AND MANAGEMENT

The Company has established a Gratification Control Team/Unit (UPG) which is responsible to the Board of Directors to implement a gratification prevention and control system within the Company based on the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK-56/29/5/2/MS-20 Dated May 29, 2020.



No.	Unit Kerja Work Unit	Jabatan dalam Tim Position in the Team
1	Corporate Secretary	Ketua Chairman
2	Kepala Satuan Pengawas Internal Head of Internal Supervisory Unit	Wakil Ketua Vice Chairman
3	VP Hukum & Asuransi VP Legal & Insurance	Anggota Member
4	VP SDM & Budaya Perusahaan VP HR & Corporate Culture	Anggota Member

Dalam hal ini Tim/Unit Pengendali Gratifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab, senagai berikut:

1. Menerima dan mengelola terhadap semua laporan yang masuk ke saluran yang tersedia yang dilaporkan oleh Insan Perusahaan;
2. Melakukan pemilahan kategori gratifikasi dan menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Insan Perusahaan;
3. Menentukan status kepemilikan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan (setelah ada review dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan);
4. Menentukan penyaluran penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya;
5. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima gratifikasi dan menitipkannya kepada divisi keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai surat keputusan pimpinan KPK mengenai kepemilikannya;
6. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman perusahaan terkait dengan gratifikasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders);
7. Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada manajemen Perusahaan;
8. Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Perusahaan;
9. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan;
10. Melaporkan kegiatan Tim/Unit Pengendalian Gratifikasi UPG) kepada Direksi setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan;
11. Melakukan rapat internal dengan Tim/Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) setiap bulannya;
12. Membuat laporan bulanan mengenai statistik pelaporan, tindak lanjut hingga pemberian reward dan punishment kepada pelapor dan terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Direksi.

In this case, the Gratification Control Team/Unit has duties and responsibilities, as follows:

1. Receive and manage all reports that enter the available channels reported by Company personnel;
2. Sorting gratification categories and submitting gratification reports to the KPK no later than 30 (thirty) days from the date of receipt by Company personnel;
3. Determining the status of ownership of gratuities received in the official capacity (after there is a review from KPK that the gratification report is included in the official category);
4. Determine the distribution of gratuities in the form of perishable/rotten or expired goods by keeping proof of delivery;
5. Receive money or goods handed over by the gratification recipient and entrust them to the finance division for safekeeping and hand them over or deposit them with a party appointed in accordance with the KPK leadership decree regarding ownership.
6. Disseminating or socializing company guidelines related to gratuities to stakeholders;
7. Provide information related to the development of the gratification control system to the Company's management;
8. Formulating further instructions needed for the implementation of gratification control in the Company;
9. Administering and archiving activities;
10. Reporting the activities of the UPG Gratification Control Team/Unit) to the Board of Directors every quarter, no later than 10 (ten) working days after the end of the relevant quarterly period;
11. Conduct internal meetings with the Gratification Control Team/Unit (UPG) every month;
12. Prepare a monthly report on reporting statistics, follow-up to reward and punishment to the reporter and the reported party and report the results to the Board of Directors.

PELAPORAN DAN SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

PELATIHAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI KEPADA PEKERJA

Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap etika bisnis yang tinggi, Perusahaan menyelenggarakan Pelatihan Anti Korupsi dan Gratifikasi kepada seluruh pekerja. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kolektif terhadap praktik-praktik bisnis yang bersih, serta memberikan wawasan mendalam mengenai konsekuensi hukum dan reputasi yang dapat timbul dari korupsi. Di tahun 2023, Perseroan melangkah maju dengan inisiatif yang kuat dalam upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi dengan menyelenggarakan pelatihan khusus kepada para pekerjanya. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, Perseroan menggelar Pelatihan Awareness dan Refreshment ISO37001 : 2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Langkah ini menjadi komitmen Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja JAI memahami dengan baik pentingnya transparansi, integritas, dan kepatuhan dalam setiap aspek pekerjaan mereka, serta membantu mencegah praktik korupsi dan gratifikasi di dalam organisasi. Dengan pendekatan proaktif ini, Perseroan memberikan contoh yang kuat dalam membangun budaya perusahaan yang bersih dan bertanggung jawab.

GRATIFICATION REPORTING

Violation of the provisions in the gratuity guidelines will be subject to sanctions in accordance with the provisions and regulations applicable in the Company.

ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION TRAINING FOR EMPLOYEES

In an effort to strengthen the commitment to high business ethics, the Company organizes Anti-Corruption and Gratification Training for all employees. This training aims to enhance collective understanding and awareness of clean business practices, as well as provide in-depth insight into the legal and reputational consequences that can arise from corruption. In 2023, the Company stepped forward with strong initiatives in corruption and gratification prevention by organizing special training for its employees. In commemoration of Anti-Corruption Day, the Company organized ISO37001 Awareness and Refreshment Training: 2016 Anti-Bribery Management System (ABMS). This step is the Company's commitment to ensure that all JAI employees understand the importance of transparency, integrity, and compliance in every aspect of their work, and to help prevent corrupt practices and gratuities within the organization. With this proactive approach, the Company sets a strong example in building a clean and responsible corporate culture.



SOSIALISASI ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi, Perusahaan yang berkomitmen secara berkala melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi. Langkah ini diambil untuk membentuk lingkungan kerja yang adil, di mana setiap pekerja memahami dengan baik pentingnya memelihara etika bisnis dan menolak segala bentuk praktik yang dapat merugikan integritas perusahaan.

Di tahun 2023, Perseroan telah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan penolakan terhadap praktik korupsi serta gratifikasi. Upaya ini mencakup penyuluhan melalui platform digital seperti situs web perusahaan, sistem internal yang terintegrasi, penyebaran spanduk, dan aktivitas yang disebarkan melalui berbagai saluran media sosial.

ANTI CORRUPTION AND GRATIFICATION SOCIALIZATION

To maintain integrity and transparency, the Company regularly conduct outreach on preventing corruption and gratification. This step is crucial for creating a fair work environment where every employee understands the importance of upholding business ethics and rejecting all forms of practices that could harm the company's integrity.

In 2023, The Company has conducted socialization to raise awareness of the importance of integrity and rejection of corrupt practices and gratuities. These efforts include outreach through digital platforms such as the company website, integrated internal systems, banner distribution, and activities spread through various social media channels.

MEKANISME PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Laporan atau pengaduan atas penerimaan gratifikasi akan ditangani sebagai berikut

GRATIFICATION INCOMING REPORT MECHANISM

Reports or complaints on the receipt of gratuities will be handled as follows:

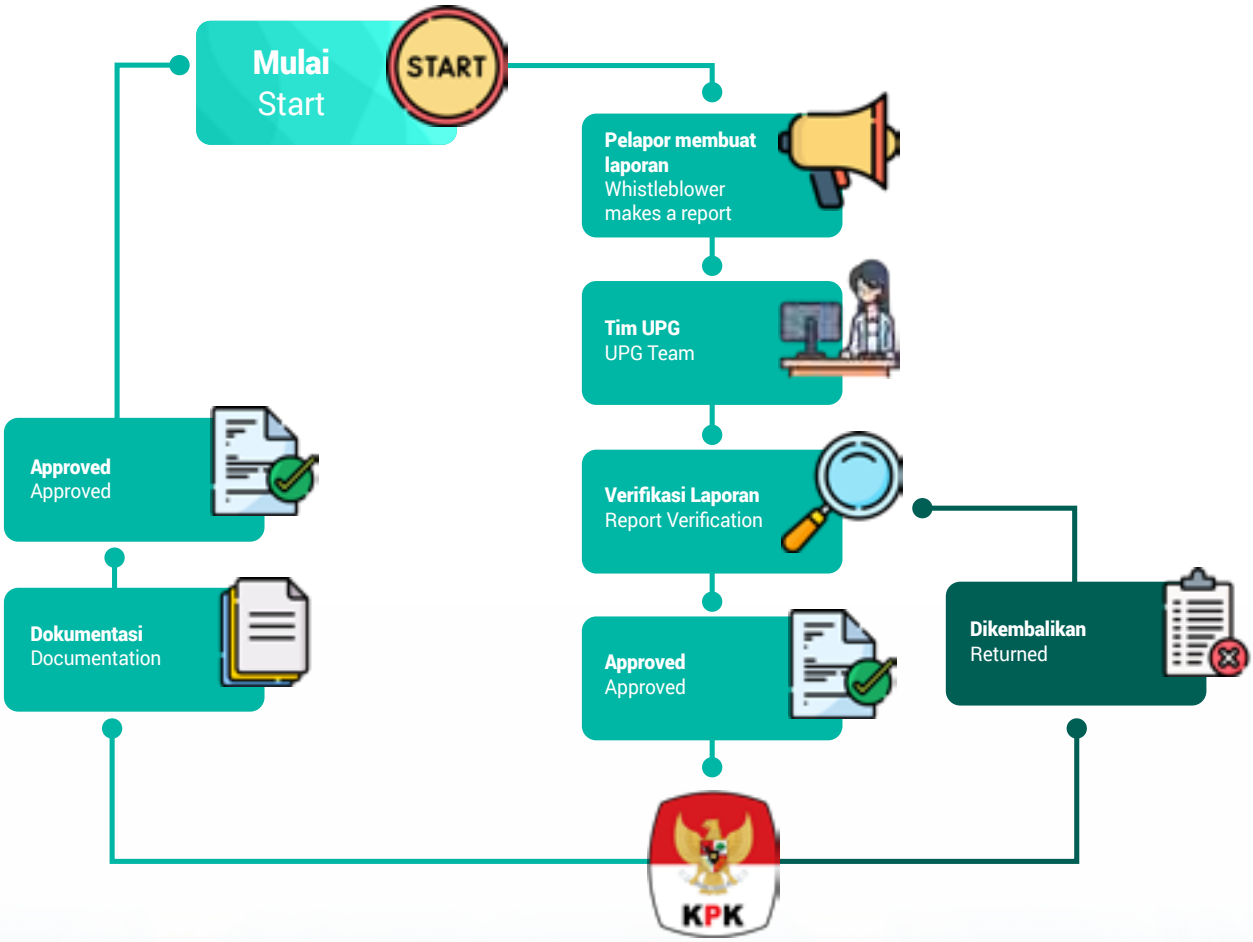

Apabila terdapat penerimaan hadiah/cendera mata dan/atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur perusahaan. Maka Insan Perusahaan wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Perusahaan dengan sepengetahuan atasan langsung masing- masing oleh Insan Perusahaan penerima hadiah/cenderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan dengan menyampaikan formulir penerimaan hadiah/ cenderamata dengan contoh format sebagaimana diatur dalam lampiran pedoman ini;
2. Whistle Blowing System yang dikelola PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang mana dilakukan apabila pelapor adalah Insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Whistle Blowing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem Whistle blowing System.

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI TAHUN 2023

Per 31 Desember 2023, Perusahaan tidak menerima adanya laporan gratifikasi.

If there is a receipt of gifts / souvenirs and / or entertainment outside the limits set by the company. Then Company personnel are required to report this through:

1. The Company's Gratification Control Team/Unit (UPG) with the knowledge of the respective direct supervisor by the Company's personnel receiving the gift/gift no later than 7 (seven) working days from the date of receipt by submitting a gift/gift receipt form with a sample format as stipulated in the attachment to this guideline;

2. Whistle Blowing System managed by PT Jasa Armada Indonesia Tbk which is carried out if the reporter is a Company Personnel or other parties (customers, work partners and the community) who do not have direct involvement, but know gratifikasi in the Company that has the potential for abuse of authority / position. Reporting through the Whistle Blowing System is carried out in accordance with a separate mechanism that regulates the Whistle blowing System.

INCOMING GRATIFICATION REPORT IN 2023

As of December 31, 2023, the Company has not received any gratification reports.



KEBIJAKAN PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*
INSIDER TRADING PREVENTION POLICY

Peraturan perundang-undangan mengharuskan setiap Anggota Direksi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk melarang keterlibatan dalam perdagangan orang dalam (*insider trading*) demi kepentingan dan/atau keuntungan pribadi.

Regulation governs that each member of the Board of Directors comply with applicable provisions, including the prohibition of involvement in insider trading for personal interest or gain.

Demikian pula, dalam pengaturan *Board Manual* Anggota Dewan Komisaris, dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat/pekerja instansi pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Similarly, the Board Manual stipulates that members of the Board of Commissioners are prohibited from offering or receiving anything of value directly or indirectly to influence a customer or government official/worker, in accordance with applicable laws and regulations.

Seluruh individu di PT Jasa Armada Indonesia Tbk diharapkan untuk menghindari konflik kepentingan seperti ini, dan jika terjadi, diwajibkan melaporkan situasi tersebut kepada atasan langsung untuk mengklarifikasi konflik kepentingan. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mengakibatkan tindakan disipliner yang tegas terhadap individu yang bersangkutan.

All individuals at PT Jasa Armada Indonesia Tbk are expected to avoid conflicts of interest and report any such situations to their immediate superior for clarification. Violations of this code of ethics will result in strict disciplinary action.

Dalam hal ini, penting pula untuk menghindari hubungan pribadi atau keterlibatan emosional dengan kompetitor, vendor, atau bawahan yang dapat mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan, untuk mencegah konflik kepentingan.

It is also crucial to avoid personal or emotional involvement with competitors, vendors, or subordinates that could influence decision-making, thus preventing conflicts of interest.

Insan PT Jasa Armada Indonesia Tbk harus selalu menghindari segala bentuk keterlibatan keluarga dalam hubungan bisnis untuk menghindari konflik kepentingan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan keterlibatan ini harus dihindari dan didiskusikan terlebih dahulu dengan atasan, atasan daripada atasan, atau SDM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk personnel must refrain from engaging in business relationships with family members to avoid conflicts of interest. Any transactions involving family members must be discussed with superiors or HR in accordance with regulations.

Selama tahun 2023 dan pada tahun-tahun sebelumnya, tidak terdapat insiden perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang melibatkan Direksi, Komisaris, atau manajemen pekerja.

Throughout 2023 and in previous years, there were no incidents of insider trading involving Directors, Commissioners, or employee management.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

Dalam rangka menjaga kelancaran rantai bisnis Perusahaan dan mencapai sasaran mitu, waktu, dan biaya, diperlukan suatu sistem pengadaan barang dan jasa yang efektif. Untuk itu, Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan optimal, sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, dan dalam batas waktu serta biaya yang telah ditentukan.

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kebijakan atas Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengacu pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK-56/14/10/1/MS-22 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/25/7/1/PGD/DUT/JAI-23 tanggal 25 Juli 2023.

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADAAN

Prosedur dan Tata Cara proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengacu pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK-56/14/10/1/MS-22 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/25/7/1/PGD/DUT/JAI-23 tanggal 25 Juli 2023 dan dijabarkan lebih detail pada Buku Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

PELAKSANAAN KEGIATAN/ JENIS PROGRAM DI 2023

Berikut adalah rangkuman kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan sepanjang tahun 2023:
1. Pekerjaan Docking Kapal Tunda, Kapal Pandu dan Kapal Kepil.
2. Pekerjaan Sewa Menyewa Kapal Tunda dan Kapal Pandu.
3. Pekerjaan Konsultan IT.
4. Pekerjaan General Overhaul Mesin Induk.
5. Pekerjaan Pengelolaan Awak Kapal.

To ensure the smooth operation of the Company's business chain and achieve quality, time, and cost targets, an effective goods and services procurement system is essential. Therefore, the Company has established a policy regarding the procurement of goods and services as a strategic measure to ensure that every procurement process is executed optimally, adhering to predetermined quality standards, and within specified time and cost constraints.

POLICIES AND GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

The policy regarding the implementation of procurement of goods and services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk is governed by the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK-56/14/10/1/MS-22 dated October 14, 2022, concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services in the Environment of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as amended by the Regulation of the Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01/25/7/1/PGD/DUT/JAI-23 dated 25 July 2023.

PROCUREMENT PROCEDURES AND GUIDELINES

The procedures and guidelines for the procurement of goods and services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk are outlined in the Regulation of the Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK-56/14/10/1/MS-22 dated October 14, 2022, concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk, amended by the Regulation of the Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01/25/7/1/PGD/DUT/JAI-23 dated July 25, 2023. Further details regarding the procurement procedures are provided in the Technical Instruction Book concerning Procedures for Procurement of Goods and Services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES/ TYPES OF PROGRAMS IN 2023

The following is a summary of goods and services procurement activities carried out by the Company throughout 2023:
1. Docking work for tugboats, pilot boats, and kepil boats.
2. Renting tugboats and pilot boats.
3. IT consultant jobs.
4. General overhaul work for main engines.
5. Crew management work.

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2023 Divisi Pengadaan telah menyelesaikan sebanyak 80 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Adapun jenis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pengadaan, secara garis besar merupakan kebutuhan utama dan rutin yang menunjang kinerja Perusahaan, antara lain Pekerjaan *Docking* Kapal, Sewa-Menyewa Kapal *General Overhaul* Mesin Kapal, Jasa Konsultansi, Jasa Sertifikasi Kapal, Pembangunan Aplikasi, Tenaga *Cleaning Service*, dan lainnya. Sementara itu, sampai dengan kurun waktu Triwulan IV Tahun 2023 total nilai pekerjaan dari seluruh kontrak yang ada mencapai Rp228.567.658.727 (dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari total nilai HPS/OE sebesar Rp240.985.498.320,- (dua ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

As of the fourth quarter of 2023, the Procurement Division has completed 80 Goods and Services Procurement Contracts within PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The types of procurement of goods and services carried out by the Procurement Division generally support the Company's performance, including Ship Docking Work, Ship Rental, General Ship Engine Overhaul, Consultancy Services, Ship Certification Services, Application Development, Cleaning Service Personnel, and others. Up to the fourth quarter of 2023, the total value of work from all existing contracts reached Rp228,567,658,727 (two hundred twenty-eight billion five hundred sixty-seven million six hundred fifty-eight thousand seven hundred twenty-seven rupiah) while the total HPS/OE value stood at Rp240,985,498,320 (two hundred forty billion nine hundred eighty five million four hundred ninety eight thousand three hundred and twenty rupiah).

Berdasarkan paparan antara total Nilai Pekerjaan dengan total HPS/OE sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 tersebut menunjukan bahwa Divisi Pengadaan telah berhasil mencapai penghematan biaya sebesar Rp.12.417.839.592,- (dua belas miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), atau sebesar 5,15%.

Based on the comparison between the total Work Value and the total HPS/OE up to Quarter IV 2023, it shows that the Procurement Division has achieved cost savings of Rp.12.417.839.592,- (twelve billion four hundred seventeen million eight hundred thirty nine thousand five hundred ninety two rupiah) or 5.15%.

Selanjutnya ditinjau dari sisi metode pemilihan penyedia bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang telah diselenggarakan oleh Divisi Pengadaan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tender Terbatas : 24 Kontrak Pekerjaan
2. Seleksi Terbatas : 2 Kontrak Pekerjaan
3. Penunjukan Langsung : 54 Kontrak Pekerjaan

Furthermore, the procurement process for goods and services carried out by the Procurement Division utilizes the following method:

1. Limted Tender : 24 Work Contracts
2. Limited Selection : 2 Work Contracts
3. Direct Appointment : 54 Work Contracts

PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah mengimplementasikan aplikasi elektronik *Procurement* milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan Pelindo Elektronik *Procurement* (P-Eproc) terhitung sejak tanggal 1 September 2023. Dengan penggunaan aplikasi P-Eproc dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT Jasa Armada Indonesia Tbk maka semua Vendor yang akan ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT Jasa Armada Indonesia Tbk harus sudah terdaftar dalam aplikasi P-Eproc dan berstatus *activated*.

As of September 1, 2023, PT Jasa Armada Indonesia Tbk has implemented the electronic procurement application owned by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), better known as Pelindo Elektronik Procurement (P-Eproc). With the utilization of the P-Eproc application in the procurement process of goods and services at PT Jasa Armada Indonesia Tbk, all vendors intending to participate must be registered in the P-Eproc application and have activated status.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
VIOLATION REPORTING SYSTEM

Perusahaan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran sebagai langkah pencegahan korupsi, suap, dan kecurangan. Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) diadopsi sebagai mekanisme deteksi dini pelanggaran yang dapat merugikan secara finansial maupun non-finansial serta merusak citra Perusahaan. Penerapan WBS di seluruh Insan Perusahaan memberikan kesempatan kepada semua pihak terkait di Perusahaan untuk menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, diperkenalkan *Whistleblowing System*. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pelapor, sistem ini tidak hanya menjaga kerahasiaan identitas, tetapi juga melindungi dari kemungkinan tindakan balasan oleh pihak yang dilaporkan. Perlindungan ini berlaku apabila laporan dibuat dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik.

The Company prioritizes the principles of good corporate governance by implementing a violation reporting system as a measure to prevent corruption, bribery, and fraud. The Whistleblowing System (WBS) policy was adopted as an early detection mechanism for violations that could cause financial and non-financial harm and damage the Company's image. The implementation of WBS across all Company Personnel provides an opportunity for all related parties in the Company to submit reports regarding indications of violations of applicable ethical values. In order to provide protection to the reporter, this system not only maintains the confidentiality of the identity but also protects against possible retaliation by the reported party. This protection applies if the report is made with reliable evidence and in good faith.

Sebagaimana diamanatkan melalui Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.56/4/10/5/MS-21 pada tanggal 4 Oktober 2021, Perusahaan telah merumuskan dan menetapkan kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mengatur Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan.

As instructed in the Guidelines for Gratification Management, Reporting of Illegal Levies, and Implementation of the Whistleblowing System (WBS) within PT Jasa Armada Indonesia Tbk, specified in the document numbered HK.56/4/10/5/MS-21 on October 4, 2021, the Company has formulated and determined a Violation Reporting System policy that regulates the Company's Violation Reporting System.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka memberikan pemahaman terkait kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perusahaan secara rutin melakukan sosialisasi kepada seluruh Insan IPCM. Manajemen Perusahaan melengkapi inisiatif IPCM Bersih ini dengan:

1. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pekerja atas keberadaan Program IPCM Bersih dan sistem pelaporan pelanggaran yang independen.
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada stakeholder agar memahami kebijakan dan prosedur internal control untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
3. Operator *call center* khusus dengan pengetahuan untuk menggali informasi penting.
4. Ahli investigasi forensik yang berpengalaman untuk menganalisa laporan.
5. Mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat segera ditindaklanjuti.

SOCIALIZATION OF THE VIOLATION REPORTING SYSTEM

To ensure understanding of the Violation Reporting System policy, the Company regularly conducts outreach to all IPCM personnel. Company Management complements this Clean IPCM initiative by:

1. Conducting socialization activities to increase workers' awareness of the Clean IPCM Program and an independent violation reporting system.
2. Providing education and training activities for stakeholders to understand internal control policies and procedures to prevent violations.
3. Employing specialized call center operators with the knowledge to uncover important information.
4. Utilizing experienced forensic investigation experts to analyze reports.
5. Implementing violation reporting mechanisms that can be promptly followed up on.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkup Perusahaan digambarkan dalam bagan berikut.

MECHANISM FOR SUBMITTING VIOLATION REPORTS

The Violation Reporting System mechanism within the Company is depicted in the following chart.

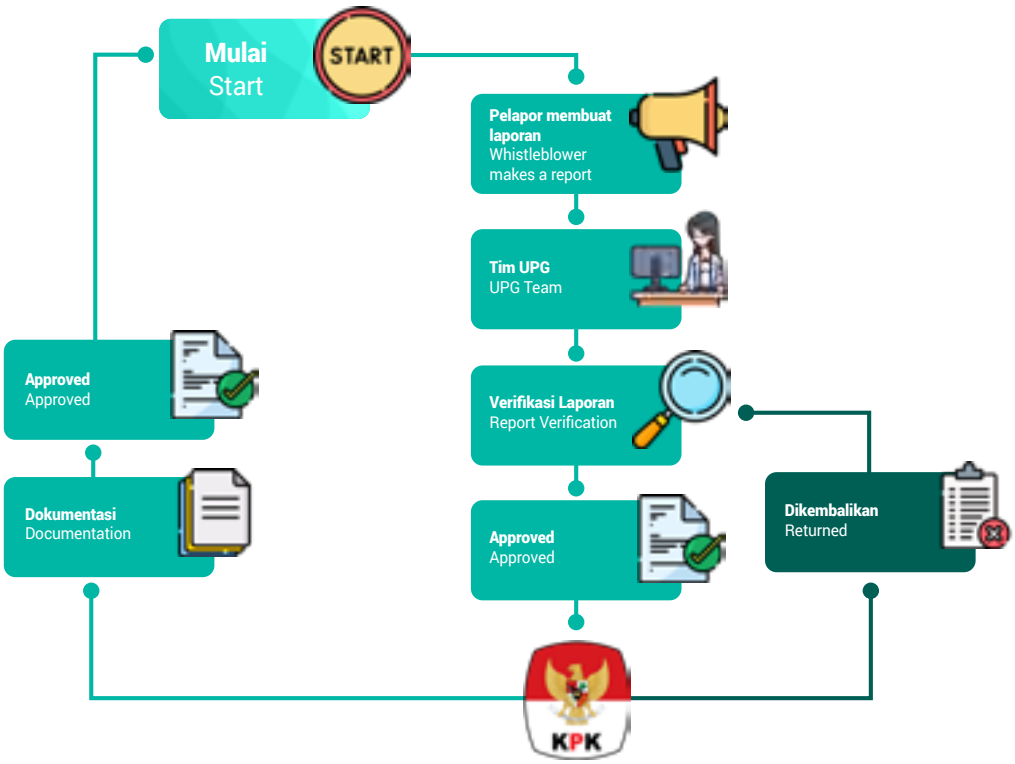

Apabila terdapat penerimaan hadiah/cenderamata dan/atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan. Maka Insan Perseroan wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Perusahaan dengan sepengetahuan atasan langsung masing-masing oleh Insan Perseroan penerima hadiah/cenderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan dengan menyampaikan formulir penerimaan hadiah/cenderamata.
2. *Whistleblowing System* yang dikelola PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang mana dilakukan apabila pelapor adalah Insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui *Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem *Whistleblowing System* yang dapat diakses melalui:

If Company Personnel receive gifts/souvenirs and/or entertainment exceeding the set limits, they must report this through:

1. The Company's Gratification Control Team/Unit (UPG), informing their respective direct superiors no later than 7 (seven) working days from the date of receipt. This is done by submitting the gift/souvenir acceptance form.
2. The Whistleblowing System managed by PT Jasa Armada Indonesia Tbk is applicable if the reporter is Company personnel or other parties (customers, work partners, and the public) who do not have direct involvement but are aware of gratification in the Company, which has the potential for abuse of authority/position. Reporting via the Whistleblowing System follows a separate mechanism accessible through:



https://pelindobersih.whistleblowing.link/
+62 21 2782 2345
+62 21 2782 3456
+62 811 933 2345 / +62811 9511 665
pelindobersih@whistleblowing.link
Pelindo Bersih. PO Box 1074. JKS 12010

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Pelapor dapat melaporkan tanpa menyebutkan identitasnya (anonim) ataupun menyebutkan identitasnya. Pelapor yang menyebutkan identitasnya memperoleh perlindungan dari manajemen dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan. Melalui sistem ini, Insan Perusahaan atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

PROTECTION FOR REPORTERS

The reporter can choose to report anonymously or disclose their identity. Reporters who disclose their identity receive protection from management and facilitate the follow-up process if additional information is required. Through this system, Company personnel or stakeholders who report will receive protection, including confidentiality of identity and guarding against possible retaliation by the reported individual.

PROSES PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

Pelaksanaan dan prasarana untuk pelaksanaan *Whistleblowing System*, Perusahaan menggunakan prasarana yang dimiliki induk perusahaan yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Seluruh upaya ini bertujuan untuk menginternalisasi prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aktivitas bisnis dan program kerja.

PROCESS FOR HANDLING VIOLATION COMPLAINTS

For the implementation and infrastructure of the Whistleblowing System, the Company utilizes the infrastructure owned by the parent company, namely PT Pelabuhan Indonesia (Persero). These efforts are aimed at internalizing GCG principles in all business activities and work programs.

PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi mengacu pada SK No. HK-56/29/5/2/MS-20 Tanggal 29 Mei 2020, yang terdiri dari:

- Ketua : Sekretaris Perusahaan
- Wakil Ketua : Kepala Satuan Pengawas Internal
- Anggota : VP Hukum & Asuransi VP SDM dan Budaya Perusahaan

VIOLATION REPORTING SYSTEM MANAGER

The Company has established a Gratification Control Unit referring to Decree No. HK-56/29/5/2/MS-20 Dated May 29, 2020, which consists of:

- Chairman : Corporate Secretary
- Deputy : Head of the Internal Audit Unit
- Member : VP Legal & Insurance, VP HR and Corporate Culture

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES SERTA SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES TAHUN 2023

Selama tahun 2023, tidak terdapat laporan masuk, sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini.

NUMBER OF COMPLAINTS INCOMING AND PROCESSED AND SANCTIONS/ FOLLOW UP FOR COMPLAINTS THAT HAVE COMPLETED IN 2023

During 2023, there were no incoming reports, as attached in the table below.

	2023	2022
Jumlah pengaduan yang masuk Incoming reports	Nihil None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang diproses Processed reports	Nihil None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang telah selesai Settled reports	Nihil None	Nihil None

TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*
TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

Sampai dengan akhir tahun 2023, Perusahan tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang terkait dengan praktik *Bad Corporate Governance* seperti yang tercantum di bawah ini:

As of the end of 2023, the Company has not carry out actions or policies related to Bad Corporate Governance practices as listed below:

Transparansi Praktik *Bad Corporate Governance* Tahun 2023
Bad Corporate Governance Practice in 2023

No	Praktik Practice	Keterangan Description
1	Laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan Reports on Company activities that pollute the environment	Nihil None
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan Important cases being faced by the Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and/or Commissioners who are currently serving are not disclosed in the Annual Report	Nihil None
3	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan Non-compliance in disclosing the fulfillment of tax obligations	Nihil None
4	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Inconsistency in the presentation of the Annual Report and Financial Reports with applicable regulations and SAK	Nihil None
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan Not disclosing operating segments in the Financial Statements	Nihil None
6	Kasus terkait buruh dan pekerja Cases related to workers and employees	Nihil None
7	Ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan dengan Laporan Tahunan Digital Incompatibility between the Physical Annual Report Book and the Digital Annual Report	Nihil None

PENERAPAN ATAS PEDOMAN GOVERNANSI PERUSAHAAN
IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Commissioners		
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors		
Rekomendasi Recommendation			
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: • berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; • beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; • berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta • berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*) To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes: • to be competitive and focused on long-term performance; • to be ethical and responsible in conducting business; • to have positive contributions to the community and the environment; • as well as d. to be able to survive and grow (corporate resilience)	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.1.1.1	Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. The Board of Directors maintains high standards of business ethics and ensures the implementation of a code of ethics that creates a corporate culture of integrity.	*Apply*	
1.1.1.2	Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa pekerja memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi. The Board of Directors fosters a corporate culture that ensures that employees understand their responsibility to behave in accordance with corporate values and high standards of business ethics.	*Apply*	
1.1.1.3	Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. The Board of Directors ensures the fulfillment of corporate social and environmental responsibilities. The Board of Directors has a clear strategic plan in carrying out corporate social and environmental responsibilities.	*Apply*	
1.1.1.4	Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional. The Board of Directors ensures that the corporation is financially strong and operationally agile.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporate mission, vision, goals, objectives, strategies, as well as annual and mid-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.1.2.1	Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. When developing strategies and plans, the Board of Directors promotes innovation and the use of advanced technologies to increase competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, and fulfill social and environmental responsibilities.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.1.2.2	Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi The Board of Directors prioritizes and promotes a corporate culture that includes innovation and incorporates innovation into corporate strategy, operational development planning, and operational supervision	*Apply*	
1.1.2.3	Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra. The Board of Directors drives innovation that enhances long-term value creation for the business in a changing environment. Such innovation can include designing innovative business models, products and services, promoting research, improving production processes and operations, and collaborating with partners.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies, as well as complying with applicable laws and regulations and standards.	*Apply*	
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures that the integrity of the corporate accounting and financial reporting system and the timely and accurate disclosure of all material information about the corporation.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.1.4	Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk pekerja) yang memadai. The Board of Directors ensures that everyone involved in the preparation and disclosure of corporate information has relevant knowledge, skills and experience, reflected, among other things, in relevant professional certifications issued by reputable institutions. Apart from that, the Board of Directors also ensures the availability of adequate resources (including employees).	*Apply*	
1.1.4.2	Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini: • Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal • Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain • Pendapat Komite Audit Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan. When approving information disclosures (including periodic disclosures of financial information), the Board of Directors considers all of the following factors: • Results of evaluation of design accuracy and effectiveness of internal control system implementation • External auditor's opinion on financial reports, observations of the internal control system, and other observations through other sources • Audit Committee Opinion • Consistency with goals, strategies and policies.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.1.4.3	Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi. The Board of Directors submits a report that comments on the Quarterly Financial Report and is published simultaneously with the Quarterly Financial Report so that it is useful for investors and analysts who will review the corporation's financial fundamentals and performance.	*Apply*	
Rekomendasi 5 Recommendation 5			
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.1.5.1	Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global. Sustainability reports are prepared based on a reporting framework that is appropriate to the size and complexity of the corporation and meets national and/or global standards.	*Apply*	
1.1.5.2	Pelaporan keberlanjutan korporasi mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan. Corporate sustainability reporting reflects corporate practices that support sustainable value creation.	*Apply*	
Rekomendasi 6 Recommendation 6			
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors builds a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.1.6.1	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal. The Board of Directors ensures that the corporation has an IT resource allocation policy that ensures adequate and optimal investment and allocation of IT resources.	*Apply*	
1.1.6.2	Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI. The Board of Directors ensures that corporate risk management includes IT risk management.	*Apply*	
1.1.6.3	Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data. The Board of Directors ensures that the corporation has IT security policies and procedures, including protection of data security and confidentiality.	*Apply*	
Rekomendasi 7 Recommendation 7			
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	*Explain*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Directors' Charter or by a Directors' Decree.	*Apply*	
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	*Apply*	
1.2	Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya Performance Assessment – Board of Directors and its Members		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts annual formal evaluations objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.2.1.1	Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris. The Board of Commissioners establishes a self-assessment policy for the Board of Directors to assess the performance of the Board of Directors. The results of the self-assessment are submitted to Board of Commissioners to be assessed and if necessary adjusted to the assessment of the Board of Commissioners.	*Apply*	
1.2.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan Korporasi dalam mencapai target-target kinerja. Tolak ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Self-assessment policies or other assessment policies are based on assessment benchmarks that are specific, measurable, achievable and relevant and in accordance with those determined by the Board of Commissioners based on the considerations of the Nomination and Remuneration Committee and as a basis for assessing the accountability of the Board of Directors regarding the level of success of the Corporation in achieving targets. The selected benchmarks are included in the work agreement contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners.	*Apply*	
1.2.1.3	Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada direktur, komisaris, dan pekerja harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. The remuneration scheme in the form of shares given to directors, commissioners and employees must obtain approval from shareholders.	*Explain*	
1.2.1.4	Perpanjangan masa jabatan direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a director's term of office is based on satisfactory performance evaluation results regarding his or her contribution.	*Apply*	
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Panduan Guideline			
1.2.2.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan. The Board of Commissioners ensures that the President Director's performance evaluation is based on predetermined criteria which have been communicated to him in advance. Performance criteria or evaluation must provide incentives to the President Director to carry out his role in supporting the achievement of corporate goals and the creation of sustainable value.	*Apply*	
1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, carries out an annual performance evaluation of the President Director. The Board of Commissioners or the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners communicates the results (including development areas) of performance evaluation to the President Director.	*Apply*	
1.2.2.3	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara obyektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, approves the performance evaluation criteria for other members of the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the President Director evaluates the performance of other members of the Board of Directors objectively and accurately based on previously determined performance evaluation criteria.	*Apply*	
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves business plans and long-term financial plans and short-term financial plans of the corporation. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors regarding implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in very important decisions for the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	*Apply*	
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	*Apply*	
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and is decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinction between ethnicity, religion, race, group and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year the Board of Commissioners reviews reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	*Apply*	
1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners a). submit to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b). periodically review the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners monitors the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.3.6.1	Dewan komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen. The board of commissioners ensures that regular evaluations are carried out on the implementation of corporate governance policies, both independently and using independent external consultants.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with corporate goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	*Apply*	
1.3.7.2	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa: • Penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko (*risk appetite*) korporasi, • Kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini (*early warning signals*) atas risiko material, • Kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that: • Establishing and implementing risk management policies is consistent with corporate goals, objectives, strategies and risk appetite, • Risk management policies can provide early warning signals for material risks, • Risk management policies are reviewed periodically, for example every year.	*Apply*	
1.3.7.3	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal. The Board of Commissioners monitors and provides input so that main risks are identified through consideration of internal and external factors.	*Apply*	
1.3.7.4	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that the impact and likelihood of risks occurring have been assessed, and that appropriate risk mitigation strategies and plans are in place.	*Apply*	
1.3.7.5	Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal korporasi The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of risk management and the corporation's internal control system	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Rekomendasi Recommendation			
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.3.8.1	Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan korporasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan korporasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif. Before approving the financial report, the Board of Commissioners received a statement from the President Director and Finance Director of the corporation, that in their opinion, the entity's financial records have been managed well and the financial report has been prepared in accordance with applicable accounting standards and presents a fair presentation of the corporation's financial position and performance. and that their opinion is formed based on an appropriately designed and effectively implemented risk management and internal control system.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Corporation's annual reports and sustainability reports and ensures their integrity, as well as oversees the corporate disclosure and communication process.	*Apply*	
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	*Apply*	
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	*Apply*	
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.3.12.1	Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu: a) mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; b) dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang korporasi, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; c) mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas. If the President Commissioner is not an Independent Commissioner, then the Board of Commissioners appoints an Independent Commissioner or senior Independent Commissioner (if there is more than one Independent Commissioner) to carry out the role of President Commissioner for tasks of the President Commissioner that have potential conflicts of interest with affiliated parties. The criteria for appointing a senior Independent Commissioner are: a) able to convey opinions/arguments constructively to the President Commissioner; b) compared to other commissioners, has more knowledge about the corporation, including its performance, market and stakeholders; c) able to provide balanced views/thoughts on the issues and concerns of the majority shareholder.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.3.12.2	Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris independen agar: • Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; • Memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali; • Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan • Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. In carrying out their role as members of the Board of Commissioners, independent Commissioners must: • Acting in the best interests of the corporation; • Monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors and Board of Commissioners or controlling shareholders; • Taking independent account of the views of minority shareholders and other stakeholders; And • Encourage dialogue between management, shareholders and other stakeholders.	*Apply*	
1.3.12.3	Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas komisaris independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir. The corporation revealed the reasons for the end of the independent commissioner's duties which occurred before the term of office ended.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The Chief Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Apart from that, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. Details of the duties of the President Commissioner are disclosed in the annual report and corporate website.	*Apply*	
1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. The President Commissioner coordinates the distribution of supervisory roles among members of the Board of Commissioners, chairs meetings of the Board of Commissioners and represents the Board of Commissioners in matters with parties outside the Board of Commissioners.	*Apply*	
1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former President Directors and members of the Board of Directors who are elected as members of the Board of Commissioners cannot be immediately appointed as President Commissioner. There needs to be a cooling off period of 2 (two) years before being reappointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that the former President Director/member of the Board of Directors needs to become President Commissioner, then the Board of Commissioners provides reasons and explanations in the Annual Report.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.4	Pembentukan Komite Committee Establishment		
Rekomendasi Recommendation			
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Monitoring Committee.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.4.1.1	Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, korporasi mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya. For Committees that are not required by law, if they do not have a Committee, the corporation discloses this fact and discloses the process used to ensure that the function of the Committee is carried out by the Board of Commissioners as it should.	*Apply*	
Rekomendasi xxx			
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independent. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that the majority of other committees formed by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.4.2.1	Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semua wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan. The Committee has a charter that clearly defines its role and provides it with all the authority necessary to carry out its role. This authority includes, among other things, the right to obtain information, meet with related parties in connection with the implementation of their duties (with or without the presence of management), and request advice from independent external consultants/experts if the committee deems it necessary.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is objective and independent, the President Commissioner may not be chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.	*Apply*	
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment – Board of Commissioners and its Members		
Rekomendasi Recommendation			
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees and each individual commissioner.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Panduan Guideline			
1.5.1.1	Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self -assessment) untuk menilai kinerja sebagai dewan secara keseluruhan. The Board of Commissioners can have a self-assessment policy to assess performance as a board as a whole.	*Apply*	
1.5.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris. The self-assessment policy or other assessment policies are based on benchmarks or assessment criteria that are specific, measurable, achievable and relevant and in accordance with those determined by the Board of Commissioners.	*Apply*	
1.5.1.3	Perpanjangan masa jabatan komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of the commissioner's term of office is based on satisfactory performance evaluation results regarding his contribution.	*Apply*	
1.5.1.4	Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur. The Board of Commissioners regularly engages independent external consultants at least once during their term of office, to facilitate objective and honest performance evaluations of the Board of Commissioners.	*Apply*	
1.6	Benturan Kepentingan Conflift of Interest		
Rekomendasi Recommendation			
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nominating function, before accepting a new appointment as director or commissioner of a publicly traded corporation, other directorship or other position with a significant time commitment.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.6.1.1	Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris di korporasi lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah korporasi yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur atau komisaris. The Board of Commissioners ensures clear policies and guidelines for members of the Board of Directors who serve or wish to serve as directors or commissioners in other corporations. The policy should specify the permitted appointments and the permitted number of corporations in which they are permitted to simultaneously serve as directors or commissioners.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and making decisions regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Panduan Guideline			
1.6.2.1	Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut. The Board of Commissioners has procedures to ensure that members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have a conflict of interest do not participate in decision making related to (abstain) the conflict of interest.	*Apply*	
1.6.2.2	Setiap anggota Dewan Komisaris menginformasikan segera kepada Direksi dan Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan pelanggan, pemasok, kreditur, atau partner bisnis lainnya. Each member of the Board of Commissioners immediately informs the Board of Directors and Board of Commissioners if there is a potential conflict of interest, including as a result of their position as a consultant or official in a customer company, supplier, creditor or other business partner.	*Apply*	
1.6.2.3	Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan. All members of the Board of Directors immediately disclose potential conflicts of interest to the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors and do not participate in decision making in cases where they have a conflict of interest.	*Apply*	
1.6.2.4	Dalam laporannya, Dewan Komisaris menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan. In its report, the Board of Commissioners informed the GMS of the existence of a material conflict of interest and its treatment. A material conflict of interest that is more than temporary in nature may result in termination of office as a member of the board.	*Apply*	
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Competency Improvement of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners		
Rekomendasi Recommendation			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards as well as other applicable obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.	*Apply*	
Panduan Guideline			
1.7.1.1	Direksi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka. The Board of Directors ensures that newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners receive a formal and adequate induction program as well as all information relevant to their roles and responsibilities.	*Apply*	
1.7.1.2	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive relevant, adequate and sustainable training and knowledge development programs.	*Apply*	
1.7.1.3	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive accurate, timely and clear information regarding the latest developments in relevant laws and regulations and standards, other applicable obligations, risk factors and the corporate business environment.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors		
Rekomendasi Recommendation			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine candidates who meet the requirements.	*Apply*	
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and skills required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	*Apply*	
Panduan Guideline			
2.1.2.1	Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: • identitas calon dan alasan pengangkatan; • kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; • jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; • faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; • lama masa jabatan; • kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan • setiap kepemilikan saham dalam korporasi Information about prospective Directors must be disclosed in the election/re-election process and must be available from the date the GMS summons is issued until the GMS is held and can be downloaded via the Public Company website and/or e-GMS, including: • identity of the candidate and reasons for appointment; • core competencies, qualifications, and professional background; • current positions at other corporations, as well as key roles at non-profit/ charitable organizations; • factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; • length of term of office; • attendance at Board of Directors meetings (except for new Directors); And • any share ownership in the corporation	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Corporate policies regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report.	*Apply*	
Panduan Guideline			
2.1.3.1	Korporasi melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi dan dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. The corporation reports in the Annual Report the current diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners, measurable composition targets and the progress achieved in achieving these targets. Information should include references to how diversity is achieved through appropriate succession planning in the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Rekomendasi Recommendation			
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	*Apply*	
Panduan Guideline			
2.1.4.1	Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/ pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: • identitas calon dan alasan pengangkatan; • kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; • jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/ amal; • faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; • lama masa jabatan; • kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk komisaris baru); dan • setiap kepemilikan saham dalam korporasi Information about Commissioner candidates must be disclosed in the election/ re-election process and must be available from the date of the summons to the GMS until the GMS is held and can be downloaded via the Public Company website and/or e-GMS, including: • identity of the candidate and reasons for appointment; • core competencies, qualifications, and professional background; • current positions at other corporations, as well as key roles at non-profit/ charitable organizations; • factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; • length of term of office; • attendance at Board of Commissioners and committee meetings (except for new commissioners); And • any share ownership in the corporation	*Apply*	
2.1.4.2	Jika Dewan Komisaris menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan. If the Board of Commissioners uses an independent external consultant in the nomination process, then relevant information regarding the independent external consultant is disclosed in the annual report, including information regarding independence and conflicts of interest.	*Explain*	
Rekomendasi Recommendation			
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee which carries out the nomination function determines nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skills matrix which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.	*Apply*	
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota -anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Panduan Guideline			
2.1.6.1	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi. At least one Commissioner has previous experience in the main sector in which the corporation operates.	*Apply*	
2.1.6.2	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. Determining the number of members of the Board of Commissioners takes into account the condition of the corporation.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence. from a corporate perspective.	*Apply*	
Panduan Guideline			
2.1.7.1	Mantan direktur utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former president directors/members of the Board of Directors can join the Board of Commissioners as Independent Commissioners only in extraordinary circumstances and there must be a gap period between these positions of at least 2 (two) years.	*Apply*	
2.1.7.2	Mantan komisaris independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former independent commissioners can be reappointed as Independent Commissioners only in extraordinary circumstances and there must be a gap period between these positions of at least 2 (two) years.	*Apply*	
2.1.7.3	Masa jabatan komisaris independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (Sembilan) tahun. Bagi korporasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/sepuluh tahun, seorang komisaris independen dapat terus menjabat hanya sebagai komisaris. The term of office of an independent commissioner may not exceed the time limit of 9 (nine) years. For corporations with a term of office of 5 (five) years, the term of office may not exceed 10 (ten) years. After nine/ten years, an independent commissioner can continue to serve only as a commissioner.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
	Panduan Guideline		
2.1.8.1	Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada: 1. menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya: a. Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada dewan komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada dewan komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya. b. Dalam penunjukan anggota komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota komisaris dan anggota komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada dewan komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan dewan komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut. 2. secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi direksi dan dewan komisaris. 3. menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite. 4. mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi. The responsibilities and roles of the Nomination and Remuneration Committee include but are not limited to: 1. develop guidelines to ensure that all commissioners allocate sufficient time to the corporation to carry out their responsibilities effectively. These guidelines include: a. In appointing the main commissioner, the Nomination and Remuneration Committee prepares a description of the job specifications, including time commitment requirements which also takes into account the need for time commitment in times of crisis. Any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the board of commissioners prior to appointment and disclosed in the annual report. Changes in commitments must be immediately reported to the board of commissioners and their impacts explained in the next annual report. b. In appointing commissioners, the Nomination and Remuneration Committee determines the terms and conditions for appointing commissioners. These terms and conditions are available for inspection. The expected time commitment is stated in the letter of appointment of commissioner members and commissioner members must have sufficient time to fulfill the expected time commitment. Any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the board of commissioners prior to appointment, along with an indication of the time commitment required and the board of commissioners must be notified of any changes to these commitments. 2. proactively lead and be responsible for the development, implementation and ongoing review of succession planning for directors and board of commissioners. 3. uphold the principle of independence in handling conflicts of interest (and potential conflicts of interest) between committee members in carrying out the Committee's duties. 4. consider and be responsible for appointing nominated independent consultants, including the selection and requirements for their assignment, as well as disclosing the identity and costs of consulting services.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
Rekomendasi Recommendation			
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	*Apply*	
Panduan Guideline			
2.2.1.1	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. Remuneration policies are reasonable and fair, both in structure and amount, and are determined in the context of corporate values, internal reward structures, and encourage competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and community norms.	*Apply*	
2.2.1.2	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (*clawback*). The corporation has a remuneration policy for members of the Board of Directors that is performance-based and in line with the achievement of the corporation's long-term interests, such as the following performance measures: share ownership options, deferred bonuses, provisions for the return of part or all of the bonuses/ incentives that have been paid (clawback).	*Apply*	
2.2.1.3	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. The Board of Directors does not receive other facilities apart from the facilities already provided at the corporation's General Meeting of Shareholders.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. Apart from that, consideration must also be given to his position as President Commissioner and chairman as well as his membership in committees.	*Apply*	
Panduan Guideline			
2.2.2.1	Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi. The remuneration of the Board of Commissioners must be a fixed remuneration. If members of the Board of Commissioners are given remuneration related to performance, the basis for the award must be related to the long-term development of the corporation and is different from members of the Board of Directors.	*Apply*	
2.2.2.2	Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus. Independent Commissioners may not receive stock options, shares linked to performance, or bonuses.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
	Rekomendasi Recommendation		
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications and competencies of directors and commissioners by taking into account corporate operational performance, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	
	Panduan Guideline		
2.2.3.1	Dalam menjalankan perannya Komite Nominasi dan Remunerasi: 1. menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan, 2. mempertimbangkan apakah direktur dan komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang. 3. secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak direktur/komisaris jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik, 4. mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi direktur dan komisaris bagi korporasi, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk direktur dan komisaris yang hampir pensiun. 5. menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite. 6. mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi. In carrying out its role the Nomination and Remuneration Committee: 1. Determine the appropriate and balanced proportion between fixed and performance-related remuneration components, remuneration components that are paid directly or that are deferred. Performance indicators, including non-financial indicators, are ensured to be relevant and designed to support the achievement of long-term corporate performance. Remuneration incentives are ensured in accordance with corporate risk policies. Apart from that, there is a determination of an upper limit on remuneration and this upper limit is disclosed in the annual report, 2. Consider whether directors and commissioners qualify for annual bonuses and/or allowances under long-term incentive schemes. 3. Carefully consider the compensation obligations (including pension contributions and all other components) that the director/commissioner is entitled to if dismissed early. The aim is to avoid giving rewards for poor performance, 4. Consider the consequences of pension obligations and other long-term benefits for directors and commissioners for the corporation, including the impact of increases in employee benefits and other changes, especially for directors and commissioners who are nearing retirement. 5. Uphold the principle of independence in handling conflicts of interest (and potential conflicts of interest) between committee members in carrying out the Committee's duties. 6. Consider and be responsible for appointing an independent consultant for remuneration, including the selection and requirements for assignment, as well as disclosing the identity and costs of consulting services.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
3	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris** Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners		
3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of Relationship		
Rekomendasi Recommendation			
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leaks of confidential information.	*Apply*	
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	*Apply*	
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	*Apply*	
Panduan Guideline			
3.1.3.1	Peran dan tanggung jawab Sekretaris Korporasi mencakup, namun tidak terbatas pada: 1. memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitenya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi 2. memantau perkembangan governansi korporat, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi korporat untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan, 3. Mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dicatat secara akurat dalam risalah 4. Mengatur dan memfasilitasi orientasi direktur/komisaris/anggota komite baru dan pengembangan profesional direktur/komisaris/anggota komite 5. Mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara korporasi dengan pemegang saham/investor, baik lokal maupun asing. The roles and responsibilities of the Corporate Secretary include, but are not limited to: 1. Ensure a good flow of information between the Board of Commissioners and its committees and between the Board of Commissioners and the Board of Directors 2. Monitoring the development of corporate governance, including ensuring that the charter of the Board of Commissioners, Directors and committees is fully implemented, assisting and providing advice to the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance practices to meet stakeholder expectations, 3. Manage all meeting requirements of the Board of Commissioners, Board of Directors, Directors and Board of Commissioners, committees formed by the Board of Commissioners, attend and record minutes of all meetings and facilitate communication between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including ensuring that discussions and decisions at meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are recorded accurately in treatise 4. Organize and facilitate the orientation of new directors/commissioners/ committee members and professional development of directors/ commissioners/committee members 5. Manage investor relations activities to maintain and improve communication between corporations and shareholders/investors, both local and foreign.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
3.1.3.2	Setiap direktur dan komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan sekretaris korporat dan sebaliknya. Each director and commissioner can communicate directly with the corporate secretary and vice versa.	*Apply*	
3.1.3.3	Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Korporasi. The Board of Commissioners provides consideration to the Board of Directors in the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.	*Apply*	
3.2	Akses informasi Dewan Komisaris Access to Information for the Board of Commissioners		
Rekomendasi Recommendation			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time ask the Board of Directors to provide additional information.	*Apply*	
Panduan Guideline			
3.2.1.1	Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait. The Board of Commissioners has a process that allows members of the Board of Commissioners, including Independent Commissioners, to have access to the Board of Directors and related senior management.	*Apply*	
3.2.1.2	Direktur Utama atau Sekretaris Korporat segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan korporasi. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris diadakan untuk membahas peristiwa tersebut. The President Director or Corporate Secretary immediately informs the Board of Commissioners about major material and important events regarding the condition, performance and management of the corporation. If necessary, a Board of Commissioners meeting is held to discuss the incident.	*Apply*	
3.2.1.3	Di antara rapat Dewan, Dewan Komisaris berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan korporasi yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Between Board meetings, the Board of Commissioners communicates regularly with the Board of Directors to keep them informed of corporate developments that need the attention of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can carry out their duties more effectively.	*Apply*	
3.3	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners on Impacts of the Structure		
Rekomendasi Recommendation			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on corporations. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and relationships between corporate shareholders that may have an impact on the management and operations of the corporation.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Panduan Guideline			
3.3.1.1	Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis dimana korporasi merupakan bagiannya. The Board of Directors and Board of Commissioners understand the shareholder ownership structure and relationships between corporate shareholders, and consider the impact on control over the corporation, including written and unwritten family agreements as controlling shareholders, agreements between shareholders, or policies of the business group of which the corporation is a part of it	*Apply*	
3.3.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik korporasi. The Board of Directors and Board of Commissioners ensure that the shareholder ownership structure and relationships between corporate shareholders do not affect the implementation of the roles and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, (including in relation to the Directors' succession plan) in the best interests of the corporation.	*Apply*	
3.3.1.3	Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi. The Board of Commissioners monitors and the Board of Directors ensures that information is disclosed correctly when conditions exist that impact control over the corporation.	*Apply*	
4	**Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab** Ethical and Responsible Conduct		
4.1	Pedoman Etika dan Perilaku Code of Conduct		
Rekomendasi Recommendation			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pekerja akan: 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; 3. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; 5. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; 6. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; 7. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. 8. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. 9. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. 10. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pekerja. 11. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
	This statement is outlined in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly express the corporation's expectations that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees will: 1. Acting in the best interests of the corporation; 2. Act honestly and with high standards of integrity; 3. Be independent and act on complete information, in good faith, with due diligence and care. 4. Comply with the laws and regulations that apply to the corporation and its operations; 5. Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethical guidelines; 6. Not be involved or participate in any activities that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will have a negative impact on the corporation's reputation; 7. Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes losses to the corporation and its customers. 8. Not taking advantage of his position or the opportunities generated by his position for personal gain. 9. Avoid acts of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for oneself or for other people which creates a conflict of interest/providing benefits to third parties in violation of statutory regulations. 10. Respect differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees. 11. Ensure complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.		
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors determines policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, involvement in politics by referring to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.	*Apply*	
Panduan Guideline			
4.1.2.1	Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis. The Board of Directors develops and establishes a system that can be used as an effort to prevent money laundering and terrorist financing, anti-corruption, offering or accepting bribes as well as payments or other inducements to commit acts that violate laws and regulations or are unethical.	*Apply*	
4.1.2.2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan antikorupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap dan antikorupsi kepada pemangku kepentingan. The Board of Directors communicates anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption policies by providing training to staff and making efforts to expand anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption efforts to stakeholders.	*Apply*	
4.1.2.3	Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi harus diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris. Any material violation of anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption policies must be informed to the Board of Directors and Board of Commissioners or the Board of Commissioners Committee.	*Apply*	
4.1.2.4	Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris. The Board of Directors establishes and regularly reviews a transparent policy on political engagement, which includes lobbying and donations to political causes or candidates where permitted by law, and ensures that the benefits and risks of the approach taken are understood, monitored and regularly reviewed by Board of Commissioners.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
4.2	Nilai – nilai dan Budaya Organisasi Corporate Values and Culture		
Rekomendasi Recommendation			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilainilai korporasi Corporations articulate, cultivate and express corporate culture and values	*Apply*	
Panduan Guideline			
4.2.1.1	Korporasi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh pekerjanya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku The corporation fosters a corporate culture that ensures that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees understand and are committed to carrying out their responsibilities to behave in accordance with ethical and behavioral guidelines.	*Apply*	
4.2.1.2	Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh pekerja korporasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etika korporasi. There is adequate training and outreach at the level of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all corporate employees mentioned above for all aspects related to corporate culture, values and ethics.	*Apply*	
4.2.1.3	Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh pekerja korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat. There is an assessment and monitoring program so that all Directors, Board of Commissioners and all corporate employees understand the relevant code of ethics and implement it effectively to avoid corporate involvement in inappropriate behavior.	*Apply*	
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Enforcement and Communication of the Code of Ethics, Values, and Culture		
Rekomendasi Recommendation			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh pekerja, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	*Apply*	
Panduan Guideline			
4.3.1.1	Korporasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik. Corporation has violation reporting guidelines that can be used to encourage reporting of behavior that violates laws and regulations or is unethical, which also includes a guideline on how the corporation protects whistleblowers who have good intentions.	*Apply*	
4.3.1.2	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku The Corporation ensures that the Board of Commissioners and committees are immediately notified if there is a material violation of ethical and behavioral guidelines	*Apply*	
4.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran. The Corporation ensures that the Board of Commissioners and Committees are immediately notified if any material incidents are reported based on the violation reporting policy.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
4.3.1.4	Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan Jika terdapat pelanggaran, Direksi wajib mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. The Board of Directors ensures that violations of the guidelines result in disciplinary action, including dismissal. If there is a violation, the Board of Directors is obliged to take preventive action so that the violation does not happen again.	*Apply*	
5	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Risk Management, Internal Contorl and Compliance		
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance		
Rekomendasi Recommendation			
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors carries out regular reviews of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.	*Apply*	
Panduan Guideline			
5.1.1.1	Reviu berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan: 1. Adanya perubahan sejak reviu berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan korporasi dalam merespons perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya; 2. Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asurans lainnya; 3. Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memampukan Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko; 4. Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direviu dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan korporasi; dan 5. Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Periodic reviews carried out by the Board of Directors specifically consider: 1. There have been changes since the last periodic review regarding the nature and scope of significant risks and the corporation's ability to respond to changes in its business and external environment; 2. bThe scope and quality of ongoing monitoring of risks and internal control systems, the role of the internal audit function and other assurance service providers; 3. The scope and frequency of communication of the above monitoring results to the Board of Commissioners (or to the Audit Committee) which enables the Board of Commissioners to comprehensively assess the condition of internal control and its effectiveness in risk management; 4. The occurrence of failures or deficiencies in internal control discovered in the period reviewed and the extent of contingent impacts that have, can, or may occur in the future, which have a material impact on the corporation's financial condition or performance; And 5. Effectiveness of internal controls relating to financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.	*Apply*	
5.1.1.2	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal korporasi. The Board of Directors ensures that the corporation has a function whose role is to always follow changes in various applicable laws and regulations related to its business and laws and regulations in general, as well as having a system to ensure corporate compliance with applicable laws and regulations. corporate internal.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
5.2	Manajemen Risiko Risk Maangement		
Rekomendasi Recommendation			
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as in discussions at meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	*Apply*	
Panduan Guideline			
5.2.1.1	Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi korporasi, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif. The Board of Directors leads the implementation of risk management to be utilized by all levels of management in creating and protecting value for the corporation, by setting an example and being a role model in terms of controlling and managing risks in business and operational activities in order to instill, strengthen and develop a risk-aware culture that is based on compliance. and effective internal control.	*Apply*	
5.2.1.2	Direksi mengungkapkan a) risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan b) apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut. The Board of Directors discloses a) the main risks faced by the corporation and their management; and b) whether there is material exposure to environmental or social risks and, if so, how to manage or intend to manage those risks.	*Apply*	
5.2.1.3	Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis korporasi sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi korporasi, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksanakan secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan." The Board of Directors ensures the suitability of the internal control system and risk management framework with the characteristics of the corporation's needs and business processes so that the internal control and risk management processes cover all types of risks faced by the corporation, including communication and reporting about risks, risk management, audits and their effectiveness, can be implemented effectively in line with stakeholder expectations.	*Apply*	
5.2.1.4	Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan cyber, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors ensures risk governance processes in Information Technology including disruption, cyber security, disaster recovery, to ensure that all major risks are identified, managed and reported to the Board of Commissioners.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for supervising corporate risk management.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Panduan Guideline			
5.2.2.1	Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk diantaranya: 1. memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; 2. memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (*fraud risk*); 3. mereviu setiap kejadian material yang melibatkan *fraud* atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang; 4. menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; 5. menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; 6. menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan 7. mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan. The role of the Risk Management Monitoring Committee includes: 1. monitor corporate performance against the risk management framework, including monitoring whether the corporation operates within the risk appetite approved by the Board of Commissioners; 2. monitor control of key risks, including major financial reporting risks and fraud risks; 3. reviewing every material incident involving fraud or significant weaknesses in corporate risk control, as well as lessons learned to prevent recurrence in the future; 4. receive reports from internal auditors regarding the results of reviews of the adequacy of corporate risk management processes; 5. receive reports from management regarding new and emerging sources of risk as well as risk control and mitigation steps that have been carried out by the Board of Directors to handle these risks; 6. prepare recommendations to the Board of Commissioners regarding changes that must be made to the entity's risk management framework or risk appetite as approved by the Board of Commissioners; And 7. oversee corporate insurance programs, taking into account corporate business and insurable risks.	*Apply*	
5.2.2.2	Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif. The number of members of the Risk Management Monitoring Committee is adequate and the majority are independent; among its members have the necessary technical knowledge and sufficient understanding of the industry in which the entity operates, to be able to carry out the committee's mandate effectively.	*Apply*	
5.3	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management, and Compliance		
Rekomendasi Recommendation			
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors has built an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.	*Apply*	
Panduan Guideline			
5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. The Board of Directors ensures coordination and increased capability between the main GRC systems which include governance systems, strategic management, performance management, risk management, compliance management and internal audit systems so that the corporation remains on the right track in achieving its goals.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Rekomendasi Recommendation			
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the department in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.	*Apply*	
5.4	Audit Internal Internal Audit		
Rekomendasi Recommendation			
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation to achieve its goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance.	*Apply*	
Panduan Guideline			
5.4.1.1	Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen korporasi dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggung jawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi. Internal audits are carried out objectively and independently from corporate management and from the function being audited. Thus, Internal Audit is functionally responsible and reports to the Board of Commissioners through the Audit Committee, has direct access to the Audit Committee and Board of Commissioners and can communicate and meet directly with the Audit Committee and Board of Commissioners with or without the presence of the Board of Directors.	*Apply*	
5.4.1.2	Dewan Komisaris melalui komite audit memastikan fungsi audit internal memiliki a. wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif. The Board of Commissioners, through the audit committee, ensures that the internal audit function has adequate authority, resources and access to information to carry out its role effectively.	*Apply*	
5.4.1.3	Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal. The Audit Committee recommends to the Board of Commissioners the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit, scope of work, and budget for the Internal Audit function.	*Apply*	
5.4.1.4	Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal. The Audit Committee reviews the effectiveness of internal audit implementation and evaluates Internal Audit performance every year and submits the results to the Board of Commissioners. Every three years, taking into account the recommendations of the Audit Committee, the Board of Commissioners appoints an independent external consultant to review the performance of the Internal Audit.	*Apply*	
5.4.1.5	Audit internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Internal audit creates an audit plan, involving the President Director, Board of Commissioners with consideration by the Audit Committee. The internal audit plan is submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners for approval.	*Apply*	
5.4.1.6	Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi. The Audit Committee ensures that the implementation of internal audits is carried out based on applicable internal audit professional standards and by upholding the professional code of ethics and the organization's code of ethics.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
6	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency		
6.2	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy		
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	*Apply*	
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain regularly and in a timely manner relevant material information about the corporation must be fulfilled.	*Apply*	
Panduan Guideline			
6.1.2.1	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku. The corporation has and discloses written policies in carrying out continuous disclosure obligations/information disclosure based on applicable regulations.	*Apply*	
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial Statements and Sustainability Report		
Rekomendasi Recommendation			
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	*Apply*	
Panduan Guideline			
6.2.1.1	Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup: 1. pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim, 2. peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim, 3. peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. Disclosure of systems and procedures includes at least: 1. internal control over financial reporting, including interim financial reports, 2. the role of the risk management/compliance/management oversight function and the internal audit function in ensuring the integrity of interim financial reports, 3. the role of the Audit Committee in reviewing interim financial reports to be published.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. These activities include recommending the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.	*Apply*	
Panduan Guideline			
6.2.2.1	Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya. The external auditor selection process through tender is carried out transparently so that shareholders can observe and monitor the process if they wish.	*Explain*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
6.2.2.2	Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. The Audit Committee ensures that in the contract with the auditor there are no clauses that could interfere with the auditor's independence or competence in carrying out the financial statement audit.	*Apply*	
6.2.2.3	Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu management letter yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen. The Audit Committee carries out adequate dialogue with the external auditor without the presence of management and monitors interactions between management and the external auditor, including reviewing the management letter provided by the external auditor and monitoring management's response.	*Apply*	
6.2.2.4	Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit. The Board of Commissioners, or Audit Committee, ensures that the external auditor immediately informs all significant findings and problems discovered by the external auditor during the audit.	*Apply*	
6.2.2.5	Komite Audit mereviu setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor. The Audit Committee reviews every non-audit service provided by the external auditor and its affiliates and related costs, to ensure that such services do not compromise the auditor's independence.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and prepared in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	*Apply*	
Panduan Guideline			
6.2.3.1	Laporan keberlanjutan diberikan asurans oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten. Sustainability reports are provided with assurance by independent and competent external parties.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Corporations publish integrated annual reports that put historical performance into context and describe the corporation's risks, opportunities and future prospects, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	*Apply*	
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination		
Rekomendasi Recommendation			
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.	*Apply*	
Panduan Guideline			
6.3.1.1	Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan Corporations regularly hold meetings with financial analysts	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
6.3.1.2	Korporasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi Corporations utilize information technology effectively and more widely apart from websites as a medium for information disclosure	*Apply*	
6.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya The corporation ensures that the security of the information it disseminates is maintained and protected	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement regarding the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.	*Apply*	
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk *listing* utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on the capital market in jurisdictions other than the home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross listing, cross listing criteria and procedures, criteria and procedures for recognizing listing requirements for the main listing must be transparent and documented.	*Apply*	
7	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham** Protection of the Rights of Shareholders		
7.1	Hak Pemegang Saham Rights o Shareholders		
Rekomendasi Recommendation			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor The corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation	*Apply*	
Panduan Guideline			
7.1.1.1	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan. Shareholders, including institutional shareholders, are permitted to consult with each other on issues regarding basic shareholder rights as stipulated in these Principles, but this must not be abused.	*Apply*	
7.1.1.2	Korporasi mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Korporasi menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai korporasi dalam jangka menengah hingga panjang. Corporations encourage constructive dialogue between shareholders (especially institutional investors) and management. The corporation responded to requests from shareholders to engage in dialogue to support sustainable growth and increase corporate value in the medium to long term.	*Apply*	
7.1.1.3	Korporasi menyediakan wadah atau *platform* dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen. Corporations provide a forum or platform for constructive dialogue between all shareholders and management.	*Apply*	
7.1.1.4	Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa. The Corporation promptly discloses to the public all material new facts that are available to financial analysts and other similar parties.	*Apply*	
7.1.1.5	Korporasi mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan. Corporations disclose corporate communication policies with shareholders or investors in websites and reports.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Rekomendasi Recommendation			
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation, which is the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation's investment is significant.	*Apply*	
Panduan Guideline			
7.1.2.1	Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai: 1. wewenang untuk menunjuk komisaris dan direktur. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukkan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; 2. efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya. 4. Jika korporasi memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain perseroan terbatas, korporasi memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya. Corporate governance framework and policies in subsidiaries include written policies regarding, among other things 1. authority to appoint commissioners and directors. Generally, for subsidiaries with relatively large sizes, the Board of Commissioners needs to be involved in appointing management in the subsidiary. For smaller subsidiaries, the Board of Directors has the authority to implement it; 2. effectiveness of the internal control system and compliance with applicable laws and regulations; And 3. timely and accurate disclosure of material information on subsidiaries, including financial information, transactions with related parties and other material information. 4. If a corporation owns/forms a legal entity other than a limited liability company, the corporation ensures that its corporate governance policies apply to that entity according to the context of the type of legal entity.	*Apply*	
7.1.2.2	Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa korporasi memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak. For investments in subsidiaries that are significant but below the majority (such as ownership between 20 percent and 50 percent of shares), the Board of Directors ensures that there is a shareholder agreement or other agreement that allows the corporation to monitor corporate performance and participate in management, including for approval of transactions and decisions which is significant. This is necessary, among other things, to ensure that the corporation has adequate, accurate and timely information on subsidiaries.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Corporations have rules and procedures governing acquisitions, takeovers and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Panduan Guideline			
7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. Corporations clearly disclose these rules and procedures so that investors understand their rights and the right to obtain compensation.	*Apply*	
7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambilalihan (*anti-take-over devices*) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. Tactics that prevent takeover (anti-take-over devices) must not be used to protect management and the Board of Commissioners from accountability.	*Apply*	
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment to all Shareholders		
Rekomendasi Recommendation			
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b).pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Corporations have rules and procedures that ensure all shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, b). disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of capital structures and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	*Apply*	
Panduan Guideline			
7.2.1.1	Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham. To ensure transparency of shareholders' rights to obtain a share of profits, corporations disclose measurable dividend policies, for example the target dividend payment ratio/dividends per share.	*Apply*	
7.2.1.2	Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. Investors obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they buy them. Any change in the economic value of shares or voting rights requires the approval of the class of shares negatively affected.	*Apply*	
7.2.1.3	Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (beneficial owner) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen). So that shareholders can know the ultimate beneficial owner (beneficial owner) of a corporation with significant ownership, the corporation discloses the ultimate beneficial owner in share ownership through the main and controlling shareholders and the ultimate beneficial owner in share ownership of at least 5% (five percent).	*Apply*	
7.2.1.4	Korporasi mengungkapkan: a). perjanjian antar pemegang saham, b). voting cap, c). multiple voting rights, d). perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. The corporation discloses: a). agreement between shareholders, b). voting cap, c). multiple voting rights, d). other agreements that allow certain shareholders to have voting rights over their ownership in the corporation.	*Apply*	
7.2.1.5	Korporasi menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. The Corporation provides mechanisms/procedures that enable shareholders to have the opportunity to obtain effective compensation for violations of their rights in accordance with applicable laws and regulations at a reasonable cost and without excessive delay.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Rekomendasi Recommendation			
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are managed appropriately, and protects the interests of the corporation and shareholders.	*Apply*	
Panduan Guideline			
7.2.2.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (*arm's length transaction*). Corporations have standard operational policies and procedures that ensure that transactions with related parties are carried out in such a way as to ensure that transactions are fair and reasonable (arm's length transactions).	*Apply*	
7.2.2.2	Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/komisaris dan afiliasinya dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan. Material related party transactions, including consulting service agreements and other services or work between directors/commissioners and their affiliates with the corporation must obtain approval in accordance with applicable laws and regulations. Apart from those that have been regulated for approval in statutory regulations, material related party transactions obtain approval from the Board of Commissioners. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in granting approval.	*Apply*	
7.2.2.3	Korporasi memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut: 1. Bantuan/subsidi keuangan kepada Direksi atau Komisaris pada tingkat bunga di bawah kewajaran; kalaupun ada pemberian pinjaman harus dilakukan pada tingkat bunga dan syarat wajar dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris 2. bantuan/subsidi keuangan kepada entitas selain entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi. The corporation has a policy that transactions that are certain to harm public/minority shareholders are prohibited. Examples of such transactions: 1. Financial assistance/subsidies to Directors or Commissioners at interest rates below reasonable; Even if there is a loan, it must be made at a reasonable interest rate and terms and obtain approval from the Board of Commissioners 2. Financial assistance/subsidies to entities other than entities wholly owned by the corporation.	*Apply/Explain*	
7.2.2.4	Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat. The Board of Commissioners discloses the process policy for approving, reviewing and monitoring related party transactions and any inherent conflicts of interest.	*Apply*	
7.2.2.5	Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan korporasi. The conclusions of the Audit Committee's review of related party transactions/significant conflicts of interest are disclosed in the corporation's Annual Report.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. Corporations have and disclose policies to prevent insider trading. Corporations have clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that anyone cannot profit directly or indirectly from information that is not/not yet available on the market.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		
Rekomendasi Recommendation			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The corporation calls for a GMS with the GMS agenda and materials as complete and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed via electronic means such as through the corporate website.	*Apply*	
Panduan Guideline			
7.3.1.1	Dalam materi atas agenda RUPS, korporasi menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi (*rationale*) atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS. In the material on the GMS agenda, the corporation submits relevant and complete information needed for decision making, including explanations and justifications (rationale) for the decisions proposed for approval at the GMS.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	*Apply*	
Panduan Guideline			
7.3.2.1	Korporasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS. The corporation provides infrastructure that allows the presence of all domestic and foreign shareholders, including institutional investors, at the GMS.	*Apply*	
7.3.2.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners were present at the Annual GMS	*Apply*	
7.3.2.3	Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS. Chairs of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee, and other committees are ready to provide meaningful responses to questions addressed to them at the GMS.	*Apply*	
7.3.2.4	Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk: 1. mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan, 2. memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS, dan 3. mengajukan usulan resolusi. Shareholders have the opportunity, within reasonable limits, to 1. ask questions at the GMS, including questions relating to the results of the annual external audit, 2. include an event on the GMS agenda, and 3. submit a proposed resolution.	*Apply*	
7.3.2.5	Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (*voting*) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu: 1. lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham 2. pemungutan secara tertutup (*poll-voting*) dan bukan dengan mengacungkan tangan (*show of hands*) 3. memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat pemegang saham untuk turut serta mengambil keputusan. Corporation has technical voting methods or procedures that prioritize independence and the interests of shareholders, namely: 1. GMS location that is easily accessible to most shareholders 2. closed voting (poll-voting) and not by show of hands (show of hands) 3. ensure that there are no GMS requirements and procedures that prevent shareholders from participating in making decisions.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
7.3.2.6	Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara. Corporation is working on electronic voting procedures and taking steps to build infrastructure that enables electronic voting or use existing infrastructure in the voting ecosystem.	*Apply*	
7.3.2.7	Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (*bundling*). Each vote at the GMS is only for one decision, there is no combining of several decisions into the same resolution (bundling).	*Apply*	
7.3.2.8	Korporasi menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS. The corporation appoints an independent party (supervisor/inspector) to count and/or ratify the votes at the GMS and disclose this in the minutes of the GMS.	*Apply*	
7.3.2.9	Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham nonpengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham nonpengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali. If the resolution approved by the controlling shareholder conflicts with the majority of non-controlling shareholders' votes, then post-GMS, the corporation discloses what actions it took to understand and respond to the non-controlling shareholder's concerns that caused it to vote differently from the controlling shareholder.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	*Apply*	
Panduan Guideline			
7.3.3.1	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, carries out in-depth examination of Director and Commissioner candidates and conveys all material relevant information regarding the candidates to shareholders in the process of selecting board members. The information disclosed includes information regarding Director or Commissioner positions in other corporations, and whether they are considered independent from the corporation's perspective.	*Apply*	
7.3.3.2	Direktur dan komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali. Directors and commissioners are nominated for election at least once every three years or five years for corporations whose regulations require five years. It would be better if nominations were carried out once a year.	*Apply*	
7.3.3.3	Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat direktur dan komisaris. Shareholders vote separately for each candidate for director and commissioner.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of external auditors at the GMS.	*Apply*	
Panduan Guideline			
7.3.4.1	Dalam panggilan RUPS, korporasi mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS. In the invitation to the GMS, the corporation identifies and informs prospective external auditors who will be appointed or re-appointed at the GMS.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
7.3.4.2	Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. The corporation ensures that external auditors attend the GMS and are obliged to answer questions from shareholders related to the audit of financial statements.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	*Apply*	
Panduan Guideline			
7.3.5.1	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS. The minutes of the GMS are communicated to shareholders no later than 30 working days after the GMS.	*Apply*	
7.3.5.2	Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. The minutes of the GMS contain questions asked by shareholders and answers given by the chairman of the meeting or the party who answered.	*Apply*	
7.3.5.3	Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. The holding of the GMS, along with all meeting materials, reports and related documents which include, among other things, the annual report and voting results, including the relevant meeting agenda are published on the company's official website or digital communication media and are available for at least 10 (ten) years.	*Apply*	
8	**Pemangku Kepentingan Lainnya** Other Stakeholders		
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*) Stakeholder Engagement		
Rekomendasi Recommendation			
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporation, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.	*Apply*	
Panduan Guideline			
8.1.1.1	Korporasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan. The corporation revealed the process for identifying and selecting key stakeholders to be involved.	*Apply*	
8.1.1.2	Korporasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci. The corporation discloses its approach and activities in handling key stakeholder engagement including its frequency based on type and key stakeholder group.	*Apply*	
8.1.1.3	Korporasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka. Corporation provides channels through which key stakeholders (e.g. customers, suppliers, the general public, etc.) can express their opinions and input, voice their complaints and/or complain about possible violations of their rights.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
8.1.1.4	Korporasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk: 1. respons korporasi, dan 2. kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan. The corporation expresses significant views, input and complaints submitted by key stakeholders obtained from key stakeholder engagement, including: 1. corporate response, and 2. key stakeholder groups who provide views and input.	*Apply*	
8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Sustainability Integration into Business Model		
Rekomendasi Recommendation			
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including determining corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners include sustainability considerations when carrying out their roles, including, among others, in the development and implementation of corporate strategy, business plans, main action plans and risk management.	*Apply*	
Panduan Guideline			
8.2.1.1	Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures that corporate sustainability strategies, priorities and targets as well as performance against these targets are communicated to stakeholders.	*Apply*	
8.2.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi dan bisnisnya. The Board of Directors and Board of Commissioners always follow and understand sustainability issues that are relevant to the corporation and its business.	*Apply*	
8.2.1.3	Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan korporasi. Evaluation of the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners includes their performance in monitoring and handling significant risks and opportunities regarding corporate sustainability.	*Apply*	
8.2.1.4	Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategik keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi. The Board of Directors appoints someone in management who has a special role in strategically managing sustainability, including integrating sustainability considerations into corporate activities.	*Apply*	
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection to Stakeholders		
Rekomendasi Recommendation			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the implementation of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensure that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
Panduan Guideline			
8.3.1.1	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh korporasi. The corporation implements and discloses policies regarding corporate responsibility to customers, including considering customer information security, sales ethics and behavior, after-sales service according to product age/service period, as well as following up on customer satisfaction levels to improve product and service quality. Advertising and public relations should promote responsible consumption and be conducted responsibly, including avoiding misleading customers, or causing misunderstandings about the products and services offered by the corporation.	*Apply*	
8.3.1.2	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Korporasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan pekerja, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan. The corporation implements and discloses policies that include criteria for selecting suppliers, transparent procurement mechanisms, efforts to increase supplier capabilities, and fulfillment of rights related to suppliers. The corporation also has policies that encourage and monitor suppliers to respect human rights, carry out social and environmental responsibilities, treat their employees, staff and workers fairly, and ensure that suppliers have implemented sustainable and value-based business policies and procedures.	*Apply*	
8.3.1.3	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara kongkrit memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat. Corporation carries out and express social responsibility by applying corporate business knowledge and experience to develop and produce socially responsible activities that concretely provide added value to society, including encouraging community independence.	*Apply*	
8.3.1.4	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi korporasi, termasuk dalam penggunaan: 1. bahan baku, 2. energi, 3. penggunaan air, 4. pemanfaatan sumber daya terbarukan 5. pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon. Corporation carries out and express environmental responsibility by preventing, reducing and managing negative impacts on the environment from all aspects of corporate operations, including the use of: 1. raw material, 2. energy, 3. water usage, 4. utilization of renewable resources 5. utilization and rehabilitation of biodiversity, waste management and reducing the impact of greenhouse gases and carbon emissions.	*Apply*	
8.3.1.5	Korporasi melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik antipersaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar. The corporation implements and discloses fair competition policies by prioritizing ethical business behavior and not engaging in anti-competitive practices to gain or protect market position.	*Apply*	

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation
8.3.1.6	Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditur. 1. Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi. 2. Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin. The Board of Directors has a policy to protect the rights of creditors. 1. The Board of Commissioners supervises and the Board of Directors monitors the corporation's financial liquidity and solvency. 2. The Board of Directors ensures that risks to the financial position or financial difficulties are immediately identified, managed, mitigated and reported. The Board of Commissioners monitors the Directors' handling of financial risks or difficulties and receives regular reports.	*Apply*	
Rekomendasi Recommendation			
8.3.2	Direksi mendorong pekerja bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability.	*Apply*	
Panduan Guideline			
8.3.2.1	Korporasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada pekerja, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. The corporation has a policy of providing long-term incentives to employees, which encourages sustainable value creation.	*Apply*	
8.3.2.2	Remunerasi berbasis kinerja untuk pekerja harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (risk-adjusted return), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan. Performance-based remuneration for employees must take into account the element of risk, including measuring risk-adjusted returns, to ensure that no incentives are provided for undesirable risk taking.	*Apply*	
8.3.2.3	Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara pekerja sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan korporasi sebagai pengelola dana pensiun. The Board of Directors properly manages conflicts of interest that may arise between employees as recipients of pension fund benefits and the corporation as pension fund manager.	*Apply*	
8.3.2.4	Direksi memastikan korporasi memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi memiliki pekerja dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman. The Board of Directors ensures that the corporation has an effective human resource development and management program to ensure that the corporation has an adequate number of employees who are knowledgeable, skilled and experienced.	*Apply*	
8.3.2.5	Pada saat mengisi posisi manajerial dalam korporasi, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan jender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur. When filling managerial positions in a corporation, the Board of Directors considers elements of diversity, non-discrimination and provides equal opportunities to all candidates without distinction of ethnicity, religion, race, class and gender. The diversity policy is accompanied by measurable goals.	*Apply*	

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibilities



Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, PT Jasa Armada Indonesia Tbk senantiasa melaksanakan program TJSL dengan memegang teguh tanggung jawab serta prinsip-prinsip keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

As a form of the Company's commitment in achieving the Sustainable Development Goals, PT Jasa Armada Indonesia Tbk always implements the CSR program by upholding the responsibility and principles of balancing economic, social and environmental aspects.


TJSL
PELINDO

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE



PT Jasa Armada Indonesia Tbk senantiasa berkomitmen memberikan kontribusi terhadap sosial dan lingkungan melalui pelaksanaan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program yang diselenggarakan oleh Perusahaan tidak pernah luput dari pertimbangan atas kebutuhan pemangku kepentingan dan kelestarian serta pelestarian alam. Penyelenggaraan program TJSL dilaksanakan Perusahaan guna memberikan manfaat baik, juga meningkatkan *corporate image* yang berdampak pada kesinambungan bisnis Perusahaan.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk is committed to contributing to social and environmental causes by implementing Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs. These programs are organized by the Company with careful consideration of the needs of stakeholders, sustainability, and nature conservation. The Company conducts the TJSL program to provide benefits and enhance its corporate image, which in turn impacts the continuity of its business.

Informasi mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di tahun 2023, secara komprehensif telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023 yang disajikan secara terpisah, namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini, sebagaimana arahan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021, yang mencakup poin-poin sebagai berikut:

- Penjelasan Strategi Keberlanjutan;
- Ikhtisar Aspek Kinerja Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup);
- Profil Singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
- Penjelasan Direksi;
- Tata Kelola Keberlanjutan;
- Kinerja Keberlanjutan;
- Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen;
- Lembar Umpan Balik (*feedback*) untuk Pembaca; dan
- Tanggapan Perusahaan terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya.

Information regarding the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) program in 2023 has been comprehensively disclosed in the Sustainability Report of the 2023 Financial Year. This report is presented separately but is an inseparable part of this Annual Report, as instructed by the Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021. The Sustainability Report includes the following points:

- Explanation of Sustainability Strategy;
- Overview of Sustainability Performance (Economic, Social, and Environmental);
- Brief Profile of the Issuer or Public Company;
- Directors' Explanation;
- Sustainability Governance;
- Sustainability Performance;
- Written Verification from an Independent Party;
- Feedback Form for Readers; and
- Company Response to Previous Year Report Feedback.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan berbagai program TJSL sebagai upaya menjalankan hubungan yang baik dan harmonis dengan pemangku kepentingan serta memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023 yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

Throughout 2023, the Company implemented various TJSL programs as an effort to maintain good and harmonious relationships with stakeholders and provide a positive impact on society and the environment, as disclosed in the 2023 Financial Year Sustainability Report, which is presented separately from this Annual Report.

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Laporan Keuangan

Financial Report





PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2023 and
for the year then ended with independent auditor's report

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	5	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	6-79	*Notes to the Financial Statements*

****

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
   Alamat kantor/Office address
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card
   Jabatan/Title

2. Nama/Name
   Alamat kantor/Office address
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card
   Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

We, the undersigned below:

1. Shanti Puruhita
   Gedung Pelindo Tower Lt. 8
   Jl. Yos Sudarso No.9, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230
   Taman Century 2, jalan Tanjung I blok C No. 17 RT/RW 001/023, Kel. Pekayon, Kec. Bekasi Selatan
   Direktur Utama/*President Director*
2. Reini Delfianti
   Gedung Pelindo Tower Lt. 8
   Jl. Yos Sudarso No.9, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230
   Jalan Bhakti VII/16 RT/RW 001/009 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat
   Direktur Keuangan & SDM/*Director of Finance & HR*

declare that:

1. *We responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Company as of December 31, 2023 and for the year then ended.*
2. *The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Company; and*
   b. *The financial statements of the Company do not contain materially misleading information or facts and do not conceal any information or facts.*
4. *We are responsible for the Company internal control system.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 21 Maret 2024 / *March 21, 2024*

METERAI TEMPEL

Shanti Puruhita
Direktur Utama/*President Director*

Reini Delfianti
Direktur Keuangan & SDM/*Finance & HR Director*

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2023, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit Utama (lanjutan)

Kecukupan Penyisihan Atas Kerugian Kredit Ekspektasi

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo piutang usaha setelah penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian ("KKE") adalah sebesar Rp42 miliar. Penilaian atas piutang usaha penting bagi audit kami karena jumlahnya material terhadap laporan keuangan dan pengukuran KKE melibatkan pelaksanaan pertimbangan manajemen yang signifikan, seperti segmentasi eksposur risiko kredit serta penentuan metode untuk memperkirakan KKE dan asumsi yang akan digunakan dalam model KKE (yaitu, exposure at default (EAD), probability of default (PD) dan loss given default (LGD)).

Pengungkapan terkait piutang usaha dan penyisihan atas KKE disajikan dalam Catatan 2f dan 5 atas laporan keuangan.

Respons audit:

Kami memeroleh pemahaman tentang metodologi yang diterapkan oleh Perusahaan dalam menentukan jumlah KKE dari penggunaan model KKE. Kami melibatkan spesialis internal kami dalam mengevaluasi metodologi dan asumsi utama yang digunakan dalam model.

Kami menguji asumsi utama dalam model KKE seperti PD, LGD, dan EAD dengan membandingkannya dengan informasi yang diperoleh dari sumber input, analisis koleksi historis, dan menganalisa umur piutang usaha. Kami membandingkan informasi ekonomi yang digunakan dalam skenario berwawasan ke depan dalam model KKE dengan data ekonomi makro, informasi yang tersedia untuk umum, dan pengetahuan industri. Kami menguji akurasi aritmetika dari penyisihan KKE. Kami juga menilai kecukupan pengungkapan mengenai piutang usaha dan KKE yang dibuat dalam laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

Adequacy of Allowance for Expected Credit Loss

Description of the key audit matter:

As of December 31, 2023, the balance of trade receivables after allowance for expected credit loss ("ECL") amounted to Rp42 billion. The valuation of trade receivables is significant to our audit as the amount is material to the financial statements and the measurement of ECL involves the exercise of significant management judgment, such as segmentation of credit risk exposure and determination of method to estimate ECL and assumptions to be used in the ECL model (i.e., the exposure at default (EAD), the probability of default (PD) and the loss given default (LGD)).

The disclosures of trade receivables and allowance for ECL are presented in Notes 2f and 5 to the financial statements.

Audit response:

We obtained an understanding of the methodology applied by the Company in determining the ECL amount through the use of an ECL model. We involved our internal specialist in evaluating the methodologies and key assumptions used in the model.

We tested key assumptions in the ECL model such as PD, LGD and EAD by comparing them with the information obtained from source inputs, historical collection analysis, and analyzing trade receivables aging. We compared the economic information used in the forward-looking scenarios in the ECL model against macro-economic data, publicly available information and industry knowledge. We tested the arithmetical accuracy of the allowance for ECL. We also assessed the adequacy of the disclosures regarding trade receivables and ECL made in the accompanying financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the The Annual Report other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance,but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Moch. Dadang Syachruna
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/*Public Accountant Registration No. AP.0697*

26 Maret 2024/*March 26,2024*

00332

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2022	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	409.000.607	4,26,27,28,29	571.726.884	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto		5,28,29		*Trade receivables - net*
Pihak ketiga	37.675.720		23.781.091	*Third parties*
Pihak berelasi	4.443.250	26	98.731.275	*Related parties*
Pendapatan masih akan diterima		6,28		*Accrued revenues*
Pihak ketiga	44.941.152		10.528.226	*Third parties*
Pihak berelasi	313.409.671	26	110.882.066	*Related parties*
Piutang lain - lain		7,28		*Other receivables*
Pihak ketiga	-		6.710	*Third parties*
Pihak berelasi	5.640.100	26	51.324.242	*Related parties*
Persediaan	25.072.666	8	24.066.113	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	48.572.645	16a	24.143.101	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	878.583	9	4.041.896	*Other current assets*
Total Aset Lancar	**889.634.394**		**919.231.604**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap - neto	581.005.721	10	538.124.122	*Fixed assets - net*
Aset hak-guna - neto	38.507.956	11	6.693.537	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	12.986.577	16e	12.663.725	*Deferred tax assets - net*
Taksiran tagihan restitusi pajak - neto	-	16f	11.495.078	*Estimated claims for tax refund - net*
Total Aset Tidak Lancar	**632.500.254**		**568.976.462**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET	**1.522.134.648**		**1.488.208.066**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha		12,28,29		*Trade payables*
Pihak ketiga	4.095.090		24.389.082	*Third parties*
Pihak berelasi	18.464.080	26	29.714.862	*Related parties*
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	13,28,29	69.574.568	*Other payables - third parties*
Uang titipan	15.424.418	14,28,29	9.613.338	*Deposits*
Beban akrual	174.839.605	15,28,29	142.190.584	*Accrued expenses*
Utang pajak	9.224.532	16b	9.177.645	*Taxes payable*
Utang dividen		19,28,29		*Dividend payable*
Pihak ketiga	2.450.322		-	*Third parties*
Pihak berelasi	17.601.409		-	*Related parties*
Liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	32.485.372	11,28,29	6.730.639	*Current maturities of long-term lease liabilities*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**274.584.828**		**291.390.718**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	7.030.080	11,28,29	297.942	*Long-term lease liabilities - net of current maturities*
TOTAL LIABILITAS	**281.614.908**		**291.688.660**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar - 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh)				*Authorized capital - 15,000,000,000 shares at Rp100 (full amount) par value*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.284.811.100 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh)	528.481.110	17	528.481.110	*Issued and fully paid capital - 5,284,811,100 shares at Rp100 (full amount) par value*
Saham tresuri	(1.617.838)	17	(1.617.838)	*Treasury stocks*
Tambahan modal disetor	317.981.175	18	317.981.175	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	96.758.091	19	96.758.091	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	298.917.202		254.916.868	*Unappropriated*
EKUITAS NETO	**1.240.519.740**		**1.196.519.406**	***NET EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.522.134.648**		**1.488.208.066**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
Pendapatan	1.138.537.475	20,26,31	980.168.475	*Revenues*
Beban pokok pendapatan	(798.761.967)	21,31	(677.621.689)	*Cost of revenues*
LABA BRUTO	**339.775.508**		**302.546.786**	***GROSS INCOME***
Beban umum dan administrasi	(165.468.611)	22,31	(117.607.997)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya	10.181.184	23,31	749.076	*Other operating income*
Beban operasi lainnya	(729.210)	24,31	(11.673.442)	*Other operating expenses*
LABA USAHA	**183.758.871**		**174.014.423**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	14.958.550	25a,31	14.141.732	*Finance income*
Beban keuangan	(2.773.465)	25b,31	(2.117.196)	*Finance expenses*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**195.943.956**		**186.038.959**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan badan	(38.281.968)	16c,16d	(35.384.110)	*Corporate income tax expenses*
LABA TAHUN BERJALAN	**157.661.988**		**150.654.849**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	**-**		**-**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**157.661.988**		**150.654.849**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**29,88**		**28,55**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Share capital - issued and fully paid*	Saham tresuri/ *Treasury stocks*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/*Retained earnings*		Ekuitas neto/ *Net equity*	
					Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2021		**528.481.110**	**(1.617.838)**	**317.981.175**	**69.457.305**	**242.111.165**	**1.156.412.917**	***Balance as of December 31, 2021***
Pembagian dividen kas	19	-	-	-	-	(110.548.360)	(110.548.360)	*Distribution of cash dividend*
Pembentukan cadangan umum	19	-	-	-	27.300.786	(27.300.786)	-	*General reserve appropriation*
Total laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	150.654.849	150.654.849	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2022		**528.481.110**	**(1.617.838)**	**317.981.175**	**96.758.091**	**254.916.868**	**1.196.519.406**	***Balance as of December 31, 2022***
Pembagian dividen kas	19	-	-	-	-	(113.661.654)	(113.661.654)	*Distribution of cash dividend*
Total laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	157.661.988	157.661.988	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2023		**528.481.110**	**(1.617.838)**	**317.981.175**	**96.758.091**	**298.917.202**	**1.240.519.740**	***Balance as of December 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ Notes**	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	987.801.421		876.576.702	*Receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(940.642.427)		(660.999.577)	*Payment to suppliers*
Pembayaran kepada karyawan	(151.985.596)		(142.831.026)	*Payment to employees*
Penerimaan pajak	17.994.078		17.208.810	*Cash receipt of taxes*
Penerimaan dari pendapatan keuangan	14.958.550	25a	14.141.732	*Cash receipts of finance income*
Pembayaran beban keuangan	(56.440)		(522.615)	*Payments for financial expenses*
Penerimaan dari kegiatan operasional lain	55.872.035		22.908.605	*Receipt from other operational activities*
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**(16.058.379)**		**126.482.631**	***Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities***
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(14.522.186)		(3.425.613)	*Acquisitions of fixed assets*
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FOR FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen	(93.609.923)	19	(110.548.360)	*Dividend payment*
Pembayaran kepada pihak berelasi	-		(44.380.234)	*Payment due to related parties*
Pembayaran liabilitas sewa	(38.535.789)	11	(52.038.573)	*Payments of lease liabilities*
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(132.145.712)**		**(206.967.167)**	***Net Cash Flows Used in Financing Activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(162.726.277)**		**(83.910.149)**	***NET DECREASE IN CASH AND AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**571.726.884**	4	**655.637.033**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**409.000.607**	4	**571.726.884**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-47228.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 9 September 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris No. 44 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, tanggal 23 Juni 2022 mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan operasional di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan kapal, penumpang, barang dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan:

a. Kegiatan usaha utama Perusahaan untuk menyediakan:
   - Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
   - Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum;
   - Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan;
   - Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang;
   - Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
   - Angkutan laut luar negeri untuk barang umum;
   - Pergudangan dan penyimpanan;
   - Reparasi mesin untuk keperluan umum;
   - Penanganan kargo (bongkar muat barang).

1. GENERAL

a. Establishment of the Company and General Information

PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("the Company") was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-47228.AH.01.01.TAHUN 2013 dated September 9, 2013, and has been published in the State Gazette No. 78 dated September 27, 2013. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently through Notary Deed No. 44 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, dated June 23, 2022 regarding changes of the Company's Articles of Association and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 dated July 8, 2022.

Based on the Article 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to carry out operational activities in the scope of organizing and operating ship services, passengers, goods and activities related to ports as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality and highly competitive services. to obtain or pursue profits in order to increase the value of the Company. To carry out these aims and objectives, the Company may carry out activities:

a. The Company's main business activities are to provide:
   - *Sea port service activities;*
   - *Domestic sea transportation for public goods;*
   - *River and lake transportation for public goods and/or animals;*
   - *Domestic sea freight port for goods;*
   - *Domestic sea transportation for special goods;*
   - *Overseas liner sea freight for public goods;*
   - *Warehousing and storage;*
   - *General machine repair for public needs;*
   - *Cargo handling (loading and unloading goods).*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum (lanjutan)

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagai berikut:
- Industri kapal dan perahu;
- Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung.

Saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan, penundaan, pengepilan, pengangkutan laut, penyewaan kapal, dan pengoperasian kapal.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 September 2014.

Mulai tanggal 1 Januari 2017, pelayanan jasa pemanduan untuk pelabuhan cabang Tanjung Priok dan cabang-cabang pelabuhan lainnya pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia ("Pelindo") telah dilaksanakan oleh masing-masing cabang tersebut (Catatan 26a).

Perusahaan berlokasi di Gedung Rukindo Lantai 1, Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430 dan Pelindo Tower Lantai 8 & 9, Jl Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM") dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 22 Desember 2017, Perusahaan telah menawarkan 1.215.506.500 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan harga penawaran perdana sebesar Rp380 (nilai penuh) per saham.

Seluruh Saham Perusahaan yang ditempatkan dan disetorkan penuh telah dicatatkan di BEI.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company and General Information (continued)

b. Supporting business activities that support the main business activities are as follows:

- *Ship and boat industry;*
- *Repair of ships, boats and floating buildings.*

Currently, the Company engages in pilotage, towage, mooring, sea transportation and ship operation.

The Company started its commercial operations on September 1, 2014.

Starting January 1, 2017, pilotage services for port Tanjung Priok branch and other port branches in Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia ("Pelindo") have been conducted by each of those branches (Note 26a).

The company is situated at Rukindo Building, 1st Floor, Jl. Raya Ancol Baru, East Ancol, North Jakarta 14430 and at Pelindo Tower, 8th & 9th Floor, Jl Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, North Jakarta 14230.

The Company's parent is PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM") and the Company's ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

b. Public Offering of the Company's Shares of Stock

As of December 22, 2017, the Company offered 1,215,506,500 shares with par value of Rp100 (full amount) per share to the public and subsequently registered in Indonesian Stock Exchange ("IDX") at a subscription price of Rp380 (full amount) per share.

All of the Company's issued and fully paid shares were listed in IDX.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2023, susunan manajemen kunci Perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris	Zuhri Iryansyah	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Bay Mokhamad Hasani	*Independent Commissioner*
Komisaris	R. R. Dewi Ariyani	*Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Shanti Puruhita	*President Director*
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	Shanti Puruhita	*Acting Director of Commercial and Business Development*
Direktur Armada dan Operasi	Muhammad Iqbal	*Director of Fleet and Operations*
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Reini Delfianti	*Director of Finance and Human Resource*

Pemberhentian Hary Kriswanto sebagai Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Laporan Informasi atau Fakta Material Komisaris Independen Perseroan yang telah meninggal dunia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KP.20.04/26/6/1/KGC/SPR/JAI-23 tanggal 26 Juni 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022, susunan manajemen kunci Perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris	Zuhri Iryansyah	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Bay Mokhamad Hasani	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Hary Kriswanto	*Independent Commissioner*
Komisaris	R. R. Dewi Ariyani	*Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Shanti Puruhita	*President Director*
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	Shanti Puruhita	*Acting Director of Commercial and Business Development*
Direktur Armada dan Operasi	Muhammad Iqbal	*Director of Fleet and Operations*
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Reini Delfianti	*Director of Finance and Human Resource*

1. GENERAL (continued)

c. Key Management and Other Informations

As of December 31, 2023, the composition of the Company's key management, which consists of Board of Commissioners and Directors are as follow:

The termination of Hary Kriswanto as an Independent Commissioner of the Company was based on the Report of Information or Material Fact of the Independent Commissioner of the Company who has passed away to the Financial Services Authority (OJK) No. KP.20.04/26/6/1/KGC/SPR/JAI-23 dated June 26, 2023.

As of December 31, 2022, the composition of the Company's key management, which consists of Board of Commissioners and Directors are as follow:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya (lanjutan)

Susunan Komite Audit dan sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Bay Mokhamad Hasani	*Head*
Anggota	Dadang Budiawan	*Member*
Anggota	Yoshua P.S.I Anthonie	*Member*
Sekretaris Perusahaan	Eddy Haristiani	***Corporate Secretary***

Karyawan
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki karyawan masing-masing sejumlah 181 dan 184 karyawan (tidak diaudit).

d. Perizinan

1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 9120207592005 telah menerbitkan izin usaha sebagai Pelaku Usaha pada tanggal 20 Mei 2019 kepada Perusahaan sehingga Perusahaan dapat melakukan aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, meliputi:

- Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- Memelihara kelestarian lingkungan;
- Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional .

1. GENERAL (continued)

c. Key Management and Other Informations (continued)

The members of the Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Employees
As of December 31, 2023, and 2022, the Company has employees with total of 181 and 184 employees, respectively (unaudited).

d. Permits

1) Investment Coordinating Board Decree of Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Through the Risk-Based Business Licensing Standard Certificate No. 9120207592005 a business permit was issued on May 20, 2019, to the Company as a Business Operator. Consequently, the Company can carry out maritime port service activities, including:

- *Provide and maintain the feasibility of port facilities;*
- *Provide services to port service users in accordance with the service standards set by the government;*
- *Maintain security, safety, and order at the operated port facilities;*
- *Participate in maintaining safety, security, and order concerning transport in waters;*
- *Maintain environmental sustainability;*
- *Fulfill obligations in accordance with the concession in the agreement; and*
- *Comply with the provisions of laws and regulations, both nationally and internationally.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Perizinan (lanjutan)

2) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. BX-311/AL 001 tanggal 8 Agustus 2014 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. SIUPAL berlaku selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022. Kepemilikan SIUPAL/SIOPSUS Perusahaan telah beberapa kali dilakukan evaluasi dan verifikasi data administrasi dan teknis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang terbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS No. AL.010/696/DA-2022 tanggal 7 September 2022.

3) Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi juncto Permenhub Nomor 13 Tahun 2023. Pada 20 Mei 2019, Perusahaan telah melakukan Online Single Submission (OSS) dan telah menerima Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120207592005 dari Lembaga OSS (BKPM) dengan berbasis Risiko dan telah melakukan perubahan pertama pada tanggal 3 November 2023. Oleh karena itu, masa izin usaha Perusahaan berlaku “Selama Badan Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”.

e. Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 26 Maret 2024. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

1. GENERAL (continued)

d. Permits (continued)

2) Letter of Permit for Sea Transportation Company (SIUPAL) No. BX-311/AL 001 dated August 8, 2014 from the Minister of Transportation Directorate General of Sea Transportation. SIUPAL is valid as long as the Company is still conducting its operational activities and evaluated once every 2 (two) years by the Director General in accordance with Minister of Transportation Regulation Number PM 93 Year 2013 juncto Minister of Transportation Regulation Number PM 74 Year 2016 juncto Minister of Transportation Regulation Number PM 23 Year 2022. The ownership of SIUPAL by the Company has been evaluated and verified by the Minister of Transportation Directorate General of Sea Transportation based on Minute No. AL.010/696/DA-2022 dated September 7, 2022.

3) Regulation of the Minister of Transportation (Permenhub) No. 12 of 2021 concerning The Standard of Business Activity and Product on the Implementation of Risk Based Business License in Transportation Sector juncto Permenhub Number 13 Year 2023. On May 20, 2019, the company has made an Online Single Submission (OSS) and has received a Business Registration Number (NIB): 9120207592005 from the OSS Institution (BKPM) based on risk and has made the first changes on November 3, 2023. Therefore, the Company's business permit is applicable "as long as the business entity runs its business and/or activities".

e. Issuance of Financial Statements

The management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements, which were completed and authorized for issuance by the Company’s Directors on March 26, 2024. The Company’s Directors who signed the Directors’ statement are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

Perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the financial statements

*The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (*Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia *or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority ("*Otoritas Jasa Keuangan*" or "*OJK*").*

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the financial statements.

The statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Company are consistently applied for the years covered by the financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The Company has prepared the financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

All figures in the financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Changes in accounting principles

The Company made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the financial statements of the Company:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu Perusahaan menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Perusahaan, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian *item* apa pun dalam laporan keuangan Perusahaan.

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan *item* yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan *item-item* tersebut, dan biaya untuk memproduksi *item-item* tersebut, dalam laba rugi.

Perusahaan menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan Perusahaan karena tidak ada penjualan atas *item-item* yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provide guidance to help the Company apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments have had an impact on the Company's disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Company's financial statements.

Amendment of PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use

The amendments prohibit entities from deducting from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

The Company applies the amendments retrospectively only to items of fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

These amendments had no impact on the financial statements of the Company as there were no sales of such items produced by fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD),* dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the Company's financial statements.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the Company's financial statements.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and include:

- *An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and*
- *Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua (lanjutan)

Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, Perusahaan masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

Amandemen tersebut tidak berdampak pada laporan keuangan Perusahaan karena tidak termasuk dalam cakupan aturan model Pilar Dua karena pendapatannya kurang dari EUR 750 juta/tahun.

c. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:
- diekspektasikan akan direalisasi, dimaksudkan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:
- diekspektasikan akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules (continued)

The exception - the use of which is required to be disclosed - applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

As of December 31, 2023, the Pillar Two income taxes legislation has not yet been enacted or has not yet substantively enacted in Indonesia where the Company operates. Therefore, the Company is still in the process of assessing the potential exposure to Pillar Two income taxes. The potential exposure, if any, to Pillar Two income taxes is currently not known or reasonably estimable.

The amendments had no impact on the Company's financial statements as the Company is not in scope of the Pillar Two model rules as its revenue is less than EUR 750 million/year.

c. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:
- *expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- *held primarily for the purpose of trading,*
- *expected to be realized within 12 months after the reporting period, or*
- *cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:
- *expected to be settled in the normal operating cycle,*
- *held primarily for the purpose of trading,*
- *due to be settled within 12 months after the reporting period, or*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila: (lanjutan)
- tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

d. Pengukuran nilai wajar

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar.

Perusahaan juga mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:
i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Current and non-current classification (continued)

A liability is current when it is: (continued)

- *there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d. Fair value measurement

The Company initially measure financial instruments at fair value.

The Company also initially measures financial instruments. The Company also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:
i) In the principal market for the asset or liability, or
ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

The fair value of an asset or a liabilities are measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati *(observable)* baik secara langsung atau tidak langsung.
iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati *(unobservable)*.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Perusahaan bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Perusahaan dan penilai eksternal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Fair value measurement (continued)

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Company's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Company and external valuers.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan mementukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

f. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2k.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Fair value measurement (continued)

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 (three) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

f. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2k.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan masih akan diterima dan piutang lain-lain yang merupakan bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur melalui NWPKL dan NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL).*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, trade receivables, accrued revenues and other receivables under other non-current financial assets.

The Company has no financial assets measured in FVOCI and FVTPL.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir;
  Atau
- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
  Or
- *The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan.

KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Perusahaan menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Perusahaan menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment

The Company recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts.

ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVOCI, the Company applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company reassesses the internal credit rating of the debt instrument

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Selain itu, Perusahaan mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 365 hari dari tanggal jatuh tempo.

Perusahaan menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 365 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Perusahaan tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR dan utang.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang, seperti utang usaha, utang lain-lain - pihak ketiga, uang titipan, beban akrual, utang dividen, dan liabilitas sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

In addition, the Company considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 365 days past due.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 365 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL and payables.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company designates its financial liabilities as payables, such as trade payables, other payables - third parties, deposits, accrued expenses, dividend payable, and lease liabilities.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Perusahaan dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 71 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang)

i) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha, utang lain-lain - pihak ketiga, uang titipan, beban akrual, utang dividen, dan liabilitas sewa dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entere into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Company has not designated any financial liability as at FVTPL.

Financial liabilities at amortized cost (borrowings)

i) Payables and Accruals

Liabilities for trade payables, other payables - third parties, deposits, accrued expenses, dividend payable, and lease liabilities are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 26.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

g. Transactions with Related Parties

The Company have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 26.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the financial statements are unrelated parties.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Persediaan terdiri dari bahan bakar, suku cadang dan perlengkapan kapal, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

i. Aset Tetap

Aset tetap lainnya pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Perusahaan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Inventories

Inventory was recorded using the weighted average method. Inventories consists of fuel, vessels spare parts, vessel equipments, office supplies, medicines and medical supplies.

i. Fixed Assets

All other fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Subsequent to initial recognition, these assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Company and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follow:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	25	*Buildings*
Kapal	3-20	*Vessels*
Instalasi fasilitas pelabuhan	5	*Port facilities*

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of these assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

The residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Perusahaan mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Perusahaan atas aset individual yang dialokasikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Fixed Assets (continued)

Constructions in progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

j. Impairment of Non-financial Assets

The Company assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Companys of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Company bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas UPK terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Impairment of Non-financial Assets (continued)

These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each CGU's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

k. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Kontrak-kontrak dengan pelanggan-pelanggan tertentu dalam segmen bisnisnya mensyaratkan imbalan variabel.

Manajemen menetapkan metode estimasi untuk memastikan imbalan variabel yang kemungkinan terjadinya sangat tinggi sebagai salah satu faktor yang diperhitungkan dalam estimasi sehingga pembalikan signifikan atas jumlah pendapatan kumulatif yang telah diakui tidak akan terjadi pada saat ketidakpastian yang terkait dengan imbalan variabel tersebut terselesaikan dikemudian waktu. Sedangkan pengakuan dilakukan pada saat dokumen-dokumen pendukung telah diterima dari pelanggan-pelanggan atau pada saat besar kemungkinan bahwa penyesuaian harga akan diberikan.

Piutang usaha merupakan hak Perusahaan atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang perlu terjadi sebelum pembayaran imbalan tersebut jatuh tempo). Lihat kebijakan akuntansi aset keuangan di bagian Instrumen Keuangan mengenai pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Perusahaan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran imbalan jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Perusahaan telah memenuhi apa yang harus dilaksanakan sesuai kontrak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Impairment of Non-financial Assets (continued)

After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

k. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Company and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.

Certain contracts with customers within the respective business segments give rise to variable considerations.

The management established estimation method that ensure inclusion of these variable consideration only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved. Meanwhile, the recognition is made when supporting documents have been received from customers or when it is probable price adjustments will be given.

Trade receivables represent the Company's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Refer to accounting policies of financial assets in Financial instruments section regarding initial recognition and subsequent measurement.

If a customer pays consideration before the Company transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Company performs under the contract.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

l. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai tukar yang digunakan untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("US$") adalah sebesar Rp15.416 (2022: Rp 15.731).

m. Sewa

Perusahaan menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan sebagai Penyewa

Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

l. Foreign Currency Transactions and Balances

The reporting currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is also each entity's in the Company functional currency.
Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

At December 31, 2023, the rate of exchange used for United States Dollar ("US$") 1 was Rp15,416 (2022: Rp15,731).

m. Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company as Lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa

Aset hak-guna

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai (Note 2j).

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Leases (continued)

The Company as Lessee

Right-of-use assets

The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment (Note 2j).

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Perusahaan juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

n. Perpajakan

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Leases (continued)

Lease liabilities (continued)

In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Company also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company as Lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

n. Taxation

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Taxation (continued)

Current Tax (continued)

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense. Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;
ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

ii) in respect of deductible temporary differences, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

o. Laba per Saham

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Total rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu masing-masing sebesar 5.276.771.300 saham.

p. Saham Tresuri

Instrumen ekuitas sendiri yang diperoleh kembali (saham tresuri) diakui pada harga perolehan kembali dan dikurangi dari ekuitas. Tidak ada laba atau rugi yang diakui pada laba rugi atas perolehan, penjualan kembali, penerbitan atau pembatalan dari instrumen ekuitas Perusahaan. Selisih antara jumlah tercatat dan penerimaan, bila diterbitkan kembali, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor pada ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Taxation (continued)

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the statement of financial position.

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

o. Earnings per Share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

Total weighted average number of shares outstanding for the years ended December 31, 2023 and 2022 are 5,276,771,300 shares, respectively.

p. Treasury Shares

Own equity instruments that are reacquired (treasury shares) are recognized at reacquisition cost and deducted from equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments. Any difference between the carrying amount and the consideration, if reissued, is recognized as part of additional paid-in capital in the equity.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Informasi Segmen

Perusahaan secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 31, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

r. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi pada tanggal 26 Maret 2024:

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Segment Information

The management regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance.

Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 31, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

r. Accounting standards issued but not yet effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated as of March 26, 2024:

Effective beginning on or after January 1, 2024

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. *Pillar 1 International Financial Accounting Standards,*
2. *Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),*
3. *Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and*
4. *Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Amendment of PSAK 73: Lease liability in a Sale and Leaseback

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Earlier application is permitted. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.

Amendment of PSAK 2 and PSAK 60: Supplier Finance Arrangements

The amendments to PSAK 2 and PSAK 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan Pembiayaan Pemasok (lanjutan)

Amandemen ini akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan, namun perlu diungkapkan. Amandemen tersebut diperkirakan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (continued)

Amendment of PSAK 2 and PSAK 60: Supplier Finance Arrangements (continued)

The amendments will be effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Early adoption is permitted, but will need to be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Company's financial statements.

The Company is currently evaluating the impact of these accounting standards and has not yet determined the impact on the financial statements.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 16c.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 16f.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa.

Perusahaan mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Perusahaan menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 11.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Taxes (continued)

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details regarding taxation are disclosed in Note 16c.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. Further explanations regarding this account are provided in Note 16f.

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Company as lessee

The Company has several lease contracts that include extension and termination options. The Company applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not.

The Company considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Company reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 11.

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan Asumsi

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estmasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Penjelasan lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 5.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimates and Assumptions

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for Groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Company will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

Further details on trade receivables are disclosed in Note 5.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 25 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci atas aset tetap diungkapkan dalam Catatan 10.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 to 25 years, which are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details on fixed asset are disclosed in Note 10.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/*December 31,* 2023	2022	
Kas	**23**	**108.239**	***Cash on hand***
Kas di bank			***Cash in banks***
Rekening Rupiah			*Rupiah Accounts*
Pihak berelasi (Catatan 26)			*Related parties (Note 26)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	81.349.046	125.007.600	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.689.028	4.500.040	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.728.239	3.300.657	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.018.558	589.283	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Rekening Dolar AS			*US Dollar Accounts*
Pihak berelasi (Catatan 26)			*Related party (Note 26)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	215.713	221.065	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Sub-total kas di bank	**101.000.584**	**133.618.645**	***Sub-total cash in banks***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Deposito berjangka			***Time deposits***
Pihak berelasi (Catatan 26)			*Related parties (Note 26)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	39.000.000	89.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	76.000.000	76.000.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	78.000.000	78.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	115.000.000	195.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Sub-total deposito berjangka	**308.000.000**	**438.000.000**	***Sub-total time deposits***
Total kas dan setara kas	**409.000.607**	**571.726.884**	***Total cash and cash equivalents***

Suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Annual interest rates on the time deposits are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Rupiah	2,25% - 6,10%	2,5% - 6,00%	*Rupiah*

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

Accounts in bank have floating interest rate based on the offered rate from each bank.

Kas dan setara kas tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Cash and cash equivalents were not used as collateral at reporting date.

Saldo kas dan setara kas, pada tanggal pelaporan, tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents were not restricted to use at the reporting date.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables per customer are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bali Infra Gas	6.397.524	-	*PT Bali Infra Gas*
PT Admiral Lines	4.429.459	697.611	*PT Admiral Lines*
PT Lintas Samudera Sejahtera	3.236.899	1.301.170	*PT Lintas Samudera Sejahtera*
PT International Total Services and Logistics	2.798.999	593.371	*PT International Total Services and Logistics*
PT Penascop Maritim Indonesia	2.770.322	2.046.050	*PT Penascop Maritim Indonesia*
PT Karya Pacific Shipping	2.504.567	219.501	*PT Karya Pacific Shipping*
PT Bahari Eka Nusantara	1.710.134	987.162	*PT Bahari Eka Nusantara*
PT Muara Laju Lancar	1.537.350	-	*PT Muara Laju Lancar*
PT IDT Trans Agency	1.417.101	3.246.230	*PT IDT Trans Agency*
PT Metro Pearl Indonesia	1.233.590	-	*PT Metro Pearl Indonesia*
PT Trielang Indo Maritim	1.173.905	4.056.397	*PT Trielang Indo Maritim*
PT Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	947.076	554.726	*PT Pelayanan Nasional Bahtera Bestari Shipping*
PT Prima Lestari Segara Abadi	843.705	1.748.877	*PT Prima Lestari Segara Abadi*
PT Dwidaya Agensi Indonesia	832.424	444.182	*PT Dwidaya Agensi Indonesia*
PT Trans Energy Indonesia	770.440	62.146	*PT Trans Energy Indonesia*
PT Wallem Sentosa Shipping Indonesia	751.408	-	*PT Wallem Sentosa Shipping Indonesia*
PT Tama Samudera Lines	661.214	463.543	*PT Tama Samudera Lines*
PT Lintas Bahari Nusantara	649.119	-	*PT Lintas Bahari Nusantara*
PT Bilqis Mutiara Bahari	606.235	233.590	*PT Bilqis Mutiara Bahari*
PT Bahtera Mitra Sepupu	583.575	-	*PT Bahtera Mitra Sepupu*
PT Pelayaran Sinar Dafitha Utama	570.408	1.714.413	*PT Pelayaran Sinar Dafitha Utama*
PT Lautan Jaya Manggala	512.698	221.182	*PT Lautan Jaya Manggala*
PT Tirta Permai Bahari	468.763	3.744.300	*PT Tirta Permai Bahari*
PT Riandy Fiesta Samudera	-	3.267.374	*PT Riandy Fiesta Samudera*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp400.000)	3.910.464	1.258.746	*Others (below Rp400,000 each)*
Sub-total pihak ketiga	41.317.379	26.860.571	*Sub-total third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(3.641.659)	(3.079.480)	*Allowance for impairment*
Sub-total pihak ketiga - neto	37.675.720	23.781.091	*Sub-total third parties - net*
Pihak berelasi (Catatan 26)			*Related parties (Note 26)*
PT Pelabuhan Tanjung Priok	2.590.198	2.590.198	*PT Pelabuhan Tanjung Priok*
PT Pertamina Trans Kontinental	1.464.542	2.585.433	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Bukit Prima Bahari	396.453	1.544.864	*PT Bukit Prima Bahari*
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	48.055	24.384	*PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)*
Pelindo	-	83.659.494	*Pelindo*
PT Pelindo Energi Logistik	-	4.477.446	*PT Pelindo Energi Logistik*
SPJM	-	3.549.456	*SPJM*
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	-	300.000	*PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia*
Sub-total pihak berelasi	4.499.248	98.731.275	*Sub-total related parties*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan atas penurunan nilai	(55.998)	-	*Allowance for impairment*
Sub-total pihak berelasi - neto	4.443.250	98.731.275	*Sub-total related parties - net*
Neto	**42.118.970**	**122.512.366**	***Net***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *5. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Piutang usaha tidak dijaminkan dan tidak dikenakan bunga.

Trade receivables are unsecured and non-interest bearing.

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Lancar	20.165.451	-	*Current*
Telah jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 30 hari	4.588.404	54.849.125	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	2.409.303	17.042.081	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	3.062.486	10.676.283	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	15.590.983	43.024.357	*More than 90 days*
Total	45.816.627	125.591.846	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(3.697.657)	(3.079.480)	*Allowance for impairment*
Neto	**42.118.970**	**122.512.366**	***Net***

Mutasi saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

	2023	**2022**	
Saldo awal	3.079.480	2.911.648	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan	618.177	167.832	*Allowance for the year*
Saldo akhir	**3.697.657**	**3.079.480**	***Ending balance***

Piutang usaha tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Trade receivables were not used as collateral at reporting date.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

Lihat Catatan 29 mengenai risiko kredit piutang usaha untuk memahami bagaimana Perusahaan mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang usaha.

See Note 29 on credit risk of trade receivables to understand how the Company manages and measures credit quality of trade receivables.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA / *6. ACCRUED REVENUES*

Pendapatan masih akan diterima merupakan piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan). Rincian akun ini pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Accrued revenues represent receivables to customers for services which have been delivered by the Company, but not yet billed (unbilled receivables). Details of the account as of December 31, 2023 dan 2022 are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Langlang Laju Layang	42.621.881	732.279	*PT Langlang Laju Layang*
PT Bali Infra Gas	1.980.642	-	*PT Bali Infra Gas*
PT Energy Marine Indonesia	-	4.448.466	*PT Energy Marine Indonesia*
PT Lintas Samudera Sejahtera	-	848.943	*PT Lintas Samudera Sejahtera*
PT Samudera Shipping Agency	-	827.101	*PT Samudera Shipping Agency*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	338.629	3.671.437	*Others (below Rp500,000 each)*
Sub-total pihak ketiga	44.941.152	10.528.226	*Sub-total third parties*
Pihak berelasi (Catatan 26)			*Related parties (Note 26)*
SPJM	183.762.810	4.378.688	*SPJM*
Pelindo	92.399.601	87.358.124	*Pelindo*
PT Pengembang Listrik Nasional Gas & Geothermal	11.937.774	-	*PT Pengembang Listrik Nasional Gas & Geothermal*
PT Adhi Guna Putera	11.422.853	-	*PT Adhi Guna Putera*
PT Jawa Satu Power	9.882.774	11.412.147	*PT Jawa Satu Power*
PT Pertamina Trans Kontinental	4.003.859	4.369.055	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Pelindo Energi Logistik	-	3.364.052	*PT Pelindo Energi Logistik*
Sub-total pihak berelasi	313.409.671	110.882.066	*Sub-total related parties*
Total	**358.350.823**	**121.410.292**	***Total***

Pendapatan masih akan diterima tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Accrued revenue were not used as collateral at reporting date.

7. PIUTANG LAIN-LAIN / *7. OTHER RECEIVABLES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga	-	6.710	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 26)			*Related parties (Note 26)*
Pelindo	5.640.100	49.881.674	*Pelindo*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	-	1.442.568	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
Sub-total pihak berelasi	5.640.100	51.324.242	*Sub-total related parties*
Total	**5.640.100**	**51.330.952**	***Total***

Piutang lain-lain dari Pelindo merupakan piutang atas *reimbursement* pemeliharaan kapal Pelindo.

Other receivables from Pelindo mainly represent receivables of reimbursement for Pelindo's ship docking.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / *7. OTHER RECEIVABLES (continued)*

Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jaminan.

Other receivables are non-interest bearing and unsecured.

8. PERSEDIAAN / *8. INVENTORIES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Bahan bakar	23.502.239	22.301.389	*Fuel*
Suku cadang kapal	1.356.142	1.528.320	*Vessel Spare parts*
Perlengkapan kapal	98.548	107.563	*Vessel equipments*
Alat tulis kantor	17.276	59.698	*Office supplies*
Obat dan alat-alat medis	546	516	*Medicines and medical supplies*
Lain-lain	97.915	68.627	*Others*
Total	**25.072.666**	**24.066.113**	***Total***

9. ASET LANCAR LAINNYA / *9. OTHER CURRENT ASSETS*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset lancar lainnya terutama terdiri dari beban dibayar di muka atas sewa, asuransi, gaji karyawan, dan uang jaminan.

As of December 31, 2023 and 2022, other current assets are mainly consists of prepaid expenses for rental, insurance, employee salary, and collateral fund.

10. ASET TETAP - NETO / *10. FIXED ASSETS - NET*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ *Year ended December 31, 2023*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Kapal	644.239.209	49.785.330	-	93.045.641	787.070.180	*Vessels*
Bangunan	626.684	-	-	11.733.100	12.359.784	*Buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	4.290.547	-	-	1.110.056	5.400.603	*Port facilities*
Aset dalam penyelesaian	71.577.371	34.311.426	-	(105.888.797)	-	*Construction in progress*
Total harga perolehan	720.733.811	84.096.756	-	-	804.830.567	*Total acquisition cost*
Dikurangi:						*Less:*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kapal	180.395.663	39.437.541	-	-	219.833.204	*Vessels*
Bangunan	46.062	195.051	-	-	241.113	*Buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	2.167.964	1.582.565	-	-	3.750.529	*Port facilities*
Total akumulasi penyusutan	182.609.689	41.215.157	-	-	223.824.846	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**538.124.122**				**581.005.721**	***Net book value***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

10. FIXED ASSETS - NET (continued)

This account consists of the following: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/ *Year ended December 31, 2022*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Kapal	643.803.951	435.258	-	-	644.239.209	*Vessels*
Bangunan	626.684	-	-	-	626.684	*Buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	2.893.947	-	-	1.396.600	4.290.547	*Port facilities*
Aset dalam penyelesaian	7.260.275	65.713.696	-	(1.396.600)	71.577.371	*Construction in progress*
Total harga perolehan	654.584.857	66.148.954	-	-	720.733.811	*Total acquisition cost*
Dikurangi:						*Less:*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kapal	142.845.283	37.550.380	-	-	180.395.663	*Vessels*
Bangunan	30.708	15.354	-	-	46.062	*Buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	1.083.982	1.083.982	-	-	2.167.964	*Port facilities*
Total akumulasi penyusutan	143.959.973	38.649.716	-	-	182.609.689	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**510.624.884**				**538.124.122**	***Net book value***

Beban penyusutan aset tetap masing-masing sebesar Rp41.215.157 dan Rp38.649.716 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruhnya dialokasikan dalam beban pokok pendapatan (Catatan 21).

Depreciation expense of fixed assets amounting to Rp41,215,157 and Rp38,649,716 for the years ended December 31, 2023 and 2022 are allocated to cost of revenue, respectively (Note 21).

Pada tanggal 31 Desember 2023, kapal-kapal yang dimiliki sendiri telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang disebabkan kerusakan mesin dan *hull* (*machinery breakdown*) pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), pihak berelasi, dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp2.159.248 dan Rp158.159.

As of December 31, 2023, the company-owned ships have been insured against the risk of loss caused by machine and hull damage (machinery breakdown) with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) and PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), related parties, with total coverage amounting to Rp2,159,248 and Rp158,159 respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kapal-kapal yang dimiliki sendiri telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang disebabkan kerusakan mesin dan *hull* (*machinery breakdown*) pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), pihak berelasi, dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp1.292.171.

As of December 31, 2022, the company-owned ships have been insured against the risk of loss caused by machine and hull damage (machinery breakdown) with PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), related parties, with total coverage amounting to Rp1,292,171.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kapal-kapal milik Pelindo yang dioperasikan oleh Perusahaan telah diasuransikan dengan polis asuransi *Protection and Indemnity* pada *The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association*, pihak ketiga, terhadap risiko kerugian atas tabrakan diatas batas penggantian oleh polis asuransi *Marine Hull & Machinery*, biaya pengobatan, rumah sakit, pemakaman, biaya-biaya lain, cidera dan atau kematian anggota awak kapal dan pihak ketiga, biaya pembersihan, denda-denda yang berkaitan dengan polusi atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kapal dan pengangkatan bangkai kapal.

As of December 31, 2023 and 2022, those owned vessels by Pelindo operated by the Company have been insured with Protection and Indemnity insurance policy with The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association, a third party, against losses of collisions above the replacement limit by the Marine Hull & Machinery Insurance policy, medical expenses, hospitals, funerals, other expenses, injury and or death of crew members and third parties, loss, cleaning costs, fines related to pollution or environmental damage caused by vessels and removal of shipwrecks.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Batas maksimum penggantian setiap kecelakaan untuk semua jenis klaim sebesar $AS500.000.000 (nilai penuh). Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan untuk aset tetap kapal tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan penelaahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap, manajemen berkeyakinan tidak terdapat perubahan atas estimasi umut manfaat, nilai residu dan metode penyusutan untuk seluruh aset tetap.

Aset tetap tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Tidak terdapat aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perusahaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

10. FIXED ASSETS (continued)

Maximum limit of replacement of any accidents for any claim type for each insurance are US$500,000,000 (full amount). Management believes that the insurance coverage for these vessels are adequate to cover the risk of potential losses of the insured assets.

As of December 31, 2023, based on review on estimated useful lives, residual values and methods of depreciation of fixed assets, the management believes that there were no change in useful lives, residual values and method of depreciation on all fixed assets.

Fixed assets were not used as collateral as at the reporting date.

There are no fixed assets that have been fully depreciated but are still used to support the Company's operations.

Management believes that there was no impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2023 and 2022.

11. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

11. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The movements in right-of-use assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Kapal Tunda	119.863.752	48.982.022	(62.268.382)	-	106.577.392	*Tug vessels*
Kendaraan	6.286.661	-	(3.317.255)	-	2.969.406	*Vehicles*
Bangunan	9.277.662	19.323.616	(6.865.628)	-	21.735.650	*Buildings*
Total harga perolehan	135.428.075	68.305.638	(72.451.265)	-	131.282.448	*Total acquisition costs*
Dikurangi:						*Less:*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kapal Tunda	115.852.373	27.570.126	(62.268.382)	-	81.154.117	*Tug vessels*
Kendaraan	5.118.645	893.252	(3.317.255)	-	2.694.642	*Vehicles*
Bangunan	7.763.520	8.027.841	(6.865.628)	-	8.925.733	*Buildings*
Total akumulasi penyusutan	128.734.538	36.491.219	(72.451.265)	-	92.774.492	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**6.693.537**				**38.507.956**	***Net book value***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2022

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Kapal Tunda	103.315.249	16.548.503	-	-	119.863.752	*Tug vessels*
Kendaraan	5.957.580	329.081	-	-	6.286.661	*Vehicles*
Bangunan	6.865.628	2.412.034	-	-	9.277.662	*Buildings*
Total harga perolehan	116.138.457	19.289.618	-	-	135.428.075	*Total acquisition costs*
Dikurangi:						*Less:*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kapal Tunda	76.660.392	39.191.981	-	-	115.852.373	*Tug vessels*
Kendaraan	3.473.145	1.645.500	-	-	5.118.645	*Vehicles*
Bangunan	4.780.907	2.982.613	-	-	7.763.520	*Buildings*
Total akumulasi penyusutan	84.914.444	43.820.094	-	-	128.734.538	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**31.224.013**				**6.693.537**	***Net book value***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *11. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)*

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut: / *The detail of lease liabilities is as follows:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Bagian jangka pendek	32.485.372	6.730.639	*Current portion*
Bagian jangka panjang	7.030.080	297.942	*Non-current portion*
Total	**39.515.452**	**7.028.581**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut: / *Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Beban bunga atas liabilitas sewa	2.717.025	1.594.581	*Interest expense on lease liabilities*
Beban penyusutan aset hak-guna	36.491.219	43.820.094	*Depreciation expense of right-of-use assets*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban penyusutan aset hak-guna dicatat sebagai bagian dari beban pokok pendapatan (Catatan 21).

As of December 31, 2023 and 2022, the depreciation expense of right-of-use assets was recorded as part of cost of revenues (Note 21).

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Perusahaan sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Perusahaan. Perusahaan mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Perusahaan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Perusahaan.

Some leases contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Company. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut: / *Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as folllow:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Saldo awal	7.028.581	32.848.942	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	68.305.635	24.623.631	*Addition during the year*
Arus kas	(38.535.789)	(52.038.573)	*Cash flow*
Perubahan non-kas	2.717.025	1.594.581	*Non-cash changes*
Total	**39.515.452**	**7.028.581**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. UTANG USAHA / *12. TRADE PAYABLES*

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on vendors are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Karya Teknik Sentosa	1.284.252	-	*PT Karya Teknik Sentosa*
PT Multi Jaya Samudera	647.140	1.262.531	*PT Multi Jaya Samudera*
PT Titu Perkasa Energi	-	6.553.493	*PT Titu Perkasa Energi*
PT Laros Petroleum	-	5.028.438	*PT Laros Petroleum*
PT Presol Indo Prima	-	3.434.604	*PT Presol Indo Prima*
PT Estline Sumber Energi	-	2.175.763	*PT Estline Sumber Energi*
PT Lantra Hement Indonesia	-	1.766.472	*PT Lantra Hement Indonesia*
PT Putra Samudra	-	878.336	*PT Putra Samudra*
PT Alzano Surya Kencana Nusantara	-	801.686	*PT Alzano Surya Kencana Nusantara*
The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association - Singapura	-	681.939	*The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association - Singapore*
PT Norte Amani Energi	-	520.373	*PT Norte Amani Energi*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	2.163.698	1.285.447	*Others (below Rp500,000 each)*
Sub-total pihak ketiga	4.095.090	24.389.082	*Sub-total third parties*
Pihak berelasi (Catatan 26)			*Related parties (Note 26)*
Pelindo	10.718.976	8.872.918	*Pelindo*
PT Nusantara Regas	5.441.452	5.293.907	*PT Nusantara Regas*
PT Pelindo Energi Logistik	1.614.257	1.175.351	*PT Pelindo Energi Logistik*
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	414.561	740.287	*PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia*
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	-	7.554.456	*PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia*
PT Pertamina Patra Niaga	-	3.944.802	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Rumah Sakit Pelabuhan	-	586.645	*PT Rumah Sakit Pelabuhan*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	274.834	1.546.496	*Others (below Rp500,000 each)*
Sub-total pihak berelasi	18.464.080	29.714.862	*Sub-total related parties*
Total	**22.559.170**	**54.103.944**	***Total***

Rincian utang usaha menurut jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables by currencies are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Rupiah	22.559.170	54.103.944	*Rupiah*
Total	**22.559.170**	**54.103.944**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA / *13. OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES*

	31 Desember/*December 31,* 2023	2022	
PT Dimas Tanjung Perak Shipyard	-	49.532.210	*PT Dimas Tanjung Perak Shipyard*
PT Galangan Kapal Yasa Wahana Tirta Samudera	-	20.042.358	*PT Galangan Kapal Yasa Wahana Tirta Samudera*
Total	**-**	**69.574.568**	***Total***

Utang lain-lain - pihak ketiga merupakan utang atas pembelian dan pembangunan aset tetap.

Other payables - third parties represents payable for purchase and construction of asset.

14. UANG TITIPAN / *14. DEPOSITS*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, akun ini seluruhnya merupakan uang titipan karyawan.

As of December 31, 2023 and 2022, this account represents deposits from employee.

15. BEBAN AKRUAL / *15. ACCRUED EXPENSES*

Beban akrual terdiri dari:

Accrued expenses consist of:

	31 Desember/*December 31,* 2023	2022	
Kerja sama mitra usaha	84.913.770	84.813.694	*Partnership*
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	44.132.383	39.064.702	*Salaries, allowance and employee welfare*
Bahan bakar dan pelumas	26.055.976	5.379.885	*Fuel and lubricants*
Pemeliharaan kapal	9.238.829	6.509.510	*Ship maintenance*
Pembangunan kapal	4.308.829	-	*Ship building*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	6.189.818	6.422.793	*Others (below Rp500,000 each)*
Total	**174.839.605**	**142.190.584**	***Total***

Beban akrual tidak dikenakan bunga dan tidak dijaminkan.

Accrual expenses are not subject to interest and unsecured.

16. PERPAJAKAN / *16. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid tax*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pajak dibayar di muka seluruhnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

As of December 31, 2023 and 2022, prepaid taxes represent Value Added Tax ("VAT").

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan) / *16. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

Rincian utang pajak terdiri dari: / *Details of taxes payable consists of:*

	31 Desember/*December 31,* 2023	2022	
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 29	4.352.916	5.391.045	*Article 29*
Pasal 21	3.400.818	2.854.968	*Article 21*
Pasal 25	1.175.425	457.845	*Article 25*
Pasal 23	214.678	269.384	*Article 23*
Pasal 4 (2)	44.875	100.591	*Article 4 (2)*
Pasal 26	29.532	29.779	*Article 26*
Pasal 15	6.288	74.033	*Article 15*
Total	**9.224.532**	**9.177.645**	***Total***

c. Pajak penghasilan badan / *c. Corporate income tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Years ended December 31*, 2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	195.943.956	186.038.959	*Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Bonus	14.696.999	(1.314.558)	*Bonus*
Penyusutan aset tetap	(2.257.591)	(1.836.567)	*Depreciation of fixed assets*
Beban sewa	672.455	(6.623.897)	*Lease expense*
Penyisihan penurunan nilai piutang	618.177	167.832	*Allowance for impairment of receivables*
Perbedaan permanen:			*Permanent differences:*
Kesejahteraan karyawan, imbalan kerja dan beban lainnya	16.321.493	28.911.329	*Employee welfare, employee benefits and other expenses*
Promosi dan pemasaran	10.920.563	5.100.473	*Promotion and marketing*
Beban pajak	-	8.748.636	*Tax expenses*
Hasil pemeriksaan pajak	(6.499.000)	-	*Tax letter assessment result*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(14.233.852)	(13.141.136)	*Finance income subject to final tax*
(Pendapatan)/beban yang dikenakan pajak final	(40.706.743)	(50.415.466)	*(Revenue)/expense subjected to final income tax*
Taksiran penghasilan kena pajak	**175.476.457**	**155.635.605**	***Estimated taxable income***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan) / *16. TAXATION (continued)*

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan) / *c. Corporate income tax (continued)*

Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

The calculation of current income tax expense - current year and estimated payable corporate income tax are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Taksiran penghasilan kena pajak	175.476.457	155.635.605	*Estimated taxable income*
Beban pajak penghasilan badan - tahun berjalan	38.604.820	34.239.834	*Corporate income tax expense - current*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak penghasilan dibayar di muka :			*Prepaid income taxes :*
Pasal 22	-	135.174	*Article 22*
Pasal 23	15.862.576	15.991.785	*Article 23*
Pasal 25	18.389.328	12.721.830	*Article 25*
Taksiran utang pajak pajak tahun berjalan	**4.352.916**	**5.391.045**	***Estimated tax payable current year***

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Years ended December 31*,		
	2023	**2022**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	195.943.956	186.038.959	*Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	(43.107.670)	(40.928.572)	*Income tax calculated at applicable rate*
Dampak perbedaan permanen:			*Effect of permanent differences:*
Kesejahteraan karyawan, imbalan kerja dan beban lainnya	(3.590.728)	(6.360.492)	*Employee welfare, employee benefits and other expenses*
Promosi dan pemasaran	(2.402.524)	(1.122.104)	*Promotion and marketing*
Beban pajak	-	(1.924.700)	*Tax expenses*
Hasil pemeriksaan pajak	1.429.780	-	*Tax letter assessment result*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	3.131.447	2.891.050	*Finance income subject to final tax*
Pendapatan (beban) yang dikenakan pajak final	8.955.484	11.091.403	*Revenue (expense) subjected to final income tax*
Penyesuaian	(2.697.757)	969.305	*Adjustments*
Beban pajak penghasilan	**(38.281.968)**	**(35.384.110)**	***Income tax expense***

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2022 sesuai dengan yang dilaporkan Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") kepada Kantor Pajak.

The calculation of corporate income tax for 2022 conforms to the amounts that reported by the Company to Tax Office in its Annual Tax Return.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rincian beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

16. TAXATION (continued)

d. The details of income tax expenses is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Kini	(38.604.820)	(34.239.834)	*Current*
Tangguhan	322.852	(1.144.276)	*Deferred*
Beban pajak penghasilan	**(38.281.968)**	**(35.384.110)**	***Income tax expense***

e. Pajak tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

e. Deferred taxes

The details of deferred tax assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ *Year ended December 31, 2023*				
		Dibebankan pada/*Charged to*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***	**Penyesuaian/ *Adjustment***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Bonus	7.794.837	3.233.340	(1.648.287)	9.379.890	*Bonus*
Penyusutan aset tetap	4.117.693	(496.670)	(1.049.470)	2.571.553	*Depreciation of fixed assets*
Beban sewa	1.546.287	(7.880.128)	15.027.240	8.693.399	*Lease expense*
Penyisihan penurunan nilai piutang	677.484	135.999	-	813.483	*Allowance for impairment of receivables*
Total	**14.136.301**	**(5.007.459)**	**12.329.483**	**21.458.325**	***Total***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Beban sewa	(1.472.576)	8.028.068	(15.027.240)	(8.471.748)	*Lease expense*
Total	**(1.472.576)**	**8.028.068**	**(15.027.240)**	**(8.471.748)**	***Total***
Aset pajak tangguhan, neto	**12.663.725**	**3.020.609**	**(2.697.757)**	**12.986.577**	***Deferred tax assets, net***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

e. Deferred taxes (continued)

The details of deferred tax assets are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/ *Year ended December 31, 2022*			
		Dibebankan pada/*Charged to*		
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Bonus	8.499.459	(289.202)	(415.420)	7.794.837	*Bonus*
Penyusutan aset tetap	4.058.311	(404.045)	463.427	4.117.693	*Depreciation of fixed assets*
Beban sewa	4.669.371	(11.097.678)	7.974.594	1.546.287	*Lease expense*
Penyisihan penurunan nilai piutang	640.561	36.923	-	677.484	*Allowance for impairment of receivables*
Total	**17.867.702**	**(11.754.002)**	**8.022.601**	**14.136.301**	***Total***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Beban sewa	(4.059.701)	9.640.421	(7.053.296)	(1.472.576)	*Lease expense*
Total	**(4.059.701)**	**9.640.421**	**(7.053.296)**	**(1.472.576)**	***Total***
Aset pajak tangguhan, Neto	**13.808.001**	**(2.113.581)**	**969.305**	**12.663.725**	***Deferred tax assets, net***

f. Taksiran tagihan restitusi pajak dan Surat Ketetapan Pajak

f. Estimated claims for tax refund and Tax Assessment Letter

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Tahun 2021	-	19.745.078	*Year 2021*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan atas ketetapan pajak	-	8.250.000	*Allowance for tax assessement*
Neto	**-**	**11.495.078**	***Net***

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari – Desember 2021

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki pajak dibayar di muka yang timbul dari hasil neto antara Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") masukkan dan keluaran sebesar Rp19.745.078. Pada tahun 2022, Perusahaan mengajukan restitusi atas PPN masa Desember 2021 sebesar Rp19.745.078 dan telah mencadangkan penyisihannya sebesar Rp8.250.000 pada laporan laba rugi Perusahaan tahun 2022 (Catatan 24).

Value Added Tax Refunds Period January – December 2021

On December 31, 2021, the Company had prepaid taxes arising from net off between Value Added Tax ("VAT") in and VAT out amounting to Rp19,745,078. In 2022, the Company filed an application for refund on VAT for the period December 2021 amounting to Rp19,745,078 and reserve allowance for the overpayment amounting to Rp8,250,000 in the Company's 2022 statements of profit and loss (Note 24).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Taksiran tagihan restitusi pajak dan Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari – Desember 2021 (lanjutan)

Pada tanggal 10 Oktober 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") untuk PPN masa Desember sebesar Rp19.728.831. Perusahaan menerima hasil tersebut dan mencatat selisihnya pada laporan laba rugi Perusahaan tahun 2023. Perusahaan juga melakukan pembalikan atas cadangan penyisihan taksiran tagihan restitusi pajak dan mencatat pembalikan tersebut dalam laporan laba rugi Perusahaan tahun 2023 (Catatan 23).

Pada tanggal 14 November 2023, Perusahaan menerima pembayaran atas SKPLB sebesar Rp17.994.078 dikurangi dengan beberapa Surat Tagihan Pajak ("STP") and Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") sejumlah Rp1.734.753 PPN yang telah dicatat dalam laporan laba rugi Perusahaan tahun 2023 (Catatan 23).

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari – Desember 2020

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat lebih bayar atas PPN masa Januari sampai Desember sebesar Rp17.707.446. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp17.208.810 yang sudah diterima oleh Perusahaan pada bulan Februari 2022. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan Perusahaan sebesar Rp498.636 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya (Catatan 24).

16. TAXATION (continued)

f. Estimated claims for tax refund and Tax Assessment Letter (continued)

Value Added Tax Refunds Period January – December 2021 (continued)

On October 10, 2023, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") for VAT period of December amounting to Rp19,728,831. The Company accepted the result and recorded the difference in the Company's 2023 statements of profit and loss. The Company also reverse the estimated claims for tax refund and recorded the reversal in the Company's 2023 statements of profit and loss (Note 23).

On November 14, 2023, the Company received the payment related to the SKPLB amounting to Rp17,994,078 net off with several Tax Collection Letter ("STP") and Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") amounting to Rp1,734,753 on VAT which has been recorded by the Company in 2023's statements of profit and loss (Note 23).

Value Added Tax Refunds Period January – December 2020

In 2020, the Company recorded an overpayment of VAT for January to December period amounting to Rp17,707,446. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the approved overpayment amounting to Rp17,208,810 which had been received by the Company in February 2022. The difference in the results of the tax audit with the Company's record amounting to Rp498,636 has been recorded as part of other operating expenses (Note 24).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. MODAL SAHAM / *17. SHARE CAPITAL*

Susunan kepemilikan saham pada Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

The composition of shares ownership in the Company as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Pemegang Saham / *Shareholders*	31 Desember/*December 31, 2023* dan/*and 2022* Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Nominal/ *Amount*
PT Pelindo Jasa Maritim	4.063.504.600	76,89%	406.350.460
PT Multi Terminal Indonesia	5.800.000	0,11%	580.000
Masyarakat:			
PT Pelabuhan Indonesia Investama	569.551.400	10,78%	56.955.140
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	637.915.300	12,07%	63.791.530
	5.276.771.300	99,85%	527.677.130
Saham tresuri	8.039.800	0,15%	803.980
Total	**5.284.811.100**	**100%**	**528.481.110**

Dalam Berita Acara Kesepakatan Direksi pada tanggal 18 Maret dan 2 Juli 2020, para pemegang saham menyetujui rencana manajemen untuk melaksanakan pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan dalam jangka waktu, antara tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 dan 7 Juli sampai dengan tanggal 30 September 2020, dengan pembelian maksimum masing-masing sejumlah 20.000.000 saham dan 15.000.000 saham dari seluruh saham Perusahaan.

In the Berita Acara Kesepakatan Direksi dated March 18 and July 2, 2020, the shareholders approved the management's plan to conduct shares buyback within a period, from March 20 up to June 18, 2020 and July 7 up to September 30, 2020, with maximum buyback of 20,000,000 and 15,000,000 shares of the Company's total issued and fully paid shares to be acquired.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham tresuri sebanyak 8.039.800 saham dengan harga perolehan sebesar Rp1.617.838, yang disajikan sebagai akun "Saham Tresuri" yang mengurangi ekuitas pada laporan posisi keuangan.

Up to December 31, 2020, the Company has purchased amounting to 8,039,800 treasury shares with acquisition price amounting to Rp1,617,838, which presented as "Treasury Shares" account that deducted the equity in the statement of financial position.

Pada tanggal 3 Januari 2022, Pelindo dan SPJM menyepakati Perjanjian No.SK.03/3/1/2/PBAN/UTMA/PLND-22 perihal Pengalihan Hak Atas Saham Pelindo pada Perusahaan kepada SPJM.

On January 3, 2022 Pelindo and SPJM consented to Agreement No. SK.03/3/1/21PBAN/UTMA/PLND-22 regarding the Transfer of Rights of Pelindo's shares in the Company to SPJM.

Pada tanggal 4 Januari 2022, SPJM melaporkan Kepemilikan Saham atas Perusahaan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. HM.01.01/2/PLJM-2022. Saat ini, SPJM memiliki 4.063.504.600 saham atau sama dengan 76,89% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.

On January 4, 2022, SPJM reported Share Ownership of the Company to the Chief Executive of Capital Market Supervisory of Otoritas Jasa Keuangan through letter No. HM.01.01/2/PLJM-2022. Currently, SPJM owns 4,063,504,600 shares or equal to 76.89% of the total issued and paid-up capital of the Company.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 29 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 14 April 2022, terdapat perubahan susunan pemegang saham Perusahaan. Perubahan tersebut telah diberitahukan dan telah menerima surat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-01.09-0010472 tanggal 28 April 2022.

Dengan perubahan tersebut, maka rincian para pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

- SPJM dengan jumlah 4.063.504.600 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp406.350.460.000.
- PT Multi Terminal Indonesia dengan jumlah 5.800.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp580.000.000.
- Masyarakat dengan jumlah 1.215.506.500 atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp121.550.650.000.

17. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Deed No. 29 from Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, dated April 14, 2022, there were changes in the Company's composition of shareholders. The changes have been reported and received from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-01.09-0010472 dated April 28, 2022.

With the change, the details of the Company's shareholders are as follows:

- *SPJM amounted to 4,063,504,600 shares or with a total nominal value of Rp406,350,460,000.*
- *PT Multi Terminal Indonesia amounted to 5,800,000 shares or with a total nominal value of Rp580,000,000.*
- *Public amounted to 1,215,506,500 or with a total nominal value of Rp121,550,650,000.*

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan agio saham yang berasal dari selisih lebih hasil penawaran umum perdana atas nilai nominal saham setelah dikurangi biaya penerbitan (Catatan 1b).

18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the premium on stock from excess of proceeds from the initial public offering of shares over par value after deducting the issuance cost (Note 1b).

19. CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN

Pada tanggal 17 Desember 2023, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2023 sebesar Rp3,80 (nilai penuh) per saham atau seluruhnya sebesar Rp20.051.731 dan dibayarkan pada tanggal 24 Januari 2024 dan 16 Februari 2024.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 21 Juni 2023 tentang Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Tahun Buku 2022, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2022 untuk dividen sebesar Rp113.028.442. Dividen terdiri dari dividen interim sebesar Rp19.418.519 yang telah dibagikan pada tanggal 24 Desember 2022 dan dividen tunai sebesar Rp93.609.923 pada tanggal 20 Juli 2023.

19. GENERAL RESERVE AND DIVIDEND

On December 17, 2023, the Company declared the distribution of an interim dividend for 2023 amounting to Rp3.80 (full amount) per share or a total of Rp20,051,731 and paid on January 24, 2024 and February 16, 2024.

Based on the Minutes of General Meeting of Shareholders dated June 21, 2023 on Annual Report Accountability Year 2022, the Company's shareholders agreed the utilization of the Company's net income year 2022 for dividend amounting to Rp113,028,442. The dividend consists of interim dividend amounting to Rp19,418,519 which were paid on December 24, 2022 and cash dividend amounting to Rp93,609,923 which were paid on July 20, 2023.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN (lanjutan)

Pada tanggal 25 November 2022, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2022 sebesar Rp3,68 (nilai penuh) per saham atau seluruhnya sebesar Rp19.418.519 dan dibayarkan pada tanggal 24 Desember 2022.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 23 Juni 2022 tentang Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Tahun Buku 2021, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penggunaaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2021 untuk dividen dan cadangan umum masing-masing sebesar Rp109.281.934 dan Rp27.300.786. Dividen terdiri dari dividen interim sebesar Rp18.152.093 yang telah dibagikan pada tanggal 24 Desember 2021 dan dividen tunai sebesar Rp91.129.841 pada tanggal 20 Juli 2022.

19. GENERAL RESERVE AND DIVIDEND (continued)

On November 25, 2022, the Company declared the distribution of an interim dividend for 2022 amounting to Rp3.68 (full amount) per share or in total amounting to Rp19,418,519 and paid on December 24, 2022.

Based on the Minutes of General Meeting of Shareholders dated June 23, 2022 on Annual Report Accountability Year 2021, the Company's shareholders agreed the utilization of the Company's net income year 2021 for dividend and general reserve amounting to Rp109,281,934 and Rp27,300,786, respectively. The dividend consists of interim dividend amounting to Rp18,152,093 which were paid on December 24, 2021 and cash dividend amounting to Rp91,129,841 which were paid on July 20, 2022.

20. PENDAPATAN

Pendapatan usaha menurut jenis usaha adalah sebagai berikut:

20. REVENUES

Revenues based on type of operating are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Jasa pelayanan kapal:			*Vessel services:*
Penundaan	997.791.280	825.805.688	*Tug service*
Pemanduan	62.970.573	49.735.851	*Pilotage service*
Total pendapatan jasa pelayanan kapal	1.060.761.853	875.541.539	*Total revenue from vessel services*
Jasa pengelolaan kapal	31.500.000	54.000.000	*Fleet management services*
Jasa pengangkutan dan lainnya	46.275.622	50.626.936	*Freight and other services*
Total pendapatan	**1.138.537.475**	**980.168.475**	***Total revenues***

Jasa pelayanan kapal merupakan kegiatan operasional utama Perusahaan yang berupa penyediaan jasa pemanduan dan penundaan kapal untuk membantu kapal masuk hingga keluar pelabuhan. Pada tahun 2023, Perusahaan masih menyepakati penerapan *fuel surcharge* atas penggunaan kapal tunda untuk pelayanan jasa kapal di lingkungan Pelindo sebesar Rp103.726.217 (2022 : Rp48.838.269) yang dikenakan sesuai kesepakatan dengan pengguna jasa akibat adanya kenaikan harga bahan bakar yang signifikan (Catatan 26g).

Ship service is the Company's main operational activity in the form of providing pilotage and tug services to help ships enter and leave the port. In 2023, the Company agreed to apply a fuel surcharge for the use of tugboats for ship services within pelindo amounting to Rp103,726,217 (2022: Rp48,838,269) which imposed in accordance with the agreement with the service user due to a significant increase in fuel prices (Note 26g).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PENDAPATAN (lanjutan) / *20. REVENUES (continued)*

Rincian pendapatan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of revenues based on customers are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Langlang Laju Layang	84.505.942	732.279	*PT Langlang Laju Layang*
PT Energy Marine Indonesia	41.578.493	14.098.920	*PT Energy Marine Indonesia*
PT Karya Pacific Shipping	30.445.295	8.715.186	*PT Karya Pacific Shipping*
PT Trielang Indo Maritim	28.066.252	13.848.345	*PT Trielang Indo Maritim*
PT Riandy Fiesta Samudera	22.647.705	19.917.320	*PT Riandy Fiesta Samudera*
PT IDT Trans Agency	21.141.248	14.865.599	*PT IDT Trans Agency*
PT Bali Infra Gas	16.856.658	-	*PT Bali Infra Gas*
PT Tirta Permai Bahari	16.179.946	9.619.193	*PT Tirta Permai Bahari*
PT Penascop Maritim Indonesia	15.984.846	7.317.107	*PT Penascop Maritim Indonesia*
PT Internasional Total Service dan Logistic	14.399.136	6.274.220	*PT Internasional Total Service dan Logistic*
PT Bahari Eka Nusantara	13.403.057	1.195.355	*PT Bahari Eka Nusantara*
PT Bahtera Bestari Shipping	8.976.234	2.770.920	*PT Bahtera Bestari Shipping*
PT Admiral Lines	7.386.961	6.158.153	*PT Admiral Lines*
PT Lautan Jaya Manggala	6.982.965	1.792.857	*PT Lautan Jaya Manggala*
PT Pelayaran Sinar Dhafitha Utama	3.374.073	5.372.666	*PT Pelayaran Sinar Dhafitha Utama*
PT Tri Elang Jaya Maritim	684.419	9.270.534	*PT Tri Elang Jaya Maritim*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp3.000.000)	1.046.620	1.817.542	*Others (below Rp3,000,000 each)*
Sub-total pihak ketiga	333.659.850	123.766.196	*Sub-total third parties*
Pihak berelasi (Catatan 26)			*Related parties (Note 26)*
Pelindo	514.578.319	768.735.841	*Pelindo*
SPJM	163.529.263	7.928.143	*SPJM*
PT Pertamina Trans Kontinental	72.266.975	24.513.026	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Jawa Satu Power	22.875.927	39.691.188	*PT Jawa Satu Power*
PT Pengembang Listrik Nasional Gas & Geometral	11.937.774	-	*PT Pengembang Listrik Nasional Gas & Geometral*
PT Adhi Guna Putera	11.422.853	-	*PT Adhi Guna Putera*
PT Pelindo Energi Logistik	5.386.253	11.712.408	*PT Pelindo Energi Logistik*
PT Bukit Prima Bahari	2.880.261	3.821.673	*PT Bukit Prima Bahari*
Sub-total pihak berelasi	804.877.625	856.402.279	*Sub-total related parties*
Total pendapatan	**1.138.537.475**	**980.168.475**	***Total revenues***

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of customers which represent more than 10% of the total revenues are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*				
	Pendapatan/*Revenue*		Persentase dari total pendapatan/*Percentage of total revenue*		
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	
Pelindo	514.578.319	768.735.841	45,20%	78,43%	*Pelindo*
SPJM	163.529.263	7.928.143	14,36%	0,81%	*SPJM*
Total	**678.107.582**	**776.663.984**	**59,56%**	**79,24%**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *21. COST OF REVENUES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023	2022	
Bahan bakar, pelumas, air dan makanan	338.089.816	226.480.305	*Fuel, lubricant, water and food*
Kerjasama mitra usaha	239.371.901	238.921.766	*Partnership*
Penyusutan (Catatan 10 dan 11)	77.706.376	82.469.810	*Depreciation (Notes 10 and 11)*
Gaji	58.866.819	63.715.626	*Salaries*
Perbaikan dan pemeliharaan	49.905.770	30.374.024	*Repair and maintenance*
Penerimaan negara bukan pajak	13.853.269	8.880.534	*Non-tax state revenues*
Surat kapal	10.602.528	9.115.350	*Ship letter*
Asuransi	4.238.168	8.391.409	*Insurance*
Beban pokok pendapatan lainnya	6.127.320	9.272.865	*Other cost of revenues*
Total	**798.761.967**	**677.621.689**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pemasok dengan nilai transaksi melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

As of December 31, 2023 and 2022, there were no suppliers, with transaction values exceeding 10% of total revenue.

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023	2022	
Gaji	96.519.596	79.115.400	*Salaries*
Kerjasama mitra usaha, asuransi, administrasi kantor dan umum	56.450.574	31.938.316	*Partnership, insurance, office administrative and general*
Perbaikan dan pemeliharaan	4.693.075	1.857.374	*Repair and maintenance*
Bahan bakar, pelumas, air dan makanan	7.805.366	4.696.907	*Fuel, lubricant, water and food*
Total	**165.468.611**	**117.607.997**	***Total***

23. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA / *23. OTHER OPERATING INCOME*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023	2022	
Penyesuaian atas hasil surat ketetapan pajak (Catatan 16f)	6.499.000	-	*Adjustment for tax assessment letter (Note 16f)*
Laba selisih kurs	-	749.076	*Foreign exchange gain*
Lain-lain	3.682.184	-	*Others*
Total	**10.181.184**	**749.076**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. BEBAN OPERASI LAINNYA / *24. OTHER OPERATING EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023	2022	
Pajak final atas pendapatan keuangan	724.698	1.000.596	*Final tax on financial income*
Rugi selisih kurs	4.512	728.715	*Foreign exchange loss*
Pembebanan pajak dibayar di muka (Catatan 16f)	-	8.250.000	*Prepaid tax charges (Note 16f)*
Penyesuaian atas hasil surat ketetapan pajak (Catatan 16f)	-	498.636	*Adjustment for tax assessment letter (Note 16f)*
Lain-lain	-	1.195.495	*Others*
Total	**729.210**	**11.673.442**	***Total***

25. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN / *25. FINANCE INCOME AND EXPENSES*

a. Pendapatan keuangan / *a. Finance income*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023	2022	
Pendapatan bunga deposito	13.780.913	13.342.900	*Interest income from time deposit*
Pendapatan jasa giro	1.177.637	798.832	*Interest income from current accounts*
Total	**14.958.550**	**14.141.732**	***Total***

b. Beban keuangan / *b. Finance expenses*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023	2022	
Beban bunga sewa	2.717.025	1.594.581	*Lease interest expense*
Beban administrasi bank	56.440	522.615	*Bank administrative expenses*
Total	**2.773.465**	**2.117.196**	***Total***

26. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI / *26. RELATED PARTY INFORMATION*

Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi / *The nature of transactions with the related parties*

Sifat relasi/ *Nature of relationship*	Nama pihak berelasi/ *Name of related party*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
Pemegang saham/*Shareholders*	PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")	Penjualan jasa dan dividen/ *Sales of services and dividend*
	PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	Dividen/*Dividend*
	PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Dividen/*Dividend*
Entitas sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/*Entities under common control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")	Penjualan dan pembelian jasa, imbalan kerja/ *Sales and purchase of services, employee benefits*
	PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP")	Pembelian layanan kesehatan/ *Purchase of health services*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

26. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. *RELATED PARTY INFORMATION (continued)*

Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

The nature of transactions with the related parties (continued)

Sifat relasi/ *Nature of relationship*	Nama pihak berelasi/ *Name of related party*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
Entitas sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/*Entities under common control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*	PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Pelindo Energi Logistik ("PEL")	Penjualan dan pembelian jasa/ *Sales and purchase of services*
	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Penjualan dan pembelian jasa/ *Sales and purchase of services*
	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Pembelian jasa/*Purchase of services*
Entitas berelasi dengan pemerintah/ *Government-related entity*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bukit Prima Bahari	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Pertamina Patra Niaga	Pembelian bahan bakar/*Purchase of fuel*
	PT Nusantara Regas	Pembelian jasa/*Purchase of services*
	PT Jawa Satu Power	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Pengembang Listrik Nasional Gas & Geothermal	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Adhi Guna Putera	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Pembelian jasa asuransi/ *Purchase of insurance services*
	PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero)	Pembelian jasa asuransi/ *Purchase of insurance services*
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Jasa asuransi/*Insurance services*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Remunerasi personil manajemen kunci

Jumlah gaji, tantiem dan tunjangan lainnya yang dibayar atau diakru kepada manajemen kunci Perusahaan adalah sebesar Rp14.303.557 dan Rp14.387.973 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Perjanjian dan perikatan yang signifikan dengan pihak berelasi

a. Berdasarkan Surat Direksi Pelindo tanggal 29 November 2016 tentang Segmentasi Bisnis Anak Perusahaan dan Cabang di Pelabuhan Tanjung Priok, kegiatan pelayanan jasa pemanduan akan dilaksanakan oleh Pelindo Cabang Tanjung Priok terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

   Berdasarkan Surat Direksi Pelindo tentang Kerjasama Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemanduan tanggal 10 Oktober 2017, kegiatan pelayanan pemanduan menjadi tanggung jawab dan dicatat oleh masing-masing cabang Pelindo terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

b. Pada tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan dan Pelindo menandatangani perjanjian tentang Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan di Lingkungan Pelindo dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut:
   - Kerjasama penyediaan dan pengelolaan kapal tunda dengan bagi hasil sebesar 85% dan 15% masing masing untuk Perusahaan dan Pelindo, dihitung dari pendapatan jasa penundaan dikurangi PNBP, Pajak penghasilan pasal 23, nota koreksi serta pungutan resmi berdasarkan ketentuan yang berlaku dari pemerintah dan/atau regulator.
   - Kerjasama pengelolaan kapal pandu dengan besaran biaya pengelolaan kapal pandu yang diterima Perusahaan sebesar Rp4.500.000 per bulan pada tahun 2023 dan 2022.
   - Jangka waktu berlakunya perjanjian ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

   Pada tanggal 11 November 2023, Perusahaan dan Pelindo menandatangani pengakhiran atas perjanjian tersebut terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 (Catatan 26i).

26. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Key management personnel remuneration

The amount of salary, tantiem and other benefits paid or accrued to the Company's key management were Rp14.303.557 and Rp14,387,973 for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

The significant agreements and commitments with related parties

a. Based on Letter of the Board of Directors of Pelindo dated November 29, 2016 regarding Subsidiaries and Branches Business Segmentation in Tanjung Priok Port, the pilotage services activities will be conducted by Pelindo Tanjung Priok Branch starting January 1, 2017.

   Based on Letter of the Board of Directors of Pelindo of Cooperation of Pilotage Facilities and Infrastructure Provision dated October 10, 2017, the pilotage services activities were the responsibilities of each Pelindo branch starting January 1, 2017.

b. On December 21, 2018, the Company and Pelindo have signed an agreement regarding the Provision of Supporting Facilities and Infrastructure in Pelindo with the following conditions:
   - *Supply and management cooperation of tug vessels with a sharing fee of 85% and 15% for the Company and Pelindo respectively shall be calculated from tug service revenue after deducting PNBP, Income tax payable of article 23, correction note and and official collection based on applicable regulations from the government and/or regulators.*
   - *Cooperation in the management of pilotage vessel with the management fee of pilotage vessel received by the Company amounting to Rp4,500,000 per month for 2023 and 2022.*
   - *The period of validity of this agreement is from January 1, 2019 to December 31, 2028.*

   On November 11, 2023, the Company and Pelindo signed a termination of the agreement, effective from August 1, 2023 (Note 26i).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Perjanjian dan perikatan yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

c. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara PTP dengan Perusahaan pada tanggal 10 Oktober 2019, PTP sepakat untuk melakukan penyelesaian utang kepada Perusahaan sebesar Rp31.062.213 yang harus dibayarkan kepada Perusahaan paling lambat tanggal 5 November 2019. Sampai dengan tahun 2023, Perusahaan telah menerima pembayaran sebesar Rp28.472.015. Pada tanggal 31 Desember 2023 and 2022, sisa saldo piutang kepada PTP masing-masing sebesar Rp2.590.198 (Catatan 5).

d. Dalam rangka memenuhi kebutuhan karyawan, Perusahaan melakukan kerjasama dengan Pelindo untuk menempatkan beberapa karyawan Pelindo ke Perusahaan sesuai dengan perjanjian tanggal 1 Oktober 2014. Kerjasama tersebut meliputi pembinaan, pengembangan kompetensi serta penghasilan dan remunerasi pegawai sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah karyawan Pelindo yang ditugaskan di Perusahaan masing-masing sebanyak 124 dan 127 orang.

e. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Pelindo dengan Perusahaan pada tanggal 27 September 2022, Pelindo dan Perusahaan sepakat untuk melakukan *net off* antara piutang dan utang per Juni 2022 dimana Pelindo masih memiliki kewajiban sebesar Rp4.494.512. Perusahaan telah menerima pelunasan atas kewajiban tersebut pada tanggal 9 Desember 2022.

f. Pada tanggal 8 Juni 2022, Perusahaan dengan SPJM menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kapal Tunda Untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Wilayah Kerja Perairan *Ship to Ship* (STS) Nipa, Batam yang tertuang dalam perjanjian No. HK.301/8/6/1/MS-22. Nilai Kerjasama yang disepakati dalam perjanjian ini adalah Perusahaan mendapatkan bagi hasil sebesar 90% dan SPJM sebesar 10%. Jangka waktu perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun sampai dengan Juni 2023 dan tidak dilakukan perpanjangan perjanjian.

26. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

The significant agreements and commitments with related parties (continued)

c. Based on Minutes of Agreement between PTP and the Company dated October 10, 2019, PTP agreed to conduct settlement its payables to the Company amounting to Rp31,062,213 which has to be paid to the Company by November 5, 2019 at the latest. Until 2023, the Company has received the payment amounting to Rp28,472,015. As of December 31, 2023 and 2022, outstanding of receivables to PTP are Rp2,590,198, respectively (Note 5).

d. In order to meet the needs of employees, the Company cooperates with Pelindo to register several of Pelindo employees in the Company in accordance with agreement dated October 1, 2014. The cooperation includes coaching, competency development as well as employee's income and remuneration in accordance with the agreement of both parties. As of December 31, 2023, and 2022, the number of Pelindo employees assigned in the Company are 124 and 127, respectively.

e. Based on Minutes of Agreement between Pelindo and the Company dated September 27, 2022 Pelindo and the Company agreed to conduct net off between receivables and payables as of June 2022 in which Pelindo has an obligation amounting to Rp4,494,512. The Company has received payment of this obligation on December 9, 2022.

f. On June 8, 2022, the Company and SPJM signed a Cooperation Agreement regarding Provision of Tugboats for Tug Services in the Nipa Ship to Ship (STS) Waters Working Area, Batam as stated in the agreement No. HK.301/8/6/1/MS-22. The value of the cooperation agreed in this agreement is that the Company gets a profit sharing of 90% and SPJM of 10%. The term of this agreement is 2 (two) years until June 2023 and the agreement was not extended.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Perjanjian dan perikatan yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

g. Pada tanggal 30 November 2022, Perusahaan, Pelindo, dan SPJM sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama No. HK.566/30/11/3/MS-22 tentang Penerapan *Fuel Surcharge* atas Penggunaan Sarana Bantu Pemanduan dan Penundaan di Lingkungan Pelindo. dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan 30 November 2027. Perjanjian ini menyepakati besaran bagi hasil adalah 60% untuk Perusahaan, 30% untuk Pelindo, dan 10% untuk SPJM.

Pada tanggal 9 Januari 2023, Perusahaan, Pelindo, dan SPJM sepakat untuk menandatangani Addendum atas Perjanjian Kerjasama tentang Penerapan *Fuel Surcharge* atas Penggunaan Sarana Bantu Pemanduan dan Penundaan di Lingkungan Pelindo. Perjanjian ini menyepakati perubahan besaran bagi hasil adalah 65% untuk Perusahaan, 25% untuk SPJM dan 10% untuk Pelindo.

h. Pada tanggal 23 Desember 2022, Perusahaan dan Pelindo Cabang Tanjung Priok menandatangani surat perjanjian Nomor HK-566/23/12/1/MS-22 tentang kerja sama penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan milik cabang Tanjung Priok untuk pelayanan jasa pemanduan dan penundaan di luar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Masa berlaku perjanjian ini dimulai pada 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Tidak terdapat perpanjangan atas perjanjian ini.

i. Pada tanggal 11 Desember 2023, Perusahaan dan SPJM menandatangani Kerjasama Pengelolaan dan Penyediaan Sarana bantu Pemanduan dan Penundaan (SBPP) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 No. KS.02/11/12/2/KOS/DUT/JAI-23 dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2033. Besaran bagi hasil untuk kegiatan Pemanduan adalah 5% untuk Perusahaan, 95% untuk SPJM, serta untuk kegiatan Penundaan adalah 90% untuk Perusahaan, 10% untuk SPJM.

26. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

The significant agreements and commitments with related parties (continued)

g. On November 30, 2022, the Company, Pelindo and SPJM agreed to sign an Agreeement No. HK.566/30/11/3/MS-22 regarding Application of Fuel Surcharge for the Use of Guide Motors and Tugboats within Pelindo, with a duration of 5 (five) years, effective from November 30, 2022 to November 30, 2027. This Agreement agrees to amount of revenue sharing is 60% for the Company, 30% for Pelindo, and 10% for SPJM.

On January 9, 2023, the Company, Pelindo and SPJM agreed to sign an addendum to Agreement regarding Appllication of Fuel Surcharge for the Use of Guide Motors and Tugboats within Pelindo. This agreement agrees to changes amount of revenue sharing is 65% for the Company, 25% for SPJM and 10% for Pelindo.

h. On December 23, 2022, the Company and Pelindo Tanjung Priok Branch registered a letter of agreement No. HK-566/23/12/1/MS-22 regarding cooperation in the use of piloting aids and infrastructure belonging to the Tanjung Priok branch for scouting and transportation services outside the Tanjung Priok Port area. The validity period of this agreement starts on January 1, 2023 until December 31, 2023. There are no extention for this agreement.

i. On December 11, 2023, the Company and SPJM signed a Management and Provision of Pilotage and Tug Services (SBPP) Cooperation within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 No. KS.02/11/12/2/KOS/DUT/JAI-23, with a duration of 10 (ten) years, effective from August 1, 2023 to July 31, 2033. The revenue sharing for the pilotage services is 5% for the Company, 95% for SPJM, while for the tug services, it is 90% for the Company, 10% for SPJM.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. ASET MONETER DALAM MATA UANG ASING

27. MONETARY ASSETS DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

	31 Desember/*December 31,*			
	2023		2022	
Aset				***Asset***
Kas dan setara kas	$US	13.993	$US	14.053	*Cash and cash equivalents*

28. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai tercatat instrumen keuangan merefleksikan nilai wajarnya. Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, utang usaha, utang lain-lain - pihak ketiga, beban akrual, uang titipan, utang dividen, dan liabilitas sewa. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya.

Liabilitas keuangan jangka panjang

Nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka panjang diasumsikan sama dengan nilai tunai yang akan diterima atau dibayarkan karena saat jatuh temponya tidak dinyatakan dalam kontrak-kontrak terkait, sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan kapan liabilitas keuangan jangka panjang tersebut akan direalisasi dan dilunasi.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:
- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Perusahaan akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

28. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The carrying amounts of financial instruments reflect the estimated fair value. Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current arm's length transaction between knowledgeable willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

The methods and assumptions used to estimate the fair value of financial instruments are as follow:

Current financial assets and current financial liabilities

Short-term financial instruments with maturities of one year or less includes cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, accrued revenue, trade payables, other payables - third parties, accrued expenses, deposits, dividend payable, and lease liabilities. The fair values of these financial instruments are approximately the same with their carrying amounts.

Long-term financial liabilities

The fair values of non-current financial liabilities are assumed to be the same as the cash amount that will be received or paid due to the fact that their maturities are not stated in the related contracts, therefore it is not possible to determine when the financial liabilities will be realized and settled.

Fair value estimation is judgmental and involved various boundaries, including:

- *Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.*
- *Fair value estimation are not always indicating value that the Company will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk: (lanjutan)

- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

Selain aset dan liabilitas keuangan yang disebutkan di atas, Perusahaan tidak mempunyai aset dan liabilitas lain yang diukur dan disajikan pada nilai wajar, oleh karena itu, Perusahaan tidak menyajikan hirarki nilai wajar sesuai PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar".

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Level 1 dan Level 2, dan tidak terdapat pengalihan dari Level 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan selain yang telah dijelaskan diatas.

Tabel berikut menunjukkan jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

28. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Fair value estimation is judgmental and involved various boundaries, including: (continued)

- *Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs), either directly or indirectly.*

Other than financial assets and financial liabilities mentioned above, the Company does not have other assets or liabilities measured and disclosed at fair value, therefore the Company does not present fair value hierarchy under PSAK 68 "Fair Value Measurements".

As of December 31, 2023 and 2022, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed other than above explained.

The following table sets out the carrying amounts and estimated fair values of the Company's financial instruments as of December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/*December 31*, 2023		31 Desember/*December 31*, 2022		
	Jumlah tercatat/ *Carrying Amount*	Nilai wajar/ *Fair Value*	Jumlah tercatat/ *Carrying Amount*	Nilai wajar/ *Fair Value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	409.000.607	409.000.607	571.726.884	571.726.884	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	42.118.970	42.118.970	122.512.366	122.512.366	*Trade receivables - net*
Pendapatan masih akan diterima	358.350.823	358.350.823	121.410.292	121.410.292	*Accrued revenues*
Piutang lain-lain	5.640.100	5.640.100	51.330.952	51.330.952	*Other receivables*
Total	**815.110.500**	**815.110.500**	**866.980.494**	**866.980.494**	***Total***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	22.559.170	22.559.170	54.103.944	54.103.944	*Trade payables*
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	69.574.568	69.574.568	*Other payables - third parties*
Uang titipan	15.424.418	15.424.418	9.613.338	9.613.338	*Deposits*
Beban akrual	174.839.605	174.839.605	142.190.584	142.190.584	*Accrued expenses*
Utang dividen	20.051.731	20.051.731	-	-	*Dividend payable*
Liabilitas sewa	39.515.452	39.515.452	7.028.581	7.028.581	*Lease liabilities*
Total	**272.390.376**	**272.390.376**	**282.511.015**	**282.511.015**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset Perusahaan yang terekspos terhadap risiko suku bunga:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. The Directors review and agree policies for managing each of these risks, which are described in more details as follows:

Interest Rate Risks

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at floating interest rates are exposed to cash flows risk.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Company's assets exposed to interest rate risk:

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*			
	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	Total	
31 Desember 2023						***December 31, 2023***
Kas dan setara kas	409.000.607	-	-	-	409.000.607	*Cash and cash equivalents*
31 Desember 2022						***December 31, 2022***
Kas dan setara kas	571.726.884	-	-	-	571.726.884	*Cash and cash equivalents*

Dampak perubahan tingkat suku bunga per tahun deposito berjangka terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The effect of changes in the annual interest rates of time deposits to profit before income tax is as follows:

Variabel	Kenaikan/ (Penurunan) / *Increase/ (Decrease)*	(Penurunan)/Kenaikan Laba Sebelum Pajak Penghasilan / *(Decrease)/Increase in Profit Before Tax*	*Variable*
31 Desember 2023			*December 31, 2023*
Tingkat suku bunga mengambang	50/(50) basis poin/ *basis points*	(Rp1.885.760)/Rp1.885.760	*Floating interest rate*
31 Desember 2022			*December 31, 2022*
Tingkat suku bunga mengambang	50/(50) basis poin/ *basis points*	(Rp2.792.084)/Rp2.792.084	*Floating interest rate*

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perusahaan. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari piutang usaha dalam mata uang $AS.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Company. Exposure of the Company against exchange rate fluctuations is mainly derived from trade receivable denominated in $US.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

***PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)***

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 29. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	Kenaikan (penurunan) nilai tukar mata uang/ *Increases (decreases) on foreign exchange rates*	Dampak/ *Effect*	
Perubahan kurs mata uang asing 2023	(+)100bps	361.229	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2023*
	(-)100bps	(361.229)	
Perubahan kurs mata uang asing 2022	(+)100bps	362.312	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2022*
	(-)100bps	(362.312)	

Pada tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan simulasi yang rasional, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah/menguat sebesar 1%, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, akan lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp361.229, terutama sebagai akibat dari kerugian/keuntungan selisih kurs atas penjabaran kas dan setara kas dalam Dolar AS.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Perusahaan dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Foreign currency risk (continued)

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 29. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follows:

As of December 31, 2023, based on a sensible simulation, had the exchange rate of Rupiah against the US Dollar depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, income before tax for the period ended December 31, 2023 would have been lower/higher Rp361,229, respectively, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents denominated in US Dollar.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counter parties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Company manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Company and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan masih akan diterima dan piutang lain-lain. Dalam hal kas dan setara kas, Perusahaan menempatkannya di bank yang memiliki modal kuat, bereputasi baik, memiliki pangsa pasar luas serta produk dan jasa keuangan yang lengkap sesuai kebutuhan Perusahaan. Sebagian besar piutang usaha adalah kepada perusahaan berelasi sehingga risiko kreditnya dapat dikelola dengan baik.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit Risk (continued)

The Company is exposed to credit risk primarily from cash and cash equivalents, trade receivables, accrued revenues and other receivables. In the case of cash and cash equivalent, the Company places them in banks that have strong capital, good reputation, have broad market share and complete financial products and services according to the Company's needs. Most of the trade receivables are related parties so that credit risk can be managed properly.

Credit risk exposure relating to assets in the statements of financial position is as follow:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Kas dan setara kas	409.000.607	571.726.884	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	42.118.970	122.512.366	*Trade receivables*
Pendapatan masih akan diterima	358.350.823	121.410.292	*Accrued revenues*
Piutang lain-lain	5.640.100	51.330.952	*Other receivables*
Total	**815.110.500**	**866.980.494**	***Total***

Risiko Likuiditas

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima.

Perusahaan secara teratur mengevaluasi informasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasikan kesempatan melakukan penggalangan dana yang mencakup pasar modal.

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan, berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto, yang mencakup beban bunga terkait:

Liquidity Risk

The Company manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiative, including equity market.

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments, which include the related interest charges:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*					
	< 1 tahun/ *< 1 year*	**1 - 2 tahun/ *1 - 2 years***	**2 - 3 tahun/ *2 - 3 years***	**> 3 tahun/ *> 3 years***	**Jumlah/ *Total***	
Utang usaha	22.559.170	-	-	-	22.559.170	*Trade payables*
Uang lain-lain - pihak ketiga	-	-	-	-	-	*Other payables – third parties*
Utang titipan	15.424.418	-	-	-	15.424.418	*Deposits*
Beban akrual	174.839.605	-	-	-	174.839.605	*Accrued expenses*
Utang dividen	20.051.731	-	-	-	20.051.731	*Dividend payable*
Liabilitas Sewa	32.485.372	7.030.080	-	-	39.515.452	*Lease Liabilities*
Total	**265.360.296**	**7.030.080**	**-**	**-**	**272.390.376**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*					
	< 1 tahun/ *< 1 year*	1 - 2 tahun/ *1 - 2 years*	2 - 3 tahun/ *2 - 3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha	54.103.944	-	-	-	54.103.944	*Trade payables*
Uang lain-lain - pihak ketiga	69.574.568	-	-	-	69.574.568	*Other payables – third parties*
Utang titipan	9.613.338	-	-	-	9.613.338	*Deposits*
Beban akrual	142.190.584	-	-	-	142.190.584	*Accrued expenses*
Utang dividen	-	-	-	-	-	*Dividend payable*
Liabilitas Sewa	6.730.639	297.942	-	-	7.028.581	*Lease Liabilities*
Total	**282.213.073**	**297.942**	**-**	**-**	**282.511.015**	***Total***

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company manages its capital to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

30. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang Tbk

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan dan PT Cemindo Gemilang Tbk sepakat membuat dan menandatangani surat Perjanjian Nomor HK-566/31/3/1/MS-22 dan 061/CG-JAI/III/2023 tentang Kerjasama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal serta penyediaan sarana bantu pemanduan melalui mekanisme *revenue sharing* dengan persentase untuk Perusahaan sebesar 100% untuk pemanduan dan 10% untuk penundaan dengan jangka waktu perjanjian dimulai dari 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023.

Pada tanggal 30 Maret 2023, Perusahaan dan PT Cemindo Gemilang Tbk memperpanjang jangka waktu kerjasama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal serta penyediaan sarana bantu pemanduan No. PD.02/30/3/1/KOS/DUT/JAI-23 terhitung sejak 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024.

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Cooperation Agreement for Pilotage and Tug services at the Special Terminal of PT Cemindo Gemilang Tbk

On March 31, 2022, the Company and PT Cemindo Gemilang Tbk agreed and signed an Agreement Letter Number HK-566/31/3/1/MS-22 and 061/CG-JAI/III/2023 regarding Cooperation in Ship Pilotage and Tug Services and the provision of pilotage aids through a revenue sharing mechanism with a percentage for The Company is 100% for pilotage and 10% for tug with the term of the agreement starting from April 1, 2022 to March 31, 2023.

On March 30, 2023, the Company and PT Cemindo Gemilang Tbk extend the term of Cooperation in Ship Pilotage and Tug Services and the provision of pilotage aids No. PD.02/30/3/1/KOS/DUT/JAI-23 effective from April 1, 2023 until March 31, 2024.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian sewa kapal tunda untuk wilayah operasional PT Jawa Satu Power

Pada tanggal 5 Februari 2021, Perusahaan dan PT Jawa Satu Power menandatangani surat perjanjian No. HK-566/05/02/01/MS-21 tentang Sewa Kapal Tunda untuk Wilayah Operasional PT Jawa Satu Power. Total biaya sewa 2 (dua) unit Kapal Tunda dengan sistem *Time Charter* adalah sebesar Rp3.561.360 setiap bulan belum termasuk PPN 10% dengan biaya sewa yang akan dihitung sejak dimulainya jangka waktu sewa.

Harga biaya sewa dengan sistem *On Call* sebesar Rp794.480 untuk setiap kegiatan, akan ditagihkan bersama dengan sewa 2 (dua) unit kapal tunda dengan sistem *Time Charter* periode bulan berikutnya. Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya perjanjian dan berakhir pada 31 Desember 2021. Perjanjian ini telah beberapa kali dilakukan perpanjangan, terakhir pada tanggal 1 Februari 2023 dengan perubahan tarif menjadi Rp3.294.258 untuk sistem *Time* Charter dan Rp734.894 untuk sistem *On Call* serta berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Pada tanggal 1 September 2023, Perusahaan dan PT Pengembang Listrik Nasional Gas & Geothermal dan PT Adhi Guna Putera sebagai penyedia jasa Kapal Tunda untuk wilayah operasional Jawa Satu Power menandatangani perjanjian atas perjanjian Sewa Kapal Tunda Untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power yang dituangkan dalam Perjanjian No. 2963/126/IX/Direksi-2023 dan PD.02/1/9/1/SPB/DUT/JAI-23. Dalam Perjanjian ini, disepakati perubahan atas total biaya sewa 2 (dua) unit Kapal Tunda dengan sistem Time Charter menjadi Rp3.094.258 setiap bulan belum termasuk PPN dan juga atas biaya sewa dengan sistem On Call menjadi sebesar Rp685.000 terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2028 untuk setiap kegiatan. Masa berlaku perjanjian terhitung sejak 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2028.

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Tugboat rental agreement for PT Jawa Satu Power operational area

On February 5, 2021, the Company and PT Jawa Satu Power signed a letter of agreement No. HK-566/05/02/01/MS-21 regarding Tugboat Rental for PT Jawa Satu Power Operational Area. The total cost of renting 2 (two) units of Tugboats with Time Charter system is Rp3,561,360 per month excluding 10% VAT with rental fees that will be calculated from the start of lease term.

The price of rental fees with On Call system is Rp794,480 for each activity and will be billed together with the rental of 2 (two) units of tugboats with the Time Charter system is effective since the signing of agreement and ended on December 31, 2021. The agreement has been amended several times, last amendment on February 1, 2023 with a rate change to Rp3,294,258 for Time Charter system and Rp734,894 for On Call system, valid until June 30, 2023.

On September 1, 2023, the Company and PT Pengembang Listrik Nasional Gas & Geothermal dan PT Adhi Guna Putera as a provider of Tugboat services for the operational area of Jawa Satu Power signed agreement to the Tugboat Rental agreement for the Jawa Satu Power Operational Area as outlined in Agreement No. 2963/126/IX/Direksi-2023 and PD.02/1/9/1/SPB/DUT/JAI-23. In this agreement, it was agreed to change the total cost of renting 2 (two) units of Tugboats with the Time Charter system to Rp3,094,258 every month excluding VAT and also the rental fee using the On Call system to Rp685,000 starting from July 1, 2023 until June 30, 2028 for each activity. The validity period of this agreement starts from July 1, 2023 to June 30, 2028.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Meulaboh, Aceh

Pada tanggal 18 November 2021, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Meulaboh Provinsi Aceh yang tertuang dalam Perjanjian No. HK-566/18/11/1/MS-21. Nilai kerjasama yang disepakati dalam perjanjian ini adalah Perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 80% dan PT Langlang Laju Layang mendapatkan 20% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal.

Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

d. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Pelabuhan Weda (Teluk Weda) Maluku Utara

Pada tanggal 17 November 2022, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Pelabuhan Weda (Teluk Weda) Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Perjanjian No. HK-566/17/11/1/MS-22. Waktu kontrak 18 (delapan belas) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

e. Nota Kesepahaman Tentang Rencana Kerjasama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Cargill Indonesia

Pada tanggal 27 Desember 2021, Perusahaan, PT Pelindo, dan PT Pacrim Nusantara Lestari Foods (Cargill Company) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerjasama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang tertuang dalam perjanjian HK.566/27/12/2/MS-21. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c. Cooperation Agreement for Provision of Guiding Assistance Facilities in the Form of Tugboats for Ship Towing Services in Meulaboh Waters, Aceh

On November 18, 2021, the Company and PT Langlang Laju Layang signed a Cooperation contract for the Provision of Guiding Aids in The Form of Tugboats for Towing Ships in Meulaboh Waters, Aceh Province as stipulated in Agreement No. HK-566/18/11/1/MS-21. The value of the cooperation agreed in this agreement is that the Company gets 80% revenue sharing and PT Langlang Laju Layang gets 20% of gross revenue from ship towing services.

The term of this agreement is for 5 (five) years from the signing of Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

d. Agreement on the Provision of Pilotage Facilities in the Form of Tugboats for Tug Services in the Waters of Weda Harbor (Teluk Weda) North Maluku

On November 17, 2022, the Company and PT Langlang Laju Layang signed a Cooperation to Provide Pilotage Assistance in the Form of Tugboats for Tug Services in the Waters of Weda Port (Teluk Weda) of North Maluku Province as stated in Agreement No. HK-566/17/11/1/MS-22. The contract period is 18 (eighteen) months from the signing of the Minutes of Commencement of Work (BAMK) from the signing of the Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

e. Memorandum of Understanding on Cooperation Plan for Guidance and Delay Services at Terminals for PT Cargill Indonesia's Own Interests

On December 27, 2021, the Company, PT Pelindo, and PT Pacrim Nusantara Lestari Foods (Cargill Company) signed a Memorandum of Understanding regarding the Cooperation Plan for Guiding and Towing Services at Terminals for Their Own Interests as stipulated in the agreement HK.566/27/12/2/MS-21. Costs incurred in connection with the implementation of this Memorandum of Understanding will be borne by each Party in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Nota Kesepahaman Tentang Rencana Kerjasama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Cargill Indonesia (lanjutan)

Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini. Tidak terdapat perpanjangan atas perjanjian ini.

f. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda dan Awak Kapal dengan Sistem *On Call* di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Bukit Asam Tbk

Pada tanggal 20 Oktober 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda dan Awak Kapal dengan Sistem *On Call* di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, yang tertuang dalam perjanjian No. HK-566/20/10/3/MS-22. PT Bukit Asam Tbk melakukan pembayaran Nilai Kerjasama kepada Perusahaan atas kerjasama penyediaan Kapal Tunda dan Awak Kapal dengan Sistem *On Call*. Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Pada Tanggal 13 Oktober 2023, Perusahaan menyepakati perpanjangan atas perjanjian No. HK-566/20/10/3/MS-22 tentang Kerjasama Penyediaan Sarana bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda dan Awak Kapal dengan Sistem *On Call* di Terminal untuk Kepentingan Sendiri PT Bukit Asam Tbk dengan jangka waktu diperpanjang selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya addendum sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025.

g. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Pada Tanggal 27 Februari 2020, Perusahaan dan PT Nusantara Regas sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas di Kepulauan Seribu Provnsi DKI Jakarta. Perjanjian ini menyepakati besaran tarif yang dikenakan terhadap kapal LNG pihak ketiga dan kapal LNG yang dikelola PT Nusantara Regas di Terminal Khusus dengan masa kontrak terhitung dari 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e. Memorandum of Understanding on Cooperation Plan for Guidance and Delay Services at Terminals for PT Cargill Indonesia's Own Interests (continued)

The term of this Memorandum of Understanding is valid for 2 (two) years from the date this Memorandum of Understanding is signed. There are no extention for this agreement.

f. Cooperation Agreement on Provision of Guiding Aid Facilities in the Form of Tugboats and Crews with On Call Systems at Terminals for PT Bukit Asam Tbk's Own Interests

On October 20, 2022, the Company signed a Cooperation Agreement for the Provision of Guidance Assistance in the Form of Tugboats and Crews with an On Call System at the Terminal for Their Own Interests, as stated in agreement No. HK-566/20/10/3/MS-22. PT Bukit Asam Tbk pays Cooperation Value to the Company for the cooperation in providing Tugs and Crew with On Call System. The term of this agreement is 1 (one) year from the date of signing of this Agreement.

On October 13, 2023, the Company agreed to extension an agreement No. HK-566/20/10/3/MS-22 regarding the Cooperation of Providing Pilotage Assistance Facilities in the form of Tugboats and Crew with an On Call system at the Private Port of PT Bukit Asam Tbk with the term was extended for 2 (two) years from the date this addendum until October 19, 2025.

g. Ship service cooperation agreement at the Special Terminal of PT Nusantara Regas in Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

On February 27, 2020, the Company and PT Nusantara Regas agreed to sign a Ship Service Cooperaition Agreement at PT Nusantara Regas Special Terminal in Kepualauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. This agreement agrees on the rate imposed on third party LNG vessels and LNG vessels managed by PT Nusantara Regas at the PT Nusantara Regas Special Terminal with a contract period starting from March 1, 2020 to December 31, 2022.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta (lanjutan)

Pada tanggal 18 April 2023, Perusahaan dan PT Nusantara Regas sepakat untuk menandatangani Amandemen atas Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Perjanjian ini menyepakati perubahan besaran tarif kapal LNG, pihak ketiga dan kapal LNG yang dikelola PT Nusantara Regas di Tersus Nusantara Regas dan mengubah hak kedua belah pihak serta memperpanjang jangka waktu dan pengakhiran perjanjian sampai dengan 31 Maret 2024.

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h. Ship service cooperation agreement at the Special Terminal of PT Nusantara Regas in Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta (continued)

On April 18, 2023, the Company and PT Nusantara Regas agreed to sign an Amendment to the Service Agreement for Ships at PT Nusantara Regas Special Port in Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. This agreement agreed on changes of the tariff for third party LNG vessels and LNG vessels managed by PT Nusantara Regas in Tersus Nusantara Regas and to change the rights of both parties as well as extend the term and termination of the agreement until March 31, 2024.

31. INFORMASI SEGMEN

Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa pelayanan kapal, pengangkutan dan pengelolaan kapal (Catatan 20).

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut:

31. SEGMENT INFORMATION

The Company operates and manages business in a single segment which provides vessel, freight and fleet management services (Note 20).

Information concerning the Company geographical segment are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pendapatan			***Revenue***
Jasa kapal - Pelabuhan umum			***Vessel service - Public port***
Tanjung Priok	317.494.199	348.974.900	*Tanjung Priok*
Banten	56.569.485	32.505.423	*Banten*
Panjang	53.881.743	47.093.269	*Panjang*
Palembang	41.618.094	16.453.793	*Palembang*
Teluk Bayur	29.366.885	33.025.608	*Teluk Bayur*
Pontianak	10.859.143	11.994.261	*Pontianak*
Bengkulu	7.070.764	6.881.852	*Bengkulu*
Cirebon	4.667.719	3.648.844	*Cirebon*
Pangkal Balam	3.962.634	3.352.336	*Pangkal Balam*
Sub-total	525.490.666	503.930.286	*Sub-total*
Jasa kapal - Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)			***Vessel service - Private port***
Palembang	95.296.035	107.644.756	*Palembang*
Banten	60.617.206	51.903.294	*Banten*
Pontianak	14.001.027	6.910.295	*Pontianak*
Teluk Bayur	12.537.062	259.240	*Teluk Bayur*
Panjang	7.807.483	3.708.963	*Panjang*
Pangkal Balam	878.025	672.166	*Pangkal Balam*
Bengkulu	386.732	150.352	*Bengkulu*
Kanci	108.014	-	*Kanci*
Sub-total	191.631.584	171.249.066	*Sub-total*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

31. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company geographical segment are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Jasa kapal - Terminal khusus			***Vessel service - Special port***
Palembang	112.373.749	103.223.072	*Palembang*
Cirebon	79.857.501	49.000.061	*Cirebon*
Maluku Utara	72.541.192	-	*North Maluku*
Tanjung Priok	36.760.943	20.039.557	*Tanjung Priok*
Banten	21.024.997	20.134.648	*Banten*
Meulaboh	13.661.811	-	*Meulaboh*
Kepulauan Batam & Nipa	5.143.468	-	*Batam & Nipa*
Jambi	1.295.464	5.198.567	*Jambi*
Panjang	980.478	2.349.180	*Panjang*
Sub-total	343.639.603	199.945.085	*Sub-total*
Jasa pengelolaan kapal			***Fleet management services***
Tanjung Priok	9.800.000	17.400.000	*Tanjung Priok*
Pontianak	5.040.000	8.640.000	*Pontianak*
Panjang	4.830.000	8.010.000	*Panjang*
Palembang	4.830.000	7.950.000	*Palembang*
Teluk Bayur	2.660.000	4.560.000	*Teluk Bayur*
Cirebon	980.000	1.680.000	*Cirebon*
Bengkulu	840.000	1.440.000	*Bengkulu*
Jambi	840.000	1.440.000	*Jambi*
Pangkal Balam	840.000	1.440.000	*Pangkal Balam*
Tanjung Pandan	840.000	1.440.000	*Tanjung Pandan*
Sub-total	31.500.000	54.000.000	*Sub-total*
Jasa pengangkutan dan lainnya			***Freight and other services***
Cirebon	46.275.622	50.902.288	*Cirebon*
Banten	-	141.750	*Banten*
Sub-total	46.275.622	51.044.038	*Sub-total*
Total	**1.138.537.475**	**980.168.475**	***Total***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Tanjung Priok	304.423.631	322.484.280	*Tanjung Priok*
Panjang	58.992.741	65.762.579	*Panjang*
Banten	59.849.588	63.848.276	*Banten*
Palembang	14.131.954	7.035.359	*Palembang*
Lain-lain	195.102.340	109.845.968	*Others*
Total	**632.500.254**	**568.976.462**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Aset tidak lancar - lain-lain terutama merupakan aset tetap - neto, aset hak - guna - neto aset pajak tangguhan - neto dan taksiran tagihan restitusi pajak.

31. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company geographical segment are as follows: (continued)

Non-current assets - others represent fixed assets, net, right of use asset, net, deferred tax assets - net and estimated claims for tax refund.

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/*Year ended December 31, 2023*				
	Jasa Kapal/ *Vessel Service*	**Jasa pengangkutan dan lainnya/ *Freight and Other services***	**Jasa pengelolaan kapal/ *Fleet management services***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen	1.060.761.853	46.275.622	31.500.000	1.138.537.475	*Segment operating revenues*
Beban pokok pendapatan segmen	(744.197.045)	(32.465.516)	(22.099.406)	(798.761.967)	*Segment cost of revenues*
Laba bruto				**339.775.508**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi				(165.468.611)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya				10.181.184	*Other operating income*
Beban operasi lainnya				(729.210)	*Other operating expenses*
Laba usaha				**183.758.871**	***Income from operation***
Pendapatan keuangan				14.958.550	*Finance income*
Beban keuangan				(2.773.465)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan badan				**195.943.956**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan					***Corporate income tax***
Kini				(38.604.820)	*Current*
Tangguhan				322.852	*Deferred*
Laba tahun berjalan				**157.661.988**	***Income for the year***
Penghasilan komprehensif lain				-	*Other comprehensive income*
Total laba komprehensif tahun berjalan				**157.661.988**	***Total comprehensive income for the year***
Aset dan liabilitas					*Assets and liabilities*
Aset segmen	654.295.298			654.295.298	*Segment assets*
Aset yang tidak dapat dialokasikan				867.839.350	*Unallocated assets*
Total aset				**1.522.134.648**	***Total assets***
Liabilitas segmen	236.914.228			236.914.228	*Segment liabilities*
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				44.700.680	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas				**281.614.908**	***Total liabilities***
Informasi lainnya					*Other information*
Penyusutan segmen	67.014.610			67.014.610	*Segment depreciation*
Penyusutan segmen yang tidak dapat dialokasikan				10.691.766	*Unallocated segment depreciation*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

31. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company geographical segment are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/*Year ended December 31, 2022*				
	Jasa Kapal/ *Vessel Service*	**Jasa pengangkutan dan lainnya/ *Freight and Other services***	**Jasa pengelolaan kapal/ *Fleet management services***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen	875.124.437	51.044.038	54.000.000	980.168.475	*Segment operating revenues*
Beban pokok pendapatan segmen	(596.307.086)	(33.881.084)	(47.433.519)	(677.621.689)	*Segment cost of revenues*
Laba bruto				**302.546.786**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi				(117.607.997)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya				749.076	*Other operating income*
Beban operasi lainnya				(11.673.442)	*Other operating expenses*
Laba usaha				**174.014.423**	***Income from operation***
Pendapatan keuangan				14.141.732	*Finance income*
Beban keuangan				(2.117.196)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan badan				**186.038.959**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan					***Corporate income tax***
Kini				(34.239.833)	*Current*
Tangguhan				(1.144.277)	*Deferred*
Laba tahun berjalan				**150.654.849**	***Income for the year***
Penghasilan komprehensif lain				-	*Other comprehensive income*
Total laba komprehensif tahun berjalan				**150.654.849**	***Total comprehensive income for the year***
Aset dan liabilitas					*Assets and liabilities*
Aset segmen	652.788.251		4.500.000	657.288.251	*Segment assets*
Aset yang tidak dapat dialokasikan				830.919.815	*Unallocated assets*
Total aset				**1.488.208.066**	***Total assets***
Liabilitas segmen	183.963.751		25.085.966	209.049.717	*Segment liabilities*
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				82.638.943	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas				**291.688.660**	***Total liabilities***
Informasi lainnya					***Other information***
Penyusutan segmen	77.087.949			77.087.949	*Segment depreciation*
Penyusutan segmen yang tidak dapat dialokasikan				5.381.861	*Unallocated segment depreciation*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas Perusahaan adalah sebagai berikut:

32. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Significant activities which did not affect the Company's cash flows are as follows:

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	68.305.635	24.623.631	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*
Penambahan aset tetap melalui beban akrual	4.308.829	-	*Addition of fixed assets through accrued expenses*
Penambahan aset tetap melalui utang lain-lain - pihak ketiga	-	69.574.568	*Addition of fixed assets through other payables - third parties*

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Pengakuan bunga/ *Interest recognition***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Liabilitas sewa	7.028.581	(38.535.789)	2.717.025	68.305.635	39.515.452	*Lease liabilities*

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2022/ *January 1, 2022*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Pengakuan bunga/ *Interest recognition***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Liabilitas sewa	32.848.942	(52.038.573)	1.594.581	24.623.631	7.028.581	*Lease liabilities*

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor: 91202075920050001 telah menerbitkan izin usaha sebagai Pelaku Usaha tanggal 5 Februari 2024 kepada Perusahaan sehingga Perusahaan dapat melakukan aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, meliputi:

- Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan stadar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- Memelihara kelestarian lingkungan;
- Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional .

33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

The Head of the Investment Coordinating Board, through Risk-Based Business Licensing Standard Certificate Number: 91202075920050001, has issued a business permit to the Company as a Business Operator dated February 5, 2024 enabling the Company to carry out seaport service activities, which include:

- *Providing and maintaining the suitability of port facilities;*
- *Providing service to port service users in accordance with the service standards set by the government;*
- *Maintaining the security, safety, and orderliness of the operated port facilities;*
- *Contributing to the maintenance of safety, security, and orderliness concerning transportation in waters;*
- *Preserving the environment;*
- *Fulfilling obligations in accordance with the concession in the agreement; and*
- *Complying with the provisions of laws and regulations, both nationally and internationally.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan untuk lebih dari 1 (satu) terminal. Izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan ini berlaku selama waktu yang tidak ditentukan.

33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

The Company as a Port Operation Entity may engage activities for more than 1 (one) terminal. The business license as a Port Operation Entity is valid for indefinite time.

34. HAL LAINNYA

COVID-19

Operasi Perusahaan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia meliputi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak pandemi ini terhadap Perusahaan belum memberikan pengaruh signifikan. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari pandemi ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Perusahaan di periode-periode berikutnya.

Kondisi peperangan di Ukraina

Invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan tantangan yang luas. Mengingat situasi yang sedang berkembang, ada banyak faktor dan peristiwa yang belum atau tidak dapat diketahui yang dapat berdampak material terhadap operasi Perusahaan. Peristiwa terkait kondisi peperangan di Ukraina ini telah dan terus berdampak pada harga komoditas, rantai pasokan, risiko kredit termasuk yang terkait dengan piutang, perdagangan komoditas, perbendaharaan, dan faktor lainnya. Salah satu dari faktor-faktor ini, secara individu atau agregat, dapat berdampak material terhadap pendapatan, arus kas, dan kondisi keuangan Perusahaan.

Perusahaan telah dan mungkin terus menilai dampak yang disebabkan oleh kondisi peperangan di Ukraina terhadap operasi Perusahaan. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari peperangan ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Perusahaan di periode-periode berikutnya.

34. OTHER MATTERS

COVID-19

The Company's operation has and may continue to be impacted by the outbreak of COVID-19 pandemic. The effects of COVID-19 pandemic to the global and Indonesian economy include lower economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. The effects of the pandemic to The Company is not significant. Further significant impact of the pandemic, if any, will be reflected in the The Company's financial reporting in the subsequent periods.

The war in Ukraine

Russia's recent invasion of Ukraine poses wide-ranging challenges. Given the evolving situation, there are many unknown factors and events that could materially impact to the Company operations. These events related to the war in Ukraine have and continue to impact commodity prices, our supply chain, credit risks including those related to receivables, commodity trading, treasury and other factors. Any of these factors, individually or in aggregate, could have a material effect on the The Company's earnings, cash flows and financial condition.

The Company has and may continue to assess the impact of the war in Ukraine to the Company's operations. Further significant impact of the war, if any, will be reflected in the Company's financial reporting in the subsequent periods

REFERENSI SILANG SEOJK NO. 16 /SEOJK.04/2021: BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

CROSS-REFERENCE NO. 16/SEOJK.04/2021: FORMAT AND COMPLETING THE ANNUAL REPORT OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan Description	Halaman Page
Ketentuan Umum General Terms	
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	✓
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	✓
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	✓
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	✓
e. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	✓
f. Direksi: Board of Directors:	✓
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	✓
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓

Keterangan Description	Halaman Page
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. 2) for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	✓
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	✓
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. 2) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. .	✓
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	✓
Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	✓
Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	✓
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	✓
Bentuk Laporan Report Format	
Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	✓
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	✓
Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	✓

Keterangan Description	Halaman Page
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam *Portable Document Format* (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	✓
Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
a. ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	14-16
b. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	17
c. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	34-39
d. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	28-33
e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	42-108
f. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	110-184
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	186-361
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	362-365
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	366-458
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	40-41
Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	14-16
» pendapatan/penjualan; income/sales;	14
» laba bruto; gross profit;	14
» laba (rugi); profit (loss);	14
» jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	14
» total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	14
» jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	14
» laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	14
» jumlah aset; total assets;	14

Keterangan Description	Halaman Page
» jumlah liabilitas; total liabilities;	14
» jumlah ekuitas; total equity;	14
» rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	15
» rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	15
» rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	15
» rasio lancar; current ratio;	15
» rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	15
» rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	15
» informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	15
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	17
» saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	
c. jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	
d. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	
e. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	
f. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	18
dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	18
a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	18
b. rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	
c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	
d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	
e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	

Keterangan Description	Halaman Page
dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	18
dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	
Laporan Direksi Board of Directors' Report	34-39
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
a. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	
» strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	35-36
» peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	36-37
» proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	37
» perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	37
» kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	37
b. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	37-38
c. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	38
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	28-33
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
a. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	30-31
b. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	31
c. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	31-32
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	42-108
a. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	44, 50

Keterangan Description	Halaman Page
b. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	45-46
» alamat; address;	
» nomor telepon; telephone number;	
» alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	
» alamat situs web; website address;	
c. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	47-50
d. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	60-64
e. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	54-56
f. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	58-59
g. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	68-69
h. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	67

Keterangan Description	Halaman Page
i. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	
» nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	
» foto terbaru; recent photograph;	
» usia; age;	
» kewarganegaraan; nationality;	
» riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
j. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	
k. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	75-78
l. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
» hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	
» perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	

Keterangan Description	Halaman Page
a. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	
» nama dan jabatan; name and position;	
» foto terbaru; recent photograph;	
» usia; age;	
» kewarganegaraan; nationality;	
» riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
b. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	
c. dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	71-73
d. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	
e. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
» hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	
» pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	224
» perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	70
dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	74 ,70
jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	90-92
nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	93

Keterangan Description	Halaman Page
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	94
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	96-97
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	93
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	✓
persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	96-97
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	96-97
jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	94-95
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	94-95
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	
informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	100
nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	100
kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	102
informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	103

Keterangan Description	Halaman Page
informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 20) information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/ associations/alliances include:	103
a. nama dan alamat; name and address;	100
b. periode penugasan; assignment period;	
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	
d. biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/aliances can be presented in tabular form.	✓
nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	103-104
Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion	110-161
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	
tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	112
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	118
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	119
c. profitabilitas; profitability;	119
kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	129
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	129
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	134
c. ekuitas; equity;	136
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	136-137
e. arus kas; cash flows;	139-140
kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	140-142
tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	142-143

Keterangan Description	Halaman Page
struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	143-144
bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	144-145
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	145
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	
bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	144-145
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	145
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	
informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	145-146
prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	157-158
perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	145-146
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	146
b. laba (rugi); profit (loss);	146
c. struktur modal (*capital structure*); atau capital structure; or	145-146
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	146
target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: 11) targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	147-148
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	147
b. laba (rugi); profit (loss);	147
c. struktur modal (*capital structure*); capital structure;	147-148
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	148-149
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	147

Keterangan Description	Halaman Page
aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	116-117
uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	148-149
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	148
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	149
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	149
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	149
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	✓
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: 14) realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	150
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	152
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	
b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	155
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	157
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	157
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	154
pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); dan (1) a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	

Keterangan Description	Halaman Page
peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); (2) the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	✓
untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; g) for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	154
untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; h) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	
dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	158-159
perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	160
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	186-361
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
a. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	208-224
» Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	208-224
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (1) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	✓
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; (2) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	✓
b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	223 ;221 ;215 ;209

Keterangan Description	Halaman Page
Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	236-242
Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; a. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	238-290
b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	238
c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	258-261
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	241
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	✓
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	✓
e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	242
» prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	
f. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	242
Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	224-234
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	228-231
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	225
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	254-258
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	✓
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	232

Keterangan Description	Halaman Page
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	✓
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	✓
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	248-253
» prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	✓
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	✓
» pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and	✓
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	234
» prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	234
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	234
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: 4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	234 ;223
a. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	236 ;224
b. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	253-254
» prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	✓
» struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	✓
» besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	✓
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	N/A

Keterangan Description	Halaman Page
a. nama; name;	N/A
b. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	N/A
c. periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	N/A
d. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	N/A
e. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	N/A
Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:	265-271
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	75 ;267-268
b. usia; age;	
c. kewarganegaraan; nationality;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	✓
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	✓
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓
f. periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	266-267
g. pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	268-269
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	270-271
i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	270
j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	271

Keterangan Description	Halaman Page
komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: 7) the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	271-274
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	
b. usia; age;	
c. kewarganegaraan; nationality;	73 ;272-273
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	✓
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	✓
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	272
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	273
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	232
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	273-274
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*); a statement that it has a guideline or charter;	271
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	274
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	273
m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	N/A
» alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	
» pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;	
komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	274-277
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	
b. usia; age;	
c. riwayat pendidikan; educational history;	72 ;275-276
d. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	

Keterangan Description	Halaman Page
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	✓
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	✓
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓
e. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	275
f. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	276
g. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	277
h. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	276-277
i. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	274-275
j. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	277
k. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	276-277
Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	278-281
a. nama; name;	279
b. domisili; domicile;	
c. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
» dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as company secretary; and	✓
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓
d. riwayat pendidikan; educational history;	279
e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	278
f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	280
Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	281-286
a. nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	281-286
b. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
» dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	✓
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	284

Keterangan Description	Halaman Page
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	285
e. struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	284
f. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	283-284
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	282
h. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	285-286
uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	290-291
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	290
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	290-291
c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	290
sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	292-298
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	292-293
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	296
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	297
d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	297-298
perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	299
a. pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	
informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); 14) information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	299
informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: 15) information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	306-311
a. pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	306
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	310-311
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	309

Keterangan Description	Halaman Page
uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); 16) a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	300
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	
a. jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	300
b. jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	
uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	300
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan a) share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	300
b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	300
uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	320-322
a. cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	320-321
b. perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	322
c. penanganan pengaduan; complaint handling;	
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	
» jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	
» tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints;	
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.	
uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	312-316
a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	315-317 ;314
b. pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	314-315

Keterangan Description	Halaman Page
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	
penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	199-205
a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	
b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).	199-205
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	362-365
Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:	✓
a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;	✓
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	✓
c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;	✓
d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;	✓
e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;	✓
f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance;	✓
g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any;	✓
h. lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and	✓
tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	✓
Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	✓
informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:	✓
a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or	✓

Keterangan Description	Halaman Page
b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	✓
Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	✓
Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	✓
a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and	✓
b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	✓
Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	✓
Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.	✓
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	366-458
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	✓

Keterangan Description	Halaman Page
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	40-41


PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

2023 Annual Report
Laporan Tahunan

Accelerating Trade Through Marine Collaboration

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

www.ipcmarine.co.id

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

Gedung Rukindo
Jl. Raya Ancol Baru
Ancol Timur, Jakarta 14430
Telp : +62 21 4306789
Email : corsec@ipcmarine.co.id